SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, gambaran daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

b. bahwa dalam memberikan pedoman bagi seluruh komponen daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 30);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2022-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);

11. Peraturuan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan dan kondisi Daerah yang diinginkan dan terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
13. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD.
15. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya Tujuan.
16. Kinerja adalah capaian hasil kerja yang meliputi keluaran, hasil, dan dampak.
17. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
18. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang diperoleh dengan teknis penurunan Kinerja.

BAB II
RPJMD TAHUN 2025-2029
Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJPD untuk periode 5 (lima) tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD.
(3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
a. BAB I : pendahuluan
b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah
c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.
(2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029; dan
c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kebijakan perumusan Visi dan Misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(4) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup Daerah RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam upaya mewujudkan Visi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

(1) Semua ketetapan target dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi capaian dan perkembangan peraturan perundang-undangan pada tahun berkenaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan target dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan.
(3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pada tahun berkenaan.
(4) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang dapat disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENTUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (11/126/2025)

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DESY ARYANTI, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19770923 201001 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan Pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahaanya diwajibkan menyusun perencanaan Pembangunan.

Perencanan Pembangunan Daerah sebagimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMD provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daeah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan komitmen Kinerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode.

Penetapan sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan hasil prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam RKPD.

Ruang lingkup yang diatur dalam RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekomomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 121

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun 2025

BANDUNG LEBIH BEDAS!

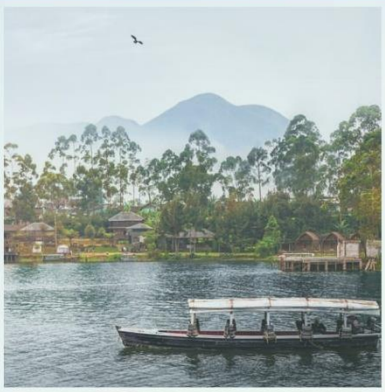

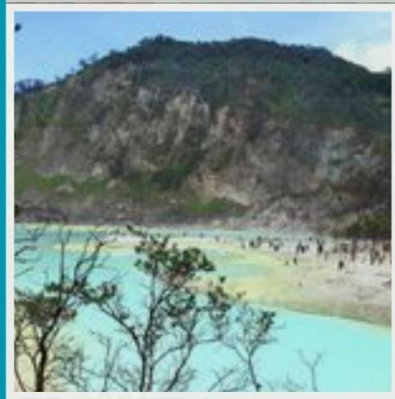
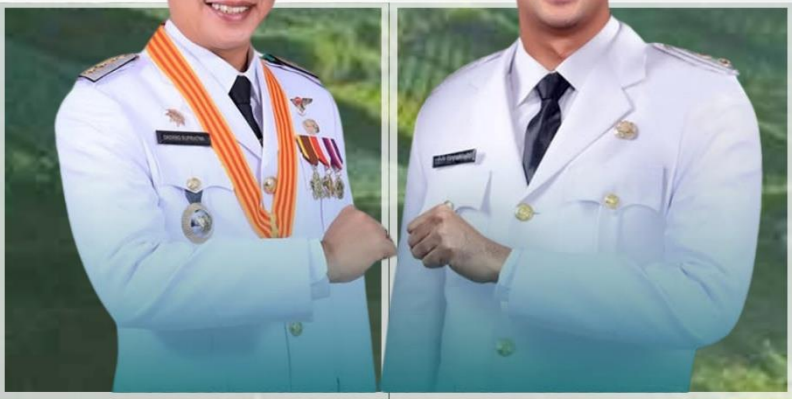

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kabupaten Bandung
Tahun 2025-2029

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji bagi Allah SWT, yang atas izin dan ridho-Nya, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 akhirnya dapat diselesaikan. Proses ini dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung dengan dukungan Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Bandung.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung 2025 – 2029 mengacu pada peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dokumen ini telah disusun sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Secara keseluruhan, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 berjalan dengan lancar. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, masyarakat, dan akademisi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMD ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten Bandung ke depan.

Soreang, September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1-1**
1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen 1-4
1.4. Maksud dan Tujuan 1-6
1.4.1 Maksud 1-6
1.4.2 Tujuan 1-6
1.5. Sistematika Penulisan 1-7

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH **2-1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 2-1
2.1.1.1 Topografi 2-4
2.1.1.2 Kelerengan 2-5
2.1.1.3 Klimatologi 2-6
2.1.1.4 Hidrogeologi 2-7
2.1.1.5 Penggunaan Lahan 2-10
2.1.1.6 Geologi 2-12
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 2-12
2.1.2.1 Potensi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan 2-12
2.1.2.2 Potensi Sektor Wisata 2-27
2.1.2.3 Potensi Sektor Panas Bumi 2-30
2.1.2.4 Potensi Sektor Industri 2-31
2.1.3 Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup 2-33
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 2-50
2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan 2-50
2.1.4.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2-51
2.1.4.3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 2-52
2.1.4.4 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan 2-52

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas..... 2-53
2.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2-53
2.1.5.2 Ruang Terbuka Taman dan TPU 2-55
2.1.5.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak..... 2-56
2.1.5.4 Pengelolaan Sampah 2-58
2.1.5.5 Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman..... 2-79
2.1.5.6 Persentase Rumah Layak Huni 2-88
2.1.6 Karakteristik Transportasi 2-89
2.1.6.1 Pola Jaringan Jalan..... 2-89
2.1.6.2 Angkutan Umum 2-91
2.1.6.3 Fasilitas Perlengkapan Jalan 2-97
2.1.6.4Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Pengembangan BRT Cekungan Bandung..... 2-102
2.1.6.5 Kinerja Tingkat Konektivitas Layanan Angkutan Umum. 2-103
2.1.7 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim..... 2-106
2.1.7.1 Penurunan Emisi GRK..... 2-106
2.1.7.2 Indeks Risiko Bencana.....2-112
2.1.7.3 Indeks Ketahanan Daerah.....2-114
2.1.8 Demografi..... 2-120
2.1.8.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk..... 2-120
2.1.8.2 Komposisi Penduduk 2-122
2.1.8.3 Kepadatan Penduduk..... 2-123
2.1.8.4 Keberadaan Masyarakat Adat dan Kebudayaan Lokal 2-124
2.1.8.5 Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 Tahun Mendatang 2-128
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 2-129
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi..... 2-129
2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2-129
2.2.1.2 PDRB Per Kapita 2-137
2.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka..... 2-138
2.2.1.4 Indeks Gini..... 2-142
2.2.1.5 Tingkat Kemiskinan 2-144
2.2.1.6 Garis Kemiskinan..... 2-145
2.2.1.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan..... 2-146
2.2.1.8 Indeks Keparahan Kemiskinan..... 2-147
2.2.1.9 Indeks Pembangunan Manusia..... 2-148
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua..... 2-149
2.2.2.1 Usia Harapan Hidup..... 2-149

2.2.2.2 Indeks Kesehatan 2-150
2.2.2.3 Prevalensi Stunting..... 2-150
2.2.2.4 ATM (AIDS, Tuberkulosis dan Malaria)..... 2-152
2.2.2.5 Kondisi Layanan Kesehatan..... 2-155
2.2.2.6 Rasio Ketersediaan Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk..... 2-157
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata..... 2-159
2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah..... 2-160
2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah 2-161
2.2.3.3 Kapasitas Ruang Kelas 2-162
2.2.3.4 Keterjangkauan Akses Pendidikan..... 2-163
2.2.3.5 Angka Literasi/Numerasi 2-164
2.2.3.6 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat..... 2-167
2.2.3.7 Indeks Literasi Digital..... 2-168
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif..... 2-169
2.2.4.1 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan..... 2-169
2.2.4.2 Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender..... 2-170
2.2.4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan..... 2-173
2.3 Aspek Daya Saing Daerah 2-174
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia..... 2-174
2.3.1.1 Karakteristik Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir 2-174
2.3.1.2 Struktur Tenaga Kerja 2-175
2.3.1.3 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2-176
2.3.1.4 Tingkat Ketergantungan..... 2-178
2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi 2-178
2.3.2.1 Rasio PDRB Industri pengolahan 2-179
2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum 2-180
2.3.2.3 Ekonomi Kreatif..... 2-181
2.3.2.4 Usaha Mikro Kuliner..... 2-182
2.3.2.5 Volume Usaha Koperasi 2-183
2.3.2.6 Rasio Kewirausahaan 2-184
2.3.2.7 Jenis Usaha Mikro Unggulan 2-186
2.3.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja..... 2-187
2.3.2.9 ICOR (Incremental Capital Output Ratio) 2-187
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru..... 2-188
2.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau dan Biru..... 2-188

2.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 2-191
2.3.4.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto..... 2-191
2.3.4.2 Ekspor Barang dan Jasa 2-192
2.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi ... 2-193
2.3.5.1 Indeks Pengembangan Wilayah 2-199
2.3.5.2 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur..... 2-202
2.3.5.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak..... 2-203
2.3.5.4 Persentase Desa Mandiri 2-203
2.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro 2-204
2.3.6.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 2-204
2.3.6.2 Laju Inflasi 2-205
2.4 Aspek Pelayanan Umum..... 2-206
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... 2-206
2.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi..... 2-206
2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik..... 2-207
2.4.1.3 Indeks Reformasi Hukum 2-209
2.4.2 Hukum berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 2-209
2.4.2.1 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum..... 2-209
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 2-210
2.4.3.1 Capaian Indeks Daya Saing Tahun 2023-2024 2-210
2.5 Evaluasi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026..... 2-212
2.6 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... 2-225
2.6.1 Capaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2024 2-227
2.6.2 Rekomendasi dalam Pencapaian SPM di Kabupaten Bandung 2-230
2.7 Capaian Indikator TPB/SDG's Kabupaten Bandung..... 2-232
2.8 Bandan Usaha Milik Daerah..... 2-239
2.9 Gambaran Keuangan 2-242
2.9.1 Realisasai APBD Tahun Anggaran Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun anggaran 2025-2029 2-242
2.9.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD..... 2-242
2.9.2 Neraca Daerah 2-246
2.9.3 Alternatif Pendanaan Pembangunan..... 2-248
2.9.3.1 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur..... 2-248
2.9.3.2Ekonomi Syariah..... 2-249
2.9.3.3 Kerjasama Pengelolaan Pasar Ikan Modern Soreang..... 2-251

2.10 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis 2-252
2.10.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 2-252
2.10.1.1 Aspek Geografis dan Demografi 2-257
2.10.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-258
2.10.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 2-258
2.10.1.4 Aspek Pelayanan Umum 2-259
2.10.2 Isu Strategis Daerah 2-264
2.10.2.1 Isu Global 2-264
2.10.2.2 Isu Nasional 2-270
2.10.2.3 Isu Regional 2-272
2.10.3 Perumusan Isu Strategis 2-287

BAB 3 VISI MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 3-1
3.1 Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 3-1
3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 3-9
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1 3-11
3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2 3-14
3.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 3 3-17
3.2.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4 3-19
3.2.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 5 3-22
3.3 Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah . 3-28
3.3.1 Tema Pembangunan Daerah 3-28
3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 3-32
3.3.3 Strategi Pembangunan Daerah 3-54
3.3.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah 3-64
3.4 Perencanaan Tematik Kabupaten Bandung 3-99
3.4.1 Peningkatan Ketahanan Pangan 3-101
3.4.2 Kawasan Ekonomi Terpadu 3-105
3.4.2.1 Sub-Tematik Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Usaha Mikro Terpadu 3-109
3.4.2.2 Kebijakan Pembangunan Pariwisata Hijau di Kabupaten Bandung 3-111
3.4.3 Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung 3-113
3.4.4 SDM Bedas 3-117
3.4.4.1 Kesehatan Masyarakat – Tematik Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting 3-118
3.4.4.2. Kesehatan Masyarakat – Pencegahan dan Pengendalian AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM) 3-119

3.4.4.3 Kesejahteraan Sosial – Tematik Penanganan Kemiskinan 3-120

3.4.4.4 Inklusi Pembelajaran – Jalur Pendidikan Non-Formal 3-120

3.4.5 Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas 3-121

BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4-1

4.1 Program Perangkat Daerah 4-1

4.1.1 Indikator program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 4-1

4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintah 4-69

4.2.1Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 4-69

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 4-70

4.2.2.1 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 4-70

4.2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 4-78

BAB 5 PENUTUP 5-1

5.1 Pedoman Transisi 5-1

5.2 Kaidah Pelaksanaan 5-1

5.3 Penutup 5-2

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Kecamatan di Kabupaten Bandung 2-1
Tabel 2.2. Luas Topografi di Kabupaten Bandung 2-4
Tabel 2.3. Luas Kemiringan Lereng Kabupaten Bandung 2-6
Tabel 2.4. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Bandung 2-7
Tabel 2.5. Luas Hidrogeologi (Tingkat Keterusan) Kabupaten Bandung 2-8
Tabel 2.6. Luas Hidrogeologi (Produktivitas Akuifer) Kabupaten Bandung ... 2-9
Tabel 2.7. Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Tahun 2019* 2-10
Tabel 2.8. Luas Lahan Pertanian (Ha) Kabupaten Bandung per Kecamatan Tahun 2024 2-13
Tabel 2.9.Perkembangan Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Unggulan Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2024..... 2-17
Tabel 2.10. Lima Kecamatan Sentra Produksi Padi Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024 2-20
Tabel 2.11. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Komoditas Palawija Utama Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2024 2-20
Tabel 2.12. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Komoditas Sayuran Utama Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2024..... 2-22
Tabel 2.13. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Komoditas Buah-buahan Utama Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2024... 2-23
Tabel 2.14. Performa Tiga Komoditas Sub Sektor Perkebunan 2-25
Tabel 2.15. Kontribusi Populasi Sapi Perah (ekor) dan Produksi susu sapi (ton) Tahun 2024 2-26
Tabel 2.16. Data populasi Peternakan Unggulan dan Pusat Produksi Kabupaten Bandung Tahun 2024..... 2-26
Tabel 2.17. Produksi Perikanan di Kabupaten Bandung 2-26
Tabel 2.18. Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024..... 2-29
Tabel 2.19. Potensi Panas Bumi di Kabupaten Bandung..... 2-31
Tabel 2.20. Analisis Potensi Industri Pengolahan Berdasarkan Kecamatan dan Skala Usaha 2-33
Tabel 2.21. Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih, dan Luas Wilayah yang Belum Melampaui Daya Dukung Penyedia Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2022..... 2-34
Tabel 2.22.Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana di Kabupaten Bandung..... 2-41
Tabel 2.23.Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air dan Limbah pada Penutup Lahan di Kabupaten Bandung..... 2-43
Tabel 2.24.Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara pada Penutup Lahan di Kabupaten Bandung..... 2-45

Tabel 2.25.Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir di Kabupaten Bandung 2-47
Tabel 2.26.Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Bandung..... 2-49
Tabel 2.27. Perolehan Rincian Komponen Indeks Ketahanan Pangan (IKP). 2-50
Tabel 2.28. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan..... 2-52
Tabel 2.29.Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan di Kabupaten Bandung..... 2-53
Tabel 2.30. Komponen Pembentuk IKLH 2-53
Tabel 2.31. Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Tertata 2-55
Tabel 2.32. Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2024 2-56
Tabel 2.33. Lokasi Prioritas Penanganan SPALD Kabupaten Bandung..... 2-57
Tabel 2.34. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen) Kabupaten Bandung 2-58
Tabel 2.35. Sumber Sampah di Kabupaten Bandung 2-59
Tabel 2.36. Timbulan Sampah Berdasarkan Sumber di Kabupaten Bandung 2-59
Tabel 2.37. Perkembangan Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung..... 2-60
Tabel 2.38. Perkembangan Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung..... 2-61
Tabel 2.39. Wilayah Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung 2-62
Tabel 2.40. Rincian Wilayah Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung..... 2-63
Tabel 2.41. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung 2-65
Tabel 2.42.Jumlah Bank Sampah dalam Kondisi Aktif dan Non Aktif Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bandung 2-66
Tabel 2.43.Jumlah TPST dalam Kondisi Aktif dan Non Aktif Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bandung 2-69
Tabel 2.44. Armada Pengangkutan Sampah Kabupaten Bandung 2-70
Tabel 2.45. Indikator Kinerja terkait Persampahan 2-72
Tabel 2.46. APBD Pengelolaan Sampah Tahun 2021-2024 2-74
Tabel 2.47. Kegiatan Pengurangan dan Penanganan..... 2-76
Tabel 2.48.Luas Permukiman Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bandung..... 2-79
Tabel 2.49. Jenis Rumah di Kabupaten Bandung Tahun 2024 2-81
Tabel 2.50. Jumlah Backlog Kepemilikan dan Penghunian Kabupaten Bandung Tahun 2023 2-84
Tabel 2.51. Jumlah RTLH di Kabupaten Bandung..... 2-87
Tabel 2.52.Jumlah RTLH yang Sudah Tertangani Tahun 2021 – 2024 Kabupaten Bandung..... 2-88
Tabel 2.53. Persentase Rumah Layak Huni (Persen)..... 2-89

Tabel 2.54. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Bandung 2-90
Tabel 2.55. Trayek AKDP di Kabupaten Bandung 2-92
Tabel 2.56. Trayek Angkutan Perkotaan di Kabupaten Bandung 2-93
Tabel 2.57. Koridor Rute Trans Metro Pasundan Bandung 2-94
Tabel 2.58. Lokasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Bandung Tahun 2024 2-98
Tabel 2.59.Jumlah Titik Lokasi Marka Jalan/Zebra Cross di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 2-99
Tabel 2.60.Jumlah Titik Lokasi Rambu Peringatan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 2-100
Tabel 2.61.Jumlah Titik Lokasi Rambu Petunjuk di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 2-101
Tabel 2.62.Jumlah Titik Lokasi Rambu Perintah di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 2-101
Tabel 2.63.Jumlah Titik Lokasi Rambu Larangan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 2-102
Tabel 2.64. Kinerja Konektivitas Layanan Angkutan Umum Tahun 2024&2023 2-103
Tabel 2.65. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Agregat Kabupaten Bandung.. 2-106
Tabel 2.66. Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah 2-109
Tabel 2.67. Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian.....2-110
Tabel 2.68. Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan 2-111
Tabel 2.69. Data Kejadian Bencana di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024 2-113
Tabel 2.70. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2-121
Tabel 2.71. Komposisi Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 .. 2-123
Tabel 2.72. Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)..... 2-123
Tabel 2.73. Data Sanggar di Kabupaten Bandung 2-127
Tabel 2.74. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung 2025-2030.... 2-128
Tabel 2.75. Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Bandung 2-133
Tabel 2.76. Realisasi Investasi Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024..... 2-133
Tabel 2.77. Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) 2-134
Tabel 2.78.PDRB ADHK Kabupaten Bandung Menurut Pengeluaran Tahun 2019 -2024 2-136
Tabel 2.79. Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Kategori/Sub Kategori Tahun 2019-2024 2-136
Tabel 2.80. Pendapatan Per-Kapita (ADHB) Kabupaten Bandung 2019-2024 2-137

Tabel 2.81. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung 2-149
Tabel 2.82. Usia Harapan Hidup Kabupaten Bandung tahun 2020 - 2024... 2-150
Tabel 2.83. Profil Layanan Puskesmas di Kabupaten Bandung Tahun 2024 2-156
Tabel 2.84.Rasio Ideal Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024 2-158
Tabel 2.85. Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit terhadap Penduduk Kabupaten Bandung dan Defisit Tempat Tidur 2-159
Tabel 2.86. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bandung tahun 2019-2024 2-160
Tabel 2.87. Harapan Lama Sekolah..... 2-161
Tabel 2.88. Kapasitas Ruang Kelas Berdasarkan Jenjang dan Status Sekolah Tahun 2024 2-163
Tabel 2.89. Kemampuan Literasi Jenjang SD 2-165
Tabel 2.90. Kemampuan Literasi Jenjang SMP..... 2-166
Tabel 2.91. Kemampuan Numerasi Jenjang SD 2-166
Tabel 2.92. Kemampuan Numerasi Jenjang SMP 2-167
Tabel 2.93. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2-167
Tabel 2.94. Persentase Penduduk berumur 5 tahun Ke Atas yang Mengakses Internet..... 2-169
Tabel 2.95.Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung (Dalam Satuan %) 2-170
Tabel 2.96. Indeks Pembangunan Gender 2-172
Tabel 2.97. Indeks Pemberdayaan Gender 2-173
Tabel 2.98. Indeks Pembangunan Kebudayaan 2-174
Tabel 2.99.Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Bandung Berdasarkan Komponen Tahun 2023..... 2-177
Tabel 2.100. Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung 2-178
Tabel 2.101. Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif..... 2-182
Tabel 2.102. Informasi Mengenai Usaha Mikro Kuliner..... 2-183
Tabel 2.103. Informasi Mengenai Volume Usaha Koperasi 2-183
Tabel 2.104. Rasio Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Bandung 2-184
Tabel 2.105. Jenis Usaha Mikro Unggulan..... 2-186
Tabel 2.106. Status Perhitungan Indeks Ekonomi Hijau untuk Kabupaten Bandung..... 2-189
Tabel 2.107. Perolehan Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Bandung Tahun 2021 -2024..... 2-189
Tabel 2.108. Pertumbuhan PMTB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024 . 2-191
Tabel 2.109.Arahan Fungsi dan Kondisi Eksisting Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung..... 2-193

Tabel 2.110. Indeks Pengembangan Wilayah 2020-2024 2-201
Tabel 2.111. Persentase Hunian Layak Huni Tahun 2019-2024 2-203
Tabel 2.112.Jumlah Desa dan Persentase Desa Mandiri Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024 2-204
Tabel 2.113. Rasio Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2024 ... 2-205
Tabel 2.114.Laju Inflasi (IHK) Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional 2020-2024 2-205
Tabel 2.115. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024 2-207
Tabel 2.116.Capaian IDSD dan Perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat dan Daerah Sekitarnya 2-211
Tabel 2.117.Penjabaran Variabel Capaian Indeks Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Dan 2024 2-211
Tabel 2.118. Capaian Visi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 . 2-212
Tabel 2.119. Capaian Misi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 2-213
Tabel 2.120.Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 2-214
Tabel 2.121. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 2-220
Tabel 2.122. Rekapitulasi Capaian SPM di Kabupaten Bandung Tahun 2024 2-227
Tabel 2.123. Rekapitulasi Capaian SDG's di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024 2-233
Tabel 2.124. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024 2-243
Tabel 2.125. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024 2-243
Tabel 2.126. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung 2020-2024 2-243
Tabel 2.127. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026-2030 2-244
Tabel 2.128. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026-2030 2-244
Tabel 2.129. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026-2030 2-244
Tabel 2.130. Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019-2024 2-247
Tabel 2.131. Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia..... 2-253
Tabel 2.132. Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan.... 2-254
Tabel 2.133. Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah..... 2-255
Tabel 2.134. Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan..... 2-256
Tabel 2.135. Tantangan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum2-257
Tabel 2.136. Arahan KLHS RPJMD Kabupaten Bandung..... 2-269

Tabel 2.137. Peran dan Fungsi Kabupaten Bandung dalam Penataan Ruang dan Cakupan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung 2-276
Tabel 2.138. Arahan Penataan Ruang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044 2-278
Tabel 2.139. Arahan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044 2-279
Tabel 2.140. Arahan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044 2-283
Tabel 2.141. Arahan Kawasan Strategis RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044 2-284
Tabel 2.142. Perumusan Isu strategis Kaupaten Bandung 2-288
Tabel 3.1 Visi RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kabupaten Bandung 3-1
Tabel 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kabupaten Bandung 3-2
Tabel 3.3 Visi, Misi dan Rencana Aksi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 3-6
Tabel 3.4Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 3-25
Tabel 3.5Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 3-34
Tabel 3.6 Pentahapan Pembangunan Tahun 2025-2029 3-39
Tabel 3.7 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 3-55
Tabel 3.8 Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 3-65
Tabel 3.9 Program Prioritas Sasaran 1.1 3-83
Tabel 3.10 Program Prioritas Sasaran 1.2 3-85
Tabel 3.11 Program Prioritas Sasaran 1.3 3-85
Tabel 3.12 Program Prioritas Sasaran 1.4 3-86
Tabel 3.13 Program Prioritas Sasaran 1.5 3-87
Tabel 3.14 Program Prioritas Sasaran 2.1 3-87
Tabel 3.15 Program Prioritas dan Program Pendukung Sasaran 2.2 3-89
Tabel 3.16 Program Prioritas Sasaran 2.3 3-90
Tabel 3.17 Program Prioritas Sasaran 2.4 3-90
Tabel 3.18 Program Prioritas Sasaran 3.1 3-91
Tabel 3.19 Program Prioritas Sasaran 4.1 3-94
Tabel 3.20 Program Prioritas Sasaran 4.2 3-95
Tabel 3.21 Program Prioritas Sasaran 4.3 3-96
Tabel 3.22 Program Prioritas Sasaran 4.4 3-97
Tabel 3.23 Program Prioritas Sasaran 5.1 dan 5.2 3-98

Tabel 3.24 Struktur Pembangunan Tematik Model “Gunungan” 3-100
Tabel 4.1. Program disertai Kebutuhan Pendanaan 4-2
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 .. 4-70
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 4-71
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 4-78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pendekatan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 1-2
Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 1-3
Gambar 1. 3 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Lainnya 1-6
Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Bandung 2-2
Gambar 2.2. Peta Konstelasi Regional Kabupaten Bandung 2-4
Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Bandung 2-5
Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bandung 2-6
Gambar 2.5. Peta Klimatologi Kabupaten Bandung 2-7
Gambar 2.6. Peta Zona Konservasi Air Tanah Kabupaten Bandung..... 2-8
Gambar 2.7. Peta Produktivitas Air Tanah Kabupaten Bandung..... 2-9
Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung 2-11
Gambar 2.9. Peta Geologi Kabupaten Bandung..... 2-12
Gambar 2.10. Perkembangan Lahan Sawah dan Lahan Sawah Tadah Hujan 2019 - 2024 2-15
Gambar 2.11. Peta Sebaran dan Perkembangan Lahan Sawah Tadah Hujan per Kecamatan 2-15
Gambar 2.12. Luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Kabupaten Bandung.... 2-16
Gambar 2.13. Peta Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Bandung 2-17
Gambar 2.14. Perkembangan Produksi, Produktivitas, dan Luas Panen Padi Kabupaten Bandung Periode 2019-2024..... 2-19
Gambar 2.15. Produksi Komoditas Biofarma Kabupaten Bandung Tahun 2024 2-24
Gambar 2.16. Perkembangan Produksi Perkebunan Kabupaten 2-25
Gambar 2.17. Pengembangan Objek Wisata Unggulan Kabupaten Bandung 2-28
Gambar 2.18. Ketersediaan Energi Bahan Pangan per Grid 5” (Juta Rupiah)2-35
Gambar 2.19. Kebutuhan Energi Bahan Pangan per Grid 5” 2-36
Gambar 2.20. Selisih Ketersediaan Bahan Pangan per Grid 5” 2-36
Gambar 2.21. Ambang Batas Penduduk untuk Penyedia Bahan Pangan

(Jiwa) 2-37
Gambar 2.22.Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2022 dalam Sistem Grid 5”x..... 2-37
Gambar 2.23. Ketersediaan Bersih per Grid 5”..... 2-39
Gambar 2.24. Selisih Ketersediaan Air di Kabupaten Bandung dalam sistem grid 5”x5” 2-39
Gambar 2.25. Ambang Batas Penduduk Penyedia Air per Grid 5’ 2-40
Gambar 2.26. Status Daya Dukung Air terhadap Ambang Batas 2-40
Gambar 2.27. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana 2-42
Gambar 2.28. Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air dan Limbah 2-44
Gambar 2.29. Jasa Ekosistem Pengaturan Udara 2-46
Gambar 2.30. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir 2-48
Gambar 2.31. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim 2-50
Gambar 2.32. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Bandung 2020-2024..... 2-51
Gambar 2.33. Skor PPH di Kabupaten Bandung 2019-2024 2-51
Gambar 2.34. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ... 2-54
Gambar 2.35. Perkembangan Timbulan Sampah Kabupaten Bandung..... 2-61
Gambar 2.36. Komposisi Sampah Makro Permukiman dan Non Permukiman di Kabupaten Bandung 2-62
Gambar 2.37. Peta Wilayah Pelayanan Sampah..... 2-64
Gambar 2.38. Peta Sebaran Lokasi Bank Sampah di Kabupaten Bandung.... 2-67
Gambar 2.39. Neraca Kinerja Pengelolaan Sampah..... 2-68
Gambar 2.40. Peta Sebaran Lokasi TPS3R di Kabupaten Bandung 2-68
Gambar 2.41. Peta Sebaran Lokasi TPST di Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Bandung..... 2-69
Gambar 2.42. Sarana dan Prasaran di TPK Sarimukti..... 2-71
Gambar 2.43.Grafik Luas Permukiman Berdasarkan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung..... 2-80
Gambar 2.44. Peta Permukiman Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung..... 2-81
Gambar 2.45. Peta Permukiman Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung..... 2-83
Gambar 2.46. Grafik Luas Permukiman Berdasarkan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung 2-85
Gambar 2.47. Grafik Jumlah RTLH Didalam dan Diluar Kawasan Kumuh di Kabupaten Bandung..... 2-88
Gambar 2.48. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Bandung..... 2-91
Gambar 2.49. Kondisi Terminal di Kabupaten Bandung..... 2-92
Gambar 2.50. Rute Layanan BRT Metro Jabar Trans 2-94

Gambar 2.51. Rute Layanan BRT Metro Jabar Trans 2-95
Gambar 2.52. Kondisi Stasiun di Kabupaten Bandung 2-95
Gambar 2.53. Kereta Cepat Jakarta Bandung, WHOOSH 2-96
Gambar 2.54. Stasiun HSR Tegalluar..... 2-97
Gambar 2.55. Sebaran Titik PJU pada Jalan Kabupaten 2-99
Gambar 2.56. Proporsi Pemilihan Moda Perjalanan di Kabupaten Bandung Tahun 2023 & 2024 2-105
Gambar 2.57. Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor limbah 2-108
Gambar 2.58. Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor pertanian 2-110
Gambar 2.59. Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor kehutanan.....2-111
Gambar 2.60. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bandung.....2-112
Gambar 2.61. Jumlah Kejadian Bencana berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 2-113
Gambar 2.62. Peta Titik Lokasi Kejadian Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bandung.....2-114
Gambar 2.63. Peta Titik Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Bandung..2-116
Gambar 2.64. Peta Titik Lokasi Kejadian Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bandung.....2-117
Gambar 2.65. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Bandung.....2-117
Gambar 2.66. Peta Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bandung.....2-118
Gambar 2.67.Peta Lokasi Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung) di Kabupaten Bandung 2-119
Gambar 2.68. Peta Risiko Bencana Gunung Api di Kabupaten Bandung.....2-119
Gambar 2.69. Peta Lokasi Kejadian Bencana Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung..... 2-120
Gambar 2.70. Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024 2-122
Gambar 2.71. Laju pertumbuhan Ekonomi, 2019 – 2024 (dalam %)..... 2-130
Gambar 2.72.Kontribusi sektor utama terhadap perekonomian Kabupaten Bandung, 2019-2024..... 2-131
Gambar 2.73.Kontribusi PDRB berdasarkan pengeluaran terhadap perekonomian, 2019 – 2024 2-132
Gambar 2.74. Proporsi Sektor PDRB ADHB Kabupaten Bandung Tahun 2024134
Gambar 2.75. Grafik PDRB Per-Kapita Kabupaten Bandung 2-138
Gambar 2.76.Perbandingan TPT Daerah dengan Capaian Nasional dan Jawa Barat Tahun 2021-2024..... 2-139
Gambar 2.77. Status Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024139
Gambar 2.78. Kontribusi tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikanganti2-140

Gambar 2.79. Jumlah dan Kontribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Lapangan Usaha 2-141
Gambar 2.80. Penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan..... 2-141
Gambar 2.81. Penduduk Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama (Formal/Informal)..... 2-142
Gambar 2.82. Grafik Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024..... 2-143
Gambar 2.83. Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi, Kabupaten Tahun 2019-2024..... 2-144
Gambar 2.84. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 2-145
Gambar 2.85. Garis Kemiskinan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024 ... 2-146
Gambar 2.86. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020-2024..... 2-147
Gambar 2.87. Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2020-2024..... 2-147
Gambar 2.88. Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Barat & Kabupaten Bandung..... 2-148
Gambar 2.89. Indeks Kesehatan 2-150
Gambar 2.90. Prevalensi Stunting Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024 . 2-152
Gambar 2.91. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) di Kabupaten Bandung 2-153
Gambar 2.92.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) di Kabupaten Bandung 2-154
Gambar 2.93. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024..... 2-173
Gambar 2.94. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung 2021-2024 2-175
Gambar 2.95. Distribusi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama..... 2-176
Gambar 2.96. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)..... 2-180
Gambar 2.97. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)..... 2-181
Gambar 2.98. Gambar Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2020 – 2024 (%) 2-187
Gambar 2.99. Nilai ICOR Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024..... 2-188
Gambar 2.100. Konsep Pengembangan Ekonomi Kabupaten Bandung Berbasis Ekonomi Hijau, Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Pangan . 2-191
Gambar 2.101.Perkembangan Nilai Ekspor Non-Migas Kabupaten Bandung Bulanan 2019 – 2024 2-192
Gambar 2.102. Pengembangan Kawasan Kabupaten Bandung..... 2-200
Gambar 2.103. Tren Perkembangan Indeks Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Bandung Tahun 20220-2024..... 2-202
Gambar 2.104. Grafik Laju Inflasi PDRB 2-206

Gambar 2.105.Sandingan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023 2-207
Gambar 2.106. Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Bandung 2-208
Gambar 2.107. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024 2-210
Gambar 2.108. Pohon Masalah Aspek Geografis dan Demografis 2-260
Gambar 2.109. Pohon Masalah Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-260
Gambar 2.110. Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah..... 2-261
Gambar 2.111. Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah (Lanjutan)..... 2-262
Gambar 2.112. Pohon Kinerja Aspek Pelayanan Umum..... 2-263
Gambar 2.113. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2-268
Gambar 2.114. Perumusan Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029..... 2-287
Gambar 3.1. Linearitas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan..... 3-10
Gambar 3.2. Cascading Misi Pembangunan 1.....3-11
Gambar 3.3. Cascading Misi Pembangunan 2..... 3-15
Gambar 3.4. Cascading Misi Pembangunan 3..... 3-18
Gambar 3.5. Cascading Misi Pembangunan 4..... 3-20
Gambar 3.6. Cascading Misi Pembangunan 5..... 3-23
Gambar 3.7. Tema dan Tahapan Pembangunan Tahunan Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 3-28
Gambar 3.8.Posisi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dalam RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 3-33
Gambar 3.9. Kerangka Penyusunan Strategi 3-54
Gambar 3.10. Struktur Pembangunan Tematik Model “Gunungan”..... 3-100
Gambar 3.11.. Konsep Pembangunan Ketahanan Pangan Melalui Simpul Pangan Lokal..... 3-102
Gambar 3.12. Bisnis Simpul Pangan Lokal Berbasis Komunitas 3-103
Gambar 3.13. Keruangan Simpul Pangan Regional Dan Kemitraan Dengan Simpul Pangan Lokal..... 3-104
Gambar 3.14. Konsep Pembagian Peran Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung..... 3-104
Gambar 3.15. Konsep Wilayah Pengembangan Ekonomi Kabupaten Bandung 3-107
Gambar 3.16. Konsep Konvergensi Pembangunan IKM dan UKM (KAB BANDUNG BANGKIT)..... 3-109
Gambar 3.17. Konsep Pembagian Peran Konvergensi Pembangunan IKM dan UKM di Kabupaten Bandung 3-110
Gambar 3.18. Konsep Pembangunan Pariwisata Hijau dan Budaya di kabupaten Bandung.....3-112

Gambar 3.19. Profil Kemacetan di Kawasan Soreang 3-114

Gambar 3.20.Konsep Penanganan Permasalahan Amenitas di Kawasan Perkotaan Soreang 3-116

Gambar 3.21. Strategi Mengatasi Parkir Liar.....3-117

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung periode 2025–2030 pada tanggal 20 Februari 2025, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat enam bulan sejak tanggal pelantikan kepala daerah. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, penyusunan RPJMD wajib selaras dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

RPJMD tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama sekaligus pondasi dalam perencanaan pembangunan berdasarkan RPJPD tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi yang dimiliki, kearifan lokal, serta prinsip kolaborasi dan adaptabilitas melalui pendekatan strategis seperti pentahelix dan dynamic governance guna memastikan keterlibatan multi pihak dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap dinamika pembangunan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, serta program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMN dan RPJPD. Untuk periode 2025–2029, RPJMD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD berperan sebagai acuan dalam pengendalian, evaluasi, serta akuntabilitas pembangunan daerah, sekaligus instrumen untuk menerjemahkan sasaran strategis jangka panjang dari RPJPD ke dalam program dan kegiatan yang lebih terukur dalam jangka menengah. Proses penyusunannya menuntut pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan partisipatif agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan optimal, berwawasan lingkungan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan dokumen RPJMD ini, pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada beberapa proses meliputi:

- **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- **Pendekatan politik** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD; dan
- **Pendekatan pendekatan atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*)** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
- **Pendekatan teknokratik** menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- **Pedekatan tematik** merupakan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menentukan tema prioritas dan setiap tema berfokus pada isu strategis yang harus ditangani dalam periode RPJMD.
- **Pendekatan holistik** merupakan pendekatan yang memastikan perencanaan lebih komprehensif dan mencakup berbagai aspek pembangunan. Setiap tema yang telah ditetapkan dikembangkan lebih lanjut agar mencakup seluruh sektor yang berkaitan.
- **Pendekatan integratif** merupakan berbagai kewenangan dalam satu proses perencanaan terpadu, yang menghindari tumpang tindih program serta memastikan efisiensi dalam implementasi kebijakan.
- **Pendekatan spasial** merupakan pendekatan yang mempertimbangkan dimensi tata ruang dalam perencanaan pembangunan daerah**.**

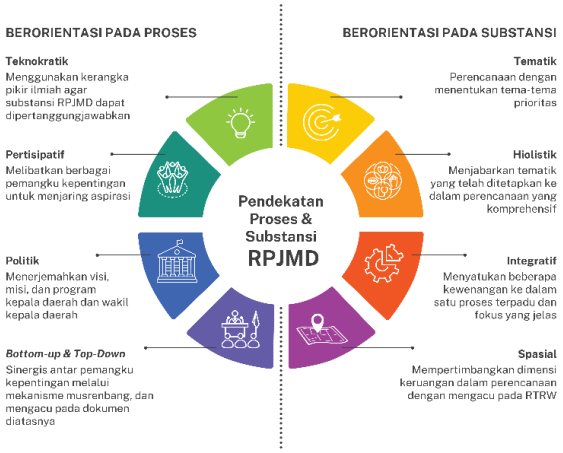

Gambar 1. 1 Pendekatan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029
Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, diolah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang berlandaskan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya rancangan RPJMD yang terstruktur, berbasis visi, misi, dan program kepala daerah serta fokus pada program dan isu-isu strategis diharapkan dapat menjadi dasar kuat

untuk mengarahkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan sebagai berikut:

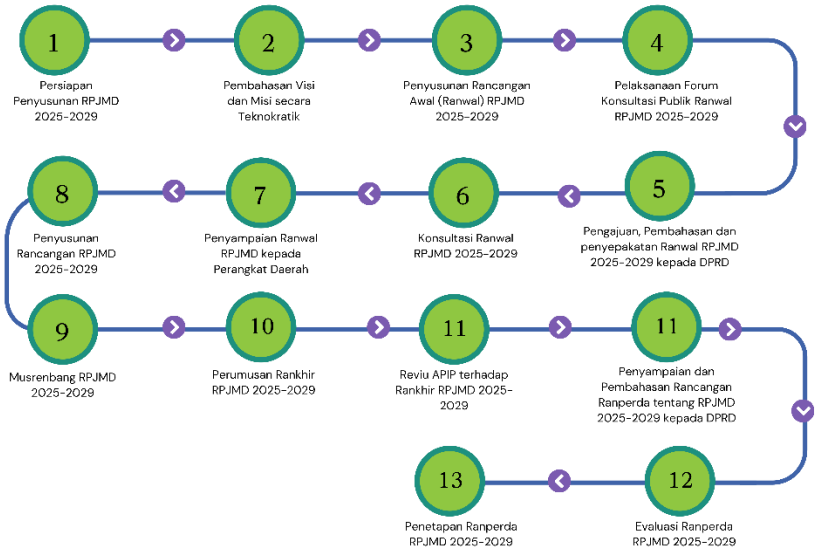

Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, diolah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 30)
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor ...);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang dijabarkan dari RPJPD Kabupaten Bandung, serta selaras dengan dokumen nasional (RPJPN, RPJMN) dan dokumen provinsi (RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi).

- **RPJP dan RPJM Nasional**

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) menetapkan visi dan misi pembangunan nasional selama 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan menjadi panduan bagi daerah untuk menyusun perencanaan dalam jangka watu 5 tahunan.

- **RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Barat**

RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Provinsi Jawa Barat mengacu pada RPJPN, yang kemudian dijabarkan dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Barat dan menjadi pedoman untuk penyusunan perencanaan di tingkat kabupaten/kota.

- **RPJPD Kabupaten Bandung**

RPJPD Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJPN, selanjutnya dijabarkan setiap lima tahun dalam RPJMD Kabupaten/Kota.

- **RTRW Kabupaten Bandung**

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah dokumen yang mengatur pola ruang dan struktur ruang wilayah. RPJMD perlu memperhatikan dan menyesuaikan arah pembangunan daerah berdasarkan ketentuan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW, sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun.

- **KLHS Kabupaten Bandung**

RPJMD Kabupaten Bandung harus disusun berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan. KLHS memberikan rekomendasi kebijakan yang wajib dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD agar rencana pembangunan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan.

- **Renstra PD dan RKPD Kabupaten Bandung**

RPJMD digunakan sebagai acuan bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD Kabupaten Bandung yang selanjutnya dijabarkan melalui Renja PD.

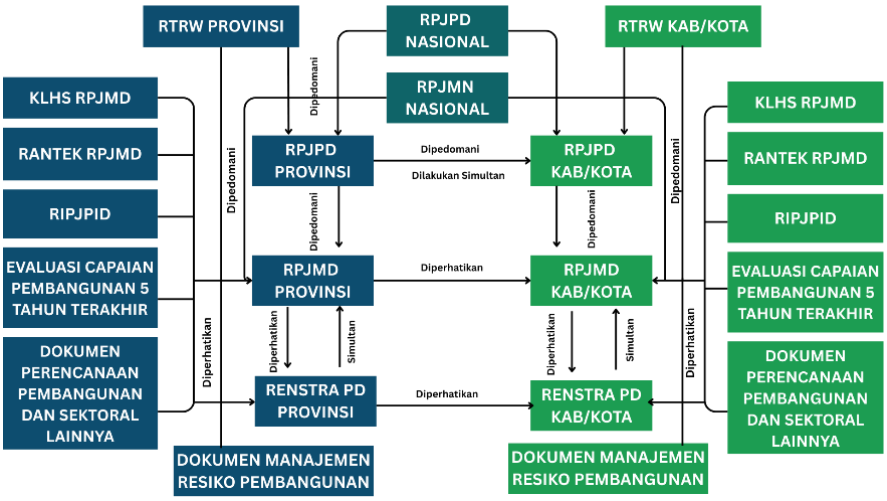

Gambar 1. 3 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Lainnya
Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung bertujuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah selama 5 tahun mendatang yang terintegrasi dengan visi-misi kepala daerah terpilih dan menjembatani kebutuhan masyarakat. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dirancang untuk menyusun kebijakan pembangunan jangka menengah yang holistik, tematik, integratif, dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebelumnya dan mentransformasikan sasaran strategis yang tercantum dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah).

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, di antaranya:

1. Menyediakan kebijakan pembangunan jangka menengah yang disesuaikan dengan dinamika kondisi terkini serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Menyediakan panduan untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga akhir masa berlakunya RPJMD.
3. Mendorong terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk kabupaten/kota yang berbatasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi data dan informasi dengan 4 pendekatan aspek pembangunan, gambaran keuangan daerah yang menjelaskan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 serta proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030, serta rumusan permasalahan dan isu strategis.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi rumusan visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi mengenai rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB 2
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044, secara geografis, Kabupaten Bandung terletak di antara 6° 41' 00" dan 7° 19' 00" Lintang Selatan dan antara 107° 22' 00" dan 108° 50' 00" Bujur Timur dan berada di wilayah dataran tinggi. Sebagian besar bentang alam yang terdapat di Kabupaten Bandung berada di antara bukit-bukit dan gunung yang mengelilingi wilayahnya. Di sebelah utara Kabupaten Bandung terdapat Gunung Bukit Tunggul (2209 mdpl) dan Gunung Tangkuban Perahu (2087 mdpl) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Di bagian selatan, Kabupaten Bandung berbatasan dengan Gunung Patuha (2434 mdpl), Gunung Malabar (2343 mdpl), Gunung Guntur (2434 mdpl) dan Gunung Papandayan (2265 mdpl) yang berbatasan dengan Kabupaten Garut. Dari segi administratif, Kabupaten Bandung merupakan salah satu bagian wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan luas 174.084,34 Ha dan Kecamatan Soreang sebagai ibukota kabupaten. Batas administrasi Kabupaten Bandung dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang
Sebelah Timur	:	Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
Sebelah Barat	:	Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan. Adapun kecamatan serta luas wilayah administratif masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Luas Kecamatan di Kabupaten Bandung

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Pangalengan	21.656,39
2	Kecamatan Pasir Jambu	19.807,79
3	Kecamatan Rancabali	15.286,64
4	Kecamatan Kertasari	13.654,39
5	Kecamatan Pacet	9.482,01
6	Kecamatan Arjasari	6.277,55
7	Kecamatan Cimaung	5.955,56
8	Kecamatan Ciwidey	5.519,18
9	Kecamatan Ibun	5.477,22
10	Kecamatan Ciparay	5.366,72
11	Kecamatan Paseh	4.789,21
12	Kecamatan Cimenyan	4.758,98

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
13	Kecamatan Kutawaringin	4.705,50
14	Kecamatan Rancaekek	4.486,63
15	Kecamatan Cicalengka	4.351,07
16	Kecamatan Nagreg	4.282,97
17	Kecamatan Baleendah	4.182,97
18	Kecamatan Banjaran	3.903,25
19	Kecamatan Cikancung	3.872,63
20	Kecamatan Cilengkrang	3.525,17
21	Kecamatan Cileunyi	3.063,24
22	Kecamatan Bojongsoang	2.822,38
23	Kecamatan Soreang	2.537,04
24	Kecamatan Solokanjeruk	2.435,27
25	Kecamatan Majalaya	2.431,45
26	Kecamatan Cangkuang	2.375,09
27	Kecamatan Margaasih	1.832,39
28	Kecamatan Katapang	1.561,94
29	Kecamatan Pameungpeuk	1.514,15
30	Kecamatan Dayeuhkolot	1.115,30
31	Kecamatan Margahayu	1.054,26
Total		**174.084,34**

Sumber: Data Dikelola SIPD; RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

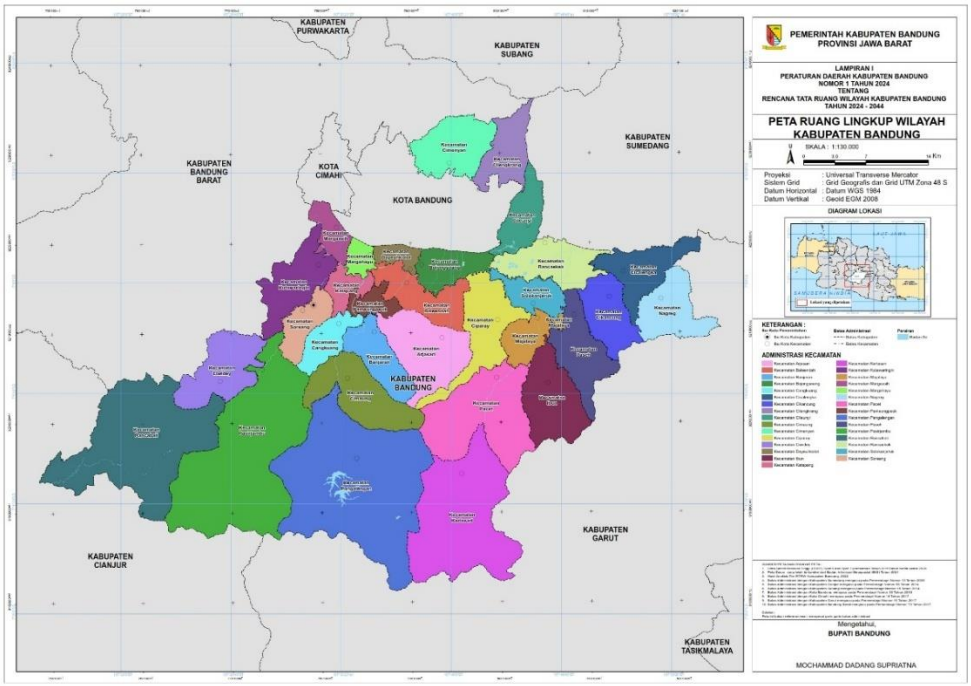

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD; RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

Kabupaten Bandung merupakan wilayah terluas dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Cekungan Bandung atau Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018. Kawasan ini mencakup lima wilayah administratif, yaitu:

- Kabupaten Bandung (174.084,34 Ha),
- Kabupaten Bandung Barat (130.577,4 Ha),

- Sebagian wilayah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Jatinangor, Rancakalong, dan Pamulihan (15.486 Ha),
- Kota Cimahi (4.023 Ha), dan
- Kota Bandung (16.729 Ha).

Sebagai bagian integral dari PKN Bandung Raya, Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam pengembangan kawasan melalui sektor-sektor seperti industri non-polutif, agroindustri, pariwisata alam, pertanian, dan perkebunan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam RTRWN perubahan Tahun 2017, serta RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042. Perencanaan kawasan Cekungan Bandung juga menempatkan sektor industri pengolahan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan panas bumi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah yang terarah, Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044, Kabupaten Bandung menetapkan sejumlah kawasan strategis berdasarkan skala pelayanannya. Kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berfungsi melayani aktivitas berskala internasional, nasional, atau antar provinsi, mencakup koridor Soreang–Kutawaringin–Katapang–Margahayu–Margaasih, Cileunyi–Rancaekek, Cicalengka, Majalaya–Ciparay, Baleendah–Dayeuhkolot–Bojongsoang, dan Banjaran. Sementara itu, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan direncanakan berada di Ciwidey dan Pangalengan, merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi strategis.

Selain itu, pengembangan pusat pelayanan lain juga diarahkan untuk memperkuat struktur wilayah. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai pusat kegiatan skala kecamatan ditetapkan di Cimenyan dan Cangkuang. Adapun Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang melayani skala antar desa meliputi wilayah Arjasari, Cikancung, Cimaung, Ibun, Kertasari, Nagreg, Pacet, Pameungpeuk, Paseh, Rancabali, dan Solokanjeruk. Pengembangan pusat-pusat ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan akses layanan masyarakat secara berkelanjutan.

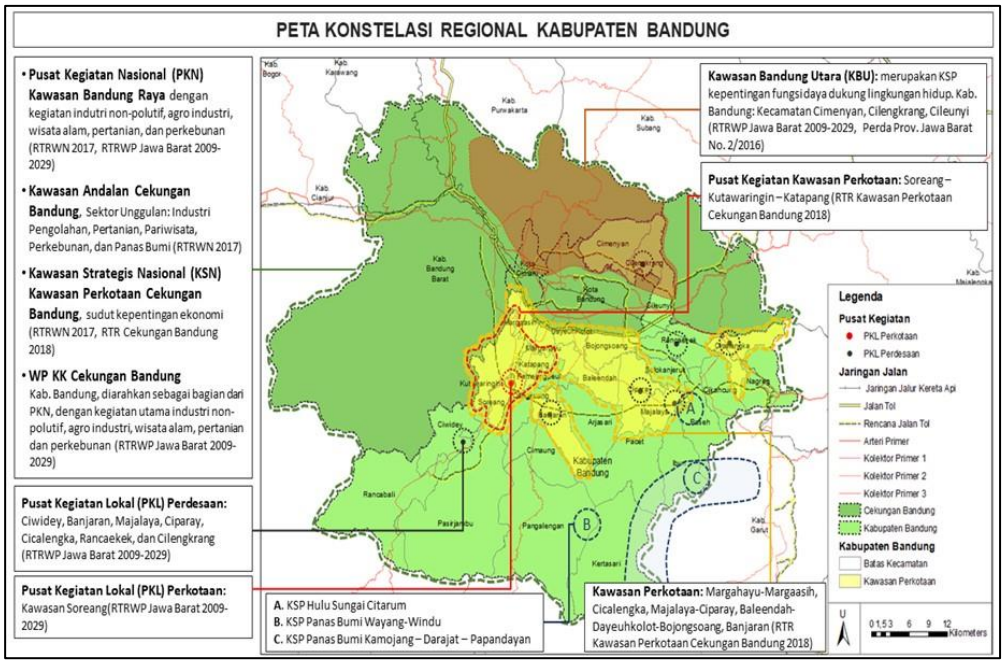

Gambar 2.2. Peta Konstelasi Regional Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD; RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

2.1.1.1 Topografi

Kabupaten Bandung yang terletak di Cekungan Bandung memiliki ciri khas dataran tinggi dimana wilayah Kabupaten Bandung dikelilingi pegunungan di sebelah barat, selatan, utara dan timur wilayahnya. Wilayah kecamatan tertinggi terletak di Kecamatan Kertasari dengan ketinggian 1.512 mdpl, sementara wilayah terendah terletak di Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot (664 mdpl). Sebagian besar ketinggian dataran di Kabupaten Bandung berada pada ketinggian <700 mdpl (19%) yang menjadi lokasi sebagian besar kawasan perkotaan di Kabupaten, seperti Majalaya, Soreang, Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot, Margahayu, Cileunyi, Baleendah, dan Bojongsoang. Wilayah yang terletak di Pegunungan yaitu Ciwidey, Pasirjambu dan Pangalengan di bagian selatan serta Cimenyan dan Cilengkrang di bagian utara. Gunung yang ada di Kabupaten Bandung antara lain: Gunung Patuha (2.334 mdpl), Gunung Malabar (2.321 mdpl), Gunung Papandayan (2.262 mdpl), dan Gunung Manglayang.

Tabel 2.2. Luas Topografi di Kabupaten Bandung

No.	Topografi	Luas (Ha)
1	<700 mdpl	33.842,52
2	800 mdpl	12.354,06
3	900 mdpl	12.228,65
4	1000 mdpl	9.804,18
5	1100 mdpl	9.120,41
6	1200 mdpl	10.011,61
7	1300 mdpl	10.138,25
8	1400 mdpl	9.479,07
9	1500 mdpl	14.381,89
10	1600 mdpl	14.026,96

No.	Topografi	Luas (Ha)
11	1700 mdpl	12.605,05
12	1800 mdpl	9.118,17
13	1900 mdpl	6.178,06
14	2000 mdpl	4.472,98
15	2100 mdpl	2.964,81
16	2200 mdpl	1.818,57
17	2300 mdpl	1.098,42
18	2400 mdpl	292,21
19	2500 mdpl	99,49
20	>2600 mdpl	48,97
Total Luas Lahan		**174.084,34**

Sumber: Data Dikelola SIPD; RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

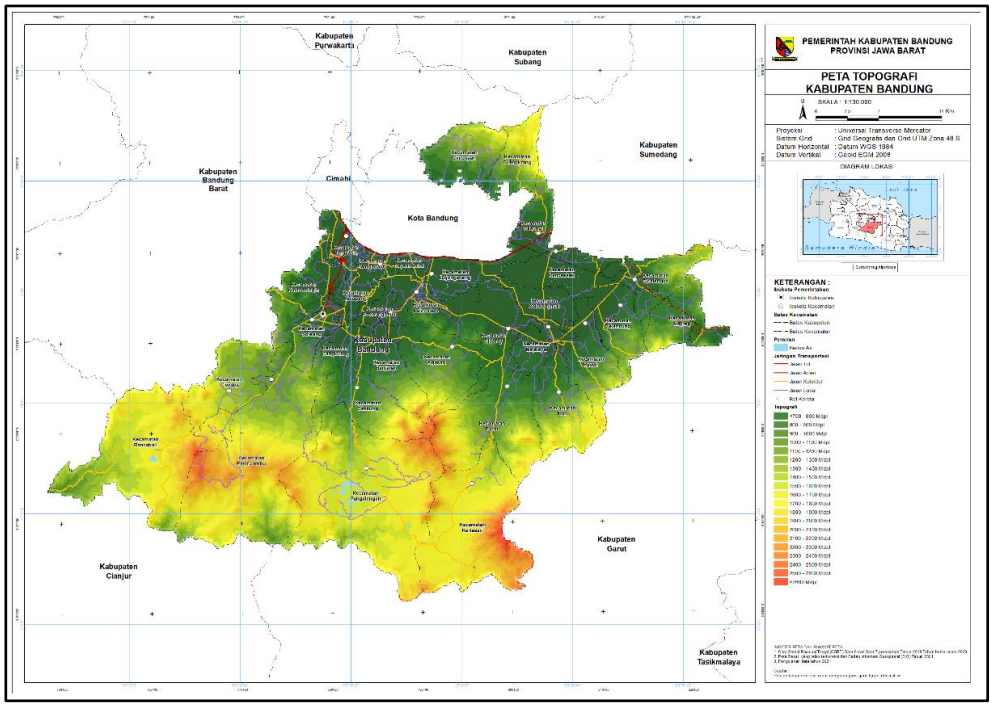

Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD; RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

2.1.1.2 Kelerengan

Ketampakan alam di Kabupaten Bandung sangat beragam, seperti adanya gunung, sungai, bukit, dan lainnya. Sehingga dari ketampakan alam tersebut menjadikan beberapa tingkat kemiringan lereng di berbagai wilayah. Kemiringan lereng di Kabupaten Bandung didominasi dengan tingkat kemiringan 2-15% yang tersebar di berbagai kecamatan, terutama di kecamatan-kecamatan di bagian utara kabupaten. Kemiringan lereng tertinggi atau tercuram berada pada Kecamatan Ciwidey, Pacet, dan Pasir Jambu dengan tingkat kemiringan mencapai lebih dari 40%. Kawasan terbangun pada ketiga kecamatan ini tidak terlalu padat, bahkan cenderung tidak padat. Lebih jelas mengenai klasifikasi kemiringan lereng di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

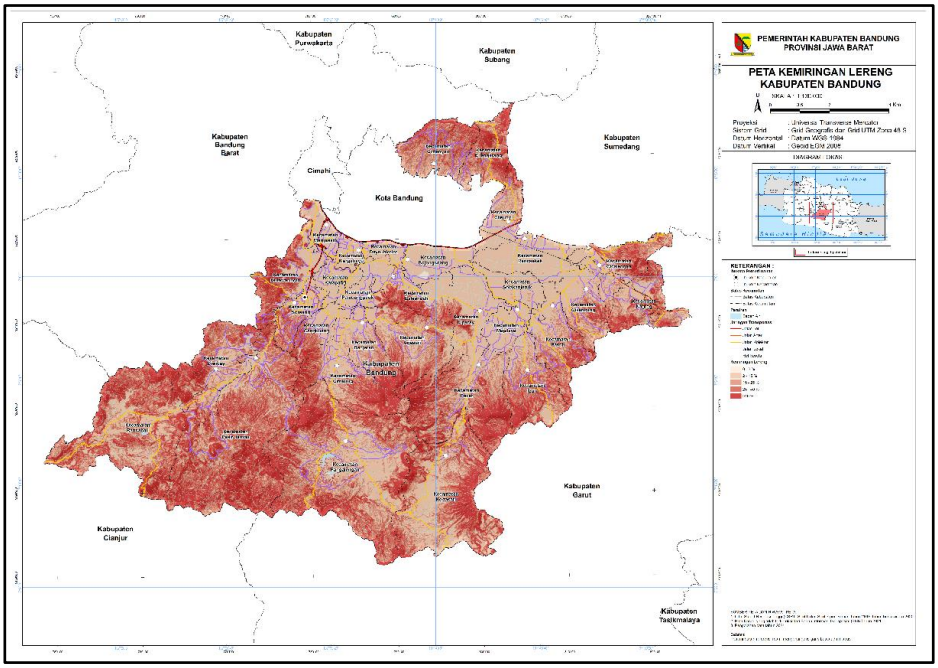

Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD; RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

Tabel 2.3. Luas Kemiringan Lereng Kabupaten Bandung

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)
1	0-2%	295,01
2	2-15%	65.501,09
3	15-25%	33.146,28
4	25-40%	42.997,79
5	>40%	32.144,18
Total Luas Lahan		**174.084,34**

Sumber: Data Dikelola SIPD; RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

2.1.1.3 Klimatologi

Berdasarkan data pengamatan unsur iklim di Stasiun Bandung tahun 2024, suhu rata-rata bulanan di Kabupaten Bandung berkisar antara 23,80°C hingga 25,60°C dengan suhu minimum terendah tercatat pada bulan Juli (19,10°C) dan maksimum tertinggi pada bulan Oktober (32,50°C). Curah hujan menunjukkan variasi yang cukup signifikan sepanjang tahun, dengan musim hujan terjadi terutama pada bulan Januari hingga April serta November, di mana curah hujan tertinggi tercatat pada bulan November sebesar 512 mm/tahun. Sebaliknya, bulan dengan curah hujan terendah adalah Juli sebesar 30 mm/tahun, menunjukkan adanya periode musim kemarau di pertengahan tahun. Pola ini mencerminkan iklim tropis basah dengan dua musim yang cukup jelas, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Kondisi klimatologi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan potensi bencana, seperti banjir dan longsor yang lebih rawan terjadi pada periode curah hujan tinggi, serta kekeringan pada saat musim kemarau. Selain itu, ketersediaan air bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri sangat dipengaruhi oleh fluktuasi curah hujan ini, sehingga

diperlukan strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Pola iklim juga berimplikasi terhadap penggunaan lahan, di mana perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan pertanian perlu menyesuaikan dengan musim tanam, risiko bencana, serta daya dukung lingkungan.

Tabel 2.4. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Bandung

No	Bulan	Suhu (^{0}C)			Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)
		Minimum	Rata-rata	Maksimum	
1	Januari	21,10	24,30	29,60	335
2	Februari	21,00	24,40	30,20	264
3	Maret	20,90	24,30	29,50	272
4	April	21,50	25,00	30,20	215
5	Mei	23,10	25,30	30,90	71
6	Juni	20,20	24,30	29,90	156
7	Juli	19,10	23,80	29,90	30
8	Agustus	19,50	24,50	31,30	53
9	September	20,20	24,90	31,40	136
10	Oktober	20,80	25,60	32,50	81
11	November	20,80	23,90	30,50	512
12	Desember	21,80	24,60	30,10	90

Sumber: Data Dikelola SIPD; Kabupaten Bandung Dalam Angka, Tahun 2025

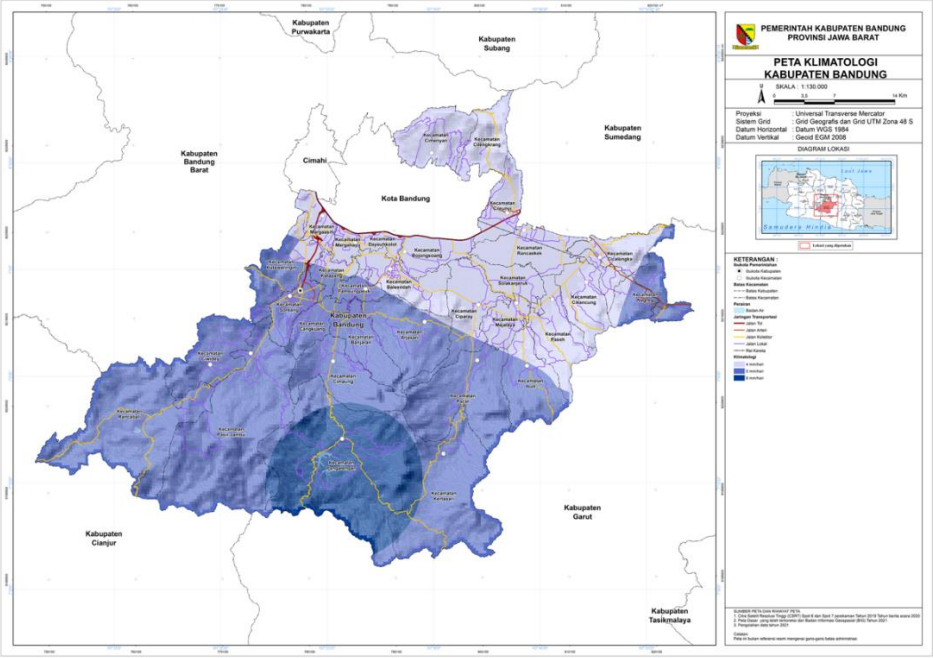

Gambar 2.5. Peta Klimatologi Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD; RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

2.1.1.4 Hidrogeologi

Berdasarkan data hidrogeologi Kabupaten Bandung, wilayah ini didominasi oleh daerah dengan tingkat keterusan air tanah sedang hingga tinggi yang mencakup 114.680,26 Ha dari total 174.084,34 Ha, menunjukkan potensi pergerakan air tanah yang cukup baik di sebagian besar wilayah. Dari segi produktivitas akuifer, sebagian besar wilayah tergolong

setempat produktif (61.919,05 Ha), diikuti produktivitas sedang dengan penyebaran luas (45.819,39 Ha), produktif dengan penyebaran luas (28.706,45 Ha), dan hanya sebagian kecil yang masuk kategori produktif tinggi dengan penyebaran luas (6.300,65 Ha). Kondisi ini menunjukkan potensi air tanah cukup tersedia, namun distribusinya bervariasi sehingga perlu pengelolaan yang tepat. Tantangan muncul ketika kebutuhan daya dukung dan daya tampung penyedia air di Kabupaten Bandung mencapai 7.511.799.753 m³/tahun, sedangkan ketersediaannya hanya 1.898.283.389 m³/tahun, menimbulkan defisit air yang signifikan. Situasi ini mempertegas pentingnya pengelolaan sumber daya air tanah yang terintegrasi dengan tata ruang, konservasi lingkungan, serta strategi ketahanan terhadap bencana, sebagai bagian dari isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.5. Luas Hidrogeologi (Tingkat Keterusan) Kabupaten Bandung

No	Tingkat Keterusan	Luas (Ha)
1	Sedang - Tinggi	114.680,26
2	Rendah	40.789,43
3	Rendah - Sangat Rendah	11.561,71
4	Rendah - Sedang	6.797,51
5	Tinggi	128,75
6	-	126,69
	Total Luas Lahan	**174.084,34**

Sumber: Data Dikelola SIPD; RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

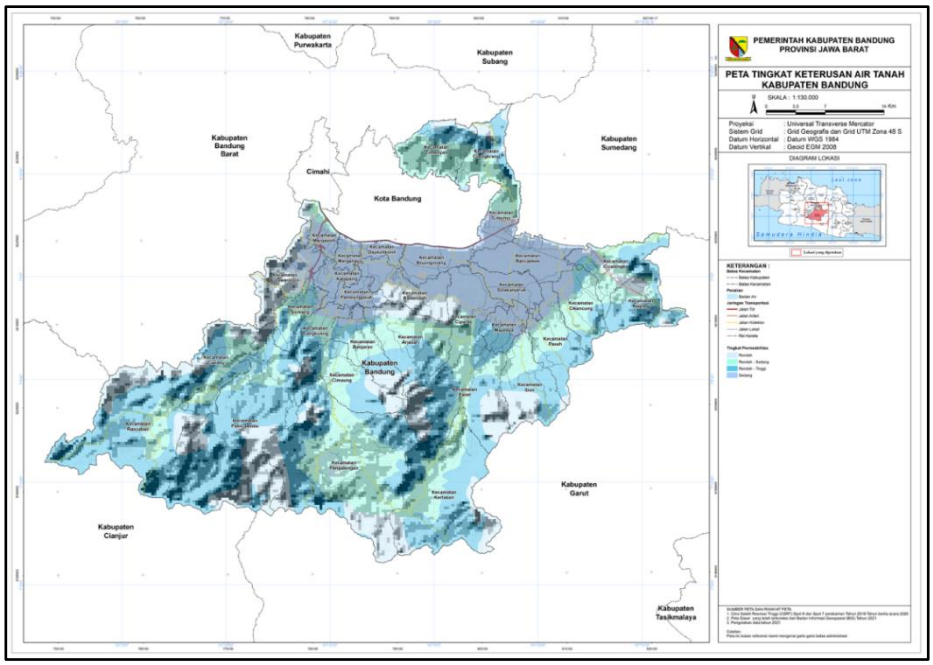

Gambar 2.6. Peta Zona Konservasi Air Tanah Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

Tabel 2.6. Luas Hidrogeologi (Produktivitas Akuifer) Kabupaten Bandung

No	Produktivitas Akuifer	Luas (Ha)
1	Setempat Produktif	61.919,05
2	Produktif Sedang dan Penyebaran Luas	45.819,39

3	Produktif dan Penyebaran Luas	28.706,45
4	Langka	27.120,63
5	Produktif Tinggi dan Penyebaran Luas	6.300,85
6	Produktif Kecil Setempat Berarti	3.938,85
7	Produktif Sedang	152,44
8	Perairan	126,69
	Total Luas Lahan	**174.084,34**

Sumber: Data Dikelola SIPD, RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

Berdasarkan Peta Konservasi Air Tanah CAT Bandung - Soreang, terdapat zona resapan air tanah yang teridentifikasi sebagai zona aman. Kondisi pendayagunaan air tanah di Kabupaten Bandung didominasi Zona Daerah Aman dan Daerah Resapan. Terdapat beberapa daerah zona kritis dan rawan di bagian utara Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Berikut adalah pembagian wilayah pendayagunaan air tanah Kabupaten Bandung.

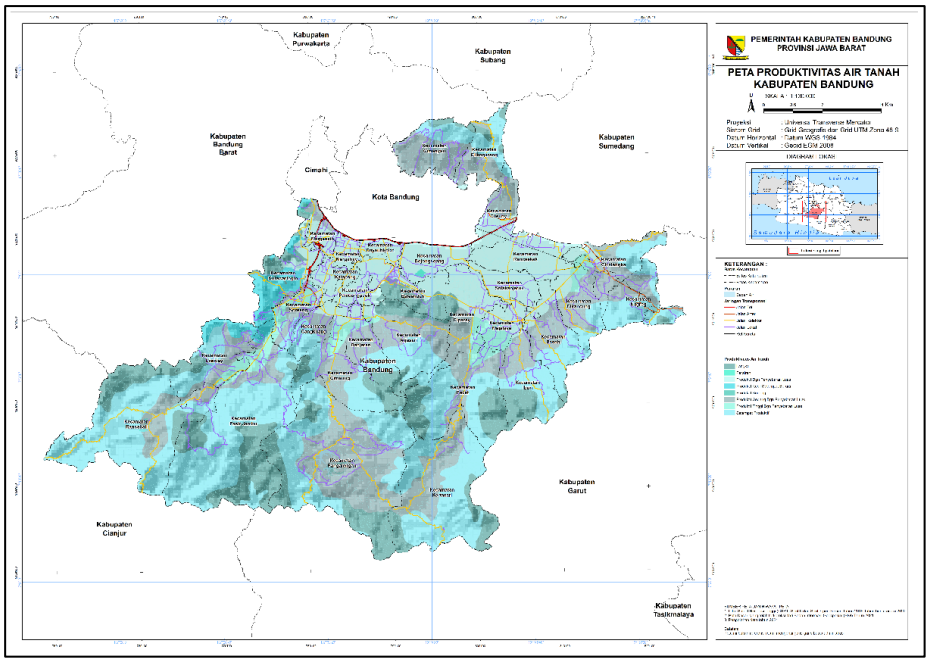

Gambar 2.7. Peta Produktivitas Air Tanah Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

Dua bentang alam yang dikelilingi pegunungan, serta dukungan potensi lahan agraris, sumber daya air tanah, dan kekayaan geologi vulkanik menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian, pariwisata alam, industri non-polutif, serta energi terbarukan seperti panas bumi. Selain itu, keberadaan koridor-koridor strategis seperti Soreang–Kutawaringin dan Majalaya–Ciparay memperkuat posisi Kabupaten Bandung sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional.

Namun demikian, potensi tersebut juga dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain tekanan pembangunan di kawasan dataran rendah dan perkotaan yang memiliki risiko pada daya dukung lingkungan, kerentanan bencana geologi seperti longsor akibat

topografi terjal, serta ketimpangan dalam pemerataan akses dan layanan antarwilayah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang integratif dan berbasis spasial sangat diperlukan untuk menjamin keseimbangan antara pelestarian fungsi ekologis, pemanfaatan ekonomi wilayah, dan ketahanan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Berdasarkan komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Bandung tahun 2019, terlihat bahwa pemanfaatan ruang didominasi oleh hutan lahan tinggi sekunder kerapatan sedang (36.093,31 Ha), sawah dengan padi terus menerus (29.943,11 Ha), ladang/tegalan dengan palawija (26.742,73 Ha), dan perkebunan teh (21.752,91 Ha). Keempat jenis penggunaan lahan ini mencerminkan karakter agraris dan konservatif dari wilayah Kabupaten Bandung, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung ketahanan pangan daerah. Sementara itu, penggunaan lahan untuk bangunan permukiman kota dan desa secara kumulatif mencapai sekitar 14,47%, menunjukkan tekanan pembangunan perkotaan yang perlu diimbangi dengan upaya perlindungan lingkungan dan tata ruang berkelanjutan. Lebih jelas mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Tahun 2019*

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	36.093,31	20,73
2	Sawah dengan Padi Terus Menerus	29.943,11	17,20
3	Ladang/Tegalan dengan Palawija	26.742,73	15,36
4	Perkebunan Teh	21.752,91	12,50
5	Bangunan Permukiman Kota	15.154,47	8,71
6	Semak/Belukar	14.702,12	8,45
7	Bangunan Permukiman Desa	10.019,35	5,76
8	Kebun Campuran	8.674,39	4,98
9	Sawah dengan Padi Diselingi Palawija/Tanaman Lain	3.967,31	2,28
10	Hutan Lebih Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	2.245,01	1,29
11	Bangunan Industri dan Perdagangan	1.748,29	1,00
12	Perkebunan Lain	1.030,01	0,59
13	Lahan Terbuka Lain	778,67	0,45
14	Sungai	247,55	0,14
15	Danau/Tegalan Alami	214,64	0,12
16	Jaringan Jalan Aspal/Beton/Tanah	197,75	0,11
17	Penambangan Terbuka Lain	121,00	0,07
18	Kolam Oksidasi dan Pengelolaan Limbah	81,72	0,05
19	Landas Pacu dan Taxiway	71,30	0,04
20	Waduk Irigasi	63,13	0,04
21	Padang Golf	60,68	0,03

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
22	Kolam Air Tawar Lain	44,47	0,03
23	Permukiman Diperkeras Lain	29,66	0,02
24	Padang Rumput	24,67	0,01
25	Hamparan Lahar/Lava	20,91	0,01
26	Stadion	14,06	0,01
27	Saluran Air	12,14	0,01
28	Bangunan non-permukiman lain	8,83	0,01
29	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	7,92	0,00
30	Area Parkir dan Lapangan	6,37	0,00
31	Embung	3,78	0,00
32	Danau Buatan Lainnya	1,19	0,00
33	Lapangan Diperkeras	0,71	0,00
34	Hutan, Jalur Hijau dan Taman Kota	0,66	0,00
Total		**174.084,34**	100,00

Keterangan: *Data terkini kemungkinan berubah
Sumber: Data dikelola SIPD, DPUTR dan RPJPD

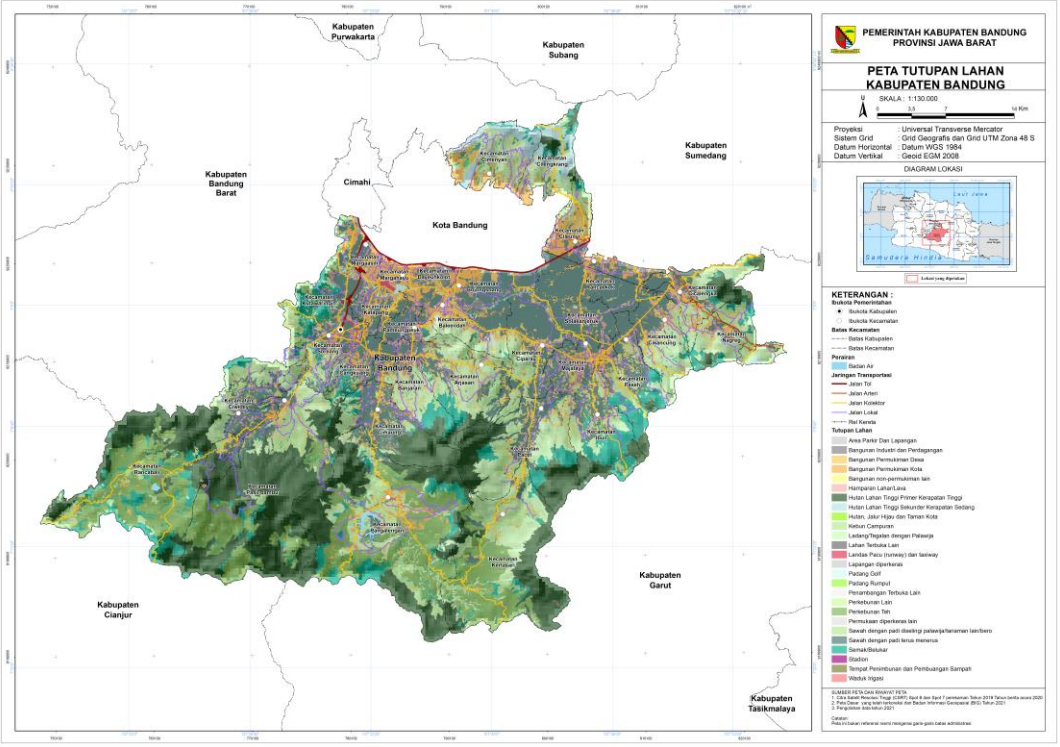

Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

2.1.1.6 Geologi

Kabupaten Bandung memiliki kondisi geologi yang beragam, terutama karena adanya berbagai jenis batuan (litologi) yang terbentuk dari letusan gunung api muda dan tua, seperti endapan aluvial (Ql), koluvium (Qc), serta hasil letusan Wayang-Windu, Papandayan, dan Tangkuban Perahu (Qyw, Qyp, Qyt). Keanekaragaman batuan mulai

dari andesit, basal, hingga desit mencerminkan kompleksitas geologi wilayah yang signifikan dalam mendukung perencanaan infrastruktur, mitigasi bencana, serta pengelolaan sumber daya alam. Struktur geologi ini turut memengaruhi karakteristik tanah, potensi kerawanan terhadap bencana seperti longsor dan gempa bumi, serta daya dukung lingkungan terhadap pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan spasial berbasis geologi diperlukan guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko geologi. Adapun rincian satuan litologi/formasi geologi Kabupaten Bandung disajikan pada tabel berikut.

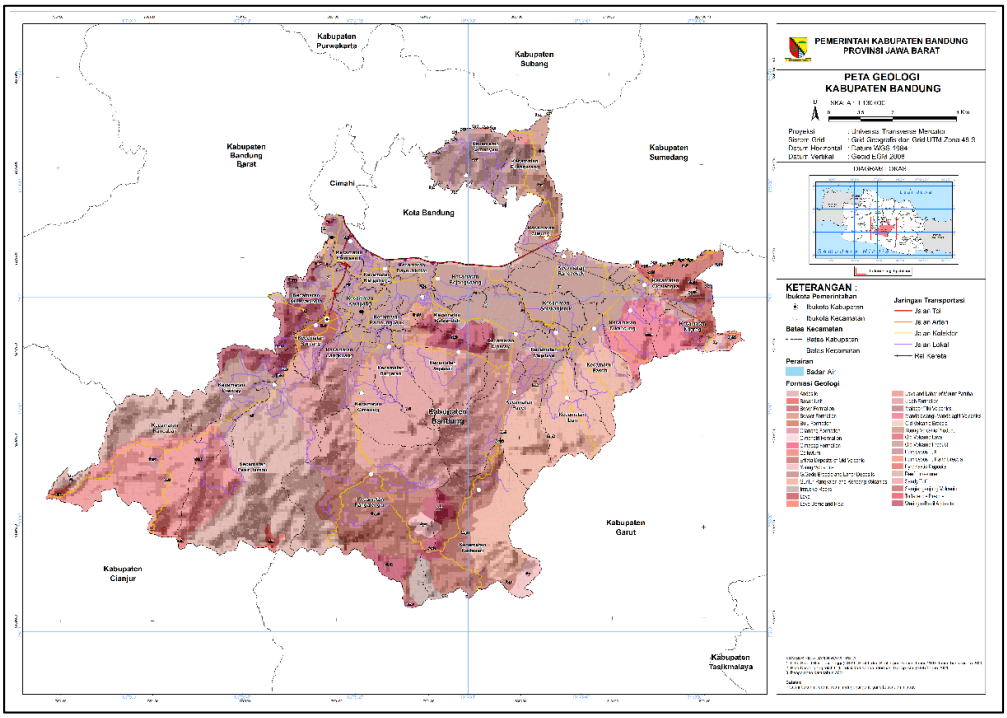

Gambar 2.9. Peta Geologi Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2025

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.2.1 Potensi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Lahan Pertanian

Potensi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor ketiga terbesar penopang perekonomian di Kabupaten Bandung. Wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan. Keberagaman ini memengaruhi pola penggunaan lahan, termasuk dalam sektor pertanian. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian tahun 2024, total luas lahan pertanian di Kabupaten Bandung mencapai 143.928 Ha, yang terdiri atas 28.750 Ha lahan sawah dan 115.178 Ha lahan pertanian bukan sawah. Kecamatan dengan luas lahan pertanian terbesar adalah Pasirjambu dengan 23.319 hektar, diikuti oleh Pangalengan dan Rancabali. Sebaliknya,

Kecamatan Margahayu tercatat memiliki luas lahan pertanian terkecil, yakni hanya 91 Ha.

Sebagian besar kecamatan memiliki dominasi lahan pertanian bukan sawah dibandingkan lahan sawah, mencerminkan pola pertanian yang lebih beragam. Lahan pertanian bukan sawah meliputi area yang digunakan untuk kegiatan pertanian selain budidaya padi atau tanaman lain yang memerlukan genangan air, seperti tegalan, perkebunan, hutan rakyat, ladang, dan padang rumput. Pada tahun 2024, lahan pertanian bukan sawah sebanyak 115.178 hektar dengan Pasirjambu sebagai wilayah terluas (19.66%), diikuti oleh Pangalengan (15.82%), Kertasari (12.36%), Rancabali (12.16%), dan Pacet (5.49%).

Tabel 2.8. Luas Lahan Pertanian (Ha) Kabupaten Bandung per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Lahan Sawah			Lahan Pertanian Bukan Sawah		Luas Lahan Pertanian Total (Ha)
		Hektar (2024)	% terhadap total lahan sawah (2024)	% perubahan (2019-2024)	Hektar (2024)	% terhadap total lahan bukan sawah (2024)	
1	Pasirjambu	677	2,35	-35,15	22.642	19,66	23.319
2	Pangalengan	198	0,69	-57,42	18.216	15,82	18.414
3	Rancabali	460	1,60	-16,06	14.000	12,16	14.460
4	Kertasari	74	0,26	-53,16	14.232	12,36	14.306
5	Pacet	1460	5,08	-19,38	6.324	5,49	7.784
6	Arjasari	1225	4,26	-3,47	3.594	3,12	4.819
7	Cimaung	1287	4,48	-23,35	3.258	2,83	4.545
8	Nagreg	285	0,99	4,40	4.232	3,67	4.517
9	Ibun	1090	3,79	-2,50	3.157	2,74	4.247
10	Paseh	1366	4,75	12,34	2.634	2,29	4.000
11	Ciparay	2542	8,84	-2,68	1.332	1,16	3.874
12	Kutawaringin	1085	3,77	-4,57	2.734	2,37	3.819
13	Cikancung	847	2,95	52,61	2.818	2,45	3.665
14	Rancaekek	3052	10,62	3,46	273	0,24	3.325
15	Cimenyan	110	0,38	-39,23	3.035	2,64	3.145
16	Ciwidey	1397	4,86	4,18	1.658	1,44	3.055
17	Banjaran	1223	4,25	-7,00	1.534	1,33	2.757
18	Cicalengka	795	2,77	-6,03	1.548	1,34	2.343
19	Cileunyi	747	2,60	6,56	1.503	1,30	2.250
20	Cilengkrang	186	0,65	31,91	2.038	1,77	2.224
21	Baleendah	1077	3,75	-14,59	1.004	0,87	2.081
22	Bojongsoang	1424	4,95	-13,38	464	0,40	1.888
23	Solokan Jeruk	1633	5,68	-5,93	87	0,08	1.720
24	Soreang	600	2,09	-28,06	1.027	0,89	1.627
25	Cangkuang	786	2,73	-15,57	777	0,67	1.563
26	Majalaya	1182	4,11	0,42	342	0,30	1.524
27	Margaasih	427	1,49	-20,78	523	0,45	950
28	Pameungpeuk	733	2,55	1,38	59	0,05	792
29	Katapang	593	2,06	-25,50	19	0,02	612
30	Dayeuhkolot	135	0,47	3,05	77	0,07	212
31	Margahayu	54	0,19	-3,45	37	0,03	91
Jumlah		**28.750**			**115.178**		**143.928**

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2025

Lebih detail, diatas juga menunjukan perkembangan lahan sawah per kecamatan dari tahun 2019–2024. Wilayah-wilayah yang memiliki atau cenderung bersifat perkotaan (peri-urban) merupakan wilayah yang mengalami perubahan lahan sawah menjadi non-sawah, seperti Baleendah, Soreang, Bojongsoang, Katapang, Cimenyan dan Margaasih. Jika dilihat dari persentase perubahan, Pangalengan, Kertasari dan Cimenyan menjadi wilayah yang mengalami persen penurunan luas lahan sawah yang paling besar dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan, luas lahan sawah di 8 kecamatan seperti, Cikancung, Paseh dan Cilengkrang bertambah.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan sektor pertanian adalah perubahan guna lahan dari pertanian ke non-pertanian. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, luas lahan sawah mengalami penurunan dari sisi kuantitas, dari 35.682 Ha pada tahun 2014 menjadi hanya 28.750 Ha pada tahun 2024. Penurunan berdampak pada penurunan produksi komoditas pertanian serta kebutuhan strategi peningkatan produksi lain dalam rangka mempertahankan Kabupaten Bandung sebagai wilayah produsen pertanian. Gambar dibawah ini menginformasikan perkembangan luas lahan sawah dapat dilihat pada tabel berikut.

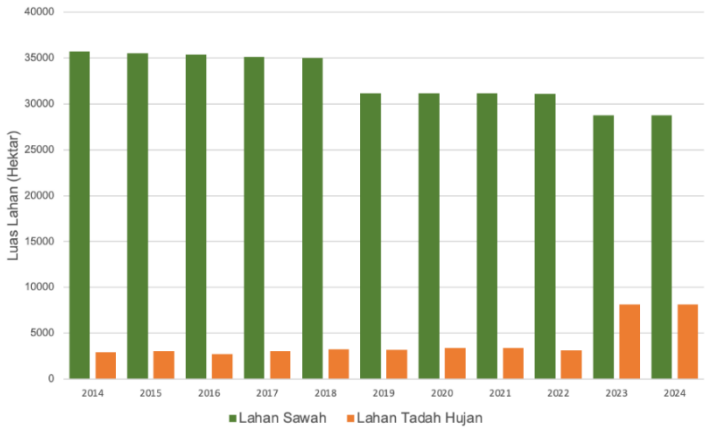

Gambar 2.10. Perkembangan Lahan Sawah dan Lahan Sawah Tadah Hujan 2019 - 2024
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Analisis Bapperida, 2025

Gambar diatas juga menunjukan bahwa terdapat tren peningkatan lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Bandung, yakni sebesar 154,73% dalam kurun waktu lima tahun ke belakang. Potensi peningkatan tersebut memberikan informasi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pertanian melalui peningkatan produksi pangan berbasis padi maupun non-padi. Selanjutnya pada gambar berikutnya menjelaskan sebaran secara spasial dan perkembangan luas lahan sawah tadah hujan per kecamatan di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2024, Rancaekek, Solokanjeruk, dan Bojongsoang mengalami peningkatan luasan lahan sawah, berturut-turut sebesar 820, 776, dan 684 hektar. Sebaliknya, luas lahan kategori ini di Kutawaringin, Majalaya dan Rancabali menurun, di samping 6 kecamatan lainnya.

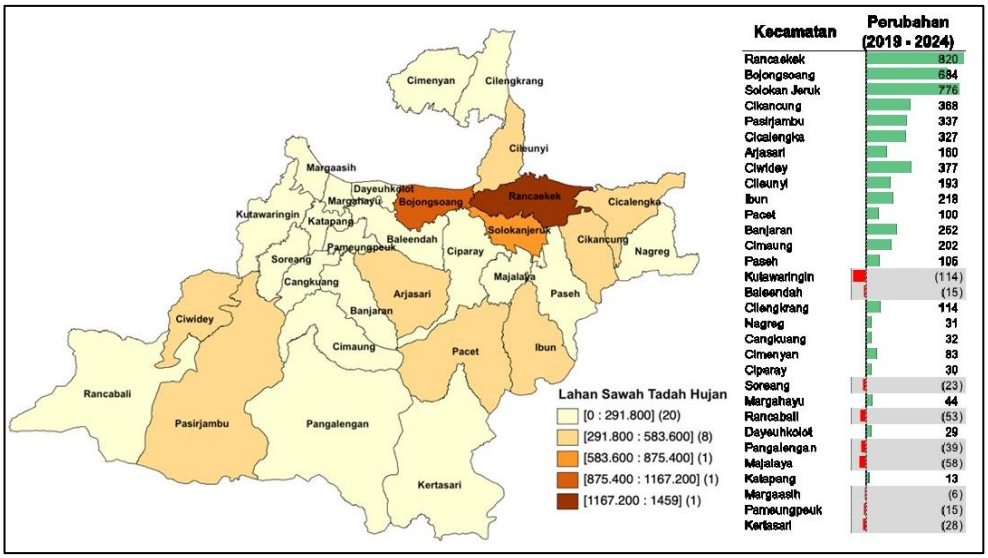

Gambar 2.11. Peta Sebaran dan Perkembangan Lahan Sawah Tadah Hujan per Kecamatan

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2025

Perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Bandung diperkirakan akan terus meningkat, seiring dengan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang di Lindungi dengan Rencana Tata Ruang, luas LSD yang sesuai dengan Kawasan tanaman pangan /sub zona tanaman pangan tercatat sebesar 16.915,90 Ha. Data lengkap mengenai luas LSD tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah Pengendalian perubahan guna lahan pada Kawasan LSD menjadi salah satu isu strategi pembangunan yang diterjemahkan dalam program prioritas pembangunan peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

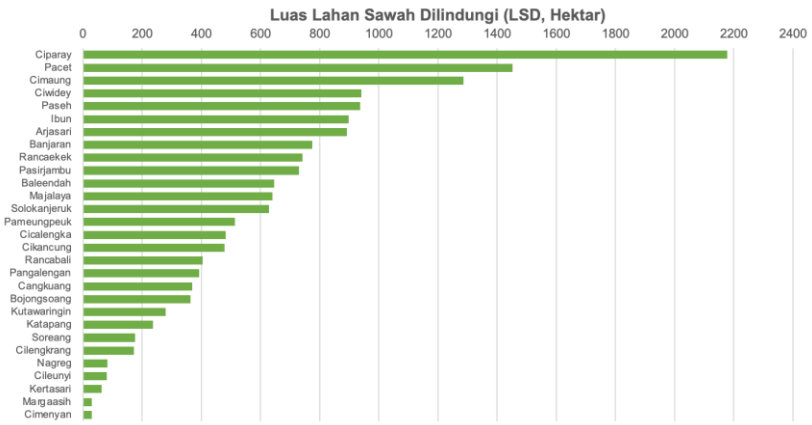

Gambar 2.12. Luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Kabupaten Bandung

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2025

Perkembangan Produksi Pertanian

Gambar dibawah memetakan sebaran potensi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung. Secara spasial, sub sektor tanaman pangan terkonsentrasi di kecamatan, seperti Ciparay, Solokanjeruk, Majalaya, Baleendah, Rancaekek, dan kecamatan lain yang berbatasan dengan kota Bandung dan memiliki ketinggian yang relatif rendah (±700 mdpl). Sub sektor hortikultura dan perkebunan berlokasi di wilayah yang memiliki ketinggian relatif lebih tinggi (≥ 700 mdpl) di bagian selatan dan utara, seperti Cimenyan, Cilengkrang, Pangalengan, Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, Kertasari, dan wilayah lainnya. Seperti halnya perkebunan, peternakan terpusat di wilayah dataran tinggi, seperti Ciwidey, Pangalengan, Kertasari, Ibun, Arjasari, dan Pasirjambu.

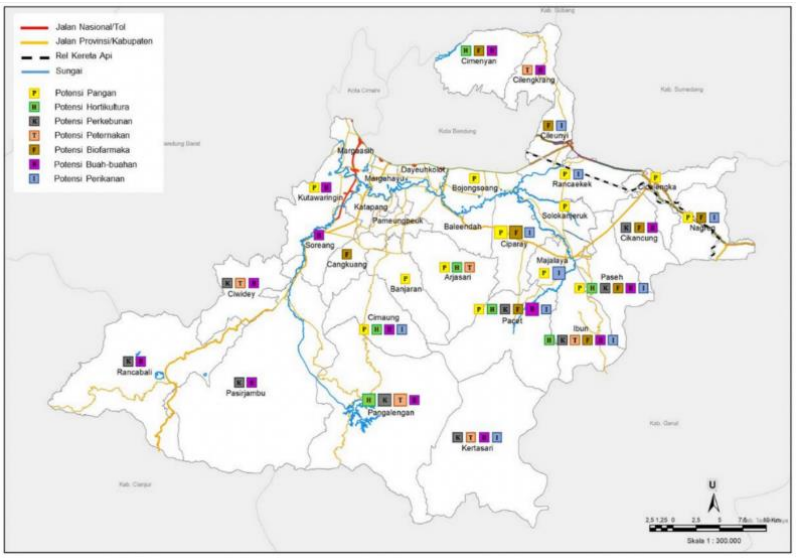

Gambar 2.13. Peta Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD, Masterplan Perekonomian Kabupaten, 2021 Bandung

Potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan Kabupaten Bandung dapat dilihat juga dari kontribusi produksi terhadap produksi pada tingkat Provinsi Jawa Barat, tabel dibawah ini memperlihatkan perkembangan produksi komoditas unggulan di Kabupaten Bandung tahun 2021–2024 dan kontribusinya terhadap produksi Provinsi Jawa Barat. Pada sub sektor pertanian, hortikultura dan perkebunan memberikan kontribusi berkisar antara 20-60%. Padi dan jagung berkontribusi sekitar 6% dan 9% pada total produksi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Adapun, 20% dari total produksi ubi jalar Provinsi Jawa Barat berasal dari Kabupaten Bandung. Sehingga, beberapa komoditas sayuran – seperti, bawang merah, tomat, kubis, cabai merah, wortel, cabe rawit, dan kentang – dan perkebunan – seperti, kopi, teh, dan tembakau – merupakan komoditas unggulan daerah yang memiliki daya saing dalam menyumbangkan ketersedian pangan di Jawa Barat.

Disamping itu, jeruk lemon, jeruk siam, sukun, dan alpukat menjadi komoditas penyumbang pasokan buah-buahan di Jawa Barat.

Tabel 2.9. Perkembangan Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Unggulan Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2024

KOMODITAS	PRODUKSI (TON)				% PERTUMBUHAN (RERATA TAHUNAN)	KONTRIBUSI TERHADAP PRODUKSI PROV JAWA BARAT (%, 2024)
	2021	2022	2023	2024		
TANAMAN PANGAN						
Padi	657.813	630.712	557.334	511.292	-8,01	5,93
Jagung	107.154	118.011	85.438	90.390	-3,89	8,96
Ubi jalar	33.567	50.170	46.436	54.189	19,57	8,50
Ubi kayu	82.244	120.041	82.011	82.858	5,10	7,94
SAYURAN						
Kentang	70.678	72.366	39.574	50.200	-5,36	20,11
Tomat	31.139	27.966	32.099	89.938	61,59	33,98
Cabai merah	49.481	46.712	40.602	89.328	33,78	27,55
Cabai rawit	9.177	12.481	9.422	37.862	104,45	23,12
Bawang merah	58.900	77.279	65.515	87.633	16,58	43,84
Wortel	51.834	61.734	32.971	26.023	-16,19	25,97
Kubis	66.303	50.018	46.596	69.102	5,63	28,47
BUAH-BUAHAN						
Alpukat	13.164	28.314	8.292	21.120	66,36	20,96
Jambu biji	4.504	15.614	4.321	9.993	101,87	14,03
Jeruk siam	10.424	20.149	6.649	18.659	68,97	30,19
Sukun	3.707	4.561	3.528	6.693	30,03	26,27
Jeruk lemon	1.797	4.561	3.135	17.334	191,82	60,58
Stroberi	6.262	24.665	22.440	27.808	102,93	99,00
Pisang	27.487	24.454	15.553	27.660	10,14	2,24
BIOFARMAKA						
Jahe	448	606	992	723	23,97	1,48
Kunyit	193	219	438	447	38,55	1,61
Serai	37	206	563	395	200,69	4,32
Jeruk nipis	82	227	209	335	76,50	9,42
Kapulaga	69	93	452	215	122,97	0,24
PERKEBUNAN						
Kopi	7.680	8.183	8.318	8.567	3,73	52,73
Teh	3.153	3.177	3.139	3.170	0,18	3,69
Tembakau	1.486	1.697	1.907	1.938	9,40	22,69
PETERNAKAN						
Susu perah	68.884	62.025	68.867	70.901	1,34	28,75
Telur unggas	5.956	5.491	5.813	5.975	0,28	4,76
Daging sapi	1.083	6.395	4.418	2.176	136,29	5,79
Daging unggas	2.495	2.354	2.382	2.431	-0,81	3,86

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Kabupaten Bandung juga termasuk wilayah di Jawa Barat yang memiliki potensi biofarmaka. Komoditas biofarmaka dengan produksi tertinggi di Kabupaten Bandung meliputi jahe, kunyit, serai, jeruk nipis, dan kapulaga. Tabel di atas menjelaskan dalam kurun waktu 2021 – 2024 komoditas biofarmaka tersebut mengalami lonjakan produksi dengan rata-rata pertumbuhan tahunannya serai (> 200%) dan kapulaga (> 120%). Selanjutnya dari sub sektor peternakan, susu perah menyumbang 28% pada total produksi Jawa Barat. Wilayah yang menjadi pusat produsen susu sapi perah di Kabupaten Bandung

adalah Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali, Cilengkrang, Arjasari dan Kertasari.

Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan yang dominan di Kabupaten Bandung adalah padi, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu. Berdasarkan rata-rata tahunan empat komoditas tanaman pangan tersebut, ubi jalar dan ubi kayu mengalami peningkatan jumlah produksi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berturut-turut 19,57% dan 5,10%; sedangkan, padi dan jagung menurun dalam periode yang sama.

Padi

Jumlah produksi padi di Kabupaten Bandung cenderung menurun dalam kurun waktu lima tahun ke belakang. Grafik dibawah ini menunjukkan tren produksi padi di Kabupaten Bandung cenderung mengalami penurunan, tetapi produktivitasnya yang cenderung naik dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, produksi padi tercatat sebesar 711.958 ton dan terus menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2024, yaitu 511.292 ton; begitu pula, luas panen padi mengalami penurunan dari 112.474 hektar di tahun 2019 menjadi 79.889 hektar. Indeks pertanaman padi perlu menjadi perhatian khusus sebagai salah satu langkah strategi untuk meningkatkan produksi padi Kabupaten Bandung.

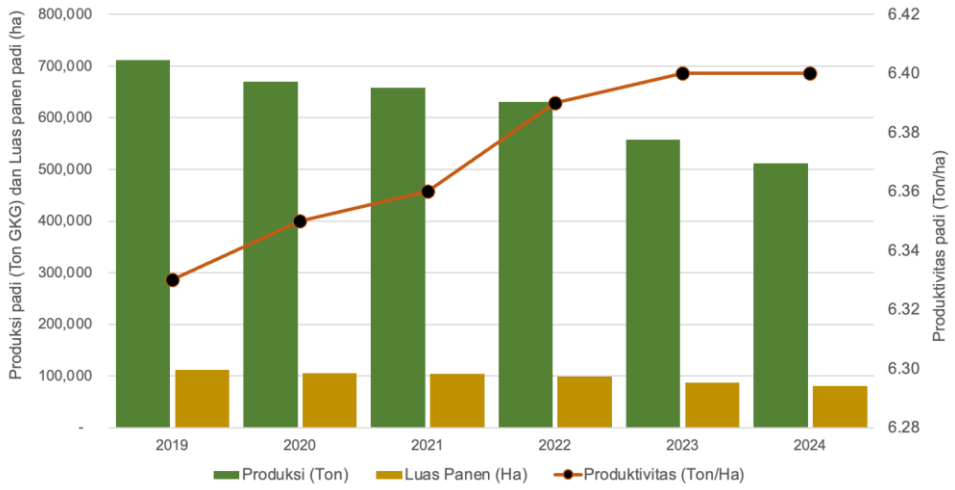

Gambar 2.14. Perkembangan Produksi, Produktivitas, dan Luas Panen Padi Kabupaten Bandung Periode 2019-2024

Sumber: Data Dikelola SIPD, Profil Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tahun 2024

Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam sektor pertanian yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan pemanfaatan lahan, perubahan iklim, penurunan kualitas infrastruktur irigasi, maupun kebijakan pertanian yang belum optimal. Menariknya, meskipun produksi dan luas panen menurun, grafik juga memperlihatkan bahwa produktivitas padi justru mengalami sedikit peningkatan dari

6,33 ton/ha pada tahun 2019 menjadi 6,40 ton/ha pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan teknologi budidaya pertanian padi, indeks pertanaman, dan mekanisasi pertanian masih dapat dipertahankan, namun keberlanjutan produksi padi tetap membutuhkan perhatian serius, terutama dalam menjaga ketersediaan lahan dan infrastruktur pendukung pertanian.

Kondisi produksi komoditas padi di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung menunjukkan variasi dari produktivitas dan pola tanam. Satu kecamatan yang memiliki keunggulan dalam komoditas padi belum tentu memiliki kinerja serupa pada komoditas pertanian lainnya, begitu pula sebaliknya. Untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang memiliki kinerja terbaik pada komoditas padi, rata-rata produktivitas selama tiga tahun terakhir dapat dijadikan sebagai indikator yang representatif. Tabel berikut menyajikan lima kecamatan dengan rata-rata produkvitas tertinggi untuk komoditas padi, yang mencerminkan potensi unggulan wilayah dalam sektor pertanian.

Tabel 2.10. Lima Kecamatan Sentra Produksi Padi Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Produksi (Ton)			Produkvitas (Ton/Ha)			Rata-Rata Provitas (Ton/Ha)
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Rancaekek	50.828	53.099	47.497	6,69	6,57	6,46	6,57
2.	Solokan Jeruk	31.496	25.806	23.552	6,64	6,53	6,44	6,54
3.	Majalaya	23.374	20.984	21.942	6,62	6,52	6,45	6,53
4.	Bojongsoang	31.274	20.273	26.193	6,68	6,48	6,40	6,52
5.	Katapang	13.800	13.681	9.552	6,58	6,49	6,44	6,51

Sumber: Data Dikelola SIPD, Profil Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tahun 2025 (Diolah)

Palawija

Produksi tanaman palawija di Kabupaten Bandung menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Beberapa komoditas, seperti jagung dan ubi kayu, memperlihatkan tren peningkatan produksi secara umum, meskipun sempat mengalami lonjakan pada tahun 2024. Di sisi lain, produksi komoditas seperti kacang tanah justru mengalami sedikit penurunan. Dinamika ini mencerminkan bahwa perubahan produksi palawija dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pola tanam yang terus berkembang serta fluktuasi permintaan pasar yang berdampak pada minat petani dalam membudidayakan komoditas tertentu.

Tabel 2.11. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Komoditas Palawija Utama Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2024

KOMODITAS	INDIKATOR				PERTUMBUHAN (% RERATA TAHUNAN)	WILAYAH SENTRA PRODUKSI (% KONTRIBUSI)
	2021	2022	2023	2024		
Jagung						Nagreg (32,56%), Cileunyi (3,37%), Cicalengka (4,03%),
Produksi (Ton)	107.154	118.011	85.438	90.390	-3,89	
Luas Panen (ha)	15.906	17.408	12.587	13.352	-4,06	

KOMODITAS	INDIKATOR				PERTUMBUHAN (% RERATA TAHUNAN)	WILAYAH SENTRA PRODUKSI (% KONTRIBUSI)
	2021	2022	2023	2024		
Produktivitas (Ton/ha)	6,74	6,78	6,79	6,77	0,16	Pacet (3,26%), Cikancung (11,31%)
Ubi jalar						Cimaung (16,21%), Arjasari (6,93%), Paseh (3,07%), Pacet (2,04%), dan Cileunyi (3,28%)
Produksi (Ton)	33.567	50.170	46.436	54.189	19,57	
Luas Panen (ha)	2.503	3.682	3.410	3.521	14,32	
Produktivitas (Ton/ha)	13,41	13,63	13,62	15,39	4,85	
Ubi kayu						Cileunyi (11,93%), Paseh (7,30%), Cangkuang (12,92%), Cimaung (5,85%), dan Ciparay (12,07%)
Produksi (Ton)	82.244	120.041	82.011	82.858	5,10	
Luas Panen (ha)	3.896	5.670	3.881	4.201	7,41	
Produktivitas (Ton/ha)	21,11	21,17	21,13	19,72	-2,19	

Sumber: Data Dikelola SIPD, Profil Dinas Pertanian, 2024

Tabel diatas memperlihatkan komoditas palawija Kabupaten Bandung periode 2021–2024 yang cenderung naik untuk komoditas ubi jalar dan ubi kayu serta menurun untuk jagung. menunjukkan fluktuasi pada empat komoditas utama. Jagung tercatat mengalami penurunan produksi dan luas panen berturut-turut 3,89% dan 4,06% dalam rata-rata tahunan. Kecamatan penyumbang produksi jagung adalah Nagreg, Cileunyi, Cicalengka, Pacet, dan Cikancung; wilayah ini termasuk pusat *corn-belt* (sabuk jagung) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan, laju pertumbuhan produksi dan luas panen ubi jalar naik sebesar 19,57% dan 14,32% dalam rata-rata tahunan. Menariknya, komoditas ini juga meningkat dari sisi produktivitas per hektar nya sebesar 4,85% menjadi 15,39 ton/ha pada tahun 2024. Ubi kayu menjadi komoditas palawija ketiga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi pangan. Produksi dan luas panen ubi kayu mengalami peningkatan 5,10% dan 7,41% rerata tahunan pada kurun waktu 2021-2024. 19 – 21 ton/hektar produktivitas ubi kayu yang dapat dicapai oleh petani di Kabupaten Bandung. Dua hal yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pengembangan komoditas palawija, adalah: (1) penguatan sub sistem hulu produksi komoditas tersebut, baik berupa fasilitasi sarana produksi ataupun peningkatan kualitas infrastruktur produksi, dan (2) pengembangan hilirisasi dan industri jagung, ubi jalar dan ubi kayu.

Holtikultura

Sayuran

Secara keseluruhan, performa produksi komoditas sayuran menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dan tantangan dalam mencapai produksi yang konsisten selama periode 2021-2024. Capaian produksi komoditas pertanian seperti cabai, kentang, tomat, bawang merah, dan kubis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan permintaan pasar, kondisi cuaca, dan teknik budidaya yang digunakan. Komoditas sayuran menjadi salah satu komoditas yang mempengaruhi inflasi Kabupaten Bandung; harga yang sangat

fluktuatif dan bergantung akan pasar menunjukan arah kebijakan pengembangan produksi dan hilirisasi produk.

Tabel 2.12. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Komoditas Sayuran Utama Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2024

KOMODITAS	PRODUKSI (TON)				% PERTUMBUHAN (RERATA TAHUNAN)	WILAYAH SENTRA PRODUKSI
	2021	2022	2023	2024		
Kentang						Pangalengan, Cimenyan, Kertasari, Paseh, Rancabali
Produksi (Ton)	70.678	72.366	39.574	50.200	-5,36	
Luas panen (Ha)	3.390	3.642	1.932	2.966	4,67	
Produktivitas (Ton/ha)	20,85	19,87	20,48	16,92	-6,33	
Tomat						Pangalengan, Cimaung, Paseh, Cimenyan, Rancabali
Produksi (Ton)	31.139	27.966	32.099	89.938	61,59	
Luas panen (Ha)	2.131	1.593	1.700	2.174	3,12	
Produktivitas (Ton/ha)	14,61	17,56	18,88	41,37	48,93	
Cabai merah						Pangalengan, Cimaung, Paseh, Cimenyan, Pacet
Produksi (Ton)	49.481	46.712	40.602	89.328	33,78	
Luas panen (Ha)	5.759	5.041	4.546	4.884	-4,95	
Produktivitas (Ton/ha)	8,59	9,27	8,93	18,29	36,34	
Cabai rawit						Pangalengan, Cimenyan, Pacet, Pacet, Cimaung
Produksi (Ton)	9.177	12.481	9.422	37.862	104,45	
Luas panen (Ha)	1.342	1.518	1.490	1.843	11,65	
Produktivitas (Ton/ha)	6,84	8,22	6,32	20,54	74,01	
Bawang merah						Cimenyan, Cimaung, Pacet, Pangalengan, Arjasari
Produksi (Ton)	58.900	77.279	65.515	87.633	16,58	
Luas panen (Ha)	5.002	6.995	5.507	7.011	15,29	
Produktivitas (Ton/ha)	11,78	11,05	11,90	12,50	2,19	
Wortel						Pangalengan, Kertasari, Cimaung, Rancabali, Pasirjambu
Produksi (Ton)	51.834	61.734	32.971	26.023	-16,19	
Luas panen (Ha)	2.343	2.991	1.518	1.972	2,77	
Produktivitas (Ton/ha)	22,12	20,64	21,72	13,20	-13,57	
Kubis						Pangalengan, Kertasari, Cimenyan, Rancabali, Paseh
Produksi (Ton)	66.303	50.018	46.596	69.102	5,63	
Luas panen (Ha)	2.680	2.368	1.978	2.823	4,87	
Produktivitas (Ton/ha)	24,74	21,12	23,56	24,48	0,27	

Sumber: BPS Kabupaten Bandung 2024, 2025

Tabel diatas menyajikan produksi, luas panen, dan produktivitas sayuran utama Kabupaten Bandung tahun 2021–2024 yang menunjukkan variasi antar komoditas yang mencolok. Bawang merah, cabai merah, cabe rawit dan tomat mengalami pertumbuhan positif selama periode tersebut. Produksi tomat mengalami penurunan pada tahun 2022,

namun berhasil meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, komoditas kentang dan kubis cenderung menurun hingga 2022, lalu mulai menunjukkan pemulihan pada 2024. Sementara itu, bawang merah dan cabai rawit menunjukkan tren yang fluktiatif dari tahun ke tahun. Dinamika ini menegaskan pentingnya intervensi pada perencanaan produksi yang lebih adaptif dan penguatan sistem pendukung budidaya untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas sektor hortikultura daerah.

Buah-Buahan

Komoditas hortikultura lain yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung adalah alpukat, jeruk siam, jeruk lemon, jambu biji, sukun, stroberi, dan pisang. Tabel berikut menunjukan perkembangan produksi dan wilayah sentra produksi komoditas tersebut. Kontribusi terbesar terhadap total produksi Provinsi Jawa Barat adalah stroberi (sekitar 99%), jeruk lemon (60,58%), dan jeruk siam (30,19%).

Tabel 2.13. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Komoditas Buah-buahan Utama Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2024

KOMODITAS	PRODUKSI (TON)				% PERTUMBUHAN (RERATA TAHUNAN)	WILAYAH SENTRA PRODUKSI
	2021	2022	2023	2024		
Alpukat	13.164	28.314	8.292	21.120	66,36	Pangalengan, Cicalengka, Cikancung, Arjasari, Cileunyi
Jeruk siam	10.424	20.149	6.649	18.659	68,97	Ciwidey, Ibun, Paseh, Cikancung, Cimenyan, Arjasari
Jeruk lemon	1.797	4.561	3.135	17.334	191,82	Pangalengan, Paseh, Cimenyan, Pasirjambu, Arjasari
Jambu biji	4.504	15.614	4.321	9.993	101,87	Cikancung, Baleendah, Pangalengan, Nagreg, Cileunyi
Sukun	3.707	4.561	3.528	6.693	30,03	Ibun, Kutawaringin, Cimenyan, Nagreg, Cileunyi
Stroberi	6.262	24.665	22.440	27.808	102,93	Rancabali, Pasirjambu, Ciwidey
Pisang	27.487	24.454	15.553	27.660	10,14	Pangalengan, Paseh, Cimenyan, Cileunyi, Baleendah

Sumber: BPS Kabupaten Bandung 2024

Penataan wilayah sentra produksi stroberi – Rancabali, Pasirjambu, dan Ciwidey – dan jeruk – Ciwidey, Cimenyan, Pangalengan, Paseh, Arjasari – baik dari segi infrastruktur kewilayahan maupun proses bisnis integrasi hulu-hilir (rantai pasok yang berkelanjutan) dipandang merupakan salah satu langkah strategi Kabupaten Bandung dalam mencirikan identitas produk unggulan daerah.

Biofarma

Data produksi di bawah ini memberikan gambaran potensi tanaman obat di Kabupaten Bandung. Komoditas seperti jahe, kunyit, serai, kapulaga memiliki jumlah produksi yang tinggi. Selain itu, tanaman obat lainnya seperti temulawak, lengkuas, dan mengkudu/pace juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Komoditas Jahe merupakan produksi tertinggi dengan 991.537 kg, disusul oleh Serai Hijau sebanyak 563.483 kg dan Kapulaga 452.213 kg. Tanaman obat dengan produksi terendah adalah Temuireng dengan 11.692 kg. Data ini memberikan gambaran skala produksi berbagai tanaman obat yang penting bagi industri kesehatan atau kuliner. Lebih jelas mengenai produksi biofarmaka dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

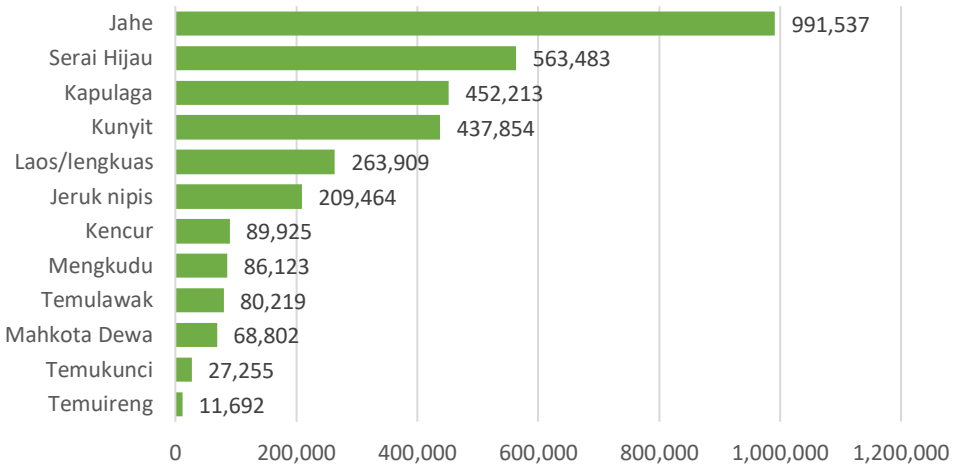

Gambar 2.15. Produksi Komoditas Biofarma Kabupaten Bandung Tahun 2024

Sumber: Data Dikelola SIPD, Profil Dinas Pertanian, 2024

Berdasarkan data produksi dari BPS Kabupaten Bandung (2024), wilayah sentra produksi jahe terletak di Kecamatan Soreang, Paseh, Ibun, Cileunyi, dan Pacet. Serai terkonsentrasi di wilayah Kertasari, Rancabali, Paseh, Cikancung, dan Pacet. Untuk komoditas kapulaga, wilayah Ibun, Cimaung, Cimenyan, dan Rancabali merupakan pusat produksi di Kabupaten Bandung. Di samping itu, kunyit yang berkontribusi sekitar 2% terhadap produksi Jawa Barat terpusat di wilayah Paseh, Pacet, Rancabali, Cimaung dan Kutawaringin.

Perkebunan

Produksi perkebunan di Kabupaten Bandung cenderung meningkat, produksi kopi mengalami peningkatan yang signifikan selama periode lima tahun tersebut. Produksi teh cenderung stabil dengan fluktuasi kecil selama periode tersebut. Produksi tembakau menunjukan sedikit peningkatan pada tahun 2024 seperti tersaji pada gambar berikut.

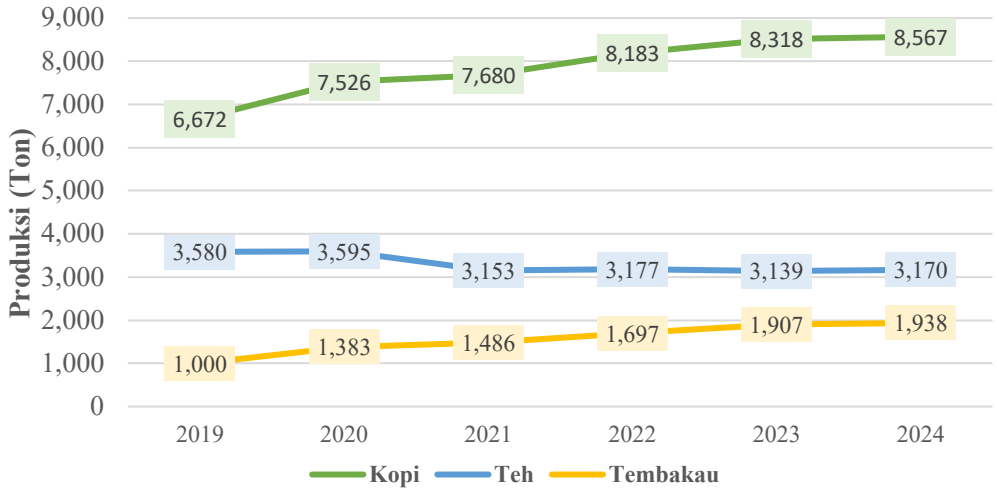

Gambar 2.16. Perkembangan Produksi Perkebunan Kabupaten Bandung, 2019 – 2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Profil Dinas Pertanian, 2024

Secara umum, dari ketiga komoditas tersebut, kopi dan tembakau mengalami pertumbuhan produksi yang positif, sedangkan teh menunjukkan fluktuasi pada beberapa tahun kebelakang. Ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan strategi pengembangan komoditas pertanian di masa mendatang, khususnya untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan tiap sektor.

Tabel 2.14. Performa Tiga Komoditas Sub Sektor Perkebunan

Jenis Komoditas	Tahun 2024		
	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Provitas (Kg/Ha)
Kopi Arabika	10.532,15	8.566,89	813,40
Tembakau	1.761	1937,73	1100,36
Teh	1.674,00	3.170	1.898,03

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2025 (diolah)

Peternakan

Sektor peternakan merupakan salah satu penopang utama ketahanan pangan dan perekonomian daerah di Kabupaten Bandung. Untuk mendukung perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, disajikan data produksi peternakan yang mencakup populasi ternak utama, antara lain sapi, domba, kambing, dan ayam. Sub sektor peternakan dapat disederhanakan menjadi dalam tiga komoditas saja, yaitu daging, susu, dan telur. Jumlah produksi pada tahun 2024 di Kabupaten Bandung untuk seluruh komoditas tersebut adalah: daging (48.030 ton), susu (75.901,13 ton), dan telur (7.168 ton). Adapun populasi hewan ternak pada tahun tersebut di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu: sapi potong (17.250 ekor jantan dan 6.215 ekor betina), sapi perah (5.580 ekor jantan dan 19.869 ekor betina), domba (95.634 ekor jantan dan 137.465 ekor betina), kambing (7.444 ekor jantan dan 10.240 ekor betina), serta ayam ras pedaging (4.129.675 ekor jantan). Lima hewan ternak tersebut dapat menjadi gambaran dari performa sub sektor ini. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai data produksi

peternakan, termasuk lima kecamatan dengan masing-masing jumlah hewan ternak terbanyak dapat dilihat pada tabel-tabel tabel di bawah ini.

Tabel 2.15. Kontribusi Populasi Sapi Perah (ekor) dan Produksi Susu Sapi (ton) Tahun 2024

Daerah	Populasi Sapi Perah 2024 (ekor)	Produksi Susu Sapi 2024* (ton)
Kab Bandung	28.478	70.901,13
Provinsi Jawa Barat	99.692	246.619,97
Kontribusi Kab Bandung ke Provinsi	28,45% *No. 1 di Jawa Barat	28,75% *No. 1 di Jawa Barat

Sumber: Data Dikelola SIPD, Jawa Barat Dalam Angka 2024

Tabel 2.16. Data populasi Peternakan Unggulan dan Pusat Produksi Kabupaten Bandung Tahun 2024

Komoditas	Jumlah*	Wilayah Sentra Produksi
Sapi perah**	23.218	Pangalengan (59,65%), Cilengkrang (17,06%), Kertasari (12,71%), Pasirjambu (6,97%), Arjasari (3,60%)
Sapi potong**	19.098	Cikancung (70,38%), Kutawaringin (11,52%), Cimenyan (9,52%), Pasirjambu (4,48%), Cileunyi (4,10%)
Domba**	151.015	Ibun (73,59%), Arjasari (7,90%), Rancaekek (7,56%), Kertasari (5,82%), Cimaung (5,13%)
Kambing**	6.120	Ciwidey (22,48%), Pasirjambu (21,68%), Kertasari (19,54%), Rancabali (18,61%), Kutawaringin (17,68%)
Ayam ras pedaging	2.613.400	Cikancung (40,41%), Arjasari (30,38%), Paseh (10,94%), Pasirjambu (10,42%), Ibun (7,84%)

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2025 (diolah)
Keterangan: * Jumlah ekor hewan berdasarkan lima kecamatan pusat produksi. ** dihitung berdasarkan ternak jantan dan betina

Perikanan

Perikanan merupakan salah satu potensi yang cukup penting di Kabupaten Bandung dimana pembenihan dan pengolahan menjadi segmen utama perikanan di Kabupaten Bandung. Tabel di bawah ini menampilkan jumlah produksi berbagai komoditas ikan, dimana ikan mas, nila, dan lele mendapatkan penekanan khusus. Adapun jumlah produksi ikan hias yang dilaporkan dalam satuan ekor, karena konteks pada kategori ini adalah bukan ikan yang dikonsumsi atau dimakan, seperti halnya ikan-ikan lainnya.

Tabel 2.17. Produksi Perikanan di Kabupaten Bandung

No	Jenis Komoditas	Total Produksi (Ton)					Laju Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
1.	Ikan Mas	3.778,93	3,790.81	1.364,12	1.531,93	1.264,08	-66,55%
2.	Ikan Nila	4.425,21	4,457.54	2.962,30	3.093,62	3.256,65	-26,41%
3.	Ikan Lele	5.855,57	6,216.490	11.080,76	11.343,11	12.101,98	106,67%
4.	Aneka Ikan	621,98	619.39	128,30	110,19	58,07	-90,66%
5.	Ikan Hias	1.437.241	1.230.906	5.365.261	5.535.570	5.800.624	303,59%

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa ikan hias mengalami peningkatan produksi terbesar sepanjang lima tahun terakhir (2020-2024) ini, di mana nilainya menjadi sekitar empat kali lipatnya (303,59%). Perolehan ini jauh lebih besar daripada jika dibandingkan dengan rentang lima tahun sebelumnya (2019-2023), walaupun nilainya tidak berbeda jauh (292,77%). Lonjakan peningkatan terhadap ikan hias terjadi dari tahun 2021 ke 2022

(335,88%). Oleh karena itu, perlu untuk mempertimbangkan budidaya ikan hias yang didominasi oleh beberapa kecamatan berikut, yaitu: **Ibun (33,18%), Baleendah (20,29%), Ciparay (17,56%), Pacet (16,70%), dan Cangkuang (5,53%)**.

Besarnya luas lahan untuk budidaya ikan hias di Kabupaten Bandung sebesar 1,11 Ha. Diartikan, untuk setiap 0,01 Ha lahan perikanan di kabupaten Bandung, rata-rata ikan hias yang dihasilkan sebesar 49.868 ekor. Angka tersebut menggambarkan rata-rata provitas dari ikan hias di seluruh wilayah kabupaten Bandung. **Data menunjukkan bahwa kecamatan Cangkuang memiliki provitas ikan hias tertinggi**, karena sekalipun hanya mendominasi 5% dari total produksi ikan hias di kabupaten Bandung, besarnya provitasnya sekitar enam kali lipat dari provitas kabupaten Bandung (306.034 ekor). **Dua kecamatan lainnya yang juga memiliki provitas di atas rata-rata, yaitu: Baleendah (160.422 ekor) dan Ibun (83.491 ekor)**. Daerah Pacet dan Ciparay masuk ke dalam lima besar berdasarkan total produksi ikan hias, hanya karena dipengaruhi oleh luas lahan saja. Pacet menguasai sepertiga dari luas lahan keseluruhan (0,37 Ha), sedangkan Ciparay hanya sekitar seperempatnya saja (0,28 Ha). Hal ini, dapat dibuktikan dari besarnya provitas yang di bawah rata-rata kabupaten Bandung, di mana Pacet (24.980 ekor) dan Ciparay (34.708 ekor). Penurunan terbesar terjadi pada kategori aneka ikan, di mana jumlahnya menjadi sekitar sepersepuluhnya pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut, diduga terjadi karena berpindahnya produksi ke sektor lainnya, seperti ikan lele yang naik lebih dari dua kali lipatnya (106,67%) selama lima tahun terakhir ini.

2.1.2.2 Potensi Sektor Wisata

Sektor Pariwisata merupakan sektor potensial yang sedang meningkat secara pesat di Kabupaten Bandung. Adapun proses pengembangannya tidak terlepas dari dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA). Pada dokumen tersebut kawasan pariwisata terbagi kedalam beberapa klasifikasi dengan jumlah 12 kawasan, meliputi:

1. Kawasan Agrowisata Edukatif Ciwidey
2. Kawasan Ekowisata Pegunungan Kawah Putih
3. Kawasan Pariwisata Perairan Danau Situ Patenggang
4. Kawasan Pariwisata Seni dan Budaya Tradisional Sunda – Jelekong
5. Kawasan Pariwisata Petualangan Alam Lamajang
6. Kawasan Agrowisata Rekreatif Malabar
7. Kawasan Pariwisata Olahraga Air Cileunca
8. Kawasan Geowisata Panas Bumi Kamojang
9. Kawasan Pariwisata Alam Hutan Paseh
10. Kawasan Rekreasi Alam Cicalengka – Nagreg

11. Kawasan Pariwisata Sejarah Cileunyi – Rancaekek
12. Kawasan Geowisata Cimenyan – Cilengkrang

Berdasarkan Dokumen Riparda Kabupaten Bandung tahun 2019, Kabupaten Bandung memiliki beragam destinasi wisata yang tersebar di berbagai Daerah Pengembangan Kawasan (DPK) dengan keunikan masing-masing. DPK Soreang menonjolkan wisata olahraga, rekreasi buatan, budaya, serta kawasan pariwisata perkotaan. DPK Dayeuhkolot–Bojongsoang–Baleendah dikenal melalui desa wisata, rekreasi buatan, serta wisata budaya dan sejarah. DPK Majalaya menghadirkan wisata alam/tirta, rekreasi buatan, wisata sejarah, hingga pariwisata perkotaan. Di sisi lain, DPK Pacira menawarkan wisata alam, agrowisata, wisata buatan tirta, dan kuliner. DPK Cicalengka lebih dikenal dengan wisata kriya, rekreasi buatan, serta wisata sejarah. DPK Pangalengan menjadi tujuan unggulan untuk wisata alam tirta (situ), wisata edukasi, dan wisata minat khusus. Sementara itu, DPK Cimenyan–Cilengkrang–Cileunyi menghadirkan kombinasi desa wisata, wisata minat khusus, dan wisata alam. Seluruh kawasan ini memperlihatkan kekayaan potensi pariwisata Kabupaten Bandung yang variatif, mulai dari alam, budaya, hingga rekreasi modern. Secara akses pelayanan DPK yang ada di Kabupaten Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:

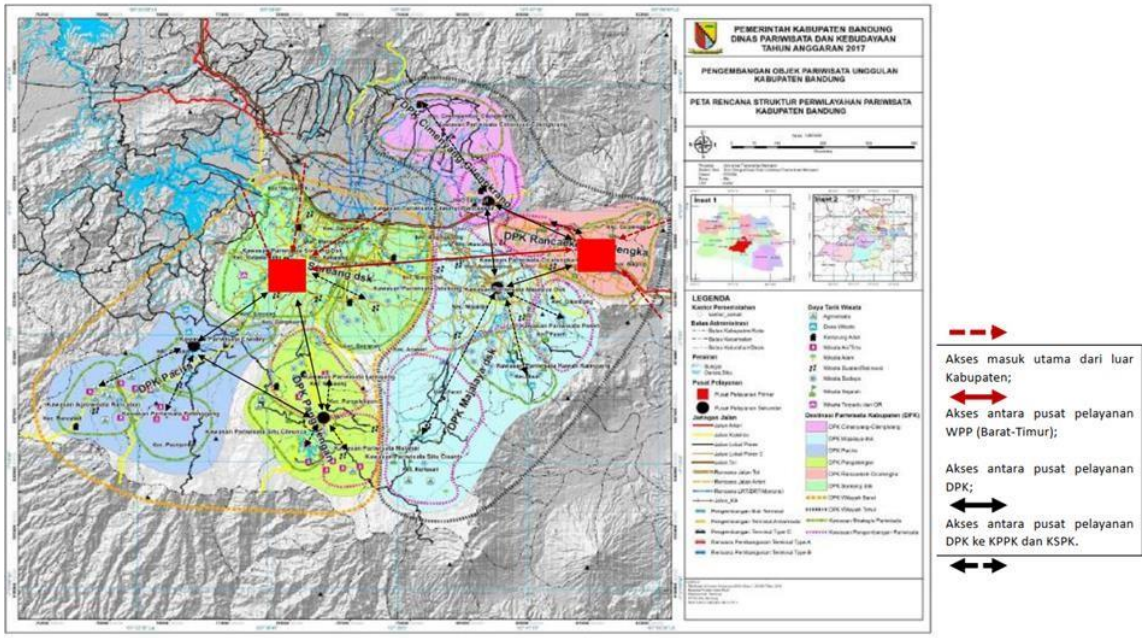

Gambar 2.17. Pengembangan Objek Wisata Unggulan Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD, Dokumen Riparda Kabupaten Bandung, 2019

Berdasarkan gambar, dapat terlihat bahwa akses antar DPK sudah terhubung dengan cukup baik terutama dengan adanya tol Soreang-Pasirkoja yang membuat akses pariwisata di Bandung Selatan lebih mudah. Adapun yang menjadi akses utama antara DPK Timur dan Barat belum terhubung dengan baik sehingga perlu dibangun akses

langsung yang menghubungkan 2 wilayah tersebut. Berikut adalah data jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.18. Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Tahun	Data Kunjungan Wisatawan		Total
	Domestik	Asing	
2020	2.072.697	0	2.072.697
2021	3.880.500	100	3.880.600
2022	6.548.815	1.748	6.550.563
2023	6.986.976	57.324	7.044.300
2024	7.703.985	12.782	7.716.767

Sumber: Data Dikelola SIPD Dinas Budaya dan Pariwisata, 2025

Data menunjukkan tren kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun. Tahun 2020 tercatat 2.072.697 kunjungan wisatawan, seluruhnya merupakan wisatawan domestik. Hal ini, terjadi karena keberadaan pandemi COVID-19. Pada tahun berikutnya (2021), mengalami peningkatan hampir dua kali lipatnya (87,22%), disertai dengan mulai hadirnya wisatawan asing. Kenaikan ini terus menerus terjadi secara konsisten pada Tahun 2022 hingga 2024. Hanya saja, laju kenaikan mulai melambat, karena sebelumnya melonjak tinggi akibat pemulihan pasca Covid-19. Laju pertumbuhan sudah stabil berada di kisaran 6–10% pada tahun 2023–2024. Ini menandakan pemulihan pariwisata yang berkelanjutan dan stabil.

Data di atas juga menunjukkan bahwa kawasan wisata yang terdapat di kelompok Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Cangkuang, dan Pasirjambu dikunjungi lebih dari dua per lima (40,10%) dari seluruh wisatawan atau merupakan yang terbanyak pada tahun 2024. Adapun aspek wisatawan makan dan minum menjadi yang terfavorit untuk dikunjungi, dengan kontribusi lebih dari sepertiganya (37,54%). Jumlah pengunjung yang berasal dari mancanegara hanya kurang dari satu persen (0,17%) dari total wisatawan. Tercatat tiga DPK yang meliputi sebelas kecamatan di Kabupaten Bandung sama sekali tidak dikunjungi oleh wisata mancanegara selama tahun 2024. Objek wisata yang tergolong ke dalam aspek daya tarik wisata benar-benar yang paling memikat mereka dengan jumlah kunjungan lebih dari empat perlimanya (85,56%) dari keseluruhan pengunjung mancanegara. DPK 1 yang meliputi tujuh kecamatan dikunjungi oleh hampir dua pertiganya (65,69%) dari kelompok mereka. Berbeda dengan wisatawan mancanegara yang hampir seutuhnya hanya mengunjungi objek wisata yang mengandung daya tarik wisata, pengunjung dari domestik mayoritas paling menyukai wisata kuliner atau makan dan minum (37,53%). Meskipun demikian, kontribusinya tidak berbeda jauh dengan objek wisata yang termasuk aspek daya tarik (36,42%).

Selain potensi destinasi wisata kabupaten, Kabupaten Bandung juga memiliki potensi Desa Wisata yang terus dikembangkan, karena berkaitan erat dengan aspek keberlanjutan *(sustainability)* dan kemajuan desa. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 556/Kep.770-Disbudpar/2022, terdapat lima puluh desa wisata yang mayoritas mutlak atau sekitar tiga perempatnya (74%) atau 37 desa wisata masuk ke dalam kategori rintisan. Sisanya, masuk ke dalam kategori berkembang dan maju, di mana terdapat sebelas desa dengan kategori berkembang dan dua desa kategorinya adalah maju. Desa wisata yang maju ini adalah Desa Alamendah yang terletak di Kecamatan Rancabali dan Desa Ciburial di Kecamatan Cimenyan. Desa yang terletak di Rancabali ini memiliki potensi wisata dalam *homestay*, agrowisata, UMKM, peternakan, kesenian, perkebunan kopi, UMKM olahan makanan, *birds watching*, wisata olahraga *trekking*, dan *virtual tour* selain itu Desa Ciburial memiliki potensi wisata dalam hutan, gua, sungai, agrowisata, wisata kuliner, dan agroekowisata.

Kecamatan Ibun menjadi daerah yang tercatat berkontribusi dalam desa wisata terbanyak yang berjumlah tujuh desa. Hanya satu desa di dalamnya yang berkategori berkembang yaitu Desa Laksana. Desa ini memiliki potensi wisata dalam *homestay*, pemandian air panas, Kawah Kamojang, bumi perkemahan, dan Danau Ciharus. Enam desa wisata lainnya dengan kategori rintisan adalah Dukuh, Neglasari, Karyalaksana, Talun, Ibun, dan Mekarwangi. Adapun SK 556/Kep.923-Disbudpar/2023 menyampaikan bahwa terdapat lima puluh desa wisata rintisan, di mana Kertasari menjadi kecamatan dengan kontribusi terbanyak (10%). Adapun lima desa wisata yang dirintis adalah Resmi Tinggal, Neglawangi, Santosa, Cihawuk, dan Cikembang.

2.1.2.3 Potensi Sektor Panas Bumi

Pemanfaatan dan pengelolaan tanah, air, hutan, panas bumi, serta tambang menjamin kelestarian sumber daya yang terkendali, lestari, berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistem) dengan memberikan manfaat bagi pemerataan, kemakmuran rakyat, berbudaya disertai upaya peningkatan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing, dan berkompetensi. Pembangunan sektoral ini perlu untuk mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan yang telah diagendakan pada *SDG's* 2030. Pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan.

Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung adalah potensi panas bumi dengan besar potensi diperkirakan sebesar 2.711 Mega Watt (MW). Dari jumlah tersebut, energi panas bumi yang sudah termanfaatkan (ter-*install*) baru mencapai ± 787 MW yang

tersebar di wilayah Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, Kamojang, dan Cibuni. Energi panas bumi yang telah termanfaatkan berperan penting menyuplai kebutuhan energi listrik Jawa-Madura-Bali. Meninjau masih tingginya potensi panas bumi yang belum termanfaatkan diperkirakan potensi luas cakupan ini kedepan akan semakin berkembang. Informasi detail mengenai potensi panas bumi di Kabupaten Bandung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.19. Potensi Panas Bumi di Kabupaten Bandung

No.	WKP Panas Bumi	Pemegang WKP	Lapangan PLTP	Pengembang	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
1	Pangalengan	PT Pertamina Geothermal Energy	Wayang Windu	PT. Star Energy	400	227
2.	Pasirjambu/ Rancabali	PT. Geo dipa Energi	Patuha	PT Geo Dipa Energi	400	55
3	Ibun	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy	855	240
4	Kertasari	PT Star Energy	Darajat	PT. Star Energy	610	270
5	Cibuni	PT Koperasi Jasa Keahlian Teknosa (KKT)	Cibuni	PT Koperasi Jasa Keahlian Teknosa (KKT)	140	0
Jumlah					**2.711**	**787**

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, 2020.

2.1.2.4 Potensi Sektor Industri

Tiga sektor yang menjadi penghasil usaha bruto yang berkontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB 2024 (BPS) yaitu Industri Pengolahan 52,91%, Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor 13,46 %, dan Pertanian 6,77 %. Sektor industri merupakan sektor yang dinilai cukup penting untuk dikembangkan karena memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Kabupaten Bandung walaupun tidak menjadi sektor unggulan.

Potensi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bandung menunjukkan klaster pertanian di bagian Selatan, klaster industri dan perdagangan di bagian Tengah, serta *hot spot* pariwisata di bagian Selatan. Dari klaster tersebut kemudian dirumuskan dua ekosistem ekonomi yaitu, ekosistem pedesaan dengan sektor unggulan pertanian dan pariwisata terdapat di bagian Selatan dan dua ekosistem penunjang di bagian Timur dan Utara, serta ekosistem perkotaan dengan sektor unggulan industri dan perdagangan yang terdapat di bagian Tengah, dengan ekosistem promosi di bagian Timur. Secara konsep terdapat dua jenis pergerakan ekonomi yaitu, pergerakan produk pangan lokal dari ekosistem desa ke kota, dan pergerakan perusahaan menengah besar dari ekosistem kota ke desa.

Untuk identifikasi potensi dari industri pengolahan Kab. Bandung akan didasari pada serapan dan kontribusi sektoral tenaga kerja Kab. Bandung. Serapan tenaga kerja dapat dilihat dari perbandingan tenaga kerja terhadap jumlah usaha/perusahaan secara subsektor dan masing-masing kecamatan. Sedangkan, kotribusi sektoral tenaga kerja

dapat terlihat dari proporsi tenaga kerja untuk masing-masing sub-sektor dari setiap kecamatan terhadap keseluruhan tenaga kerja sektoral berdasarkan data yang tersedia.

Industri pengolahan yang memberikan serapan dan kontribusi tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata, diantaranya industri tekstil & pakaian jadi dan industri kulit, barang dari kulit, & alas kaki. Untuk industri tekstil dan pakaian jadi menunjukan bahwa setiap usaha dari industri tersebut menyerap sekitar 28 – 29 tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 49,47% dari keseluruhan tenaga kerja industri pengolahan Kab. Bandung yang tercatat pada data OSS Kab. Bandung.

Hasil analisis terkait serapan dan kontribusi tenaga kerja untuk masing-masing kecamatan juga diperoleh. Hasil tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini bahwa untuk secara keseluruhan wilayah kecamatan yang memiliki potensi industri pengolahan secara serapan dan kontribusi tenaga kerja di atas rata-rata mencakup: Cicalengka, Cikancung, Dayeuhkolot, Katapang, Majalaya, Margahayu, Margaasih, Pamengpeuk, Rancaekek, dan Solokan Jeruk. Dari hasil analisis juga ditunjukan bahwa wilayah Dayeuhkolot memiliki serapan terbesar untuk tenaga kerja industri pengolahan. Serapan pada wilayah ini mencapai sekitar 25 tenaga kerja per satu usaha. Wilayah ini juga memiliki proporsi tenaga kerja industri pengolahan mencapai 13,76% tenaga kerja industri pengolahan di Kab. Bandung.

Lebih lanjut, hasil analisis juga mencoba untuk membagi potensi industri pengolahan berdasarkan skala usaha. Spesifik untuk industri pengolahan berskala mikro dan kecil, wilayah seperti Margaasih, Margahayu, dan Katapang cenderung memberikan serapan dan kontribusi tenaga kerja untuk usaha skala mikro dan kecil yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Sedangkan, untuk industri skala menengah dan besar wilayah dengan proporsi tenaga kerja paling besar ditunjukan oleh daerah Dayeuhkolot. Sedangkan, dari segi serapan usaha, wilayah Pamengpeuk menunjukan nilai tenaga kerja per usaha yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain.

Tabel 2.20. Analisis Potensi Industri Pengolahan Berdasarkan Kecamatan dan Skala Usaha

No	Kecamatan	Mikro dan Kecil			Menengah dan Besar		
		Tenaga Kerja/ Usaha	Proporsi Tenaga Kerja	Potensial	Tenaga Kerja/ Usaha	Proporsi Tenaga Kerja	Potensial
1	Arjasari	2,23	2,27	-	93,18	3,03	-
2	Baleendah	2,93	7,88	-	100,46	3,17	-
3	Banjaran	2,42	2,53	-	111,04	2,49	-
4	Bojongsoang	3,45	5,03	V	38,33	2,16	-
5	Cangkuang	3,53	2,87	-	2,33	0,01	-
6	Cicalengka	2,40	2,47	-	173,54	4,29	V
7	Cikancung	3,60	1,67	-	292,63	6,16	V
8	Cilengkrang	3,03	1,58	-	2,00	0,00	-

No	Kecamatan	Mikro dan Kecil			Menengah dan Besar		
		Tenaga Kerja/ Usaha	Proporsi Tenaga Kerja	Potensial	Tenaga Kerja/ Usaha	Proporsi Tenaga Kerja	Potensial
9	Cileunyi	2,59	5,70	-	69,06	2,62	-
10	Cimaung	2,54	1,63	-	2,07	0,06	-
11	Cimenyan	3,32	3,18	-	9,94	0,14	-
12	Ciparay	2,37	5,13	-	5,85	0,07	-
13	Ciwidey	2,07	1,43	-	0,00	0,00	-
14	Dayeuhkolot	4,02	4,84	V	282,46	20,28	V
15	Ibun	3,18	1,89	-	300,00	0,55	-
16	Katapang	4,79	5,62	V	199,75	11,88	V
17	Kertasari	1,88	0,72	-	24,00	0,01	-
18	Kutawaringin	4,28	3,23	-	32,53	0,57	-
19	Majalaya	4,36	5,35	V	182,63	11,95	V
20	Margaasih	4,28	5,83	V	64,81	3,91	-
21	Margahayu	4,66	5,41	V	153,93	3,17	-
22	Nagreg	2,35	1,25	-	17,00	0,06	-
23	Pacet	2,01	2,04	-	72,00	0,20	-
24	Pameungpeuk	2,57	2,12	-	799,12	9,50	V
25	Pangalengan	2,41	2,30	-	41,80	0,10	-
26	Paseh	2,22	2,39	-	34,00	0,11	-
27	Pasirjambu	2,49	1,86	-	198,50	0,36	-
28	Rancabali	2,13	0,74	-	213,00	0,19	-
29	Rancaekek	2,66	3,68	-	210,97	5,98	V
30	Solokanjeruk	4,09	2,99	-	203,45	6,89	V
31	Soreang	3,53	4,39	V	4,24	0,10	-
RATA-RATA		**3,05**	**3,23**		**126,92**	**3,23**	

Sumber : Masterplan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

2.1.3 Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Jasa ekosistem merupakan manfaat yang diberikan alam untuk mendukung kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks daya dukung dan daya tampung lingkungan, jasa ekosistem mencerminkan kapasitas alam dalam menyediakan kebutuhan dasar (seperti pangan dan air bersih), serta menyerap beban aktivitas manusia (seperti limbah dan polusi), sehingga menjadi indikator penting untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Dalam RPJMD, jasa ekosistem yang digunakan sebagai data dasar meliputi penyediaan pangan, air bersih, serta fungsi regulasi seperti pengaturan bencana, pemurnian air dan limbah, pengaturan udara, tata air, banjir, dan iklim. Jasa-jasa ini memberikan gambaran langsung tentang sejauh mana lingkungan mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan menampung tekanan ekologis tanpa mengalami degradasi.

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan

Berdasarkan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Kabupaten Bandung, menjelaskan bahwa secara keseluruhan, total ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Bandung mencapai 540.976,8192 juta kkal, yang menunjukkan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan di wilayah tersebut. Pangalengan tercatat sebagai kecamatan dengan ketersediaan bahan pangan tertinggi, yaitu 49.974,69477 juta kkal. Total kebutuhan bahan pangan di Kabupaten Bandung mencapai 5.409.768,192 juta kkal, mencerminkan besarnya permintaan pangan di daerah ini untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pangalengan tercatat sebagai kecamatan dengan kebutuhan bahan pangan terbesar, yaitu 319.904,7061 juta kkal.

Berdasarkan data selisih ketersediaan bahan pangan per kecamatan di Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kecamatan mengalami kekurangan ketersediaan bahan pangan dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Pangalengan tercatat sebagai kecamatan dengan selisih ketersediaan bahan pangan terbesar, yaitu -269.930,0113 juta kkal dan beberapa kecamatan seperti Solokanjeruk (-16.905,63911 juta kkal) dan Rancaekek (-27.946,57137 juta kkal) memiliki selisih ketersediaan pangan yang relatif lebih kecil.

Status daya dukung penyedia bahan pangan di Kabupaten Bandung tahun 2022 dalam sistem grid 5”x5” menunjukkan sebaran status daya dukung penyedia pangan di Kabupaten Bandung. Seperti yang terlihat, sebagian besar wilayah di Kabupaten Bandung sudah tidak dapat mendukung penyediaan pangan bagi penduduknya. Berdasarkan pehitungan, sebesar 67,56% dari luas wilayah Kabupaten Bandung memiliki status daya dukung pangan yang sudah melampaui.

Tabel 2.21. Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih, dan Luas Wilayah yang Belum Melampaui Daya Dukung Penyedia Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2022

No	Kecamatan	Ketersediaa Bahan Pangan (juta kkal)	Kebutuhan Bahan Pangan (juta kkal)	Selisih Ketersediaan (juta kkal)	Luas Belum Melampaui	
					Ha	%
1	Arjasari	19.236,28	127.668,81	-108.432,53	683,53	10,88
2	Baleendah	**16.462,70**	120.514,05	-104.051,35	787,24	18,92
3	Banjaran	7.376,54	85.036,68	-77.660,14	624,61	16,05
4	Bojongsoang	20.028,91	57.730,83	-37.701,92	1.303,44	46,05
5	Cangkuang	13.279,75	44.622,84	-31.343,09	740,10	31,06
6	Cicalengka	12.431,17	84.902,23	-72.471,06	1.110,35	25,47
7	Cikancung	15.022,79	85.657,65	-70.634,86034	566,60	14,66
8	Cilengkrang	4.838,41	47.989,37	-43.150,96	1.311,34	37,22
9	Cileunyi	10.776,63	94.408,78	-83.632,15	586,89	19,14
10	Cimaung	27.299,20	58.858,12	-31.558,92	3.495,25	58,59
11	Cimenyan	10.542,93	107.887,01	-97.344,08	916,54	19,26
12	Ciparay	33.035,84	83.501,37	-50.465,53	2.406,50	44,72
13	Ciwidey	24.322,83	75.347,06	-51.024,23	1.772,23	32,14
14	Dayeuhkolot	2.191,54	53.697,09	-51.505,55	54,21	4,84
15	Ibun	19.035,10	69.662,80	-50.627,70	1.544,06	28,19
16	Katapang	8.912,84	45.424,32	-36.511,49	414,83	26,67
17	Kertasari	25.125,00	182.021,53	-156.896,54	4.146,89	30,38
18	Kutawaringin	16.639,90	79.730,15	-63.090,2	673,94	14,34
19	Majalaya	15.508,01	66.052,90	-50.544,89	716,53	29,51
20	Margaasih	6.526,02	63.081,61	-56.555,59	278,93	15,23

No	Kecamatan	Ketersediaa Bahan Pangan (juta kkal)	Kebutuhan Bahan Pangan (juta kkal)	Selisih Ketersediaan (juta kkal)	Luas Belum Melampaui	
					Ha	%
21	Margahayu	845,78	50.363,65	-49.517,87	4,71	0,45
22	Nagreg	6.293,95	77.567,35	-71.273,39	537,90	12,58
23	Pacet	29.506,76	111.274,95	-81.768,20	3.558,68	37,49
24	Pameungpeuk	9.843,34	36.551,35	-26.708,01	560,97	37,07
25	Pangalengan	49.974,69	319.904,71	-269.930,0	6.509,44	30,06
26	Paseh	22.718,88	75.849,03	-53.130,15	1.252,22	26,22
27	Pasirjambu	26.171,15	171.090,32	-144.919,17	10.543,68	53,23
28	Rancabali	9.925,95	189.456,28	-179.530,33	4.575,33	29,93
29	Rancaekek	39.865,76	67.812,33	-27.946,57	2.717,12	60,40
30	Solokanjeruk	21.292,36	38.198,00	-16.905,64	1.362,35	56,06
31	Soreang	11.880,58	66.353,79	-54.473,21	388,91	15,25
Total		**540.976,82**	**2.851.339,73**	**-2.310.362,92**	**56.145,29**	**32,44**

Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

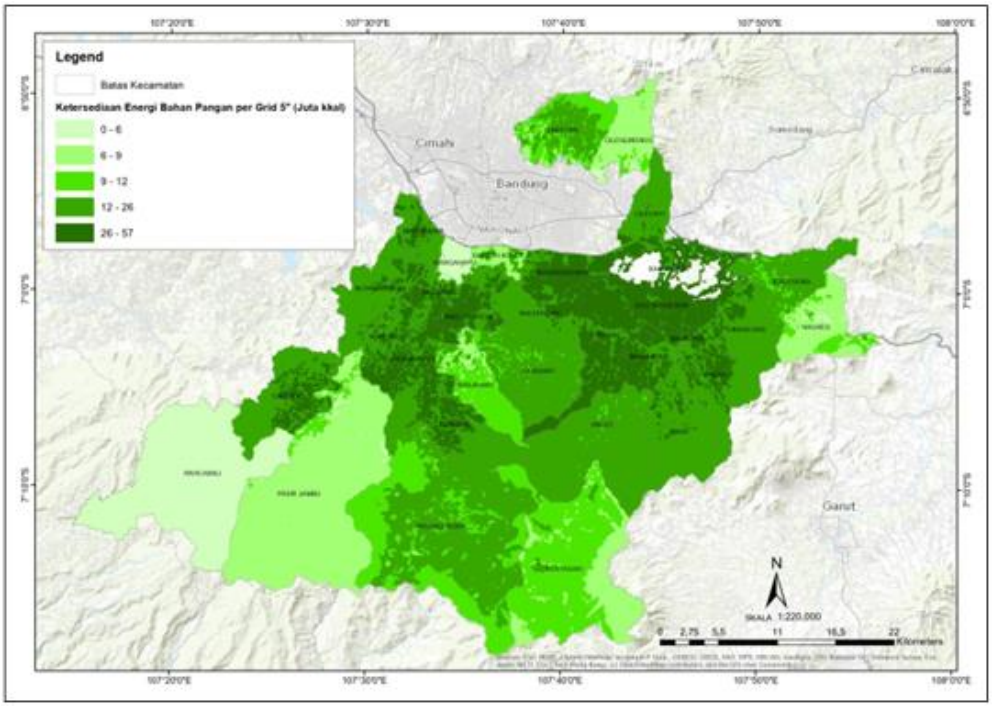

Gambar 2.18. Ketersediaan Energi Bahan Pangan per Grid 5" (Juta Rupiah)

Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

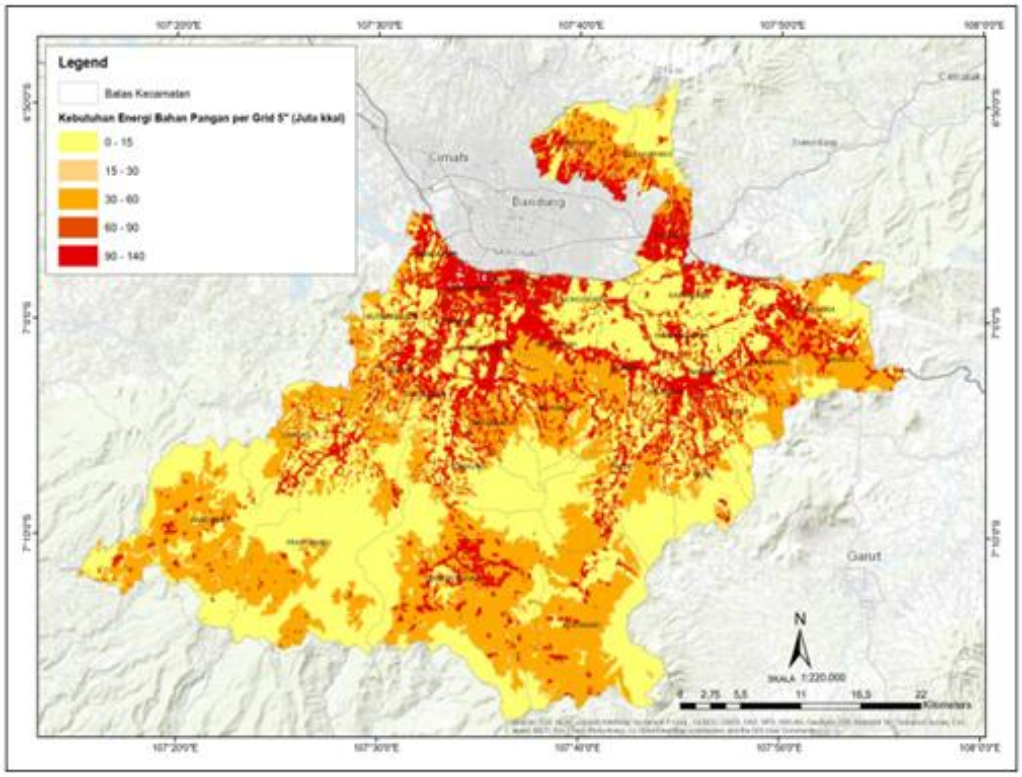

Gambar 2.19. Kebutuhan Energi Bahan Pangan per Grid 5"
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

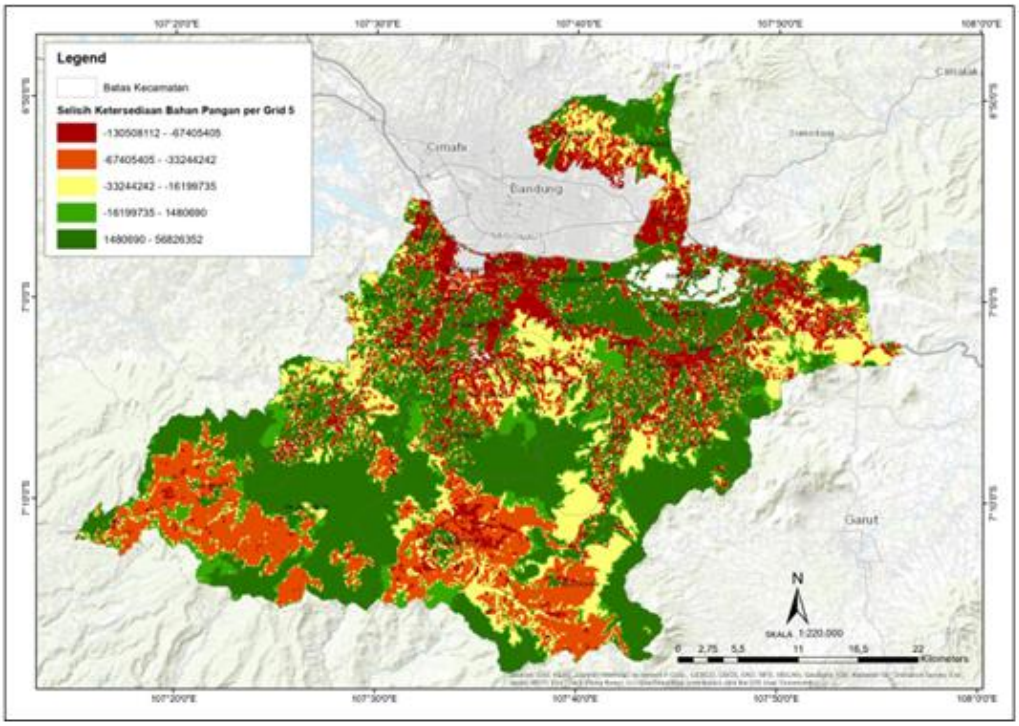

Gambar 2.20. Selisih Ketersediaan Bahan Pangan per Grid 5"
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

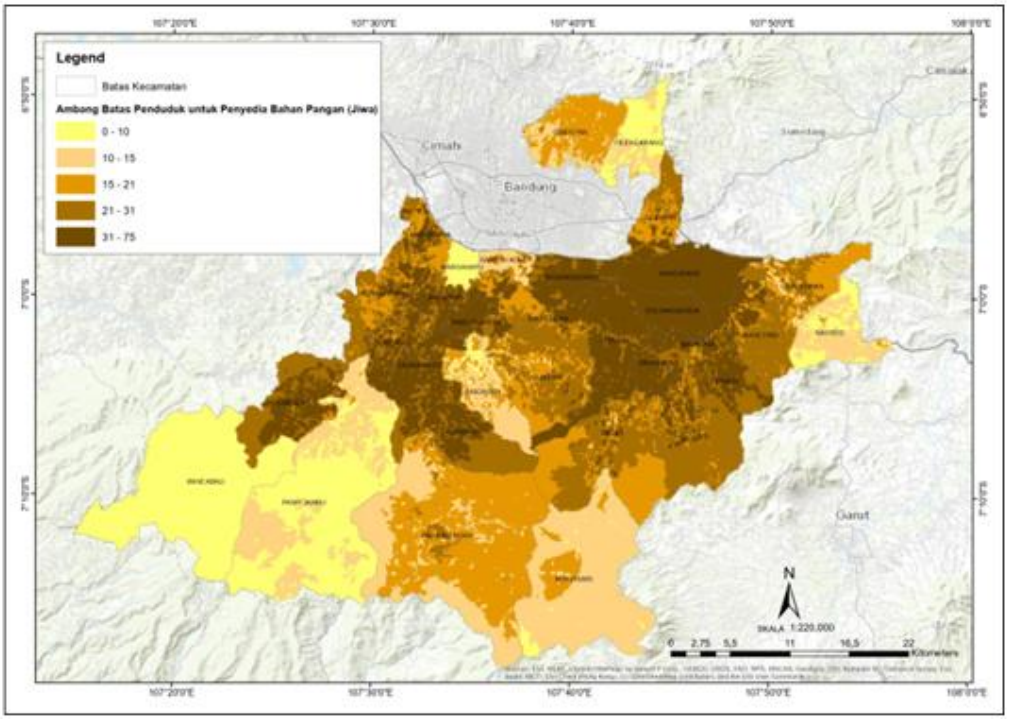

Gambar 2.21. Ambang Batas Penduduk untuk Penyedia Bahan Pangan (Jiwa)
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

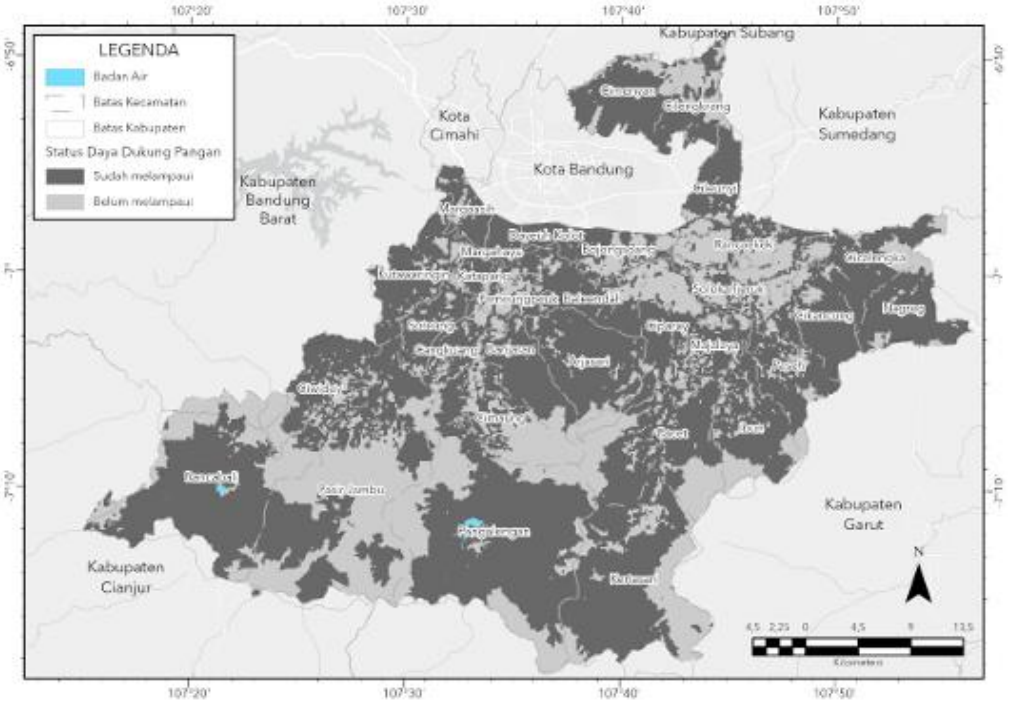

Gambar 2.22. Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2022 dalam Sistem Grid 5"x
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air

Berdasarkan data yang diperoleh dari D3TLH Kabupaten Bandung, daya dukung dan

daya tampung air meliputi kebutuhan air domestik dan luas lahan yang mendukung. Secara umum kebutuan air yang tinggi tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. Kebutuhan daya dukung dan daya tampung penyedia air di Kabupaten Bandung sebesar 7.511.799.753 m3/tahun dengan ketersediaan air sebesar 1.898.283.389 m3/tahun hal ini menyebabkan selisih air yang cukup tinggi yaitu sebesar -5.613.516.356 m3/tahun. Selisih negatif menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami defisit air, namun tidak mengindikasikan bahwa daerah tersebut akan mengalami kekeringan atau kebutuhan penduduk akan air tidak terpenuhi. Wilayah yang memiliki selisih ketersediaan bernilai negatif umumnya terdiri atas tutupan lahan berupa lahan pertanian, yang memang memiliki nilai kebutuhan air yang tinggi. Wilayah ini diantaranya adalah Kecamatan Pameungpeuk, Cangkuang, Solokanjeruk, Katapang, Cimaung, Cilengkrang, dan Pangalengan.

Beberapa upaya sebagai strategi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memenuhi kebutuhan air dan pangan tersebut pada 5 tahun ke depan direncanakan pembangunan SPAM skala regional di 2 (dua) wilayah, yaitu SPAM Sinumbra dan Bandung Timur. SPAM Sinumbra memiliki air baku yang bersumber dari situ, mata air dan sungai dengan debit rencana sebesar 1.200 liter/detik. Rencana pelayanannya mencakup wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung dimana Kabupaten Bandung direncanakan alokasi debitnya sebesar 400 liter/detik. Untuk SPAM Bandung Timur memiliki sumber air baku dari wilayah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang berasal dari air baku intake Cibangoak dengan kapasitas 500 liter/detik, disamping itu program-program pemenuhan kebutuhan air dari sumber sumur artesis / air dalam bagi daerah yang tidak terlalui oleh jaringan distribusi utama.

Kebutuhan Air Bersih per Grid 5” bagian selatan Kabupaten Bandung memiliki kebutuhan air yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini karena daerah tersebut merupakan lahan sawah, sehingga memiliki kebutuhan air yang lebih tinggi. Pada Ambang Batas Penduduk Penyedia Air per Grid 5’ terlihat bahwa Kabupaten Bandung memiliki nilai ambang batas yang cukup rendah. Hal ini berarti bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung hampir mencapai batas maksimal penduduk untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Secara umum, ambang batas penduduk terhadap penyediaan air di Kabupaten Bandung sudah hampir melampaui. Secara keseluruhan, sudah terdapat 63,7% lahan yang sudah tidak dapat mendukung penyediaan air di Kabupaten Bandung.

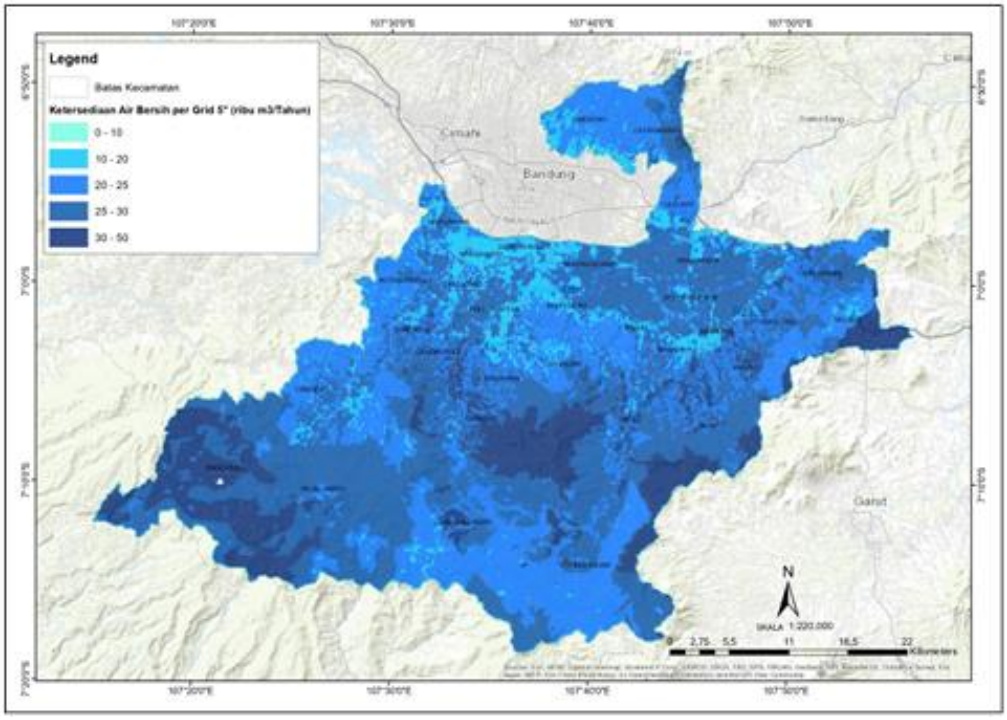

Gambar 2.23. Ketersediaan Bersih per Grid 5"
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

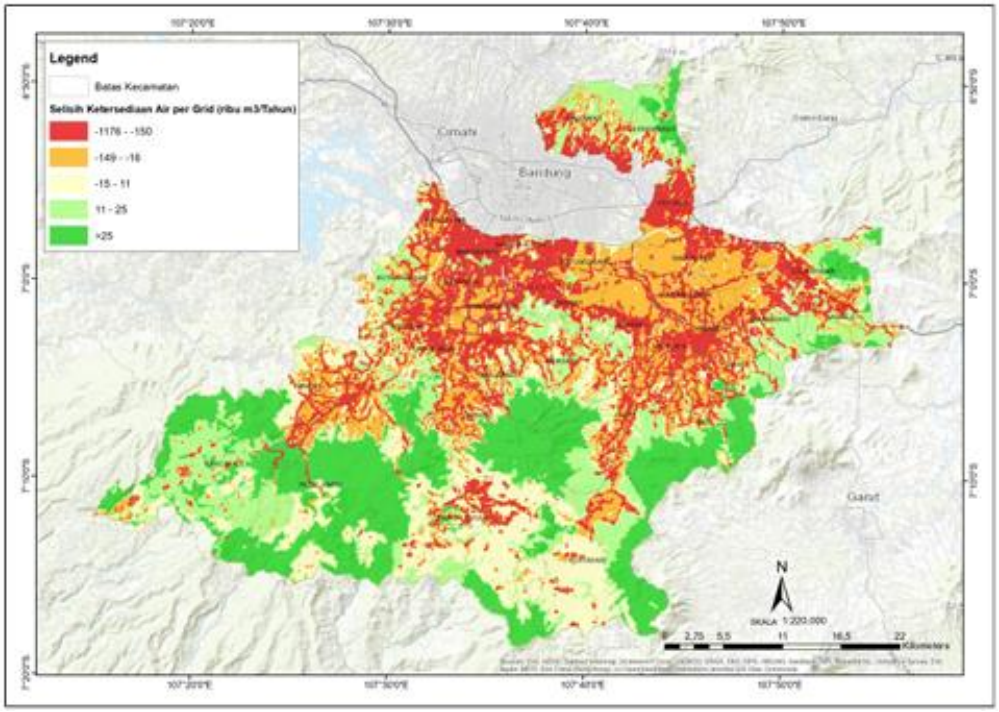

Gambar 2.24. Selisih Ketersediaan Air di Kabupaten Bandung dalam sistem grid 5"x5"
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

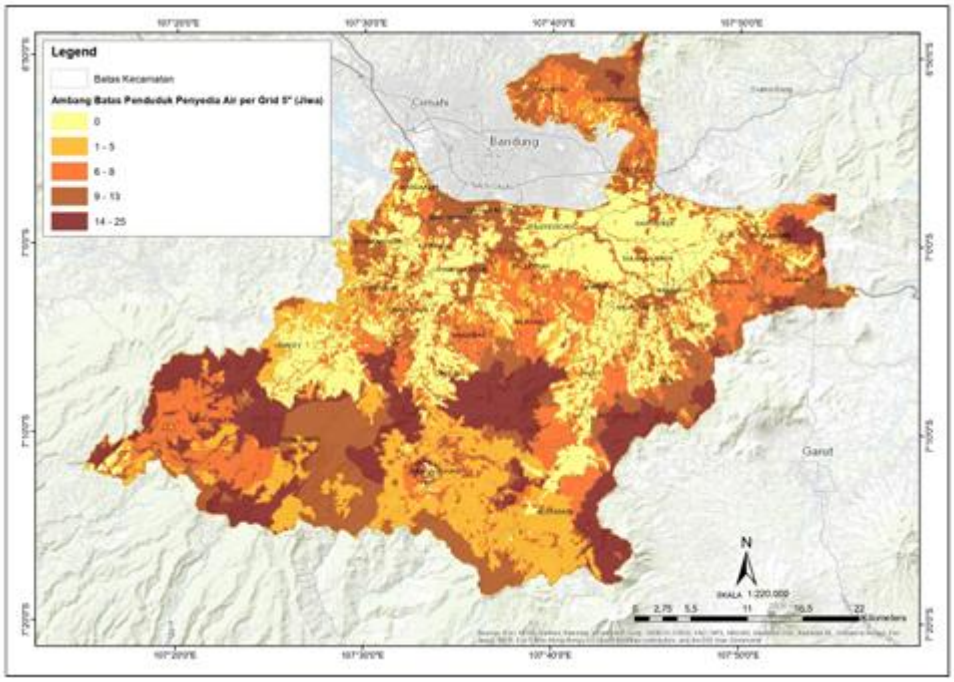

Gambar 2.25. Ambang Batas Penduduk Penyedia Air per Grid 5'
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

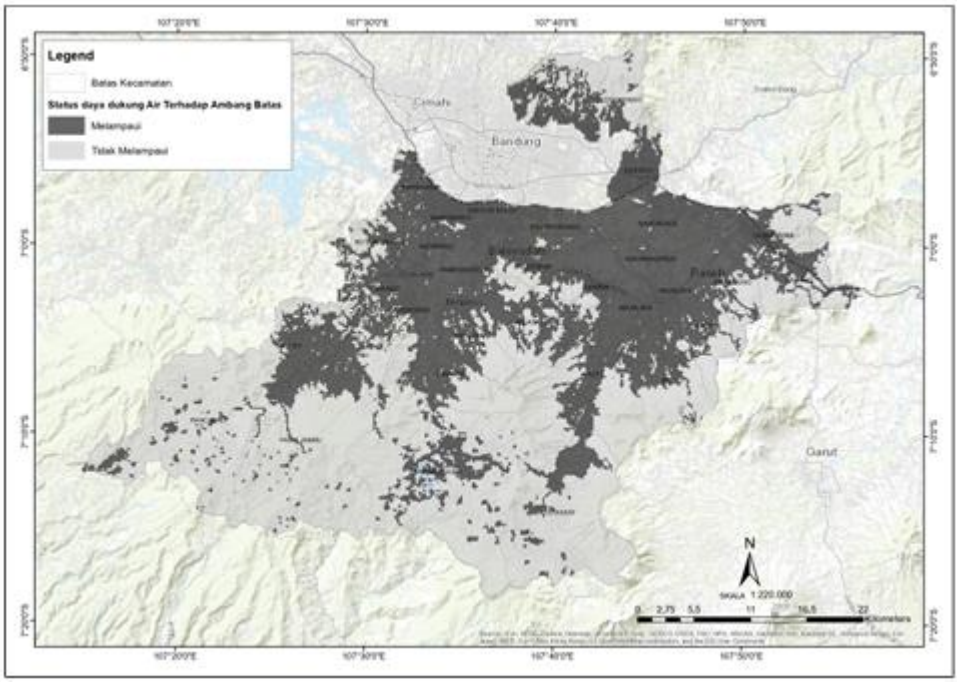

Gambar 2.26. Status Daya Dukung Air terhadap Ambang Batas
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

C. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana

Beragam bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan sering kali terjadi akibat kerusakan ekosistem. Vegetasi alami seperti hutan dan kawasan lindung berperan sebagai pelindung alami dalam menahan erosi, menyerap air hujan, dan mengurangi

risiko bencana. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berbasis ekosistem menjadi strategi penting dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Bandung. Jasa ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kategori ini menunjukkan kapasitas suatu wilayah ekosistem dalam memberikan perlindungan terhadap bencana secara alami. Wilayah dengan kelas sangat tinggi memiliki vegetasi yang padat dan struktur lahan yang ideal untuk mencegah kerusakan lingkungan, sementara kelas sangat rendah mengindikasikan wilayah yang mengalami degradasi dan memiliki kontribusi minimal terhadap fungsi perlindungan bencana.

Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana di Kabupaten Bandung didominasi oleh kelas sedang (37,00%) dan rendah (33,46%) yang berarti sebagian besar wilayah belum optimal dalam mendukung mitigasi bencana secara ekologis, sementara kelas Sangat Tinggi mencakup 21,08 % dari total luas wilayah yang menandakan keterbatasan ruang alami yang memiliki fungsi pencegahan bencana maksimal. Wilayah dengan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana kelas sangat tinggi terluas di Kabupaten Bandung antara lain adalah Kecamatan Pasirjambu dengan luas 10.616,04 Ha atau sekitar 53,6 % dari total luas kecamatan (19.807,79 Ha), dan Kecamatan Pangalengan dengan luas 6.776,43 Ha atau 31,3 % dari total luas wilayahnya (21.656,39 Ha). Sementara itu, kecamatan dengan kelas rendah terluas antara lain Kecamatan Rancaekek (4.387,09 Ha) dan Ciparay (3.602,69 Ha). Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi melalui rehabilitasi lahan, reboisasi, dan penguatan kawasan lindung sebagai upaya menurunkan risiko bencana secara ekologis. Adapun persentase dan sebaran klasifikasi Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana ditunjukkan pada tabel dan gambar peta berikut

Tabel 2.22. Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
1	Arjasari	2.335,05	3.193,43	501,89	247,18	6.277,55
2	Baleendah	2.952,94	1.128,27	42,01	59,74	4.182,97
3	Banjaran	1.475,02	1.311,10	636,85	480,28	3.903,25
4	Bojongsoang	2.632,00	58,84	93,75	37,79	2.822,38
5	Cangkuang	1.589,72	462,82	266,37	56,19	2.375,09
6	Cicalengka	1.767,23	1.604,08	239,54	740,23	4.351,07
7	Cikancung	1.721,66	2.017,61	133,35	0,00	3.872,63
8	Cilengkrang	644,43	2.145,12	312,48	423,15	3.525,17
9	Cileunyi	2.229,95	675,73	95,79	61,77	3.063,24
10	Cimaung	2.557,13	738,76	272,36	2.387,30	5.955,56
11	Cimenyan	1.299,21	3.078,37	380,40	1,00	4.758,98
12	Ciparay	**3.602,69**	1.274,23	60,44	429,36	5.366,72
13	Ciwidey	2.214,24	2.087,02	226,79	991,13	5.519,18
14	Dayeuhkolot	1.053,20	15,46	33,39	13,25	1.115,30
15	Ibun	1.764,47	1.098,21	1.636,54	978,01	5.477,22
16	Katapang	1.454,51	60,88	32,98	13,57	1.561,94
17	Kertasari	820,13	8.657,41	505,57	3.671,29	13.654,39
18	Kutawaringin	1.944,61	1.462,13	1.273,42	25,34	4.705,50

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
19	Majalaya	2.297,47	120,95	4,58	8,45	2.431,45
20	Margaasih	1.520,25	189,75	98,86	23,53	1.832,39
21	Margahayu	964,42	55,85	11,96	22,03	1.054,26
22	Nagreg	826,69	2.456,80	526,10	473,38	4.282,97
23	Pacet	2.242,43	3.507,03	944,54	2.788,01	9.482,01
24	Pameungpeuk	1.358,61	114,91	38,71	1,92	1.514,15
25	Pangalengan	2.064,68	10.755,35	2.059,93	**6.776,43**	21.656,39
26	Paseh	2.245,65	976,81	1.238,74	328,02	4.789,21
27	Pasirjambu	1.431,64	7.135,56	624,55	**10.616,04**	19.807,79
28	Rancabali	763,02	7.257,94	2.287,31	4.978,37	15.286,64
29	Rancaekek	**4.387,09**	60,19	9,13	30,22	4.486,63
30	Solokanjeruk	2.361,92	35,21	18,19	19,95	2.435,27
31	Soreang	1.721,42	676,97	120,29	18,36	2.537,04
Grand Total		**58.243,46**	**64.412,77**	**14.726,83**	**36.701,28**	**174.084,34**
		33,46%	**37,00%**	**8,46%**	**21,08%**	**100%**

Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

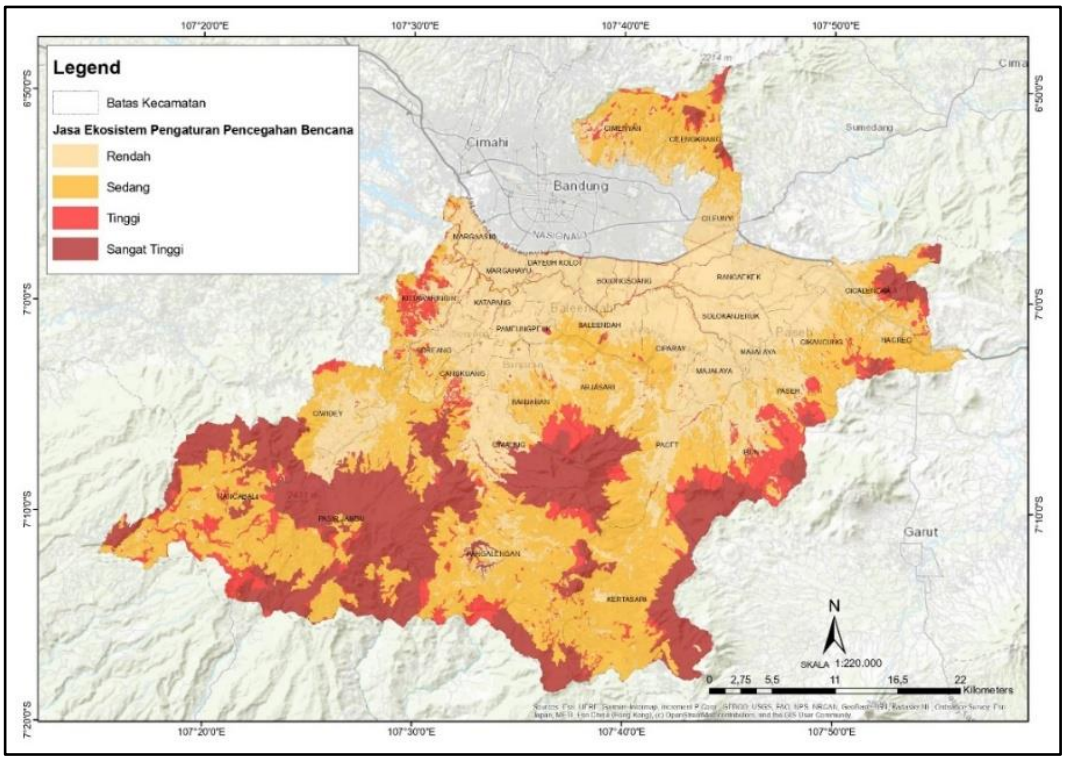

Gambar 2.27. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Bencana
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

D. Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air dan Limbah

Pengaturan pemurnian air dan limbah merupakan salah satu jasa ekosistem penting yang berkontribusi langsung terhadap kualitas lingkungan hidup. Ekosistem mendukung proses alami penyaringan polutan dan penguraian limbah melalui keberadaan vegetasi, lahan basah, dan daerah aliran sungai. Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung, pemanfaatan fungsi ekosistem sebagai pengatur kualitas air perlu dikelola secara berkelanjutan agar tetap mampu menjaga keseimbangan lingkungan. Jasa ekosistem pengaturan pemurnian air dan limbah diklasifikasikan ke dalam empat kelas,

yaitu sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi, yang menunjukkan kapasitas suatu wilayah dalam memurnikan air secara alami. Kelas "tinggi" mengindikasikan wilayah dengan vegetasi dan kondisi hidrologi yang optimal untuk pemurnian air, sedangkan kelas "sangat rendah" mencerminkan keterbatasan baik dari segi tutupan lahan maupun kemampuan alami dalam pengolahan limbah.

Jasa ekosistem pengaturan pemurnian air dan limbah di Kabupaten Bandung didominasi oleh kelas rendah (43,30%) dan sangat rendah (34,33%), sementara kelas sedang mencakup 22,02% dan kelas tinggi hanya 0,35% dari total luas wilayah. Wilayah dengan jasa ekosistem pengaturan pemurnian air dan limbah kelas tinggi terbesar di Kabupaten Bandung antara lain adalah Kecamatan Pengalengan dengan luas 229,87 Ha atau sekitar 1,1% dari total luas kecamatan (21656,39 Ha), dan Kecamatan Rancabali dengan luas 55,81 Ha atau 0,4% dari total luas wilayahnya (15.286,64 Ha). Sementara itu, kecamatan dengan kelas sangat rendah antara lain Kecamatan Pangalengan dengan luasan sangat rendah terbesar (10.291,54 Ha atau 47,5% dari luas wilayah) dan Rancabali menempati urutan kedua (7.003,08 Ha atau 45,8% dari luas wilayah). Adapun persentase dan sebaran klasifikasi Jasa Ekosistem Pengaturan Air dan Limbah ditunjukkan oleh tabel dan gambar peta berikut.

Tabel 2.23. Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air dan Limbah pada Penutup Lahan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air dan Limbah (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Grand Total
1	Arjasari	1.846,74	4.183,64	247,18	0,00	6.277,55
2	Baleendah	1.946,74	2.176,48	21,74	38,00	4.182,97
3	Banjaran	1.245,33	2.177,64	480,28	0,00	3.903,25
4	Bojongsoang	1.038,78	1.745,81	0,00	37,79	2.822,38
5	Cangkuang	900,62	1.418,28	52,30	3,89	2.375,09
6	Cicalengka	1.279,97	2.330,87	739,60	0,63	4.351,07
7	Cikancung	1.143,60	2.729,03	0,00	0,00	3.872,63
8	Cilengkrang	734,75	1.274,75	1.515,19	0,49	3.525,17
9	Cileunyi	1.778,39	1.222,87	58,81	3,17	3.063,24
10	Cimaung	906,59	2.661,66	2.387,30	0,00	5.955,56
11	Cimenyan	1.556,02	2.109,41	1.092,56	1,00	4.758,98
12	Ciparay	1.372,91	3.564,46	413,15	16,21	5.366,72
13	Ciwidey	983,86	3.544,18	989,33	1,81	5.519,18
14	Dayeuhkolot	890,68	211,36	0,00	13,25	1.115,30
15	Ibun	1.264,21	3.235,00	963,63	14,38	5.477,22
16	Katapang	754,37	794,00	0,00	13,57	1.561,94
17	Kertasari	5.429,46	4.553,64	3.669,78	1,51	13.654,39
18	Kutawaringin	1.355,74	3.324,42	0,00	25,34	4.705,50
19	Majalaya	1.159,57	1.263,43	0,00	8,45	2.431,45
20	Margaasih	1.025,32	783,54	0,00	23,53	1.832,39
21	Margahayu	914,14	118,09	0,00	22,03	1.054,26
22	Nagreg	975,18	2.774,68	533,11	0,00	4.282,97
23	Pacet	1.439,32	5.254,69	2.783,59	4,41	9.482,01
24	Pameungpeuk	599,36	912,87	0,00	1,92	1.514,15
25	Pangalengan	**10.291,54**	4.588,42	6.546,55	**229,87**	21.656,39
26	Paseh	1.284,25	3.176,94	327,76	0,26	4.789,21
27	Pasirjambu	5.473,34	3.718,41	10.594,07	21,97	19.807,79
28	Rancabali	**7.003,08**	3.305,19	4.922,56	**55,81**	15.286,64
29	Rancaekek	1.200,23	3.256,17	0,00	30,22	4.486,63

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air dan Limbah (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Grand Total
30	Solokanjeruk	647,37	1.767,95	0,00	19,95	2.435,27
31	Soreang	1.316,73	1.201,95	0,00	18,36	2.537,04
Grand Total		**59.758,21**	**75.379,83**	**38.338,49**	**607,82**	**174.084,34**
		34,33%	**43,30%**	**22,02%**	**0,35%**	**100%**

Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

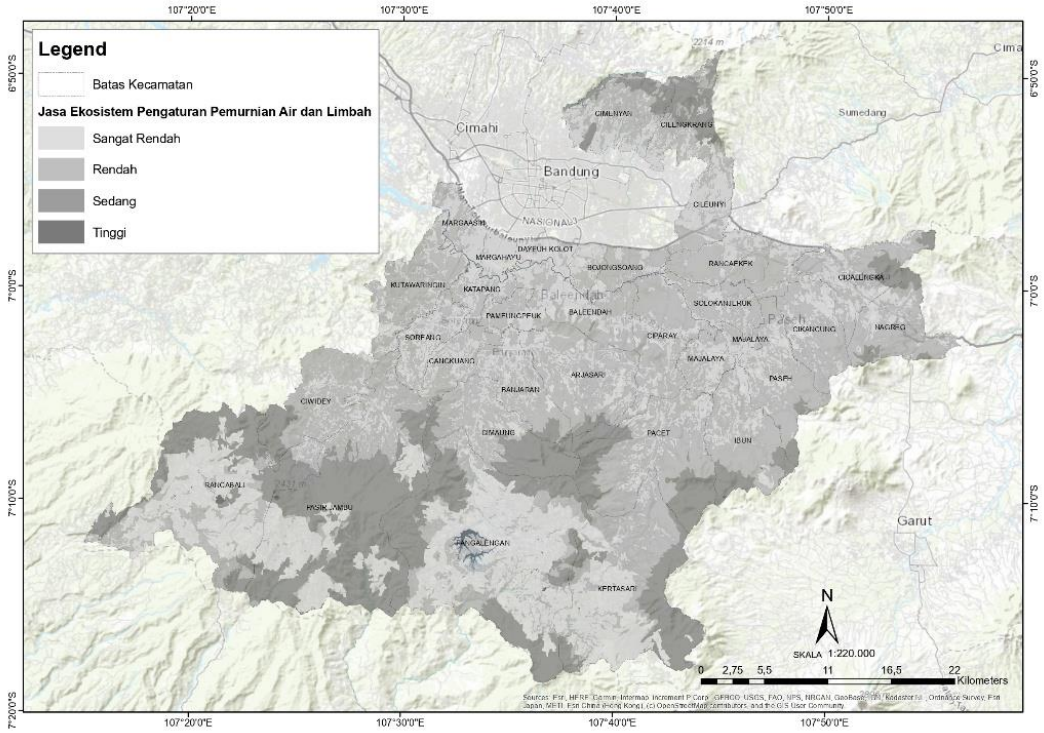

Gambar 2.28. Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air dan Limbah
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

E. Jasa Ekosistem Pengaturan Udara

Jasa ekosistem pengaturan kualitas udara merupakan salah satu fungsi ekosistem penting yang berkontribusi langsung terhadap kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Ekosistem yang mendukung fungsi ini melalui keberadaan tutupan lahan alami seperti hutan, vegetasi, dan ruang terbuka hijau yang mampu menyerap polutan dan menghasilkan oksigen. Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung, pemanfaatan fungsi ekosistem sebagai pengatur kualitas udara perlu dikelola secara berkelanjutan agar tetap mampu memberikan manfaat ekologis tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan. Jasa ekosistem pengaturan udara diklasifikasikan ke dalam lima kelas, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, yang menunjukkan kapasitas suatu wilayah dalam mendukung kualitas udara bersih. Kelas "sangat tinggi" mengindikasikan wilayah dengan tutupan lahan yang sangat baik dalam mendukung fungsi penyerap polusi udara, sedangkan kelas "sangat rendah" mencerminkan keterbatasan baik dari segi luasan vegetasi maupun kualitas tutupan

lahannya.

Jasa ekosistem pengaturan udara di Kabupaten Bandung didominasi oleh kelas sangat rendah (35,74%) dan sedang (26,53%), sementara kelas sangat tinggi hanya mencakup 22,02% dari total luas wilayah. Wilayah dengan jasa ekosistem pengaturan udara kelas sangat tinggi di Kabupaten Bandung antara lain adalah Kecamatan Pasirjambu dengan luas 10.594,07 Ha, dan Kecamatan Pangalengan dengan luas 6.546,55 Ha. Sementara itu, kecamatan dengan kelas sangat rendah antara lain Kecamatan Rancaekek (4.396,61 Ha) dan Solokanjeruk (2.361,92 Ha), yang memiliki keterbatasan dalam fungsi ekosistem pengatur udara, baik dari sisi tutupan vegetasi maupun intensitas pemanfaatan lahan terbangun. Adapun persentase dan sebaran klasifikasi Jasa Ekosistem Pengaturan Udara ditunjukkan oleh tabel dan gambar peta berikut.

Tabel 2.24. Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara pada Penutup Lahan di Kabupaten Bandung

No.	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Udara (Ha)					
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
1	Arjasari	2.335,05	2.542,38	1.152,95	0,00	247,18	6.277,55
2	Baleendah	2.952,94	932,75	237,54	38,00	21,74	4.182,97
3	Banjaran	1.475,02	1.065,42	882,53	0,00	480,28	3.903,25
4	Bojongsoang	2.632,00	34,78	117,81	37,79	0,00	2.822,38
5	Cangkuang	1.632,22	117,19	569,49	3,89	52,30	2.375,09
6	Cicalengka	1.821,25	1.276,99	512,60	0,63	739,60	4.351,07
7	Cikancung	1.762,67	1.716,26	393,70	0,00	0,00	3.872,63
8	Cilengkrang	671,05	771,02	567,42	0,49	1.515,19	3.525,17
9	Cileunyi	2.238,58	338,49	424,19	3,17	58,81	3.063,24
10	Cimaung	2.561,98	570,73	435,54	0,00	2.387,30	5.955,56
11	Cimenyan	1.361,12	1.613,22	691,08	1,00	1.092,56	4.758,98
12	Ciparay	3.602,69	924,41	410,26	16,21	413,15	5.366,72
13	Ciwidey	2.290,60	1.685,60	551,85	1,81	989,33	5.519,18
14	Dayeuhkolot	1.053,20	6,99	41,86	13,25	0,00	1.115,30
15	Ibun	1.985,48	392,89	2.120,84	14,38	963,63	5.477,22
16	Katapang	1.454,51	47,20	46,65	13,57	0,00	1.561,94
17	Kertasari	1.993,22	2.582,68	5.407,20	1,51	3.669,78	13.654,39
18	Kutawaringin	2.015,01	853,60	1.811,55	25,34	0,00	4.705,50
19	Majalaya	2.334,23	16,46	72,31	8,45	0,00	2.431,45
20	Margaasih	1.520,25	171,85	116,76	23,53	0,00	1.832,39
21	Margahayu	964,42	52,67	15,14	22,03	0,00	1.054,26
22	Nagreg	991,12	1.957,93	800,81	0,00	533,11	4.282,97
23	Pacet	2.659,14	2.542,59	1.492,27	4,41	2.783,59	9.482,01
24	Pameungpeuk	1.358,61	86,66	66,96	1,92	0,00	1.514,15
25	Pangalengan	2.064,68	1.932,29	10.882,99	229,87	6.546,55	21.656,39
26	Paseh	2.389,56	484,02	1.587,61	0,26	327,76	4.789,21
27	Pasirjambu	2.506,83	1.315,99	5.368,93	21,97	10.594,07	19.807,79
28	Rancabali	1.103,38	409,69	8.795,20	55,81	4.922,56	15.286,64
29	Rancaekek	4.396,61	11,31	48,49	30,22	0,00	4.486,63
30	Solokanjeruk	2.361,92	20,22	33,18	19,95	0,00	2.435,27
31	Soreang	1.721,42	268,39	528,87	18,36	0,00	2.537,04
Grand Total		**62.210,77**	**26.742,69**	**46.184,58**	**607,82**	**38.338,49**	**174.084,34**
		35,74%	**15,36%**	**26,53%**	**0,35%**	**22,02%**	**100%**

Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

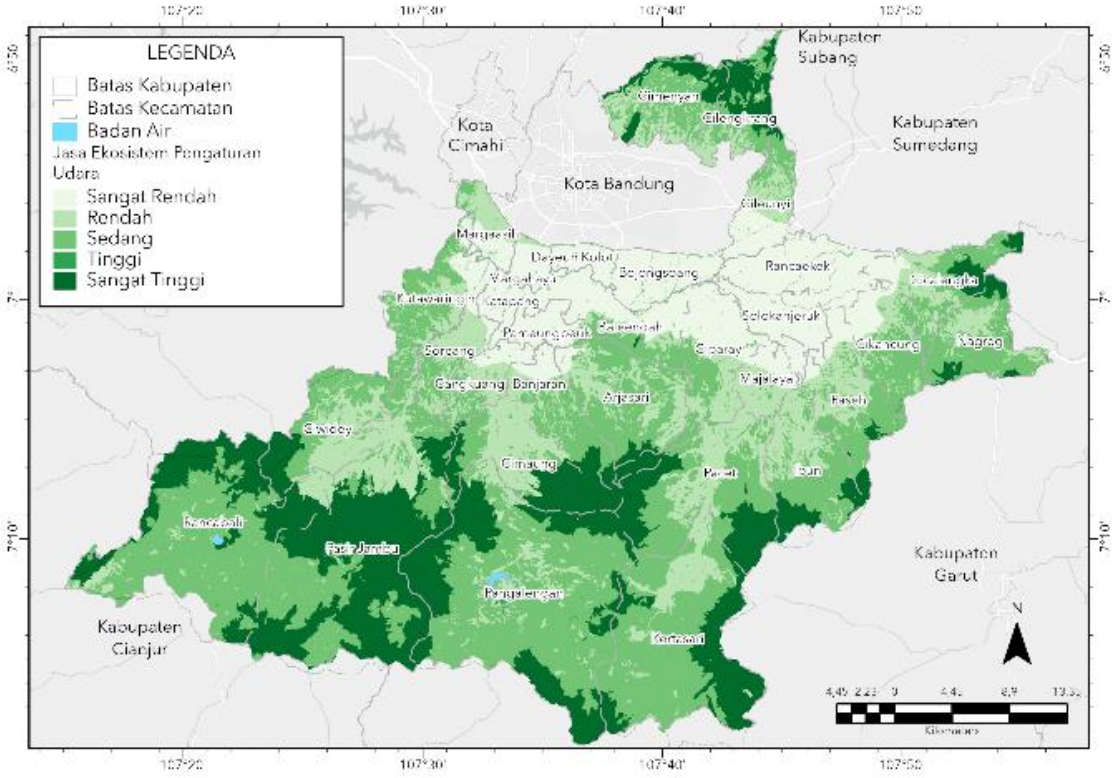

Gambar 2.29. Jasa Ekosistem Pengaturan Udara
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

F. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

Fungsi ekosistem dalam mengatur tata air sangat berpengaruh terhadap kestabilan lingkungan, terutama dalam mengendalikan limpasan air hujan yang dapat menyebabkan banjir. Ekosistem seperti hutan, rawa, dan daerah resapan air berfungsi menyerap dan menyimpan air, sehingga membantu mengatur aliran air secara alami. Penataan ruang dan infrastruktur daerah perlu diselaraskan dengan fungsi ekologis ini agar risiko banjir dapat diminimalkan. Jasa ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir diklasifikasikan ke dalam lima kelas, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, yang menunjukkan tingkat kemampuan wilayah dalam menampung, menyerap, dan mengalirkan air secara alami berdasarkan kondisi biofisik wilayahnya. Kelas sangat tinggi menandakan kemampuan maksimal ekosistem dalam mengatur tata air dan meredam banjir, sedangkan kelas sangat rendah menunjukkan kondisi yang kritis, rentan banjir, serta minim daya serap dan daya dukung hidrologi.

Jasa ekosistem Pengaturan Tata Air Dan Banjir di Kabupaten Bandung didominasi oleh kelas sedang (**44,17**%) dan sangat tinggi (**21,08**%). Wilayah dengan jasa ekosistem pengaturan Tata Air dan Banjir kelas sangat tinggi di Kabupaten Bandung antara lain adalah Kecamatan Pasirjambu dengan luas **10.616,04** Ha atau sekitar 53,6% dari total luas kecamatan (19.807,79 Ha), dan Kecamatan Pangalengan dengan luas **6.776,43** Ha atau sekitar 31,3% dari total luas kecamatan (21.656,39 Ha). Sementara itu, kecamatan dengan

kelas sangat rendah antara lain Kecamatan Rancabali (**495,19**Ha) dan Cilengkrang (**479,81**Ha) yang berisiko tinggi terhadap gangguan tata air dan potensi banjir, maka diperlukan upaya rehabilitasi kawasan resapan dan penguatan perlindungan ekosistem alami untuk dapat mengurangi resiko banjir. Adapun persentase dan sebaran klasifikasi Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir ditunjukkan oleh tabel dan gambar peta berikut.

Tabel 2.25. Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir di Kabupaten Bandung

NO	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Dan Banjir (Ha)					
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
1	Arjasari	1.195,68	1.139,37	3.695,33	0,00	247,18	6.277,55
2	Baleendah	1.751,22	1.201,72	1.170,28	0,00	59,74	4.182,97
3	Banjaran	999,66	475,36	1.947,95	0,00	480,28	3.903,25
4	Bojongsoang	1.014,73	1.617,27	152,59	0,00	37,79	2.822,38
5	Cangkuang	597,50	992,22	729,19	0,00	56,19	2.375,09
6	Cicalengka	1.006,91	760,31	1.843,62	0,00	740,23	4.351,07
7	Cikancung	883,25	838,41	2.150,97	0,00	0,00	3.872,63
8	Cilengkrang	**479,81**	164,62	1.365,07	1.092,53	423,15	3.525,17
9	Cileunyi	1.449,99	779,96	771,31	0,21	61,77	3.063,24
10	Cimaung	743,42	1.813,71	1.011,13	0,00	2.387,30	5.955,56
11	Cimenyan	1.245,34	53,87	2.366,22	1.092,56	1,00	4.758,98
12	Ciparay	1.023,09	2.579,61	1.334,67	0,00	429,36	5.366,72
13	Ciwidey	658,80	1.555,44	2.313,80	0,00	991,13	5.519,18
14	Dayeuhkolot	882,22	170,99	48,85	0,00	13,25	1.115,30
15	Ibun	779,92	984,55	2.734,75	0,00	978,01	5.477,22
16	Katapang	740,69	713,81	93,86	0,00	13,57	1.561,94
17	Kertasari	527,83	292,30	9.162,97	0,00	3.671,29	13.654,39
18	Kutawaringin	817,61	1.127,00	2.735,55	0,00	25,34	4.705,50
19	Majalaya	1.091,84	1.205,63	125,53	0,00	8,45	2.431,45
20	Margaasih	1.007,42	512,83	288,61	0,00	23,53	1.832,39
21	Margahayu	910,95	53,47	67,81	0,00	22,03	1.054,26
22	Nagreg	700,47	126,21	2.923,17	59,73	473,38	4.282,97
23	Pacet	891,58	1.350,85	4.451,57	0,00	2.788,01	9.482,01
24	Pameungpeuk	571,12	787,49	153,62	0,00	1,92	1.514,15
25	Pangalengan	1.468,48	596,20	12.815,28	0,00	**6.776,43**	21.656,39
26	Paseh	935,37	1.310,28	2.215,54	0,00	328,02	4.789,21
27	Pasirjambu	728,96	702,68	7.760,11	0,00	**10.616,04**	19.807,79
28	Rancabali	**495,19**	267,83	9.545,25	0,00	4.978,37	15.286,64
29	Rancaekek	1.160,87	3.226,22	69,32	0,00	30,22	4.486,63
30	Solokanjeruk	632,38	1.729,54	53,40	0,00	19,95	2.435,27
31	Soreang	908,16	813,26	797,26	0,00	18,36	2.537,04
Grand Total		**28.300,46**	**29.943,00**	**76.894,58**	**2.245,02**	**36.701,28**	**174.084,34**
		16,26%	**17,20%**	**44,17%**	**1,29%**	**21,08%**	**100%**

Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

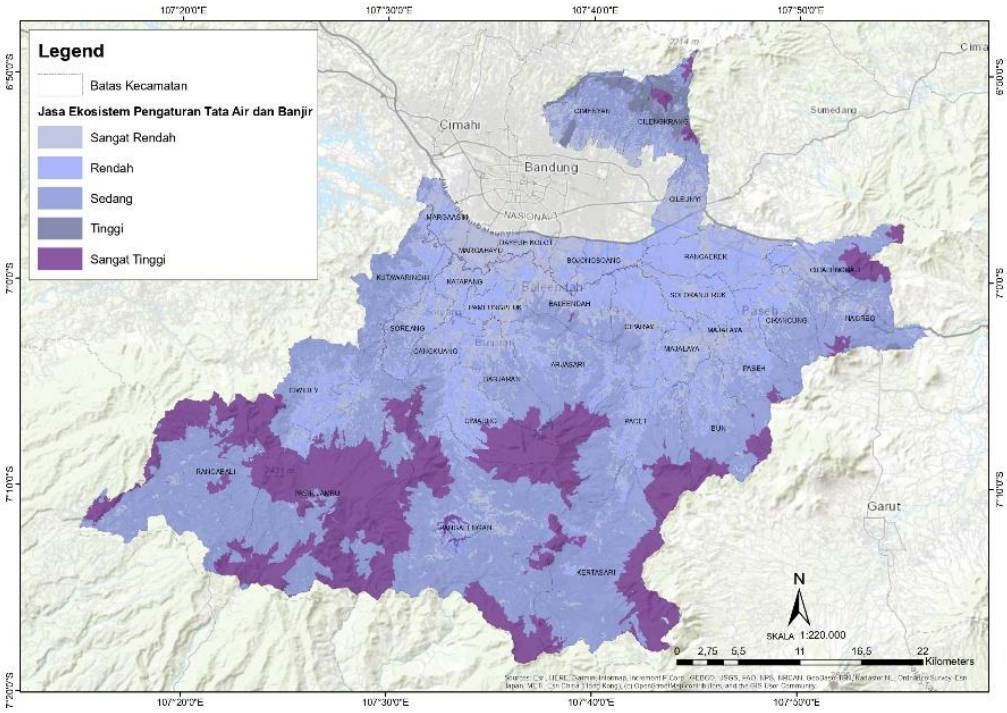

Gambar 2.30. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir
Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

G. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, khususnya dalam menyerap emisi karbon dan mengatur suhu mikroklimat. Layanan ekosistem ini sangat bergantung pada keberadaan tutupan vegetasi alami seperti hutan dan lahan basah yang mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Dalam konteks Kabupaten Bandung, peran jasa ekosistem pengaturan iklim semakin krusial mengingat tingginya tekanan alih fungsi lahan dan peningkatan emisi dari aktivitas manusia. Klasifikasi daya dukung ekosistem ini dibagi ke dalam empat kelas: sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah, yang mencerminkan kapasitas masing-masing wilayah dalam mengatur iklim secara alami. Kelas "sangat tinggi" menunjukkan wilayah yang paling efektif dalam menyerap karbon dan menstabilkan iklim lokal.

Sebaran daya dukung jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Bandung menunjukkan dominasi kelas sedang sebesar 44,17% dari total wilayah, diikuti kelas rendah sebesar 33,46%. Namun, hanya 22,02% wilayah yang termasuk ke dalam kelas sangat tinggi, yang tersebar terutama di Kecamatan Pasirjambu (10.594,07 Ha atau 5,61%) dan Pangalengan (6.546,55 Ha atau 3,47%). Kawasan-kawasan ini umumnya memiliki bentang alam pegunungan dan tutupan hutan yang masih lestari, sehingga berperan besar dalam menyerap emisi karbon. Sebaliknya, wilayah seperti Rancaekek (kelas rendah seluas 4.387,09 Ha atau 2,32%) dan Solokanjeruk (2.361,92 Ha atau 1,25%) didominasi kelas rendah, mencerminkan rendahnya kapasitas ekosistem di wilayah

tersebut dalam pengaturan iklim. Rincian klasifikasi dan luasannya disajikan dalam tabel dan peta berikut untuk memberikan gambaran spasial terhadap kapasitas ekosistem dalam mendukung stabilitas iklim daerah.

Tabel 2.26. Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
1	Arjasari	2.335,05	3.695,33	0,00	247,18	6.277,55
2	Baleendah	2.952,94	1.170,28	38,00	21,74	4.182,97
3	Banjaran	1.475,02	1.947,95	0,00	480,28	3.903,25
4	Bojongsoang	2.632,00	152,59	37,79	0,00	2.822,38
5	Cangkuang	1.589,72	729,19	3,89	52,30	2.375,09
6	Cicalengka	1.767,23	1.843,62	0,63	739,60	4.351,07
7	Cikancung	1.721,66	2.150,97	0,00	0,00	3.872,63
8	Cilengkrang	644,43	1.365,07	0,49	1.515,19	3.525,17
9	Cileunyi	2.229,95	771,31	3,17	58,81	3.063,24
10	Cimaung	2.557,13	1.011,13	0,00	2.387,30	5.955,56
11	Cimenyan	1.299,21	2.366,22	1,00	1.092,56	4.758,98
12	Ciparay	3.602,69	1.334,67	16,21	413,15	5.366,72
13	Ciwidey	2.214,24	2.313,80	1,81	989,33	5.519,18
14	Dayeuhkolot	1.053,20	48,85	13,25	0,00	1.115,30
15	Ibun	1.764,47	2.734,75	14,38	963,63	5.477,22
16	Katapang	1.454,51	93,86	13,57	0,00	1.561,94
17	Kertasari	820,13	9.162,97	1,51	3.669,78	13.654,39
18	Kutawaringin	1.944,61	2.735,55	25,34	0,00	4.705,50
19	Majalaya	2.297,47	125,53	8,45	0,00	2.431,45
20	Margaasih	1.520,25	288,61	23,53	0,00	1.832,39
21	Margahayu	964,42	67,81	22,03	0,00	1.054,26
22	Nagreg	826,69	2.923,17	0,00	533,11	4.282,97
23	Pacet	2.242,43	4.451,57	4,41	2.783,59	9.482,01
24	Pameungpeuk	1.358,61	153,62	1,92	0,00	1.514,15
25	Pangalengan	2.064,68	12.815,28	229,87	**6.546,55**	21.656,39
26	Paseh	2.245,65	2.215,54	0,26	327,76	4.789,21
27	Pasirjambu	1.431,64	7.760,11	21,97	**10.594,07**	19.807,79
28	Rancabali	763,02	9.545,25	55,81	4.922,56	15.286,64
29	Rancaekek	**4.387,09**	69,32	30,22	0,00	4.486,63
30	Solokanjeruk	**2.361,92**	53,40	19,95	0,00	2.435,27
31	Soreang	1.721,42	797,26	18,36	0,00	2.537,04
Grand Total		**58.243,46**	**76.894,58**	**607,82**	**38.338,49**	**174.084,34**
		33,46%	**44,17%**	**0,35%**	**22,02%**	**100%**

Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH Kabupaten Bandung, 2025

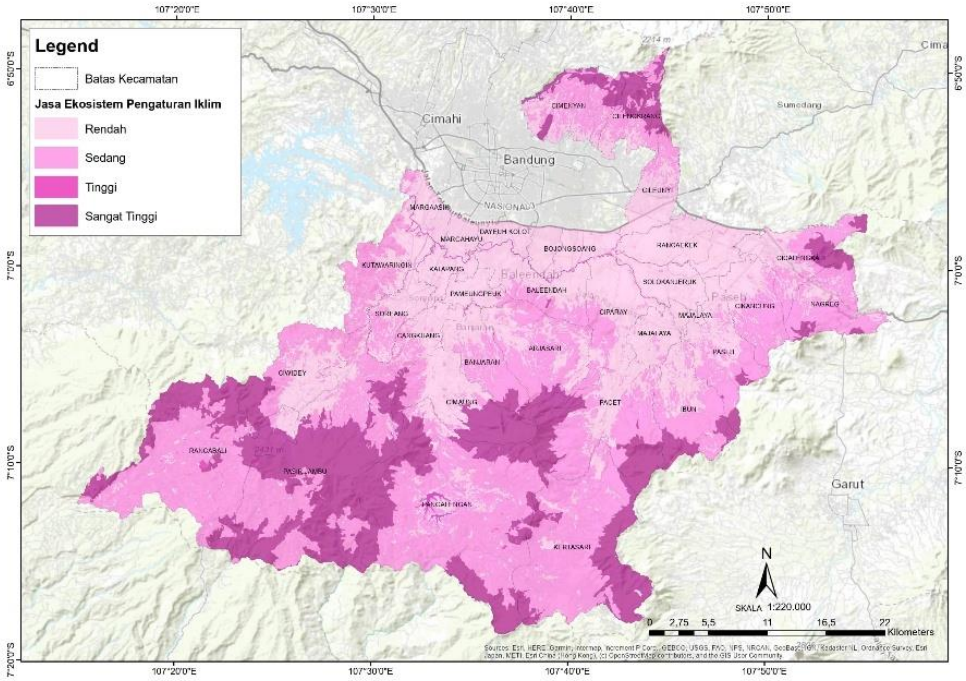

Gambar 2.31. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim
Sumber: DLH Kabupaten Bandung, 2025

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Data menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung mengalami tren meningkat dari tahun 2020 (79,08) hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 (82,48). Namun, terjadi penurunan pada tahun 2024, sekalipun perolehannya lebih tinggi daripada tahun 2020-2022. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan ketahanan pangan selama tiga tahun berturut-turut (2021-2023), namun terjadi penurunan pada tahun 2024 yang diakibatkan oleh seluruh komponen pada IKP, dengan penurunan masing-masing sebesar: ketersediaan (3,90%), keterjangkauan (0,91%), dan pemanfaatan (2,25%).

Tabel 2.27. Perolehan Rincian Komponen Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Tahun	Kabupaten Bandung		
	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfataan
2024	70,89	89,12	81,55
2023	73,77	89,94	83,43
2022	71,56	86,43	82,31
2021	68,74	86,01	82,45
2020	69,28	85,28	81,78

Sumber: Data Dikelola SIPD, Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 2.32. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Bandung 2020-2024

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Tahun 2024 (Diolah)

2.1.4.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Selain mengukur ketahanan pangan perlu diperhatikan juga mengenai keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan sehingga dipergunakan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk mengukurnya. Selama 5 tahun terakhir skor PPH di Kabupaten Bandung cukup berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 skor PPH mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, namun pada tahun 2021 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan yang cukup positif. Adapun secara detail digambarkan sebagai berikut:

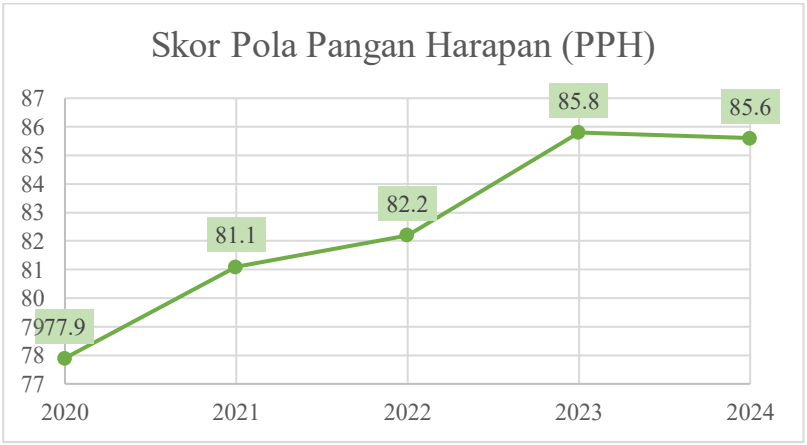

Gambar 2.33. Skor PPH di Kabupaten Bandung 2019-2024

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang signifikan dari 77,9 pada tahun 2020 menjadi 85,6 pada tahun 2024. Meskipun terdapat sedikit penurunan dari tahun 2023 ke 2024, secara keseluruhan tren ini menunjukkan perbaikan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat yang semakin mendekati pola pangan ideal.

2.1.4.3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan persentase populasi yang mengonsumsi makanan di bawah tingkat kebutuhan energi minimum harian yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehat dan produktif. Tingkat kebutuhan energi minimum ini bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan faktor lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi ketidaksukupan konsumsi dintaranya adalah produksi padi, kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, usia harapan hidup, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.28. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

No	Tahun	Perolehan
1	2024	5,80
2	2023	5,19
3	2022	8,30
4	2021	5,53
5	2020	5,07

Sumber: Data Dikelola SIPD, Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Bandung tahun 2020–2024, terlihat fluktuasi yang cukup signifikan. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 8,30%, sedangkan angka terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 5,07%. Setelah lonjakan pada 2022, prevalensi kembali menurun menjadi 5,19% di tahun 2023 dan naik sedikit menjadi 5,80% pada 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Bandung belum menunjukkan tren perbaikan yang konsisten, dengan fluktuasi signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan intervensi ketahanan pangan, terutama untuk menjamin aksesibilitas dan keterjangkauan pangan bergizi secara merata di seluruh wilayah.

2.1.4.4 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan

Persentase rumah tangga di Kabupaten Bandung yang memiliki akses terhadap sumber air minum perpipaan menunjukkan tren peningkatan yang positif dari 84,54% pada tahun 2021 menjadi 90,75% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan dasar, khususnya akses air bersih. Lonjakan tertinggi terjadi pada periode 2021–2022 sebesar 3,01%. Meskipun demikian, laju pertumbuhan akses mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu sebesar 1,95% pada 2022–2023 dan 1,25% pada 2023–2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan penyediaan infrastruktur air minum masih perlu mendapat perhatian, terutama untuk menjangkau sekitar 9,25% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap air minum perpipaan pada tahun 2024.

Tabel 2.29. Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan di Kabupaten Bandung

Tahun	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak
2021	84,54
2022	87,55
2023	89,50
2024	90,75

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang & Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2021-2024

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu indikator penting yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di suatu wilayah. Sebagai tolok ukur nasional, IKLH berfungsi sebagai acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mengevaluasi keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, IKLH juga menjadi instrumen penilaian kinerja pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan program terkait lingkungan.

Nilai IKLH ditentukan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Ketiga komponen ini dihitung menggunakan formula tertentu sesuai dengan Surat Edaran KLHK Nomor 5.318/PPKL/SET/Ren.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 yang dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 2.30. Komponen Pembentuk IKLH

No.	Jenis Data	Elemen Data/Rumus		Keterangan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	$\text{IKA} = IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_A}{2}}$ Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : a. memenuhi baku mutu = 70 b. tercemar ringan = 50 c. tercemar sedang = 30 d. tercemar berat = 10		PP No.82 /2001 Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen dengan Parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, NO3-N, Total Phosphat, Fecal Coliform
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU = 100 - [50/0.9 x (Ieu - 0.1)		Rata-rata konsentrasi parameter NO2 dan SO2
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		
		Sangat Baik	X > 90	
		Baik	70 < X ≤ 90	
		Cukup	50 ≤ X ≤ 90	
		Kurang	30 ≤ X < 50	
		Sangat Kurang	X < 30	
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	=100 – (((84,3-(LTL/LW-DKK x 100)) x 50/54,3)		Parameter Tutupan Vegetasi Hutan dan Tutupan Vegetasi Non Hutan
IKLH		**= (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)**		

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tiga komponen utama: Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Pada tahun 2024, perhitungan IKLH menunjukkan capaian sebesar 59,62, yang diperoleh dari nilai IKU sebesar 82,63, IKA sebesar 40,57, dan IKL sebesar 49,77. Capaian IKLH tahun 2024 ini dapat dibandingkan dengan tren tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut.

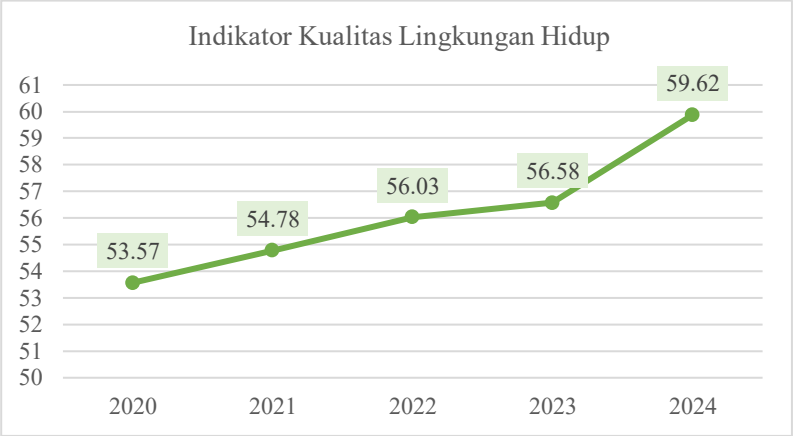

Gambar 2.34. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai indikator berada di angka 53,57 dan mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 59,62 pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2023 dan 2024, yaitu sebesar 3,04 poin. Peningkatan ini mencerminkan tren positif dalam upaya pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.

Untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional tahun 2025-2045, dilakukan penyelarasan nilai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada periode 2025-2029 sebagai salah satu indikator utama pembangunan yang akan disampaikan pada bab berikutnya. Penyelarasan ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target IKLH Tahun 2025-2029, serta berdasarkan Berita Acara Nomor BA-13/SETPPKL/PEHKT/REN2.4/B/04/2024 terkait target IKLH Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045.

2.1.5.2 Ruang Terbuka Taman dan TPU

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertata merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup suatu kawasan perkotaan. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota dan area resapan air, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan rekreasi bagi masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyediakan infrastruktur hijau yang berkualitas, Dinas Lingkungan Hidup telah menginventarisasi berbagai RTH publik yang telah tertata dengan baik. Data berikut menguraikan komposisi dan luas dari setiap kategori RTH, termasuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang juga merupakan elemen penting dalam penataan ruang, memberikan gambaran tentang sejauh mana ketersediaan ruang terbuka hijau yang terkelola di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.31. Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Tertata

No.	Kategori	Luas (M^2)
1	Taman Alun-Alun	46.389,68
2	Taman Kota	14.166,35
3	Taman Tematik	29.121,89
4	Taman Median dan Bahu Jalan	11.093,69
5	Taman Pulau dan Batas Kota	2.150,00
6	Taman Lingkungan	41.542,80
7	TPU	161.593,80
	Jumlah	**306.058,21**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Berdasarkan data pada Tabel diatas, total luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah tertata di Kabupaten Bandung adalah seluas 306.058,21 M² atau setara dengan 30,6 hektar. Analisis komposisi menunjukkan bahwa Tempat Pemakaman Umum (TPU) mendominasi dengan porsi terbesar, yaitu 161.593,80 M² (52,8% dari total), yang mengindikasikan bahwa kebutuhan lahan untuk fasilitas ini sangat signifikan dan telah mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan tata ruang. Di luar TPU, kategori RTH aktif yang berfungsi untuk rekreasi dan ekologi didominasi oleh Taman Alun-Alun (46.389,68 M²) dan Taman Lingkungan (41.542,80 M²), yang bersama-sama menyumbang sekitar 28,7% dari total luas. Secara keseluruhan, data ini menjadi dasar yang krusial untuk mengevaluasi pencapaian target proporsi RTH publik sesuai standar nasional dan untuk merencanakan pengembangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan arahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung, strategi peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) difokuskan pada pengembangan model taman tematik atau taman komunal yang dikelola secara kolektif serta penyusunan rencana kebutuhan RTH dan TPU berbasis analisis spasial dan proyeksi demografi.

2.1.5.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) merupakan infrastruktur penting untuk mendukung sanitasi lingkungan yang sehat. Kabupaten Bandung sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat membutuhkan strategi pengembangan SPALD yang tepat sasaran. Berikut merupakan target dan realisasi pelayanan pengolahan air limbah domestik tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Tabel 2.32. Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2024

No	Kecamatan	Target				Realisasi			
		Total (Rumah)	Akses Layak	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T	Akses Layak (Rumah)	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T	Akses Dasar (Rumah)
1	Arjasari	27,050	13,509	10,764	2,701	17,937	6,656	725	3,078
2	Baleendah	65,331	32,606	26,128	6,530	51,692	9,318	2,339	2,483
3	Banjaran	33,524	16,750	13,406	3,348	22,299	5,663	3,356	2,271
4	Bojongsoang	26,790	13,383	10,650	2,676	19,474	3,009	2,261	2,046
5	Cangkuang	22,181	11,089	8,867	2,215	13,242	3,923	3,319	1,697
6	Cicalengka	31,393	15,689	12,553	3,135	19,607	5,684	4,558	1,764
7	Cikancung	24,968	12,483	9,933	2,494	12,638	4,701	6,627	1,413
8	Cilengkrang	13,164	6,581	5,263	1,313	8,539	2,861	641	1,123
9	Cileunyi	43,639	21,819	17,455	4,363	32,804	4,379	3,540	2,916
10	Cimaung	22,325	11,150	8,876	2,229	17,065	3,543	366	1,351
11	Cimenyan	27,373	13,684	10,944	2,733	21,218	4,225	531	1,600
12	Ciparay	46,250	23,071	18,321	4,617	34,858	5,638	2,792	4,229
13	Ciwidey	22,012	11,004	8,801	2,198	13,269	4,760	2,545	1,465
14	DayeuhKolot	36,324	18,161	14,528	3,631	22,902	5,024	5,679	3,179
15	Ibun	22,127	10,970	8,845	2,207	13,437	4,180	2,914	2,801
16	Katapang	33,553	16,758	13,335	3,351	22,068	7,526	1,801	4,081
17	Kertasari	18,376	9,169	7,297	1,835	8,852	2,444	5,719	2,259
18	Kutawaringin	26,492	13,236	10,593	2,644	19,126	3,430	1,880	2,539
19	Majalaya	41,225	20,617	16,435	4,119	22,191	9,656	6,450	4,423
20	Margaasih	37,388	18,690	14,903	3,736	30,937	1,557	2,096	2,798
21	Margahayu	30,801	15,398	12,318	3,078	23,534	3,638	1,622	2,176
22	Nagreg	14,993	7,493	5,993	1,494	10,752	3,072	-	1,169
23	Pacet	30,062	15,016	11,968	2,998	19,022	5,880	2,877	4,106
24	Pameungpeuk	21,937	10,951	8,773	2,192	16,505	3,613	264	1,555
25	Pangalengan	39,640	19,803	15,801	3,958	25,484	8,726	2,862	2,877
26	Paseh	34,901	17,445	13,955	3,485	22,101	5,381	5,196	3,641
27	Pasirjambu	23,673	11,812	9,463	2,364	13,418	3,412	5,061	1,782
28	Rancabali	12,554	6,269	4,963	1,253	6,920	1,038	3,883	1,047
29	Rancaekek	46,487	23,231	18,587	4,643	30,538	7,740	5,353	3,575
30	Solokanjeruk	23,329	11,661	9,327	2,328	15,303	5,880	1,205	978
31	Soreang	29,803	14,880	11,915	2,975	17,583	7,312	3,078	1,830
	Kabupaten Bandung	**929,665**	**464,378**	**370,960**	**92,843**	**625,315**	**153,869**	**91,540**	**74,252**
				Persentase Layanan		**67.26%**	**16.55%**	**9.85%**	**7.99%**
				Capaian SPM		**93.66%**			

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2025

Berdasarkan data capaian SPALD di Kabupaten Bandung dari total 929.665 rumah, baru 67,26% (625.315 rumah) yang memiliki akses layak, sementara 16,55% (153.869 rumah)

terlayani oleh SPALD-S (sistem setempat) dan 9,85% (91.540 rumah) oleh SPALD-T (sistem terpusat). Meskipun capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) telah mencapai 93,66%, masih terdapat 7,99% (74.252 rumah) yang hanya memiliki akses dasar, mengindikasikan ketimpangan layanan antarkecamatan. Beberapa kecamatan seperti Baleendah (51.692 akses layak) dan Ciparay (34.858) menunjukkan kinerja baik, sementara wilayah seperti Kertasari (8.852) dan Rancabali (6.920) masih tertinggal, terutama dalam akses SPALD-T. Realisasi SPALD-T yang masih rendah di sebagian besar kecamatan (misalnya, Nagreg dengan 0 realisasi) menegaskan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur terpusat, khususnya di daerah dengan pertumbuhan permukiman tinggi seperti Rancaekek dan Majalaya, guna memastikan pemerataan sanitasi yang berkelanjutan. Berdasarkan kajian teknis dan kondisi eksisting, ditetapkan lokasi prioritas pengembangan SPALD tersaji pada tabel beirkut.

Tabel 2.33. Lokasi Prioritas Penanganan SPALD Kabupaten Bandung

No.	Kecamatan	Jumlah Titik
1	Arjasari	29
2	Baleendah	16
3	Banjaran	19
4	Bojongsoang	20
5	Cangkuang	23
6	Cicalengka	30
7	Cikancung	17
8	Cilengkrang	19
9	Cileunyi	17
10	Cimaung	28
11	Cimenyan	30
12	Ciparay	24
13	Ciwidey	21
14	DayeuhKolot	13
15	Ibun	34
16	Katapang	21
17	Kertasari	23
18	Kutawaringin	34
19	Majalaya	20
20	Margaasih	12
21	Margahayu	14
22	Nagreg	31
23	Pacet	32
24	Pameungpeuk	14
25	Pangalengan	30
26	Paseh	24
27	Pasirjambu	36
28	Rancabali	16
29	Rancaekek	35
30	Solokanjeruk	21
31	Soreang	33
	Kabupaten Bandung	**736**

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2025

Data jumlah titik prioritas pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Bandung menunjukkan variasi yang signifikan antar kecamatan, dengan total 736 titik yang tersebar di 31 kecamatan. Konsentrasi kebutuhan tertinggi di Pasirjambu (36 titik), Rancaekek (35), Ibun (34), Kutawaringin (34), dan Soreang (33), yang secara kolektif menyumbang 23% total kebutuhan, sementara wilayah seperti Margaasih (12) dan DayeuhKolot (13) menunjukkan kebutuhan relatif lebih rendah.

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak merujuk pada rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. Fasilitas ini dirancang untuk mencegah kontak manusia dengan limbah, mengurangi risiko penyebaran penyakit, dan menjaga kualitas air tanah.

Tabel 2.34. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen) Kabupaten Bandung

Tahun	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen)
2020	85,11
2021	90,80
2022	93,43
2023	92,75
2024	93,66

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang & Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

Persentase rumah tangga di Kabupaten Bandung yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan signifikan dari 85,11% pada tahun 2020 menjadi 93,66% di tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya sistematis pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur sanitasi melalui program pembangunan fasilitas dasar, edukasi masyarakat, dan koordinasi antar-dinas terkait. Namun, terdapat fluktuasi dalam tren tahunan: peningkatan tajam terjadi pada 2020–2021 (+5,69%), diikuti kenaikan moderat ke 93,43% (2022), penurunan kecil ke 92,75% (2023), dan pemulihan ke 93,66% (2024).

2.1.5.4 Pengelolaan Sampah

A. Sumber Sampah

Berdasarkan data dari DLH Kabupaten Bandung, sumber sampah di wilayah ini dapat dikategorikan menjadi sampah permukiman (rumah tangga), non-permukiman (pasar, komersial, institusi, industri, wisata, dan fasilitas kesehatan), serta sampah dari penyapuan jalan. Sampah permukiman mencakup aktivitas rumah tangga di seluruh wilayah, sementara sampah non-permukiman seperti pasar dan industri didominasi oleh bahan organik dan anorganik. Adapun sumber sampah di Kabupaten Bandung tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35. Sumber Sampah di Kabupaten Bandung

No.	Sumber Sampah	Uraian Singkat
1	Sampah permukiman	Berasal dari aktivitas rumah tangga di permukiman teratur dan tidak teratur.
2	Sampah pasar	Dominan organik (sisa sayur/buah), berasal dari pasar di setiap kecamatan/kelurahan.
3	Sampah komersial	Dari pertokoan, hotel, dan restoran, terutama di wilayah perkotaan.
4	Sampah rumah sakit/puskesmas	Organik, anorganik, dan limbah B3 (B3 dikelola pihak ketiga).
5	Sampah institusi	Dari sekolah/perkantoran (kertas, kardus, organik), termasuk komplek pemerintahan di Soreang.
6	Sampah industri	Dari industri kecil hingga besar, residunya dilayani pemerintah.
7	Sampah penyapuan jalan	Dari pengguna jalan, ditangani di poros utama ibu kota Kabupaten Bandung (Soreang).
8	Sampah tempat wisata	Dari aktivitas wisata, pelayanan berdasarkan permintaan pengelola.
9	Sampah permukiman	Berasal dari aktivitas rumah tangga di permukiman teratur dan tidak teratur.

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2025

B. Timbulan Sampah

Berdasarkan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah, terlihat perbedaan signifikan dalam jumlah sampah yang dihasilkan berdasarkan klasifikasi permukiman. Permukiman menengah mencatat timbulan sampah tertinggi, yaitu 0,44 kg/orang/hari, lebih tinggi dibandingkan permukiman menengah ke atas (0,29 kg/orang/hari) dan menengah ke bawah (0,20 kg/orang/hari). Fenomena ini mengindikasikan bahwa pola konsumsi, gaya hidup, atau sistem pengelolaan sampah di permukiman menengah mungkin kurang efisien dibandingkan kelompok lainnya. Sementara itu, rata-rata timbulan sampah perkotaan Kabupaten Bandung mencapai 0,31 kg/orang/hari, angka ini mencerminkan variasi kontribusi antar-kelompok permukiman, dengan permukiman menengah menjadi faktor dominan peningkatan rata-rata. Berikut merupakan detail terkait timbulan sampah berdasarkan sumbernya di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.36. Timbulan Sampah Berdasarkan Sumber di Kabupaten Bandung

No	Sumber Sampah	Timbulan Sampah (Kg/Orang/Hari)
1	Permukiman Menengah ke Atas	0,29
2	Permukiman Menengah	0,44
3	Permukiman Menengah ke Bawah	0,11
Rata-Rata		0,31

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Kabupaten Bandung menunjukkan perkembangan yang beragam dalam upaya pengelolaan sampah selama lima tahun terakhir. Pengurangan timbulan sampah mengalami peningkatan signifikan dari 21,25% (2020) menjadi 50,77% (2024), mencerminkan keberhasilan program preventif seperti edukasi masyarakat, daur ulang, atau penerapan kebijakan *zero waste*. Di sisi lain, penanganan sampah bersifat fluktuatif: tertinggi pada 2020 (41,12%), turun drastis di 2021 (24,95%), kemudian meningkat kembali pada 2022–2023 (33,81%–30,41%), dan sedikit naik di 2024 (36,88%).

Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SISPN) Kabupaten Bandung, timbulan sampah per kapita pada periode 2020 hingga 2022 tercatat sebesar 0,30 kg per orang per hari. Namun, hasil pengukuran sampel yang dilakukan antara Agustus hingga September 2023 menunjukkan kenaikan dengan timbulan per kapita mencapai 0,47 kg per orang per hari. Perbedaan angka timbulan per kapita ini sangat berpengaruh terhadap total volume timbulan sampah di Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Sebagai contoh, total timbulan sampah di Kabupaten Bandung tercatat sebesar 1.321,35 ton per hari pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 1.820,6 ton per hari pada tahun 2024. Perkembangan ini dalam timbulan sampah per kapita maupun total timbulan sampah dapat dilihat secara rinci pada gambar dan tabel yang disajikan berikut ini.

Tabel 2.37. Perkembangan Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung

Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton/hari)	Timbulan Sampah Perkapita (Kg/O/Hr)
2020	1321,35	0,30
2021	1268,33	0,30
2022	1283,16	0,30
2023	1763,20	0,47
2024	1820,60	0,47

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2025

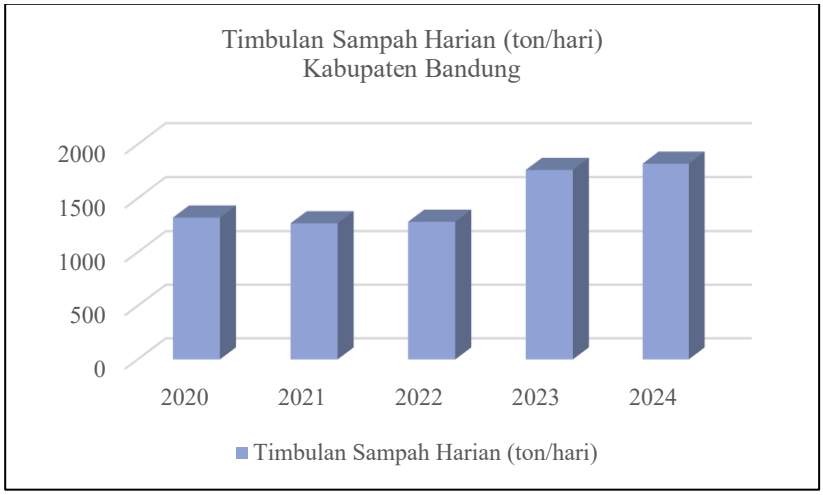

Gambar 2.35. Perkembangan Timbulan Sampah Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Data dari UPTD DLH Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah sampah yang berasal dari Kabupaten Bandung dan dikirim ke Tempat Pengolahan Kompos (TPK) Sarimukti mengalami peningkatan dari 230,36 ton per hari pada tahun 2020 menjadi 235,15 ton per hari pada tahun 2022. Namun, terdapat perbedaan data jika dibandingkan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SISPN) Kabupaten Bandung, yang mencatat

jumlah sampah yang dikirim ke TPK Sarimukti pada tahun 2022 mencapai 402 ton per hari.

Perbedaan ini kemungkinan berasal dari perbedaan metode pencatatan atau cakupan data masing-masing sumber. Untuk konteks yang lebih luas, TPK Sarimukti yang melayani Kabupaten Bandung bersama daerah Bandung Raya lainnya memang menghadapi masalah kapasitas karena kenaikan terus-menerus volume sampah yang masuk. Pada tahun-tahun terakhir, terdapat peningkatan pengiriman sampah dari Kabupaten Bandung ke Sarimukti, meskipun dengan angka pasti yang berbeda antara data UPTD DLH Jawa Barat dan SISPN Kabupaten Bandung. Tren peningkatan jumlah sampah yang diangkut ini juga sejalan dengan peningkatan timbulan sampah per kapita dan total timbulan sampah di Kabupaten Bandung yang telah dicatat pada data sebelumnya.Informasi lengkap berupa tabel dan grafik tren pengiriman sampah ke TPK Sarimukti dari Kabupaten Bandung tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.38. Perkembangan Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung

Tahun	Sampah ke TPA dari Kab. Bandung		
	Ton/Tahun	Ton/Hari (data PSTR)	Ton/Hari (data PSTR)
2020	84082.224	230.36	
2021	83666.52	229.22	300
2022	49380.716	235.15	402

Sumber: Data Dikelola SIPD, UPTD DLH Jawa Barat & SISPN didalam Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah, 2024

C. Komposisi Sampah

Pengelompokan jenis sampah berdasarkan berat dan komposisi mengacu pada SNI 19-3694-1994, yang membaginya menjadi komposisi mikro dan makro. Komposisi mikro mencakup delapan jenis, seperti sisa makanan, daun, kertas, kayu, kain, karet, plastik, logam, dan kaca. Sementara itu, komposisi makro dibagi menjadi empat kategori utama: sampah organik (sisa makanan dan sapuan halaman), sampah daur ulang (kertas, plastik, logam, kaca), sampah B3 rumah tangga (baterai, obat-obatan, lampu), dan sampah residu (karet, kain, dll.). Di Kabupaten Bandung, komposisi sampah makro permukiman didominasi oleh anorganik daur ulang high value (39%) dan organik (33%), sedangkan di kawasan non-permukiman, sampah organik lebih tinggi (47,8%) dengan daur ulang high value (36%). Hal ini menunjukkan perbedaan karakteristik sampah antara kawasan permukiman dan non-permukiman, yang memerlukan strategi pengelolaan berbeda untuk meningkatkan efektivitas daur ulang dan pengurangan limbah.

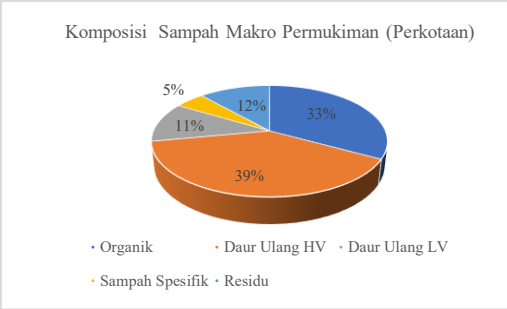

Gambar a: Komposisi Sampah Makro Permukiman (Perkotaan)

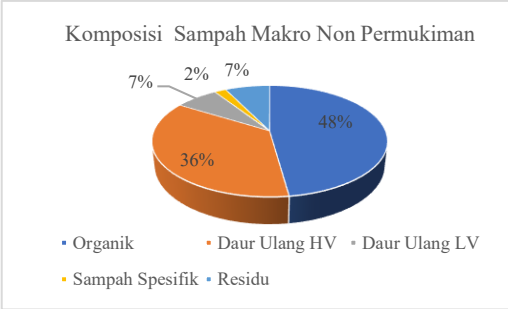

Gambar b: Komposisi Sampah Makro Non Permukiman

Gambar 2.36. Komposisi Sampah Makro Permukiman dan Non Permukiman di Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

D. Wilayah Pelayanan

Berdasarkan data dari Laporan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung tahun 2023, layanan pengelolaan sampah di wilayah ini terbagi menjadi empat zona pelayanan, masing-masing dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Saat ini, dari total 31 kecamatan, 25 kecamatan telah mendapatkan layanan, meskipun cakupannya belum merata hingga tingkat permukiman. Beberapa kecamatan, seperti Cimaung, Pacet, dan Solokan Jeruk, hanya menerima layanan untuk sampah pasar. Sementara itu, Kecamatan Ibun dan Pacet di Wilayah Pelayanan (WP) Ciparay sama sekali belum memiliki layanan pengangkutan sampah, baik untuk permukiman maupun non-permukiman.

Tabel 2.39. Wilayah Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung

No	WP Soreang	WP Baleendah	WP Rancaekek	WP Ciparay
1	Soreang	Banjaran	Cileunyi	Majalaya
2	Katapang	Cangkuang	Cicalengka	Ciparay
3	Margahayu	Bojongsoang	Rancaekek	Arjasari
4	Margaasih	Baleendah	Cilengkrang	Paseh
5	Ciwidey	Pameungpeuk	Nagreg	Pacet*
6	Rancabali	Dayeuhkolot	Cikancung	Solokan Jeruk
7	Kutawaringin	Pangalengan	Ibun*	
8	Pasirjambu	Cimaung*	Kertasari	

Keterangan:

- *Kecamatan bertanda bintang hanya dilayani untuk sampah pasar atau belum ada layanan sama sekali.
- Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Data lebih rinci menunjukkan variasi cakupan layanan antar-UPTD. Berikut merupakan tabel rincian UPTR berdasarkan Kecamatan dengan rincian berupa titik dan KK terlayani Persampahan di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.40. Rincian Wilayah Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung

No	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Kecamatan	Titik Terlayani	KK Terlayani
1	UPTD Rancaekek	Cileunyi	53	7,952

No	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Kecamatan	Titik Terlayani	KK Terlayani
		Cicalengka	7	218
		Rancaekek	40	6,131
		Cimenyan	5	676
		Cilengkrang	5	1,054
		Nagreg	-	-
		Cikancung	-	-
2	UPTD Soreang	Soreang	38	3,662
		Katapang	19	3,644
		Margahayu	43	6,721
		Margaasih	20	4,444
		Ciwidey	1	0
		Rancabali	-	-
		Kutawaringin	5	376
		Pasirjambu	1	0
3	UPTD Baleendah	Banjaran	11	1,339
		Cangkuang	10	2,056
		Bojongsoang	18	4,859
		Baleendah	33	5,464
		Pameungpeuk	2	215
		Dayeuhkolot	13	1,664
		Pangalengan	-	-
		Cimaung	1	270
4	UPTD Ciparay	Majalaya	13	1,049
		Ciparay	6	1,225
		Arjasari	9	1,220
		Paseh	4	300
		Pacet	0	0
		Solokanjeruk	2	145
		Ibun	-	-
		Kertasari	-	-

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Berdasarkan data DLH Kabupaten Bandung (2023), UPTD Rancaekek menunjukkan cakupan terluas dengan 53 titik layanan dan 7.952 KK terlayani di Cileunyi, diikuti oleh Rancaekek (40 titik, 6.131 KK), meski beberapa kecamatan seperti Nagreg dan Cikancung belum terdata. UPTD Soreang mendominasi dalam jumlah titik layanan (43 titik di Margahayu) dengan 6.721 KK terlayani, namun masih terdapat keterbatasan di Ciwidey dan Pasirjambu (masing-masing hanya 1 titik, 0 KK). UPTD Baleendah memiliki distribusi merata dengan 33 titik dan 5.464 KK terlayani di Baleendah, tetapi wilayah seperti Pangalengan belum terjangkau. Sementara itu, UPTD Ciparay memiliki cakupan terbatas, dengan 13 titik dan 1.049 KK terlayani di Majalaya sebagai yang tertinggi, serta beberapa kecamatan seperti Pacet dan Ibun yang belum terlayani sama sekali. Data ini mengindikasikan ketimpangan layanan antarkecamatan, di mana wilayah

perkotaan cenderung lebih terlayani dibandingkan daerah pinggiran. Detail wilayah pelayanan berdasarkan lokasi dapat dilihat pada peta berikut.

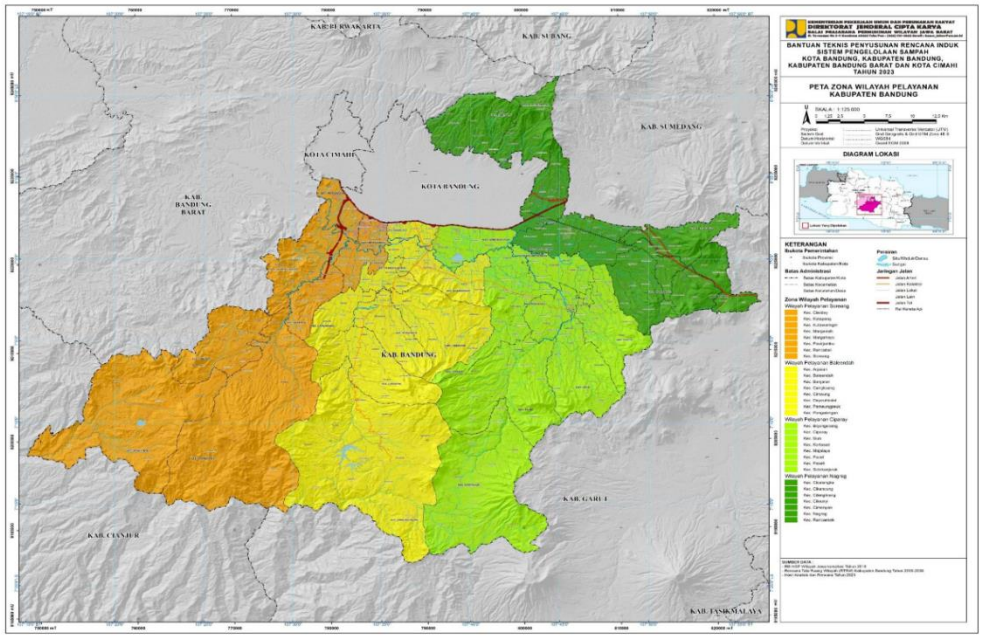

Gambar 2.37. Peta Wilayah Pelayanan Sampah

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

E. Pengelolaan Sampah

Kabupaten Bandung sebagai wilayah penyangga metropolitan Bandung yang terus berkembang, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh warganya. Dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, timbulan sampah yang harus dikelola pun semakin meningkat setiap tahunnya, menekan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung tidak dapat hanya mengandalkan paradigma lama dengan mengangkut dan membuang semua sampah ke TPA, tetapi harus beralih kepada pendekatan pengelolaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini diwujudkan melalui serangkaian intervensi yang terbagi dalam dua pilar utama, yaitu pengurangan sampah *(reduce dan reuse)* dari sumbernya dan penanganan sampah *(recycle, recovery, dan treatment)* untuk meminimalisir yang dibuang ke TPA, yang keseluruhan capaian kinerjanya dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.41. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung

No	Keterangan	Timbulan (Ton/Hari)	
		2023	2024
I	**TIMBULAN SAMPAH** (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	1301.53	1312.20
II	**JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH**		
1	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah		

No	Keterangan	Timbulan (Ton/Hari)	
		2023	2024
a.	Pembatasan pada Sekolah Adiwiyata	1.88	1.88
b.	Pembatasan pada Retail Modern/Swalayan/Mini Market	2.50	2.50
c.	Pembatasan pada Permukiman	3.32	7.40
2	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah		
a.	Komposting rumah tangga (LCO)	4.05176	8.05
b.	Bank Sampah Unit (Jumlah total 318 unit, yang terdata 281 unit)	6.74	6.74
c.	Bank Sampah Induk - BSB, Binangkit Citaliktik	12.1	18.10
d.	TPS 3R	277.4	268.88
e.	TPS 3R dan Rumah Kompos	1.502	2.50
f.	TPST Sekarwangi	4	4.00
g.	BST	13.323	13.32
h.	Industri Daur Ulang	332.82	332.87
III	**JUMLAH PENANGANAN**		
1	TPS 3R Pemda (jalak harupat)	3.5	3.70
2	TPST Citaliktik+RDF Citaliktik	23.11	35.61
3	PDU	10.8	10.80
4	POO Puspa (maggot) + RDF Puspa	74.608	53.01
5	Proses Thermal Pirolisis	8	8.00
6	Proses Thermal Bumi resik	10	15.00
7	RDF Oxbow Cicukang	8	8.00
8	Sampah ke TPA	257.724	269.78
9	Motah		80.00
Total Sampah Terkelola		1055.38	1150.14
Persentase Sampah Terkelola		81.09%	87.65%

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Timbulan sampah secara keseluruhan mengalami kenaikan dari 1301.53 ton/hari menjadi 1312.20 ton/hari, yang didorong oleh pertumbuhan penduduk. Meskipun demikian, upaya pengurangan sampah di sumber (reduce dan reuse) melalui program seperti Adiwiyata, retail modern, dan bank sampah menunjukkan stabilitas bahkan peningkatan pada beberapa segmen, seperti komposting rumah tangga yang hampir dua kali lipat dan pemanfaatan di TPST Citaliktik. Pada sisi penanganan sampah (waste handling), terdapat perkembangan signifikan dengan bertambahnya kapasitas pengolahan, seperti di TPST Citaliktik dan proses thermal Bumi Resik, serta dimulainya operasi Methane Recovery (Motah) di TPA pada tahun 2024 yang berkontribusi sebesar 80 ton/hari.

Dampak dari upaya pengelolaan sampah terlihat pada peningkatan volume sampah terkelola dari 1055.38 ton/hari (81.09%) menjadi 1150.14 ton/hari (87.65%). Artinya, persentase sampah yang berhasil diolah dan tidak langsung dibuang ke TPA semakin besar. Namun, sampah yang masih berakhir di TPA juga mengalami peningkatan absolut, dari 257.72 ton/hari menjadi 269.78 ton/hari. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun strategi pengelolaan sampah menunjukkan tren yang positif dan efektif dalam

meningkatkan persentase pengelolaan, sistem secara keseluruhan masih perlu diperkuat, khususnya dalam memperbanyak dan meningkatkan kapasitas infrastruktur pengolahan agar dapat mengimbangi laju pertumbuhan timbulan sampah itu sendiri.

Sampai saat ini, Kabupaten Bandung telah memiliki sarana pengolahan sampah TPS 3R dan TPST. Data DLH Kabupaten Bandung jumlah sampah TPS 3R saat ini mencapai 174 unit (99 aktif dan 75 tidak aktif), Bank Sampah sebanyak 320 unit,TPST sebanyak 3 (tiga) unit (TPST PUSPA Jelekong, TPST Citaliktik, TPST Oxbow Cicukang) , BS Tematik dan rumah kompos 310 unit dan Lubang Cerdas Organik (LCO) sebanyak 2 juta unit. Adapun jumlah sarana pengolahan sampah di Kabupaten Bandung untuk TPS 3R adalah sebagai berikut.

1. Bank Sampah

Kabupaten Bandung memiliki total 320 unit bank sampah, dengan 281 unit dalam kondisi aktif dan 39 unit tidak aktif. Bank Sampah adalah program berbasis masyarakat yang terbukti efektif dalam mengurangi sampah anorganik dari sumbernya. potensi besar bank sampah sebagai salah satu pilar dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Bandung. Berikut merupakan jumlah dan sebaran bank sampah dalam kondisi aktif dan non aktif di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.42. Jumlah Bank Sampah dalam Kondisi Aktif dan Non Aktif Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Kondisi (Unit)		Total (Unit)
		Aktif	Tidak Aktif	
Kabupaten Bandung		281	39	320

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

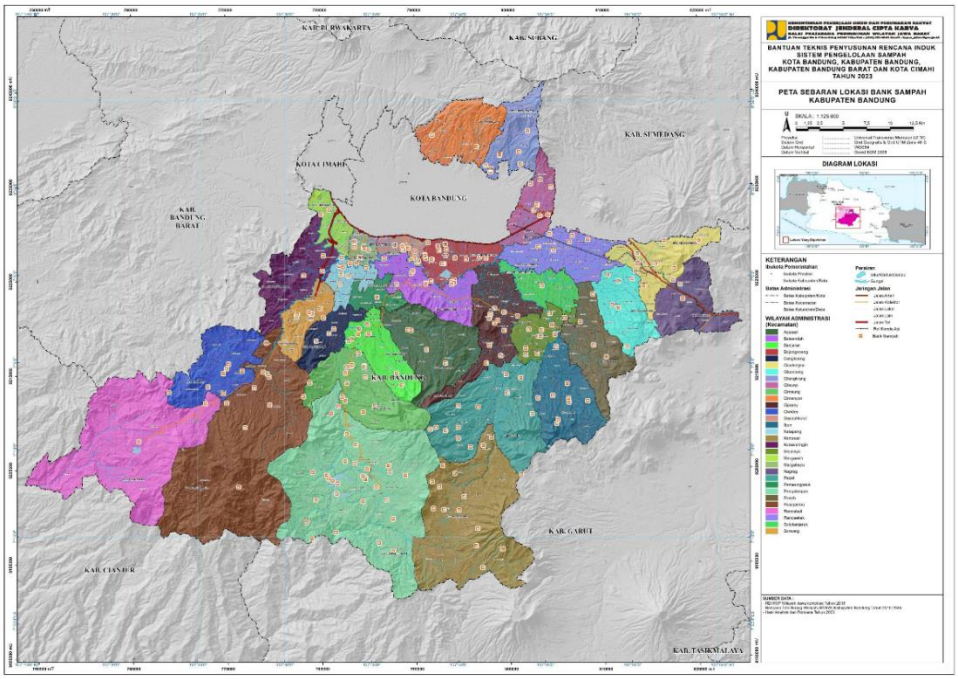

Gambar 2.38. Peta Sebaran Lokasi Bank Sampah di Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

2. TPS3R

Dalam rangka mengurangi volume sampah ke TPA, Kabupaten Bandung menerapkan strategi pengolahan di sumber melalui program 3R dan TPST. Sebagai tulang punggungnya, telah dibangun sebanyak 174 unit TPS 3R yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun, data menunjukkan tantangan signifikan, di mana dari total tersebut hanya 99 unit yang berstatus aktif. Sementara itu, sebanyak 75 unit berada dalam kondisi tidak aktif. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pembangunan infrastruktur dengan keberlanjutan fungsinya. Kecamatan seperti Cimaung dan Cileunyi menjadi contoh wilayah dengan tingkat inaktivitas fasilitas yang tinggi. Oleh karena itu, upaya reaktivasi TPS 3R yang mangkrak menjadi langkah krusial untuk mengoptimalkan program pengurangan sampah di Kabupaten Bandung. Adapun upaya untuk mereaktivasi TPS 3R ialah dengan peremajaan kelembagaan disertai dengan insentif berupa edukasi dan pemenuhan alat pengelolaan sampah. Neraca kinerja pengelolaan sampah secara lengkap digambarkan sebagai berikut:

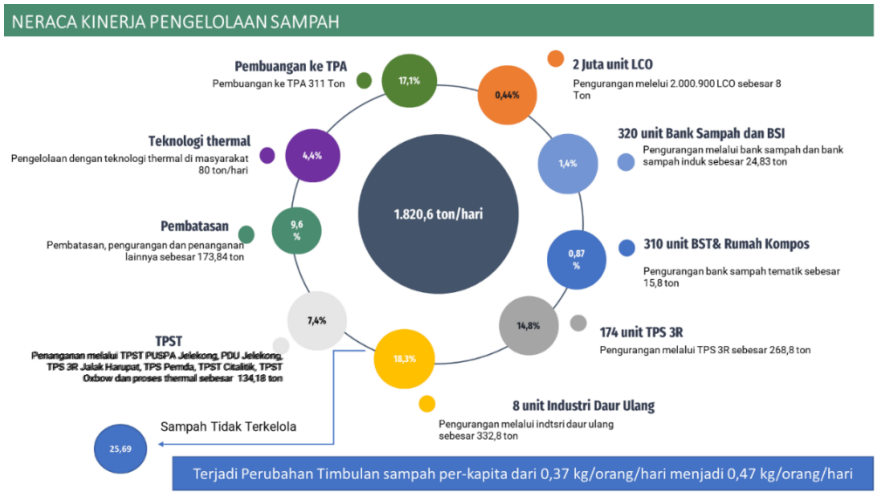

Gambar 2.39. Neraca Kinerja Pengelolaan Sampah
Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Berdasarkan data kondisi unit pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, terlihat bahwa kapasitas operasional antar kecamatan sangat bervariasi, dengan Ciparay menjadi kecamatan dengan jumlah unit terbanyak (11 unit), diikuti oleh Banjaran dan Cicalengka (masing-masing 7 unit). Kecamatan seperti Cimaung dan Katapang juga menghadapi tantangan dengan jumlah unit tidak aktif yang tinggi (masing-masing 5 dan 3 unit). Adanya **8 unit belum aktif** secara keseluruhan (misalnya di Cikancung dan Majalaya) menunjukkan peluang peningkatan melalui aktivasi atau redistribusi sumber daya. Secara agregat, dari total **126 unit**, hanya **75 unit (59.5%) yang aktif**, sementara **43 unit (34.1%) tidak beroperasi.** Berikut merupakan sebaran jumlah dan titik lokasi TPS 3R di Kabupaten Bandung.

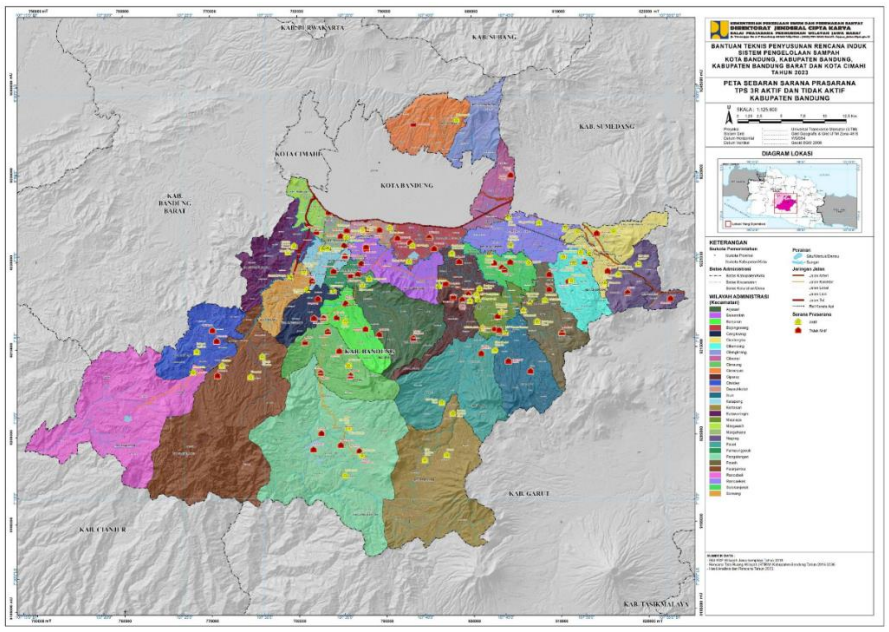

Gambar 2.40. Peta Sebaran Lokasi TPS3R di Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

3. TPST

Hanya tiga kecamatan di Kabupaten Bandung yakni Kecamatan Margaasih, Soreang, dan Baleendah yang memiliki Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dalam kondisi aktif, masing-masing dengan 1 unit, sehingga total TPST aktif di Kabupaten Bandung hanya 3 unit. Berikut tabel dan gambar peta yang menjelaskan jumlah dan titik lokasi persebaran TPST dalam kondisi aktif di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.43. Jumlah TPST dalam Kondisi Aktif dan Non Aktif Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Kondisi (Unit)		Total (Unit)
		Aktif	Tidak Aktif	
1	Margaasih	1	0	1
2	Soreang	1	0	1
3	Baleendah	1	0	1
Kabupaten Bandung		**3**	**0**	**3**

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

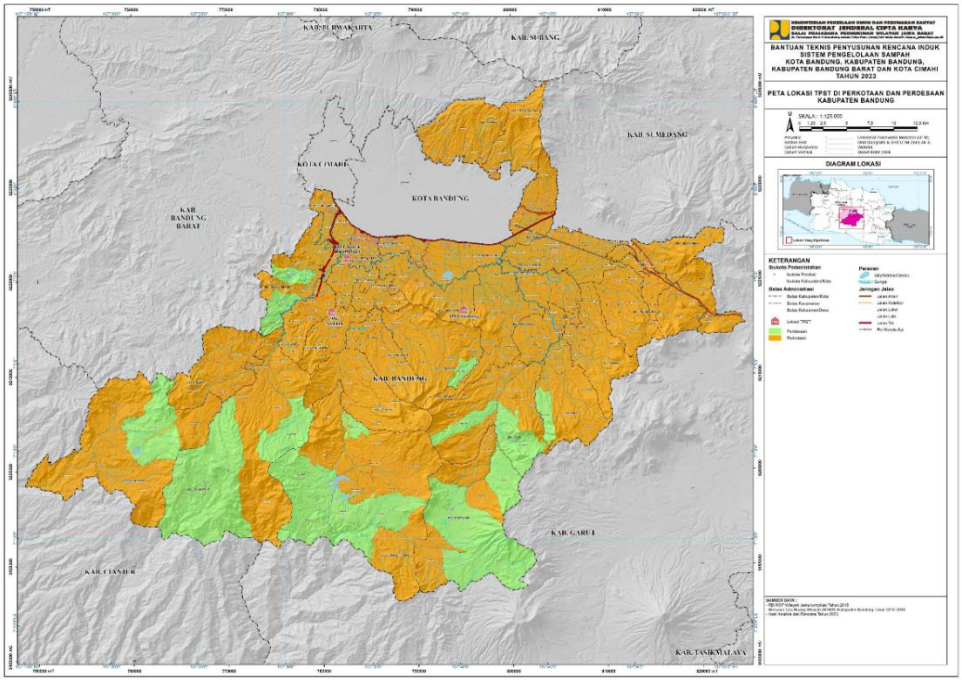

Gambar 2.41. Peta Sebaran Lokasi TPST di Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

F. Pengangkutan Sampah

Di Kabupaten Bandung, proses pengangkutan sampah dilakukan melalui pola pemindahan langsung yang melibatkan pengambilan sampah dari wadah individu, tong sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta kontainer. Proses ini menggunakan berbagai jenis armada pengangkut sampah, antara lain arm roll sebanyak 47 unit, dump truk sebanyak 73 unit, tronton sebanyak 5 unit, serta compactor sebanyak 3 unit (merujuk pada Power Point Sosialisasi Perda No 1 tahun 2022, 11 Juli 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup). Selain armada tersebut, Kabupaten Bandung juga menerima dukungan dari program Integrated Solid Waste Management Program (ISWMP) berupa

bantuan alat angkut tambahan, yaitu 1 unit arm roll truck, 16 unit motor sampah, dan 3 unit pick up. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44.Armada Pengangkutan Sampah Kabupaten Bandung

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Arm Roll Truck	47	Termasuk 1 unit bantuan ISWMP
2	Dump Truck	73	DLH
3	Compactor	3	DLH
4	Tronton	5	DLH

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

G. Pemrosesan Akhir

Saat ini Kabupaten Bandung mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang terletak di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi pembuangan akhir sampah. Dengan luas area mencapai 25,2 hektar, TPA ini menerima timbunan sampah sebesar 109.500 ton per tahun dari Kabupaten Bandung berdasarkan data SISPN tahun 2021. Angka ini menunjukkan besarnya volume sampah yang harus dikelola setiap harinya, sekaligus menjadi indikator tingginya kebutuhan akan sistem pengelolaan sampah yang efektif di wilayah ini.

TPA Sarimukti dilengkapi dengan berbagai sarana utama dan penunjang yang cukup komprehensif. Sarana utama meliputi landfill sebagai area pembuangan akhir, Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) untuk mengolah air sampah, jaringan jalan operasi, sistem drainase, serta sumur pantau untuk pemantauan lingkungan. Sementara sarana penunjangnya terdiri dari kantor pengelola, jembatan timbang beserta kantor pencatatnya, garasi alat berat, hanggar komposting, dan gudang penyimpanan. Kelengkapan fasilitas ini menunjukkan upaya untuk memenuhi standar pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Gambar 2.42. Sarana dan Prasaran di TPK Sarimukti
Sumber: Data Dikelola SIPD, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, 2024

H. Kinerja Pengelolaan Sampah

Pada tahun 2024, Kabupaten Bandung berhasil mengelola persentase sampah sebesar 100,57% dari target yang ditetapkan sebesar 87,15%, dengan realisasi pencapaian sebesar 87,65%. Namun, kinerja penanganan sampah hanya mencapai 62,18% dari target 59,31%, dengan realisasi sebesar 36,88%. Sementara itu, capaian pengurangan sampah sangat tinggi, yakni mencapai 182,36% dari target 27,84%, dengan realisasi 50,77%. Faktor utama yang mempengaruhi hasil ini antara lain adalah keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah serta belum adanya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) lokal di Kabupaten Bandung.

Dari segi realisasi, persentase volume sampah yang berhasil dikelola meningkat sebesar 6,56% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 81,09% pada tahun 2023 menjadi 87,65% pada tahun 2024. Dari sisi pencapaian kinerja, persentase volume sampah yang dikelola naik sekitar 0,4%, dari 100,2% pada 2023 menjadi 100,6% pada 2024. Untuk indikator sasaran strategis, persentase penanganan sampah meningkat sebesar 6,47%, dari 30,41% di tahun 2023 menjadi 36,88% di tahun 2024. Begitu pula dengan persentase pengurangan sampah yang naik tipis sebesar 0,09%, dari 50,68% di tahun 2023 menjadi 50,77% pada tahun 2024. Namun, jika dilihat dari pencapaian

kinerja, persentase penanganan sampah pada 2024 meningkat 6,74% dibandingkan tahun 2023, sedangkan persentase pengurangan sampah justru menurun sebesar 11,97%.

Dari perspektif rencana jangka menengah, capaian persentase volume sampah yang terkelola pada tahun 2024 belum mencapai target akhir RPJMD-P dan Renstra-P, yaitu 87,65% dari target 100%. Sedangkan untuk persentase pengurangan sampah, capaian tahun 2024 sudah melampaui target akhir RPJMD-P dan Renstra-P sebesar 158,81%, dengan realisasi 50,77% dari target 31,97%. Namun, capaian persentase penanganan sampah masih di bawah target, yakni 54,21% dari target 68,03%, dengan realisasi 36,88%. Peningkatan pengurangan sampah ini didorong oleh bertambahnya sarana pengurangan sampah seperti Bank Sampah Tematik dan TPS3R, serta adanya delapan industri daur ulang yang memanfaatkan sampah sebagai bahan baku. Di sisi lain, penanganan sampah belum optimal karena keterbatasan sarana-prasarana dan adanya pembatasan kuota pembuangan sampah ke TPA Sarimukti.

Menurut evaluasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Provinsi Jawa Barat dalam Road Map Rencana Aksi Pengelolaan Sampah DLH Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2024, rerata penanganan sampah di Jawa Barat adalah 43,63%, sedangkan rerata pengurangan sampah hanya 13,03%, sehingga total pengelolaan sampah mencapai 56,66%. Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam persentase volume sampah yang terkelola di tahun 2024, yaitu lebih tinggi sebesar 30,99%. Realisasi pengurangan sampah di Kabupaten Bandung juga lebih tinggi 37,74% daripada rata-rata provinsi, meski persentase penanganan sampah di Kabupaten Bandung masih lebih rendah 6,75% dibandingkan rerata Jawa Barat.

Tabel 2.45. Indikator Kinerja terkait Persampahan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target pada PK	Realisasi	Capaian (%)	Target pada PK	Realisasi	Capaian (%)
1	**Tujuan**	Persentase volume sampah yang terkelola	80,93%	81,09%	100,20%	87,15%	87,65%	100,57%
	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah							
2	**Sasaran Strategis:**	Persentase penanganan sampah	54,85%	30,41%	55,44%	59,31%	36,88%	62,18%
	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah	26,08%	50,68%	194,33%	27,84%	50,77%	182,36%

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Berdasarkan data diatas pada tahun 2024 persentase volume sampah yang terkelola yakni 87,65% sehingga masih terdapat 12,35% timbulan sampah di Kabupaten Bandung belum terkelola dengan baik, menunjukkan adanya celah dalam sistem pengelolaan persampahan. Analisis sosio-ekonomi (Sosek) tahun 2023 mengungkap bahwa sebagian besar masyarakat (66,18%) bergantung pada layanan pengangkutan sampah oleh pemerintah, sementara 25,49% masih melakukan pembakaran sampah—praktik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Selain itu, 4,41% responden mengaku membuang sampah sembarangan, dan 3,43% memilih mengubur sampah di tanah, yang berisiko mencemari tanah dan air tanah. Perilaku ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan metode pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta ketergantungan yang tinggi pada layanan pemerintah. Untuk mengurangi timbulan sampah yang tidak terkelola, diperlukan intervensi edukatif untuk mengubah perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi pembakaran dan pembuangan sembarangan, serta penguatan infrastruktur pengelolaan sampah agar lebih inklusif dan terjangkau. Banyak program baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang berupaya menumbuhkan kebiasaan masyarakat agar berdisiplin membuang sampah dan menggerakkan warga untuk menangani sampah dengan baik. Adapun terkait kedisiplinan masyarakat akan terhubung dengan ketersediaan/kepemilikan sarana pembuangan sampah.

Beberapa upaya perbaikan yang direncanakan guna mengakselerasi peningkatan kinerja volume sampah yang terkelola pada tahun 2025 meliputi: penerapan kawasan pengelolaan sampah mandiri berbasis teknologi di area perumahan, pariwisata, dan industri; peningkatan kualitas Tempat Pengelolaan Sampah, Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R); penambahan fasilitas pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF); optimalisasi fungsi bank sampah induk; pembangunan Pusat Pengolahan Sampah dan Pengomposan (PUSPA) di Nagreg; implementasi teknologi pemusnahan residu; operasionalisasi pengolahan sampah dengan teknologi hydrodrive; peningkatan sarana dan prasarana melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang); aktivasi Sistem Pengelolaan Sampah (SPA) di Bojong; pembentukan kader penggerak edukasi pengelolaan sampah dan penguatan paguyuban maggot; serta optimalisasi Kawasan Bersih, Bagus, dan Sehat (KBBBS) untuk edukasi, operasi, dan pengawasan. Selain itu, mendukung kegiatan pengelolaan sampah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjalankan satu program utama dengan satu kegiatan dan sembilan subkegiatan guna mencapai target peningkatan kinerja pengelolaan sampah secara efisien, dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya sebesar 7,47%. Kinerja pengelolaan sampah yang meningkat, yang diukur

berdasarkan persentase sampah yang berhasil dikelola, didukung oleh program pengelolaan sampah tersebut. Pengelolaan sampah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 46.294.184.303,00 yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.

Tabel 2.46. APBD Pengelolaan Sampah Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
DLH	33.496.424.508	39.301.459.166	51.730.310.467	42.092.430.303
DPUTR		3.295.000.000	6.993.482.215	4.201.754.000
Jumlah APBD	**33.496.424.508**	**42. 596.459.166**	**58.723.792.682**	**46. 294.184.303**

Sumber: Data Dikelola SIPD, DLH dan DPUTR, 2025

I. Sistem Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung didasarkan pada tiga peraturan utama:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 288 Tahun 2023 tentang tatacara Pemungutan Retribusi Daerah
4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bandung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
7. Intruksi Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Pengurangan dan Pembatasan Penggunaan Kemasan/Wadah/Kantong sekali pakai di Kabupaten Bandung.
8. Intruksi Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Rangka Pengendalian Perubahan Iklim

Berdasarkan Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2022 tentang kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dibagi pembahasannya sebagi berikut.

A. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Jakstrada merupakan pedoman terpadu untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan, meliputi:

2. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi peningkatan kinerja Pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan :

1. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sedangkan penanganan sampah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui:

1. Pemilahan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan
5. Pemrosesan Akhir

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terbagi menjadi 2 jenis kegiatan utama, yaitu kegiatan pengurangan yang berfokus pada pencegahan dan minimasi timbulan sampah dari sumbernya, serta kegiatan penanganan yang mencakup pengelolaan sampah setelah dihasilkan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, sebagaimana secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.47. Kegiatan Pengurangan dan Penanganan

No	Pengurangan	Penanganan
1	Peningkatan pengangkutan sampah melalui penambahan sewa armada sebanyak 25 unit dump truk dan 4 unit tronton dan pembelian dump truk melalui belanja modal sebanyak 7 unit yang berpotensi meningkatkan pengangkutan pelayanan,	Peningkatan sarana-prasarana pengurangan sampah : TPS 3R 172 Unit, Bank Sampah 318 unit dan Bank Sampah Tematik (BST) 306 unit serta bantuan sarpras melalui hibah pokir dan musrenbang.
2	Peningkatan pengolahan sampah melalui pengelolaan pada TPS3R dengan penambahan 25 Unit mesin Gibrig (pemilah sampah), peningkatan pengolahan TPST	Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat, dilaksanakan dengan Bimbingan Teknis pengelolaan (Bimtek) sampah sebanyak 575 peserta, sosialisasi edukasi program oleh Kader

No	Pengurangan	Penanganan
	Jelekong sebesar 30 ton/hari, TPST Citaistik 10 ton/hari dan cangkuang 6 ton/hari, pengolahan maggot 3,3 ton/hari,	B3S kepada masyarakat secara langsung sebanyak 9300 titik, juga melalui media informasi lainnya, serta Pilot project PPAM (Pelaksanaan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat) memilah sampah dari sumber di Desa Mekarrahayu sebanyak 2.550 KK di RT 2 RW 17 Desa Mekarrahayu, dan intervensi sekolah SMP IT Fitrah Insani 3
3	Penguatan kelembagaan melalui penyusunan dokumen kajian kelembagaan perubahan UPTD Pengangkutan Sampah (UPTD PS) menjadi UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah (UPTD PPS),	
4	Penguatan kelembagaan melalui pembuatan komitmen bersama para camat, pelaku usaha perumahan, pelaku industri dan pelaku	
5	pariwisata untuk pengelolaan sampah mandiri berbasis rumah tangga,	
6	Peningkatan SDM dan Kader Pengelola Sampah melalui penyediaan Pengemudi 100 orang, Asisten Pengemudi 266 orang, Kader BBBS 348 orang, Kader Penyapu Jalan 77 orang dan Kader TPST 144 orang.	
7	Peningkatan pengangkutan sampah melalui penambahan sewa armada sebanyak 25 unit dump truk dan 4 unit tronton dan pembelian dump truk melalui belanja modal sebanyak 7 unit yang berpotensi meningkatkan pengangkutan pelayanan,	

Sumber: Data Dikelola SIPD, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup, 2024

B. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah merupakan langkah strategis dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam Pasal 21 Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2022. Kebijakan ini meliputi tiga kegiatan utama, yaitu pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendauran ulang sampah. Pembatasan timbulan sampah dilakukan secara bertahap melalui kebijakan yang mengatur sampah organik, non-organik, serta sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Untuk sampah organik, fokusnya adalah mengurangi sisa makanan dan bahan makanan yang masih layak konsumsi, sementara untuk sampah non-organik, kebijakan ini menargetkan produk atau kemasan sekali pakai. Produsen juga memiliki peran krusial dalam pembatasan ini, dengan kewajiban menyediakan alternatif kemasan ramah lingkungan dan mematuhi regulasi yang berlaku. Pelaksanaan pembatasan sampah B3 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sampah spesifik, sehingga memastikan pengelolaan yang aman dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan holistik untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

C. Penanganan Sampah

Penanganan sampah berdasarkan Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2022 meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Berikut merupakan pembahasan secara detail terkait kebijakan penanganan sampah di Kab. Bandung

1. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah, pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan sampah, di mana tanggung jawab dibagi antara masyarakat (pada sumber sampah), sektor swasta/pengelola (seperti permukiman, komersial, industri, fasilitas umum, dan sosial), dan pemerintah.

2. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah merupakan tahap krusial dalam sistem pengelolaan sampah yang melibatkan peran aktif dari pengelola kawasan dan pemerintah daerah kabupaten. Pengelola kawasan seperti permukiman, komersial, industri, serta fasilitas umum dan sosial bertanggung jawab menyediakan sarana pengumpulan sampah berupa TPS (Tempat Penampungan Sementara), TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), dan alat pengumpul khusus untuk sampah terpilah. Penyediaan fasilitas ini sangat penting untuk memastikan sampah dapat dikumpulkan secara terpisah sesuai jenisnya, sehingga memudahkan proses pengolahan lebih lanjut.

Untuk kawasan khusus dan fasilitas tertentu, pengumpulan sampah dilakukan secara mandiri oleh lembaga penanggung jawab fasilitas tersebut, dengan opsi untuk bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai peraturan yang berlaku. Mekanisme ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan pengumpulan sampah sekaligus mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengumpulan sampah diatur dalam Peraturan Bupati, yang memungkinkan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di tingkat daerah.

Kebijakan pengumpulan sampah ini menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan menekankan kolaborasi antar pihak, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pengaturan yang adaptif di tingkat lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengumpulan sampah tetapi juga mendukung upaya pengurangan dan pengolahan sampah yang lebih baik.

3. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten yang mencakup pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga, sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik dari sumber sampah atau tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan akhir. Pelayanan ini dilaksanakan melalui tiga pola utama, yaitu pola individual langsung yang mengangkut sampah terpilah dari sumbernya, pola individual tidak langsung yang melibatkan titik kumpul sebelum diangkut, serta pola komunal

langsung yang memusatkan pengangkutan dari TPS terpilah pada waktu tertentu. Khusus untuk kawasan pertokoan atau kegiatan skala besar di jalur protokol, pengangkutan sampah juga menjadi fokus pelayanan ini. Seluruh mekanisme pengangkutan dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, menekankan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan sampah.

4. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah merupakan tahap penting dalam sistem pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai metode dan pelaku. Kegiatan pengolahan mencakup pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi, menunjukkan pendekatan yang komprehensif untuk mengurangi volume sampah sekaligus memanfaatkannya sebagai sumber daya. Pelaksanaannya melibatkan tiga pihak utama: individu pada sumber sampah, pengelola kawasan (seperti permukiman, komersial, industri), dan Pemerintah Daerah Kabupaten, menciptakan kolaborasi yang menyeluruh.

Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas pengolahan seperti TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA, dan TPST, khususnya di wilayah permukiman. Selain itu, untuk memberdayakan masyarakat, pemerintah juga memfasilitasi pengembangan bank sampah (termasuk bank sampah induk dan tematik) serta pusat edukasi pengolahan sampah. Di tingkat desa, kewajiban penyediaan TPS 3R semakin memperkuat infrastruktur pengolahan sampah hingga ke tingkat paling dasar. Ketentuan teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati, memastikan implementasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Kebijakan ini tidak hanya menekankan pengolahan sampah yang efektif tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemanfaatan nilai ekonomis dari sampah.

5. Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan akhir sampah merupakan tahap penutup dalam sistem pengelolaan sampah yang dilakukan melalui beberapa metode, yaitu lahan urug terkendali, lahan urug saniter, atau teknologi ramah lingkungan, menunjukkan komitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan. Tanggung jawab pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau pengelola TPA sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan TPA diatur dalam Peraturan Bupati, yang memungkinkan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan lokal sekaligus menjamin standar pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kebijakan ini menekankan pentingnya metode yang terkendali dan berwawasan lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat.

2.1.5.5 Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kawasan ini berperan sebagai lingkungan hunian sekaligus area aktivitas yang mendukung kehidupan masyarakat. Berbeda dengan perumahan yang hanya terdiri dari kumpulan rumah untuk tempat tinggal, kawasan permukiman memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian bagi sebagian penduduk.

Sistem Penyediaan Kawasan Permukiman (PKP) mencakup berbagai elemen, seperti rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas sebaran perumahan dan permukiman di Kabupaten Bandung mencapai 25.173,81 hektar atau 14,46% dari total luas administratif kabupaten tersebut. Untuk detail lebih lanjut mengenai persebaran kawasan permukiman di Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48. Luas Permukiman Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bandung

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Permukiman			
			Perdesaan		Perkotaan	
			Ha	%	Ha	%
1	Arjasari	6,277.55	837.68	13.34	243.01	3.87
2	Baleendah	4,182.97	900.58	21.53	675.52	16.15
3	Banjaran	3,903.25	278.71	7.14	645.14	16.53
4	Bojongsoang	2,822.38	208.64	7.39	602.73	21.36
5	Cangkuang	2,375.09	40.93	1.72	540.3	22.75
6	Cicalengka	4,351.07	167.9	3.86	708.39	16.28
7	Cikancung	3,872.63	344.95	8.91	332.27	8.58
8	Cilengkrang	3,525.17	6.43	0.18	466	13.22
9	Cileunyi	3,063.24	25.56	0.83	1,243.96	40.61
10	Cimaung	5,955.56	137.19	2.3	594.94	9.99
11	Cimenyan	4,758.98	125.09	2.63	1,066.19	22.4
12	Ciparay	5,366.72	995.66	18.55	13.17	0.25
13	Civirdey	5,519.18	458.9	8.31	198.25	3.59
14	Dayeuh Kolot	1,115.30	-	-	533.97	47.88
15	Ibun	5,477.22	612.47	11.18	82.86	1.51
16	Katapang	1,561.94	49.26	3.15	574.76	36.8
17	Kertasari	13,654.39	336.9	2.47	161.69	1.18
18	Kutawaringin	4,705.50	229.4	4.88	528.42	11.23
19	Majalaya	2,431.45	220.23	9.06	673.31	27.69
20	Margaasih	1,832.39	54.25	2.96	767.01	41.86
21	Margahayu	1,054.26	-	-	735.95	69.81
22	Nagreg	4,282.97	301.4	7.04	253.12	5.91
23	Pacet	9,482.01	871.12	9.19	0.69	0.01
24	Pameungeuk	1,514.15	211.8	13.99	260.98	17.24
25	Pangalengan	21,656.39	421.76	1.95	984.86	4.55
26	Paseh	4,789.21	542	11.32	343.28	7.17
27	Pasir Jambu	19,807.79	434.48	2.19	267.13	1.35
28	Rancabali	15,286.64	477.75	3.13	5.05	0.03
29	Rancaekek	4,486.63	190.52	4.25	828.6	18.47
30	Sobkarjienk	2,435.27	494.81	20.32	0.64	0.03

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Permukiman			
			Perdesaan		Perkotaan	
			Ha	%	Ha	%
31	Soreang	2,537.04	42.95	1.69	822.26	32.41
Total	**Kabupaten Bandung**	**174,084.34**	**10,019.34**	**5.76**	**15,154.48**	**8.71**

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bandung, 2024

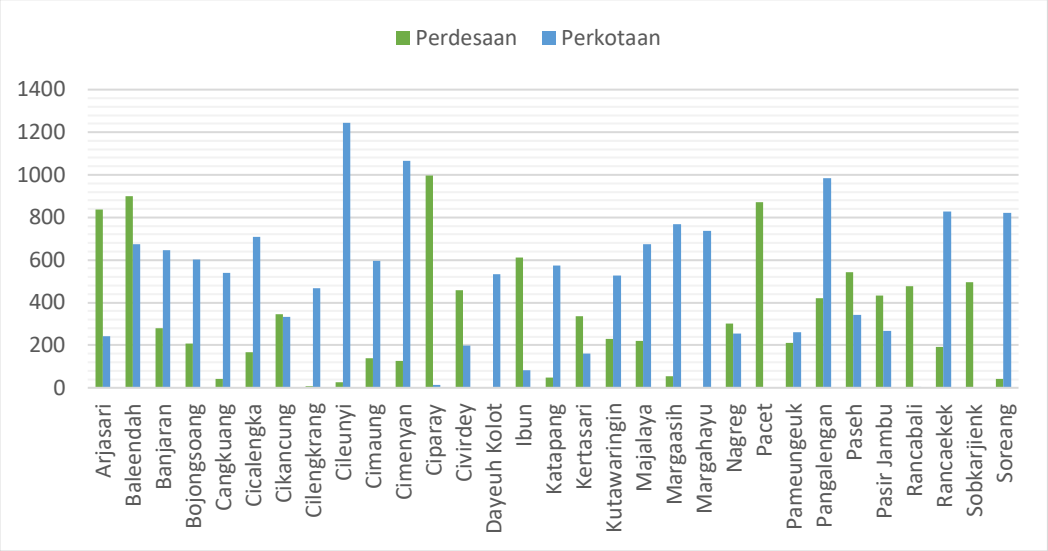

Gambar 2.43. Grafik Luas Permukiman Berdasarkan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bandung, 2024

Berdasarkan data luas permukiman perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung, terlihat bahwa sebagian besar wilayah masih didominasi oleh kawasan non-permukiman, dengan total permukiman hanya mencakup 14,47% dari total luas wilayah (5,76% perdesaan dan 8,71% perkotaan). Beberapa kecamatan seperti Margahayu (69,81%), Dayeuh Kolot (47,88%), dan Cileunyi (40,61%) memiliki persentase permukiman perkotaan yang tinggi, sementara Sobkarjienk (20,32%) dan Pameungeuk (13,99%) didominasi permukiman perdesaan. Kecamatan dengan luas wilayah besar seperti Pangalengan dan Pasir Jambu justru memiliki proporsi permukiman relatif kecil (di bawah 5%). Gambaran sebaran terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada peta berikut.

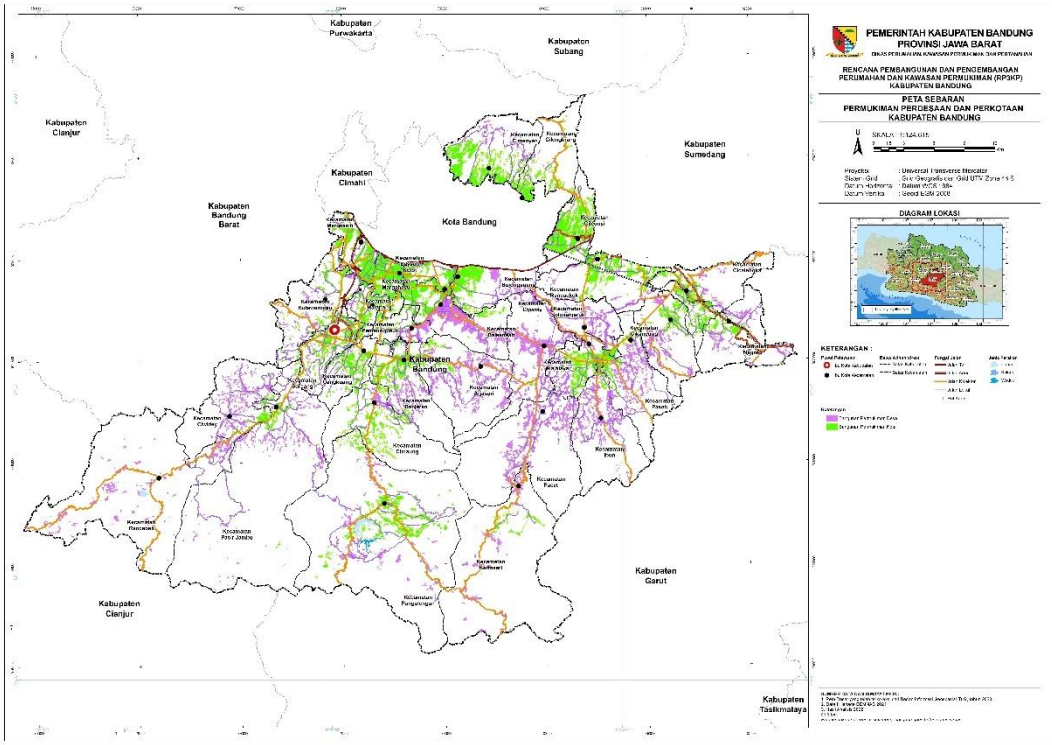

Gambar 2.44. Peta Permukiman Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bandung, 2024

A. Jenis Rumah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan, jenis perumahan di Indonesia diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu Rumah Komersial, Rumah Umum, Rumah Swadaya, dan Rumah Negara. Hingga tahun 2024, Kabupaten Bandung memiliki total 960.458 unit rumah. Data lebih rinci mengenai distribusi jenis perumahan di wilayah ini dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Tabel 2.49. Jenis Rumah di Kabupaten Bandung Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Rumah				Jumlah Rumah
		Formal	Khusus	Swadaya	Negara	
1	Arjasari	18,608	-	27,386	5	45,999
2	Baleendah	30,140	-	28,171	113	58,424
3	Banjaran	7,720	-	21,908	13	29,641
4	Bojongsoang	13,270	-	37,083	16	50,369
5	Cangkuang	16,745	-	5,394	5	22,144
6	Cicalengka	13,650	-	17,724	15	31,389
7	Cikancung	7,670	-	19,306	3	26,979
8	Cilengkrang	2,719	-	11,346	19	14,084
9	Cileunyi	12,673	-	61,393	236	74,302
10	Cimaung	3,842	-	18,490	5	22,337
11	Cimenyan	12,074	-	13,780	44	25,898
12	Ciparay	8,788	-	33,310	36	42,134
13	Civirdey	1,129	-	20,177	7	21,313
14	Dayeuhkolot	2,072	-	20,828	129	23,029
15	Ibun	2,014	-	19,314	3	21,331
16	Katapang	17,378	-	5,636	37	23,051

No.	Kecamatan	Jenis Rumah				Jumlah Rumah
		Formal	Khusus	Swadaya	Negara	
17	Kertasari	-	-	12,042	3,900	15,942
18	Kutawaringin	1,294	-	22,292	9	23,595
19	Majalaya	1,035	-	38,923	20	39,978
20	Margaasih	14,848	-	23,664	23	38,535
21	Margahayu	12,417	-	13,782	849	27,048
22	Nagreg	5,548	-	7,613	360	13,521
23	Pacet	4,339	-	25,187	11	29,537
24	Pameungeuk	2,339	-	17,984	10	20,333
25	Pangalengan	308	-	35,218	3,622	39,204
26	Paseh	11,746	-	20,976	7	32,729
27	Pasirjambu	2,801	-	22,936	852	26,589
28	Rancabali	-	-	7,497	3,390	10,887
29	Rancaekek	29,409	-	20,260	23	49,692
30	Solokanjeruk	4,433	-	31,803	5	36,241
31	Soreang	18,458	-	5,727	18	24,203
Total	Kabupaten Bandung	279,467	-	667,150	13,785	960,458

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bandung, 2024

Berdasarkan data disperkimtan tahun 2024, Kabupaten Bandung memiliki total 960.458 unit rumah yang didominasi oleh rumah swadaya (667.150 unit atau 69,5%). Rumah formal menyumbang 29,1% (279.467 unit), dengan konsentrasi tertinggi di Baleendah (30.140 unit) dan Rancaekek (29.409 unit), mencerminkan perkembangan kawasan urban di wilayah tersebut. Sementara itu, rumah negara hanya mencapai 1,4% (13.785 unit), dengan distribusi signifikan di Pangalengan (3.622 unit), Kertasari (3.900 unit), dan Rancabali (3.390 unit) yang kemungkinan terkait dengan fasilitas pemerintah atau proyek perumahan dinas. Ketimpangan distribusi jenis rumah terlihat jelas, di mana beberapa kecamatan seperti Cileunyi dan Bojongsoang memiliki jumlah rumah swadaya yang sangat tinggi (masing-masing 61.393 dan 37.083 unit), sementara kecamatan seperti Katapang dan Soreang justru didominasi rumah formal. Berikut merupakan peta kondisi perumahan dan permukiman di Kabupaten Bandung.

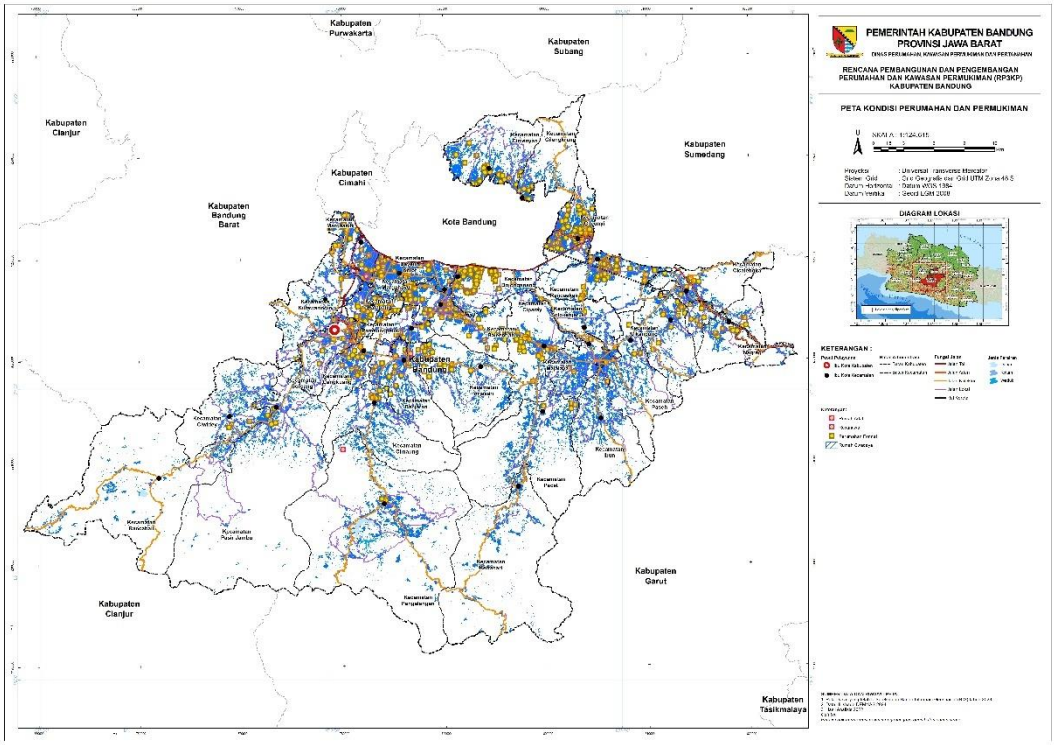

Gambar 2.45. Peta Permukiman Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bandung, 2024

B. Jumlah dan Sebaran Backlog Rumah

Berdasarkan data BKKBN Kabupaten Bandung tahun 2023, teridentifikasi masalah kekurangan perumahan yang signifikan dengan *backlog* kepemilikan rumah mencapai 274.584 unit dan backlog penghunian sebanyak 173.973 unit. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 25,94% keluarga (274.584 dari total 1.058.331 keluarga) belum memiliki rumah sendiri, sementara 16,44% keluarga (173.973) masih bergantung pada tempat tinggal sewa atau menumpang. Beberapa kecamatan seperti Baleendah (backlog kepemilikan 21.462 unit), Majalaya (15.028 unit), dan Dayeuhkolot (15.845 unit) mencatat angka backlog tertinggi, dengan pola serupa terlihat pada backlog penghunian. Kasus khusus terdapat di Pangalengan dimana hanya 1.684 keluarga yang memiliki rumah sendiri, serta Margahayu dan Dayeuhkolot yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada sewa rumah. Data lengkap mengenai distribusi backlog per kecamatan dapat dilihat pada tabel dan grafik terlampir, yang memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan perumahan di Kabupaten Bandung tahun 2023.

Tabel 2.50. Jumlah *Backlog* Kepemilikan dan Penghunian Kabupaten Bandung Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Kepemilikan Rumah / Bangunan Tempat Tinggal					Backlog (Unit Rumah)	
			Milik Sendiri	Kontra / Sewa	Bebas Sewa / Menumpang	Dinas	Lainnya	Kepemilikan	Penghunian
1	Arjasari	31,674	28,615	471	2,515	5	68	3,059	2,515

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Kepemilikan Rumah / Bangunan Tempat Tinggal					Backlog (Unit Rumah)	
			Milik Sendiri	Kontra / Sewa	Bebas Sewa / Menumpang	Dinas	Lainnya	Kepemilikan	Penghunian
2	Baleendah	78,222	56,760	9,686	11,348	113	315	21,462	11,348
3	Banjaran	37,678	26,975	3,408	7,157	13	125	10,703	7,157
4	Bojongsoang	32,040	24,182	2,934	4,800	16	108	7,858	4,800
5	Cangkuang	23,652	18,168	1,913	3,459	5	107	5,484	3,459
6	Cicalengka	35,802	26,519	2,504	6,621	15	143	9,283	6,621
7	Cikancung	24,530	20,565	472	3,367	3	123	3,965	3,367
8	Cilengkrang	17,046	13,985	826	2,105	19	111	3,061	2,105
9	Cileunyi	53,107	39,956	5,571	7,198	236	146	13,151	7,198
10	Cimaung	26,111	21,086	735	4,205	5	80	5,025	4,205
11	Cimenyan	35,123	26,124	2,126	6,685	44	144	8,999	6,685
12	Ciparay	49,098	35,244	3,105	10,198	36	515	13,854	10,198
13	Civirdey	26,409	21,086	960	4,280	7	76	5,323	4,280
14	Dayeuhkolot	33,642	17,797	10,180	5,134	129	402	15,845	5,134
15	Ibun	25,255	21,211	314	3,624	3	103	4,044	3,624
16	Katapang	41,213	27,112	6,908	7,070	37	86	14,101	7,070
17	Kertasari	20,716	14,239	197	2,319	3,900	61	6,477	2,319
18	Kutawaringin	31,716	25,461	1,098	5,000	9	148	6,255	5,000
19	Majalaya	48,314	33,286	4,204	10,637	20	167	15,028	10,637
20	Margaasih	36,686	27,549	3,265	5,705	23	144	9,137	5,705
21	Margahayu	31,567	21,622	4,795	4,206	849	95	9,945	4,206
22	Nagreg	17,480	13,283	620	3,133	360	84	4,197	3,133
23	Pacet	34,885	28,223	593	5,886	11	172	6,662	5,886
24	Pameungeuk	26,744	18,939	2,565	5,142	10	88	7,805	5,142
25	Pangalengan	45,421	1,684	998	8,611	3,622	506	13,737	8,611
26	Paseh	38,355	30,377	1,262	6,559	7	150	7,978	6,559
27	Pasirjambu	27,468	20,656	865	4,944	852	151	6,812	4,944
28	Rancabali	14,872	9,203	534	1,686	3,390	59	5,669	1,686
29	Rancaekek	55,131	40,699	4,346	9,634	23	429	14,432	9,634
30	Solokanjeruk	25,284	19,552	805	4,780	5	142	5,732	4,780
31	Soreang	33,090	23,589	3,299	5,965	18	219	9,501	5,965
Total	**Kabupaten Bandung**	**1,058,331**	**783,747**	**81,559**	**173,973**	**13,785**	**5,267**	**274,584**	**173,973**

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bandung, 2024

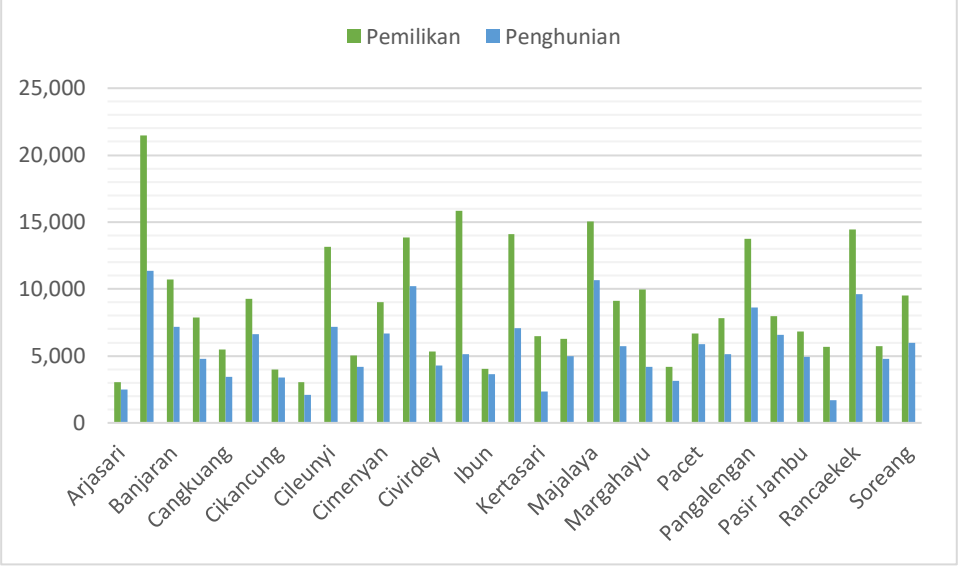

Gambar 2.46. Grafik Luas Permukiman Berdasarkan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bandung, 2024

Data BKKBN Kabupaten Bandung tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 1.058.331 keluarga, sebanyak 274.584 keluarga (25,94%) mengalami backlog kepemilikan rumah, sementara 173.973 keluarga (16,44%) menghadapi backlog penghunian. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar seperempat penduduk belum memiliki rumah sendiri, dan sekitar seperenam lainnya masih bergantung pada tempat tinggal sewa atau menumpang. Lima kecamatan dengan backlog kepemilikan tertinggi adalah:

1. Baleendah (21.462 unit rumah),
2. Dayeuhkolot (15.845 unit rumah),
3. Majalaya (15.028 unit rumah),
4. Rancaekek (14.432 unit rumah), dan
5. Katapang (14.101 unit rumah).

Sementara itu, backlog penghunian terbesar terdapat di:

1. Baleendah (11.348 unit rumah),
2. Ciparay (10.198 unit rumah),
3. Majalaya (10.637 unit rumah),
4. Rancaekek (9.634 unit rumah), dan
5. Pangalengan (8.611 unit rumah).

C. Jumlah dan Sebaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni, yang disingkat RTLH, adalah rumah yang tidak memenuhi standar keselamatan bangunan, luas minimum bangunan, serta kondisi kesehatan bagi penghuninya. Definisi ini merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

RTLH memiliki ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa kriteria konstruksi bangunan yang harus dipenuhi adalah:

1. Bangunan dengan bahan beton bertulang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Bangunan dengan bahan kayu harus memenuhi SNI.
3. Bangunan dengan bahan baja harus memenuhi SNI.
4. Bangunan yang menggunakan bahan lain harus minimal mampu menahan gempa berkekuatan 8 skala Richter (mengacu pada rata-rata kekuatan gempa di Indonesia yang berkisar antara 6 hingga 7 skala Richter).

5. Luas bangunan harus mengikuti standar minimal per orang, yakni 9 meter persegi per orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2011.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut HRC Caritra, RTLH adalah rumah atau hunian yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi persyaratan utama, yaitu:

1. Keselamatan dan keamanan konstruksi bangunan
2. Kecukupan luas minimum
3. Keadilan sosial dan kesehatan penghuni
4. Persyaratan rumah tidak layak huni meliputi aspek keselamatan konstruksi, kecukupan ruang, serta kesehatan dan kesejahteraan penghuninya.

Sementara itu, menurut PermenPUPR RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi standar keselamatan bangunan, luas minimum yang memadai, dan kondisi kesehatan yang baik bagi penghuninya. Kriteria rumah layak huni mencakup:

1. Keselamatan bangunan, meliputi pondasi, kolom, balok, dan struktur atas.
2. Kesehatan, yang mencakup pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi.
3. Kecukupan luas bangunan, dengan standar antara 7,2 hingga 12 meter persegi per orang.

Selain itu, kriteria RLH tidak menghilangkan penerapan teknologi dan bahan bangunan lokal yang sesuai dengan kearifan daerah masing-masing dalam proses pembangunan rumah.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, terdapat 58.156 unit RTLH, yang terdiri dari 45.441 unit RTLH di luar kawasan kumuh dan 12.715 unit RTLH di dalam kawasan kumuh. Dua kecamatan dengan jumlah RTLH terbanyak adalah Kecamatan Pangalengan dengan 7.888 unit dan Kecamatan Pacet dengan 7.477 unit. Untuk informasi lebih detail mengenai distribusi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51. Jumlah RTLH di Kabupaten Bandung

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH di Kabupaten Bandung Tahun 2024		Total RTLH
		Diluar Kawasan Kumuh	Didalam Kawasan Kumuh	
1	Arjasari	1,218	237	1,455
2	Baleendah	738	881	1,619
3	Banjaran	2,541	497	3,038
4	Bojongsoang	226	469	695
5	Cangkuang	1,031	128	1,159
6	Cicalengka	1,266	993	2,259
7	Cikancung	2,167	758	2,925
8	Cilengkrang	524	85	609

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH di Kabupaten Bandung Tahun 2024		Total RTLH
		Diluar Kawasan Kumuh	Didalam Kawasan Kumuh	
9	Cileunyi	672	89	761
10	Cimaung	2,502	321	2,823
11	Cimenyan	514	93	607
12	Ciparay	1,738	264	2,002
13	Ciwidey	2,129	195	2,324
14	Dayeuhkolot	183	233	416
15	Ibun	1,133	422	1,555
16	Katapang	293	188	481
17	Kertasari	2,729	923	3,652
18	Kutawaringin	1,469	950	2,419
19	Majalaya	1,275	257	1,532
20	Margaasih	425	346	771
21	Margahayu	133	133	266
22	Nagreg	1,061	224	1,285
23	Pacet	6,336	1,141	7,477
24	Pameungeuk	132	74	206
25	Pangalengan	6,768	1,120	7,888
26	Paseh	1,998	431	2,429
27	Pasirjambu	1,327	173	1,500
28	Rancabali	1,170	107	1,277
29	Rancaekek	296	184	480
30	Solokanjeruk	433	493	926
31	Soreang	1,014	306	1,320
Total	**Kabupaten Bandung**	**45,441**	**12,715**	**58,156**

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bandung, 2024

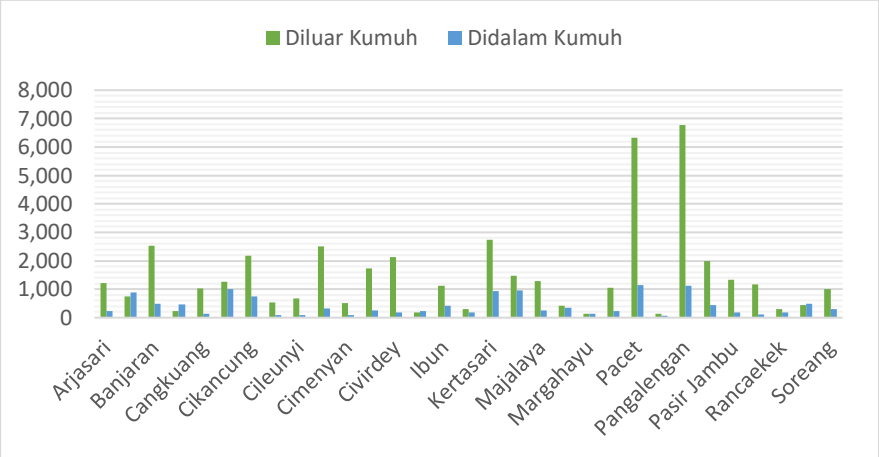

Gambar 2.47. Grafik Jumlah RTLH Didalam dan Diluar Kawasan Kumuh di Kabupaten Bandung

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bandung, 2024

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah memberikan bantuan kepada 27.138 unit rumah pada periode tahun 2021 hingga 2024. Bantuan tersebut bersumber dari berbagai anggaran, yaitu APBD II Kabupaten (melalui DISPERKIMTAN, DPMD, dan Kecamatan), APBD II Provinsi, serta

APBN (melalui BSPS). Kontribusi terbesar diberikan oleh program BSPS dan DPMD, sementara bantuan dari kecamatan cenderung paling sedikit. Tren rehabilitasi RTLH cukup konsisten dari tahun ke tahun, dengan jumlah rumah yang dibantu setiap tahunnya relatif stabil. Untuk detail alokasi rehabilitasi RTLH berdasarkan masing-masing sumber anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52. Jumlah RTLH yang Sudah Tertangani Tahun 2021 – 2024 Kabupaten Bandung

Sumber Anggaran	Jumlah Unit			
	2021	2022	2023	2024
APBD II Kabupaten				
- DISPERKIMTAN	732	1.487	1.152	1.228
- DPMD	1.350	1.620	1.620	1.620
- KECAMATAN	0	0	50	50
APBD II Provinsi	2.225	713	1.140	203
APBN				
- DANA ALOKASI KHUSUS	140	135	0	0
- BSPS	2.990	3.442	3.544	1.697
Jumlah	7.437	7.397	7.456	4.798
Total	**27.138**			

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Bandung, 2024

2.1.5.6 Persentase Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan salah satu indikator kunci dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 11 yang menargetkan terciptanya kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Suatu rumah dikategorikan layak apabila memenuhi empat kriteria utama, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak. Selama periode 2020 hingga 2024, persentase rumah layak huni di Kabupaten Bandung menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni mencapai 98,44%, kemudian menurun pada 2021 menjadi 96,45% akibat dampak pandemi Covid-19 yang memperburuk kondisi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah serta membatasi pelaksanaan program bantuan perumahan. Kondisi mulai membaik pada 2022 dengan kenaikan menjadi 97,39%, disusul peningkatan ke 98,30% pada tahun 2023, dan mencapai capaian tertinggi sebesar 98,94% pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program perumahan yang mendukung akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan sehat.

Tabel 2.53. Persentase Rumah Layak Huni (Persen)

Tahun	Persentase Rumah dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (Persen)
2020	98,44
2021	96,45
2022	97,39
2023	98,30
2024	98,94

Sumber: Disperkimtan, 2024

2.1.6 Karakteristik Transportasi

2.1.6.1 Pola Jaringan Jalan

Panjang total jalan kabupaten di Kabupaten Bandung mencapai 1.428,360 kilometer. Dari jumlah tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung mengelola jalan dengan sekitar 34,77 persen di antaranya berlapis aspal. Jalan-jalan ini berfungsi menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar kecamatan, pusat kegiatan lokal, serta menjadi jalur strategis kabupaten. Selain itu, jalan kabupaten juga berperan sebagai alternatif lokal untuk jalan nasional dan provinsi.

Kabupaten Bandung merupakan titik penting dalam jaringan jalan raya di Jawa Barat. Jalan Tol Purbaleunyi menghubungkan Jakarta dengan Bandung dan berakhir di Kecamatan Cileunyi. Dari Cileunyi juga bermula Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang menuju Bandara Internasional Kertajati, kawasan Rebana, Jawa Tengah, dan bagian utara Jawa Timur. Jalur Jalan Nasional Bandung–Yogyakarta–Surabaya atau Jalur Selatan melintasi beberapa kecamatan di bagian timur Kabupaten Bandung dan menjadi arteri utama transportasi di Jawa Barat. Selain itu, Jalan Nasional Bandung–Cirebon juga melewati kawasan Cileunyi. Jalan Nasional Cimahi–Cidaun menghubungkan Kota Bandung ke kawasan Pantai Selatan Jawa lewat beberapa kecamatan seperti Soreang, Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali. Sedangkan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja mempercepat akses dari Kota Bandung ke Soreang, khususnya menuju destinasi wisata di Bandung Selatan. Berikut merupakan jumlah panjang jalan di kabupaten bandung berdasarkan status jaringan jalan.

Tabel 2.54. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Bandung

Status Jalan	Panjang (Km)
Jalan Nasional	34,8
Jalan Provinsi	127,53
Jalan Kabupaten	1160,293
Jalan Desa	863,37
Total Panjang Jalan Kabupaten Bandung	**2.238,463**

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Tabel diatas menunjukkan panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan status jalan, dengan total panjang mencapai 2.238,463 km. Jalan Kabupaten mendominasi dengan panjang 1.160,293 km, diikuti oleh Jalan Desa sepanjang 863,37 km, Jalan Provinsi 127,53 km, dan Jalan Nasional 34,8 km. Data ini bersumber dari Dinas Perhubungan tahun 2025, menggambarkan distribusi infrastruktur jalan yang ada di wilayah tersebut, di mana jalan dengan status kabupaten dan desa menjadi penyumbang terbesar terhadap total panjang jalan.

Dalam konteks aglomerasi wilayah Bandung Metropolitan, jaringan jalan di Kabupaten Bandung memiliki pola linier dan radial. Pusat Kegiatan Perkotaan (CBD) utama berada di bagian tengah utara Kabupaten Bandung, sementara pusat-pusat kegiatan wilayah tersebar di berbagai kecamatan. Jaringan jalan linier berfungsi menghubungkan daerah-daerah dengan pusat kegiatan, sedangkan jaringan jalan radial tersusun mengelilingi pusat CBD tersebut. Gambaran umum jaringan jalan di Kabupaten Bandung secara keseluruhan dapat dilihat pada peta berikut.

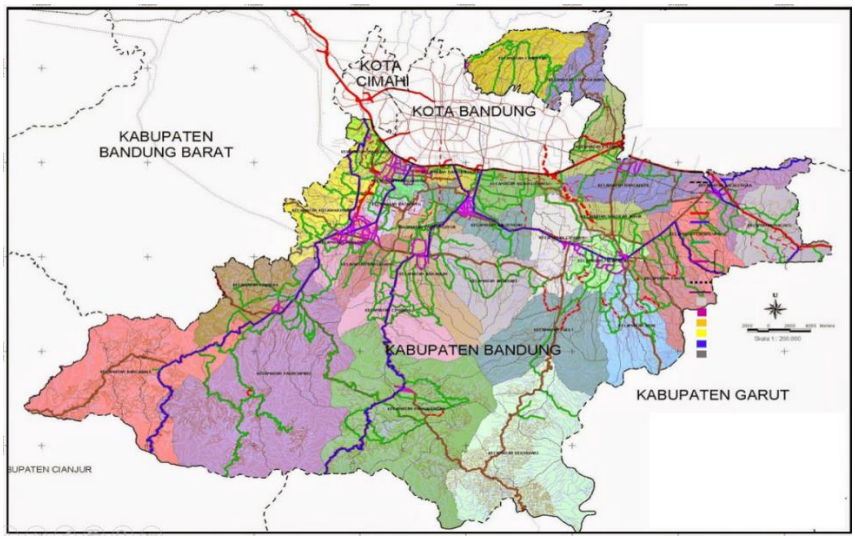

Gambar 2.48. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Bandung
Sumber: Laporan Analisa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, 2024

2.1.6.2 Angkutan Umum

A. Angkutan Terminal

Kabupaten Bandung menyediakan dua jenis sarana transportasi untuk penumpang dan barang, yakni transportasi umum dan transportasi pribadi. Transportasi umum meliputi angkot (angkutan kota), angkutan perbatasan, angkutan desa, AKDP (Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi), serta ojek. Sementara itu, transportasi pribadi terdiri dari sepeda, sepeda motor, dan mobil pribadi.

Sistem transportasi umum di wilayah ini terbagi dalam dua kategori layanan:

1. **Layanan terjadwal dengan rute tetap** yang mencakup Angkutan perkotaan (angkot dan transportasi massal), AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)
2. **Layanan tidak terjadwal** yang diwakili oleh taksi.

Penggunaan transportasi umum di Kabupaten Bandung masih terbatas. Fenomena ini disebabkan oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, di kalangan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang lebih memilih menggunakan sepeda

motor atau ojek membuat layanan angkutan pedesaan kurang optimal. Untuk mendukung mobilitas, Kabupaten Bandung telah mengembangkan jaringan rute transportasi umum yang terintegrasi dengan infrastruktur jalan dan didukung oleh sembilan terminal sebagai simpul transportasi, antara lain:

1) Terminal Tipe B Soreang
2) Terminal Tipe B Banjaran
3) Terminal Tipe B Baleendah
4) Terminal Tipe B Ciparay
5) Terminal Tipe B Cicalengka
6) Terminal Tipe B Majalaya
7) Terminal Tipe B Ciwidey
8) Terminal Tipe B Cileunyi
9) Terminal Tipe B Pengalengan.

Terminal-terminal di Kabupaten Bandung umumnya berlokasi berdekatan dengan pusat aktivitas masyarakat seperti pasar tradisional, alun-alun kota, atau kawasan pertokoan. Namun, perkembangan pusat ekonomi yang semakin meluas justru berdampak pada penurunan fungsi terminal. Banyak angkutan umum yang kesulitan mengakses terminal akibat menurunnya fungsi aksesibilitas.

Berdasarkan penilaian terhadap indikator fasilitas utama dan penunjang sesuai PP No. 132 Tahun 2015 tentang Terminal Transportasi Jalan, terungkap bahwa mayoritas terminal di Kabupaten Bandung memiliki kelengkapan dan kondisi fasilitas yang kurang memadai, dengan tingkat pemenuhan di bawah 50%. Berikut gambaran visual terminal-terminal di wilayah ini.

Gambar 2.49. Kondisi Terminal di Kabupaten Bandung
Sumber: Laporan Analisa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, 2024

Pelayanan Angkutan Umum di Kabupaten Bandung memiliki 12 trayek AKDP dan 40 trayek Angkutan perkotaan aktif dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.55. Trayek AKDP di Kabupaten Bandung

No.	Trayek	No.	Trayek
1	Ciwidey - Mekanwangi - Sukanagara	7	Ciwidey - Paranggong - Cidann
2	Ciwidey - Cikadu - Sindang Barang	8	Gunung Halu - Ciwidey
3	Soreang - Cipatik - Cililin	9	Cimahi - Patrol - Soreang
4	Pangelengan - Rancabuaya	10	Cimindi - Marga Asih - Cibaligo
5	Ciwidey - Cidann - Sindang Barang	11	Cimindi - Nanjung - Cipatik
6	Ciwidey - Cipelah - Pagelaran	12	Ciwidey - Girijaya

Sumber: Laporan Analisa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, 2024

Tabel 2.56. Trayek Angkutan Perkotaan di Kabupaten Bandung

No.	Trayek	No.	Trayek Perkotaan
1	Baleendah - Andir - Rancamanyar - Verbas	21	Ciwidey - Paranggong
2	Baleendah - Bojong Malaka - Tci	22	Ciwidey - Patenggang
3	Banjaran - Arjasari	23	Ciwidey - Pathhawati
4	Banjaran - Asem - Sayuran - Tci	24	Ciwidey - Rancabali - Simumbra
5	Banjaran - Baros	25	Ciwidey - Rancabolang
6	Banjaran - Gamblok	26	Ciwidey - Singkup
7	Banjaran - Madur	27	Griya Prima Asri - Baleendah - Kopo Permai
8	Banjaran - Pangalengan	28	Majalaya - Cicalengka
9	Cicalengka - Nagreg - Cijolang	29	Majalaya - Ciparay
10	Cijapati - Cicalengka	30	Majalaya - Kampjang
11	Cileunyi - Cicalengka	31	Majalaya - Lembur Awi
12	Cileunyi - Cicalengka - Nagreg	32	Majalaya - Paseh
13	Cileunyi - Rancae kek - Majalaya	33	Palasari - Sayati
14	Ciparay - Arjasari	34	Pangalengan - Cisewu
15	Ciparay - Cibereum - Santosa	35	Rancae kek - Cicalengka - Curug Cindulang
16	Ciparay - Lembur Awi - Pacet	36	Soreang - Banjaran
17	Ciwidey - Balegede	37	Soreang - Cangkuang
18	Ciwidey - Cimaskara	38	Soreang - Clame - Batu Karut - Cikoneng
19	Ciwidey - Cipelah	39	Soreang - Ciwidey
20	Ciwidey - Dewata	40	Soreang - Rahayu

Sumber: Laporan Analisa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, 2024

Kabupaten Bandung memiliki dua jenis kendaraan utama untuk angkutan perkotaan, yaitu mikro bus berkapasitas 12 penumpang dan elf dengan daya tampung 15 orang. Layanan angkutan umum ini beroperasi setiap hari tanpa jadwal tetap, memberikan fleksibilitas bagi pengguna jasa.

B. BRT Metro Jabar Trans

Metro Jabar Trans (MJT) merupakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang melayani kawasan metropolitan Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten Sumedang. Layanan ini dijalankan sebagai bagian dari program Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan inisiatif *Buy The Service* bernama Teman Bus. Pada tahun 2024, pengelolaan BRT ini terbagi menjadi dua subsektor.

Armada BRT yang dioperasikan oleh DAMRI masih berada di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan, sementara armada yang dioperasikan oleh *Big Bird* telah dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah dokumentasi mengenai layanan Trans Metro Pasundan. Berikut visualisasi armada trans metro pasundan.

Gambar 2.50. Rute Layanan BRT Metro Jabar Trans
Sumber: Laporan Analisa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, 2024

Menurut data dari Kementerian Perhubungan, layanan Teman Bus Bandung beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB dengan tarif tetap sebesar Rp 4.900 per perjalanan sekali jalan (Flat Fare). Bagi pelajar, mahasiswa, lansia, dan penyandang disabilitas yang telah mendaftar dan mengaktifkan Tarif Khusus, tersedia tarif khusus sebesar Rp 2.000. MJT juga menerapkan tarif integrasi yang memungkinkan penumpang untuk berpindah moda atau transit antar Teman Bus tanpa dikenakan biaya tambahan selama periode 90 menit. Saat ini, Trans Metro Pasundan mengoperasikan total 85 unit armada yang melayani lima rute koridor utama, antara lain:

Tabel 2.57. Koridor Rute Trans Metro Pasundan Bandung

No.	Koridor	Rute	Pengelola
1	**Koridor K1BD**	**Leuwipanjang – Soreang**	**Damri**
2	Koridor K2BD	Kota Baru Parahyangan (Padalarang) – Alun-alun Kota Bandung	Big Bird
3	Koridor K3BD	Baleendah – Bandung Electronic Center	Big Bird
4	Koridor K4BD	Leuwipanjang – Dago	Damri
5	Koridor K5BD	Dipatiukur – Jatinangor (Via Tol)	Damri

Sumber: Laporan Analisa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, 2024

Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah yang dilayani BRT Trans Metro Pasundan dilalui oleh koridor 1, 3 dan 5 dengan Soreang, Baleendah dan Cileunyi sebagai simpul titik hentinya. Hal ini didukung dengan adanya prasarana halte serta rambu fasilitas titik henti yang ada di tiap lokasi.

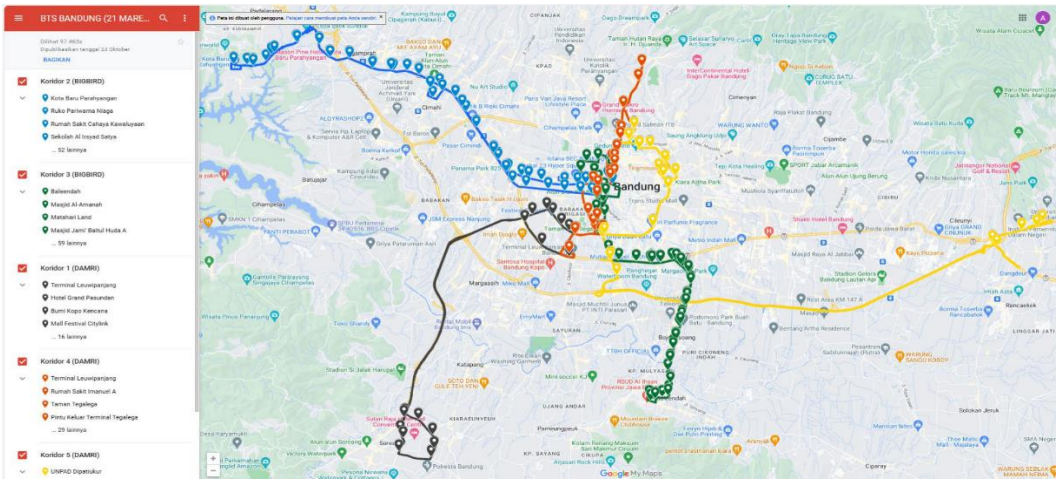

Gambar 2.51. Rute Layanan BRT Metro Jabar Trans
Sumber: Laporan Analisa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, 2024

C. Angkutan Stasiun Kereta Api

Selain transportasi jalan raya, wilayah ini juga dilengkapi dengan infrastruktur kereta api yang terdiri dari:

1. Stasiun HSR Tegalluar - sebagai bagian dari jaringan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
2. Empat stasiun konvensional: Rancaekek, Haurpugur, Cicalengka, dan Nagreg yang dikelola PT KAI

Stasiun Kereta Cepat Tegalluar telah beroperasi penuh dan terus meningkatkan frekuensi layanannya untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh. Data resmi dari KCIC menunjukkan angka penggunaan yang mencapai 180.000 penumpang harian.

Keempat stasiun konvensional di bawah PT KAI Daop II Bandung memegang peranan penting dalam sistem transportasi regional. Statistik terbaru mengungkapkan bahwa stasiun-stasiun ini menyumbang 23% dari total pergerakan penumpang di wilayah operasi DAOP II Bandung, mencerminkan pengaruh signifikan terhadap pola perjalanan di Kabupaten Bandung.

Gambar 2.52. Kondisi Stasiun di Kabupaten Bandung
Sumber: Laporan Analisa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, 2024

D. Kereta Cepat (HSR – High Speed Rail) Jakarta-Bandung

WHOOSH, singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat (sebelumnya dikenal sebagai Kereta Cepat Jakarta–Bandung), merupakan sistem kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta ini beroperasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam dan menghubungkan rute Tegalluar—Halim.

Gambar 2.53. Kereta Cepat Jakarta Bandung, WHOOSH
Sumber: Laporan Analisa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, 2024

Pengembangan infrastruktur kereta cepat ini juga mengacu pada konsep Transit Oriented Development (TOD), yaitu pengembangan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat bisnis, dan moda transportasi massal yang modern. Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung menjadi lokasi potensial untuk pengembangan kawasan TOD di Kecamatan Bojongsoang yang mengusung konsep "a vibrant gateway city." Kawasan ini, yang memiliki luas lebih dari 340 hektar, akan menyediakan berbagai fasilitas seperti pusat bisnis campuran (CBD), museum budaya, area perumahan campuran, pusat perbelanjaan, pusat pergudangan, taman perkantoran, perumahan sosial, sekolah internasional, rumah sakit, dan lainnya. Selain itu, kawasan ini juga terhubung langsung dengan LRT Bandung, kereta api, akses keluar tol, dan Bus Rapid Transit (BRT), meningkatkan kemudahan akses para penghuninya.

Stasiun Tegalluar terletak di Cibiru Hilir, Cileunyi, Kabupaten Bandung, meskipun namanya berasal dari desa Tegalluar yang lokasinya berada di sebelah barat daya stasiun ini. Stasiun tersebut melayani 28 hingga 32 perjalanan per hari per 1 November 2023, dengan interval keberangkatan 40 menit selama jam sibuk pagi dan sore, serta 51 menit pada akhir pekan. Integrasi antar moda di stasiun ini difasilitasi oleh layanan Bus Damri dan shuttle bus Summarecon sebagai moda lanjutan yang menghubungkan dan meninggalkan stasiun.

Gambar 2.54. Stasiun HSR Tegalluar
Sumber: Laporan Analisa Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, 2024

Kemudahan akses ke Stasiun Tegalluar juga didukung oleh keberadaan Jembatan Cibiru yang sudah beroperasi untuk kendaraan. Selain itu, pihak KCIC bekerjasama dengan Jasa Marga membuka pintu tol di KM 149 yang sudah aktif, dan saat ini sedang dalam proses pembangunan pintu tol di KM 151 guna mempermudah masyarakat menuju stasiun. Kereta cepat WHOOSH yang menghubungkan Jakarta dan Bandung menunjukkan performa yang positif dengan rata-rata penumpang harian mencapai 17.000 hingga 18.000 orang, dan meningkat hingga lebih dari 24.000 selama musim liburan. Dalam enam bulan pertama tahun 2024, total penumpang yang menggunakan layanan ini mencapai sekitar 2,6 juta orang, dan diperkirakan akan mencapai 5 juta pada akhir tahun, didukung oleh berbagai promosi, integrasi berbagai moda transportasi, serta inovasi layanan seperti jadwal dinamis dan paket wisata.

Keunggulan utama kereta cepat ini adalah waktu tempuh yang singkat, kenyamanan, dan ketepatan jadwal, yang telah mendorong banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi publik, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Untuk Stasiun Tegalluar sendiri, jumlah penumpang yang turun mencapai sekitar 30% dari total penumpang harian, yaitu sekitar 5.100 hingga 5.400 penumpang pada hari biasa dan bisa meningkat hingga 7.200 penumpang saat liburan. Data ini menunjukkan adanya kenaikan penumpang yang signifikan, yakni 300% dari tahun 2023 ke 2024, dari 1,2 juta penumpang meningkat menjadi sekitar 5 juta penumpang pada tahun 2024.

2.1.6.3 Fasilitas Perlengkapan Jalan

Fasilitas perlengkapan jalan merupakan komponen penting dalam menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan. Data fasilitas perlengkapan jalan yang terhimpun dan dikelola oleh dinas tersebut mencakup Penerangan Jalan Umum (PJU), marka jalan termasuk zebra cross, serta rambu-rambu lalu lintas. PJU berperan dalam memberikan

pencahayaan yang memadai di malam hari untuk mengurangi risiko kecelakaan, sementara marka jalan dan zebra cross berfungsi sebagai petunjuk visual untuk mengatur arus lalu lintas dan memberikan hak pejalan kaki saat menyeberang. Rambu lalu lintas, di sisi lain, memberikan informasi, peringatan, serta peraturan yang harus dipatuhi pengendara guna menjaga ketertiban di jalan raya. Dengan adanya pengelolaan yang terstruktur dari Dinas Perhubungan, diharapkan fasilitas-fasilitas ini dapat berfungsi secara optimal sehingga mendukung kelancaran transportasi dan mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.

A. Penerangan Jalan Umum

Sebaran Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Bandung berdasarkan data Dinas Perhubungan tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah lampu PJU yang tercatat oleh pemerintah daerah mencapai 22.700 unit, dengan total daya terpasang sebesar 4.240.870 W, kapasitas 5.053.923 VA, konsumsi listrik tahunan sebesar 1.864.165 kWh, dan biaya listrik mencapai Rp3.185.199.992 untuk satuan tertentu, atau total Rp38.222.399.904. Distribusi PJU mengikuti panjang jaringan jalan, yakni meliputi Jalan Nasional sepanjang 2.471 km, Jalan Provinsi 1.562 km, Jalan Kabupaten 9.887 km, serta Jalan Desa dan Lingkungan 8.780 km, sehingga total panjang jalan yang dilayani PJU di Kabupaten Bandung mencapai 22.700 km. Data ini menegaskan peran penting PJU dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di seluruh tingkatan status jalan di wilayah tersebut. Berikut merupakan jumlah penerangan jalan umum berdasarkan status jalan berdasarkan Kabupaten Bandung.

Tabel 2.58. Lokasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Berdasarkan Status Jalan di Kabupaten Bandung Tahun 2024

Status Jalan	Panjang Eksisting (Km)
Jalan Nasional	2.471
Jalan Provinsi	1.562
Jalan Kabupaten	9.887
Jalan Desa & Lingkungan	8.780
Total Panjang Jalan Kabupaten Bandung	**22.700**

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Sebaran titik Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kabupaten di Kabupaten Bandung menunjukkan distribusi yang bervariasi di tiap wilayah. Berdasarkan data, jumlah titik PJU tertinggi terdapat di Wilayah Soreang sebanyak 1.776 titik, diikuti Wilayah Ciparay 1.699 titik, Wilayah Banjaran 1.687 titik, dan Wilayah Margahayu 1.579 titik. Sementara itu, Wilayah Cicalengka memiliki 1.237 titik, Wilayah Majalaya 1.146 titik, dan jumlah terendah berada di Wilayah Cileunyi dengan 753 titik. Sebaran ini mencerminkan adanya perbedaan tingkat kebutuhan dan prioritas penerangan di setiap wilayah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh panjang jaringan jalan, kepadatan lalu lintas, dan tingkat

aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Berikut merupakan sebaran titik PJU di Jalan Kabupaten.

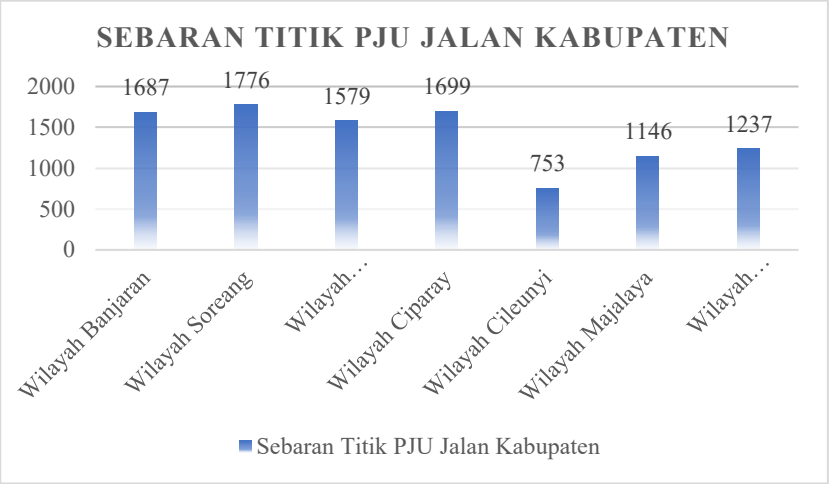

Gambar 2.55. Sebaran Titik PJU pada Jalan Kabupaten

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Perhubungan, 2025

B. Marka Jalan/Zebra Cross

Berdasarkan data Dinas Perhubungan tahun 2020, jumlah titik lokasi marka jalan/zebra cross di Kabupaten Bandung tersebar di berbagai kecamatan dengan total keseluruhan sebanyak 77 titik. Kecamatan Soreang memiliki jumlah titik tertinggi yaitu 16 titik, diikuti Kecamatan Katapang dengan 8 titik, serta Kecamatan Cileunyi, Cimaung, dan Kutawaringin masing-masing 6 titik. Kecamatan Bojongsoang dan Banjaran memiliki 4 titik, sedangkan beberapa kecamatan seperti Arjasari, Baleendah, Ciparay, Margaasih, dan Pameungpeuk memiliki 3 titik. Sementara itu, Margahayu, Paseh, dan Rancaekek masing-masing memiliki 2 titik, serta Ibun, Kertasari, Cimenyan, Pasirjambu, dan Solokan Jeruk memiliki jumlah terendah yaitu 1 titik. Distribusi ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas penempatan marka jalan di tiap kecamatan, yang kemungkinan disesuaikan dengan tingkat kepadatan lalu lintas dan kebutuhan keselamatan pengguna jalan.

Tabel 2.59. Jumlah Titik Lokasi Marka Jalan/Zebra Cross di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Total	Kecamatan	Total
Arjasari	3	Kutawaringin	6
Baleendah	3	Margaasih	3
Banjaran	4	Margahayu	2
Bojongsoang	4	Pameungpeuk	3
Cileunyi	6	Pangalengan	1
Cimaung	6	Paseh	2
Cimenyan	1	Pasir jambu	1
Ciparay	3	Rancaekek	2
Ibun	1	Solokan jeruk	1
Katapang	8	Soreang	16
Kertasari	1	**Kabupaten Bandung**	**77**

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

C. Rambu Lalu Lintas

Berdasarkan pendataan Dinas Perhubungan tahun 2020, rambu lalu lintas di Kabupaten Bandung terdiri dari empat jenis utama, yaitu rambu peringatan, rambu petunjuk, rambu perintah, dan rambu larangan. Untuk rambu peringatan, jumlah titik lokasi tercatat sebanyak 51 titik yang tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan dengan jumlah titik tertinggi adalah Kutawaringin, Cileunyi, Katapang, dan Solokan Jeruk yang masing-masing memiliki 6 titik, diikuti Rancaekek 5 titik, serta Arjasari, Bojongsoang, dan Soreang masing-masing 4 titik. Sementara itu, Banjaran, Ciparay, Dayeuhkolot, Paseh, dan Pasirjambu memiliki jumlah lebih sedikit, yakni 2 titik di setiap kecamatan. Sebaran ini mencerminkan penempatan rambu peringatan yang disesuaikan dengan potensi titik rawan kecelakaan, kepadatan lalu lintas, serta kondisi geometrik jalan di setiap wilayah. Berikut merupakan jumlah titik lokasi rambu peringatan berdasarkan di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.60. Jumlah Titik Lokasi Rambu Peringatan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Total	Kecamatan	Total
Arjasari	4	Kutawaringin	6
Banjaran	2	Paseh	2
Bojongsoang	4	Pasir jambu	2
Cileunyi	6	Rancaekek	5
Ciparay	2	Solokan jeruk	6
Dayeuhkolot	2	Soreang	4
Katapang	6	**Kabupaten Bandung**	**51**

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Sedangkan jumlah titik lokasi rambu petunjuk di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 14 titik yang tersebar di beberapa kecamatan. Rancaekek menjadi kecamatan dengan jumlah titik terbanyak yaitu 5 titik, diikuti Bojongsoang dengan 3 titik, serta Ciparay dengan 2 titik. Sementara itu, Cileunyi, Cimenyan, Soreang, dan Pacet masing-masing hanya memiliki 1 titik rambu petunjuk. Distribusi ini menunjukkan bahwa pemasangan rambu petunjuk lebih terkonsentrasi di wilayah dengan tingkat pergerakan lalu lintas yang tinggi dan menjadi jalur strategis, sehingga memerlukan arahan yang jelas bagi pengguna jalan. Berikut merupakan jumlah titik lokasi rambu petunjuk berdasarkan di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.61. Jumlah Titik Lokasi Rambu Petunjuk di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Total	Kecamatan	Total
Bojongsoang	3	Pacet	1
Cileunyi	1	Rancaekek	5
Ciparay	2	Soreang	1
Cimenyan	1	**Kabupaten Bandung**	**14**

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Sedangkan jumlah titik lokasi rambu perintah di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 58 titik yang tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan Soreang memiliki jumlah terbanyak yaitu 19 titik, diikuti Kutawaringin dengan 6 titik, Bojongsoang 5 titik, serta Baleendah, Ciparay, dan Paseh masing-masing 4 titik. Katapang memiliki 3 titik, sedangkan Cileunyi, Cimaung, Dayeuhkolot, Rancaekek, dan Solokan Jeruk masing-masing 2 titik. Beberapa kecamatan seperti Margahayu, Pasirjambu, dan Ciwidey memiliki jumlah terendah yaitu 1 titik. Penyebaran ini menunjukkan bahwa pemasangan rambu perintah lebih difokuskan pada wilayah dengan tingkat aktivitas lalu lintas tinggi dan membutuhkan pengaturan perilaku pengemudi untuk menjaga ketertiban serta keselamatan di jalan. Berikut merupakan jumlah titik lokasi rambu perintah berdasarkan di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.62. Jumlah Titik Lokasi Rambu Perintah di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Total	Kecamatan	Total
Baleendah	4	Kutawaringin	6
Bojongsoang	5	Margahayu	1
Cileunyi	2	Paseh	4
Cimaung	2	Pasir jambu	1
Ciparay	4	Rancaekek	2
Ciwidey	1	Solokan jeruk	2
Dayeuhkolot	2	Soreang	19
Katapang	3	Kabupaten Bandung	58

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Berdasarkan data Dinas Perhubungan tahun 2020, jumlah titik lokasi rambu larangan di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 30 titik yang tersebar di beberapa kecamatan. Kecamatan Soreang menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak yaitu 12 titik, diikuti Bojongsoang dengan 7 titik, serta Baleendah dengan 3 titik. Katapang dan Cileunyi masing-masing memiliki 2 titik, sedangkan Cimaung juga memiliki 2 titik, dan Pasirjambu serta Ciparay memiliki jumlah terendah yaitu 1 titik. Distribusi ini menunjukkan bahwa pemasangan rambu larangan lebih terkonsentrasi di pusat aktivitas dan jalur dengan potensi pelanggaran lalu lintas tinggi, guna mengatur pergerakan kendaraan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Tabel 2.63. Jumlah Titik Lokasi Rambu Larangan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Total	Kecamatan	Total
Baleendah	3	Katapang	2
Bojongsoang	7	Pasir jambu	1
Cileunyi	2	Soreang	12
Cimaung	2	**Kabupaten Bandung**	**30**
Ciparay	1		

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

2.1.6.4 Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Pengembangan BRT Cekungan Bandung

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyepakati nota kesepakatan bersama antara Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Kota yang berada di wilayah Cekungan Bandung tentang Pengembangan, Pengelolaan dan Pengoperasian Angkutan Massal Berbasis Jalan/ Bus Rapid Transit di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Dalam hal ini Dinas Kabupaten Bandung telah mengembangkan koridor, terminus, dan Depo BRT untuk mendukung visi misi Bupati Bandung dalam mendongkrak transportasi massal di wilayah Kabupaten Bandung.

Ada 3 Layanan Koridor yang telah beroperasi di Kabupaten Bandung, diantaranya:

1. Leuwipanjang – Soreang
2. Leuwipanjang – Majalaya
3. BEC – Baleendah

Dari ketiga koridor ini akan dikembangkan atau penambahan koridor di Wilayah Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Banjaran – Baleendah – BEC
2. Majalaya – Baleendah – Leuwipanjang
3. Tegalluar – St. Hall
4. Cibeureum – Leuwipanjang – Tegalluar
5. Majalaya – Derwati – Tegalluar

Hingga saat ini melalui pembahasan,kajian, ,dan keputusan yang telah berjalan , telah disepakati oleh Bupati Bandung untuk dibangun Depo dan Terminus BRT, diantaranya :

1. Terminus Banjaran yang berlokasi dieksisting Terminal Banjaran
2. Terminal Soreang yang berlokasi dieksisting Terminal Soreang
3. Terminal Majalaya yang berlokasi di Pasar Baru Majalaya
4. Depo BRT Soreang yang berlokasi dilahan Belakang Gedung Baznas
5. Depo BRT Majalaya yang berlokasi di Pasar Baru Majalaya

Untuk progres pembahasan proyek BRT Cekungan Bandung yang sedang berjalan hingga saat ini adalah penetapan Trayek Feeder di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini Trayek Soreang – Ciwidey telah ditetapkan untuk menjadi angkutan Feeder BRT dan sedang dalam masa pembinaan terhadap trayek tersebut dengan pengawasan dari Dishub Provinsi Jawa Barat.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Barat dengan Pemkot Bandung, Pemkot Cimahi, Pemkab Bandung, Pemkab Bandung Barat, dan Pemkab Sumedang sebagai tidak lanjut dari Nota Kesepahaman/WLA Kemenhub-Pemprov-

Pemkot/Pemkab tertanggal 7 Maret 2024 tentang Pengembangan, Pengelolaan, dan Pengoperasian Angkutan Massal Berbasis Jalan/BRT di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi landasan komitmen daerah dalam penyiapan Sharing PSO (Public Servise Obligation) operasional BRT maupun pembentukan BUMD baru yang melibatkan Pemkot/Pemkab terkait yang harus dimasukkan kedalam RPJMD masing-masing untuk penganggaran 2026. World Bank merekomendasikan porsi bus listrik minimal 50%. Rekomendasi tersebut akan berpengaruh terhadap besaran PSO.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung akan terus berkomitmen dalam penyelenggaraan pembangunan BRT Cekungan Bandung untuk menuju "Manusia Modern dengan Transportasi Massal"

2.1.6.5 Kinerja Tingkat Konektivitas Layanan Angkutan Umum

Dalam upaya mencapai akuntabilitas, Instansi Pemerintah yang baik dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta instansi pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Adapun indikator kinerja perhubungan sebagai berikut.

Tabel 2.64. Kinerja Konektivitas Layanan Angkutan Umum Tahun 2024&2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		2023	2024
Meningkatnya Tingkat Konektivitas Layanan Angkutan Umum Di Kabupaten Bandung	Persentase perjalanan menggunakan angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung (%)	5,33	6,08
	Rasio Konektivitas Kabupaten (%)	47,24	47,54

Sumber: Data Dikelola SIPD, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan data kinerja tingkat konektivitas layanan angkutan umum Kabupaten Bandung, terlihat bahwa capaian indikator pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan terhadap target yang ditetapkan. Rasio konektivitas Kabupaten pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 47,24%, namun berhasil terealisasi sebesar 49,52%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 104,83%. Nilai ini sejalan dan konsisten dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, termasuk tahun 2023 yang juga mencatatkan realisasi 49,52% meskipun targetnya lebih rendah yaitu 47,24%. Konsistensi nilai realisasi ini mengindikasikan bahwa sistem konektivitas angkutan umum di Kabupaten Bandung sudah berada pada level yang stabil, meskipun belum menunjukkan tren peningkatan tahunan yang signifikan.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, terjadi peningkatan target dari tahun 2023 ke 2024, yakni dari 47,24% menjadi 47,54%. Hal ini menunjukkan adanya ekspektasi

peningkatan dari sisi perencanaan, dan realisasi tahun 2024 yang tetap mencapai 49,52% berhasil memenuhi harapan tersebut. Namun, meski realisasi tidak naik dibandingkan tahun sebelumnya, tetap tercatat melampaui target yang ditetapkan. Ini menandakan keberhasilan dalam menjaga kualitas konektivitas meskipun tantangan pelayanan dan distribusi masih ada.

Rasio konektivitas ini sendiri dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trayek angkutan umum eksisting (baik trayek perintis maupun AKDP) dengan jumlah kebutuhan trayek. Nilai 49,52% mengindikasikan bahwa hampir separuh dari kebutuhan trayek telah dipenuhi. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat trayek-trayek yang tumpang tindih, yang dapat menyebabkan pemborosan rute dan turunnya efisiensi operasional. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi dan penataan ulang trayek agar layanan dapat menjangkau wilayah secara lebih merata dan efisien.

Kendati nilai capaian secara umum cukup tinggi, terdapat **13 zona** yang hingga tahun 2024 belum terpenuhi potensi permintaannya terhadap angkutan umum. Ketimpangan layanan ini menunjukkan perlunya pemetaan zona prioritas untuk pengembangan dan perluasan trayek, termasuk di wilayah dengan kepadatan tinggi dan potensi permintaan besar. Selain itu, indikator load factor angkutan umum yang berada di angka rata-rata 63,06% juga menjadi ukuran bahwa layanan dimanfaatkan masyarakat, walaupun tingkat keterisiannya masih bervariasi dan bergantung pada masing-masing rute. Load factor ini bersifat fluktuatif, sehingga perlu didorong dengan strategi promosi, peningkatan kualitas layanan, serta integrasi dengan moda transportasi lainnya agar keterpakaian layanan terus meningkat.

Pemilihan jenis transportasi ataupun moda angkutan yang digunakan dipengaruhi oleh karakteristik pelaku perjalanan, karakteristik perjalanan, karakteristik sistem ransportasi, serta karakteristik kota. Adapun karakteristik pemilihan moda di kabupaten bandung dibagi menjadi sepeda motor, sepeda, mobil pribadi, pejalan kaki, angkutan umum dan ojek. Berikut merupakan rincian data tahun 2023&2024 di Kabupaten Bandung.

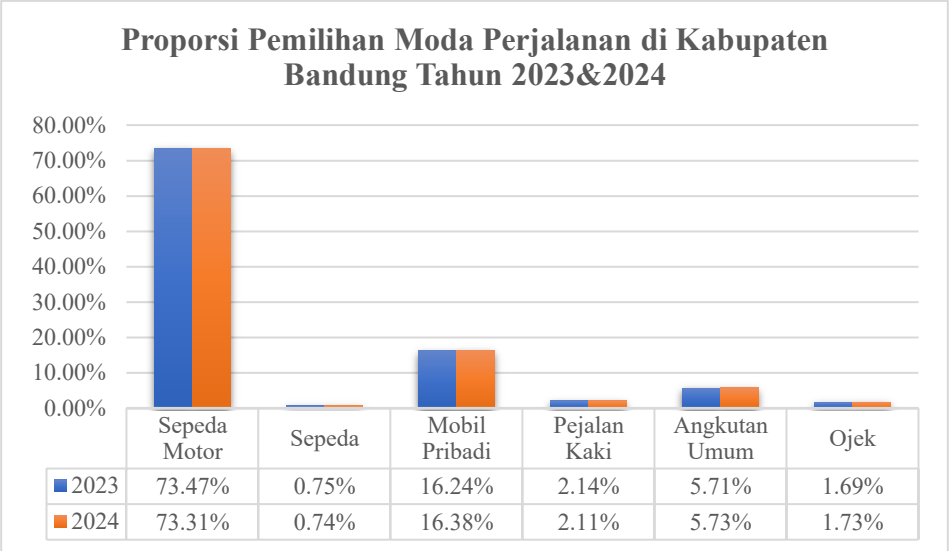

Gambar 2.56. Proporsi Pemilihan Moda Perjalanan di Kabupaten Bandung Tahun 2023 & 2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan grafik Proporsi Pemilihan Moda Perjalanan di Kabupaten Bandung Tahun 2023 dan 2024, terlihat bahwa sepeda motor masih menjadi moda transportasi paling dominan yang dipilih masyarakat, baik pada tahun 2023 maupun 2024. Pada tahun 2023, sepeda motor mencatat proporsi sebesar 73,47%, sedikit menurun menjadi 73,31% pada tahun 2024. Meski terjadi penurunan, dominasi penggunaan sepeda motor tetap tinggi, yang mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap moda ini untuk mobilitas sehari-hari. Sementara itu, angkutan umum menunjukkan peningkatan tipis dari 5,71% pada 2023 menjadi 5,73% pada 2024. Meskipun peningkatan tersebut sangat kecil, capaian ini tetap menggambarkan adanya upaya perbaikan kinerja angkutan umum, termasuk dukungan dari program subsidi dan operasional BRT yang telah dimulai sebelumnya. Namun, nilai ini masih sangat jauh dari acuan standar SNI mode share angkutan umum perkotaan sebesar 30%, menandakan bahwa moda ini belum menjadi pilihan utama masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target kinerja, pada 2023 indikator mode share angkutan umum mencapai 107% dari target (5,71% dari target 5,33%), sedangkan pada 2024 capaian sedikit lebih rendah yaitu 94,24% (5,73% dari target 6,08%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah pengguna, laju pertumbuhan belum cukup untuk mengejar target yang juga meningkat.

Analisis efisiensi program menunjukkan bahwa Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berhasil mencapai efektivitas 100% dan efisiensi 102,14%, yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator moda share, terutama pada tahun 2023. Namun, tantangan dari sisi operator tetap ada, terutama menyangkut faktor muat kendaraan yang berpengaruh terhadap pendapatan per km, serta tingginya tumpang tindih

rute angkutan perkotaan (mencapai 50% dari panjang rute), termasuk rute BRT Trans Metro Pasundan.

2.1.7 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.7.1 Penurunan Emisi GRK

Gas rumah kaca (GRK) seperti CO_2, CH_4, dan NF_3 berkontribusi besar terhadap pemanasan global melalui penyerapan radiasi panas. Inventarisasi emisi GRK di Kabupaten Bandung mencakup lima sektor: Energi, IPPU, Kehutanan, Pertanian, dan Limbah. Berdasarkan Tabel 2.50, total emisi GRK meningkat tajam dari 1.802,51 Gg CO_2 eq (2018) menjadi 28.347,48 Gg CO_2 eq (2023), dengan lonjakan terbesar pada sektor Limbah tahun 2021–2023 akibat masuknya data "Limbah Cair Industri" yang sebelumnya belum tersedia. Sementara itu, sektor IPPU tercatat tidak menghasilkan emisi (NO/Not Occurring), kemungkinan karena minimnya data aktivitas industri atau penggunaan teknologi rendah emisi. Inventarisasi emisi GRK di Kabupaten Bandung telah dilakukan secara periodik sebagai dasar kebijakan pengurangan emisi dan peningkatan penyerapan. Namun, kualitas data masih terbatas akibat sulitnya memperoleh data sumber dan penyerap emisi. Emisi dari sektor pertanian relatif stabil, sementara penyerapan emisi dari kehutanan cenderung meningkat. Lonjakan emisi pada sektor limbah tahun 2020–2021 terjadi karena masuknya data "Limbah Cair Industri" yang tidak tersedia di tahun lain, hal serupa juga terjadi pada sektor energi.

Tabel 2.65. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Agregat Kabupaten Bandung

No	Item	Emisi GRK netto (GG CO2 eq)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Energi	1.044,50	721,52	518,15	1.446,80	1.579,24	1.550,79
2	IPPU*	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3	Kehutanan	-402,14	-393,27	-546,49	-568,28	-594,51	-536,19
4	Pertanian	815,66	821,18	775,03	799,45	701,10	637,24
5	Limbah	344,48	351,48	335,43	15.898,26	22.446,06	26.695,65
Total		1.802,51	1.500,90	1.082,13	17.576,24	24.131,89	28.347,48

Keterangan: *NO = Not Occuring*
Sumber: Data Dikelola SIPD, Laporan IGRK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2024 (Diolah)

Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Bandung berusaha mencakup seluruh sektor dan kategori utama yang secara signifikan menghasilkan emisi GRK, yaitu sektor penggunaan dan pengadaan energi, pertanian, pengelolaan limbah, serta kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya. Pada tahun 2023, total emisi GRK di Kabupaten Bandung mencapai 28.347,48 Gg CO2e. Peningkatan emisi sebesar 14,87% dibanding tahun 2022 terutama disebabkan oleh kenaikan emisi pada sektor limbah yang mencapai 4.249,59 Gg CO2e. Secara rinci, emisi terbesar berasal dari sektor limbah sebesar 26.695,65 Gg CO2e, diikuti sektor energi sebesar 1.550,79 Gg CO2e, sektor pertanian sebesar 637,24 Gg

CO2e, sedangkan sektor kehutanan justru melakukan penyerapan emisi sebesar 536,19 Gg CO2e.

Analisis sumber utama emisi GRK pada 2023 menunjukkan **sektor limbah** sebagai penyumbang terbesar dengan emisi **26.327,16 Gg CO2e** yang berasal dari **limbah cair industri**, mewakili **89,27%** dari total emisi Kabupaten Bandung. Lonjakan emisi ini terkait dengan peningkatan produksi industri tekstil. Jika emisi dari industri tekstil diabaikan, maka sektor energi, khususnya dari penggunaan bahan bakar transportasi, menjadi sumber emisi utama dengan 1.166,71 Gg CO2e, disusul oleh sektor pertanian (pengelolaan sawah) dan sektor limbah permukiman. Perhitungan emisi GRK ini dilakukan untuk memantau serta mengevaluasi efektivitas upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi emisi. Aktivitas mitigasi yang telah terlaksana tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mempermudah pelaporan capaian penurunan emisi GRK, Pemerintah Daerah difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui platform daring AKSARA.

Berdasarkan data mitigasi yang dilaporkan di website AKSARA untuk tahun 2023, tercatat **penurunan emisi GRK di sektor pengelolaan limbah** sebesar 7.010,60 ton CO2e (7,010 Gg CO2e), yang berasal dari kegiatan seperti Bank Sampah, TPST/TPS3R, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL). Sedangkan **penurunan emisi di sektor energi** adalah sebesar 58,07 ton CO2e (0,058 Gg CO2e), yang dipicu oleh kegiatan seperti car free day dan penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL). Penurunan emisi pada sektor limbah tahun 2023 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 11.287,42 ton CO2e (37,89%), sementara **penurunan emisi di sektor energi** tahun 2023 justru lebih besar dibanding tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 24 ton CO2e (58,67%). Adapun detail perhitungan akumulasi GRK Sektor Limbah berdasarkan dokumen Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebagai berikut.

A. Perhitungan Emisi GRK Sektor Limbah

Emisi GRK sektor limbah di Kabupaten Bandung meningkat tajam dari 344,48 Gg CO_2 eq (2018) menjadi 26.695,65 Gg CO_2 eq (2023), terutama akibat masuknya data Limbah Cair Industri yang sebelumnya tidak terestimasi pada 2018–2020. Sejak 2021, emisi dari limbah cair industri melonjak signifikan, mencapai 26.327,16 Gg CO_2 eq pada 2023, yang mengindikasikan penambahan sumber data atau perubahan metode penghitungan yang memengaruhi tren jangka panjang.

Di sisi lain, komponen lain seperti Limbah Cair Domestik dan Limbah Padat relatif stabil, dengan emisi bertahan pada kisaran 179,70–216,90 Gg CO_2 eq (Limbah Cair Domestik) dan 145,85–153,66 Gg CO_2 eq (Limbah Padat). Namun, terdapat penurunan emisi dari aktivitas Pembakaran (dari 4,73 Gg CO_2 eq pada 2018 menjadi NE di 2023) dan Pengolahan Secara Biologis (dari 1,73 Gg CO_2 eq menjadi 0,38 Gg CO_2 eq), yang mungkin mencerminkan peralihan praktik pengelolaan limbah atau kurangnya pembaruan data.

Keterangan NE (*Not Estimated*) pada beberapa item, seperti Limbah Cair Industri (2018–2020) dan Pembakaran (2023), menandakan ketidaksinambungan data atau kesenjangan dalam pengumpulan informasi. Ketidaklengkapan ini berpotensi mengaburkan analisis tren emisi sektor limbah secara keseluruhan. Sebagai contoh, ketiadaan data Limbah Cair Industri sebelum 2021 menyebabkan total emisi sektor limbah pada tahun-tahun sebelumnya terlihat rendah secara buatan, sementara lonjakan tiba-tiba di tahun 2021–2023 sulit dijelaskan tanpa konteks metodologis yang jelas. Dapat disimpulkan bahwa sektor limbah menjadi penyumbang emisi GRK terbesar di Kabupaten Bandung sejak 2021, terutama akibat aktivitas industri. Secara lebih rinci tingkat kenaikan emisi/serapan dari sektor limbah dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.57. Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor limbah
Sumber: Data Dikelola SIPD, Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2024

Tabel 2.66. Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah

No	Item	Emisi GRK netto (GG CO2 eq)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Limbah Cair Industri	NE	NE	NE	15.534,91	22.072,74	26.327,16
2	Limbah Cair Domestik	192,18	198,02	179,70	207,59	216,90	215,49
3	Pembakaran	4,73	4,2	3,47	2,26	2,30	NE

No	Item	Emisi GRK netto (GG CO2 eq)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	Pengolahan Secara Biologis	1,73	2,53	2,99	0,51	0,46	0,38
5	Limbah Padat	145,85	146,73	149,28	153	153,66	152,62
Total		344,48	351,48	335,43	15.898,26	22.446,06	26.695,65

Keterangan: *NE = Not Estimated*
Sumber: Data Dikelola SIPD, Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2024

B. Perhitungan Emisi GRK Sektor Pertanian

Emisi gas rumah kaca (GRK) sektor pertanian Kabupaten Bandung mengalami penurunan signifikan dari 799,45 Gg CO_2 eq (2021) menjadi 637,24 Gg CO_2 eq (2023), dengan total pengurangan 20,28% dalam tiga tahun. Budidaya padi (*rice cultivation*) menjadi kontributor emisi terbesar, menyumbang rata-rata 48,5% dari total emisi sektor pertanian (344,52–313,00 Gg CO_2 eq). Meski demikian, emisi dari aktivitas ini cenderung menurun sebesar 9,15% pada 2023, diduga akibat penerapan teknik irigasi alternatif atau pengurangan lahan sawah.

Kontributor utama kedua adalah Direct N_2O *from managed soils* (emisi langsung nitro oksida dari pengelolaan tanah), yang turun dari 244,40 Gg CO_2 eq (2021) menjadi 145,55 Gg CO_2 eq (2023). Penurunan 40,43% ini menunjukkan potensi pergeseran praktik pertanian, seperti pengurangan penggunaan pupuk nitrogen sintetis atau pemanfaatan pupuk organik. Hal serupa terlihat pada emisi dari *Urea Fertilization* (pemupukan urea) yang turun 47,54% (dari 24,36 menjadi 12,78 Gg CO_2 eq), mengindikasikan upaya efisiensi pemupukan. Secara lebih rinci tingkat kenaikan emisi/serapan dari sektor pertanian dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

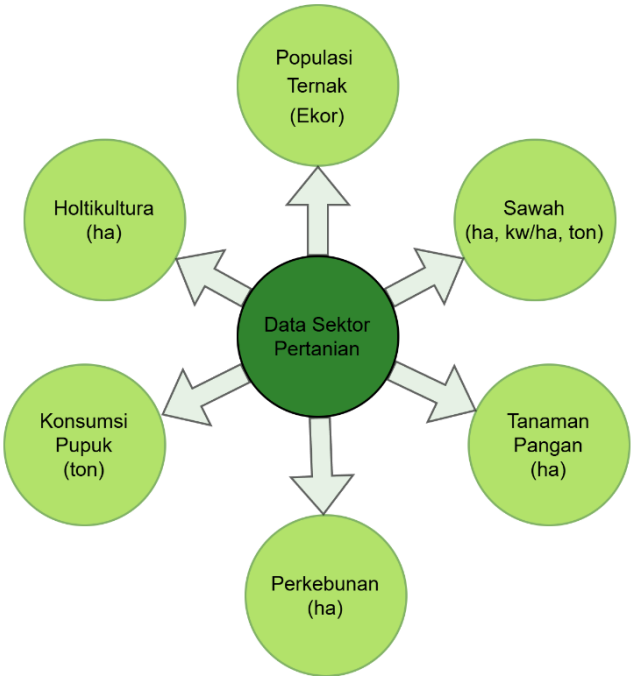

Gambar 2.58. Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor pertanian
Sumber: Data Dikelola SIPD, Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2024

Tabel 2.67. Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian

No	Item	Emisi GRK netto (GG CO2 eq)		
		2021	2022	2023
1	Enteric Fermentation	72,67	65,70	72,17
2	CH_4 From Manure Management	6,84	6,16	6,76
3	Diriect N_2O From Manure Management	27,16	24,74	26,33
4	Biomass Burning Cropland	7,99	7,95	7,20
5	Biomass Burning Grassland	0,67	0,36	0,14
6	Liming	NE	NE	NE
7	Urea Fertilization	24,36	16,80	12,78
8	Direct N_2O from managed soils	244,40	171,98	145,55
9	Indirect N_2O from managed soils	62,20	51,71	45,30
10	Indirect N_2O Manure Management	8,64	7,81	8,01
11	Rice cultivation	344,52	347,90	313,00
Total		**799,45**	**701,10**	**637,24**

Sumber: Data Dikelola SIPD, Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2024

C. Perhitungan Emisi GRK Sektor Kehutanan

Sektor kehutanan Kabupaten Bandung berperan sebagai penyerap karbon *(carbon sink)* dengan total emisi bersih negatif selama tiga tahun terakhir, yakni -568,27 Gg CO_2 eq (2021), -594,51 Gg CO_2 eq (2022), dan -536,19 Gg CO_2 eq (2023). Nilai negatif ini menunjukkan bahwa kemampuan hutan dalam menyerap karbon lebih besar daripada emisi yang dihasilkan. Namun, terjadi penurunan kapasitas penyerapan karbon pada 2023 (-536,19 Gg CO_2 eq) dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan potensi tekanan pada ekosistem hutan atau perubahan tutupan lahan. Secara lebih rinci tingkat kenaikan emisi/serapan dari sektor Kehutanan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

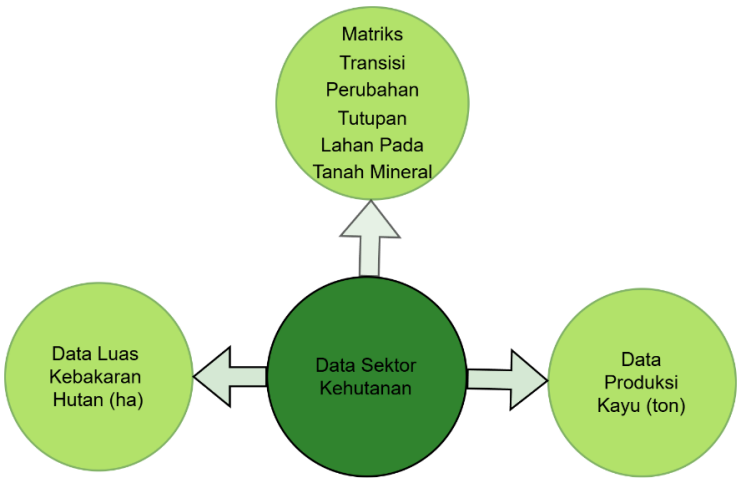

Gambar 2.59. Bagan sumber data untuk penghitungan GRK sektor kehutanan
Sumber: Data Dikelola SIPD, Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2023

Tabel 2.68. Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

No	Item	Emisi GRK netto (GG CO2 eq)		
		2021	2022	2023
1	FL-FL	-603,92	-628,29	-572,76
2	CL-CL	35,43	33,78	33,88
3	OL-CL	0,14	0	0
4	NL-OL	0	0	2,69
5	Biomass Burning	0	0	0
6	Peat Decimposition	0	0	0
7	Peat Fire	0	0	0
Total		**-568,27**	**-594,51**	**-536,19**

Sumber: Data Dikelola SIPD, Laporan IGRK DLH Kabupaten Bandung 2023

Sektor kehutanan Kabupaten Bandung masih menjadi penopang utama mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon. Namun, tren penurunan kapasitas FL-FL pada 2023 menjadi peringatan untuk memperkuat kebijakan perlindungan hutan dan rehabilitasi lahan. Sinergi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta diperlukan guna memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem hutan. Berdasarkan tabel dapat dianalisis pada komponen utama sebagai berikut

1. FL-FL (*Forest Land to Forest Land*), merupakan kontributor utama penyerapan karbon dengan nilai -603,92 Gg CO_2 eq (2021) hingga -572,76 Gg CO_2 eq (2023). Penurunan kapasitas serap karbon pada 2023 (-572,76 Gg CO_2 eq) perlu diwaspadai, mungkin disebabkan oleh deforestasi, degradasi hutan, atau penurunan pertumbuhan vegetasi.

2. CL-CL (*Cropland to Cropland*), menyumbang emisi positif kecil namun konsisten, yakni 35,43 Gg CO_2 eq (2021) hingga 33,88 Gg CO_2 eq (2023). Emisi ini berasal dari aktivitas pertanian di lahan tetap, seperti penggunaan pupuk atau alat mesin pertanian.

3. OL-CL *(Other Land to Cropland)* dan NL-OL *(Natural Land to Other Land)*, Keduanya memiliki kontribusi minimal (≤2,69 Gg CO_2 eq) atau nihil, menunjukkan minimalnya alih fungsi lahan ke penggunaan non-hutan selama periode ini.

Biomass Burning, Peat Decomposition, dan Peat Fire, tidak tercatat emisi (nilai 0) dari ketiga komponen ini, mengindikasikan tidak adanya kebakaran biomassa, dekomposisi gambut, atau kebakaran lahan gambut di Kabupaten Bandung.

2.1.7.2 Indeks Risiko Bencana

Nilai indeks risiko bencana Kabupaten Bandung tahun 2024 adalah 117,13 . Berdasarkan nilai tersebut, menurunnya tingkat risiko bencana di Kabupaten Bandung dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 132. Menurunnya Indeks Risiko Bencana menunjukkan peningkatan ketahanan Kabupaten Bandung terhadap bencana. Hal ini disebabkan oleh

perbaikan dalam mitigasi dan respons, penurunan kerentanan sosial-ekonomi, perubahan lingkungan yang lebih baik, serta efektivitas kebijakan dan regulasi. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

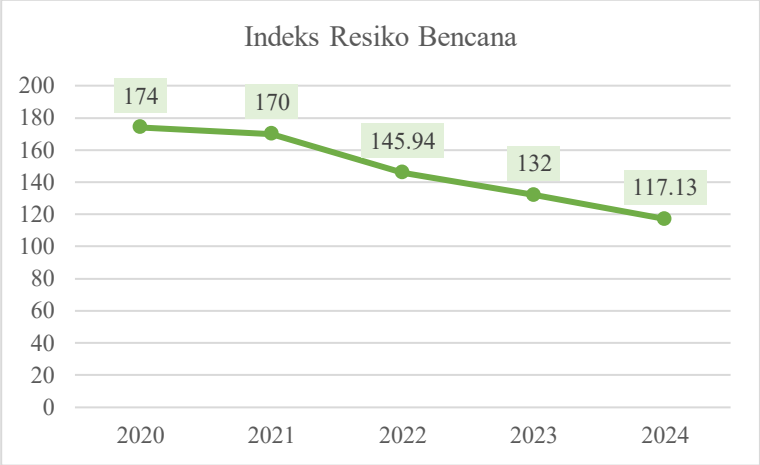

Gambar 2.60.Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD, Analisis Bappeerida, 2025

Berdasarkan kondisi Kab. Bandung, terdapat beberapa kemungkinan bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Bandung, antara lain bencana gempa bumi, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor. Untuk lebih jelasnya terkait data kejadian bencana di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69. Data Kejadian Bencana di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024

No.	Jenis Bencana	Total						Total
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Gempa Bumi	1	0	1	1	5	5	13
2.	Banjir	33	67	111	93	61	28	393
3,	Banjir Bandang	1	0	0	0	0	0	1
4.	Tanah Longsor	5	38	92	145	130	67	477
5.	Kekeringan	0	0	10	0	392	10	412
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	25	7	0		262	67	361
7.	Cuaca Ekstrem	7	36	0	0	0	0	43
8.	Angin Puting Beliung	0	0	59	69	54	19	201
9.	Lain-lain	0	1	0	0	0	85	86
Total		**72**	**149**	**273**	**310**	**1020**	**287**	**1.987**

Sumber: Data Dikelola SIPD, BPBD Kabupaten Bandung, 2025

Kabupaten Bandung mengalami 1.987 kejadian bencana dalam kurun waktu 6 tahun (2019–2024), dengan tren fluktuatif setiap tahunnya. Tanah longsor mendominasi (477 kejadian/24% dari total), terutama pada 2021–2023, diduga akibat faktor topografi berbukit dan alih fungsi lahan. Banjir menempati posisi kedua (393 kejadian), dengan puncak tertinggi pada 2021 (111 kasus), kemungkinan terkait intensitas hujan tinggi dan drainase yang tidak optimal. Kekeringan melonjak drastis di 2023 (392 kasus), mencerminkan dampak perubahan iklim atau ketahanan air yang lemah. Sementara itu, kebakaran hutan/lahan juga signifikan (361 kasus), terutama pada 2023 (262 kasus), yang

mungkin dipicu oleh cuaca kering atau aktivitas manusia. Bencana lain seperti angin puting beliung (201 kasus) dan gempa bumi (13 kasus) relatif rendah, tetapi tetap memerlukan mitigasi berbasis risiko. Berikut merupakan jumlah kejadian bencana berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2024.

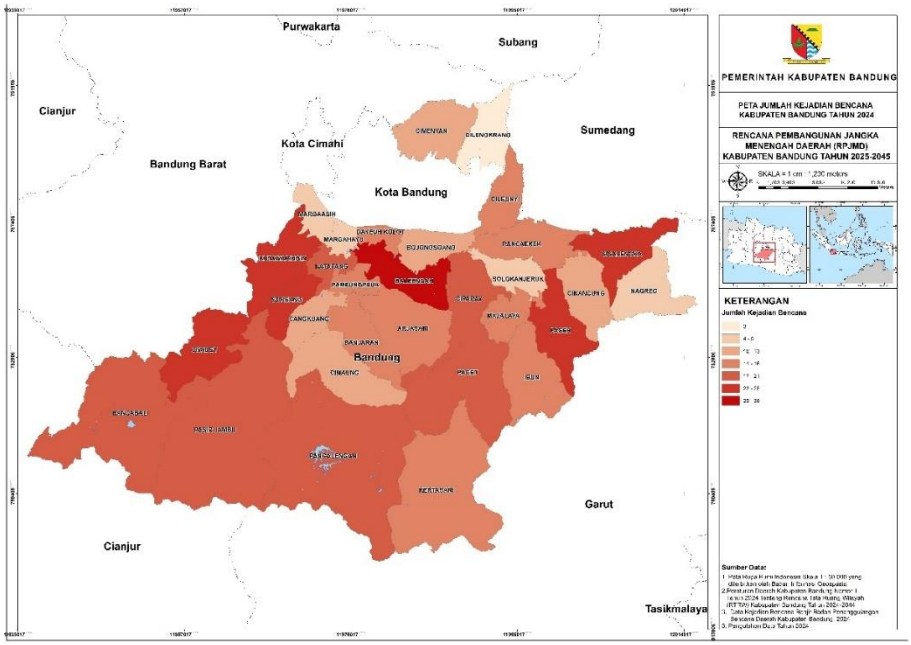

Gambar 2.61. Jumlah Kejadian Bencana berdasarkan Kecamatan Tahun 2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, BPBD Kabupaten Bandung, Tahun 2024

2.1.7.3 Indeks Ketahanan Daerah

Ketahanan daerah terhadap bencana merupakan aspek krusial dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan keselamatan masyarakat. Kabupaten Bandung dengan kondisi geografis yang beragam, rentan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Gempa Bumi

Kabupaten Bandung memiliki 5 (lima) Kecamatan yang berpeluang memiliki rawan berisiko gempa, diantaranya adalah Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Kertasari, dan Kecamatan Cilengkrang. Secara geologis Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berpotensi terjadi gempa bumi (gempa tektonik dan gempa vulkanik). Wilayah berpotensi terjadi gempa tektonik adalah cabang-cabang dari sesar utama (sesar Lembang) yang pengaruhnya signifikan dari bagian utara wilayah Kabupaten Bandung hingga mempengaruhi wilayah selatan. Adapun sesar lainnya yang berada di Wilayah Kabupaten Bandung adalah Sesar Citarum dan Sesar Cicalengka. Gempa yang cukup besar terjadi pada bulan September 2019 yang berpusat di daerah Pacet dengan kekuatan 4,1 *Skala Richter* (SR) cukup membuat wilayah Kabupaten Bandung terguncang terutama wilayah Pangalengan dan Kertasari. Kedua

wilayah tersebut mempunyai karakteristik patahan yang banyak lempeng dataran di Samudera Hindia dan bervariasi sehingga dapat menjadi katalisator gelombang gempa yang dihasilkan dari aktivitas pertemuan.

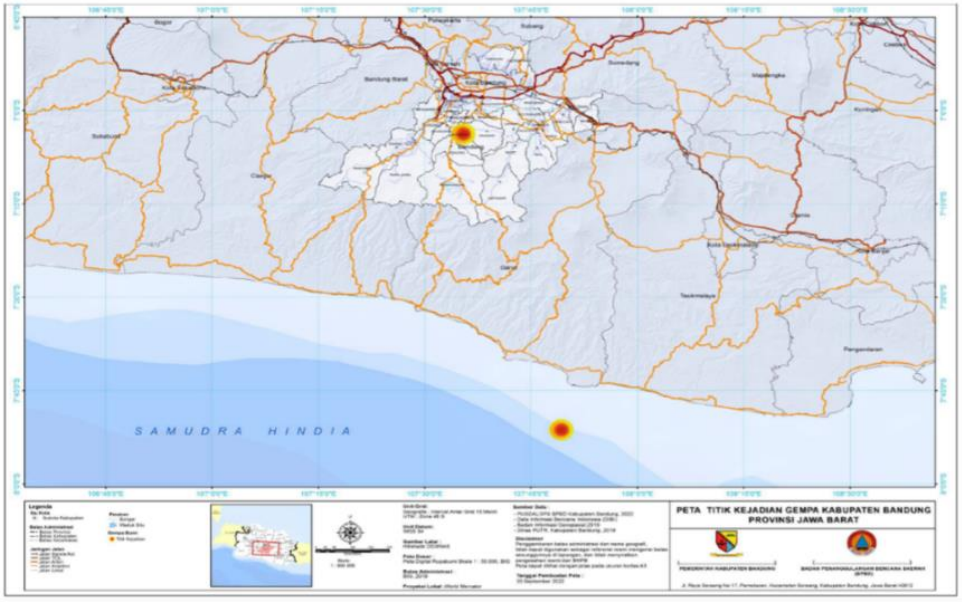

Gambar 2.62. Peta Titik Lokasi Kejadian Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD, KRB Kabupaten Bandung 2022-2026

Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir umumnya merupakan daerah di sepanjang tepi Sungai Citarum bagian hulu/Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Citarum, dengan muara-muara anak sungainya yang sering menyebabkan banjir, antara lain Sungai Ciganitri, Sungai Citarik, Sungai Cimanggung, Sungai Cikawung, Sungai Cimuncang, dan Sungai Cipamokolan. Luas kawasan yang terkena genangan banjir rutin seluas 1.700 Ha. Sementara itu sungai yang pembuangannya melintasi jalan, antara lain: Sungai Cipamokolan dan Sungai Cinambo (Desa Tegalluar), Sungai Babakan Sayang dan Sungai Ciendog (Desa Babakan Sayang). Sungai-sungai tersebut bermuara di Sungai Citarik yang selanjutnya menuju arah Sungai Citarum di Desa Sapan. Hal tersebut yang menjadi penyebab setiap tahun wilayah sapan mengalami banjir.

Penyebab banjir lainnya adalah terjadinya sedimentasi/pendangkalan pada sungai-sungai tersebut, sehingga menyebabkan sumbatan dan air kembali ke lokasi jalan tol serta menggenang di sisi kanan-kiri badan jalan. Walau terjadi secara temporer, daerah lainnya yang memiliki potensi banjir adalah Kecamatan Margahayu, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Katapang, Kecamatan Soreang, dan Kecamatan Margaasih. Jika dilihat dari cakupan DAS, maka sedimentasi yang terjadi pada DAS Cirasea adalah 1,7 juta ton/tahun, DAS Citarik 773 ribu ton/tahun, sub-DAS Cisangkuy 1,3 juta ton/tahun, dan

DAS Ciwidey 1,0 juta ton/tahun. Cekungan Bandung merupakan salah satu wilayah pengendapan sedimen untuk daerah tangkapan Waduk Saguling. Material erosi yang berasal dari sub DAS Cirasea, Cisangkuy dan Ciwidey akan mempunyai peluang mengendap di Cekungan Bandung dan hanya sebagian kecil yang akan diteruskan menuju Waduk Saguling. Cekungan Bandung akan menerima beban hasil sedimentasi sebesar 6,5 juta ton/tahun. Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung antara lain disebabkan oleh:

- Curah hujan yang cukup tinggi;
- Perubahan tata guna lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS)/wilayah Citarum Hulu yang mengakibatkan sedimentasi dan puncak banjir meningkat;
- Pertambahan penduduk dan pembangunan permukiman yang tidak berwawasan lingkungan;
- Permukiman padat/kumuh di daerah bantaran Sungai;
- Pengurangan kapasitas palung sungai akibat dari pembuangan sampah ke sungai; dan
- Belum adanya penataan sistem drainase Cekungan Bandung yang komprehensif dan memadai.

Beberapa kejadian banjir bandang di Kabupaten Bandung tercatat pada Tanggal 28 Februari 2017, bertempat di Kp. Sindang Pala RT 01 RW 03 Desa Mekar Wangi, Kecamatan Ibun telah terjadi bencana banjir bandang yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Dimensi longsoran panjang 8 meter, lebar 2,5 meter dan tinggi 10,5 meter. Pada saat kejadian bencana banjir ini tidak terdapat korban jiwa. Selain itu pada Tanggal 07 Juni 2022 di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu terjadi kejadian banjir bandang yang mengakibatkan jembatan penghubung antara Kecamatan Ciwidey dan Pasir Jambu ambruk. Adapun pada tanggal 21 November tahun 2024 terjadi bencana banjir bandang di Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk yang menyebabkan sedikitnya tiga rumah warga rusak dan empat orang terluka. Penyebab banjir bandang tersebut menurut BPBD Kabupaten Bandung disebabkan oleh intensitas hujan cukup tinggi lalu menyebabkan meluapnya Sungai Cisunggalah. Sehingga tanggul yang menahan air selama ini tidak mampu menahan debit air.

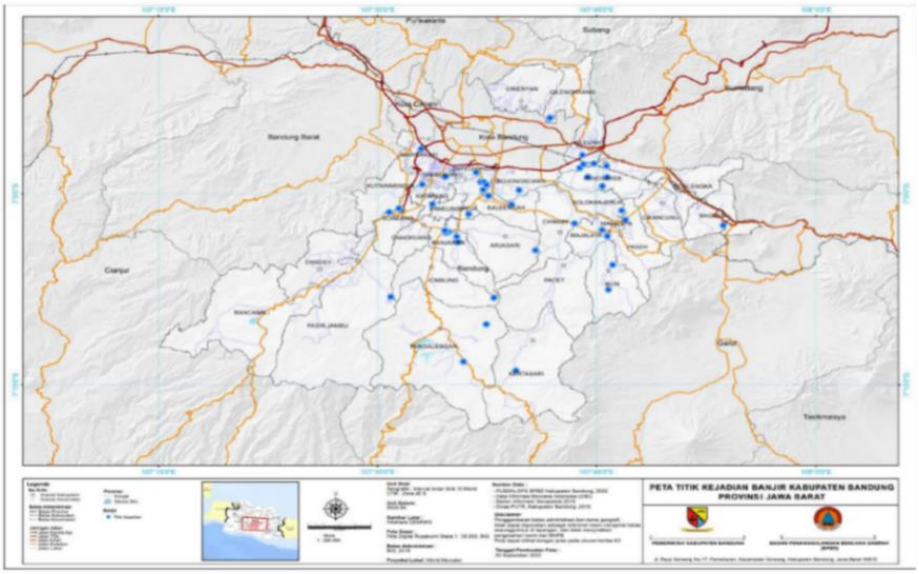

Gambar 2.63. Peta Titik Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD, KRB Kabupaten Bandung 2022-2026

Tanah Longsor

Berdasarkan kepekaan terhadap erosi di Kabupaten Bandung, terdapat 79,68 Ha atau sebesar 0,05% dari Kabupaten Bandung dengan kondisi tanah sangat peka terhadap erosi. Keterkaitan dengan potensi tanah longsor di Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi daerah yang berpotensi terjadinya tanah longsor. Tercatat terdapat 22 kecamatan yang berpotensi akan terjadinya bencana tanah longsor. Sampai dengan tahun 2021, telah dilaksanakan pemetaan dan inventarisasi daerah yang rawan terjadinya bencana tanah longsor diantaranya Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, dan Kecamatan Rancabali. Hal ini menyebabkan masih adanya kecamatan yang belum terpetakan lahan yang mempunyai potensi tanah longsor.

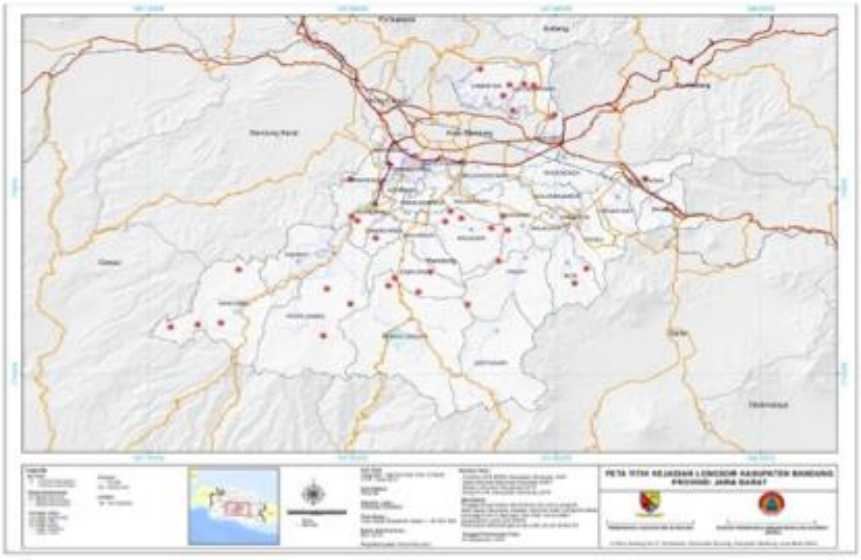

Gambar 2.64. Peta Titik Lokasi Kejadian Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD, KRB Kabupaten Bandung 2022-2026

Kekeringan

Kekeringan merupakan sebuah fenomena alam yang biasa terjadi akibat dari pengaruh iklim. Kejadian bencana kekeringan di Kabupaten Bandung pernah terjadi pada tahun 2018 befdengan jumlah kejadian 5 kali. Kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bandung, selain mengakibatkan gagal panen di bidang pertanian juga mengakibatkan sulitnya air bersih.

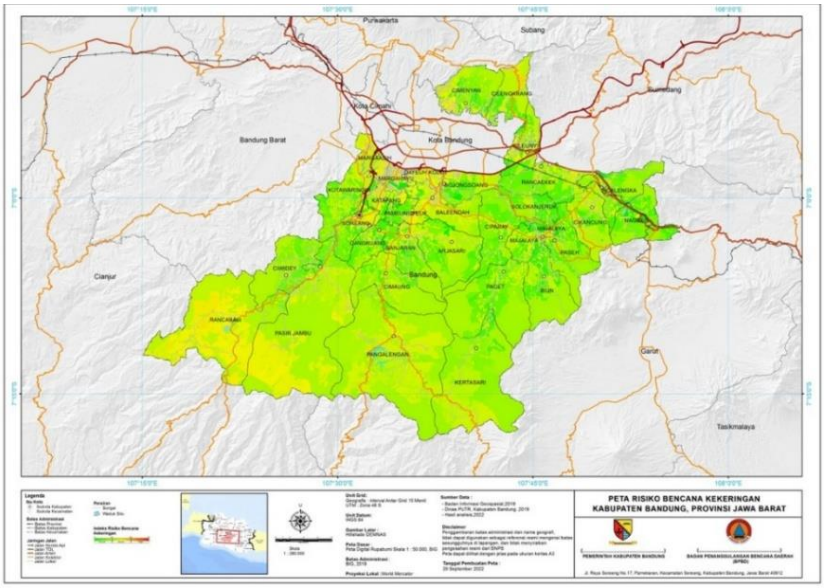

Gambar 2.65. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD, KRB Kabupaten Bandung 2022-2026

Kebakaran Hutan dan Lahan

Sejak kurun 5 tahun terakhir, bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bandung terjadi sebanyak 44 kali. Kejadian terbanyak pada tahun 2019 dengan jumlah 25 kali. Lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 terjadi di beberapa lokasi, yaitu:

- Desa Pasir Huni, Kecamatan Cimaung, terbakar mencapai ± 26 hektare.
- Desa Mangunjaya, Kecamatan Cimaung, terbakar mencapai ± 100 hektare.
- Kawah Putih di Kecamatan Pasir Jambu, terbakar mencapai ± 15 hektare.
- Puncak Besar Pacet di Kecamatan Pangalengan, terbakar mencapai ± 100 hektare.
- Desa Mekarmaju, Kecamatan Arjasari, terbakar mencapai ± 10 hektar.

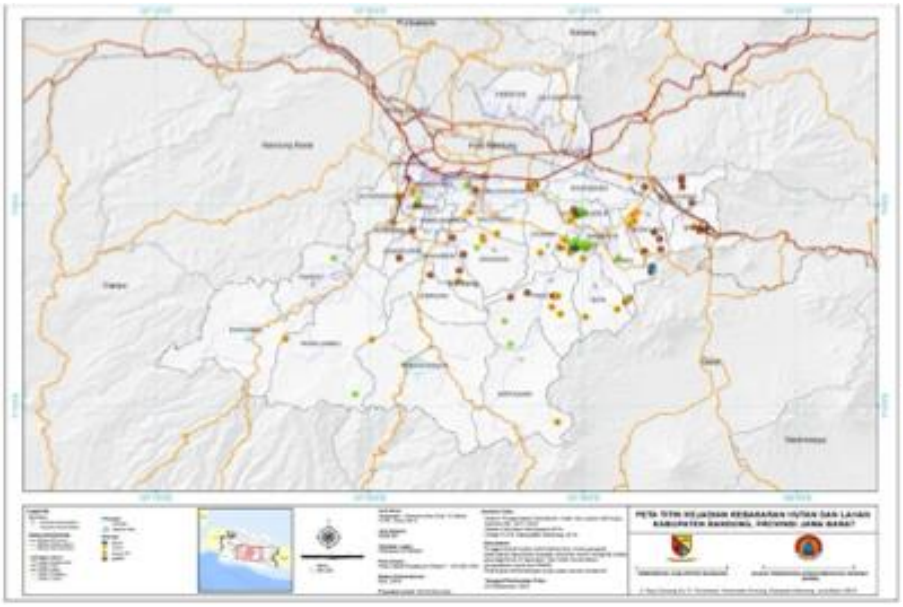

Gambar 2.66. Peta Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, KRB Kabupaten Bandung 2022-2026

Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)

Beberapa kejadian ancaman bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung) sejak kurun 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Bandung diantaranya angin puting beliung yang mengakibatkan pohon tumbang, dan kerusakan rumah. Data kejadian cuaca ekstrem (angin puting beliung) selama 5 tahun (tahun 2017-2021) sebanyak 96 kali dan sering terjadi setiap tahunnya.

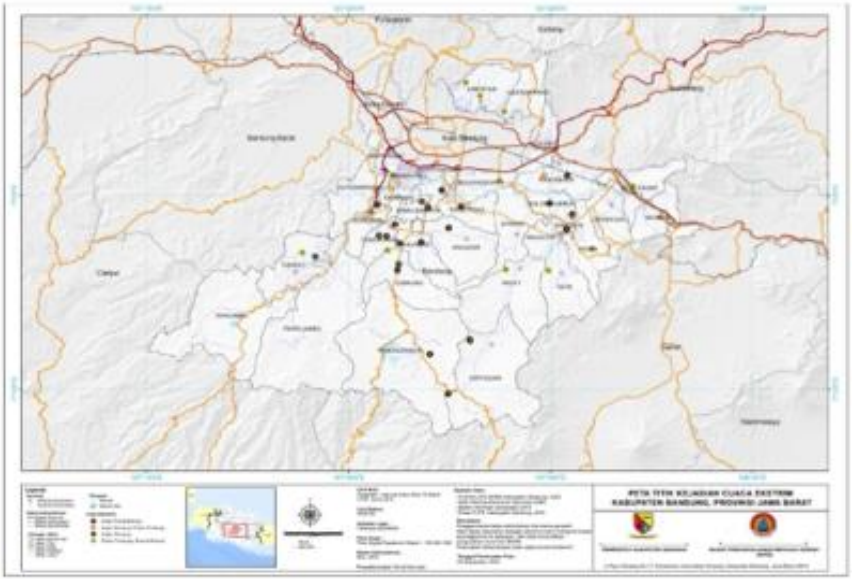

Gambar 2.67. Peta Lokasi Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung) di Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, KRB Kabupaten Bandung 2022-2026

Letusan Gunung Api

Potensi aliran lahar di Bandung Selatan dengan dijumpainya batuan gunung api bawah permukaan berumur Miosen mendukung terjadinya tumpang-tindih vulkanisme Tersier di bawah vulkanisme Kuarter. (Jurnal Geologi Vol.1, No.2 Tahun 2006), dan keberadaan Gunung Patuha dan Gunung Papandayan yang berpotensi aliran lahar menuju Selatan khususnya di Kecamatan Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali dan dampak Gunung Papandayan di Kecamatan Kertasari ± 12 Km.

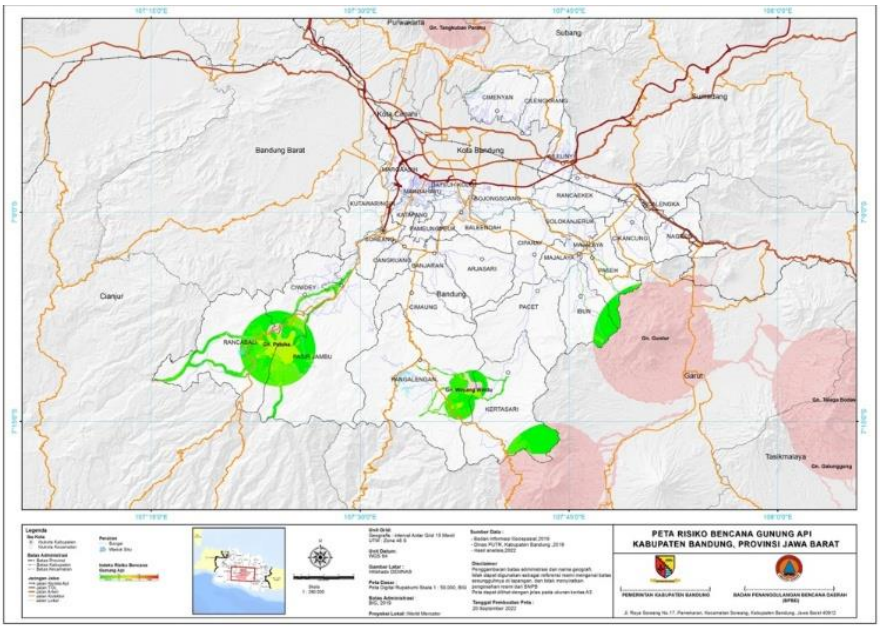

Gambar 2.68. Peta Risiko Bencana Gunung Api di Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD, KRB Kabupaten Bandung 2022-2026

Penyakit Menular

Infeksi Virus Covid-19 dimulai sejak akhir tahun 2019 di China dan menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 2021, infeksi virus ini telah menginfeksi 185 negara dengan penderita lebih dari 270 ribu jiwa. Beberapa negara kemudian menutup akses masuk maupun keluar *(lockdown)* untuk mencegah penularan yang lebih meluas. Selain itu, *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan status pandemi pada infeksi Virus Covid-19.

Pada tahun 2020, di Indonesia terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik di Kabupaten Bandung. Siklus perkembangan pandemi ini mengakibatkan pemerintah daerah memberikan perhatian penuh dalam penanganan wabah penyakit Covid-19.

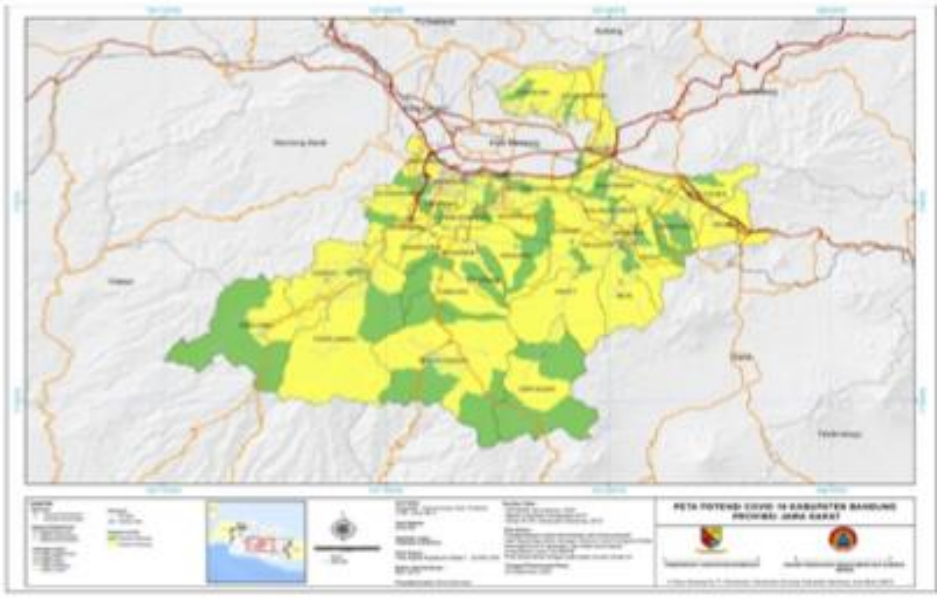

Gambar 2.69. Peta Lokasi Kejadian Bencana Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung
Sumber: Data Dikelola SIPD, KRB Kabupaten Bandung 2022-2026

2.1.8 Demografi

2.1.8.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung terus mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2024, dengan total penduduk pada tahun 2024 mencapai 3.753.116 jiwa. Meskipun terjadi kenaikan dibanding tahun 2020, jumlah ini masih lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 3.775.279 jiwa, mencerminkan adanya penurunan jumlah penduduk di beberapa kecamatan. Beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2024 adalah Baleendah (277.761 jiwa), Rancaekek (190.998 jiwa), dan Ciparay (179.350 jiwa). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk lebih sedikit antara lain Rancabali (51.738 jiwa), Cilengkrang (59.519 jiwa), dan Nagreg (61.609 jiwa). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi mencapai 3.775.279 jiwa. Namun, pada tahun 2020, jumlah tersebut menurun menjadi 3.623.790 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, yang menggunakan data dasar Administrasi Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar -0,59%, yang menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk dalam lima tahun terakhir. Beberapa kecamatan seperti Pameungpeuk, Nagreg, dan Ciwidey masih mengalami pertumbuhan positif cukup tinggi, sedangkan wilayah seperti Dayeuhkolot, Margahayu, dan Bojongsoang mengalami penurunan drastis. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan pertumbuhan penduduk antar wilayah, yang dapat dipengaruhi oleh faktor migrasi, urbanisasi, serta daya tarik

ekonomi, dan infrastruktur tiap kecamatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk di Kabupaten Badung (jiwa)						Laju Pertumbuhan (2019-2024)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Ciwidey	82.552,00	86.445,00	87.486,00	88.683,00	89.863,00	91.003,00	10,24%
2	Rancabali	53.753,00	51.096,00	51.211,00	51.409,00	51.589,00	51.738,00	-3,75%
3	Pasirjambu	90.760,00	91.191,00	91.957,00	92.879,00	93.775,00	94.623,00	4,26%
4	Cimaung	83.800,00	86.075,00	87.092,00	88.264,00	89.418,00	90.532,00	8,03%
5	Pangalengan	157.660,00	154.286,00	155.136,00	156.242,00	157.296,00	158.263,00	0,38%
6	Kertasari	74.067,00	71.255,00	71.495,00	71.852,00	72.183,00	72.473,00	-2,15%
7	Pacet	115.802,00	115.066,00	116.017,00	117.164,00	118.278,00	119.331,00	3,05%
8	Ibun	87.042,00	87.020,00	87.825,00	88.780,00	89.712,00	90.600,00	4,09%
9	Paseh	138.309,00	136.202,00	137.365,00	138.761,00	140.119,00	141.405,00	2,24%
10	Cikancung	96.897,00	96.710,00	97.863,00	99.189,00	100.495,00	101.758,00	5,02%
11	Cicalengka	126.305,00	122.162,00	122.991,00	124.026,00	125.022,00	125.951,00	-0,28%
12	Nagreg	55.777,00	58.408,00	59.141,00	59.979,00	60.807,00	61.609,00	10,46%
13	Rancaekek	193.944,00	185.499,00	186.696,00	188.204,00	189.653,00	190.998,00	-1,52%
14	Majalaya	174.114,00	160.617,00	160.823,00	161.289,00	161.696,00	162.006,00	-6,95%
15	Solokanjeruk	89.036,00	86.786,00	87.361,00	88.081,00	88.774,00	89.419,00	0,43%
16	Ciparay	174.378,00	172.589,00	174.103,00	175.914,00	177.677,00	179.350,00	2,85%
17	Baleendah	274.744,00	263.724,00	266.930,00	270.617,00	274.244,00	277.761,00	1,10%
18	Arjasari	105.026,00	105.593,00	106.673,00	107.937,00	109.176,00	110.362,00	5,08%
19	Banjaran	132.830,00	132.184,00	133.488,00	135.023,00	136.524,00	137.959,00	3,86%
20	Cangkuang	79.231,00	79.665,00	80.987,00	82.463,00	83.935,00	85.382,00	7,76%
21	Pameungpeuk	81.316,00	84.557,00	85.827,00	87.256,00	88.676,00	90.065,00	10,76%
22	Katapang	134.187,00	130.417,00	132.180,00	134.182,00	136.164,00	138.092,00	2,91%
23	Soreang	122.941,00	116.651,00	117.456,00	118.458,00	119.422,00	120.323,00	-2,13%
24	Kutawaringin	105.306,00	102.455,00	103.403,00	104.528,00	105.625,00	106.670,00	1,30%
25	Margaasih	161.684,00	148.544,00	149.454,00	150.612,00	151.722,00	152.748,00	-5,53%
26	Margahayu	137.452,00	121.608,00	121.169,00	120.926,00	120.638,00	120.279,00	-12,49%
27	Dayeuhkolot	127.772,00	107.186,00	106.639,00	106.266,00	105.855,00	105.381,00	-17,52%
28	Bojongsoang	130.091,00	112.671,00	113.221,00	113.957,00	114.654,00	115.287,00	-11,38%
29	Cileunyi	209.488,00	186.543,00	188.392,00	190.566,00	192.693,00	194.727,00	-7,05%
30	Cilengkrang	55.816,00	56.018,00	56.824,00	57.734,00	58.637,00	59.519,00	6,63%
31	Cimenyan	123.199,00	114.567,00	115.193,00	116.010,00	116.789,00	117.502,00	-4,62%
	Kabupaten Bandung	**3.775.297,00**	**3.623.790,00**	**3.652.398,00**	**3.687.251,00**	**3.721.111,00**	**3.753.116,00**	-0,59%

Sumber: Data Dikelola SIPD, SP 2020, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2025

Keterangan: Jumlah Penduduk Tertinggi
Jumlah penduduk terendah

2.1.8.2 Komposisi Penduduk

Struktur umur penduduk merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan, karena mencerminkan potensi demografi dan beban ketergantungan suatu wilayah. Grafik dibawah ini menggambarkan proporsi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, serta menjadi dasar analisis dalam merumuskan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

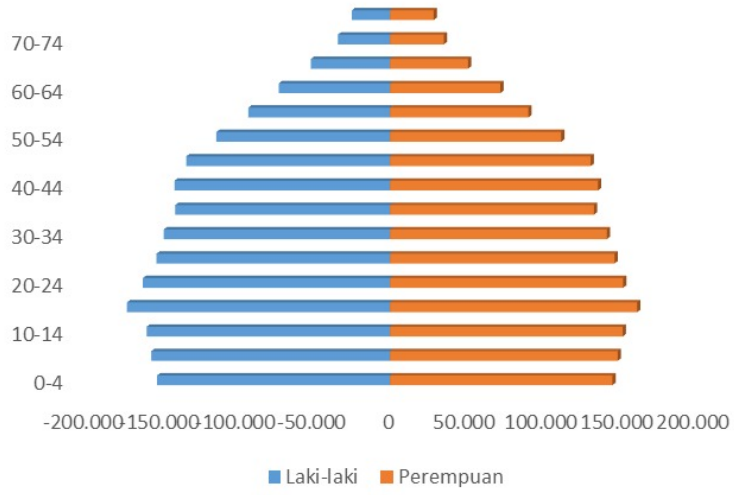

Gambar 2.70. Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas , struktur umur penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024 membentuk piramida ekspansif dengan dominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun), khususnya pada rentang usia 20–39 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi bonus demografi yang besar, yang dapat menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi jika didukung oleh kebijakan pembangunan yang tepat, terutama di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelatihan vokasional. Di sisi lain, proporsi penduduk usia non-produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) relatif lebih kecil, yang berarti beban ketergantungan masih tergolong rendah dan memberi peluang optimalisasi produktivitas penduduk usia kerja.

Pada tahun 2024, struktur penduduk Kabupaten Bandung menunjukkan komposisi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yang menggambarkan arah perubahan demografi ke depan. Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) tercatat sebanyak 961.218 jiwa dan diproyeksikan menurun menjadi 877.920 jiwa pada tahun 2030. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) diperkirakan meningkat dari 242.539 jiwa pada tahun 2024 menjadi 323.839 jiwa pada tahun 2030. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) juga mengalami pertumbuhan, dari 2.635.964 jiwa pada tahun 2024 menjadi 2.718.693 jiwa pada tahun 2030. Di sisi lain, jumlah penduduk usia non-produktif

mengalami sedikit penurunan dari 1.203.757 jiwa menjadi 1.201.759 jiwa pada periode yang sama. Angka ketergantungan, yang mencerminkan rasio antara penduduk non-produktif terhadap produktif, menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 46 pada tahun 2024 menjadi 44 pada tahun 2030, menandakan penurunan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Tabel 2.71. Komposisi Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030

Kriteria	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2024	2030
Penduduk usia muda (0-14)	961.218	877.920
Penduduk usia tua (+65)	242.539	323.839
Non Produktif	1.203.757	1.201.759
Produktif	2.635.964	2.718.693
Angka ketergantungan (%)	46	44

Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS Kabupaten Bandung, 2025 (diolah)

2.1.8.3 Kepadatan Penduduk

Berikut ini disajikan tabel kepadatan penduduk sebagai gambaran distribusi jumlah penduduk di berbagai Kabupaten Bandung, yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan.

Tabel 2.72. Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)

	2020	2021	2022	2023	2024
Kepadatan Penduduk	2.033	2.080	2.080	2.111	2.215

Sumber: Data Dikelola SIPD, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2025 (diolah)

Data menunjukkan adanya tren peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 2.033 jiwa/km², dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 2.215 jiwa/km² pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang konsisten, yang dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan alami maupun migrasi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tata ruang, penyediaan layanan publik, serta pengelolaan sumber daya wilayah agar pertumbuhan penduduk tetap berkelanjutan dan tidak menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur.

2.1.8.4 Keberadaan Masyarakat Adat dan Kebudayaan Lokal

Masyarakat adat merupakan kelompok sosial yang hidup secara turun-temurun di wilayah tertentu dengan identitas budaya, nilai, norma, serta sistem pengetahuan yang khas. Keberadaan mereka menjadi bagian penting dari struktur sosial dan pembangunan daerah, karena memiliki hubungan erat dengan pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, serta warisan budaya lokal. karakteristik penanda masyarakat adat, antara lain identifikasi diri *(self-identification)*; keberlanjutan sejarah (sebelum diinvasi oleh kekuatan penjajah atau kolonial); penduduk asal (sejarah); hubungan spiritual dengan tanah dan wilayah adat; identitas yang khas (bahasa, budaya, kepercayaan); serta sistem

sosial politik dan ekonomi yang khas. Terkait dengan keberadaan masyarakat adat, Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat adat melalui Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 281 ayat (3). Walaupun demikian, masyarakat adat di Kabupaten Bandung menghadapi tantangan dikarenakan adanya perkembangan masyarakat akibat pengaruh global. Tantangan ini dapat di atasi dengan mengakui hak-hak masyarakat adat, memperkuat identitas budaya dan pengetahuan tradisional, memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, memastikan akses setara ke layanan dasar. Hal tersebut dapat diperkuat dengan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bentuk regulasi untuk mempertahankan keberadaan dan mengadopsi keunikan lokal dan karakteristik mereka.

A. Masyarakat Adat Mahmud

Kampung Mahmud merupakan salah satu kampung adat yang terdapat di Kabupaten Bandung, terletak di RW 04 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih. Jaraknya sekitar 6 km dari Soreang sebagai ibu kota kabupaten. Kondisi alamnya cukup indah berada di pinggir Sungai Citarum dan dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas. Jumlah penduduknya kira-kira ada 1200 orang yang terbagi ke dalam 1 RW dan 4 RT. Pada umumnya, mata pencaharian masyarakat di Kampung Mahmud bekerja sebagai petani, pedagang, sopir dan pegawai negeri atau swasta. Kata Mahmud berasal dari bahasa Arab yaitu Mahmuudah yang memiliki arti puji. Kata puji tidak memiliki arti yang sama dengan terpuji, tetapi memiliki artireueus (bangga) atau deudeuh (kasih sayang penuh dengan penuh rasa ikhlas). Beberapa keunikan yang bersifat local di Kampung Mahmud antara lain:

- Memiliki adat istiadat dalam membangun rumah yang berbeda dengan daerah lain di sekitarnya. Struktur tanah yang ada di Kampung Mahmud bentuknya seperti endapan rawa dari sungai Citarum yang berada di sekelilingnya. Dengan kondisi demikian sangat tidak diperbolehkan membangun rumah secara permanen, karena dengan kondisi tanah yang tidak memungkinkan apabila dipaksakan akan mendatangkan petaka.
- Kampung adat ini memiliki ciri khas dalam tata cara berkehidupan yang berpedoman pada agama yang sangat kuat. Pemukiman masyarakat merupakan kumpulan rumah panggung yang berkelompok dalam satu wilayah dan memanfaatkan bahan bangunan dari kayu maupun bambu untuk bilik. Pemilihan kayu sebagai bahan bangunan karena berkaitan dengan kekuatan dan kepercayaan bahwa sebuah kayu akan memberikan kekuatan magis atau Ajaib.

- Pada umumnya, rumah di daerah Kampung Mahmud berbentuk memanjang atau memiliki atap yang panjang dan sering disebut rumah berbentuk persegi panjang. Hal ini bertujuan untuk menampung jumlah anggota keluarga yang banyak.Apabila dilihat dari luas bangunan, rumah di daerah Kampung Mahmud rata-rata berukuran sangat besar, yaitu dengan rata-rata 4×8 meter sampai yang berukuran 10×20 meter berikut halaman rumah yang cukup luas

B. Masyarakat Adat Cikondang

Kampung adat ini terletak di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan tepatnya di kaki Gunung Tilu Pangalengan. Pada abad ke-17 terdapat 61 rumah adat yang didirikan namun saat ini hanya tersisa satu rumah adat disebabkan musnah karena musibah kebakaran pada tahun 1942. Luas lahan secara keseluruhan adalah 30.000 m² terdiri dari lahan hunian yang meliputi rumah adat dan bangunan pendukungnya seperti leuit, tampian, saung lisung, hutan larangan, pemakaman, dan sawah adat. Nama Cikondang berasal dari nama kampung yang memiliki seke atau mata air yang ditumbuhi pohon besar bernama kondang. Mata air itulah yang menjadi asal nama Cikondang yaitu perpaduan antara "ci" dari "cai" yang berarti air dan "kondang" yang mengacu pada nama pohon Kondang. Masyarakat setempat meyakini bahwa karuhun (leluhur) Cikondang adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Mereka memanggilnya Uyut Pameget (buyut laki-laki) dan Uyut Istri (buyut perempuan) yang diyakini membawa berkah dan lindungan pada anak cucunya.

Kampung Adat Cikondang memiliki berbagai keunikan, dimana masyarakatnya masih memegang teguh tradisi dari para leluhurnya, salah satunya yaitu rumah adat yang telah berusia 370 tahun dan sampai saat ini masih kokoh berdiri. Adapun peninggalan leluhur diantaranya tunduk atau kalender tradisional Sunda, naskah kuno, leuit, saung lisung, makam, dan hutan larangan masih terawat hingga saat ini. Upacara adat berkaitan dengan lingkungan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Cikondang, diantaranya hajat lembur, hajat solokan untuk saluran irigasi, hajat paralon untuk air bersih, ngadeugkeun untuk mendirikan rumah, mitembeuyan waktu awal tanam padi, situs-situs terebut erat dengan nilai-nilai yang menggambarkan hubungan manusia-alam-Tuhan. Upacara-upacara/hajatan tersebut menjadi pengingat kepada masyarakat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenang para leluhur dan menjaga keseimbangan alam sebagai lingkungan tempat hidup.

Kebudayaan Kesenian Lokal

Keberadaan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan dan kesenian lokal yang mereka wariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai, tradisi, serta praktik kehidupan

masyarakat adat menjadi dasar lahirnya beragam ekspresi budaya dan kesenian yang masih terjaga hingga saat ini. Dengan demikian, pembahasan mengenai masyarakat adat secara alami berlanjut pada penguatan kebudayaan dan kesenian lokal sebagai identitas daerah sekaligus aset penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan pariwisata Kabupaten Bandung.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana tradisi dan nilai-nilai budaya terus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, tidak hanya melalui pelestarian situs-situs bersejarah, tetapi juga melalui praktik adat dan kesenian yang tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kabupaten Bandung memiliki kekayaan adat istiadat yang masih dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Berbagai tradisi adat mengiringi siklus kehidupan, mulai dari prosesi pernikahan yang kompleks, seperti neundeun omong, ngeuyeuk seureuh, hingga huap lingkung, serta tradisi menyambut kelahiran seperti opat bulanan dan tujuh bulanan. Adat lainnya yang tetap dijaga adalah mapag menak, muludan, munggahan, tahlil, dan sunatan, yang mencerminkan perpaduan nilai budaya Sunda dengan nilai keislaman yang kuat. Selain itu, ritual adat seperti miasih nagara padang, wuku taun, ngalokat cai, hulu wotan, dan nyipuh pusaka mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan antara manusia dan alam.

Kabupaten Bandung memiliki kekayaan seni dan budaya yang beragam dengan total 314 sanggar seni yang tersebar di berbagai bidang garapan. Jenis kesenian dengan jumlah sanggar terbanyak adalah pencak silat (115 sanggar), disusul marawis (45 sanggar), degung (27 sanggar), serta seni tradisi (31 sanggar). Selain itu, terdapat pula kesenian khas daerah seperti wayang golek, angklung, jaipongan, reog, kuda renggong, hingga benjang, yang masih dilestarikan melalui keberadaan sanggar-sanggar seni. Keberagaman ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam melestarikan seni tradisional maupun modern, sekaligus memperlihatkan potensi besar Kabupaten Bandung sebagai pusat pengembangan budaya lokal yang dapat mendukung identitas daerah, pendidikan karakter, serta daya tarik pariwisata berbasis budaya.

Tabel 2.73. Data Sanggar di Kabupaten Bandung

No	Jenis Kesenian Bidang Garapan Seni	Jumlah Sanggar
1	Pencaksilat	115
2	Calung	20
3	Marawis	45
4	Degung	27
5	Kacapi Suling	6
6	Wayang Golek	8
7	Longser	1
8	Seni Tradisi	31
9	Organ Tunggal	2
10	Kliningan	1
11	Angklung	8

No	Jenis Kesenian Bidang Garapan Seni	Jumlah Sanggar
12	Reog	2
13	Gamelan	1
14	Benjang	1
15	Kuda Renggong	15
16	Teater	1
17	Jaipongan	5
18	Sisingaan	2
19	Kuda lumping	2
20	Bangkongreang	1
21	Seni Pertunjukan	1
22	Debus	1
23	Reak	2
24	Band	1
25	Perfilman	1
26	Nasyid	3
27	Terbangan	5
28	Kasidah	3
29	Dodombaan	1
30	Celempungan	1
31	Badawang	1
	Jumlah	314

Sumber: Data Dikelola SIPD, Disbud,2024

2.1.8.5 Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 Tahun Mendatang

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung selama lima tahun mendatang diproyeksi dari 3.783.213 jiwa (2025) menjadi 3.920.452 jiwa (2030). Diartikan, diprediksi terjadi peningkatan sekitar 137.239 jiwa selama lima tahun mendatang. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 0,71% per tahun selama 2025-2030. Pertumbuhan ini tergolong moderat, mencerminkan adanya peningkatan jumlah penduduk, namun dengan laju yang relatif terkendali.

Tabel 2.74. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung 2025-2030

Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung (Jiwa)	Tahun	
	2025	2030
	3.783.213	3.920.452

Sumber: Data Dikelola SIPD, RPJPD Kabupaten Bandung, 2025

Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia nonproduktif (anak-anak dan lansia). Situasi ini ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah, yaitu sekitar dua pertiga dari jumlah penduduk keseluruhan. Ciri lainnya dapat dilihat dari parameter angka ketergantungan yang cukup rendah, yaitu mencapai 44. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung sekitar 44 penduduk usia nonproduktif. Bonus demografi biasanya terjadi setelah fase transisi demografi, yakni penurunan angka kelahiran dan peningkatan angka harapan hidup. Di tahun 2024,

Kabupaten Bandung telah memasuki periode bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif sebanyak hampir 70% dan angka ketergantungan 46. Diproyeksikan pada tahun 2025-2029, angka-angka tersebut akan terus bertambah. Kondisi ini membuka peluang besar, namun hanya dapat dimanfaatkan apabila pemerintah mampu menyiapkan kebijakan yang tepat.

Kebijakan yang strategis dan spesifik mutlak dibutuhkan mengingat bonus demografi merupakan peluang besar sekaligus tantangan serius apabila tidak dikelola dengan tepat. Jumlah tenaga kerja yang melimpah seharusnya mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperbesar tabungan dan investasi rumah tangga. Namun, tanpa perencanaan yang matang, ledakan usia produktif justru dapat menimbulkan pengangguran massal, memperparah kemiskinan struktural, bahkan memicu instabilitas sosial. Seperti yang diingatkan Thornberry & Christenson (1984), meningkatnya pengangguran usia muda berpotensi mendorong kriminalitas dan perilaku antisosial.

Manfaat besar dari bonus demografi hanya akan benar-benar dirasakan apabila daerah mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang unggul menjadi kunci untuk memicu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita, karena dengan kualitas yang baik, penduduk usia produktif dapat mengisi berbagai kesempatan kerja secara optimal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan tersedianya akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja yang sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Keseriusan pemerintah daerah dalam mempersiapkan bonus demografi juga harus diwujudkan melalui penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya wirausaha lokal dan peningkatan tabungan rumah tangga. Setiap rumah tangga berpotensi membuka usaha produktif yang tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga menambah lapangan kerja baru dan menurunkan angka pengangguran. Selain itu, pemerintah daerah harus memberi perhatian khusus pada kebijakan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja, karena kontribusi mereka terbukti mampu meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memperluas daya serap tenaga kerja.

Bonus demografi tidak berlangsung selamanya. Setelah periode ini, Indonesia termasuk Kabupaten Bandung akan memasuki era *aging population* atau penuaan penduduk yang diproyeksikan mulai terjadi sekitar 2045–2050. Pada fase ini, proporsi penduduk lanjut usia semakin besar sehingga beban tanggungan terhadap kelompok nonproduktif meningkat tajam. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan besar terhadap anggaran negara dan daerah, khususnya untuk pembiayaan jaminan sosial dan kesehatan lansia.

Karena itu, strategi perencanaan daerah perlu memperhitungkan keberlanjutan setelah bonus demografi selesai, dengan menyiapkan generasi produktif saat ini agar tetap mampu bekerja di usia lanjut, memiliki keterampilan yang adaptif, serta memiliki tabungan dan jaminan sosial yang cukup. Dengan demikian, Kabupaten Bandung tidak hanya siap menghadapi bonus demografi, tetapi juga mampu menyiapkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi penuaan penduduk di masa depan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kinerja pembangunan suatu wilayah. Grafik berikut menyajikan tren pertumbuhan ekonomi secara nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung selama periode 2019 hingga 2024.

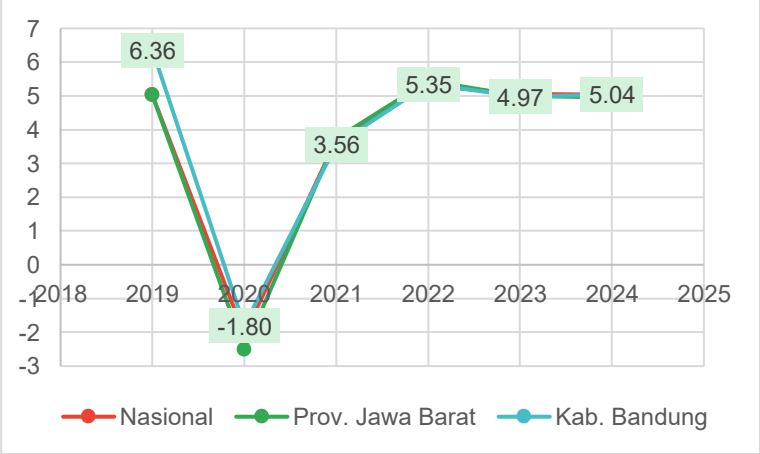

Gambar 2.71.Laju pertumbuhan Ekonomi, 2019 – 2024 (dalam %)
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS, Tahun 2025 (diolah)

Grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi secara nasional maupun daerah akibat dampak pandemi Covid-19, dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung tercatat mengalami penurunan tajam hingga -1,80%. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya terlihat adanya pemulihan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2021 dan 2022, dengan pertumbuhan Kabupaten Bandung mencapai 3,56% dan 5,35%.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit fluktuasi pada 2023 (4,97%), tren pemulihan tetap berlanjut hingga 2024 dengan pertumbuhan sebesar 5,04%. Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bandung mampu kembali ke jalur pertumbuhan positif pascapandemi, sejalan dengan tren regional dan nasional. Hal ini

mengindikasikan ketahanan struktur ekonomi daerah serta efektivitas intervensi kebijakan yang telah diterapkan selama periode pemulihan.

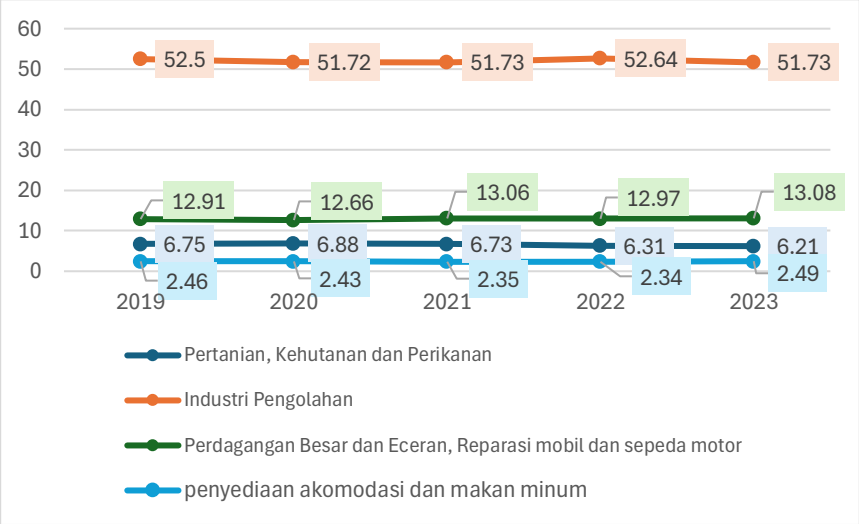

Gambar 2.72. Kontribusi sektor utama terhadap perekonomian Kabupaten Bandung, 2019-2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS, Tahun 2025 (diolah)

Perekonomian Kabupaten Bandung mengalami pergeseran struktur dari sektor primer (agrikultur) menjadi beralih ke sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa). Hal ini dapat dilihat berdasarkan data kontribusi sektor utama terhadap perekonomian Kabupaten Bandung periode 2019–2024, sektor Industri Pengolahan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi stabil di kisaran 51–52 %, menunjukkan peran dominan sektor ini dalam struktur ekonomi daerah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami tren peningkatan dari 12,91% pada 2019 menjadi 13,08% pada 2024. Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi dari 6,75% menjadi 6,10% pada 2024. Adapun sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir, dengan kontribusi di kisaran 2,34% hingga 2,49%. Pola ini mencerminkan transformasi ekonomi Kabupaten Bandung yang terus bergerak ke arah industrialisasi dan sektor jasa modern.

Data kontribusi sektor utama terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama periode 2019–2024 menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih sangat bertumpu pada sektor industri pengolahan, dengan kontribusi yang konsisten di atas 51%. Namun, stagnasi pertumbuhannya menunjukkan potensi kejenuhan jika tidak diimbangi dengan inovasi dan diversifikasi industri berbasis nilai tambah. Sektor perdagangan dan reparasi kendaraan menunjukkan tren positif, mencerminkan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat dan perputaran ekonomi lokal yang semakin dinamis. Sebaliknya, sektor pertanian justru mengalami penurunan kontribusi, yang mengindikasikan adanya

tantangan dalam menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis sumber daya alam dan perdesaan.

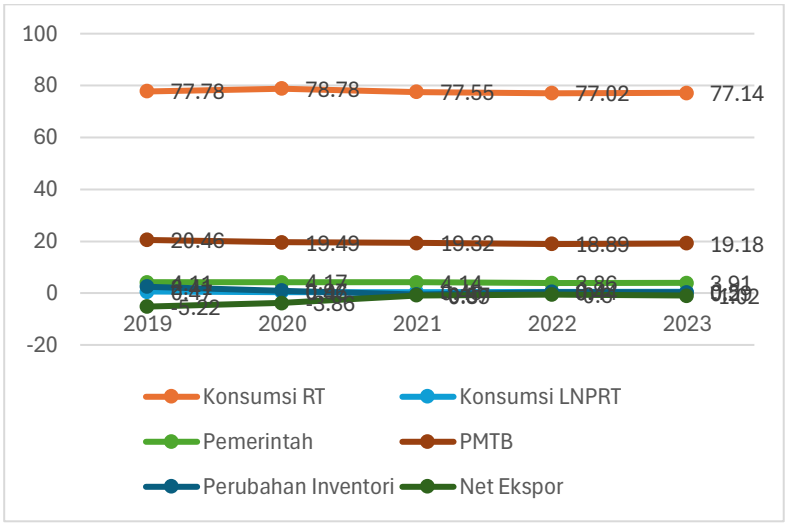

Gambar 2.73. Kontribusi PDRB berdasarkan pengeluaran terhadap perekonomian, 2019 – 2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS, Tahun 2025 (diolah)

Data PDRB ADHK Kabupaten Bandung tahun 2019–2024 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi yang tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dari 78,78% pada 2020 menjadi 76,94% pada 2024. Di sisi lain, peran investasi (PMTB) cenderung menurun dari 20,46% menjadi 19,21% pada periode yang sama. Pengeluaran pemerintah juga mengalami penurunan bertahap, sementara perubahan inventori menunjukkan fluktuasi. Net ekspor masih berada pada posisi negatif, meskipun terdapat perbaikan dari tahun ke tahun.

Tren ini mengindikasikan perlunya penguatan fondasi ekonomi daerah yang lebih seimbang antara konsumsi, investasi, dan ekspor. Dalam konteks perencanaan RPJMD, arah kebijakan ke depan sebaiknya difokuskan pada upaya peningkatan iklim investasi yang lebih atraktif, mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif dan berorientasi ekspor, serta memperkuat peran belanja pemerintah sebagai pengungkit pertumbuhan. Di saat yang sama, menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga tetap penting sebagai dasar keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun realisasi investasi di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan selama 5 Tahun terakhir. Kondisi peningkatan PDRB diikuti dengan peningkatan realisasi investasi. Realisasi investasi juga mengalami peningkatan, hal ini dipicu oleh perhitungan realisasi investasi yang melibatkan unsur dari pelaku usaha yang dicatat melalui perizinan berusaha.

Tabel 2.75. Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Bandung

Tahun	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)					
	Investasi (Rupiah)			Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)		
	PMA	PMDN	Total	PMA	PMDN	Total
2018	377.413.592.730	2.757.558.500.000	3.134.972.092.730	743	8.997	9.740
2019	3.181.456.692.471	2.078.077.900.000	5.259.534.592.471	1.526	2.175	3.701
2020	2.849.642.855.667	1.096.964.700.000	3.946.607.555.667	5.553	3.178	8.731
2021	1.155.662.698.516	1.237.274.100.000	2.392.936.798.516	3.224	2.284	5.508
2022	2.642.608.884.768	3.098.687.200.000	5.741.296.084.768	8.419	5.977	14.396
2023	2.968.322.094.165	5.144.163.400.000	8.112.485.494.165	4.364	5.905	10.269
2024	3.904.060.144.054	5.078.134.658.687	8.982.194.802.741	5.814	16.373	22.187

Sumber: Data Dikelola SIPD, Data DPMPTSP, Desember 2024 (diolah)

Adapun Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) memuat realisasi investasi penanaman modal baik yang direalisasikan dalam negeri, maupun asing. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) mencatat bahwa di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 gabungan realisasi penanaman modal yang berada di 31 kecamatan sekitar Rp 30,99 Triliun. Penanaman modal tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 210.437 orang, dimana lebih dari dua pertiganya (70,30%) atau sebanyak 147.932 orang berasal dari skala mikro. Selain itu, skala mikro juga mendominasi jumlah proyek hampir seluruhnya (89,98%) atau sebesar 77.243 proyek, dimana jumlah keseluruhan proyek termasuk skala menengah dan besar sebesar 85.840 proyek. Informasi mengenai realisasi penanaman modal beserta dengan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76. Realisasi Investasi Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024

Tahun	Data LKPM dan OSS		Data LKPM	
	Realisasi (dalam Rp)	Laju Pertumbuhan (dalam %)	Realisasi (dalam Rp)	Laju Pertumbuhan (dalam %)
2019	23.337.742.992.779	12,69	5.259.534.592.471	67,77
2020	26.300.207.834.856	10,67	3.946.607.555.667	-24,96
2021	28.999.969.698.490	1,62	2.392.936.798.516	-39,37
2022	29.470.459.885.912	3,00	5.741.296.084.768	139,93
2023	30.354.574.210.736	12,69	8.112.485.494.165	41,30
2024	30.999.849.178.405	31,72	8.982.194.802.741	10,72

Sumber: Data Dikelola SIPD, Data DPMTP, Tahun 2024 (diolah)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan pertumbuhan volume produk ekonomi yang dihasilkan dan kecepatan peningkatan volume yang dihasilkan pada kategori tertentu. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut.

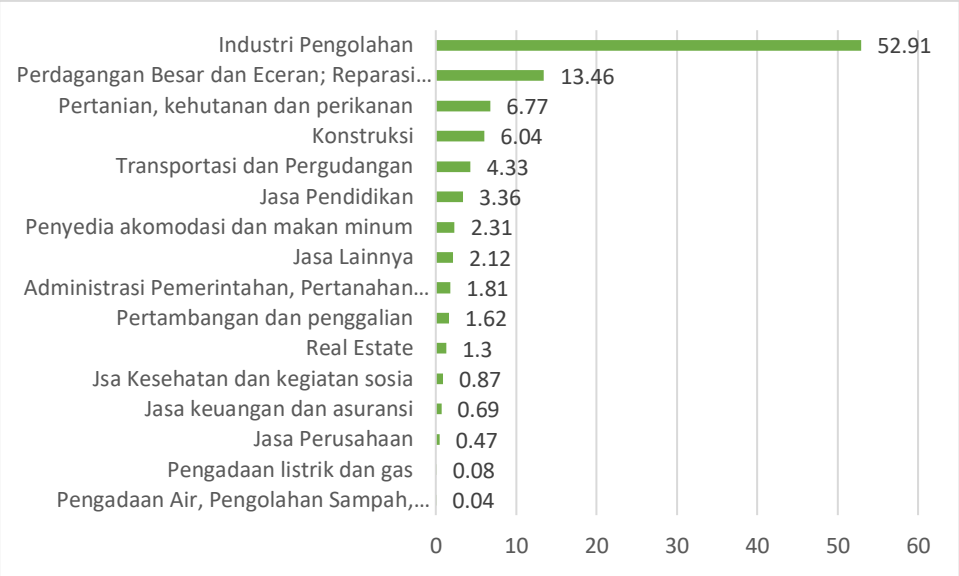

Gambar 2.74. Proporsi Sektor PDRB ADHB Kabupaten Bandung Tahun 2024
Sumber : Data Dikelola SIPD, Provinsi Jawa Barat dalam Angka, Tahun 2025

Besarnya PDRB ADHK Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sebesar Rp 82,55 triliun sedangkan pada tahun 2024 telah mencapai Rp 97,48 triliun. Pada rentang waktu 2019-2023, tingkat pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bandung menunjukkan tren positif pada rentang -1,80-6,36% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,91%. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Tabel 2.77. Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK)

Lapangan Usaha		Nilai/ Kontribusi	PDRB ADHK Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai (dalam juta rupiah)	5.568,48	5.575,89	5.646,20	5.582,33	5.761,30	5.539,35
		Kontribusi kategori (%)	*6,75*	*6,88*	*6,73*	*6,31*	*6,21*	*5,68*
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam juta rupiah)	1.702,09	1.709,49	1.734,15	1.685,75	1.686,80	1.659,43
		Kontribusi kategori (%)	*2,06*	*2,11*	*2,07*	*1,91*	*1,82*	*1,70*
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam juta rupiah)	43.323,38	41.922,97	43.430,18	46.555,85	48.020,59	51.002,18
		Kontribusi kategori (%)	*52,48*	*51,72*	*51,73*	*52,64*	*51,73*	*52,30*
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam juta rupiah)	94,86	90,00	91,97	89,99	94,98	96,87
		Kontribusi kategori (%)	*0,11*	*0,11*	*0,11*	*0,10*	*0,10*	*0,10*
E	Pengadaan Air, Pengolahan	Nilai (dalam juta rupiah)	27,69	30,52	32,96	34,26	33,99	34,59

Lapangan Usaha		Nilai/ Kontribusi	PDRB ADHK Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang	*Kontribusi kategori (%)*	*0,03*	*0,04*	*0,04*	*0,04*	*0,04*	*0,04*
F	Konstruksi	Nilai (dalam juta rupiah)	5.524,71	5.602,97	5.666,93	5.731,10	6.167,41	6.337,59
		Kontribusi kategori (%)	*6,69*	*6,91*	*6,75*	*6,48*	*6,64*	*6,50*
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam juta rupiah)	10.652,38	10.259,70	10.963,58	11.471,73	12.143,65	12.989,46
		Kontribusi kategori (%)	*12,90*	*12,66*	*13,06*	*12,97*	*13,08*	*13,32*
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam juta rupiah)	2.916,67	2.795,90	2.736,22	3.020,05	3.408,17	3.697,58
		Kontribusi kategori (%)	*3,53*	*3,45*	*3,26*	*3,41*	*3,67*	*3,79*
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam juta rupiah)	2.030,80	1.967,50	1.970,20	2.070,81	2.310,56	2.261,69
		Kontribusi kategori (%)	*2,46*	*2,43*	*2,35*	*2,34*	*2,49*	*2,32*
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam juta rupiah)	1.944,22	2.464,99	2.700,28	2.859,97	3.111,48	3.253,54
		Kontribusi kategori (%)	*2,36*	*3,04*	*3,22*	*3,23*	*3,35*	*3,34*
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam juta rupiah)	573,70	606,53	628,41	615,59	652,15	676,71
		Kontribusi kategori (%)	*0,69*	*0,75*	*0,75*	*0,70*	*0,70*	*0,69*
L	Real Estate	Nilai (dalam juta rupiah)	1.113,27	1.109,15	1.249,68	1.321,03	1.432,92	1.530,28
		Kontribusi kategori (%)	*1,35*	*1,37*	*1,49*	*1,49*	*1,54*	*1,57*
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam juta rupiah)	405,35	347,52	379,98	408,99	447,93	469,27
		Kontribusi kategori (%)	*0,49*	*0,43*	*0,45*	*0,46*	*0,48*	*0,48*
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam juta rupiah)	1.593,40	1.491,42	1.451,99	1.454,50	1.497,26	1.759,24
		Kontribusi kategori (%)	*1,93*	*1,84*	*1,73*	*1,64*	*1,61*	*1,80*
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam juta rupiah)	2.587,15	2.697,74	2.832,43	2.885,12	3.101,79	3.189,70
		Kontribusi kategori (%)	*3,13*	*3,33*	*3,37*	*3,26*	*3,34*	*3,27*
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam juta rupiah)	708,39	684,26	709,13	785,65	890,13	870,85
		Kontribusi kategori (%)	*0,86*	*0,84*	*0,84*	*0,89*	*0,96*	*0,89*

Lapangan Usaha		Nilai/ Kontribusi	PDRB ADHK Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
R,S,T,U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam juta rupiah)	1.730,90	1.704,42	1.725,07	1.865,63	2.069,54	2.141,56
		Kontribusi kategori (%)	*2,10*	*2,10*	*2,05*	*2,11*	*2,23*	*2,20*
Total PDRB ADHB		**Jumlah**	**82.547,44**	**81.060,97**	**83.949,37**	**88.437,96**	**92.830,17**	**97.509,89**
Total Kontribusi Kategori terhadap PDRB		*%*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Data Dikelola SIPD, Kabupaten Bandung dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.78. PDRB ADHK Kabupaten Bandung Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2024

Jenis Pengeluaran	PDRB Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64.203,07	63.860,16	65.105,55	68.116,26	71.612,87	75.019,81
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	384,31	369,47	376,69	386,25	463,03	519,72
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.392,23	3.383,07	3.457,96	3.412,40	3.629,08	3.439,73
Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.892,18	15.796,48	16.220,13	16.703,05	17.804,04	18.728,26
Perubahan Inventori	1.988,40	784,34	-480,72	353,88	271,14	-149,53
Nilai Ekspor Barang dan Jasa	-4.312,76	-3.132,54	-748,34	-533,88	-950,00	-48,09
PDRB	**82.547,44**	**81.060,97**	**83.949,37**	**88.437,96**	**92.830,17**	**97.509,91**

Sumber: Data Dikelola SIPD, Kabupaten Bandung dalam Angka, Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Hal ini diindikasikan dari terjadinya kenaikan pada kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam regional.

Tabel 2.79. Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Kategori/Sub Kategori Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha		PDRB ADHK Tahun 2019-2024					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,45	0,13	1,26	-1,13	3,21	-3,85
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,63	0,43	1,44	-2,79	0,06	-1,62
C	Industri Pengolahan	9,05	-3,23	3,60	7,20	3,15	6,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,89	-5,13	2,19	-2,16	5,00	2,53
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,06	10,24	7,99	3,95	-0,80	1,75
F	Konstruksi	4,11	1,42	1,14	1,13	7,61	2,76
G	Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,49	-3,69	6,86	4,63	5,86	6,97

Lapangan Usaha		PDRB ADHK Tahun 2019-2024					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
H	Transportasi dan Pergudangan	3,42	-4,14	-2,13	10,37	12,85	8,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,22	-3,12	0,14	5,11	11,58	-2,12
J	Informasi dan Komunikasi	10,61	23,61	9,54	5,91	8,79	4,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	5,72	3,61	-2,10	6,01	3,77
L	Real Estate	9,73	-0,37	12,67	5,71	8,47	6,79
M, N	Jasa Perusahaan	8,78	-14,27	9,34	7,63	9.52	4,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	-6,40	-2,64	0,17	2,94	17,50
P	Jasa Pendidikan	6,35	4,27	4,99	1,86	7,51	2,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18	-3,41	3,63	10,79	13,30	-2,17
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,84	-1,53	1,21	8,15	10,93	3,48
PDRB ADHK		**6,36**	**-1,80**	**3,56**	**5,35**	**4,97**	**5,04**

Sumber: Data Dikelola SIPD, Kabupaten Bandung dalam Angka, Tahun 2025

Rata-rata pertumbuhan terbesar selama tahun 2019-2024 terjadi pada sektor informasi dan komunikasi (10,49%), *real estate* (6,65%), serta transportasi dan pergudangan (5,09%). Adapun tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 menurut lapangan usaha dicapai pada sektor berikut ini: (1) administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib (17,50%); (2) transportasi dan pergudangan (8,49%); serta (3) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (6,97%).

2.2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. Indikator ini diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Itulah sebabnya, indikator tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur kesejahteraan dan tingkat keberhasilan pembangunan sebuah daerah, karena semakin besar PDRB per-kapitanya, maka relatif kesejahteraannya lebih tinggi. Di sisi lain, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Adapun besar kecilnya nilai PDRB bergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi produktivitas di daerah tersebut.

Tabel 2.80. Pendapatan Per-Kapita (ADHB) Kabupaten Bandung 2019-2024

Deskripsi	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Milyar Rupiah	123.985,75	123.602,78	130.476,83	143.002,07	153.950,74	165.609,36
PDRB ADHK	Milyar Rupiah	82.547,44	81.060,97	83.949,37	88.437,96	92.830,17	97.509,89
Penduduk Pertengahan Tahun	Jiwa	3.775.279	3.623.790	3.666.156	3.718.660	3.721.111	3.839.721
PDRB/ Kapita (ADHB)/Tahun	Rupiah	32.841.480	34.108.704	35.589.547	38.455.269	41.372.251	43.130.571
PDRB/	Rupiah	21.865.256	22.369.114	22898472	23.782.212	24.946.896	25.395.046

Deskripsi	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapita (ADHK)/Tahun							

Sumber: Data Dikelola SIPD, Kabupaten Bandung dalam Angka dan Modifikasi (Permendagri No. 86 Tahun 2017), Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pendapatan per kapita kabupaten Bandung secara nominal sebesar Rp 43,13 juta. Besarnya indikator ini juga dipengaruhi oleh faktor tingkat inflasi. Adapun indikator PDRB per kapita rill memperhitungkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena telah disesuaikan dengan faktor inflasi. Diartikan, semakin besar indikator ini maka masyarakat memiliki kesejahteraan yang lebih besar, karena mampu untuk mengonsumsi lebih banyak lagi barang dan jasa. PDRB Per kapita rill memiliki tren yang meningkat sepanjang tahun 2019-2024. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan secara terus menerus, namun tidak memperlihatkan atau memperhitungkan masalah-masalah lainnya seperti kesenjangan.

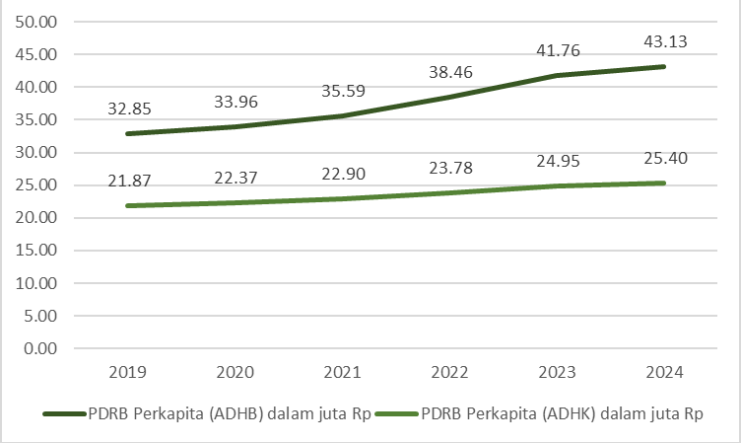

Gambar 2.75. Grafik PDRB Per-Kapita Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, Kabupaten Bandung dalam Angka dan Modifikasi (Permendagri No. 86 Tahun 2017), Tahun 2025

2.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Untuk memahami posisi dan tren TPT Kabupaten Bandung dalam konteks yang lebih luas, dilakukan perbandingan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat selama periode 2021–2024. Grafik berikut menyajikan dinamika TPT di ketiga wilayah tersebut, yang dapat menjadi dasar analisis efektivitas kebijakan ketenagakerjaan daerah.

Gambar 2.76. Perbandingan TPT Daerah dengan Capaian Nasional dan Jawa Barat Tahun 2021-2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung mengalami tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024, dan pada tahun terakhir mencapai 6,36%. Capaian ini tidak hanya menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga menempatkan Kabupaten Bandung dalam posisi lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat, meskipun masih di atas capaian nasional. Penurunan ini mengindikasikan peningkatan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan serta membaiknya daya serap pasar kerja di daerah.

Selanjutnya, gambar di bawah ini memberikan gambaran yang lebih utuh terkait dinamika ketenagakerjaan selama tahun 2019–2024. Terlihat bahwa jumlah penduduk bekerja terus meningkat seiring pertumbuhan angkatan kerja yang stabil, sementara jumlah pengangguran terbuka cenderung menurun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukkan tren positif. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan kinerja ketenagakerjaan yang membaik dan lebih resilien terhadap tekanan eksternal, serta menjadi indikasi kuat bahwa struktur ekonomi daerah semakin mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

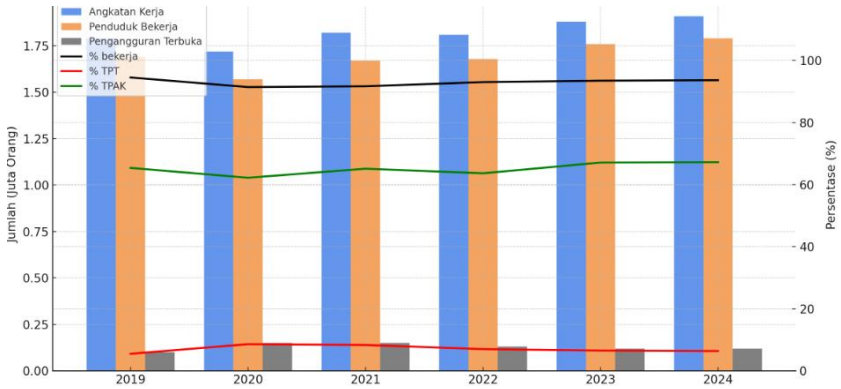

Gambar 2.77. Status Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS Sakernas, Tahun 2024 (diolah)

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD atau di bawah (yaitu, sekitar 33% atau 587.313 orang) pada tahun 2023, diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan SMP (24% atau 416.433 orang) dan SMA umum (24% atau 418.915 orang). Dengan kata lain, sekitar 81% penduduk bekerja di Kabupaten Bandung berpendidikan di bawah Sekolah Menengah Atas (SMA). Tingkat pendidikan berkorelasi terhadap kinerja tenaga kerja atau kualitas tenaga kerja pada saat masuk dalam bagian kerja. Hal ini menjadi salah satu isu sentral dalam aspek sumber daya manusia ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan 5 tahun ke depan secara konvergen.

Namun demikian, sinyal positif terlihat pada Gambar di bawah ini. Bila dibandingkan dengan kontribusi penduduk bekerja berpendidikan SD dan SMP pada tahun 2011, terdapat tren menurun untuk setiap tahun setelahnya (yaitu, masing-masing 3% dan 1%). Sebaliknya, tren positif terjadi pada kontribusi penduduk berpendidikan atas. Bahkan, penduduk bekerja lulusan perguruan tinggi (atau sarjana) meningkat dengan rata-rata 18% per tahunnya pada periode 2011–2023 bila dibandingkan dengan kontribusi penduduk bekerja pada tahun 2011, diikut oleh pertumbuhan kontribusi penduduk bekerja lulusan SMA kejuruan.

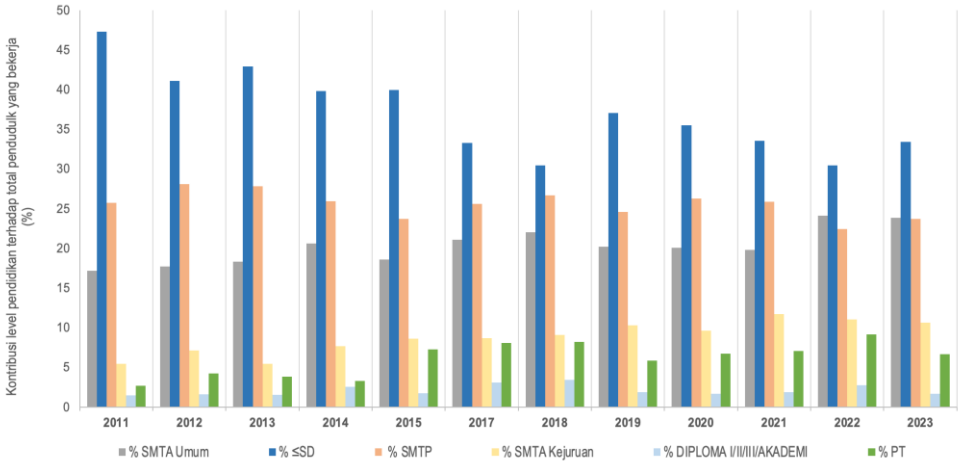

Catatan: pertumbuhan kontribusi penduduk bekerja dihitung berdasarkan perbandingan dengan kontribusi penduduk bekerja dengan Pendidikan yang sama pada tahun 2011.

Gambar 2.78. Kontribusi tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikanganti
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS Sakernas, Tahun 2023 (diolah)

Sakernas (2023) melaporkan bahwa sekitar 80% penduduk yang tidak bekerja tergolong dalam penduduk berusia 15–29 tahun atau pemuda. Dilihat dari 5 tahun ke belakang, proporsi golongan pemuda yang tidak bekerja tetap mendominasi dari total penduduk tidak bekerja. Laporan BPS juga menjelaskan bahwa penduduk tidak bekerja dengan pendidikan di bawah SMA dan/atau sederajat berkontribusi sekitar 93% dari total penduduk tidak bekerja yang tinggal lebih banyak di wilayah perkotaan.

Berdasarkan data Sakernas (2023), mayoritas penduduk bekerja di Kabupaten Bandung di sektor industri pengolahan (29% dari total penduduk bekerja) pada tahun 2023 dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil (23%) yang dapat dilihat pada Gambar 2.57.

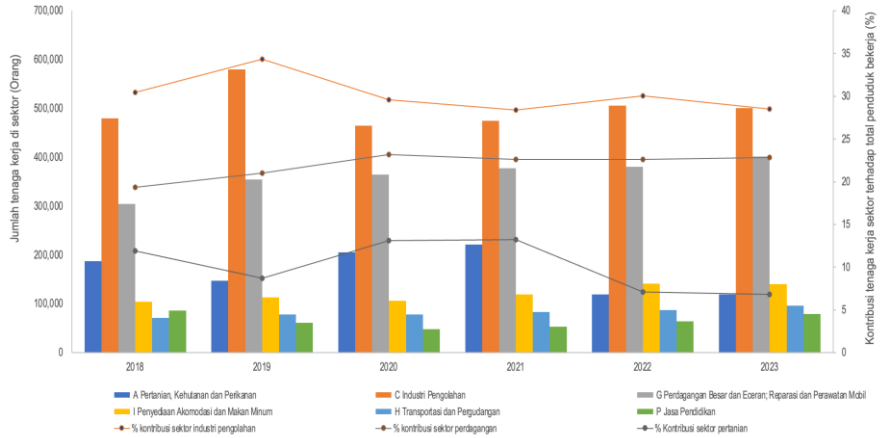

Gambar 2.79. Jumlah dan Kontribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis LapanganUsaha
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS Sakernas, Tahun 2023 (diolah)

Sektor yang mengalami pertumbuhan penyerapan tenaga kerja negatif dalam kurun 5 tahun ke belakang yaitu industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, dan administrasi pemerintahan. Sebaliknya, sektor jasa kesehatan, pertambangan dan penggalian, jasa perusahaan, dan perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan positif penyerap tenaga kerja.

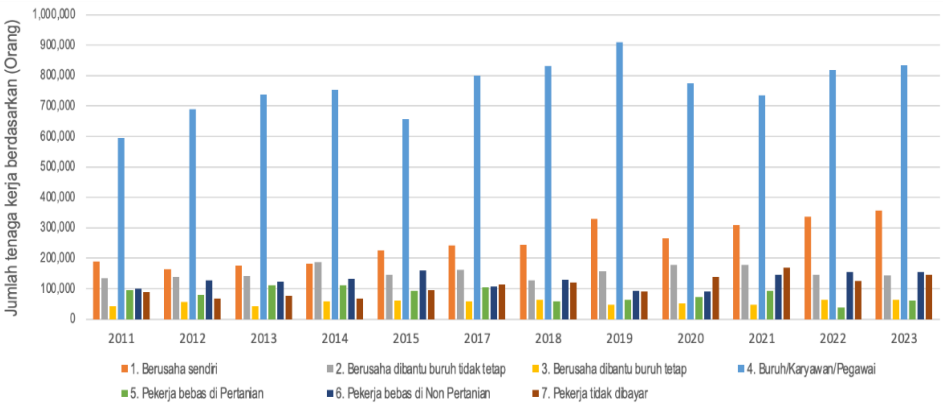

Gambar 2.80. Penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS Sakernas, Tahun 2023 (diolah)

Gamabar diatas menjelaskan penduduk bekerja menurut status pekerjaan. Penduduk di Kabupaten Bandung bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai sebanyak 833 ribu orang atau 47% dari total penduduk yang bekerja di tahun 2023; selanjutnya, berusaha sendiri (sebagai wirausahawan) sebanyak 356 ribu orang atau 20% (Lihat Gambar 2.55

(a)). Namun demikian, kelompok pekerja bebas di pertanian, non pertanian, dan tidak dibayar masih besar dengan total sebanyak 360.924 orang atau 21%. Berdasarkan Gambar 2.55, berusaha sendiri dan buruh swasta meningkat dengan masing-masing laju 9% dan 3% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Namun sayangnya, pekerja tidak dibayar juga mengalami pertumbuhan cukup signifikan pada periode yang sama sekitar 8%.

Menurut BPS (2023), pekerja informal merupakan penduduk bekerja berstatus selain berusaha dibantu buruh tetap dan berstatus buruh/karyawan/pegawai. BPS (2023) melalui Sakernas melaporkan bahwa informalitas dalam tenaga kerja mengalami pertumbuhan sebesar sekitar 29% pada 10 tahun terakhir, sedangkan pekerja formal mengalami penurunan sebesar 29% dalam kurun waktu yang sama.

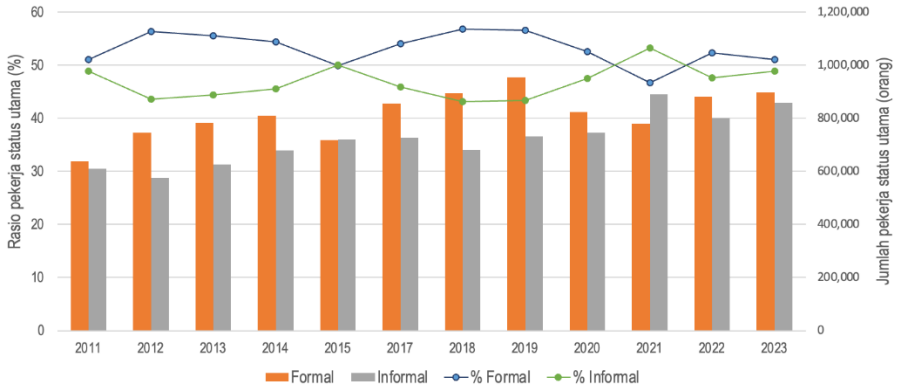

Gambar 2.81. Penduduk Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama (Formal/Informal)
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS Sakernas, Tahun 2023 (diolah)

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0–1 (0 < koefisien gini <1). Koefisien gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi nilai koefisien gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya, gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kabupaten Bandung menggunakan pendekatan teori gini ratio. secara umum, koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 0,00 < G < 0,35 : pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- 0,35 < G < 0,50 : pemerataan / ketimpangan sedang
- G > 0,50 : pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Gini ratio di Kabupaten Bandung mengalami dinamika signifikan selama 2019-2024. Setelah naik tajam dari 0,36 (2019) ke 0,41 (2020) akibat dampak pandemi Covid-19, ketimpangan pendapatan mulai membaik, turun secara bertahap hingga 0,346 pada 2024,

kemungkinan berkat intervensi pemerintah daerah. Dibandingkan Jawa Barat, Kabupaten Bandung menunjukkan pola lebih dinamis, sementara provinsi mengalami peningkatan ketimpangan dari 0,398 (2019) ke 0,428 (2024). Secara nasional, gini ratio lebih stabil, turun dari 0,38 (2019) menjadi 0,373 (2024). Penurunan indeks gini menggambarkan semakin meratanya tingkat pengeluaran penduduk di Kabupaten Bandung. Keberhasilan tersebut sejalan dengan peningkatan capaian beberapa indikator yang memiliki korelasi positif terhadap penurunan gini rasio, yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan di tahun 2023.

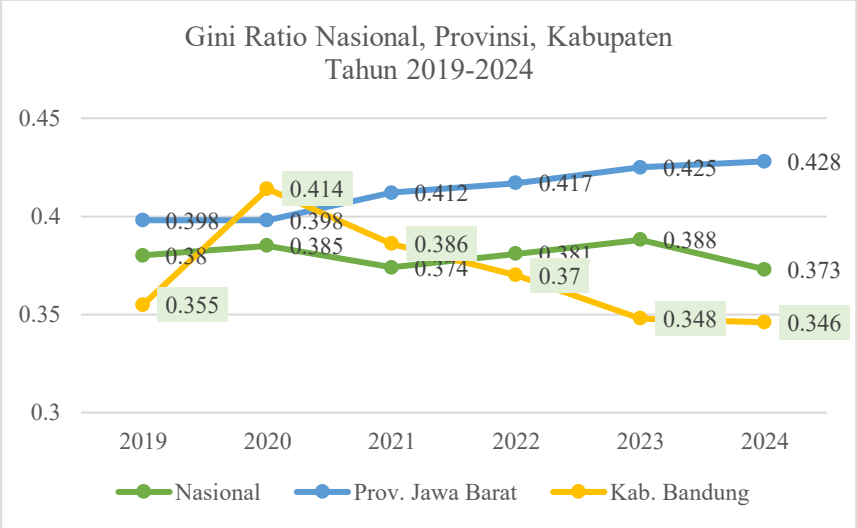

Gambar 2.82. Grafik Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS, Tahun 2025

Saat ini, Kabupaten Bandung menunjukkan kondisi ketimpangan pendapatan yang lebih rendah dan cenderung membaik dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional. Sementara indeks gini Jawa Barat terus naik dan nasional relatif stagnan, Kabupaten Bandung justru berhasil menurunkan ketimpangannya secara konsisten. Ini mengindikasikan distribusi pendapatan di Kabupaten Bandung semakin merata, sekaligus mencerminkan kinerja pembangunan sosial-ekonomi yang lebih inklusif dibandingkan wilayah sekitarnya.

2.2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat serta keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, terlihat bahwa baik secara nasional, Provinsi Jawa Barat, maupun Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi tingkat kemiskinan, dengan kecenderungan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun

2020, seluruh wilayah mencatat lonjakan tingkat kemiskinan yang signifikan, yang sangat mungkin disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi dan lapangan kerja. Di Kabupaten Bandung, pandemi menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan dari 5,94 persen pada 2019 menjadi 6,91 persen pada 2020. Meskipun demikian, laju kenaikan tersebut relatif lebih terkendali dibandingkan dengan provinsi dan nasional.

Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan sempat meningkat menjadi 7,15 persen, sebelum kemudian mengalami tren penurunan pada periode 2022–2024 hingga mencapai 6,19 persen pada tahun 2024. Tren penurunan ini mencerminkan bahwa setelah tekanan berat akibat pandemi, upaya pemulihan ekonomi dan program perlindungan sosial yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah mulai menunjukkan hasil positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

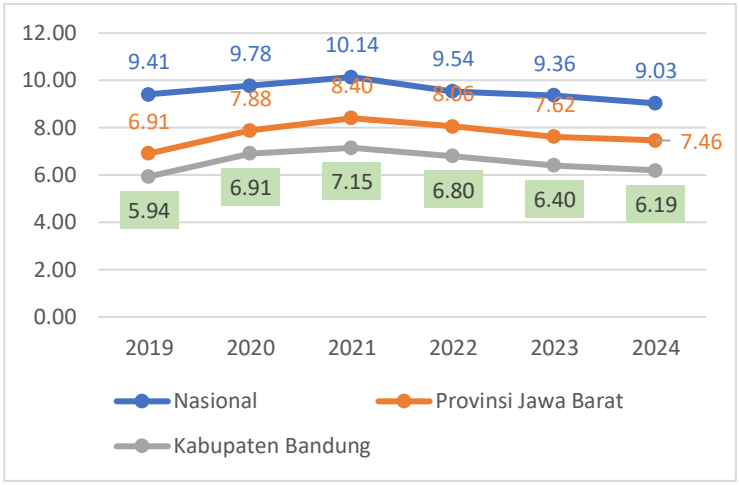

Gambar 2.83. Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi, Kabupaten Tahun 2019-2024

Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS, 2025

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Bandung menunjukkan kinerja yang baik dalam penanganan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung secara konsisten lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional, dengan selisih rata-rata masing-masing sebesar 1,27 persen dan 2,84 persen. Dalam konteks provinsi, Kabupaten Bandung menempati peringkat ke-21 dari 27 kabupaten/kota, atau berada di kelompok dengan tingkat kemiskinan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung berhasil menjaga tingkat kemiskinan tetap rendah dibandingkan sebagian besar wilayah lain di Jawa Barat. Konsistensi tingkat kemiskinan yang relatif rendah di Kabupaten Bandung mengindikasikan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah telah cukup efektif. Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi tantangan strategis yang memerlukan perhatian berkelanjutan, khususnya dalam

menjangkau kelompok masyarakat rentan serta memperkuat akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi di tingkat lokal.

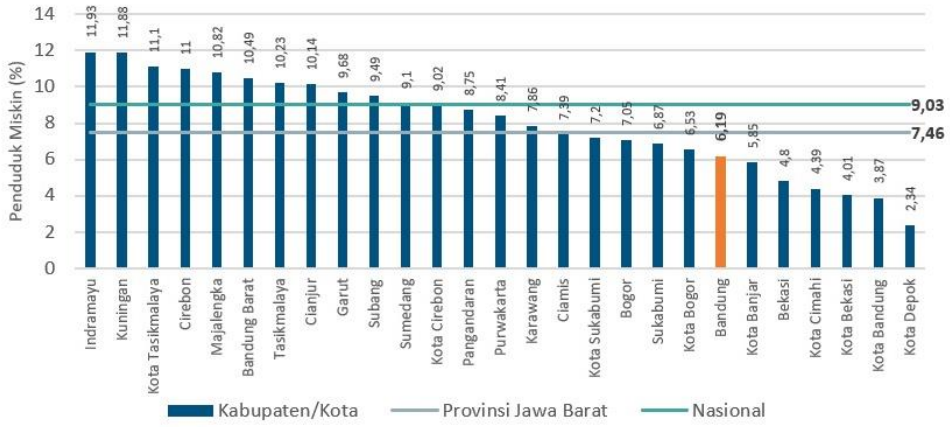

Gambar 2.84. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Sumber: Data BPS, 2025 (diolah)

2.2.1.6 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Indikator ini penting dalam mengukur daya beli serta standar hidup minimum masyarakat. Di Kabupaten Bandung, garis kemiskinan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 345.177 dan terus meningkat menjadi Rp 455.636 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan pengeluaran minimum penduduk untuk hidup layak, baik akibat inflasi, perubahan pola konsumsi, maupun kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

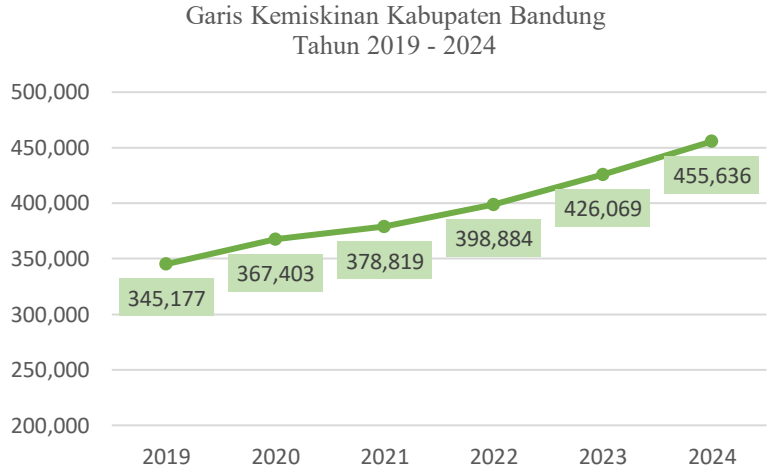

Gambar 2.85. Garis Kemiskinan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024
Sumber: Data BPS, 2025

Meningkatnya garis kemiskinan ini mengindikasikan bahwa standar kelayakan hidup masyarakat Kabupaten Bandung mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun. Di satu sisi, hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang mendorong perbaikan konsumsi masyarakat. Namun di sisi lain, peningkatan ini juga menjadi tantangan dalam memastikan program penanggulangan kemiskinan mampu mengimbangi dinamika ekonomi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu terus memperkuat strategi perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengendalian inflasi daerah agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak semakin tertekan oleh kenaikan kebutuhan hidup minimum.

2.2.1.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin besar rata-rata kekurangan pengeluaran penduduk miskin dibandingkan garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi indikator yang mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sehingga mencerminkan tingkat keparahan kemiskinan. Indikator ini dapat menggambarkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperlihatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin. Berikut adalah nilai indeks kedalaman kemiskinan yang ada di Kabupaten Bandung.

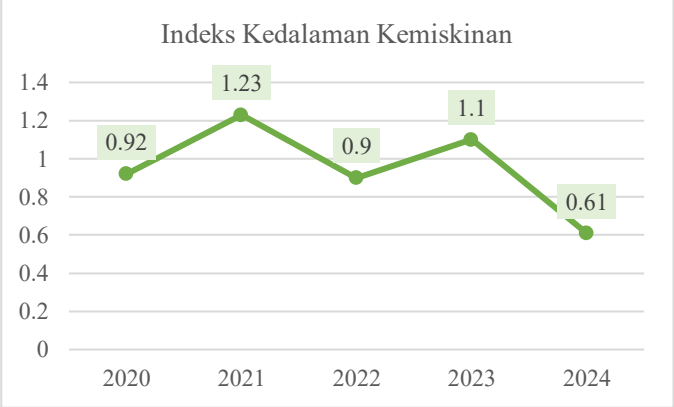

Gambar 2.86. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020-2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS, 2025 (diolah)

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,92 dan meningkat menjadi 1,23 pada 2021, yang mengindikasikan memburuknya tingkat keparahan kemiskinan. Namun, pada 2022 terjadi penurunan menjadi 0,90, kemudian terjadi kenaikan menjadi 1,10 pada 2023.

Tren positif terlihat pada tahun 2024 dengan penurunan signifikan menjadi 0,61, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang mulai berdampak nyata.

2.2.1.8 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indeks Keparahan Kemiskinan mengukur tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin, yaitu seberapa besar jurang kesejahteraan antar mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks ini, semakin timpang kondisi ekonomi di antara kelompok miskin. Indikator ini memberikan gambaran apakah program penanggulangan kemiskinan tidak hanya menurunkan jumlah orang miskin, tetapi juga mengurangi ketimpangan di dalam kelompok tersebut.

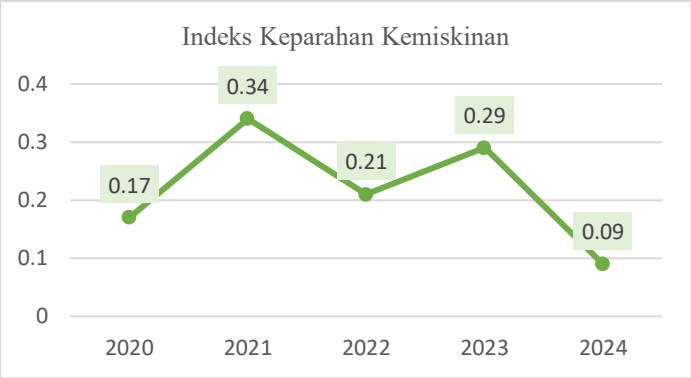

Gambar 2.87. Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2020-2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS, 2025 (diolah)

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Indeks tercatat sebesar 0,17 pada tahun 2020 dan meningkat tajam menjadi 0,34 pada 2021, yang mencerminkan meningkatnya ketimpangan di antara penduduk miskin. PadaTahun 2022 indeks menurun menjadi 0,21, namun kembali naik ke 0,29 pada 2023. Tren positif terlihat pada tahun 2024, dengan penurunan signifikan menjadi 0,09. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil, menandakan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya menurunkan jumlah orang miskin, tetapi juga memperkecil jurang kesejahteraan di dalam kelompok miskin itu sendiri.

2.2.1.9 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup meliputi dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung menunjukkan tren positif sepanjang periode 2019-2024,

dengan kenaikan dari 72,41 pada 2019 menjadi 74,59 pada 2024. Meskipun capaian ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan manusia, angka IPM Kabupaten Bandung masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (74,92) dan nasional (75,02). Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan kompetitif serta mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

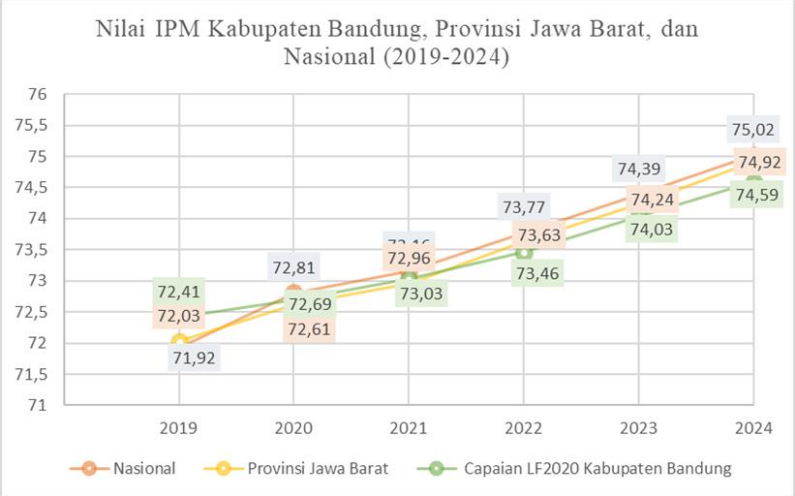

Gambar 2.88. Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Barat & Kabupaten Bandung

Sumber: Data Dikelola SIPD, Kabupaten Bandung dalam Angka, Tahun 2024

Faktor-faktor yang berperan dalam mendukung pertumbuhan IPM Kabupaten Bandung yaitu komponen penyusun IPM terdiri dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran. Kenaikan nilai IPM Kabupaten Bandung dalam kurun lima tahun terakhir terutama didukung oleh kenaikan nilai Indeks Pengeluaran dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,16% per tahun. Adapun untuk komponen Indeks Pendidikan, pertumbuhan dalam lima tahun terakhir memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,96% pertahun. Sedangkan, untuk Indeks Kesehatan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cenderung rendah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,84% per tahun. Terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam meningkatkan nilai IPM Kabupaten Bandung berasal dari indeks pengeluaran (standar hidup layak).

Tabel 2.81. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung

Tahun	Angka Harapan Hidup saat Lahir	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil per Kapita
	Tahun	Tahun	Tahun	Juta Rupiah
2019	72,41	12,68	8,79	10,502
2020	73,53	12,69	8,96	10,201
2021	73,72	12,7	9,07	10,307
2022	74,01	12,71	9,08	10,588
2023	74,92	12,73	9,1	11,018
2024	75,23	12,74	9,15	11,392

Sumber: Data Dikelola SIPD, Kabupaten Bandung dalam Angka, Tahun 2025

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan pada fokus kesejahteraan masyarakat meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk karena merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat serta memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan pada waktu tertentu. Kondisi pembangunan pada fokus kesehatan untuk semua sampai dengan tahun 2023 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Salah satu indikator kesehatan yaitu Usia Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. UHH yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang yang lebih baik untuk hidup lama. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan nilai tertinggi sebesar 75,53 pada tahun 2020 dan sempat menurun ke titik terendah 73,72 pada tahun 2021, sebelum kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 75,23 pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya dampak pandemi terhadap kualitas hidup masyarakat, namun juga menunjukkan pemulihan yang positif seiring membaiknya akses layanan kesehatan dan meningkatnya kesadaran terhadap pola hidup sehat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82. Usia Harapan Hidup Kabupaten Bandung tahun 2020 - 2024

Tahun	Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
2020	75,53
2021	73,72
2022	74,01
2023	74,92
2024	75,23

Sumber: Data Dikelola SIPD, BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2024

2.2.2.2 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Peningkatan indeks ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan, aksesibilitas, serta kualitas hidup masyarakat. Indeks Kesehatan Kabupaten Bandung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 82,35 dan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 84,97 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan, peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, serta keberhasilan program-program kesehatan masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun

2024, yang mencatat lonjakan tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, menandakan percepatan kemajuan sektor kesehatan di daerah ini.

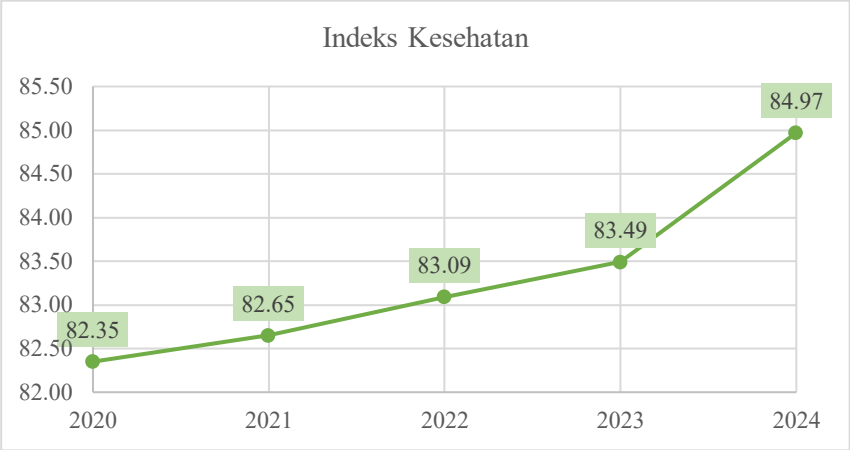

Gambar 2.89. Indeks Kesehatan
Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Kesehatan, 2025

2.2.2.3 Prevalensi *Stunting*

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, *stunting* didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang terjadi secara berulang. Gejala dari gangguan tersebut ditandai dengan tinggi atau panjang badan anak yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pada tahun 2019, prevalensi *stunting* di Kabupaten Bandung tercatat sebesar 27,87%. Angka ini meningkat pada tahun 2020 dan mencapai nilai tertinggi di tahun 2021 dengan nilai 31,10%. Namun demikian, upaya percepatan penurunan *stunting* mulai menunjukkan hasil pada tahun 2022, dengan penurunan tajam hingga mendekati 25,00%, menandakan capaian positif dari intervensi gizi, pelayanan kesehatan ibu-anak, dan edukasi masyarakat. Pada tahun 2023, angka prevalensi *stunting* kembali naik sebesar 29,20%. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Fluktuasi nilai antar tahun tersebut menunjukkan tantangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* yang kompleks. Komitmen politik dari pimpinan nasional dan daerah menunjukkan potensi yang masih dapat dioptimalkan dalam bentuk implementasi program di lapangan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menghadapi tantangan harmonisasi kepentingan antar lembaga, yang memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya konvergensi program masih dalam proses penguatan, mengingat adanya perbedaan dalam prioritas, pemahaman, serta tahapan pelaksanaan. Pada tahap awal, intervensi yang dilakukan memiliki ruang untuk lebih diselaraskan dengan isu-isu gizi yang menjadi fokus utama. Perencanaan dan penganggaran terus mengalami penyempurnaan, khususnya dalam aspek pemanfaatan

data yang lebih akurat dan berkualitas. Keterlibatan lembaga nonpemerintah menunjukkan antusiasme yang tinggi, dan saat ini tengah diarahkan agar lebih selaras dengan agenda bersama. Dinamika dalam sistem desentralisasi memberikan peluang untuk penguatan kapasitas daerah, sekaligus mendorong harmonisasi visi dan pendekatan. Perubahan perilaku masyarakat masih memerlukan strategi yang lebih adaptif terhadap nilai budaya dan tingkat literasi kesehatan setempat. Sementara itu, sistem pemantauan dan evaluasi program terus dikembangkan menuju integrasi yang lebih baik, agar tercipta sinergi data dan pelaporan lintas institusi.

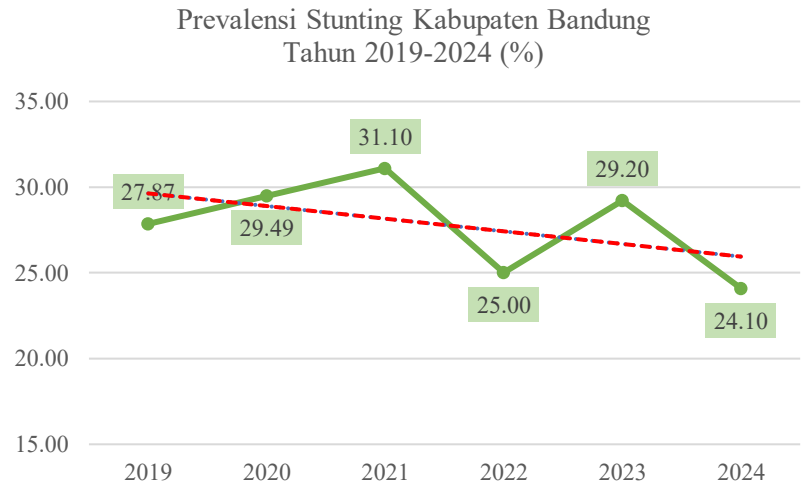

Gambar 2.90. Prevalensi *Stunting* Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Tahun 2025 (diolah)

Memasuki tahun 2024, angka prevalensi *stunting* kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 5,10%, sehingga mencapai level 24,10%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dari tahun ke tahun, tren sepanjang periode 2019 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan penurunan yang positif. Meski demikian, upaya penguatan strategi tetap menjadi kebutuhan agar penurunan prevalensi dapat berlangsung lebih cepat dan optimal. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Sekretariat Negara bersama kementerian/lembaga terkait telah merumuskan Strategi Nasional Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan *Stunting* (Stranas P3S) Tahun 2025–2029 untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan efektivitas intervensi ke depan. Seluruh kebijakan serta langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bandung dalam penanganan *stunting* akan mengacu pada pilar-pilar utama Stranas P3S tersebut.

2.2.2.4 ATM (AIDS, Tuberkulosis dan Malaria)

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya diukur dari tingginya cakupan layanan, tetapi juga dari seberapa efektif sistem kesehatan daerah mampu menangani

penyakit menular yang berdampak luas. Untuk menggambarkan efektivitas upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta kontrol penularan penyakit menular di Kabupaten Bandung, digunakan tiga indikator yang meliputi cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*), angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*), dan prevalensi HIV pada populasi dewasa.

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) merupakan indikator penting dalam pengendalian penyakit menular. Melalui peningkatan *treatment coverage*, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kasus-kasus TBC di masyarakat terdeteksi dan ditangani secara cepat dan tuntas, sehingga memutus rantai penularan dan menurunkan beban penyakit dalam jangka panjang. Upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Bandung menunjukkan dinamika yang signifikan dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC (*treatment coverage*), terjadi peningkatan yang sangat pesat dari tahun 2021 ke 2022, yakni dari 50,97% menjadi 93,26%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program skrining dan pengobatan TBC yang diperkuat pada masa tersebut.

Capaian positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan cakupan yang mencapai puncaknya di angka 97,00%. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 80,00%. Meski masih berada di atas capaian tahun 2021, penurunan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesinambungan intervensi, pelacakan kasus, serta ketersediaan layanan pengobatan di tingkat fasilitas kesehatan. Tren ini menjadi perhatian penting dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah, terutama dalam memperkuat sistem deteksi dini dan pengobatan TBC agar dapat mencapai target eliminasi TBC secara nasional pada tahun-tahun mendatang.

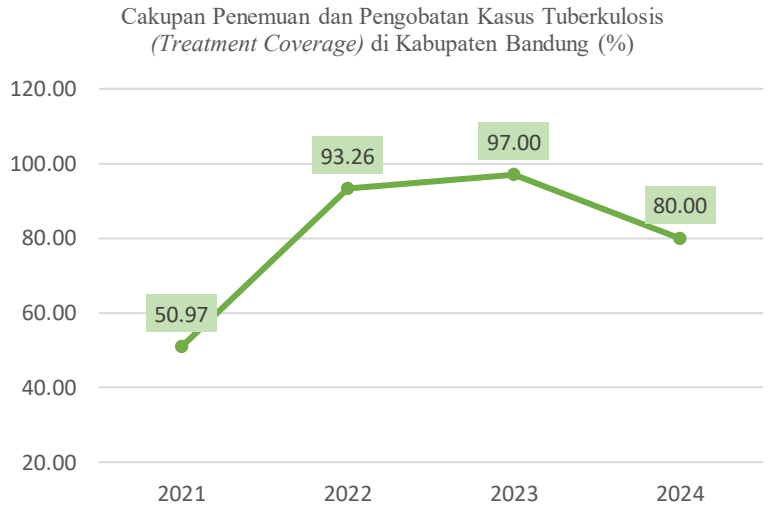

Gambar 2.91. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis *(Treatment Coverage)* di Kabupaten Bandung
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Tahun 2025 (diolah)

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis *(Treatment Success Rate)*

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas tata laksana pelayanan penyakit menular di fasilitas kesehatan. Di Kabupaten Bandung, capaian indikator ini menunjukkan fluktuasi dalam periode 2021–2024. Pada tahun 2021, keberhasilan pengobatan tercatat cukup tinggi sebesar 85,78%, namun mengalami penurunan berturut-turut hingga mencapai titik terendah 82,00% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan seperti rendahnya kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, kendala pelacakan kasus putus obat, serta kelemahan dalam sistem monitoring dan evaluasi program TBC. Meski demikian, tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan lonjakan capaian hingga 87,00%, yang menjadi tertinggi dalam empat tahun terakhir dan mencerminkan pemulihan sistem layanan serta keberhasilan intervensi program.

Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024, tren menurun dalam tiga tahun sebelumnya menjadi catatan penting bagi perencanaan ke depan. Untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan *treatment success rate*, dibutuhkan langkah strategis berupa penguatan tata kelola pengobatan, peningkatan dukungan pendampingan pasien, serta mendorong kepatuhan minum obat melalui pendekatan edukatif berbasis komunitas. Intervensi berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan, mengingat keberhasilan indikator ini menjadi salah satu penopang utama dalam upaya mencapai target eliminasi TBC nasional pada tahun 2030.

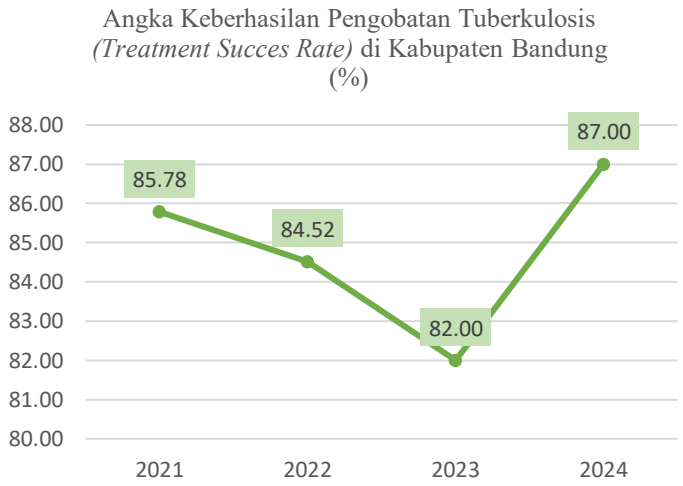

Gambar 2.92. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis *(Treatment Success Rate)* di Kabupaten Bandung
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Tahun 2025 (diolah)

Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa

Prevalensi HIV pada populasi dewasa merupakan indikator utama dalam memantau dinamika epidemi HIV/AIDS. Kabupaten Bandung menunjukkan penurunan prevalensi HIV yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, prevalensi tercatat sebesar 0,135%, dan berhasil ditekan hingga 0,025% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, termasuk perluasan layanan tes dan konseling sukarela (VCT), peningkatan cakupan terapi ARV, serta kampanye edukasi yang intensif kepada kelompok berisiko.

Meskipun tren ini menunjukkan hasil yang sangat positif, upaya konsisten tetap diperlukan untuk mempertahankan dan memperkuat capaian ini, khususnya dalam hal deteksi dini, pengurangan stigma, dan pelibatan masyarakat dalam program penanggulangan HIV. Pencapaian ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung target eliminasi HIV/AIDS sebagai masalah kesehatan masyarakat pada tahun 2030, sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pembangunan kesehatan nasional.

2.2.2.5 Kondisi Layanan Kesehatan

A. Profil Puskesmas

Berdasarkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Ini menunjukkan peran puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2024, di Kabupaten Bandung terdapat 62 puskesmas yang tersebar di 31 kecamatan dengan wilayah pelayanan mencakup 270 desa/kelurahan dan seluruhnya sudah berstatus BLUD yang berarti puskesmas dapat secara langsung menggunakan pendapatan yang diterimanya.

Dari total jumlah puskesmas di Kabupaten Bandung, 42 puskesmas atau 67,74% masuk dalam kategori perkotaan, mencerminkan konsentrasi layanan di wilayah yang mungkin memiliki fasilitas perkotaan dan akses transportasi lebih baik. Di lain sisi, hampir seluruh puskesmas di Kabupaten Bandung berstatus non rawat inap. Hanya ada 5 puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan 24 jam, termasuk pelayanan gawat darurat dan rawat inap sementara. Jumlah tempat tidur (TT) yang tersedia di puskesmas rawat inap sebanyak 77 unit, dengan distribusi yang bervariasi antar wilayah pelayanan.

Dalam aspek kemampuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), terdapat 17 atau 27,42% puskesmas PONED di Kabupaten Bandung. Puskesmas PONED memiliki tenaga medis terlatih serta fasilitas yang memadai untuk menangani kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, sehingga berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dari sisi mutu pelayanan, seluruh puskesmas telah melalui proses akreditasi sesuai standar Kementerian Kesehatan, dengan hasil akreditasi 11 puskesmas terakreditasi dasar, 32 puskesmas terakreditasi madya, dan 7 puskesmas terakreditasi utama. Selengkapnya uraian profil dan klasifikasi layanan puskesmas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.83. Profil Layanan Puskesmas di Kabupaten Bandung Tahun 2024

No.	Nama Puskesmas	Kecamatan	Kriteria Kawasan	Tipe Fasilitas	Kemampuan Pelayanan	Akreditasi
1.	Arjasari	Arjasari	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
2.	Baleendah	Baleendah	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
3.	Banjaran DTP	Arjasari	Perkotaan	Rawat Inap	PONED	Madya
4.	Banjaran Kota	Banjaran	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Dasar
5.	Bihbul	Margahayu	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	
6.	Bojongsoang	Bojongsoang	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Dasar
7.	Cangkuang	Dayeuhkolot	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Utama
8.	Cibeunying	Cimenyan	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
9.	Cibiru Hilir	Cileunyi	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
10.	Cicalengka DTP	Cicalengka	Perkotaan	Rawat Inap	PONED	Madya
11.	Cikalong	Cimaung	Pedesaan	Non Rawat Inap	PONED	Dasar
12.	Cikancung	Cikancung	Perkotaan	Non Rawat Inap	PONED	Dasar
13.	Cikaro	Majalaya	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
14.	Cilengkrang	Cilengkrang	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
15.	Cileunyi	Cileunyi	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	
16.	Ciluluk	Cikancung	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
17.	Cimaung	Cimaung	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
18.	Cimenyan	Cimenyan	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
19.	Cinunuk	Cileunyi	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
20.	Ciparay DTP	Ciparay	Perkotaan	Rawat Inap	PONED	Madya
21.	Cipedes	Paseh	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	
22.	Ciwidey	Ciwidey	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
23.	Dayeuhkolot	Dayeuhkolot	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Dasar
24.	Ibun	Ibun	Pedesaan	Non Rawat Inap	PONED	Utama
25.	Jelekong	Baleendah	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
26.	Katapang	Katapang	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
27.	Kertasari	Kertasari	Pedesaan	Non Rawat Inap	PONED	Madya
28.	Kiangroke	Banjaran	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
29.	Kopo	Kutawaringin	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Utama
30.	Kutawaringin	Kutawaringin	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
31.	Linggar	Rancaekek	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
32.	Majalaya Baru	Majalaya	Perkotaan	Non Rawat Inap	PONED	Madya
33.	Margaasih	Margaasih	Perkotaan	Non Rawat Inap	PONED	Dasar
34.	Margahayu Selatan	Margahayu	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Dasar
35.	Nagrak	Cangkuang	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
36.	Nagreg	Nagreg	Perkotaan	Non Rawat Inap	PONED	Dasar
37.	Nanjungmekar	Rancaekek	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	

No.	Nama Puskesmas	Kecamatan	Kriteria Kawasan	Tipe Fasilitas	Kemampuan Pelayanan	Akreditasi
38.	Pacet	Pacet	Pedesaan	Non Rawat Inap	PONED	Madya
39.	Padamukti	Solokanjeruk	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
40.	Pakutandang	Ciparay	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
41.	Pameungpeuk	Pameungpeuk	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
42.	Panca	Pacet	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	
43.	Pangalengan DTP	Pangalengan	Pedesaan	Rawat Inap	PONED	Utama
44.	Paseh	Paseh	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Dasar
45.	Pasirjambu	Pasirjambu	Pedesaan	Non Rawat Inap	PONED	Utama
46.	Rahayu	Margaasih	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Utama
47.	Rancabali	Rancabali	Pedesaan	Non Rawat Inap	PONED	Dasar
48.	Rancaekek DTP	Rancaekek	Perkotaan	Rawat Inap	PONED	Madya
49.	Rancamanyar	Baleendah	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	
50.	Rawabogo	Ciwidey	Pedesaan	Non Rawat Inap	PONED	Madya
51.	Sangkanhurip	Katapang	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
52.	Santosa	Kertasari	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	
53.	Sawahlega	Cicalengka	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Utama
54.	Solokan Jeruk	Solokanjeruk	Perkotaan	Non Rawat Inap	PONED	Madya
55.	Soreang	Soreang	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Dasar
56.	Sudi	Ibun	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	
57.	Sugihmukti	Pasirjambu	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	
58.	Sukajadi	Soreang	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	
59.	Sukamanah	Pangalengan	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	
60.	Sumber Sari	Ciparay	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya
61.	Wangisagara	Majalaya	Perkotaan	Non Rawat Inap	Non PONED	
62.	Warnasari	Pangalengan	Pedesaan	Non Rawat Inap	Non PONED	Madya

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2024

Berdasarkan paparan kondisi layanan puskesmas di atas, Kabupaten Bandung perlu melakukan optimalisasi terhadap puskesmas yang sudah ada dengan mendorong peningkatan status menjadi Puskesmas Rawat Inap, memperluas jumlah Puskesmas dengan layanan PONED, serta peningkatan tingkat akreditasi menuju kategori yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pemenuhan sarana dan prasarana, penambahan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang kesehatan, serta penguatan manajemen mutu.

2.2.2.6 Rasio Ketersediaan Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk

Rasio ideal puskesmas terhadap jumlah penduduk merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas layanan kesehatan dasar di suatu daerah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana fasilitas kesehatan dasar mampu memenuhi kebutuhan penduduk, sekaligus mengidentifikasi wilayah yang memerlukan penambahan atau peningkatan kapasitas layanan kesehatan. Rasio yang sesuai standar menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan telah terdistribusi secara adil dan mampu memberikan layanan optimal, sedangkan rasio yang tinggi mengindikasikan adanya beban pelayanan yang tidak efisien dan potensi penurunan kualitas layanan.

Jika dibandingkan dengan rasio ideal puskesmas terhadap jumlah penduduk yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan melalui Permenkes Nomor 5 Tahun 2024, yaitu 1 puskesmas untuk setiap 30.000 penduduk, di tahun 2024, Kabupaten Bandung memiliki rasio 125. Berarti idealnya ada 125 puskesmas di Kabupaten Bandung untuk melayani 3.753.116 penduduk. Kondisi di tahun 2024 menunjukkan Kabupaten Bandung baru bisa mencapai 49,56% dari rasio ideal. Rata-rata dibutuhkan penambahan 2 puskesmas/ kecamatan untuk mewujudkan pelayanan yang merata. Pemerataan layanan masih perlu ditingkatkan di wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Kecamatan Baleendah, Paseh, Rancaekek, Ciparay, Banjaran, Katapang, Margaasih, dan Cileunyi. Selengkapnya mengenai data rasio ideal puskesmas terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada pada tabel berikut.

Tabel 2.84. Rasio Ideal Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Jumlah Puskesmas Eksisting	Rasio Per 30.000 Penduduk	Kekurangan Puskesmas
Ciwidey	91.003	2	3	1
Rancabali	51.738	1	2	1
Pasirjambu	94.623	2	3	1
Cimaung	90.532	2	3	1
Pangalengan	158.263	3	5	2
Kertasari	72.473	2	2	0
Pacet	119.331	2	4	2
Ibun	90.600	2	3	1
Paseh	141.405	2	5	3
Cikancung	101.758	2	3	1
Cicalengka	125.951	2	4	2
Nagreg	61.609	1	2	1
Rancaekek	190.998	3	6	3
Majalaya	162.006	3	5	2
Solokanjeruk	89.419	2	3	1
Ciparay	179.350	3	6	3
Baleendah	277.761	3	9	6
Arjasari	110.362	2	4	2
Banjaran	137.959	2	5	3
Cangkuang	85.382	1	3	2
Pameungpeuk	90.065	1	3	2
Katapang	138.092	2	5	3
Soreang	120.323	2	4	2
Kutawaringin	106.670	2	4	2
Margaasih	152.748	2	5	3
Margahayu	120.279	2	4	2
Dayeuhkolot	105.381	2	4	2
Bojongsoang	115.287	1	4	3
Cileunyi	194.727	3	6	3
Cilengkrang	59.519	1	2	1
Cimenyan	117.502	2	4	2
Kab. Bandung	3.753.116	62	125	63

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Data BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2025 (diolah oleh Bapperida)

B. Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk

World Health Organization (WHO) merekomendasikan rasio ideal ketersediaan tempat tidur (TT) rumah sakit sebesar 1:1.000 penduduk. Berdasarkan data, pada tahun 2023 Kabupaten Bandung memiliki 2.343 TT dengan jumlah penduduk 3.721.111 jiwa. Rasio tersebut setara 0,63 TT per 1.000 penduduk, sehingga untuk memenuhi standar WHO dibutuhkan tambahan 1.378 TT.

Pada tahun 2024, terjadi penambahan 107 TT menjadi total 2.450 TT. Jumlah penduduk tahun 2024 mencapai 3.753.116 jiwa, sehingga rasio ketersediaan TT meningkat menjadi 0,65 TT per 1.000 penduduk. Meskipun begitu, Kabupaten Bandung masih kekurangan 1.303 TT untuk mencapai rasio ideal 1 TT per 1.000 penduduk.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Kementerian Kesehatan, rasio ketersediaan TT rumah sakit secara nasional adalah 1,38 TT per 1.000 penduduk. Artinya, masih terdapat ruang perbaikan bagi Kabupaten Bandung untuk dapat menyamai bahkan melampaui standar WHO maupun rata-rata nasional.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan peningkatan ketersediaan TT melalui penambahan kapasitas rumah sakit daerah dan optimalisasi fungsi fasilitas kesehatan yang ada. Selain itu, dibutuhkan strategi pemerataan distribusi TT agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung.

Tabel 2.85. Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit terhadap Penduduk Kabupaten Bandung dan Defisit Tempat Tidur

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Eksisting	Rasio Per 1.000 Penduduk	Kebutuhan Tempat Tidur Ideal	Kekurangan Tempat Tidur
2023	3.721.111	2.343	0,63	3.721	1.378
2024	3.753.116	2.450	0,65	3.753	1.303

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Data BPS Kabupaten Bandung, Tahun 2025 (diolah oleh Bapperida)

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas dan merata di Kabupaten Bandung merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan masyarakat. Dengan memastikan akses yang setara bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi, lingkungan belajar yang inklusif dapat tercipta. Pendidikan yang bermutu ditunjang oleh kurikulum relevan, tenaga pendidik yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai, memungkinkan setiap anak berkembang secara optimal dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan.

Pendidikan yang inklusif tidak hanya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, tetapi juga membuka peluang yang lebih adil bagi seluruh masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas menciptakan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan masa depan, berkontribusi dalam pembangunan daerah, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator penting yang menunjukkan berapa lama seseorang menghabiskan waktu dalam pendidikan formal. Data yang menunjukkan peningkatan rata-rata lama sekolah sering kali dihubungkan dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang lebih merata. Ketika semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, rata-rata lama sekolah cenderung meningkat. Hal ini dapat diartikan bahwa lebih banyak individu yang berhasil menyelesaikan pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi, berkat kebijakan dan program pendidikan yang efektif.

Pendidikan berkualitas yang merata juga berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara keseluruhan. Dengan akses yang lebih baik ke pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, karena pendidikan yang merata memberikan peluang yang lebih besar bagi semua individu, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Dengan demikian, peningkatan rata-rata lama sekolah tidak hanya mencerminkan kualitas pendidikan yang lebih baik, tetapi juga pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.86. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bandung tahun 2019-2024

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
2019	8,79
2020	8,96
2021	9,07
2022	9,08
2023	9,1
2024	9,15

Sumber: Data Dikelola SIPD, BPS Kabupaten Bandung, 2025

Data yang disajikan di tabel menunjukkan tren peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah adalah 8,79 tahun dan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 9,15 pada tahun tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menghabiskan lebih banyak waktu dalam pendidikan formal. Hal ini bisa diindikasikan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan,

sehingga semakin banyak individu yang dapat menyelesaikan pendidikan dengan lebih lama.

Peningkatan rata-rata lama sekolah ini juga dapat berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan. Dengan pendidikan yang lebih baik, masyarakat mungkin memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan yang lebih tinggi juga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Indikator Harapan Lama Sekolah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 12,68 tahun. Angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, meskipun dengan peningkatan yang relatif kecil. Pada tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 12,69 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 12,70 tahun.

Tren positif ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan Harapan Lama Sekolah sebesar 12,71 pada tahun 2022, 12,73 pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 12,74 pada tahun tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sehingga memberikan harapan yang lebih tinggi bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sehingga berdasarkan data berikut ini menunjukkan pembangunan pendidikan dasar di Kabupaten Bandung terus mengalami kemajuan.

Tabel 2.87. Harapan Lama Sekolah

Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
2019	12,68
2020	12,69
2021	12,7
2022	12,71
2023	12,73
2024	12,74

Sumber: Data Dikelola SIPD, BPS Kabupaten Bandung, 2025

2.2.3.3 Kapasitas Ruang Kelas

Kapasitas ruang kelas terhadap jumlah rombongan belajar (rombel) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan dasar di suatu daerah. Kapasitas ini mencerminkan sejauh mana fasilitas pendidikan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik sekaligus mengidentifikasi jenjang pendidikan yang memerlukan penambahan atau peningkatan kapasitas.

Persentase keterpenuhan ruang kelas yang sesuai standar kondisi normal menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan telah terdistribusi secara merata dan mampu memberikan layanan optimal, sedangkan persentase yang rendah mengindikasikan keterbatasan fasilitas yang dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, seperti penerapan sistem belajar bergilir atau berdesakan di dalam kelas.

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 yang merekomendasikan satu ruang kelas untuk satu rombel, kondisi pada tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup mencolok antar jenjang. Untuk PAUD baik swasta maupun negeri, kapasitas ruang kelas telah jauh melampaui kebutuhan dengan persentase keterpenuhan masing-masing 219% dan 155%. Sementara itu, Raudhatul Athfal (RA) baru mampu memenuhi 70% kebutuhan sehingga diperlukan tambahan 780 ruang kelas. Pada jenjang pendidikan dasar, SD swasta telah memenuhi standar, sedangkan Madrasah Ibtidaiyah (MI) hampir terpenuhi dengan persentase 96% dan kekurangan 76 ruang kelas. Namun, kondisi paling mengkhawatirkan terjadi pada SD negeri yang hanya mencapai 73% keterpenuhan, dengan kekurangan mencapai 3.032 ruang kelas. Situasi ini menandakan masih banyak siswa SD negeri yang harus menjalani pembelajaran dalam dua sesi (pagi dan siang) akibat keterbatasan ruang belajar. Pada tingkat pendidikan menengah, SMP swasta menunjukkan surplus ruang kelas sebesar 107%, sedangkan SMP negeri dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) masing-masing baru terpenuhi 91% sehingga masih membutuhkan tambahan 188 dan 218 ruang kelas.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan. Prioritas utama harus diberikan pada percepatan pembangunan ruang kelas baru di SD negeri guna menghapus sistem belajar bergilir dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Upaya ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, serta kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana pendidikan. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan ruang kelas secara berkala berdasarkan data riil di lapangan agar perencanaan pembangunan tepat sasaran. Penguatan tata kelola aset sekolah, pemanfaatan lahan secara efisien, dan rehabilitasi ruang kelas yang rusak juga menjadi bagian penting untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas belajar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas layanan dapat tercapai secara lebih optimal di seluruh jenjang pendidikan.

Tabel 2.88. Kapasitas Ruang Kelas Berdasarkan Jenjang dan Status Sekolah Tahun 2024

Jenjang/ Status	Jumlah Ruang Kelas Eksisting	Jumlah Rombel	Ruang Kelas Ideal	Gap Kebutuhan Ruang Kelas
PAUD/ swasta	3.871	1.770	1.770	+2.101
PAUD/ negeri	34	22	22	+12
Raudhatul Athfal (RA)	1.780	2.560	2.560	780
SD/ swasta	1.327	1.330	1.330	3
SD/ negeri	8.256	11.288	11.288	3.032
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2.089	2.165	2.165	76
SMP swasta	2.157	2.021	2.021	+136
SMP negeri	1.932	2.120	2.120	188
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	2.169	2.387	2.387	218

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2025 (diolah Bapperida)

2.2.3.4 Keterjangkauan Akses Pendidikan

Pendidikan yang terjangkau merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warga negara memperoleh layanan pendidikan yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akses pendidikan yang terjangkau tidak hanya mencakup ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk membiayai kebutuhan pendidikan tanpa menanggung beban berlebihan. Namun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan, yang tercermin dari keberadaan Angka Tidak Sekolah (ATS) pada usia sekolah. Tingginya ATS mencerminkan masih adanya kendala keterjangkauan baik dari sisi biaya, lokasi, maupun faktor sosial-ekonomi, yang perlu mendapat perhatian serius.

Penyebab ATS secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu faktor struktural dan non-struktural. Faktor struktural meliputi hambatan yang bersifat material, seperti keterbatasan kondisi ekonomi, infrastruktur, fasilitas pendidikan, maupun regulasi yang berimplikasi pada akses pendidikan. Sementara itu, faktor non-struktural berkaitan dengan aspek personal dan sosial-budaya, termasuk persepsi individu maupun keluarga terhadap pentingnya pendidikan. Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbud tahun 2024 di Kabupaten Bandung, mayoritas ATS disebabkan oleh faktor non-struktural, dengan alasan utama bekerja (42%) dan tidak mau bersekolah (23%). Selain itu, faktor struktural berupa keterbatasan biaya juga masih menjadi penyumbang signifikan terhadap tingginya ATS.

Secara spasial, ATS di Kabupaten Bandung lebih banyak ditemukan di beberapa kecamatan tertentu. Jumlah ATS tertinggi berada di Kecamatan Baleendah, Kecamatan Pangalengan, dan Kecamatan Ciparay. Namun, apabila dilihat berdasarkan proporsi terhadap penduduk usia wajib belajar 13 tahun, ATS tertinggi tercatat di Kecamatan

Rancabali (11,91%), Kecamatan Ciwidey (9,36%), dan Kecamatan Pangalengan (8,98%). Alasan dominan terjadinya ATS di wilayah tersebut karena bekerja dan tidak mau bersekolah. Di Kecamatan Rancabali dan Ciwidey, alasan ketiga terbesar adalah persepsi bahwa pendidikan yang telah ditempuh sudah cukup, sementara di Kecamatan Pangalengan, alasan ketiga terbesar adalah tidak adanya biaya untuk pendidikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor non-struktural masih menjadi penyebab utama ATS di Kabupaten Bandung, sekaligus menandakan perlunya penguatan efektivitas program pendidikan yang telah dilaksanakan. Program yang berhubungan langsung dengan faktor penyebab ATS, antara lain program Wajib Belajar 13 Tahun melalui PKBM Paket A, B, dan C yang menyasar anak usia sekolah yang bekerja atau enggan bersekolah. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bandung juga telah melaksanakan program Bedas Calakan untuk membantu siswa pada jenjang SMP, khususnya bagi mereka yang terkendala biaya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program eksisting. Program Wajib Belajar 13 Tahun perlu diperluas dengan strategi sosialisasi yang lebih intensif, kampanye pentingnya pendidikan sejak dini, serta pendekatan berbasis komunitas untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai nilai pendidikan. Program kesetaraan melalui PKBM dan jalur pendidikan non-formal juga perlu diperkuat sebagai alternatif bagi anak usia sekolah yang sudah bekerja. Selain itu, dukungan pembiayaan pendidikan bagi keluarga kurang mampu perlu diperluas agar hambatan biaya tidak lagi menjadi penyebab utama ATS. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan tiga alasan utama penyebab ATS dapat ditangani secara lebih komprehensif.

2.2.3.5 Angka Literasi/Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi adalah keterampilan dasar yang mencakup pemahaman terhadap teks serta penerapan konsep bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tertulis secara efektif, sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan menggunakan konsep bilangan dan matematika dalam berbagai konteks. Secara operasional, kemampuan literasi dan numerasi diukur melalui instrumen penilaian yang menghasilkan indeks literasi dan numerasi, yang berbeda dengan angka literasi dan numerasi yang bersifat umum dan hanya menunjukkan persentase yang mampu membaca atau berhitung secara dasar. Indeks ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tingkat penguasaan kompetensi siswa dalam membaca dan bernalar matematis, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan

peningkatan mutu pendidikan. Nilai indeks ini dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pembagian ini memungkinkan pemetaan capaian belajar yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kemampuan Literasi Jenjang SD

Kemampuan literasi pada jenjang SD merupakan keterampilan dasar yang mencakup kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks bacaan sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Literasi pada jenjang ini tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca secara teknis, tetapi juga pada pemahaman makna, penalaran isi bacaan, serta kemampuan menyampaikan kembali informasi yang diperoleh. Kemampuan literasi jenjang SD di Kabupaten Bandung mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan adanya kemajuan dalam keterampilan membaca dan memahami teks di tingkat dasar. Kenaikan tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 11,77 poin. Meski secara umum menunjukkan arah yang positif, pertumbuhan di tahun 2025 relatif kecil, yakni hanya 1,30 poin. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya pendampingan yang berkelanjutan agar perkembangan kemampuan literasi tetap terjaga.

Tabel 2.89. Kemampuan Literasi Jenjang SD

Indikator	Capaian			
	2022	2023	2024	2025
Kemampuan Literasi Jenjang SD	54,69	66,46	77,40	78,70

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rapor Pendidikan, 2025

Kemampuan Literasi Jenjang SMP

Kemampuan literasi pada jenjang SMP merupakan kelanjutan dan penguatan dari kemampuan literasi dasar yang diperoleh di jenjang SD, dengan cakupan yang lebih kompleks dan mendalam. Jika pada jenjang SD literasi berfokus pada pemahaman teks sederhana, maka pada jenjang SMP siswa dituntut untuk mampu menganalisis, menilai, serta merefleksikan berbagai jenis teks yang lebih beragam dan kompleks, termasuk teks argumentatif dan informatif. Pengukuran ini bertujuan untuk memetakan tingkat penguasaan literasi siswa SMP, yang hasilnya digunakan sebagai dasar perencanaan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat menengah. Kemampuan literasi jenjang SMP di Kabupaten Bandung menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dengan capaian tahun 2025 sebesar 77,46 yang mengindikasikan bahwa keterampilan membaca dan memahami teks di tingkat menengah sudah berada pada level yang cukup baik. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan lonjakan sebesar 8,91 poin. Meskipun secara keseluruhan menunjukkan perkembangan positif, laju

peningkatannya tidak selalu stabil dan cenderung fluktuatif. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Tabel 2.90. Kemampuan Literasi Jenjang SMP

Indikator	Capaian			
	2022	2023	2024	2025
Kemampuan Literasi Jenjang SMP	60,69	64,04	72,95	77,46

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rapor Pendidikan, 2025

Kemampuan Numerasi Jenjang SD

Kemampuan numerasi pada jenjang SD merupakan keterampilan dasar siswa dalam memahami, menggunakan, dan menerapkan konsep bilangan serta operasi matematika sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini mencakup pemahaman terhadap hubungan antarbilangan, pengukuran, data, dan geometri yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa SD. Secara operasional, kemampuan numerasi diukur melalui asesmen yang dirancang untuk menilai sejauh mana siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematis dasar secara logis dan kontekstual. Kemampuan numerasi pada jenjang SD mengalami peningkatan yang signifikan, dari 28,50% pada tahun 2022 menjadi 77,60% di tahun 2025. Kenaikan poin yang cukup besar setiap tahunnya mencerminkan adanya fokus yang kuat terhadap pengembangan kemampuan berhitung dan penalaran matematis sejak tahap awal pendidikan.

Tabel 2.91. Kemampuan Numerasi Jenjang SD

Indikator	Capaian			
	2022	2023	2024	2025
Kemampuan Numerasi Jenjang SD	28,50	48,65	69,15	77,60

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rapor Pendidikan, 2025

Kemampuan Numerasi Jenjang SMP

Kemampuan numerasi pada jenjang SMP merupakan kelanjutan dari kemampuan numerasi dasar yang diperoleh di jenjang SD, dimana siswa dituntut untuk mampu berpikir lebih analitis dalam menyelesaikan masalah matematika yang melibatkan konsep seperti aljabar, proporsi, dan interpretasi data dalam berbagai situasi. Secara operasional, kemampuan numerasi jenjang SMP diukur melalui asesmen yang menilai keterampilan siswa dalam mengolah informasi kuantitatif, bernalar logis, dan mengambil keputusan berdasarkan data atau perhitungan. Hasil pengukuran ini berguna untuk memetakan capaian pembelajaran serta merumuskan strategi peningkatan mutu pendidikan menengah. Kemampuan numerasi jenjang SMP di Kabupaten Bandung menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dengan capaian tahun 2025 sebesar 72,62 yang mencerminkan strategi peningkatan kemampuan berpikir logis dan matematis pada jenjang menengah yang cukup baik. Kenaikan tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan peningkatan sebesar 23,10 poin. Walaupun tren umumnya menunjukkan kemajuan, pola peningkatannya masih belum konsisten dan cenderung berfluktuasi. Maka dari itu, perlu

adanya perencanaan program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, juga dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas pendidikan.

Tabel 2.92. Kemampuan Numerasi Jenjang SMP

Indikator	Capaian			
	2022	2023	2024	2025
Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	39,64	44,74	67,84	72,62

Sumber: Data Dikelola SIPD, Rapor Pendidikan, 2025

2.2.3.6 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Literasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor pendukung utama dalam kegiatan literasi adalah ketersediaan dan kemudahan akses terhadap buku atau bahan pustaka bagi seluruh masyarakat. Untuk mengukur capaian dalam pelaksanaan kegiatan literasi, digunakan indikator berupa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). IPLM merupakan alat ukur terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna mewujudkan budaya literasi di tengah masyarakat. Komponen penyusun IPLM, yang disebut Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM), mencakup pemerataan akses layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi bahan pustaka, jumlah tenaga perpustakaan, tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan, keberadaan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan.

Tabel 2.93. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indikator	Capaian				Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2030
IPLM Kabupaten Bandung	49,00	85,16	53,70	60,65	60,66	60,71

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung, 2025

Perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tahun 2021 dilakukan oleh DISPUSIP, sedangkan mulai tahun 2022 dan seterusnya, perhitungan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional melalui survei nasional. Secara umum, capaian IPLM Kabupaten Bandung menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dengan nilai mencapai 85,16, mencerminkan peningkatan tajam dalam upaya penguatan literasi. Namun, capaian ini tidak berlanjut secara konsisten karena pada tahun 2023 indeks mengalami penurunan tajam menjadi 53,70, sejalan dengan tren penurunan di tingkat nasional. Meskipun terjadi kenaikan kembali pada tahun 2024 menjadi 60,65, angka tersebut masih belum mampu menyamai capaian tertinggi yang diraih pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi capaian tinggi pada tahun 2022, tantangan konsistensi dalam peningkatan literasi masyarakat Kabupaten Bandung masih cukup besar. Oleh sebab itu perlu dilakukan strategi lainnya untuk dapat meningkatkan gerakan literasi di masyarakat. Berbagai strategi dilakukan Kabupaten Bandung dalam upaya peningkatan literasi masyarakat diantaranya yaitu berjejaring dengan Bunda Literasi yang ada di setiap Kecamatan dan Desa, pemilihan Duta Baca, sosialisasi gemar membaca di Pondok Pesantren dan Madrasah serta peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan. Selain itu sinergi dengan komunitas, Taman Baca Masyarakat (TBM), Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan sekolah juga terus dilakukan.

2.2.3.7 Indeks Literasi Digital

Menurut UNESCO (2018), kemapuan literasi digital yang baik akan membantu memberantas kemiskinan melalui kemudahan akses pada pelayanan sosial digital oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022). Aspek teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang dapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan masyarakat dalam rangka mengikuti tren gaya hidup modern. Indeks literasi digital berkaitan dengan persentase penduduk yag dapat mengakses internat, hal ini menunjukan semakin tinggi persentase penduduk yang mengakses internet, semakin besar peluang untuk meningkatkan Indeks Literasi Digital, namun peningkatan akses harus diimbangi dengan penguatan keterampilan digital agar penggunaan internet lebih produktif dan aman.

Tabel 2.94. Persentase Penduduk berumur 5 tahun Ke Atas yang Mengakses Internet

Tahun (%)				
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
61,38	75,68	73,33	74,97	77,57

Sumber: Data Dikelola SIPD, BPS Kabupaten Bandung, 2025

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan akses internet pada penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kabupaten Bandung. Persentase akses internet meningkat dari 61,38% pada tahun 2020 menjadi 77,57% pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Tren ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan infrastruktur digital dan literasi internet, sejalan

dengan visi strategis Kabupaten Bandung dalam memperkuat pemerataan akses informasi guna mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan RPJMD. Hal ini menunjukkan peran penting teknologi informasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kebijakan sosial merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak sosial dan ekonomi warga. Dalam konteks ini, perlindungan sosial yang adaptif menjadi penting sebagai respons terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan kepada kelompok rentan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko seperti bencana, perubahan iklim, dan tekanan ekonomi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, perlindungan sosial adaptif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan gambaran terkait upaya perlindungan sosial yang adaptif di Kabupaten Bandung.

2.2.4.1 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator penting dalam menjamin kepastian kerja dan mendorong produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Bandung**.** Selain faktor upah, kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan kepastian akan perlindungan yang krusial bagi pekerja. Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan proporsi peserta, dari 15,16% pada tahun 2019 menjadi 27,46% pada tahun 2024. Namun demikian, tren tahunan menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan signifikan pada tahun 2020 (8,72%) dan peningkatan mulai tahun 2021 hingga 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperluas cakupan kepesertaan secara konsisten, guna memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja di daerah ini. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.95. Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung (Dalam Satuan %)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
15,16	8,72	10,95	23,85	26,55	27,46

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, 2025 (diolah)

2.2.4.2 Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender

Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender merupakan aspek penting yang saling terkait dalam mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif. Keluarga yang berkualitas menjadi fondasi awal bagi tumbuhnya generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kesetaraan gender memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh peluang yang setara dan

menikmati hasil yang sama dalam pembangunan. Keduanya bersama-sama membentuk ekosistem sosial yang tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu. Pendekatan teori ekosistem memandang keluarga bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai lembaga sosial yang menghubungkan individu dengan lingkungan fisik, sosial, maupun buatan. Di dalam keluarga, anak pertama kali memperoleh pengalaman hubungan antarpribadi serta mempelajari peran dan pola perilaku yang kelak dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keluarga berfungsi sebagai perantara masyarakat luas sekaligus saluran penerus nilai, norma, dan kebudayaan. Oleh karena itu, keluarga yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan, sehingga penguatan peran keluarga harus menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan alat ukur kualitas keluarga di Indonesia yang menggambarkan tingkat ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga sebagai cerminan peran serta fungsi keluarga dalam pembangunan. iBangga diperlukan untuk menilai sejauh mana pembangunan keluarga berhasil meningkatkan rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Penghitungan iBangga dilakukan dengan tiga dimensi, yaitu ketenteraman (tercermin dari kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan), kemandirian (ditunjukkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, pendidikan, kesehatan, dan akses informasi), serta kebahagiaan (dicerminkan melalui kasih sayang, penerimaan kondisi keluarga, interaksi keluarga, dan interaksi sosial). Skor iBangga diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu rentan (nilai <40), berkembang (40–70), dan tangguh (nilai >70). Dengan demikian, iBangga menjadi indikator penting untuk memetakan kondisi keluarga sekaligus sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan keluarga yang berkualitas, berketahanan, dan sejahtera lahir batin.

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan kualitas keluarga meskipun masih berada pada kategori berkembang. Pada tahun 2021 nilai iBangga tercatat sebesar 51,91 kemudian meningkat menjadi 54,77 pada 2022, 58,21 pada 2023, dan 59,93 pada 2024. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan adanya

perbaikan pada aspek ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, meskipun belum mencapai kategori tangguh (≥70). Dari perkembangan ini terlihat bahwa berbagai program pembangunan keluarga mulai memberikan hasil, namun Kabupaten Bandung masih perlu memperkuat intervensi agar percepatan peningkatan kualitas keluarga dapat lebih signifikan dan merata di seluruh wilayah.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bandung dituntut untuk mengambil langkah strategis dalam mendukung pembangunan keluarga melalui penguatan indikator iBangga. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas akses pendidikan dan kesehatan yang merata, menciptakan kesempatan ekonomi yang inklusif, memperkuat layanan konseling keluarga, serta memastikan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan. Dengan keseriusan pemerintah daerah dalam memfasilitasi kebijakan yang terarah dan berbasis data, kualitas keluarga di Kabupaten Bandung akan semakin meningkat, sehingga tercipta masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan inklusif.

Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender dalam pembangunan manusia secara statistik dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yang juga menjadi komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berbeda dengan IPM yang bersifat umum, IPG lebih menekankan pada analisis ketimpangan berdasarkan gender. Dengan demikian, IPG menjadi alat penting untuk menilai sejauh mana pembangunan yang berlangsung mampu menjangkau kedua kelompok gender secara adil, serta sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang responsif gender.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dalam lima tahun terakhir, IPG Kabupaten Bandung secara umum menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan Pembangunan antara laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bandung semakin kecil atau semakin setara.

Tabel 2.96. Indeks Pembangunan Gender

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (%)
2020	93,95
2021	93,85
2022	93,97
2023	94,03
2024	94,23

Sumber: Data Dikelola SIPD, Angka sementara dan merupakan proyeksi DP2KBP3A

IPG Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2021, yang utamanya disebabkan oleh lebih tingginya capaian laki-laki dalam indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Per Kapita. Sebaliknya, perempuan mencatat keunggulan pada indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Ketimpangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam aspek pendidikan dan ekonomi. Pada tahun 2024, peningkatan nilai kembali terlihat dengan meningkatnya nilai IPG Kabupaten Bandung menjadi 94,23. Meskipun tren positif terlihat dalam tiga tahun terakhir, nilai tersebut masih mencerminkan bahwa capaian pembangunan perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPG perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang berperspektif gender guna mendorong pemerataan pembangunan, sejalan dengan komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya tujuan kelima tentang kesetaraan gender.

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di sektor publik seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keterlibatan ini menjadi kunci agar kebutuhan dan permasalahan perempuan dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan. IPG diinterpretasikan dengan angka mendekati 100, semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 semakin setara antara laki-laki dan perempuan. Semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin timpang pembangunan antara laki dengan perempuan. Capaian IPG Kabupaten Bandung dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren positif. Adapun progres IPG dari tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.97. Indeks Pemberdayaan Gender

Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender (%)
2020	67,07
2021	68,68
2022	69,26
2023	70,19
2024	71,17

Sumber: Angka sementara dan merupakan proyeksi DP2KBP3A

Data capaian IPG Kabupaten Bandung selama empat tahun ke belakang menunjukkan tren meningkat, yang artinya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan. Namun demikian, capaian IPG Kabupaten Bandung masih berada di bawah rata-rata capaian IPG Provinsi Jawa Barat dan nasional. Oleh sebab itu, pengarusutamaan gender atau pembangunan yang berperspektif gender masih harus digalakkan. Pengarusutamaan gender akan berdampak maksimal dalam kesetaraan

apabila dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, baik yang tergabung dalam lembaga pemerintah, swasta, organisasi keagamaan dan lainnya hingga unit terkecil yaitu keluarga (Yuslin, 2021).

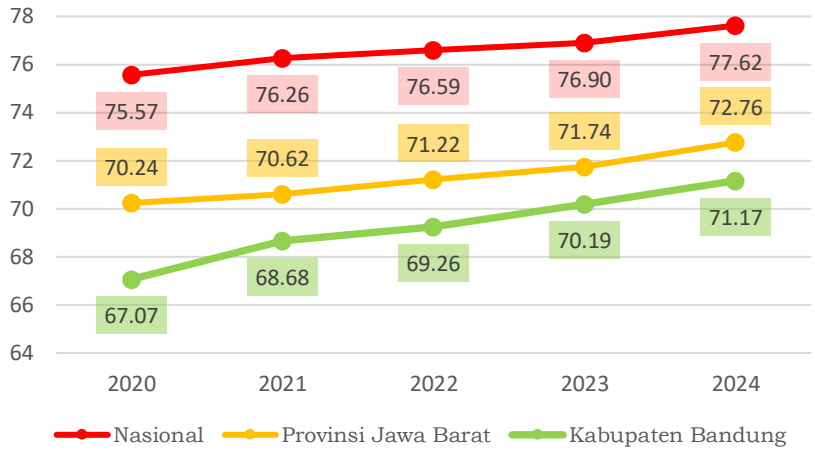

Gambar 2.93. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS, 2025

2.2.4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Aspek kebudayaan harus ikut mengalami kemajuan secara bersamaan pada saat terjadi pertumbuhan pada aspek-aspek lainnya. Untuk mengukur tingkat kemajuan tersebut, gabungan lembaga negara yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Bappenas serta BPS telah membuat sebuah instrumen yang mampu untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di Indonesia. Hadirnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Besarnya perolehan indikator ini diharapkan memberi gambaran holistik mengenai kemajuan kebudayaan nasional dan daerah, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan berbasis data empiris. Terdapat tujuh dimensi utama yang terukur dalam indikator ini, yaitu: (1) ekonomi budaya; (2) pendidikan; (3) ketahanan sosial budaya; (4) warisan budaya; (5) ekspresi budaya; (6) budaya literasi; serta (7) gender.

Setiap dimensi memiliki indikator yang diukur melalui data primer dan sekunder, seperti survei nasional dan data administrasi pemerintah. Nilai dari masing-masing indikator dinormalisasi dan dibobot untuk menghasilkan skor IPK yang mencerminkan capaian pembangunan kebudayaan secara keseluruhan. Indikator ini masih tergolong baru, sehingga deret waktu yang tersedia baru tiga tahun terakhir ini.

Tabel 2.98. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Tahun	Perolehan
2024	56,19
2023	55,07

Tahun	Perolehan
2022	51,76

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2024

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia dalam mendukung daya saing daerah dilihat melalui karakteristik penduduk bekerja menurut pendidikan terakhir, struktur tenaga kerja, dan tingkat ketergantungan.

2.3.1.1 **Karakteristik Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir**

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama selama empat tahun terakhir ini. Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung masih didominasi oleh tatanan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 34,35%. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas hanya sebesar 7,93%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah justru mengalami peningkatan persentase mencapai 0,91 persen poin. Adapun penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mengalami penurunan persentase. Hal ini ditunjukkan dari penurunan pada penduduk bekerja yang pendidikan terakhirnya berada di jenjang SMP (0,63 persen poin), SMA Umum (2,54 persen poin), dan Universitas (0,56 persen poin). Berikut merupakan diagram persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

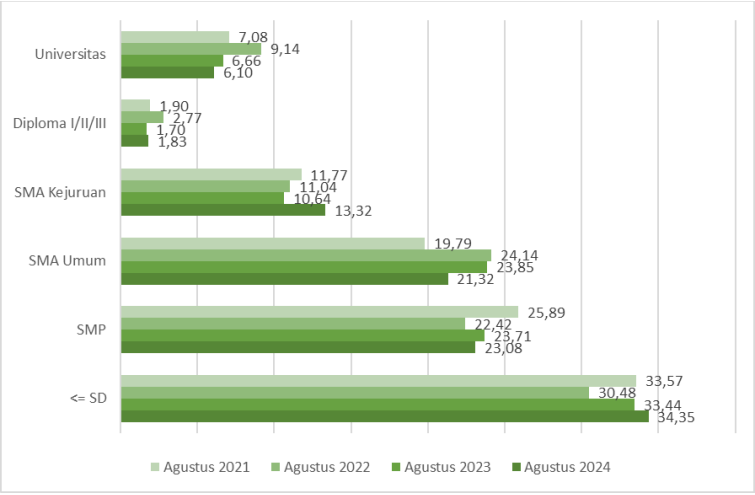

Gambar 2.94. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung 2021-2024

Sumber: Data Dikelola SIPD; Sakernas, Tahun 2021-2024

2.3.1.2 Struktur Tenaga Kerja

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Data Sakernas menunjukkan bahwa setidaknya sejak tahun 2017-2024 secara berturut-turut sektor jasa menyerap tenaga kerja terbanyak dengan dominasi sekitar separuhnya (48,37%-55,61%). Adapun sektor agrikultur yang berdiri sendiri sebagai satu dari tujuh belas lapangan usaha dalam kategori BPS yang ditulis menjadi pertanian, kehutanan, dan perikanan konsisten menjadi yang terkecil selama empat tahun terakhir ini. Jika dilihat berdasarkan trennya, jumlah pekerja di sektor pertanian terus menerus mengalami penurunan. Sebaliknya, sektor jasa memiliki tren yang terus meningkat. Akan tetapi, pada tahun 2024 keadaannya tidaklah demikian. Sektor pertanian justru meningkat 1,27% poin bersamaan dengan penurunan yang drastis pada sektor jasa sebesar 2,87% poin. Adapun pada tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 0,31 persen poin pada sektor agrikultur dan meningkat sebesar 2,10% poin pada sektor jasa.

Pekerja di sektor manufaktur berarti tergolong bekerja di lima jenis lapangan usaha yaitu: (1) pertambangan dan penggalian; (2) industri pengolahan; (3) pengadaan listrik dan gas; (4) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; serta (5) konstruksi. Adapun pekerja di sektor jasa berarti bekerja di sebelas lapangan usaha dalam kategori BPS, yaitu: (1) perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (2) transportasi dan pergudangan; (3) penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) informasi dan komunikasi; (5) jasa keuangan dan asuransi; (6) real estat; (7) jasa perusahaan; (8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (9) jasa pendidikan; (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; (11) jasa lainnya. Struktur tenaga kerja Kabupaten Bandung 2021-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

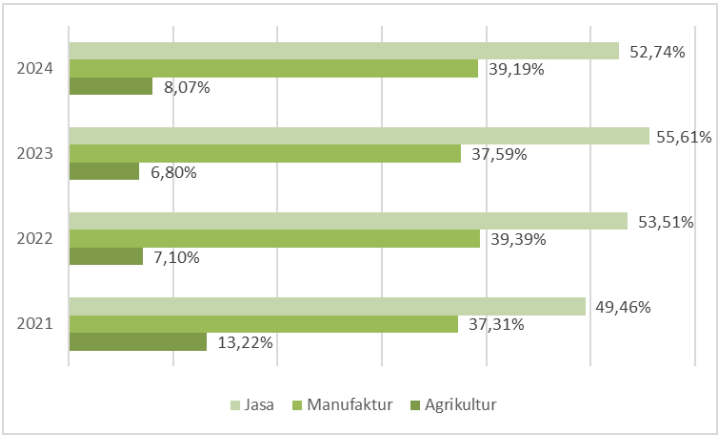

Gambar 2.95. Distribusi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Bandung 2021-2024
Sumber: Data Dikelola SIPD; Sakernas, Tahun 2021-2024

2.3.1.3 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Pembangunan pemuda yang berkualitas merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan daya saing SDM di Kabupaten Bandung. Melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), kualitas pemuda dapat diukur secara komprehensif dari lima dimensi utama, yakni pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender. IPP tidak hanya menjadi tolok ukur capaian pembangunan kepemudaan, tetapi juga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan daerah dalam menyiapkan generasi muda yang adaptif, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Berdasarkan data tahun 2023, hasil analisis IPP menunjukkan bahwa pemuda Kabupaten Bandung memiliki kekuatan yang besar pada keterampilan digital (98,7). Selain itu, dalam hal terkait pendidikan formal, lebih dari setengah pemuda sudah mengemban pendidikan setara SMA atau lebih tinggi (59,79). Namun demikian, capaian pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat masih sangat rendah (11,68). Peristiwa ini menunjukkan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja pemuda belum merata serta hubungan antara pendidikan dan keterampilan pemuda belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Dari sisi kesehatan, angka kesakitan pemuda tergolong baik, namun masih butuh perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap perilaku merokok dan kebiasaan olahraga pemuda. Begitu juga dengan angka kehamilan remaja yang masih cukup tinggi, memperlihatkan adanya kerentanan sosial yang harus diantisipasi. Pada dimensi ketenagakerjaan, kondisi pemuda masih menjadi titik lemah, persentase pemuda yang tidak bekerja maupun tidak bersekolah dan persentase pekerja tidak penuh masih cukup besar. Sementara itu, kewirausahaan pemuda juga masih sangat rendah, menunjukkan perlunya intervensi serius untuk memastikan pemuda terserap dalam dunia kerja yang produktif sekaligus didorong menjadi wirausaha.

Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu mengambil langkah strategis dalam pembangunan pemuda. Fokus utama meliputi peningkatan keterhubungan antara pendidikan, pelatihan, dan pasar kerja, penguatan program kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi pemuda, peningkatan akses pada kepemimpinan dan organisasi, serta kebijakan afirmatif untuk memperkecil kesenjangan gender dan mendukung kelompok rentan. Upaya tersebut bukan hanya akan meningkatkan kualitas pemuda Kabupaten Bandung, tetapi juga memperkuat daya saing SDM daerah dalam menghadapi bonus demografi dan persaingan global di masa mendatang.

Tabel 2.99. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Bandung Berdasarkan Komponen Tahun 2023

No	Dimensi	Indikator	Nilai Tahun 2023
1	Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	11,68
		Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	59,79
		Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	98,7
2	Kesehatan	Angka kesakitan pemuda	5,41
		Persentase pemuda yang merokok	31,9
		Persentase pemuda yang berolahraga	39,84
		Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	17,29
3	Ketenagakerjaan layak	Persentase pemuda *Not in Education, Employment, or Training* (NEET)	27,3
		Persentase pemuda pekerja tidak penuh	23,87
		Rasio kewirausahaan pemuda	0,78
4	Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	69,52
		Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	1,13
		Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	0,84
5	Inklusivitas dan kesetaraan gender	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki.	62,18
		Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	20,91
		Angka perkawinan anak	14,25

Sumber: Data Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, Tahun 2024

2.3.1.4 Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada periode tahun 2019-2023 rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Bandung cenderung terus mengalami penurunan. Indikator ini mencapai titik terendahnya pada tahun 2023 sebesar 44,09. Diartikan, untuk setiap seratus penduduk berusia kerja (15-64 tahun) memiliki tanggungan sekitar 44 penduduk yang belum masuk kategori produktif (0-14 tahun) atau dianggap tidak produktif lagi (65 tahun atau lebih). Hal ini mengindikasikan bahwa beban yang harus ditanggung oleh penduduk berusia produktif terhadap mereka yang belum atau tidak produktif menjadi semakin berkurang. Akan tetapi, data pada tahun 2024 menunjukkan terjadinya peningkatan indikator ini, sehingga jumlah beban yang ditanggung setiap seratus orang berusia produktif meningkat sekitar dua penduduk non produktif, atau menjadi sekitar 46 penduduk. Rasio ketergantungan tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.100. Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung

Tahun	Kategori Usia			Dependency Ratio (%)
	0-14	15-64	65+	
2020	958.954	2.489.131	175.705	45,58
2021	957.233	2.521.111	187.729	45,41
2022	958.613	2.559.177	200.870	45,31

Tahun	Kategori Usia			Dependency Ratio (%)
	0-14	15-64	65+	
2023	926.334	2.582.522	212.255	44,09
2024	961.218	2.635.964	242.539	45,67

Sumber: Data Dikelola SIPD; Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, Tahun 2025

2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Pentingnya inovasi juga dikuatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menekankan pentingnya penyelenggaraan inovasi di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh daerah dilaporkan dan diukur oleh Pemerintah Pusat menjadi Indeks Inovasi Daerah yang akan menilai praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terkait dengan pelaksanaan riset dan inovasi, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi pada tanggal 19 Juli 2024. Dengan adanya Perda ini diharapkan penyelenggaraan riset dan inovasi dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, terkoordinasi dan berkelanjutan. Selain itu Perda ini juga memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan riset dan inovasi.

Dalam dua tahun terakhir, capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bandung meningkat dari skor 51,52 (inovatif) pada tahun 2023 menjadi 65,89 (sangat inovatif) pada tahun 2024. Jumlah inovasi yang dilaporkan pun meningkat dari 44 menjadi 64 inovasi, dengan total keseluruhan inovasi berjumlah 679 (82 inovasi tata kelola pemerintahan, 440 inovasi pelayanan publik, dan 157 inovasi daerah lainnya) di Kabupaten Bandung hingga akhir 2024. Capaian ini menjadi cerminan komitmen daerah dalam membangun budaya inovatif dan dapat menjadi faktor pendorong pembangunan di daerah.

Inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian, hal tersebut tercermin dari analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor industri pengolahan serta sektor penyediaan akomodasi makan dan minum yang sangat relevan untuk menggambarkan dampak nyata dari penerapan inovasi terhadap nilai tambah ekonomi. Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja yang tidak terlepas dari peran inovasi dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dalam konteks pencapaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bandung akan menjadi ukuran sejauh mana upaya inovatif daerah telah membuahkan hasil dan mendorong transformasi di berbagai sektor.

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menunjukkan besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor ini mencakup aktivitas mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi melalui proses produksi. Nilai rasio ini mencerminkan tingkat industrialisasi daerah serta kapasitas produksinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar peran sektor industri sebagai penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja.

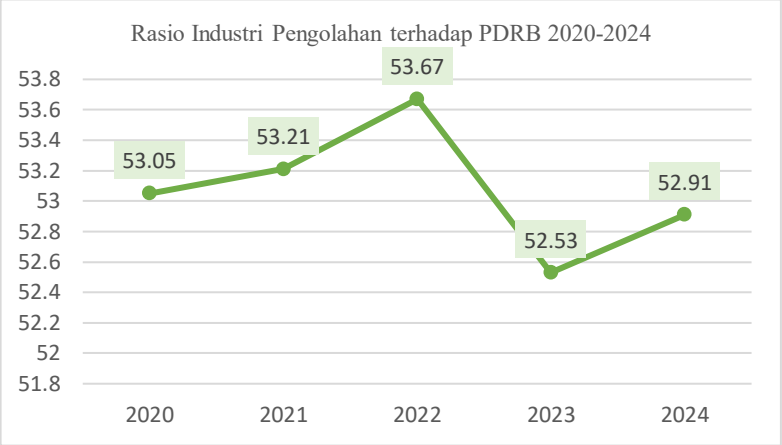

Gambar 2.96. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Sumber: Data Dikelola SIPD; Data BPS, 2025 (diolah)

Rasio PDRB industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Bandung selama periode 2012–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Rasio ini mengalami peningkatan dari 53,05% pada tahun 2020 menjadi 53,21% pada 2021. Puncak tertinggi tercapai pada tahun 2022 sebesar 53,67%, sebelum kembali menurun drastis menjadi 52,53% pada tahun 2023. Namun, terdapat sedikit pemulihan pada tahun 2024 dengan rasio meningkat menjadi 52,91%. Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika dalam kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi pasar, kebijakan industri, dan gangguan eksternal seperti pandemi.

2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum menggambarkan kontribusi sektor penyediaan penginapan serta jasa makanan dan minuman terhadap total PDRB. Rasio ini mencerminkan peran sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner dalam perekonomian daerah. Nilai yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat dalam mendukung wisata, UMKM, dan konsumsi masyarakat. Bagi daerah dengan potensi wisata seperti

Kabupaten Bandung, rasio ini penting untuk menilai dampak sektor pariwisata terhadap struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

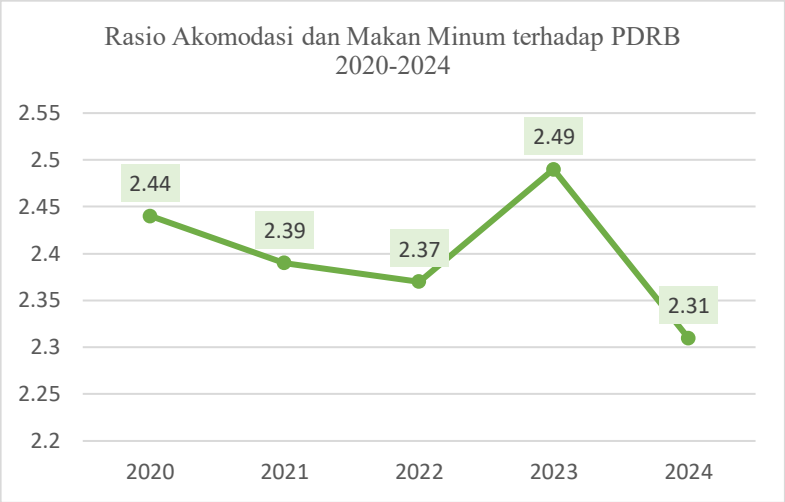

Gambar 2.97. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS, 2025 (diolah)

Rasio PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap total PDRB Kabupaten Bandung menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024. Rasio pada tahun 2020 sebesar 2,44%, lalu mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 2,37% pada tahun 2022. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan rasio mencapai 2,49%, namun kembali turun menjadi 2,31% pada tahun 2024. Penurunan tersebut dapat mencerminkan tantangan dalam pemulihan sektor pariwisata dan kuliner pasca pandemi serta perlunya penguatan daya saing dan inovasi sektor ini. Mengingat perannya dalam mendukung UMKM dan penciptaan lapangan kerja, sektor akomodasi dan makan minum perlu mendapatkan perhatian dalam strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

2.3.2.3 **Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif (ekraf) muncul ketika proses produksi menciptakan nilai tambah berbasis budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk mengembangkannya, diperlukan dukungan ide kreatif serta sumber daya, industri, pembiayaan, pemasaran, infrastruktur teknologi, dan sinergi kelembagaan antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Pemerintah Indonesia menetapkan 17 subsektor ekraf, termasuk aplikasi, desain, kriya, kuliner, fesyen, musik, film, hingga TV dan radio. Salah satu indikator keberhasilan ekraf adalah kontribusinya terhadap PDB/PDRB. Namun, karena keterbatasan data, dapat digunakan indikator alternatif berupa rasio pelaku ekraf terhadap total pelaku usaha, yaitu penduduk yang menjalankan usaha baik sendiri maupun dengan bantuan buruh. Data Kabupaten Bandung tahun 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Kehadiran ekonomi kreatif (ekraf) terjadi ketika sebuah proses produksi menghasilkan nilai tambah dari aspek budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itulah sebabnya, selain dari ide-ide kreatif, untuk mengembangkan ekonomi tersebut diperlukan topangan yang berasal dari sumber daya, industri, pembiayaan, pemasaran, infrastruktur teknologi, dan kelembagaan. Kelembagaan yang terdiri dari pemerintah, bisnis, intelektual, dan komunitas perlu terus bersinergi demi keberhasilan ekonomi kreatif. Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuh belas sub sektor ekonomi kreatif, yaitu: (1) aplikasi; (2) arsitektur; (3) desain komunikasi visual; (4) desain produk; (5) desain interior; (6) fotografi; (7) musik; (8) kriya; (9) kuliner; (10) fesyen; (11) penerbitan; (12) film, animasi, dan video; (13) periklanan; (14) permainan interaktif; (15) seni pertunjukan; (16) seni rupa; serta (17) TV dan radio.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan ekraf terhadap perekonomian nasional adalah proporsi PDB/PDRB dari sektor ekraf terhadap PDB/PDRB secara keseluruhan. Akan tetapi, karena keterbatasan data dan lain sebagainya, dapat dibuat indikator proksi berupa rasio pelaku ekraf terhadap total pelaku usaha. Adapun pelaku usaha yang dimaksud disini adalah penduduk yang tercatat berusaha baik yang dilakukan secara sendiri, maupun dibantu oleh buruh. Informasi mengenai hal ini untuk kabupaten Bandung dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101. Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Tahun	Total Pelaku Ekraf	Total Pelaku Usaha	Rasio Pelaku Ekraf Terhadap Total Pelaku Usaha
2021	5.554	533.080	1,04%
2022	11.913	543.742	2,19%
2023	13.128	554.616	2,37%
2024	11.345	514.302	2,21%

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, Tahun 2025 (diolah)

Keberlangsungan ekonomi kreatif di Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di Kabupaten Bandung, karena data terbaru (2020) menunjukkan bahwa sepersepuluh pelaku ekraf berada di daerah ini (11,18%). Adapun kota/kabupaten yang memiliki capaian lebih baik adalah Kota Bandung (17,59%).

2.3.2.4 Usaha Mikro Kuliner

Kuliner menjadi salah satu sub sektor ekraf yang perlu diberikan perhatian khusus, karena kontributor pelaku usaha pada sub sektor ini menjadi berada di posisi ketiga terbesar. Kondisi di Jawa Barat sendiri menunjukkan bahwa kuliner menempati posisi tertinggi kedua (13,94%) setelah musik (31,36%). Sekitar separuh dari usaha mikro dari tahun 2019-2024 berada dalam kategori kuliner. Jumlahnya jauh lebih besar daripada

agrobisnis, fesyen, kerajinan, dan lainnya. Informasi mengenai jumlah usaha kuliner, total keseluruhan usaha mikro, dan proporsi usaha kuliner dalam usaha mikro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102. Informasi Mengenai Usaha Mikro Kuliner

Tahun	Jumlah Usaha Mikro Kuliner	Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan	Proporsi Usaha Mikro Kuliner Terhadap Keseluruhan
2019	7.438	14.974	49,67%
2020	7.912	15.790	50,11%
2021	9.457	17.755	53,26%
2022	22.505	36.739	61,26%
2023	22.404	38.614	58,02%
2024	23.675	41.377	57,22%

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Koperasi Kabupaten Bandung, 2025 (diolah)

2.3.2.5 Volume Usaha Koperasi

Keberadaan koperasi berperan penting dalam mengembangkan ekonomi rakyat sesuai dengan cita- cita para pendahulu bangsa. Di tengah tekanan ideologi kapitalisme, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan meminimalkan terjadinya pihak-pihak yang terancam dipinggirkan. Salah satu indikator yang memperlihatkan kontribusi koperasi bagi perekonomian daerah adalah volume usaha koperasi terhadap PDRB. Data dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun cenderung terjadi penurunan volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Bandung, sekalipun ada peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Bahkan, jumlahnya pada 2024 turun drastis dan menjadi yang terendah selama lima tahun terakhir ini. Salah satu penyebab dari penurunan ini adalah koperasi yang naik kelas berpindah status kepemilikannya dari kota/kabupaten menjadi provinsi. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Bandung perlu melakukan intervensi seperti peningkatan daya saing koperasi, agar volume usaha setidaknya tidak menurun secara drastis. Besarnya volume usaha yang dimaksud mencerminkan total nilai penjualan yang akhirnya menjadi total penerimaan barang dan jasa pada setiap tahunnya.

Tabel 2.103. Informasi Mengenai Volume Usaha Koperasi

Tahun	Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (dalam Rp)	Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
2019	987.679.225.390	0,80%
2020	587.165.000.000	0,48%
2021	463.868.026.953	0,36%
2022	493.760.982.195	0,35%
2023	632.557.505.163	0,41%
2024	519.324.370.013	0,31%

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2024 (diolah)

2.3.2.6 Rasio Kewirausahaan

Wirausaha memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan usaha dan peningkatan produktivitas. Kontribusi ini diukur melalui rasio kewirausahaan, yakni perbandingan jumlah pengusaha baik pemula maupun mapan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap total angkatan kerja. Tren rasio kewirausahaan di daerah ini terus meningkat, karena pertumbuhan jumlah pelaku usaha dengan NIB melampaui pertumbuhan angkatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong tumbuhnya wirausaha baru serta penyederhanaan proses penerbitan NIB guna memperkuat basis kewirausahaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tabel 2.104. Rasio Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Bandung

Tahun	Total Pelaku Usaha (NIB)	Angkatan Kerja	Rasio Kewirusahaan
2020	15.755	1.717.376	0,92%
2021	17.755	1.824.927	0,97%
2022	36.739	1.808.799	2,03%
2023	38.614	1.878.757	2,06%
2024	71.011	1.910.662	3,72%

Sumber: Data Dikelola SIPD, Dinas Ketenagakerjaaan dan Dinas Koperasi UKM, Tahun 2024 (diolah)

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Bandung pada lima tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 0,92% (2020) menjadi 3,72% (2024). Kenaikan ini seiring dengan lonjakan jumlah pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dari 15.755 pada tahun 2020 menjadi 71.011 pada tahun 2024, sementara jumlah angkatan kerja relatif stabil. Tren ini mencerminkan semakin kuatnya minat dan kemampuan masyarakat dalam menjalankan usaha secara formal. Peningkatan ini juga menunjukkan keberhasilan intervensi pemerintah dalam mendorong iklim kewirausahaan, yang perlu terus diperkuat melalui kemudahan perizinan, pelatihan, serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Pinjaman tanpa agunan dan bunga merupakan salah satu program unggulan yang penting dari 57 rencana aksi Bupati Bandung untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di Kabupaten Bandung. Hal ini, terjadi karena program unggulan ini menurunkan biaya dan resiko bagi kegiatan wirausaha akibat bunga yang harus ditanggung saat mengajukan pinjaman. Di sisi lain, pinjaman diperlukan agar para wirausahawan mampu untuk meningkatkan kesempatan dalam memperluas skala usahanya. Adapun mekanisme dalam mengajukan pinjaman adalah dengan melibatkan lembaga keuangan perbankan, di mana bunga yang seharusnya ditanggung oleh peminjam menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab Bandung).

Program Dana Bergulir di Kabupaten Bandung merupakan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperkuat ketahanan keluarga, khususnya bagi kelompok rentan secara sosial dan ekonomi. Kebijakan ini berfokus pada penyediaan akses keuangan, terutama bagi pengusaha ultra mikro dan masyarakat miskin di pedesaan, yang seringkali terpaksa meminjam dari rentenir dengan suku bunga sangat tinggi. Dana bergulir ini bertujuan untuk memfasilitasi sumber investasi modal yang berkelanjutan bagi UMKM, koperasi, dan sektor lainnya, serta untuk memberantas praktik pinjaman ilegal seperti "bank emok" yang kerap berujung pada penagihan tidak wajar, intimidasi, bahkan pelecehan.

Program ini juga diharapkan secara perlahan akan mematikan kehadiran Bank Emok (Bank Keliling), yang mengenakan suku bunga yang tinggi bagi peminjam. Banyak yang terjerat oleh kehadiran bank ini, karena pinjaman diberikan dengan syarat yang mudah sebagai jaminan. Selain itu, kurangnya literasi keuangan dan akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan. Dengan demikian, diharapkan pinjaman yang diberikan dapat memperkokoh keberlangsungan usaha mikro yang menjadi penopang bagi perekonomian daerah. Hal ini terjadi, karena mereka tidak perlu lagi bergantung pada kehadiran bank keliling tersebut untuk memperluas skala usahanya.

Mekanisme penyaluran dana bergulir dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyedia dana dan lembaga keuangan lokal, seperti PT BPR Kerta Raharja dan PT Bank Jabar Banten, Tbk.. Pemerintah mensubsidi bunga dan biaya administrasi untuk bank daerah, sementara bank bertanggung jawab melaksanakan penyaluran, seleksi debitur berdasarkan ketentuan perbankan, serta pemulihan pinjaman dengan menjaga tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) tetap rendah (<5%). UMKM yang memenuhi syarat dapat mengajukan dana tanpa bunga, biaya administrasi, tanpa jaminan, dan persyaratan yang ringan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Program ini juga didukung oleh pemberdayaan UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung untuk memastikan keberlanjutan usaha penerima manfaat.

Kinerja program dana bergulir menunjukkan hasil positif hingga Agustus 2024, perbankan daerah telah menyalurkan sekitar Rp 71 miliar, melampaui target sebesar 101,42%, dengan tingkat NPL yang terjaga di 2,05%. Sekitar 33.965 penerima manfaat atau 88% dari total UMKM tersertifikasi telah menerima dana tersebut, dengan mayoritas meminjam antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta untuk jangka waktu 10-12 bulan. Selain fasilitasi modal, Pemerintah Kabupaten Bandung juga menerapkan strategi konvergen seperti "Kabupaten Bandung Bangkit" yang merupakan ekosistem pemberdayaan UMKM, dengan Pusat Layanan Bisnis Regional Terpadu (PLUT) sebagai pusatnya,

menyediakan berbagai layanan mulai dari inkubasi bisnis hingga digitalisasi. Kebijakan dana bergulir ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru, serta mengembangkan kewirausahaan pedesaan.

2.3.2.7 Jenis Usaha Mikro Unggulan

Secara klasifikasi usaha mikro yang ada di Kabupaten Bandung didominasi oleh usaha di sektor kuliner yang mencapai 57,22% pada tahun 2024. Walaupun demikian, jika dibandingkan tren dari tahun 2020-2022, maka grafiknya akan menurun. Adapun Usaha Mikro pada keseluruhan sektor mengalami lonjakan lebih dari dua kali lipatnya dari tahun 2021 menuju 2022, dengan pertumbuhan sebesar 106,92%. Pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2019, yaitu hanya sebesar 1,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut disajikan data jumlah usaha mikro berdasarkan jenis usahanya selama lima tahun terakhir ini.

Tabel 2.105. Jenis Usaha Mikro Unggulan

Jenis Usaha	TAHUN									
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Agrobisnis	3874	25,87	4030	25,52	4418	12,03	4289	11,21	4566	11,04
Fashion	1857	12,40	1983	12,56	5956	16,21	3555	9,29	3885	9,39
Kerajinan	400	2,67	416	2,63	2063	5,62	326	0,85	345	0,83
Kuliner	7438	49,67	7912	50,11	22505	61,27	22040	57,62	23675	57,22
Lainnya	1405	9,38	1449	9,18	1791	4,88	8040	21,02	8906	21,52
Total	14974	100	15790	100	36733	100	38250	100	41377	100

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, Tahun 2025

Dalam rangka mendorong kemajuan dan daya saing usaha mikro pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM, Kabupaten Bandung perlu menaruh fokus untuk mengembangkan usaha kuliner, baik secara kuantitas, maupun juga kualitas. Dengan demikian, tren selama lima tahun mendatang proporsi usaha mikro kuliner akan semakin mendominasi untuk menopang perekonomian Kabupaten Bandung. Dengan mengasumsikan selama lima tahun kedepan, UMKM hanya tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sangat kecil, maka selama lima tahun mendatang usaha kuliner harus bertambah sekitar 164-997 unit per tahunnya. Akan tetapi, jika pertumbuhan UMKM konsisten berada di kisaran sekitar 10% per tahunnya, maka usaha kuliner harus bertambah setidaknya sebesar 1531-3849 unit setiap tahunnya.

2.3.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK, semakin

besar pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

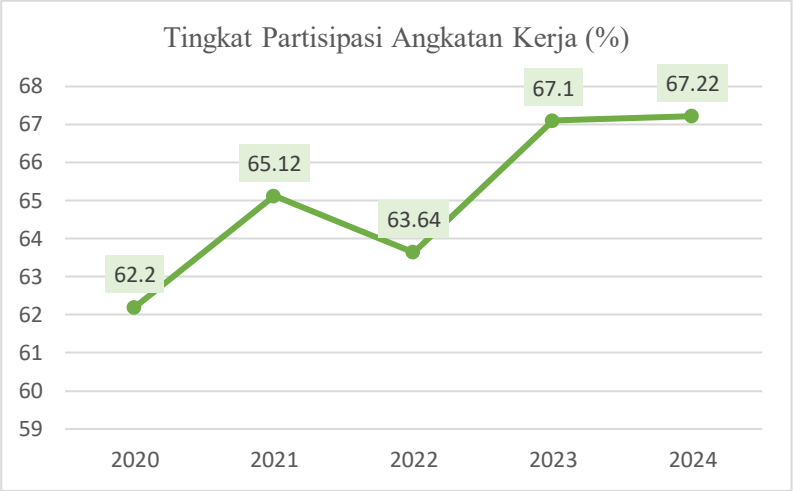

Gambar 2.98. Gambar Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2020 – 2024 (%)
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS, 2025 (diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bandung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat pada dua tahun terakhir. Setelah sempat turun dari 65,12% pada tahun 2021 menjadi 63,64% pada tahun 2022, TPAK kembali naik signifikan menjadi 67,1% pada tahun 2023 dan mencapai 67,22% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Hal ini menjadi indikasi positif dalam pemulihan dan penguatan pasar tenaga kerja di daerah, serta menunjukkan potensi produktif yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan ketenagakerjaan.

2.3.2.9 ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*)

Nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) merupakan indikator untuk menilai efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin rendah nilai ICOR, maka investasi yang dilakukan semakin efisien dalam menghasilkan output atau pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut ini disajikan data ICOR Kabupaten Bandung tahun 2019–2024 yang dapat menggambarkan dinamika efisiensi investasi daerah Kabupaten Bandung.

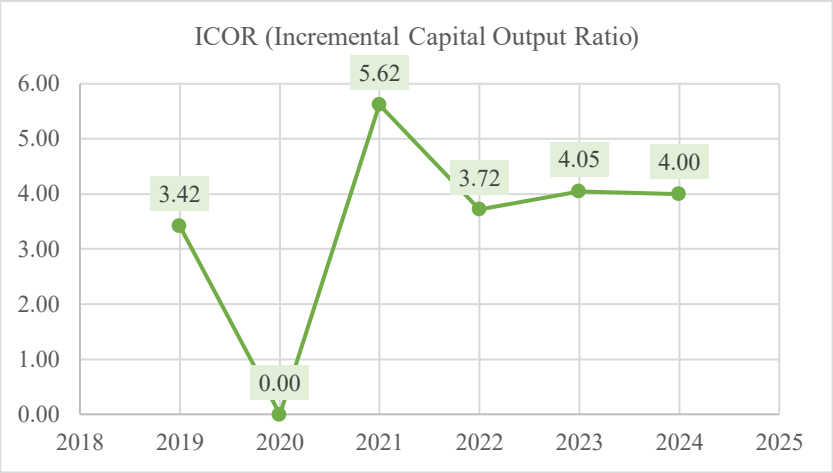

Gambar 2.99. Nilai ICOR Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024
Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Terjadi anomali pada tahun 2020, dimana PMTB menurun dan secara bersamaan PDRB meningkat. Hal ini menyebabkan nilai ICOR negatif dan tidak memiliki arti yang sama, itulah sebabnya, data tidak perlu untuk ditampilkan. Data ICOR Kabupaten Bandung pada tahun 2021-2024 cenderung menurun dan stabil di kisaran 4,00-4,05 pada tahun 2023-2024, yang masih dalam batas efisien moderat. Kondisi ini mencerminkan bahwa efisiensi investasi di Kabupaten Bandung sempat terganggu, namun mulai kembali membaik. Untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut, perlu didorong peningkatan kualitas perencanaan investasi, penguatan prodiktivitas sektor riil, serta optimalisasi inovasi dan teknologi dalam proyek-proyek pembangunan daerah.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau dan Biru

Dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pasti menghadapi *trade-off* terhadap aspek-aspek tertentu. Di sisi lain, aspek-aspek tersebut tetap harus dijaga, walaupun secara terpaksa harus dikorbankan sebagai konsekuensi dari berjalannya perekonomian. Bahkan, perlu diupayakan agar berbagai aspek tersebut justru mengalami perbaikan atau kualitasnya meningkat. Hal inilah yang mendasari lahirnya konsep ekonomi berkelanjutan, di mana bukan sekadar mengalami kemajuan dalam aktivitas ekonomi, melainkan juga aspek sosial dan lingkungan ikut meningkat kualitasnya. Peningkatan kedua aspek ini bisa terjadi baik akibat kemajuan ekonomi itu sendiri, maupun karena aspek-aspek lainnya. Ekonomi berkelanjutan ini digambarkan dalam sebuah indikator ekonomi hijau. Berikut adalah perolehan indeks ekonomi hijau beserta dengan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya.

Tabel 2.106. Status Perhitungan Indeks Ekonomi Hijau untuk Kabupaten Bandung

Indikator-Indikator	Indeks Ekonomi Hijau			
	Unit	Ambang Minimum	Ambang Maksimum	Ketersediaan Data
Pilar Lingkungan				
tutupan lahan	%	0.5	93.17	tidak tersedia
bauran energi terbarukan	%	0	42	tidak tersedia
kualitas air permukaan	parameter BOD: mg/L	6	2	tersedia
kualitas udara	parameter NO2: µg/m3	40	0.19	tersedia
persentase pengurangan emisi GHG	%	0.37	97.25	tidak tersedia
penurunan tutupan lahan gambut	%	100	9	tidak tersedia
Pilar Ekonomi				
PDRB ADHB Per Kapita	ADHB: juta Rp	8.20	208.31	tersedia
produktivitas padi	ton/hektar/tahun	5	11	tersedia
produktivitas kelapa sawit	ton/hektar/tahun	2	5	tidak tersedia
produktivitas akuakultur/perikanan	ton/hektar/tahun	3	19	tersedia
produktivitas tenaga kerja sektor industri	juta Rp/orang	20	200	tersedia
produktivitas tenaga kerja sektor jasa	juta Rp/orang	20	200	tersedia
Pilar Sosial				
rata-rata lama sekolah	tahun	2	12	tersedia
angka harapan hidup	tahun	55	75.5	tersedia
tingkat kemiskinan	%	13	0	tersedia
tingkat pengangguran terbuka	%	15	3	tersedia

*perhitungan untuk masing-masing pilar hanya melibatkan indikator-indikator yang tersedia.

Tabel 2.107. Perolehan Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

Skor	Indeks Ekonomi Hijau			
	2021	2022	2023	2024
Pilar Lingkungan	4.80	52.17	29.54	51.03
Pilar Ekonomi	22.21	23.29	24.80	25.92
Pilar Sosial (Skor)	65.67	69.51	71.61	72.85
Skor Indeks GEI	**22.20**	**46.98**	**36.53**	**47.86**

*Angka 2024 merupakan hasil proyeksi.
*Bobot untuk pilar lingkungan (50%), ekonomi (30%), dan sosial (20%)
Sumber: Pemprov Jabar, Tahun 2025

Indeks ekonomi hijau adalah indikator yang mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah yang berkelanjutan dan tidak mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Hal ini menjadi penting, karena kenyataannya terdapat *trade-off* antara ekonomi dan lingkungan.

Fokus *blue economy* dan *green economy* sedikit berbeda, demikian juga dengan tujuan dan prioritas sektor ekonomi. Bila *green economy* Indonesia fokus pada penurunan risiko kerusakan lingkungan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, maka *blue economy* lebih difokuskan pada pengembangan dan pengelolaan sektor kelautan dan maritim.

Terdapat empat strategi dalam implementasi *blue economy* di Indonesia. Pertama, membenahi dan mengembangkan pengelolaan laut dan pesisir. Pengelolaan ini mencakup rehabilitasi mangrove, tata ruang laut, dan pesisir serta penangkapan ikan. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan akses air bersih. Aspek ini diperlukan untuk melindungi ekosistem dari kerusakan lingkungan. Hal ini juga merupakan alternatif solusi untuk menjamin kualitas hidup masyarakat sekitar. Ketiga, perbaikan informasi dan pendataan sebagai rujukan perumusan kebijakan, rencana pengembangan, dan strategi perlindungan kelautan. Keempat, memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Momen ini digunakan untuk memulai penerapan implementasi *blue economy*. Implementasi *green economy* dan *blue economy* juga akan mendukung transformasi ekonomi Indonesia, sekaligus berkontribusi dalam peningkatan nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan risiliensi ekonomi masyarakat terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan tinjauan terhadap konsep ekonomi hijau Kabupaten Bandung masih dalam tahap awal pengembangan dan penyiapan serta lebih mengarah kepada konsep *clean economy* atau ekonomi bersih yaitu adalah suatu sistem ekonomi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan kesejahteraan manusia.

Pengembangan ekonomi di Kabupaten Bandung dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk impelementasi yang disesuaikan dengan keunggulan dan keragaman ekonomi di Kabupaten Bandung, antara lain *green agriculture* atau pertanian hijau, ekonomi sirkular, *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan, *green tech* atau teknologi hijau, *low waste processes* atau proses produksi rendah limbah, green infrastructure atau infrastruktur hijau, serta *nature-based solution* atau solusi berbasis alam.

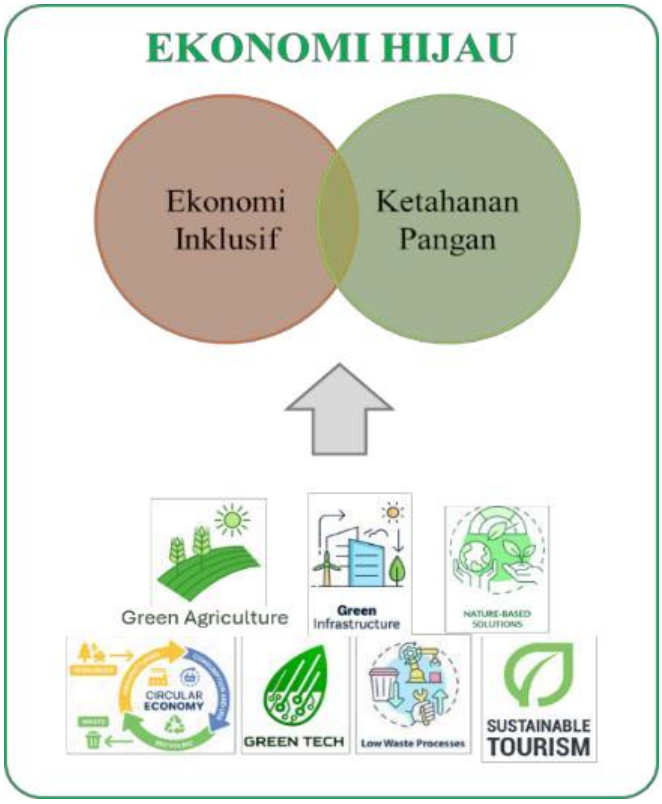

Gambar 2.100. Konsep Pengembangan Ekonomi Kabupaten Bandung Berbasis Ekonomi Hijau, Ekonomi Inklusif dan Ketahanan Pangan
Sumber: Analisis Bapperida, 2025

2.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.4.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

PDRB dapat diukur dengan menggunakan tiga pendekatan, dimana salah satunya adalah metode pengeluaran. Salah satu komponen penting di dalamnya yang menjadi perhatian bagi keberlangsungan ekonomi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Perubahan inventori merupakan indikator lainnya dalam komponen investasi yang nilainya bisa positif atau negatif dengan besaran yang relatif kecil sehingga tidak perlu dianalisis. Itu berarti, persentase kontribusi komponen tersebut terhadap PDRB menggambarkan performa dari investasi di suatu daerah. Adapun rata-rata pertumbuhan PMTB ADHB dan ADHK berturut-turut sebesar 4,81% dan 1,85% per tahun. Tabel 2.88 menunjukkan besarnya indikator ini selama lima tahun terakhir ini.

Tabel 2.108. Pertumbuhan PMTB Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024

Tahun	PMTB ADHB (Milyar Rupiah)	PMTB ADHK (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	
			PMTB ADHB	PMTB ADHK
2019	25.122,73	16.892,18	6,32	3,48
2020	23.516,69	15.796,48	-6,39	-6,49
2021	25.161,50	16.220,13	6,99	2,68
2022	27.035,80	16.703,05	7,45	2,98
2023	29.650,71	17.804,04	9,67	6,59
2024	31.545,80	18.728,26	6,39	5,19
		Rata-Rata	5,07	2,41

Sumber: Data Dikelola SIPD, Data BPS,2025

Data di atas menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan guncangan yang sangat besar terhadap investasi. Di sisi lain, komponen ini selama beberapa tahun terakhir berkontribusi terhadap seperlima perekonomian baik dilihat dalam nilai rillnya (18,89%-20,46%), maupun secara nominal (18,91%-20,26%). Adapun laju pertumbuhan PMTB cenderung lebih lambat daripada komponen-komponen lainnya secara keseluruhan, baik dilihat secara nilai rillnya, maupun nominalnya.

2.3.4.2 Ekspor Barang dan Jasa

Agregat nilai ekspor non-migas Kabupaten Bandung mengalami tren meningkat pada periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2024. Pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas berpengaruh terhadap performa perdagangan internasional. Itulah sebabnya, ekspor mengalami penurunan yang cukup tajam 20.06% pada tahun 2020. Total ekspor barang dan jasa menurun dari Rp 13,38 triliun (2019) menjadi Rp 10,70 triliun (2020) atau mengalami penurunan sekitar Rp 2,68 triliun. Akan tetapi, performanya mengalami pemulihan pada tahun 2021, sehingga nilainya bisa mendekati tahun 2019, sebesar Rp 13,48 triliun. Terjadi tren peningkatan ekspor secara terus menerus dari tahun 2021 hingga 2024. Bahkan, pada tahun 2024 nilainya menembus Rp 26,81 triliun. Peningkatan ini sangatlah besar, karena mengalami persentase peningkatan 57,95% dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar Rp 16,98 triliun. Adapun industri tekstil selalu menjadi andalan bagi ekspor dari daerah ini.

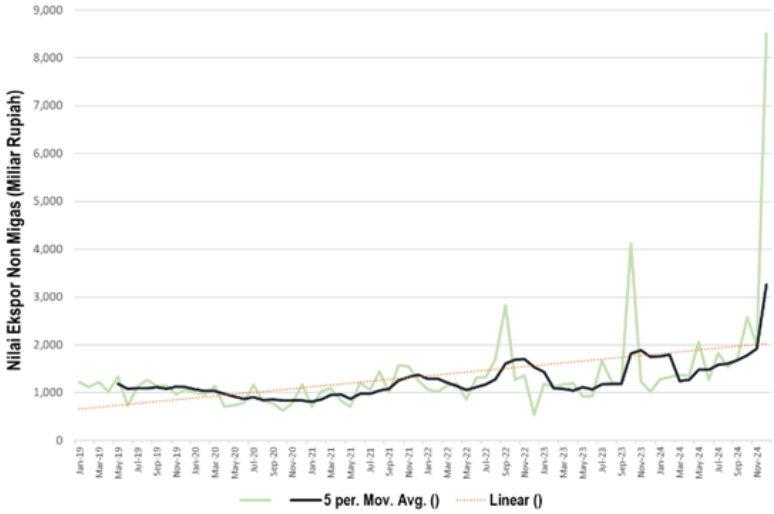

Gambar 2.101. Perkembangan Nilai Ekspor Non-Migas Kabupaten Bandung Bulanan 2019 – 2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung,Tahun 2025 (diolah)

2.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perlu dikembangkan secara terpadu untuk mewujudkan wilayah yang maju, inklusif, dan berkelanjutan,

sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Bandung 2023-2043. Sistem pusat permukiman dalam kabupaten ini disusun berdasarkan hierarki pelayanan yang mencerminkan keterkaitan fungsional antar kawasan perkotaan, baik kondisi eksisting maupun rencana pengembangan, dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu untuk mendukung simpul pelayanan sosial-ekonomi masyarakat. Berikut adalah sistem permukiman perkotaan di Kabupaten Bandung beserta arahan fungsi dan kondisi eksistingnya.

Tabel 2.109. Arahan Fungsi dan Kondisi Eksisting Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung

	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Kawasan
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	PKN merupakan Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.	Soreang-Kutawaringin-Katapang-Margahayu-Margaasih	**1. Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur yang Pesat** - **Pusat Administrasi dan Layanan Publik**: Soreang sebagai ibu kota kabupaten, menjadi magnet bagi aktivitas ekonomi dan sosial. Keberadaan kantor-kantor pemerintahan, bank, dan pusat layanan lainnya menjadikan kawasan ini sebagai pusat gravitasi. - **Aksesibilitas Tinggi**: Pembangunan Jalan Tol Soroja (Soreang-Pasirkoja) telah menjadi katalisator utama. Tol ini memangkas waktu tempuh dari Bandung ke Soreang secara drastis, yang berdampak pada peningkatan mobilitas penduduk dan distribusi barang, serta memicu pertumbuhan properti dan bisnis di sepanjang jalur tol. - **Pusat Olahraga dan Industri**: Keberadaan Stadion Si Jalak Harupat di Kutawaringin dan kawasan industri di Margaasih memberikan nilai tambah fungsional. Stadion tersebut menjadi pusat kegiatan olahraga dan hiburan berskala nasional, sedangkan area industri menjadi penopang ekonomi dengan menyerap banyak tenaga kerja. **2. Tantangan dan Isu Lingkungan** - **Konversi Lahan**: Pertumbuhan masif ini membawa dampak negatif, terutama pada konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan area komersial. Peningkatan tekanan penduduk, terutama di Katapang dan Margahayu, telah mengubah bentang alam dan mengurangi lahan hijau, yang dapat memengaruhi sistem drainase dan ketahanan pangan. - **Kepadatan Penduduk**: Tingginya kepadatan penduduk di beberapa kecamatan, khususnya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, menyebabkan tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah. - **Kemacetan Lalu Lintas**: Meskipun infrastruktur jalan sudah berkembang, volume kendaraan yang terus

	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Kawasan
			meningkat sering kali menyebabkan kemacetan, terutama di Soreang dan persimpangan-persimpangan penting lainnya.
		Cileunyi - Rancaekek	- **Aglomerasi Perkotaan**: Cileunyi dan Rancaekek telah menjadi wilayah "peri-urban" atau pinggiran kota Bandung yang padat penduduk. Pertumbuhan populasi di area ini sangat tinggi, didorong oleh masuknya penduduk pendatang yang bekerja di sektor industri. - **Pusat Industri**: Rancaekek, khususnya, sudah lama dikenal sebagai kawasan industri tekstil. Keberadaan pabrik-pabrik ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu perkembangan pesat di sekitarnya. Aktivitas pabrik ini juga menjadi penyebab utama kepadatan dan kemacetan lalu lintas, terutama saat jam masuk dan pulang kerja. - **Infrastruktur dan Transportasi**: Kawasan ini memiliki aksesibilitas yang tinggi ke Kota Bandung dan wilayah timur Jawa Barat (seperti Garut dan Tasikmalaya) berkat dukungan infrastruktur jalan dan tol. Namun, tingginya volume kendaraan sering kali menyebabkan kemacetan parah di Jalan Raya Rancaekek. Di sisi lain, kawasan ini juga merupakan lokasi strategis untuk pengembangan transportasi, seperti rencana proyek Transit Oriented Development (TOD) Tegalluar yang terintegrasi dengan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC). - **Masalah Lingkungan**: Peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun (pemukiman dan industri) menjadi isu serius di kawasan ini. Kondisi ini menyebabkan perubahan lingkungan yang signifikan, di mana area hijau dan resapan air semakin berkurang.
		Cicalengka	Cicalengka merupakan salah satu kecamatan di bagian timur Kabupaten Bandung yang memiliki peran strategis, terutama sebagai pintu gerbang menuju wilayah Priangan Timur (seperti Garut dan Tasikmalaya). Kawasan ini memiliki karakteristik unik, yang didominasi oleh percampuran antara kegiatan industri, pertanian, dan permukiman. 1. Pusat Industri dan Perdagangan **Kawasan Industri**: Cicalengka, terutama di bagian utara yang berbatasan dengan Rancaekek, merupakan bagian dari klaster industri tekstil di Kabupaten Bandung. Keberadaan pabrik-pabrik ini menjadi motor penggerak ekonomi utama, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan sekitarnya. **Jalur Perdagangan**: Cicalengka berada di jalur utama yang menghubungkan Kota Bandung dengan wilayah timur Jawa Barat. Hal ini menjadikan kawasan ini sebagai titik transit dan perdagangan yang penting, ditandai dengan banyaknya toko, pasar, dan pusat niaga yang berkembang di sepanjang jalan raya.

	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Kawasan
			2. **Pertanian dan Lingkungan** **Lahan Pertanian**: Meskipun sebagian besar wilayahnya telah berkembang menjadi area permukiman dan industri, masih terdapat lahan-lahan pertanian produktif, terutama di bagian selatan dan timur Cicalengka. Pertanian, seperti sawah dan kebun sayuran, masih menjadi mata pencaharian bagi sebagian penduduk. **Potensi Bencana**: Kondisi geografisnya yang berada di dataran rendah dan dikelilingi perbukitan membuat beberapa area di Cicalengka rentan terhadap banjir, terutama saat curah hujan tinggi, karena sistem drainase yang belum optimal dan alih fungsi lahan. 3. Infrastruktur dan Transportasi **Aksesibilitas**: Cicalengka dilintasi oleh jalur kereta api dan Jalan Raya Nasional, yang menjadikannya memiliki aksesibilitas yang baik. Stasiun Cicalengka adalah salah satu stasiun kereta api yang cukup ramai, melayani rute komuter Bandung Raya dan rute jarak jauh. **Kepadatan dan Kemacetan**: Peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas ekonomi, terutama di area pasar dan persimpangan, sering kali menyebabkan kemacetan lalu lintas, khususnya pada jam-jam sibuk.
		Majalaya-Ciparay	1. **Pusat Industri Tekstil**: Majalaya memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat industri tekstil terbesar di Jawa Barat, bahkan dikenal dengan sebutan "Kota Dollar" pada masa kejayaannya. Meskipun beberapa pabrik telah tutup, banyak industri rumahan dan pabrik skala kecil masih beroperasi. Aktivitas industri ini menarik banyak tenaga kerja dari dalam maupun luar daerah, sehingga menjadikan Majalaya sangat padat. 2. **Perdagangan dan Pasar**: Sebagai pusat industri, Majalaya juga menjadi pusat perdagangan yang ramai. Pasar Majalaya adalah salah satu yang terbesar di Kabupaten Bandung bagian timur, menjadi pusat distribusi barang dan kebutuhan sehari-hari bagi warga sekitar. 3. **Tantangan Lingkungan**: Majalaya menghadapi masalah lingkungan yang serius, terutama pencemaran sungai Citarum akibat limbah cair dari industri tekstil. Upaya revitalisasi Citarum terus dilakukan, tetapi dampak pencemaran masih terasa. Selain itu, kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas juga menjadi tantangan harian. 4. Ciparay berperan sebagai wilayah penyangga bagi Majalaya. Banyak karyawan yang bekerja di Majalaya memilih untuk tinggal di Ciparay karena lokasinya yang berdekatan. Hal ini mendorong pertumbuhan pemukiman dan aktivitas komersial di sepanjang jalur utama yang menghubungkan kedua kecamatan ini.
		Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang	**1. Kawasan Rawan Banjir** tiga kecamatan ini dikenal sebagai langganan banjir. Sebagai cekungan air dari hulu Sungai

	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Kawasan
			Citarum, daerah ini seringkali tergenang air saat musim hujan. Faktor utamanya adalah: - Topografi: Berada di dataran rendah dan cekungan, menjadikan area ini sebagai lokasi berkumpulnya aliran air dari wilayah lain. - Pendangkalan Sungai Citarum: Sedimentasi dan sampah membuat daya tampung sungai menurun, sehingga meluap saat debit air meningkat. - Alih Fungsi Lahan: Pembangunan yang pesat di wilayah hulu dan sekitarnya mengurangi area resapan air, sehingga mempercepat laju aliran air ke daerah hilir. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan oleh pemerintah, seperti pembangunan Kolam Retensi Andir, masalah banjir tetap menjadi tantangan serius yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan perekonomian warga. **2. Dinamika Ekonomi dan Populasi** - Pusat Perdagangan dan Jasa: Baleendah memiliki peran sebagai pusat perdagangan lokal dan regional, dengan Pasar Baleendah menjadi salah satu yang terbesar di Kabupaten Bandung. - Kawasan Industri: Dayeuhkolot merupakan zona industri lama, terutama tekstil dan garmen, yang telah beroperasi sejak lama. Keberadaan pabrik-pabrik ini menjadi motor ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. - Pertumbuhan Perumahan: Bojongsoang, yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, mengalami pertumbuhan pesat di sektor perumahan. Banyak perumahan dan klaster baru bermunculan di wilayah ini, menjadikannya sebagai destinasi utama bagi penduduk yang bekerja di Kota Bandung. **3. Masalah Infrastruktur** - Kemacetan Lalu Lintas: Aglomerasi ini adalah salah satu yang terpadat di Kabupaten Bandung. Volume kendaraan yang tinggi, terutama dari dan menuju Kota Bandung, menyebabkan kemacetan parah di jalan utama seperti Jalan Raya Dayeuhkolot dan Jalan Bojongsoang. - Pengelolaan Sampah dan Sanitasi: Tingginya kepadatan penduduk menciptakan masalah baru terkait pengelolaan sampah dan sanitasi yang belum optimal, menambah beban lingkungan di area yang sudah rentan banjir.
		Banjaran.	**1. Pusat Ekonomi dan Perdagangan** **Aktivitas Perdagangan**: Banjaran adalah pusat ekonomi yang ramai, dengan Pasar Banjaran sebagai motor utamanya. Pasar ini menjadi salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Bandung bagian selatan, yang melayani kebutuhan sehari-hari warga di Banjaran dan kecamatan sekitarnya. **Industri Tekstil**: Sejak lama, Banjaran dikenal sebagai kawasan industri, terutama tekstil. Banyak pabrik tekstil skala kecil dan menengah yang beroperasi di wilayah ini, menciptakan

	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Kawasan
			lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. **2. Kepadatan Penduduk dan Permukiman** **Pertumbuhan Permukiman**: Tingginya aktivitas ekonomi dan industri menarik banyak penduduk untuk tinggal di Banjaran. Hal ini menyebabkan pesatnya pertumbuhan permukiman, baik perumahan formal maupun informal, yang sering kali berdampak pada alih fungsi lahan pertanian. **Infrastruktur Dasar**: Peningkatan jumlah penduduk menimbulkan tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih dan pengelolaan sampah. Tata kelola lingkungan yang belum optimal menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. **3. Kondisi Transportasi** **Kemacetan Lalu Lintas**: Sebagai pusat keramaian, Banjaran menghadapi masalah kemacetan lalu lintas, terutama di sekitar area pasar dan persimpangan. Volume kendaraan yang padat, ditambah dengan aktivitas perdagangan di pinggir jalan, sering kali memperlambat arus lalu lintas. **Aksesibilitas**: Banjaran memiliki akses yang cukup baik menuju wilayah lain di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, tetapi belum terintegrasi dengan jaringan transportasi massal yang memadai.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) PKL merupakan Kawasan perkotaan yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Wilayah yang direncanakan:		Ciwidey	**1. Pariwisata dan Ekonomi** **Sentra Wisata Alam:** Ciwidey adalah pusat pariwisata utama di Bandung Selatan. Keindahan alamnya yang khas, seperti Kawah Putih, Situ Patenggang, dan perkebunan teh yang membentang luas, menarik ribuan wisatawan setiap hari, baik dari dalam maupun luar kota. **Agrowisata**: Sektor agrowisata berkembang pesat. Selain teh, kawasan ini juga terkenal dengan pertanian stroberi, sayuran, dan komoditas hortikultura lainnya. Banyak petani yang membuka kebunnya untuk dikunjungi wisatawan, yang dapat memetik buah stroberi sendiri, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal. **Potensi Ekonomi Lokal**: Tingginya kunjungan wisatawan mendorong pertumbuhan sektor pendukung, seperti penginapan (homestay, hotel), restoran, dan toko oleh-oleh. Hal ini secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. **2. Kepadatan dan Lalu Lintas** **Kemacetan**: Tingginya volume kendaraan, terutama pada akhir pekan dan hari libur, seringkali menyebabkan kemacetan parah di jalan menuju Ciwidey dan area wisata. Kondisi jalan yang sempit dan berliku serta aktivitas parkir di bahu jalan menjadi faktor utama kemacetan. **Minimnya Angkutan Umum**: Aksesibilitas dengan angkutan umum masih terbatas, membuat mayoritas wisatawan menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini menambah kepadatan lalu lintas dan beban jalan. **3. Pertanian dan Lingkungan**

	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Kawasan
			Pertanian Unggulan: Kondisi tanah yang subur dan iklim yang cocok menjadikan Ciwidey sebagai kawasan pertanian yang produktif. Perkebunan teh yang terhampar luas tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan konservasi dan resapan air. **Tantangan Lingkungan**: Pembangunan pariwisata yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif, seperti alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan jumlah sampah. Diperlukan tata kelola yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
		Pangalengan.	**1. Sektor Agrobisnis dan Pertanian** **Pusat Agrobisnis**: Pengalengan dikenal sebagai produsen utama susu sapi perah di Jawa Barat. Keberadaan koperasi peternak seperti KPBS (Koperasi Peternak Bandung Selatan) menjadi motor penggerak ekonomi utama bagi ribuan peternak di wilayah ini. **Perkebunan Teh dan Kopi:** Lahan di Pengalengan didominasi oleh perkebunan teh yang membentang luas. Teh yang dihasilkan dikenal memiliki kualitas tinggi. Selain itu, kopi arabika dari Pengalengan juga mulai mendapat pengakuan, menambah keragaman produk pertanian di kawasan ini. Pertanian Sayuran: Tanah yang subur dan iklim dingin mendukung budidaya berbagai jenis sayuran, seperti kentang, wortel, dan kol. Hasil pertanian ini didistribusikan ke berbagai kota, termasuk Bandung dan Jakarta. **2. Pariwisata** **Wisata Alam**: Pengalengan menawarkan panorama alam yang memukau. Destinasi wisata seperti Situ Cileunca, Situ Cipanunjang, dan perkebunan teh menarik banyak wisatawan, terutama dari dalam kota. Aktivitas seperti rafting, camping, dan berkeliling kebun teh menjadi daya tarik utama. **Potensi Ekowisata**: Keberadaan danau dan hutan pinus memberikan potensi besar untuk pengembangan ekowisata yang berbasis alam. Beberapa tempat wisata telah menawarkan paket-paket edukasi tentang peternakan dan perkebunan. **3. Kondisi Infrastruktur dan Lalu Lintas** **Aksesibilitas Jalan**: Meskipun memiliki potensi besar, akses jalan menuju Pengalengan seringkali menjadi tantangan. Jalan yang berliku dan menanjak, ditambah dengan volume kendaraan yang meningkat, sering menyebabkan kemacetan, terutama saat musim liburan. **Jalur Distribusi:** Keterbatasan infrastruktur jalan juga dapat menghambat distribusi hasil pertanian, yang merupakan komoditas utama dari wilayah ini.

Sumber: Data Dikelola SIPD, RTRW Kab. Bandung 2023-2043, Bapperida (Data Diolah), 2025

Berdasarkan data kondisi eksisting perkotaan di Kabupaten Bandung, langkah selanjutnya dalam perencanaan pembangunan adalah mengukur kualitas perkotaan secara kuantitatif melalui Indeks Pengembangan Wilayah dan Indeks Kualitas Infrastruktur.

Indeks ini akan menjadi indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana kawasan-kawasan seperti PKN (Pusat Kegiatan Nasional) Soreang-Kutawaringin dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal) seperti Banjaran dan Ciwidey telah berkembang. Pengukuran ini akan mencakup evaluasi terhadap dukungan infrastruktur, seperti ketersediaan dan kualitas jalan, transportasi, sanitasi, dan pengelolaan limbah, yang secara langsung memengaruhi aktivitas ekonomi dan kualitas pelayanan publik di setiap wilayah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci dan terukur tentang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Di sisi lain, perdesaan diarahkan menuju kemandirian yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas desa dan peningkatan jumlah desa mandiri setiap tahunnya. Akses rumah tangga terhadap hunian layak juga menjadi salah satu indikator penting yang menggambarkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Ketiga indikator tersebut secara bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan pembangunan wilayah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

2.3.5.1 Indeks Pengembangan Wilayah

Indeks Pengembangan Wilayah (IPW) merupakan ukuran komprehensif yang mencerminkan kemajuan pembangunan suatu daerah melalui indikator-indikator strategis, seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI), Indeks Risiko Bencana (IRB), dan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dan efektivitas program pembangunan wilayah dari tahun ke tahun. Data periode 2020–2024 menunjukkan dinamika perkembangan yang bervariasi antar indikator, mencerminkan tantangan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung. Analisis terhadap tren ini penting untuk memahami sejauh mana target RPJMD tercapai serta mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Berikut adalah rincian capaian Indeks Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung dari tahun 2020 hingga 2024.

Gambar 2.102. Pengembangan Kawasan Kabupaten Bandung
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Kawasan Inklusif yang mendukung pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan yang dikembangkan harus mampu mengimbangi dampak kemungkinan adanya pengurasan sumber daya oleh pusat pertumbuhan yang dapat menyebabkan ketimpangan semakin lebar. Implementasi RTRW/RDTR harus dapat menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan "kehidupan" dimana daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Bandung telah terlampaui sehingga perlu perubahan kebiasaan penyelenggaraan pemerintahan melalui implementasi turunan regulasi yang harus bersifat operasional untuk pemanfaatan dan pengendalian ruang. Dalam jangka panjang, perlu digunakan instrumen pengendali sebagai acuan pengendalian penyelenggaraan penataan ruang dengan menggunakan peta Ecoregion dan Peta Jasa Lingkungan untuk Kabupaten Bandung.

Tabel 2.110. Indeks Pengembangan Wilayah 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		2022		2023			2024		
		2020	2021	Target	Realisasi	Murni	Perubahan	Realiasasi	Murni	Perubahan	Realiasasi
IPW	Poin	N/A	52.65	54.59	54,44	55.77	58.07	59.69	57.12	59.86	62.33
IKLH	Poin	53.57	52.59	53.29	56.03	53.68	56.04	56.58	53.98	56.05	59.87
IKI	Poin	63.55	64.82	65.97	64.02	67.22	65.62	65.77	68.46	67.62	64.94
IRB	Poin	174	170	165	145.94	160	142.06	132	155	138.19	117.13
IDM	Poin	0.7524	0.7767	0.81	0.8044	0.8165	0.8165	82.4	0.8307	0.8307	83.07

Sumber: Data Dikelola SIPD, Bapperida (Data Diolah), 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa Indeks Pengembangan Wilayah (IPW) Kabupaten Bandung mengalami peningkatan signifikan dari 52,65 poin pada tahun 2021 menjadi 62,33 poin pada tahun 2024. Meskipun sempat terjadi fluktuasi pada tahun 2022, tren positif ini menunjukkan bahwa pembangunan wilayah berjalan sesuai arahan RPJMD, meski masih terdapat ruang untuk perbaikan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan pemulihan yang konsisten, meningkat dari 52,59 poin (2021) menjadi 59,87 poin (2024). Sementara itu, Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) relatif stabil, meskipun pada tahun 2022 realisasinya (64,02 poin) belum mencapai target (65,97 poin). Namun, nilai "murni" yang lebih tinggi (67,22 poin) menunjukkan bahwa potensi optimalisasi infrastruktur sebenarnya ada, tetapi terkendala oleh faktor teknis atau non-teknis. Penurunan yang cukup drastis terlihat pada Indeks Risiko Bencana (IRB), dari 174 poin (2020) menjadi 117,13 poin (2024). Hal ini mencerminkan keberhasilan program mitigasi bencana dan peningkatan ketahanan wilayah. Adapun Indeks Desa Membangun (IDM) mengalami peningkatan dari 0,7524 (2020) menjadi 0,8165 (2022), menunjukkan kemajuan dalam penguatan kapasitas desa. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung telah bergerak ke arah yang positif, meskipun masih diperlukan upaya lebih besar untuk memastikan semua indikator dapat mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Evaluasi berkala dan penyesuaian strategi pembangunan menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.5.2 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Bandung menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur ketersediaan dan mutu layanan sarana dan prasarana dasar yang menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penilaian ini mencakup aspek aksesibilitas, ketersediaan, dan keberlanjutan infrastruktur seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik. Analisis tren perkembangan indeks dari tahun 2020-2024

memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur, sekaligus menjadi dasar evaluasi atas capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

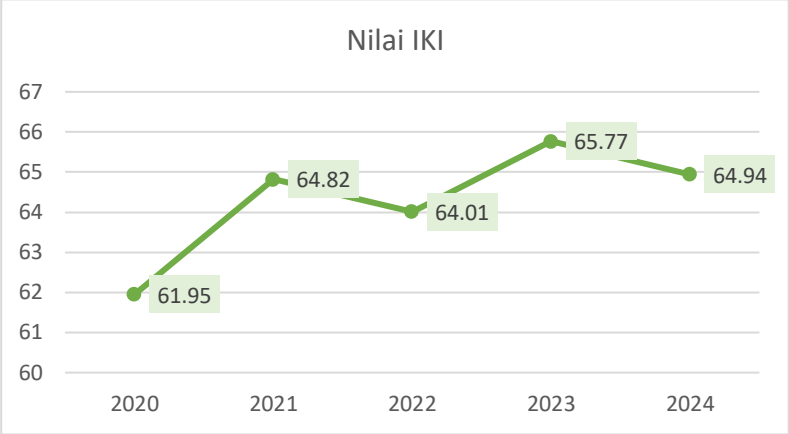

Gambar 2.103. Tren Perkembangan Indeks Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Bandung Tahun 20220-2024
Sumber: Data Dikelola SIPD, Bapperida, 2025 (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan, terjadi peningkatan Indeks Kualitas Infrastruktur dari 61,95 pada tahun 2020 menjadi 65,77 pada tahun 2023, yang mencerminkan perbaikan dalam penyediaan dan pemerataan infrastruktur. Namun, pada tahun 2024 indeks mengalami sedikit penurunan menjadi 64,94, yang mengindikasikan perlunya evaluasi atas kesinambungan program dan proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun arah pembangunan infrastruktur sudah relatif positif, tantangan dalam hal pengelolaan anggaran, pemeliharaan sarana, dan perencanaan lintas sektor masih perlu diperbaiki untuk memastikan keberlanjutan layanan infrastruktur yang andal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Perhitungan Indeks Kualitas Infrastruktur untuk periode 2026–2030 akan menggunakan definisi operasional baru yang disesuaikan dengan amanat sektoral wajib (meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum, dan tata ruang) serta memperhatikan penyesuaian berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan komponen target yang mencakup tiga urusan utama: (1) urusan perhubungan, diukur melalui Indeks Kualitas Infrastruktur Transportasi; (2) urusan pekerjaan umum dan tata ruang, diukur melalui Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; serta (3) urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, diukur melalui persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta indeks tertib administrasi pertanahan.

2.3.5.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga di Kabupaten Bandung yang menempati hunian layak mengalami fluktuasi antara tahun 2019-2024.

Pada periode 2019–2021, Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan konsisten dari 52,04% (2019) menjadi 54,73% (2021). Namun, tren ini menurun pada tahun 2022–2023, di mana persentase turun ke 49,48% (2023). Penurunan ini dapat oleh faktor seperti pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan hunian, dampak bencana alam, atau keterlambatan dalam program pembangunan. Pada tahun 2024, persentase hunian layak kembali membaik ke 54,16%. Berikut tabel perbandingan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung tahun 2019-2024.

Tabel 2.111. Persentase Hunian Layak Huni Tahun 2019-2024

Wilayah	Persentase Hunian Layak Huni (2019-2024)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Barat	49,29	52,28	53,14	53,37	54,17	56,25
Kabupaten Bandung	52,04	54,25	54,73	52,58	49,48	54,16

Sumber: Data Dikelola dikelola SIPD, Data; BPS, 2025 (diolah)

Secara umum, Kabupaten Bandung memiliki capaian lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Jawa Barat pada periode 2019–2021. Namun, pada tahun 2023, persentase hunian layak di kabupaten ini justru lebih rendah daripada provinsi. Pada tahun 2024, meski terjadi peningkatan, Kabupaten Bandung masih tertinggal dari Provinsi Jawa Barat yang mencapai 56,25%.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung tahun 2024, peningkatan ketersediaan dan kualitas rumah layak huni menjadi prioritas utama. Pada kondisi awal tahun 2020, persentase rumah layak huni di Kabupaten Bandung tercatat sebesar 98,30%, menunjukkan tingkat akses hunian yang relatif tinggi. Target pada tahun 2021-2026 selalu naik mulai dari tahun 2021 yakni sebesar 95,79%, kemudian meningkat bertahap menjadi 96,36% (2022), 97,27% (2023), 98,18% (2024), dan akhirnya mencapai 100% pada 2025–2026.

2.3.5.4 Persentase Desa Mandiri

Kabupaten Bandung menunjukkan perkembangan positif dalam peningkatan jumlah desa mandiri dari tahun 2021-2024. Jumlah total desa di Kabupaten Bandung yakni mencapai 270 desa. Pada tahun 2021, berdasarkan perhitungan persentase desa mandiri berdasarkan indeks desa membangun (IDM), tercatat 86 desa mandiri (31,85% dari total 270 desa). Angka ini meningkat signifikan pada tahun 2022 dengan 119 desa mandiri (44,07%), kemudian melonjak menjadi 162 desa (60%) pada tahun 2023. Pada tahun 2024, ditargetkan 186 desa (68,89%) telah mencapai status mandiri. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian desa melalui peningkatan infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Tabel 2.112. Jumlah Desa dan Persentase Desa Mandiri Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri
1	**2021**	86	31.85%
2	**2022**	119	44.07%
3	**2023**	162	60%
4	**2024**	186	68.89%

Sumber: Data dikelola SIPD; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), 2025

2.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.6.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Performa dari program-program pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek. Salah satu faktor yang sangat memengaruhi sekaligus menjadi kendala dari kelancaran hal tersebut adalah besarnya belanja pemerintah. Besarnya anggaran belanja setiap daerah menyesuaikan dengan besarnya pendapatan yang diterima. Adapun pajak daerah merupakan salah satu komponen yang berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah terhadap PAD sepanjang tahun 2011-2024 mencapai sekitar separuhnya (42,53%-56,73%).

Adapun Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB mengukur kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui pajak. Besarnya pajak daerah juga bergantung pada besarnya PDRB. Itulah sebabnya, rasio pajak terhadap PDRB merupakan indikator yang tepat untuk melihat tingkat penyerapan pajak yang mampu diserap oleh pemerintah daerah. Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) tidak secara eksplisit mendefinisikan indikator ini, data terkait dapat ditemukan dalam publikasi PDRB dan laporan keuangan daerah. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan mencatat bahwa rasio pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB secara nasional pada tahun 2023 adalah 1,32%, dengan target peningkatan menjadi 2,9% pada tahun 2029. Data di bawah ini menunjukkan besarnya pajak daerah sekaligus rasionya terhadap PDRB.

Tabel 2.113. Rasio Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2024

Tahun	Pajak Daerah (dalam ribu Rp)	Rasio Terhadap PDRB (%)
2011	137.799.240.880,00	0,54
2012	186.141.858.000,00	0,56
2013	287.766.327.300,00	0,75
2014	298.589.031.519,00	0,92
2015	340.007.248.935,00	0,92
2016	380.710.099.448,48	0,91
2017	464.592.767.806,00	0,88
2018	468.478.520.169,28	0,82
2019	525.068.992.918,00	0,83
2020	491.763.517.018,00	0,83
2021	562.660.836.763,00	0,84

Tahun	Pajak Daerah (dalam ribu Rp)	Rasio Terhadap PDRB (%)
2022	680.549.043.678,00	0,87
2023	656.595.362.676,00	0,83
2024	709.236.534.943,00	0,85

Sumber: Data dikelola SIPD; BPS (Data Diolah), 2025

2.3.6.2 Laju Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai meningkatnya harga barang-barang dan jasa secara keseluruhan. Indikator ini dapat diukur dengan berbagai pendekatan, dimana umumnya menggunakan pendekatan Deflator dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada dasarnya, pendekatan deflator memperhitungkan kenaikan harga-harga secara keseluruhan yang terjadi dalam perekonomian di suatu negara. Berbeda dengannya, pendekatan IHK hanya mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibelanjakan oleh konsumen pada umumnya. Kedua pendekatan ini tentu memiliki keterbatasan. Akan tetapi, indikator IHK yang lebih sering digunakan untuk memperlihatkan tingkat inflasi di suatu daerah, karena mencerminkan dampaknya secara langsung terhadap konsumen. Tabel di bawah ini menunjukkan besarnya laju inflasi selama lima tahun terakhir ini. Adapun terdapat ketidaktersediaan data untuk Kabupaten Bandung pada tahun 2020-2023, karena perhitungan indikator ini pada mulanya hanya melibatkan 90 kota saja. Itulah sebabnya, ditampilkan data tingkat inflasi Kota Bandung dengan perkiraan bahwa tingkat inflasi di daerah ini tidak akan berbeda jauh dengannya, akibat aspek geografi.

Tabel 2.114. Laju Inflasi (IHK) Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional 2020-2024

Lingkup	Laju Inflasi (Metode IHK)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Provinsi Jawa Barat	2,18	1,69	6,04	2,48	2,38
Kabupaten Bandung	1,55*	2,80*	4,04*	4,11*	1,46
Lingkup	Laju Inflasi (Metode PDRB Deflator)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-0,40	6,00	9,57	1,53	0,89
Provinsi Jawa Barat	0,60	2,07	4,21	3,20	2,47
Kabupaten Bandung	1,52	1,93	4,04	2,56	2,41

*Nilai Inflasi mengacu kepada Kota Bandung
Sumber: Data dikelola SIPD; Statistik Indonesia, Provinsi Jawa Barat dalam Angka, BPS Kabupaten Bandung dan Bapperida (data diolah), Tahun 2025

Data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Bandung berada di bawah nasional dan Provinsi Jawa Barat. Tingkat inflasi yang rendah tidak selalu berarti baik-baik saja atau tanpa masalah. Hal ini terjadi, karena besarnya tingkat inflasi dipengaruhi juga oleh daya beli masyarakat. Walaupun demikian, belum tentu jika indikator ini memperoleh nilai yang tinggi berarti mencerminkan bahwa daya beli berada di posisi yang baik, karena bisa saja dipengaruhi oleh biaya produksinya. Dengan demikian, indikator ini perlu tetap terjaga pada kisaran tertentu, di mana acuan yang digunakan adalah tingkat inflasi tahunan tidak boleh lebih tinggi dari 4%. Adapun angka

tersebut, berdasarkan arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

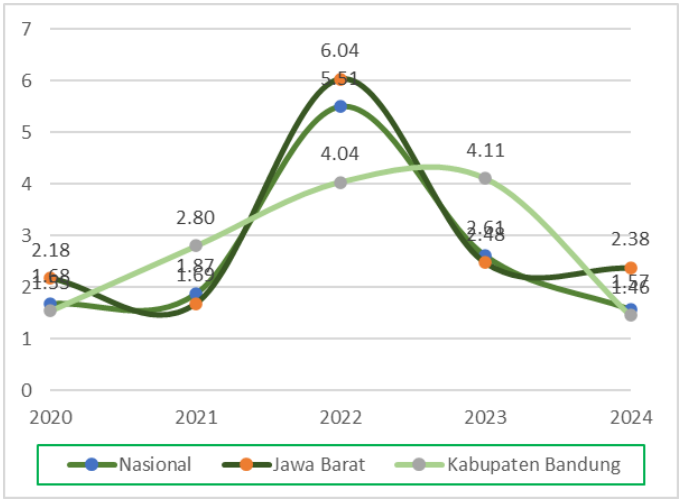

Gambar 2.104. Grafik Laju Inflasi PDRB
Sumber: Data dikelola SIPD; Statistik Indonesia, Provinsi Jawa Barat dalam Angka dan Kabupaten Bandung dalam Angka Dan Baperida, Tahun 2025

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan data capaian tahun 2024, diketahui bahwa terjadi peningkatan signifikan pada nilai IRB Kabupaten Bandung. Nilai IRB mencapai 87,37 atau meningkat sebesar 3.70 poin dengan predikat menjadi A, dimana sebelumnya predikat IRB masih berada pada level A-. Kondisi tersebut mencerminkan peningkatan kinerja birokrasi yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif. Perbaikan ini menunjukkan keberhasilan reformasi dalam tata kelola, pelayanan publik, dan profesionalisme aparatur, serta menjadi fondasi penting dalam mendukung target pembangunan daerah. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, pada tahunn 2023 capaian Kabupaten Bandung juga berada pada urutan pertama dan juga lebih baik jika dibandingkan dengan capaian provinsi. Semakin meningkatnya nilai IRB menunjukan bahwa upaya pemerintah dalam mencapai *Good Governance* juga semakin membaik. Capaian IRB periode 2019-2024 dan juga sandingannya dengan capaian kabupaten/kota lain di Jawa Barat disajikan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.115. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung Tahun 2019-2024

Tahun	IRB	Predikat
2019	62,73	B
2020	64,33	B
2021	63,25	B
2022	63,32	B
2023	83,67	A-
2024	87,37	A

Sumber: Data dikelola SIPD; Laporan Transformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2024; Diolah Bapperida Kabupaten Bandung, Tahun 2024

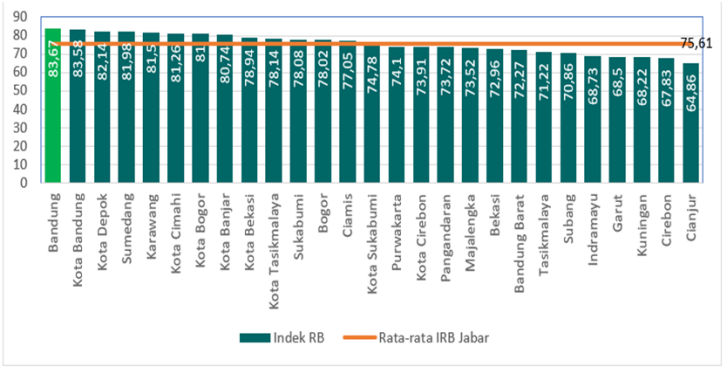

Gambar 2.105. Sandingan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023

Sumber: Data dikelola SIPD; Laporan Transformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2021-2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2021-2024 diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka

reformasi birokrasi daerah. Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Bandung dapat ditinjau pada gambar berikut.

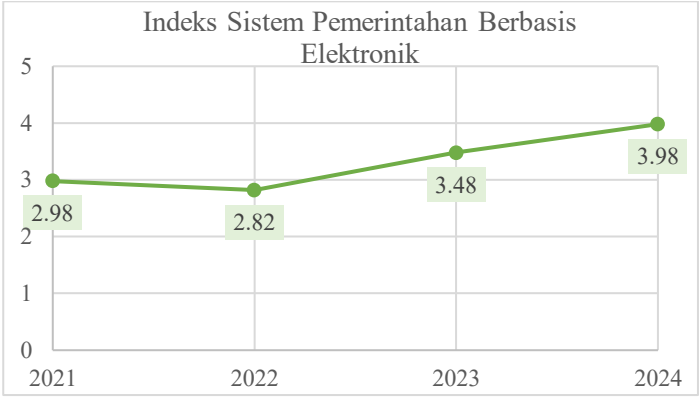

Gambar 2.106. Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Bandung

Sumber: Data dikelola SIPD; Hasil olahan Bapperida, Tahun 2025

Data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari tahun 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Indeks yang awalnya berada di angka 2,98 pada tahun 2021 turun menjadi 2,82 pada tahun berikutnya, namun meningkat tajam menjadi 3,48 pada tahun 2023 dan mencapai 3,98 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya intensif pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan penerapan teknologi digital untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam sistem pemerintahan. Hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis elektronik semakin menjadi prioritas strategis dalam mendukung pencapaian visi RPJMD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

2.4.1.3 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi hukum di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Bandung. Indeks ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum serta upaya perbaikan sistem hukum secara menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Kabupaten Bandung mencatatkan skor IRH sebesar **93,65**, menunjukkan capaian tinggi dalam pelaksanaan reformasi hukum. Capaian ini terus meningkat di tahun 2024 dengan skor **97,00**, mencerminkan komitmen yang semakin kuat dari pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan hukum, penyederhanaan regulasi, serta optimalisasi peran kelembagaan hukum di wilayahnya. Peningkatan nilai ini menjadi indikator positif bahwa reformasi hukum di Kabupaten Bandung terus bergerak ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.4.2 Hukum berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum berkaitan erat dengan regulasi dan tata kelola dalam pelayanan publik, karena ketertiban dan ketentraman merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelayanan yang efektif. Tanpa situasi yang kondusif, penerapan regulasi dan tata kelola pemerintahan akan menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakpatuhan, konflik sosial, hingga gangguan terhadap pelayanan publik. Jika ketertiban tidak terjaga, regulasi akan sulit ditegakkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun, dan adaptasi kebijakan terhadap perubahan sosial akan menghadapi hambatan besar. Oleh karena itu, menjaga ketentraman dan ketertiban umum bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga bagian dari strategi utama dalam membangun pemerintahan yang kuat, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indeks ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bandung terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021. Pada tahun 2024, Indeks ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bandung kembali meningkat menjadi 80,5 dari 77,55 di tahun 2023. Secara rinci, capaian indeks ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Bandung tahun 2021-2023 sebagai berikut.

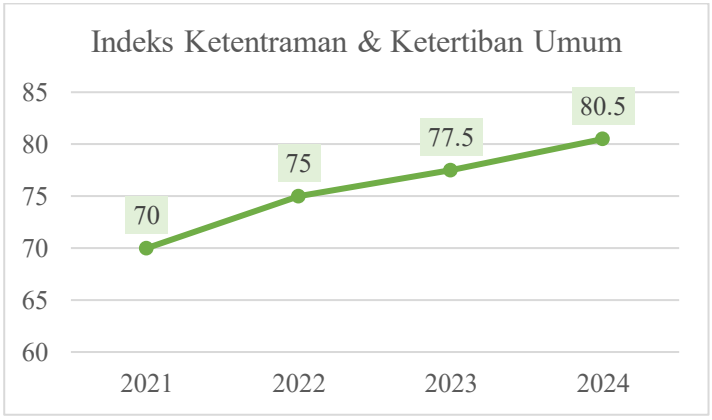

Gambar 2.107. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

Sumber: Data dikelola SIPD; Satpol PP Kabupaten Bandung, Tahun 2024

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1 Capaian Indeks Daya Saing Tahun 2023-2024

Inovasi merupakan salah satu elemen kunci yang mendorong peningkatan daya saing secara berkelanjutan. Berdasarkan kerangka Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 yang disusun oleh BRIN, inovasi ditempatkan sebagai salah satu dari empat komponen

utama yang membentuk daya saing, yaitu ekosistem inovasi. Komponen ini terdiri dari dua pilar penting, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Khususnya, pilar kapabilitas inovasi menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, serta mengubahnya menjadi produk dan layanan bernilai tambah ekonomi.

Berdasarkan IDSD 2024, produktivitas merupakan determinan utama dari daya saing, yang pada akhirnya menentukan standar hidup masyarakat. Inovasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, memperkenalkan solusi baru terhadap tantangan lokal, serta memperkuat struktur ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi menjadi pendorong bagi peningkatan produktivitas karena memungkinkan daerah untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dari sumber daya yang ada, meningkatkan efisiensi proses birokrasi dan pelayanan publik, dan meningkatkan daya serap investasi dan kepercayaan pasar terhadap iklim usaha daerah.

Peningkatan daya saing daerah menjadi salah satu fokus prioritas pembangunan. Data Indeks Daya Saing Daerah berikut ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi capaian Kabupaten Bandung dalam berbagai pilar pembangunan yang mempengaruhi kemampuan ekonomi daerah untuk bersaing secara nasional dan regional. Informasi ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus, serta mengoptimalkan potensi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.116. Capaian IDSD dan Perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat dan Daerah Sekitarnya

Skor IDSD	2023	2024
Nasional	3,44	3,43
Provinsi	3,76	3,88
Kabupaten Bandung	**3,5**	**3,86**
Kota Bandung	4,09	4,26
Cimahi	3,45	3,83
Bandung Barat	4,18	3,64
Sumedang	3,48	3,92

Sumber: Data Dikelola SIPD, BRIN,2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian indeks Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan dari 3,5 pada tahun 2023 menjadi 3,86 di tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai variabel yang tersebar dalam beberapa pilar. Mengacu pada data dari BRIN, variabel lingkungan pendukung, pasar, dan ekonomi inovasi menunjukkan tren positif hingga tahun 2024. Namun demikian, variabel sumber daya alam mengalami tren penurunan yang ditandai dengan menurunnya nilai pada masing-masing indikator, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan ke depan.

Adapun variabel sumber daya manusia, yang mencakup pilar kesehatan, keterampilan, pasar produk, dan pasar tenaga kerja, menjadi faktor strategis yang perlu terus didorong untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Tabel 2.117. Penjabaran Variabel Capaian Indeks Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Dan 2024

Variabel	Capaian 2023	Capaian 2024
Lingkungan Pendukung		
Pilar 1: Institusi	3,87	4,62
Pilar 2: Infrastruktur	2,97	3,93
Pilar 3: Adopsi TIK	4,55	4,73
Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	3,19	3,8
SDM		
Pilar 5: Kesehatan	4,15	4,11
Pilar 6: Keterampilan	3,37	3,6
Pilar 7: Pasar produk	2,10	2,9
Pilar 8: Pasar Tenaga kerja	3,39*	3,24
Pasar		
Pilar 9: Sistem Keuangan	2,89	2,99
Pilar 10: Ukuran Pasar	5,00	5
Ekosistem Inovasi		
Pilar 11: Dinamisme Bisnis	2,78	3,51
Pilar 12: Kapabilitas Inovasi	3,75	3,81

Sumber: Data Dikelola SIPD, BRIN, 2025

2.5 Evaluasi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Evaluasi terhadap hasil pembangunan jangka menengah daerah dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Evaluasi hasil capaian visi baru membandingkan capaian pembangunan dengan target tahun hingga tahun 2024. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”. Visi ini menjadi landasan dan pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan selama periode 2021-2026. Perumusan visi ini berangkat dari permasalahan dan isu–isu yang ada guna meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Berdasarkan evaluasi terhadap capaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dapat diketahui sejauh mana mimpi pembangunan daerah dapat tercapai.

Tabel 2.118. Capaian Visi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026

VISI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2016	Tingkat Capaian 2024	Predikat Capaian
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera	96.38%	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Evaluasi Bappeda Kabupaten Bandung, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat capaian visi pembangunan jangka menengah daerah di tahun 2024 adalah sebesar 96.38% dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini menandakan

bahwa pada tahun 2024, visi pembangunan jangka menengah daerah belum melampaui target berdasarkan capaian di tahun 2024. Melihat capaian visi pembangunan di tahun 2024, optimisme pemerintah Daerah Kabupaten Bandung semakin tinggi untuk mencapai arah kebijakan pembangunan tahap IV dalam RPJPD Kabupaten Bandung yaitu pemantapan perekonomian yang kokoh, adil, dan berkelanjutan. Pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung dapat diwujudkan melalui kelima misi pembangunan jangka menengah daerah. Kelima misi pembangunan ini menjadi pedoman dan langkah pemerintah Daerah untuk bersama–sama mewujudkan visi. Oleh karenanya, pencapaian visi sangat bergantung dengan kinerja pencapaian misi itu sendiri. Dari kelima misi pembangunan ini, terdapat 2 misi yang secara rata-rata capaiannya belum mencapai target diantaranya, pada misi ke-1 dan misi ke-3. Dari kedua misi tersebut secara predikat mencapai predikat Tinggi. Dari ketiga misi yang telah mencapai target, misi 4 memiliki tingkat capaian yang paling tinggi yaitu sebesar 115.47%. Capaian Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.119. Capaian Misi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026

MISI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021-2026	Tingkat Capaian 2024	Predikat Capaian
Misi 1: Membangkitkan Daya Saing Daerah	78.02%	Tinggi
Misi 2: Menyediakan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata	100.63%	Sangat Tinggi
Misi 3: Mengoptimalkan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Kreativitas Dalam Tingkat Kearifan Lokal dan Berawawasan Lingkungan	87.12%	Tinggi
Misi 4: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan	115.47%	Sangat Tinggi
Misi 5: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Prinsip Keadilan dan Keberpihakan pada Kelompok Masyarakat Lemah	100.64%	Sangat Tinggi

Sumber: Data dikelola SIPD; Hasil Evaluasi Bappeda Kabupaten Bandung, 2024

Dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah dengan mengukur tingkat realisasi dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Sebagai indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan perencanaan di tingkat kabupaten, evaluasinya menjadi penting untuk melihat bagaimana hasil pembangunan secara makro. Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang beragam di berbagai misi. Beberapa indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik, bahkan melampaui target yang ditetapkan, sementara yang lain masih memerlukan perhatian dan upaya perbaikan lebih lanjut.

- Misi 1: Rata-rata capaian 78,02%. Beberapa indikator seperti laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan pariwisata menunjukkan hasil baik, namun sektor industri pengolahan belum mencapai target. Terdapat capaian negatif pada sektor

pertanian, kehutanan, perikanan (-227,81%) dan sektor akomodasi, makan, minum (-37,99%).

- Misi 2: Rata-rata capaian 100,63%, menunjukkan target telah tercapai. Namun, Indeks Pendidikan (99,26%) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (98,86%) masih sedikit di bawah target.
- Misi 3: Rata-rata capaian 87,12%. Indeks kualitas lingkungan hidup dan risiko bencana membaik, namun Indeks Kualitas Infrastruktur (96,04%) dan Indeks Desa Membangun (98,89%) memerlukan perhatian lebih.
- Misi 4: Rata-rata capaian 115,47%, capaian tertinggi antar misi. Sebagian besar indikator sudah memenuhi target, kecuali Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum (98,17%) yang masih perlu ditingkatkan.
- Misi 5: Rata-rata capaian 100,64%. Hampir seluruh indikator tercapai, meski Indeks Ketahanan Pangan (98,13%) masih sedikit di bawah target.

Tabel 2.120. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Tujuan		Indikator Kinerja Utama /Tujuan		Indikator Kinerja Daerah / Sasaran	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian 2024
MISI 1: MEMBANGKITKAN DAYA SAING DAERAH																	
1	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**			persen	3,56	3,56	100,00	4,75	5,35	112,63	5,58	4,97	89,07	5,69	5,04	88,58
		1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor	persen	3,10	6,9	221,29	3,5	4,63	132,29	4,78	5,86	122,59	4,89	6,97	142,54
		2	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	persen	2,52	3,60	142,86	3,09	7,2	233,01	7,2	3,15	43,75	7,34	6,21	84,60
		3	Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	Persentase Koperasi yang Berkualitas	persen	5,00	6	119,40	5,5	11,71	212,91	30,20	30,2	100,00	30,83	36,2	117,48
		4	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	persen	0,59	1,26	213,56	1,39	-1,13	-81,29	1,58	3,21	203,16	1,69	-3,85	-227,81
		5	Meningkatnya daya saing pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	persen	1,66	0,14	8,43	3,26	5,11	156,75	5,21	11,58	222,26	5,58	-2,12	-37,99

Tujuan		Indikator Kinerja Utama /Tujuan		Indikator Kinerja Daerah / Sasaran	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian 2024
				Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	persen	5,00	18	360,00	5	19	380,00	20	27	135,00	21	55	261,90
		6	Meningkatnya investasi	Laju Pertumbuhan Investasi	persen	2,90	10,26	353,79	2,9	1,62	55,86	1,62	3,00	185,19	1,62	2,13	131,48
Rata-rata Tingkat Capaian Tujuan																	**88.58%**
Rata-rata Tingkat Capaian Sasaran																	**67.46%**
Rata-rata Tingkat Capaian Misi 1																	**78.02%**
MISI 2: MENYEDIAKAN LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN MERATA																	
1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata	**Indeks Pembangunan Manusia**			poin	72,33	72,33	100,00	73,48	73,46	99,97	73,61	74,03	100,57	74,06	74,59	100,72
		1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Indeks Pendidikan	poin	65,12	65,51	100,60	65,78	65,54	99,64	65,97	65,69	99,57	66,377	65,89	99,27
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	poin	82,41	82,65	100,29	82,73	83,09	100,44	83,615	83,49	99,85	84,14	84,97	100,99
				Total Fertility Rate (FTR)	anak/ wanita usia subur	2,43	2,43	100,00	2,42	2,3	104,96	2,29	2,29	100,00	2,28	2,21	103,07
		3	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	poin	81,00	82,53	101,89	82,22	85,04	103,43	87,14	86,34	99,08	89,46	88,44	98,86

Tujuan		Indikator Kinerja Utama /Tujuan		Indikator Kinerja Daerah / Sasaran	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian 2024
			penduduk berpengahsilan rendah														
Rata-rata Tingkat Capaian Tujuan																	**100.72 %**
Rata-rata Tingkat Capaian Sasaran																	**100.54 %**
Rata-rata Tingkat Capaian Misi 2																	**100.63 %**
MISI 3: MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT YANG MENJUNJUNG TINGGI KREATIFITAS DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN																	
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan tangguh terhadap bencana	**Indeks Perkembangan Wilayah**			poin	52,65	52,65	100,00	54,44	57,37	105,38	58,45	59,69	102,12	59,68	62,33	104,44
		1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	52,59	54,78	104,16	53,29	56,03	105,14	56,04	56,45	100,73	56,05	59,87	106,82
		2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	poin	64,66	64,82	100,25	65,97	64,01	97,03	65,62	65,77	100,23	67,62	64,94	96,04
		3	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana	poin	170	162	104,77	165	145,93	111,56	142,06	132	107,08	138,19	117,13	115,24
		4	Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	poin	77,67	80,44	103,57	81,00	80,44	99,31	83,15	82,40	99,10	84,15	83,07	98,72
Rata-rata Tingkat Capaian Tujuan																	**69.99%**
Rata-rata Tingkat Capaian Sasaran																	**104.25 %**
Rata-rata Tingkat Capaian Misi 3																	**87.12%**
MISI 4: MENGOPTIMALKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI BIROKRASI YANG PROFESIONAL, DAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN																	
1		**Indeks Reformasi Birokrasi**			poin	65,80	63,3	96,12	67,28	63,32	94,11	65,91	83,67	126,95	66,51	87,37	131,36

Tujuan		Indikator Kinerja Utama /Tujuan		Indikator Kinerja Daerah / Sasaran	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian 2024
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	1	Meningkatnya kualitas e-goverment melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	82,73	83,54	100,98	83,3	84,61	101,57	85,36	86,15	100,93	85,54	87,8	102,64
				Nilai SAKIP Kabupaten	poin	73	71	97,89	76	71,35	93,88	71,85	71,76	99,87	72,35	72,97	100,86
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	poin	78,72	70,68	89,79	79,42	77,24	97,26	81,69	84,71	103,70	82,29	85,57	103,99
				Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	poin	3	3	100,00	3	3	99,67	3	3,145	104,83	3	3,096	103,20
				Indeks Penerapan Sistem Merit	poin	304,5	318,5	104,60	326,5	338	103,52	338	338	100,00	342	356	104,09
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	2,98	2,98	100,00	3,15	2,82	89,52	2,92	3,48	119,18	3,02	3,98	131,79
		2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Kapasitas Fiskal Daerah	juta Rp	1.741. 425	2.497. 550	143,42	1.928. 570	2.381. 220	123,47	3.597. 711	4.134. 929	114,93	3.556. 528	4.584. 289	128,90
				Opini BPK	Poin	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
2	Menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif	**Angka Kriminalitas**			poin	46,00	7,7	183,26	3,3	44,97	-1162,73	43,99	69,22	42,65	41,3	47,34	85,38
		1	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	poin	70	70	100,00	72	75	104,17	78	77,5	99,36	82	80,5	98,17
Rata-rata Tingkat Capaian Tujuan																	**122.76 %**
Rata-rata Tingkat Capaian Sasaran																	**108.18 %**

Tujuan		Indikator Kinerja Utama /Tujuan		Indikator Kinerja Daerah / Sasaran	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian 2024
Rata-rata Tingkat Capaian Misi 4																	**115.47 %**
MISI 5: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN PRINSIP KEADILAN DAN KEBERPIHAKAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT LEMAH																	
1	Mengurangi kesenjangan kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif	**Indeks Gini**			rasio	0,415	0,415	100,00	0,4	0,37	107,50	0,365	0,348	104,66	0,365	0,346	105,21
		1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	Indeks Pengeluaran	poin	71,14	71,06	99,89	72,65	71,88	98,94	72,3	73,1	101,11	72,72	74,12	101,93
		2	Berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,37	8,32	100,60	8,15	6,98	114,36	6,74	6,52	103,26	6,5	6,36	102,15
		3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	poin	93,85	94,59	100,79	94,11	94,71	100,64	93,97	94,8	100,88	93,99	94,23	100,26
2	Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan masyarakat	**Indeks Ketahanan Pangan**			poin	80,10	80,1	100,00	81,11	80,33	99,04	81,25	82,48	101,51	82,17	80,63	98,13
		1	Menurunnya masalah pangan Daerah	Skor PPH Konsumsi	persen	86,3	80,3	93,05	86,3	81,1	93,97	81,7	82,2	100,61	82,3	85,1	103,40
Rata-rata Tingkat Capaian Tujuan																	**99.20%**
Rata-rata Tingkat Capaian Sasaran																	**102.09 %**
Rata-rata Tingkat Capaian Misi 5																	**100.64 %**

Sumber: Data dikelola SIPD; Hasil Evaluasi Bappeda Kabupaten Bandung, 2024

Secara umum, capaian IKU dan IKD pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Namun, masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 3 IKU dan 8 IKD yang belum mencapai target, yaitu:

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target:

1. Laju Pertumbuhan Ekomoni
2. Indeks Perkembangan Wilayah
3. Indeks Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang belum mencapai target:

1. Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
2. Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
3. Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
4. Indeks Pendidikan
5. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan
6. Indeks Kualitas Infrastruktur
7. Indeks Desa Membangun
8. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tahap IV RPJP Kabupaten Bandung 2005-2025, dapat tergambar bahwa berbagai permasalahan pembangunan telah teridentifikasi dengan baik. Identifikasi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sehingga strategi yang diterapkan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga berperan dalam menilai sejauh mana kebijakan yang telah dirancang mampu menjawab tantangan pembangunan serta memastikan kesinambungan antara kebijakan jangka panjang dan jangka menengah. Dengan demikian, upaya pembangunan yang dilakukan dapat lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Sebagai bagian dari proses evaluasi, dilakukan analisis terhadap kesenjangan (*gap*) antara capaian pembangunan dengan misi dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan hingga tahap IV RPJPD serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang masih memerlukan perhatian dan solusi. Dengan memahami tantangan yang masih dihadapi, pemerintah daerah dapat menyusun strategi yang lebih komprehensif untuk menutup kesenjangan pembangunan dan memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran

mengenai kesenjangan antara capaian pembangunan dengan misi dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bandung periode keempat, yang disusun sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan selanjutnya.

Tabel 2.121. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD
Misi 1 Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bandung	Tingkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (%)	**Penghambat** 1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; 2. Relatif luasnya wilayah Kabupaten Bandung;dan 3. Minimnya SDM yang Sesuai dengan Kualifikasi dalam penegakan perda **Pendorong** 1. Terdapatnya Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai pelaksana keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan 2. Terselenggaranya kegiatan penyelesaian Penegakan Perda yang sesuai dengan prosedur dan Penegakan K3.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	**Penghambat** 1. Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditandai dengan pemberlakuan aplikasi pusat yang masih terus dikembangkan. 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya dapat dituangkan dalam rencana aksi tindak lanjut, khususnya pada perangkat daerah; dan 3. Aspek organisasi memilki performasi yang cenderung tidak stabil dan in konsisten dalam pencapaiannya. **Pendorong** 1. Regulasi Pusat yang terus mendorong upaya Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dalam berbagai aspek penilaian dari sisi kinerja dan perlaksanaan; 2. Adanya inovasi manajemen dalam upaya penguatan integritas pegawai
Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**Penghambat** 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengolahan sampah; dan 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bandung belum mencapai standar. **Pendorong** 1. Terdapat Program Strategis Unggulan Daerah (Kampung Bedas, Sekolah Adiwiyata dan Kampung Proklim); 2. Adanya sinergi program dengan Perhutani dan PTPN serta pihak lainnya dalam Pengelolaan Lahan Kritis serta dengan PT Indonesia Power dalam pengembangan Kawasan Konservasi Taman Keanekaragaman Hayati.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD
	Terkendalinya pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (%)	**Penghambat** Masih relatif tingginya angka pernikahan usia dini. **Pendorong** Semakin membaiknya pelaksanaan program KB paa setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung
		Persentase penggunaan lahan sesuai tata ruang	**Penghambat** 1. Masih relatif tingginya alih fungsi lahan; 2. Masih relatif tingginya pembangunan yang tidak berijin; dan 3. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tata ruang **Pendorong** Adanya OSS (*One Single Submission*) memberikan kemudahan dalam pengawasan dan pendataan penataan tata ruang;
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memenuhi standar dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**Penghambat** 1. Relatif rendahnya IPM di wilayah Kecamatan dengan Kemiskinan Ekstrem tinggi; dan 2. Masih tingginya ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bandung yang menyebabkan perlambatan **Pendorong** 1. IPM tinggi di kecamatan-kecamatan yang bercirikan perkotaan; 2. Adany apeningkatan pada indikator penunjang IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Penghambat** Masih adanya kesenjangan gender terutama dibeberapa Bidang seperti Kesehatan, Pendidikan, Politik dan Pemerintahan. **Pendorong** Adanya kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan perempuan, seperti akses terhadap pendidikan yang setara, peluang kerja yang adil, perlindungan hukum, dan partisipasi politik perempuan yang lebih aktif, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan nilai IPG.
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**Penghambat** 1. Masih adanya kesenjangan gender terutama di beberapa Bidang seperti Kesehatan, Pendidikan, Politik dan Pemerintahan; dan 2. Masih adanya Kekerasan fisik terhadap perempuan merupakan faktor penghambat yang serius dalam pemberdayaan gender. **Pendorong** Adanya kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan perempuan, seperti akses terhadap pendidikan yang setara, peluang kerja yang adil, perlindungan hukum, dan partisipasi politik perempuan yang lebih aktif, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan nilai IPG.

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD
	Terpenuhinya kebutuhan pangan berkelanjutan	Skor PPH Konsumsi	**Penghambat** 1. Masih terbatasnya pemahaman gizi seimbang di masyarakat; 2. Masih relatif sulitnya implementasi diversifikasi pangan. **Pendorong** Terdapatnya program Ketahanan Pangan Desa dan lahan yang masih relatif luas di Kabupaten Bandung.
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia; 2. Belum terbangunnya link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan terhadap dunia usaha dan industri; dan 3. Penduduk usia kerja dan penduduk bekerja masih didominasi lulusan SD.
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	**Penghambat** 1. Belum efektifnya Tim Penangulangan Kemiskinan Daerah; dan 2. Kurangnya koordinasi antar PD dalam upaya penanggulangan kemiskinan. **Pendorong** 1. Relatif banyaknya program Penanggulangan Kemiskinan yang berasal dari Pusat yang berdampak langsung pada pengurangan tingkat kemiskinan; 2. Adanya Peningkatan Akses Pelayanan Dasar yang memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan; 3. Adanya peningkatan padakualitas Pendidikan; dan 4. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang memberikan dampak langsung terhadap masyarat.
		Indeks Gini	**Penghambat** 1. Masih relatif tingginya tingkat kemiskinan;dan 2. Masih relatif tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). **Pendorong** 1. Meningkatnya PDRB per kapita; 2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi; dan 3. adanya program bantuan sosial untuk masyarakat rentan
Menciptakan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah	Persentase kawasan kumuh (%)	1. Sulitnya pemeliharaan hasil perbaikan rumah tidak layak huni; 2. Belum adanya validasi data mengenai jumlah rumah kumuh tidak layak huni; dan 3. Perbaikan permasalahan kumuh masih dilakukan secara pragmatis dan belum adanya inovasi yang menyasar atau mengintervensi permasalahan terhadap aspek sosial dan ekonomi.
		Akses aman air bersih (%)	**Penghambat** 1. Belum terlayaninya seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Bandung oleh layanan PDAM; 2. Belum semua desa memiliki lembaga pengelola air bersih yang handal; 3. Daya dukung dan kualitas air baku makin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik; dan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD
			4. Sektor Swasta masih kurang berminat untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM **Pendorong** 1. Komitmen Perumda Air Minum Tirta Raharja yang terus mengembangkan dan terus membangun SPAM; 2. Pembinaan dari Pemerintah Daerah terhadap kelembagaan masyarakat penyelenggara pengembangan SPAM; 3. Peran serta masyarakat dalam menjaga daerah tangkapan air; dan 4. Pihak Swasta/Perbankan/CSR berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan SPAM
		Akses aman sanitasi (%)	**Penghambat** 1. Minimnya Kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memelihara sanitasi; 2. masih terdapatnya sanitas yang belum memenuhi standar; dan 3. Masih banyak wilayah pemukiman yang belum dilengkapi SPAL yang sesuai standar2 **Pendorong** 1. Adanya IPLT yang dimiliki walaupun belum beroperasi secara maksimal; 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sarana air limbah domestik kepada kelompok pengelola dan pemanfaat sarana sanitasi yang dibangun; dan 3. Kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pengembangan sanitasi berperan penting dalam meningkatkan akses aman sanitasi.
		Persentase penurunan luas genangan banjir	**Penghambat** 1. Tingginya Intensitas Curah Hujan; 2. Masih buruknya sistem drainase yang terdapat pada beberapa lokasi; dan 3. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup **Pendorong** Adanya dukungan program penanganan banjir dari Pusat/Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
		Luas sawah yang terairi irigasi (%)	1. Belum optimalnya pengendalian untuk pemanfaatan jaringan irigasi yang menyebabkan alih fungsi jaringan irigasi; 2. Banyaknya Jaringan Irigasi yang rusak; 3. Belum memadainya SDM dan sarana pendukung untuk pemeliharaan irigasi; 4. Adanya alih fungsi irigasi menjadi drainase perkotaan; 5. Terjadi endapan sedimen dan sampah pada saluran irigasi; 6. Belum terbebaskannya sempadan sungai dari bangunan liar; 7. Adanya pendangkalan sungai; 8. Belum optimalnya normalisasi sungai secaraberkaladan berkesinambungan ; dan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD
			9. Belum optimalnya ketersediaan Dokumen Perencanaan untuk 17 wilayah yang rawan banjir/bencana
	Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan terpadu	Persentase sampah yang dikelola (%)	**Penghambat** 1. Terbatasnya SDM untuk pengangkutan sampah; 2. minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan persampahan; 3. Pengelolaan bank sampah belum menyentuh proses hilir seperti industrialisasi produk yang bersumber dari bank sampah meskipun potensinya cukup tinggi. **Pendorong** 1. Banyak titik layanan yang belum terlayani sehingga sumber sampah yang belum diangkat masih banyak, sehingga meningkat sampah yang terbuang ke TPA; dan 2. Penambahan armada meningkatkan proses pengangkutan sampah terangkut 5 ton/hari.
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Aksesibilitas	1. Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang berbukit terutama di wilayah selatan; 2. Infrastruktur Transportasi yang kurang memadai; 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan insfrastruktur pada beberapa wilayah
		Moda share	**Penghambat** 1. Minimnya ketersediaan lahan dalam menyediakan kantong-kantong parkir; 2. adanya kebijakan pembatasan jam operasional angkutan umum; 3. masih banyaknya jaringan jalan di Kabupaten bandung yang tidak mempunyai bahu jalan; dan 4. Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan jumlah penumpang **Pendorong** 1. Penataan ulang jaringan Trayek; dan 2. Adanya angkutan online menjadikan perjalanan angkutan lebih bervariatif;
	Meningkatnya pembangunan perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	**Penghambat** Keterbatasan Sumberdaya Manusia yang terampil dalam pelaksanaan pembangunan desa **Pendorong** 1. Adanya sinergi antara program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan instansi dapat meningkatkan IDM; dan 2. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa
Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan yang berbasis ekonomi kemasyarakatan / ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1. Pada periode 3 tahun terakhir terganggu pandemi Covid-19 dan periode 4 RPJPD masih dalam taraf pemulihan; dan 2. Pada periode 3 adanya ketidak pastian ekonomi global akibat perdagangan amerika-china yang berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi, nasional, provinsi dan kabupaten

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD
		PDRB ADHK (juta rupiah)	
		PDRB ADHB (juta rupiah)	
		Laju inflasi (%)	1. Data inflasi Kabupaten Bandung masih menggunakan data inflasi Kota Bandung 2. Penurunan inflasi di periode III diakibatkan dari adanya Covid-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi yang membuat daya beli konsumen menurun serta menurunnya permintaan konsumen; dan 2. kenaikan indeks harga penyediaan air dan layanan perumahan lainnya
	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Laju pertumbuhan investasi	**Penghambat** 1. Belum optimalnya perencanaan pengembangan investasi; 2. Belum ada kebijakan umum dan perencanaan mengenai strategi investasi khususnya untuk menarik investasi pada UMKM. Perencanaan yang ada lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk membuka peluang investasi; dan 3. Penurunan investasi dalam negeri di Kabupaten Bandung **Pendorong** Kemudahan perijinan di daerah dan kondisi infrastruktur yang relatif baik.

Sumber: Data dikelola SIPD; Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025

2.6 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemaknaan Standar Pelayanan Minimal mengalami perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penetapan SPM. Pasal 18 UU 23/2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, Pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pmerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayan minimal. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
6. Sosial

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 18 UU 23/2014 tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan SPM lalu ditindaklanjuti melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Setiap SPM memiliki standar teknis masing-masing yang ditetapkan oleh Kementerian terkait. Standar teknis tersebut dikoordinasikan dengan pemerintah dalam negeri dan Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian terkait. Peraturan materi teknis lainnya kemudian menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar. Berikut adalah peraturan-peraturan yang menjadi teknis pelaksanaan SPM:

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2.6.1 Capaian SPM Kabupaten Bandung Tahun 2024

Berdasarkan pada peraturan-peraturan di atas, penerapan SPM ditunjukkan untuk mencapai target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun. Pemenuhan pelayanan dasar tersebut digunakan sebagai salah satu tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil evaluasi terhadap pencapaian SPM ini kemudian digunakan untuk penilaian kinerja Perangkat Daerah, Pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Berikut adalah rekapitulasi hasil capaian penerapan SPM di Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Tabel 2.122. Rekapitulasi Capaian SPM di Kabupaten Bandung Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024				
			Satuan	Target	Capaian	Persentase	Status
1. CAPAIAN JENIS PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.	Orang	98,652	98,652	**100%**	Tercapai
2	Pendidikan Dasar	Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. (SD) Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. (SMP)	Orang	575,526	575,526	**100%**	Tercapai
3	Pendidikan Kesetaraan	Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	21,870	21,870	**100%**	Tercapai
2. CAPAIAN JENIS PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	61,309	61,429	**100,20%**	Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	61,309	61,347	**100,06%**	Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	60,403	60,742	**100,56%**	Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	298,275	303,789	**101,85%**	Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	400,154	504,928	**126,18%**	Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	844,631	844,631	**100%**	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024				
			Satuan	Target	Capaian	Persentase	Status
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	141,811	141,811	**100%**	Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	324,883	324,883	**100%**	Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetesmilitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	44,200	44,200	**100%**	Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	4,554	4,554	**100%**	Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	68,672	68,672	**100%**	Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	80,819	80,819	**100%**	Tercapai
3. CAPAIAN JENIS PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM							
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	3.749.172	3.402.212	**90,75%**	Tidak Tercapai
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	3.450.481	3.450.481	**100%**	Tercapai
4. CAPAIAN JENIS PELAYANAN DASAR BIDANG PERUMAHAN RAKYAT							
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Unit	34	34	100%	Tercapai
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Orang	n/a	n/a	**0**	
1. 5. CAPAIAN JENIS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN							
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Orang	0	0	**100%**	Tercapai
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	500.000	500.000	**100%**	Tercapai
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	250.000	250.000	**100%**	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2024				
			Satuan	Target	Capaian	Persentase	Status
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	170.000	170.000	**100%**	Tercapai
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	200	436	**218%**	Tercapai
6. CAPAIAN JENIS PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL							
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	551	551	**100%**	Tercapai
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	171	171	**100%**	Tercapai
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	1,054	1,054	**100%**	Tercapai
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Orang	152	152	**100%**	Tercapai
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial	Orang	5,415	5,415	**100%**	Tercapai

Sumber: Data dikelola SIPD; Analisis Bapperida, 2025

Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor, dengan sebagian besar layanan telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian keseluruhan sebesar 95,73% menunjukkan bahwa mayoritas target pelayanan telah terpenuhi dengan baik, menandakan bahwa penyelenggaraan layanan publik berjalan secara optimal. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama dalam menjaga konsistensi kualitas layanan dan memastikan bahwa semua sektor memperoleh akses yang merata terhadap pelayanan dasar.

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa program pelayanan dasar telah berhasil dijalankan dengan tingkat pencapaian yang tinggi. Beberapa sektor bahkan menunjukkan hasil yang melebihi target, seperti pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dan penyelamatan korban kebakaran. Meskipun demikian, evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk mengidentifikasi kendala yang masih ada, meningkatkan efisiensi dalam

penyediaan layanan, serta memastikan bahwa standar pelayanan minimal dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

2.6.2 Rekomendasi dalam Pencapaian SPM di Kabupaten Bandung

Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Pemenuhan pelayanan dasar yang telah termuat dalam dokumen perencanaan masing-masing Perangkat Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih menghadapi permasalahan untuk memenuhi standar minimal pelayanan dasar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024, disusun beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya. Adapun rekomendasi yang dimaksud disajikan sebagai berikut.

1. **Data dan Informasi :**
   - Mengoptimalkan pelaksanaan SPM pada bidang pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Sosial diantaranya dengan meningkatkan nilai target penerima pelayanan dasar dan juga melakukan pendataan yang lebih intensif;
   - Bidang urusan pendidikan, kesehatan dan sosial perlu mengukur tingkat efektivitas pelayanan dasar yang diberikan salah satunya dengan melakukan pemetaan realisasi SPM terhadap jumlah populasi di wilayah Kabupaten Bandung dan juga pemetaan terhadap penerima pelayanan dasar khusus bagi warga miskin;
   - Melakukan perbaikan instrument pendataan untuk memastikan data BNBA *(By Name By Adress)* penerima pelayanan dasar tidak berubah-ubah sejak proses pengajuan dan perencanaan;
   - Melakukan perbaikan pada unsur penentuan target penerima pelayanan dasar, pencatatan, pelaporan hingga validasi data pada setiap bidang urusan SPM; dan
   - Mendorong SPM Bidang Kesehatan untuk lebih intensif menggunakan pelaporan dan pencatatan melalui e-Kohort serta melakukan penyuluhan yang lebih efektif dengan menggunakan media informasi digital.
2. **Sumber Daya Manusia**
   - Melakukan penambahan jumlah SDM penunjang pelaksanaan SPM pada beberapa bidang urusan diantaranya tenaga kesehatan, guru PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, Penyidik PNS, Personil Kebencanaan termasuk Tim Reaksi Cepat, Relawan Kebakaran di desa dan Relawan Sosial/Pramujiwa;
   - Mendorong peningkatan kualitas SDM khususnya pada bidang urusan Pendidikan, Kesehatan dan Kebencanaan melalui pelatihan yang dibutuhkan; dan

- Meningkatkan kegiatan pembinaan serta sosialisasi pada kelompok pengelola SPAM, penerima layanan rehabilitasi sosial, relawan kebakaran di desa hingga masyarakat di wilayah risiko bencana.

3. Operasional

- Mewujudkan pelaksanaan kegiatan skrining untuk seluruh jenis pelayanan dasar pada bidang urusan Kesehatan secara terpadu;
- Mendorong adanya inovasi untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi pada SPM bidang Pekerjaan Umum diantaranya keterbatasan lahan dan anggaran untuk SPAM dan juga SPALD dengan menggunakan teknologi modern serta skema pembiayaan melalui model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), B2B antar pihak swasta maupun pemanfaatan dana desa; dan
- Dilakukan perbaikan atau pembenahan pada fungsi PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana).

4. Regulasi

- Melakukan penguatan regulasi terhadap pengelolaan SPAM melalui penetapan PERDA atau PERBUP;
- Mendorong dilakukannya penyusunan dokumen rumah rawan bencana, dokumen perencanaan penanganan kebencanaan di Kabupaten Bandung, SOP (Standar Operasional Prosedur) penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung, dan dokumen rencana kontinjensi bencana alam yang ada di Kabupaten Bandung;
- Melakukan penyusunan kajian mengenai standarisasi alat untuk mengitung dan menentukan kebutuhan sapras yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, Pembinaan teknis operasional, Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; (berapa banyak unit yang dibutuhkan belum terhitung);
- Melakukan pembaharuan SOP Satpol PP sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; dan
- Menyusun kajian mengenai standarisasi pengetahuan yang mengacu pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidkan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja.

5. Sarana dan Prasarana

- Melakukan pembenahan sarana dan prasarana kebencanaan diantaranya dengan pembangunan gudang logistik yang memenuhi standar, penambahan unit kendaraan

yang baru untuk mendukung mobilitas pemberian logistik bencana serta perelngkapan logistik kebencanaan salah satunya tenda;

- Menambahkan jumlah sarana prasarana penanganan kebakaran diantaranya Pos Pelayanan Kebakaran (Jumlah eksisting Pos 9 Unit dan dibutuhkan minimal 15 Unit Pos), Mobil Damkar, APD, dan Grountang/Hidran; dan
- Perlunya melakukan perbaikan gedung untuk meningkatkan daya tampung penerima pelayanan sosial.

6. Koordinasi dan Komunikasi

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor khususnya pada saat penyusunan nilai target SPM pada seluruh bidang urusan;
- Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pihak kecamatan dan juga desa untuk mengidentifikasi faktor penghambat yang ditemui pada saat pemberian pelayanan dasar; dan
- Meningkatkan kegiatan sosialisasi program yang berkaitan dengan SPM sebagai bentuk penguatan lintas sektor dan juga realisasi SPM yang lebih optimal.

2.7 Capaian Indikator TPB/SDG's Kabupaten Bandung

Mayoritas indikator TPB/SDGs Kabupaten Bandung tahun 2024 menunjukkan kinerja positif, Meski demikian, beberapa indikator masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tabel 2.123. Rekapitulasi Capaian SDG's di Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

Kode	Indikator SDG's	Satuan	Tahun Dasar (Baeline) 2021	Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2024	Status	Perangkat Daerah
TPB 1: TANPA KEMISKINAN								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	7,34	6,8	6,4	6,19	Tercapai	**DINSOS**
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	43,7	96,43	98,28	99,52	Tercapai	**DINKES**
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	10,95	11,23	26,55	27,46	Tercapai	**DINKES**
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Orang	134,691	114.108	103.673	98,956	Perlu Perhatian	**DINSOS**
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	89,99	96,62	96,81	95,4	Akan Tercapai	**DINKES**
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	83,79	87,55	89,5	90,75	Tercapai	**DPUTR**
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	89,99	93,43	92,75	93,66	Tercapai	**DPUTR**
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	2	3	Tercapai	**BPBD**
TPB 2: TANPA KELAPARAN								
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat. berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen	1,93	3,59	0,47	0,01	Tercapai	**DISPAKAN**
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	31,3	25	29,2	24,1	Perlu Perhatian	**DINKES**
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun. berdasarkan tipe.	Persen	6,08	2,9	4,06	1,05	Tercapai	**DINKES**
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	95,74	3,9	8,39	6,37	Tercapai	**DINKES**

Kode	Indikator SDG's	Satuan	Tahun Dasar (Baeline) 2021	Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2024	Status	Perangkat Daerah
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	66,16	66,16	70,8	77,7	Tercapai	**DINKES**
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	80,3	81,1	82,2	85,6	Akan Tercapai	**DISPAKAN**
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Rupiah	53.847.251	pm	pm	pm	Data Tidak Tersedia	**DISTAN**
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Persen	18,38	55.27	58,84	58,74	Tercapai	**DISTAN**
TPB 3: KEHIDUPAN SEHAT DN SEJAHTERA								
3.1.1*	Jumlah kematian ibu	Kematian/ 100.000 Kelahiran Hidup	16	44	40	44	Perlu Perhatian	**DINKES**
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	93,1	98	97,58	98,12	Tercapai	**DINKES**
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	92,92	96,81	97,31	98,16	Tercapai	**DINKES**
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Kematian/ 1.000 Kelahiran Hidup	0,035	0,41	0,007	0,007	Tercapai	**DINKES**
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Kematian/ 1.000 Kelahiran Hidup	3	3,55	0,006	0,006	Tercapai	**DINKES**
3.2.2.(a)	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Kematian/ 1.000 Kelahiran Hidup	0,49	0,59	0,007	0,007	Tercapai	**DINKES**
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Kasus Baru /1.000 Penduduk Tidak Terinfeksi	0,06	0,135	0,025	0,028	Tercapai	**DINKES**
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus Baru /100.000 Penduduk	4	0,338	0,34	0,31	Tercapai	**DINKES**
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	19,17	34,1	3,92	8,94	Tercapai	**DINKES**

Kode	Indikator SDG's	Satuan	Tahun Dasar (Baeline) 2021	Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2024	Status	Perangkat Daerah
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	77,8	79,7	79,89	72,41	Akan Tercapai	**DP2KBP3A**
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Kelahiran/Ibu	2,41	2,3	2,29	2,21	Tercapai	**DP2KBP3A**
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	78,97	96,43	98,28	99,52	Tercapai	**DINKES**
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Persen	100	91,94	96	92,92	Akan Tercapai	**DINKES**
TPB 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS								
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	64,65	96,11	99,35	96,86	Tercapai	**DISDIK**
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	48,89	85,71	96,51	88,19	Tercapai	**DISDIK**
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	95,77	97,46	98,27	99,24	Akan Tercapai	**DISDIK**
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	Persen	99,43	93,62	94,57	94,93	Akan Tercapai	**DISDIK**
TPB 5: KESETARAAN GENDER								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dokumen	4	4	4	4	Tercapai	**DP2KBP3A**
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	0,03	0,01	0,00024	0,01	Tercapai	**DP2KBP3A**
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	100	100	100	100	Tercapai	**DP2KBP3A**
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	44,51	48,32	45,79	42	Akan Tercapai	**DP2KBP3A**
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat. parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	12,96	16,36	16,37	16,37	Tercapai	**SETWAN**
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen	1,16	1,7	10,26	12,5	Tercapai	**BKPSDM**
TPB 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK								

Kode	Indikator SDG's	Satuan	Tahun Dasar (Baeline) 2021	Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2024	Status	Perangkat Daerah
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	83,79	89,92	89,5	90,75	Tercapai	**DPUTR**
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Persen	76,07	90,47	N/A	N/A	Data Tidak Tersedia	**DINKES**
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	89,99	93,43	92,75	93,66	Akan Tercapai	**DPUTR**
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persen	280	280	280	280	Tercapai	**DINKES**
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Persen	68,74	100	100	100	Tercapai	**DINKES**
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Persen	68,74	93,43	92,75%	97,81	Tercapai	**DPUTR**
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Persen	12,11	N/A	N/A	29,67	Akan Tercapai	**DPUTR**
TPB 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita. (ADHK)	Persen	2,08	5,35	4,9	5,04	Tercapai	**BAPPERIDA**
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta Rupiah	33,96	38,45	41,38	43,13	Tercapai	**BAPPERIDA**
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian berdasarkan jenis kelamin.	Persen	53,29	51,16	48,84	49,18	Akan Tercapai	**DISNAKER**
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persen	46,71	52,36	51,07	50,23	Tercapai	**DISNAKER**
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen	5,5	2,32	3,4	4,55	Akan Tercapai	**DISNAKER**
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rupiah	19,716	25,729	27,999	29,819	Tercapai	**DISNAKER**
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	8,32	6,98	6,52	6,36	Tercapai	**DISNAKER**
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	100	1.748	57.324	12,782	Tercapai	**DISPARBUD**
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	3.880.600	6.548.815	6.986.976	7.703.985	Tercapai	**DISPARBUD**
TPB 9: INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen	62,54	53,67	52,52	52,91	Perlu Perhatian	**BAPPERIDA**
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	7,68	7,2	5,37	8,35	Tercapai	**BAPPERIDA**

Kode	Indikator SDG's	Satuan	Tahun Dasar (Baeline) 2021	Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2024	Status	Perangkat Daerah
TPB 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN								
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Persen	44,07	60	68,89	69,26	Tercapai	**DPMD**
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Aduan	101	123	109	113	Tercapai	**DP2KBP3A**
TPB 11: KOTA DAN KOMUNITAS BERKELANJUTAN								
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	96,81	97,39	98,3	98,94	Tercapai	**DISPERKIMTAN**
11.5.1*	Jumlah korban meninggal. hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang/100.000	Korban Meninggal -1 Korban Hilang (N/A) Korban Terluka (N/A) Korban Mengungsi -657	Korban Meninggal -4 Korban Hilang (N/A) Korban Terluka (N/A) Korban Mengungsi -242	Korban Meninggal -5 Korban Hilang 0 Korban Terluka -5 Korban Mengungsi -692	Korban Meninggal -20 Korban Hilang 0 Korban Terluka -165 Korban Mengungsi -12.103	Tercapai	**BPBD**
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	62,4	74,93	81,09	87,65	Tercapai	**DLH**
TPB 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	1,668	2,809	240,766	243.177,07	Tercapai	**DLH**
TPB 15: EKOSISTEM DARATAN								
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen	32,67	49,34	31,95	32	Akan Tercapai	**DLH**
TPB 16: PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH								
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	**BKAD**
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Persen	58,46	63,32	84	85,8	Tercapai	**INSPEKTORAT**

Kode	Indikator SDG's	Satuan	Tahun Dasar (Baeline) 2021	Realisasi Capaian Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2024	Status	Perangkat Daerah
	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).							
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai/Kategori	63,25	63,32	83,67	87,37	Tercapai	**SETDA**
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	12,96	16,36	16,37	16,37	Tercapai	**SETWAN**
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen	1,16	1,7	10,26	12,5	Tercapai	**BKPSDM**
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	89,9	90,53	90,7	91,02	Akan Tercapai	**DISDUKCAPIL**
TPB 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persen	0,84	0,87	0,85	0,9	Tercapai	**BAPPENDA**
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persen	0,43	0,48	0,42	0,45	Tercapai	**BAPPENDA**

Keterangan:

- Status perlu diperhatikan: realisasi yang < 90% dari nilai target
- Status akan mencapai target: nilai realisasi sudah >90% dari nilai target

Sumber: Hasil Analisi BAPPERIDA, 2025

2.8 Bandan Usaha Milik Daerah

Kabupaten Bandung memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah, yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, PT. Citra Bangun Selaras (CBS), PT. Bangun Daya Sentosa (BDS), dan PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

A. PDAM Tirta Raharja

BUMD dengan kinerja terbaik ini dibangun dengan tujuan utama menyediakan layanan air bersih secara luas dan berkelanjutan kepada masyarakat. PDAM Tirta Raharja pertama didirikan berdsarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor XVII Tahun 1977 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung melalui Perda Nomor 10 Tahun 2014. Pada Tahun 2019, PDAM Tirta Raharja mengalami perubahan bentuk badan hukum berdasarkan amanat PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.

Dalam menjalankan operasionalnya, PDAM Tirta Raharja telah mengalami berbagai fase perkembangan dan transformasi, baik dalam aspek kelembagaan, cakupan pelayanan, maupun kapasitas produksi, dan distribusi air bersih. Kehadiran PDAM Tirta Raharja merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang aman, sehat, dan terjangkau.

Memiliki visi menjadi PERUMDA Air Minum yang berorientasi global dan terunggul dalam memberikan pelayanan prima yang dinamis dan berkelanjutan, didukung inovasi teknologi informasi. Misi perusahaan mencakup peningkatan tata kelola sistem teknologi informasi *(IT Governance)*, peningkatan keandalan infrastruktur SPAM, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan cakupan pelayanan, pengembangan SDM kreatif dan inovatif, serta kolaborasi dengan mitra global dan stakeholder terkait.

Cakupan Pelayanan sampai dengan September 2024 sebesar 12,73% dari target sebesar 11,57% atau naik 4,2%. dari cakupan pelayanan Tahun 2022 sebesar 8,53%. Pelayanan meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Dengan perkembangan sambungan rumah sebanyak 16.629 SR dari posisi Tahun 2019 sebanyak 102.001 SR menjadi 118.630 SR di akhir tahun 2024 atau dengan rata rata pertumbuhan pertahun sebanyak 3.325 SR. Namun, PDAM ini masih menghadapi tantangan seperti tingginya tingkat kehilangan air (NRW) sekitar 29,7%, kapasitas sumber air baku yang belum optimal, serta kurangnya adopsi teknologi digital dalam operasional. Dari sisi eksternal, PDAM menghadapi ancaman pencemaran lingkungan, risiko sosial terkait tarif layanan, dan dampak perubahan iklim.

Dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raharja, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berkontribusi dalam memberikan penyertaan modal. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.

B. PT. Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja

Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di Kabupaten Bandung ini, bertujuan menjadi lembaga intermediasi keuangan terdepan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bank ini berasal dari penggabungan lima belas perusahaan daerah BPR BKPD di Kabupaten Bandung, yang dikonsolidasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 04 tahun 2009 pada tanggal 2 April 2009. Izin operasional penggabungan usaha diperoleh pada 15 Desember 2009 melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/15/KEP.DpG/2009. Pada tahun 2025, terjadi perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan nama Bank Perkreditasn Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), perubahan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kontribusi utama PT BPR Kerta Raharja bagi Kabupaten Bandung terlihat dari perannya sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut. Mereka menyediakan berbagai produk pinjaman seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk kebutuhan modal UMKM dan kebutuhan keluarga lainnya, serta solusi pembiayaan untuk renovasi atau melengkapi hunian. Sebagai BUMD, PT BPR Kerta Raharja juga turut serta dalam kegiatan sosial dan keagamaan di Kabupaten Bandung, serta aktif dalam mendukung program-program pemerintah daerah. Kedepannya banyak tantangan yang dihadapi sehingga perlu meningkatkan daya saing BPR Kerta Raharja diantaranya:

- Suku bunga kredit yang ditawarkan kepada masyarakat dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku di Bank Umum sehingga kurang kompetitif.
- Kualitas Sumber Daya Manusia yang harus terus ditingkatkan.
- Transformasi teknologi (digitalisasi).
- Persaingan ketat adanya *fintech*, pinjaman online. Keberadaan *fintech* saat ini yang menyediakan layanan peminjaman dengan besaran bunga yang lebih menarik.

- Persaingan antar BPR yang dinamis, dimana saat ini Bank Umum juga menawarkan produk pinjaman kepada para UMKM, pedagang pasar, dan pelaku usaha sektor informal lainnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

C. PT. Citra Bangun Selaras (CBS)

BUMD ini dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Selaras dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Selaras. Perusahaan ini dibentuk bertujuan untuk menyelenggarakan usaha jasa dan pengelolaan di bidang sarana dan prasarana pembangunan wilayah seperti kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan yang dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah, serta pengelolaan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam menghadapi banyaknya tantangan didepan maka perlu adanya pembaruan dalam operasional dan pengelolaan usaha dan pengembangan sektor bisnisnya. Beberapa rekomendasi yang diberikan untuk menghadapi tantangan kedepannya adalah dengan penyusunan rencana bisnis yang komperhensif dan fokus pada pengelolaan perusahaan, pengembangan usaha, kerjasama dengan perusahaan padat modal, kemitraan perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan pelayanan publik.

D. PT. Bandung Daya Sentosa (BDS)

PT. BDS didirikan pada tahun 2022 melalui Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2022. Tujuannya adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pasokan pangan di Kabupaten Bandung, sehingga dapat mengendalikan inflasi pada sektor pangan. BUMD ini berfokus pada sektor Perdagangan, Agribisnis, dan Industri, dengan tujuan utama untuk mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT BDS berkomitmen untuk menjadi perusahaan berskala internasional yang berkontribusi pada ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan nasional secara keseluruhan.

Untuk mencapai visinya tersebut, misi PT BDS berpusat pada pengembangan perusahaan yang mandiri, profesional, dan akuntabel. Mereka berupaya menjalin kolaborasi erat dengan masyarakat dan pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menyelaraskan proses bisnis dengan kekuatan sosial dan pemerintah, serta berkontribusi pada target pembangunan pemerintah. Selain itu, BDS juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari kegiatan usaha masyarakat dan memberikan kontribusi pada pendapatan regional maupun nasional.

2.9 Gambaran Keuangan

2.9.1 Realisasai APBD Tahun Anggaran Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun anggaran 2025-2029

Kinerja keuangan Kabupaten Bandung dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditinjau melalui kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

2.9.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran. Klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Selain itu , kinerja APBD Kabupaten Bandung tercermin dari struktur pendapatan, belanja, dan neraca daerah yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Sejak 2021-2024, terjadi peningkatan belanja yang mengindikasikan upaya pemulihan ekonomi dan penguatan layanan publik. Tren ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif. Data lengkap mengenai realisasi pendapatan dan belanja beserta dengan proyeksinya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.124. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4.	**PENDAPATAN DAERAH**					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.019.355.741.053,99	984.463.892.921,02	1.237.273.508.423,00	1.296.821.569.077,30	1.385.838.716.205,39
4.2	Pendapatan Transfer	3.893.456.403.411,00	4.209.427.081.051,00	4.643.262.811.507,00	5.027.441.135.065,00	5.512.197.560.930,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	433.180.628.862,00	441.790.684.654,00	29.691.788.584,00	37.444.037.547,00	36.945.621.140,00
Jumlah Realisasi Pendapatan		**5.345.992.773.326,99**	**5.635.681.658.626,02**	**5.910.228.108.514,00**	**6.361.706.741.689,30**	**6.934.981.898.275,39**

Sumber: LKPD Audited TA 2020-2024

Tabel 2.125. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5.	**BELANJA**					
5.1	Belanja Operasi	3.840.360.703.247,00	4.042.172.400.072,00	4.474.268.737.293,38	4.634.572.970.832,00	5.227.279.509.928,00
5.2	Belanja Modal	733.918.711.581,00	707.537.104.568,00	846.920.461.743,00	932.500.685.076,00	1.052.280.611.840,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	255.875.278.012,00	85.252.745.220,00	46.342.273.565,00	23.091.418.899,00	16.071.814.805,00
5.4	Belanja Transfer	637.060.579.965,00	659.422.637.412,00	713.144.247.085,00	803.442.821.253,00	823.500.050.148,00
Jumlah Realisasi Belanja		**5.467.215.272.805,00**	**5.494.384.887.272,00**	**6.080.675.719.686,38**	**6.393.607.896.060,00**	**7.119.131.986.721,00**
Total Surplus (Defisit)		**121.222.499.478,01**	**-141.296.771.354,02**	**170.447.611.172,38**	**31.901.154.370,70**	**184.150.088.445,61**

Tabel 2.126. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
6.	**PEMBIAYAAN**					
6.1	Penerimaan Pembiyaaan Daerah	636.927.198.547,71	507.761.415.239,69	95.595.188.950,82	462.584.215.248,92	343.356.597.407,22
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.500.000.000	16.001.080.000	113.984.797.625	63.300.000.000	0
Pembiayaan Netto		**628.427.198.547,71**	**491.760.335.239,69**	**18.389.608.674**	**399.284.215.248,92**	**343.356.597.407,22**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		**507.204.699.069,69**	**746.015.940.701,71**	**188.837.219.846,08**	**323.426.117.224,22**	**159.206.508.961,61**

Sumber: LKPD Audited TA 2020-2024

Tabel 2.127. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026-2030

No	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	6.066.673.261.334,00	5.751.554.737.362,00	5.786.391.632.457,00	5.821.224.517.163,00	5.855.489.266.823,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.050.385.786.537,00	1.855.774.357.565,00	1.890.611.252.660,00	1.925.444.137.366,00	1.959.708.887.026,00
4.2.	Pendapatan Transfer	3.981.287.474.797,00	3.860.780.379.797,00	3.860.780.379.797,00	3.860.780.379.797,00	3.860.780.379.797,00
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00

Tabel 2.128. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026-2030

No	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
5.	**BELANJA**	6.180.673.261.334,00	5.481.554.737.362,00	5.666.391.632.457,00	5.710.224.517.163,00	5.805.489.266.823,00
5.1	Belanja Operasi	4.486.566.536.437,80	3.852.891.925.756,00	4.008.323.228.469,00	4.043.047.476.988,00	4.123.550.359.791,00
5.2	Belanja Modal	746.197.845.877,20	640.806.200.476,00	666.657.261.042,00	672.432.536.909,00	685.821.634.618,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	80.800.000.000,00	82.800.000.000,00	84.800.000.000,00	84.800.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	897.908.879.019,00	907.056.611.130,00	908.611.142.946,00	909.944.503.266,00	911.317.272.414,00
	Total Surplus/Defisit	(114.000.000.000,00)	270.000.000.000,00	120.000.000.000,00	111.000.000.000,00	50.000.000.000,00

Tabel 2.129. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Bandung Tahun 2026-2030

No	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
6	**PEMBIAYAAN**					
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	250.000.000.000,00	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	136.000.000.000,00	270.000.000.000,00	120.000.000.000,00	111.000.000.000,00	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	114.000.000.000,00	(270.000.000.000,00)	(120.000.000.000,00)	(111.000.000.000,00)	(50.000.000.000,00)

Sumber: Data diolah BAPPERIDA (2025), data 2026 merupakan data RKPD 2026

Kondisi keuangan Kabupaten Bandung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, ditandai dengan peningkatan pendapatan daerah dari Rp 5,3 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 6,9 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat yang konsisten. Meski kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih terbatas, arah pertumbuhannya cukup positif dan mencerminkan potensi kemandirian fiskal yang mulai terbentuk.

Seiring meningkatnya pendapatan, kemampuan belanja daerah juga terus bertumbuh, mencapai Rp 7,1 triliun pada tahun 2024. Komposisi belanja sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional, sementara belanja modal cenderung fluktuatif. Meskipun sempat mengalami defisit anggaran pada tahun 2021, Kabupaten Bandung mampu mencatatkan surplus pada tahun-tahun berikutnya, yang didukung oleh pembiayaan netto dan posisi SiLPA yang cukup sehat. Hal ini mengindikasikan kapasitas pengelolaan fiskal yang adaptif terhadap tekanan pembiayaan, meskipun efektivitas belanja masih perlu ditingkatkan agar lebih berdampak langsung pada pembangunan.

Meski tren historis menunjukkan kinerja fiskal yang membaik, proyeksi belanja tahun 2026-2030 mengindikasikan tantangan lainnya. Kapasitas riil keuangan Daerah untuk tahun 2026-2030 dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pada prioritas pertama, Pemerintah Kabupaten Bandung menghadapi tantangan dalam pengelolaan belanja pegawai. Hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya kebijakan nasional yang berkaitan dengan penataan pegawai Non-ASN. Pemerintah Kabupaten Bandung akan melakukan pengkajian kembali terhadap belanja pegawai secara komprehensif guna memastikan kesesuaiannya dengan kemampuan fiskal daerah, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat mengoptimalkan ruang fiskal untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan belanja modal di Kabupaten Bandung terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan anggaran. Perencanaan belanja modal akan dilaksanakan secara cermat agar menghasilkan aset yang memiliki manfaat jangka panjang, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah.

Pada prioritas kedua, Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran belanja secara terarah dan terukur sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Seluruh program dan kegiatan yang telah dianggarkan disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penganggaran ini dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sehingga setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pada prioritas ketiga diarahkan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. Pembiayaan pada prioritas ini dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mengutamakan kepentingan pelayanan publik dan keberlanjutan program-program pembangunan daerah.

Kedepan pada tiap tahunnya akan dilakukan penguatan fiskal melalui upaya peningkatan PAD, pengefektifan belanja, dan penajaman alokasi anggaran untuk mendukung belanja-belanja prioritas. Dengan demikian, keberlanjutan fiskal Kabupaten Bandung ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas fiskal yang tersedia.

2.9.2 Neraca Daerah

Sebagai bagian dari laporan keuangan daerah, neraca mencerminkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Perkembangan neraca tahun 2019–2024 menjadi indikator penting untuk menilai kondisi fiskal jangka panjang serta kapasitas pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.130. Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	**ASET**						
A.	Jumlah Aset Lancar	1.008.448.654.708,17	956.295.781.728,04	1.274.337.153.850,31	987.703.243.948,63	751.636.885.646,34	577.604.789.763,53
B.	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.281.477.255,00	3.277.477.255,00	3.500.000.000,00	43.500.000.000,00	73.500.000.000,00	53.500.000.000,00
C.	Jumlah Aset Tetap	9.725.797.476.992,00	9.956.556.372.846,00	10.195.717.645.825,00	10.612.153.290.896,00	11.023.944.895.017,00	11.687.110.486.495,00
D.	Jumlah Aset Lainnya	129.497.773.309,00	183.389.938.224,00	149.369.346.898,00	182.239.994.058,77	335.377.339.916,83	217.506.869.533,00
JUMLAH ASET		**11.263.980.756.266,30**	**11.796.177.481.817,70**	**12.340.924.893.408,20**	**12.626.285.656.501,80**	**13.046.341.416.485,60**	**13.279.756.669.822,30**
2	**KEWAJIBAN**						
A.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	88.014.539.055,70	93.293.562.606,50	95.861.406.725,30	108.758.644.278,78	176.025.474.705,78	204.942.342.955,40
B.	Jumlah Kewajibang Jangka Panjang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
JUMLAH KEWAJIBAN		**88.014.539.055,70**	**93.293.562.606,50**	**95.861.406.725,30**	**108.758.644.278,78**	**176.025.474.705,78**	**204.942.342.955,40**
3.	**EKUITAS**						
	Ekuitas	11.175.966.217.210,60	11.702.883.919.211,20	12.245.063.486.682,90	12.517.527.012.223,00	12.870.315.941.779,80	13.074.814.326.866,90
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**11.263.980.756.266,30**	**11.796.177.481.817,70**	**12.340.924.893.408,20**	**12.626.285.656.501,80**	**13.046.341.416.485,60**	**13.279.756.669.822,30**

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Berdasarkan data neraca daerah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2019–2024, terlihat bahwa total aset mengalami tren kenaikan secara konsisten dari Rp 11,26 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 13,28 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan nilai aset tetap yang merupakan komponen terbesar dalam total aset, serta peningkatan investasi jangka panjang non permanen yang melonjak tajam pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun aset lancar sempat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021, nilainya justru menurun secara bertahap setelahnya.

Dari sisi kewajiban, jumlah kewajiban jangka pendek menunjukkan peningkatan dari Rp 88 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 204,94 miliar pada tahun 2024, sementara kewajiban jangka panjang tidak tersedia datanya sepanjang periode. Ekuitas daerah juga mengalami pertumbuhan dari Rp 11,18 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 13,07 triliun pada tahun 2024, mencerminkan kondisi keuangan yang relatif sehat dan stabil. Secara keseluruhan, struktur neraca menunjukkan bahwa pertumbuhan aset dan ekuitas lebih besar dibandingkan kewajiban, yang menandakan pengelolaan keuangan daerah berjalan cukup baik selama periode tersebut.

2.9.3 Alternatif Pendanaan Pembangunan

2.9.3.1 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bandung menyadari bahwa kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan alternatif sumber pembiayaan yang memungkinkan agar pembangunan tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Pemerintah Kabupaten Bandung membuka ruang terhadap skema pembiayaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan. Acuan utama dalam pengembangan pembiayaan infrastruktur ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, di mana jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan mencakup infrastruktur ekonomi dan sosial. Adapun jenis infrastruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut meliputi:

1. Infrastruktur transportasi;
2. Infrastruktur jalan;
3. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
4. Infrastruktur air minum;

5. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
6. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
7. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
8. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
9. Infrastruktur ketenagalistrikan;
10. Infrastruktur minyak dan gas bumi serta energi terbarukan;
11. Infrastruktur konservasi energi;
12. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
13. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
14. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian;
15. Infrastruktur kawasan;
16. Infrastruktur pariwisata;
17. Infrastruktur kesehatan;
18. Infrastruktur lembaga pemasyarakatan;
19. Infrastruktur perumahan rakyat; dan
20. Jenis infrastruktur ekonomi dan sosial lainnya.

Pemanfaatan berbagai alternatif pembiayaan diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan akselerasi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.9.3.2 Ekonomi Syariah

Pemerintah Kabupaten Bandung merencanakan penguatan ekonomi syariah sebagai salah satu alternatif pendanaan daerah yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakter sosial keagamaan masyarakat. Pengembangan ini mencakup pemanfaatan instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), serta potensi penerbitan sukuk daerah untuk pembiayaan infrastruktur publik.

Langkah awal dimulai dengan penyusunan regulasi daerah yang mengatur tata kelola dana ZISWAF agar dapat digunakan untuk mendukung program pengurangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekonomi komunitas. Pemerintah juga akan membentuk tim teknis lintas perangkat daerah bersama BAZNAS, Kemenag, serta mitra lembaga keuangan syariah untuk menyusun *roadmap* pemanfaatan dana sosial keagamaan secara produktif dan akuntabel.

Kajian teknis terhadap kemungkinan penerbitan sukuk daerah akan dilakukan untuk menjajaki pembiayaan proyek strategis seperti pasar rakyat, irigasi pertanian, dan fasilitas

pendidikan. Studi akan mencakup aspek regulasi, risiko fiskal, model kontrak syariah yang tepat, serta kesiapan infrastruktur pengelolaan dan pelaporan.

Pengembangan ini terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), dan memperkuat kontribusi daerah terhadap target nasional yang ditetapkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Melalui langkah ini, Kabupaten Bandung mengambil bagian dalam transformasi sistem pembiayaan daerah yang lebih inklusif, etis, dan berbasis nilai.

Indikator-indikator yang mencerminkan ekonomi syariah dapat dikelompokkan secara konseptual ke dalam empat aspek utama: kelembagaan, regulasi, keuangan/pembiayaan, dan dampak sosial-ekonomi.Salah satu indikator utama mencerminkan keberadaan dan efektivitas kelembagaan, baik yang bersifat formal seperti BAZNAS, lembaga pengelola wakaf, maupun unit-unit pelaksana teknis dalam perangkat daerah yang mulai mengintegrasikan pendekatan syariah dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Tingkat partisipasi dan koordinasi antar-lembaga, termasuk keterlibatan ormas keagamaan dan lembaga keuangan syariah lokal, juga menjadi bagian dari pengukuran ini.

Dari sisi regulasi, indikator difokuskan pada ketersediaan dan pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tata kelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta instrumen pembiayaan syariah lainnya. Aspek ini tidak hanya mencerminkan kesiapan hukum, tetapi juga kemampuan regulasi dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan implementasi.

Pada aspek keuangan, indikator diarahkan untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana sosial keagamaan secara produktif. Ini mencakup jumlah dana ZISWAF yang terkelola melalui lembaga resmi, nilai pembiayaan syariah yang tersalurkan ke UMKM atau sektor riil masyarakat, serta jumlah proyek pembangunan yang didukung oleh skema pembiayaan syariah seperti sukuk daerah atau kerja sama wakaf produktif. Perkembangan ini juga diukur dari seberapa besar inklusivitas sistem keuangan syariah dalam menjangkau kelompok rentan atau pelaku usaha kecil.

Indikator dampak sosial dan ekonomi difokuskan pada perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan syariah, antara lain melalui penurunan tingkat kemiskinan yang terkait langsung dengan program pembiayaan syariah dan distribusi dana ZISWAF. Selain itu, perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat berbasis komunitas juga menjadi bagian dari pengukuran, terutama terhadap pelaku ekonomi yang mengalami peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha setelah menerima intervensi syariah.

Secara keseluruhan, indikator-indikator ini bertujuan menyediakan kerangka evaluatif yang dapat menggambarkan kemajuan, kendala, serta potensi pengembangan ekonomi syariah sebagai alternatif sistem pembiayaan pembangunan daerah yang beretika, berkeadilan, dan berbasis nilai lokal.

Kendala yang patut diperhatikan di antaranya adalah kurangnya referensi penggunaan alternatif pembiayaan syariah dalam pendanaan daerah. Bahkan hingga saat ini, belum ada daerah yang menerbitkan Sukuk. Hal tersebut menandakan bahwa untuk memanfaatkan sektor ekonomi syariah, masih diperlukan kajian lebih lanjut dan referensi yang lebih lengkap

2.9.3.3 Kerjasama Pengelolaan Pasar Ikan Modern Soreang

Meskipun Kabupaten Bandung tidak memiliki garis pantai, kebutuhan protein hewani dari sektor perikanan di masyarakat Kabupaten Bandung sangat tinggi, mencapai rata-rata 300 ton per hari. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dan memperkuat ketahanan pangan lokal, Pemerintah Kabupaten Bandung telah membangun Pasar Ikan Modern (PIM) Soreang di Jalan Raya Gading Tutuka, Kecamatan Soreang. Fasilitas ini didesain modern dengan luas bangunan 7.257 m², dilengkapi *cold storage* berkapasitas 45 ton, dan mesin es serpihan, menjadikannya potensial sebagai pusat distribusi ikan terbesar dan terlengkap di Bandung Raya. Pasar ini juga berperan dalam mendukung program pemerintah yang terkait dengan perikanan, di antaranya program "Gemar Makan Ikan" (Gemarikan) untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan asupan gizi masyarakat.

Namun, sejak mulai beroperasi pada tahun 2019, pemanfaatan PIM Soreang belum mencapai tingkat optimal. Tantangan signifikan meliputi beban operasional dan pemeliharaan yang tinggi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keterbatasan inovasi dalam manajemen pasar, serta fluktuasi *traffic* pengunjung yang memengaruhi efisiensi distribusi. Bahkan, pada akhir tahun 2023, pasar sempat non-aktif karena berakhirnya masa kontrak pengelolaan. Kondisi ini mengindikasikan adanya aset daerah strategis yang belum sepenuhnya produktif, sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan yang lebih inovatif dan efisien.

Mengingat potensi besar PIM Soreang dalam mendukung ketahanan pangan, menstimulasi ekonomi lokal, dan meningkatkan pelayanan publik, upaya revitalisasi pasar melalui skema Kerja Sama Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu solusi yang dapat diimplementasikan. Skema tersebut memungkinkan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengalihdayakan beban operasional dan investasi pada pihak ketiga yang profesional, sembari tetap memperoleh kontribusi finansial dan memastikan aset termanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Ini adalah langkah strategis

untuk mentransformasi PIM Soreang dari aset pasif menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Dengan pengelolaan yang baik, PIM juga berpotensi mendorong transformasi budaya yang positif dalam masyarakat. Di masa depan, konsumen akan memandang pasar sebagai tempat yang bersih, nyaman, tertib, dan tertata. Hal ini akan mengurangi kebiasaan berbelanja di tempat yang kurang higienis atau tidak terorganisir sehingga terbentuk budaya konsumsi yang lebih sehat dan modern. Di sisi lain, produsen atau pedagang akan didorong untuk beradaptasi dengan standar pasar modern, seperti menjaga kualitas produk, konsisten dalam pasokan, dan mengadopsi praktik bisnis yang lebih profesional. Ini bisa meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional.

2.10 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis

2.10.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya. Perumusan persoalan dan permasalahan tidak hanya didasarkan pada dokumen perencanaan dan literatur terkait, namun juga sangat mementingkan kontribusi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam berdiskusi langsung. Hal ini tidak hanya menambah referensi terhadap permasalahan yang ada, namun juga memberikan konfirmasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pelaksana terhadap relevansi dan potensi permasalahan yang akan terjadi di masa depan. Penyusunan perumusan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bandung didasari pada daftar indikator dari berbagai sumber peraturan maupun literatur, pengembangan data kondisi lapangan, laporan instansi pemerintah, dan media massa serta perangkat daerah.

Permasalahan pembangunan bukan hanya pada tingkat kinerja pembangunan saat ini yang berada di bawah target dan dinilai belum memadai. Melainkan tingkat kinerja pembangunan yang sudah baik, akan tetapi perlu ditingkatkan agar dapat melayani masyarakat secara optimal di masa yang akan datang dan tercermin dalam kondisi yang diperlukan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka

diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing aspek sesuai dengan kondisi objektif daerah seperti yang telah disajikan pada uraian bab gambaran umum. Berdasarkan kondisi Kabupaten Bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Memadai
- Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
- Kendala dalam Tata Kelola Pemerintahan
- Tantangan Infrastruktur dan Lingkungan
- Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi, terdapat beberapa tantangan pembangunan krusial yang perlu mendapatkan perhatian. Tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi yang berkeadilan, optimalisasi tata kelola pemerintahan, hingga pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Selain itu, stabilitas keamanan dan ketertiban umum juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Setiap tantangan ini saling berkaitan dan memerlukan solusi yang terintegrasi agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata.

A. Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Tabel 2.131. Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia
1	Kualitas SDM yang belum memadai
2	Belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan
3	Ketimpangan gender yang masih terjadi, terutama dalam akses ekonomi dan politik bagi perempuan
4	Masih adanya tantangan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk isu stunting dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
5	Mengatasi ketimpangan pendapatan masyarakat

Sumber: Analisis Bapperida,2025

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang perlu segera diatasi guna mendukung terwujudnya visi "Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan." Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang berdampak langsung pada rendahnya kualitas dan daya saing SDM. Saat ini, rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk masih sebesar 1:60.534 jiwa, jauh dari target nasional 1:30.000. Demikian pula rasio tempat tidur rumah sakit baru mencapai 1:1.532, masih belum memenuhi standar ideal 1:1.000. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan

infrastruktur dasar dan pemerataan layanan kesehatan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan yang layak dan berkualitas.

Di sisi lain, permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pada tahun 2024, tercatat 113 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, meningkat dari 72 kasus pada tahun 2020. Kasus stunting juga masih cukup tinggi, menandakan belum optimalnya intervensi gizi dan layanan kesehatan ibu-anak. Meskipun ketimpangan pendapatan tergolong rendah, dengan Indeks Gini sebesar 0,246, kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi dan partisipasi politik bagi perempuan masih menjadi hambatan. Menjawab tantangan ini, Misi 1 Bupati Bandung menekankan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan berakhlak melalui kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak, agar seluruh masyarakat memiliki akses dan peran yang setara dalam pembangunan daerah.

B. Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Tabel 2.132. Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan
1	Tingkat produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang relatif rendah
2	Penguatan sektor unggulan
3	Belum optimalnya kolaborasi dan integrasi ekonomi
4	Ketimpangan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja belum optimal, terutama bagi tenaga kerja berpendidikan rendah dan penyandang disabilitas
6	Ketahanan pangan yang masih perlu ditingkatkan
7	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa
8	Kondisi geopolitik yang dinamis

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Selain tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia, Kabupaten Bandung juga menghadapi berbagai kendala dalam sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Tingkat produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang relatif rendah menjadi tantangan utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pariwisata juga menjadi fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Di sisi lain, belum optimalnya kolaborasi dan integrasi ekonomi serta ketimpangan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga menunjukkan perlunya kebijakan yang mendorong sinergi antarpelaku ekonomi dan perlindungan sosial yang lebih merata. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang belum optimal, terutama dari kelompok berpendidikan rendah dan penyandang disabilitas, juga menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil. Berdasarkan data BPS, mayoritas

penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja memiliki tingkat pendidikan tertinggi lulusan Sekolah Dasar (SD).

Selain itu, ketahanan pangan yang masih perlu ditingkatkan menuntut upaya peningkatan produksi pangan lokal secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat desa yang belum optimal juga menjadi tantangan dalam menciptakan kemandirian ekonomi lokal. Ditambah lagi, kondisi geopolitik yang dinamis turut memengaruhi stabilitas dan arah pembangunan daerah.

Sejalan dengan Misi 2 Bupati Bandung, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan akan didorong dengan pendekatan berkelanjutan dan berorientasi pada kemandirian daerah. Melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kolaborasi, serta pemberdayaan masyarakat, diharapkan Kabupaten Bandung dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan tangguh di masa depan.

C. Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Tabel 2.133. Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
1	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi *dynamic government*
2	Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan.
3	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat

Sumber: Analisis Baapperida,2025

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diselesaikan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu tantangan utama adalah kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian karena masih diperlukan peningkatan dalam menghadapi perubahan dinamika pemerintahan yang semakin kompleks di era digital.

Selaras dengan Misi 3 Bupati Bandung, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan ini akan di atasi melalui berbagai kebijakan yang mendorong efisiensi dan efektivitas birokrasi. Salah satu langkah penting adalah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih menghadapi kendala dalam integrasi sistem digital. Dengan meningkatkan stabilitas dan koordinasi dalam sistem digital pemerintahan, diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan transparan.

D. Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Tabel 2.134. Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan infrastruktur dan Lingkungan
1	Belum optimalnya pemerataan akses infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kab. Bandung
2	Belum optimalnya pembangunan wilayah, terutama dalam aspek infrastruktur, hunian, dan kualitas lingkungan
3	Adanya degradasi lingkungan, akibat kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang, pencemaran lingkungan, deforestasi, dan pengelolaan sampah yang belum maksimal
4	Terbatasnya daya dukung penyediaan pangan dan penyediaan air

Sumber: Analisis Bapperida,2025

Dalam bidang infrastruktur dan lingkungan, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan besar yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya pembangunan wilayah, terutama dalam aspek infrastruktur, hunian, dan kualitas lingkungan. Selain itu, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang, pencemaran lingkungan, deforestasi, serta pengelolaan sampah yang belum maksimal. Pemerataan akses infrastruktur dasar masih menjadi kendala, terutama di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan. Ketimpangan dalam akses infrastruktur ini berdampak pada ketidakmerataan pembangunan dan kesenjangan kualitas hidup antar wilayah.

Misi 4 Bupati Bandung menekankan peningkatan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan sebagai solusi terhadap tantangan ini. Pembangunan wilayah harus lebih optimal dengan memperhatikan aspek infrastruktur dasar, hunian, dan kualitas lingkungan. Selain itu, keterbatasan daya dukung penyediaan pangan dan air juga perlu di atasi melalui strategi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, Kabupaten Bandung diharapkan dapat memiliki infrastruktur yang lebih merata dan lingkungan yang lebih lestari demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

E. Tantangan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 2.135. Tantangan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum yang perlu Ditingkatkan
2	Koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan

Sumber: Hasil Anaisis Bapperida,2025

Dalam aspek ketenteraman dan ketertiban umum, Kabupaten Bandung menghadapi beberapa tantangan yang perlu segera di atasi demi menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Salah satu tantangan utama adalah stabilitas keamanan dan ketertiban umum yang masih perlu ditingkatkan. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan hidup masyarakat serta keberlangsungan pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah masih memerlukan peningkatan agar respon terhadap berbagai permasalahan keamanan dapat lebih cepat dan efektif.

Misi 5 Bupati Bandung berfokus pada upaya menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat. Salah satu tantangan yang juga harus diperhatikan adalah menjaga kerukunan masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang. Dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif dan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan konflik, Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi daerah yang lebih aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warganya.

Penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Bandung berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kabupaten Bandung yang dikelompokkan berdasarkan aspek sebagai berikut.

2.10.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

Pada aspek geografis dan demografis terdapat empat tantangan utama yaitu rendahnya kualitas SDM, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, keterbatasan air, serta penurunan produktivitas pangan. Rata-rata lama sekolah yang rendah dan tingginya angka stunting dipicu oleh faktor ekonomi, akses terbatas ke pendidikan dan kesehatan, serta buruknya sanitasi. Sementara itu, kenaikan suhu global, cuaca tak stabil, dan rendahnya kesadaran lingkungan memperburuk kondisi ekologi, diperparah oleh emisi industri dan transportasi.

Di Kabupaten Bandung, 63,7% lahan menghadapi krisis air, sementara sektor pertanian merosot akibat alih fungsi lahan, degradasi tanah, serta cuaca ekstrem. Petani kesulitan mengakses modal, bibit unggul, dan pupuk berkualitas. Diperlukan kebijakan terpadu yang berfokus pada peningkatan SDM, mitigasi iklim, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

2.10.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek ini terdapat empat tantangan utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu fluktuasi indeks kemiskinan, keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, rendahnya kesetaraan gender dalam pemberdayaan masyarakat, serta kondisi lingkungan yang belum mendukung kesehatan. Indeks kemiskinan yang masih fluktuatif dipicu oleh inflasi, ketimpangan pendapatan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya akses terhadap pendidikan. Sementara itu, akses layanan pendidikan dan kesehatan yang belum inklusif disebabkan oleh keterbatasan geografis, aksesibilitas, dan ekonomi, yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, rendahnya kesetaraan gender terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang masih fluktuatif dan lebih rendah dibanding tingkat provinsi dan nasional. Hal

ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya program pemberdayaan perempuan, serta hambatan budaya dan struktural. Di sisi lain, kondisi lingkungan yang belum mendukung kesehatan masyarakat ditandai dengan akses sanitasi dan air minum layak yang masih terbatas, akibat infrastruktur yang belum memadai serta kurangnya kesadaran akan pentingnya sanitasi. Permasalahan ini memerlukan intervensi kebijakan yang terarah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

2.10.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek ini terdapat berbagai tantangan dalam membangun daya saing daerah khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung, diantaranya infrastruktur yang belum memadai, kualitas sumber daya manusia yang rendah, kurangnya inovasi dan riset, iklim investasi yang belum mendukung, serta kebijakan pemerintah, secara kolektif hal-hal ini dapat menghambat kemampuan daerah untuk bersaing di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan warganya secara berkelanjutan.

Komponen daya saing daerah ini mengacu kepada empat pilar utama seperti yang terdapat dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengadopsi kerangka *Global Competitiveness Index* (GCI) *World Economic Forum*, yaitu Lingkungan Pendukung termasuk didalamnya kelembagaan dan infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Pasar termasuk pasar produk dan tenaga kerja dan yang terakhir adalah Ekosistem Inovasi namun untuk penilaian oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ada beberapa penyesuaian indikator dan metodologi agar lebih relevan dengan konteks daerah di Indonesia.

Dalam Indeks Daya Saing Daerah yang dirilis oleh BRIN tahun 2025, Kabupaten Bandung masuk dalam 10 besar tertinggi di Indonesia, dari 12 pilar penilaian skor tertinggi ada di Pasar Produk dan nilai terendah ada di Pilar Sistem Keuangan dan Kapabilitas Inovasi. Pasar produk ini mencakup kapasitas pasar dan kemampuan pasar untuk beradaptasi serta berkembang, sementara untuk sistem keuangan sebagai bagian dari kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Jika melihat hasil penilaian diatas maka minimnya riset dan kemampuan untuk menghasilkan produk inovatif dan mengadopsi teknologi masih rendah di Kabupaten Bandung. Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan ekonomi dan mendukung pengembangan usaha dan inovasi bisnis sangat penting khususnya bagi pelaku usaha mikro dan industri kecil pengolahan terkait dengan penerapan teknologi. Di sisi lain, investasi yang bersifat teknologi tinggi juga belum maksimal akibat kurangnya infrastruktur pendukung, regulasi yang belum kondusif, serta strategi promosi investasi yang belum

efektif. Semua faktor ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

2.10.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Dalam tata kelola pemerintahan terdapat tiga tantangan utama: prosedur birokrasi yang panjang, penerapan SPBE yang belum optimal, serta kebijakan pembangunan yang kurang berbasis riset. Pelayanan publik terhambat oleh sistem yang tidak efisien, rendahnya transparansi, dan birokrasi yang kurang responsif.. Penerapan SPBE menghadapi kendala infrastruktur IT, rendahnya adopsi teknologi, serta minimnya integrasi dan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, pengambilan kebijakan kurang didukung analisis mendalam dan partisipasi stakeholder, sehingga kebijakan kerap tidak berbasis data valid. Hambatan struktural dan operasional juga melemahkan eksekusi. Solusinya mencakup reformasi birokrasi yang lebih efisien, percepatan adopsi teknologi, dan penguatan riset serta analisis data dalam perumusan kebijakan.

Gambar 2.108. Pohon Masalah Aspek Geografis dan Demografis

Sumber: Analisis Bapperida,2025

Gambar 2.109. Pohon Masalah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Analisis Bapperida,2025

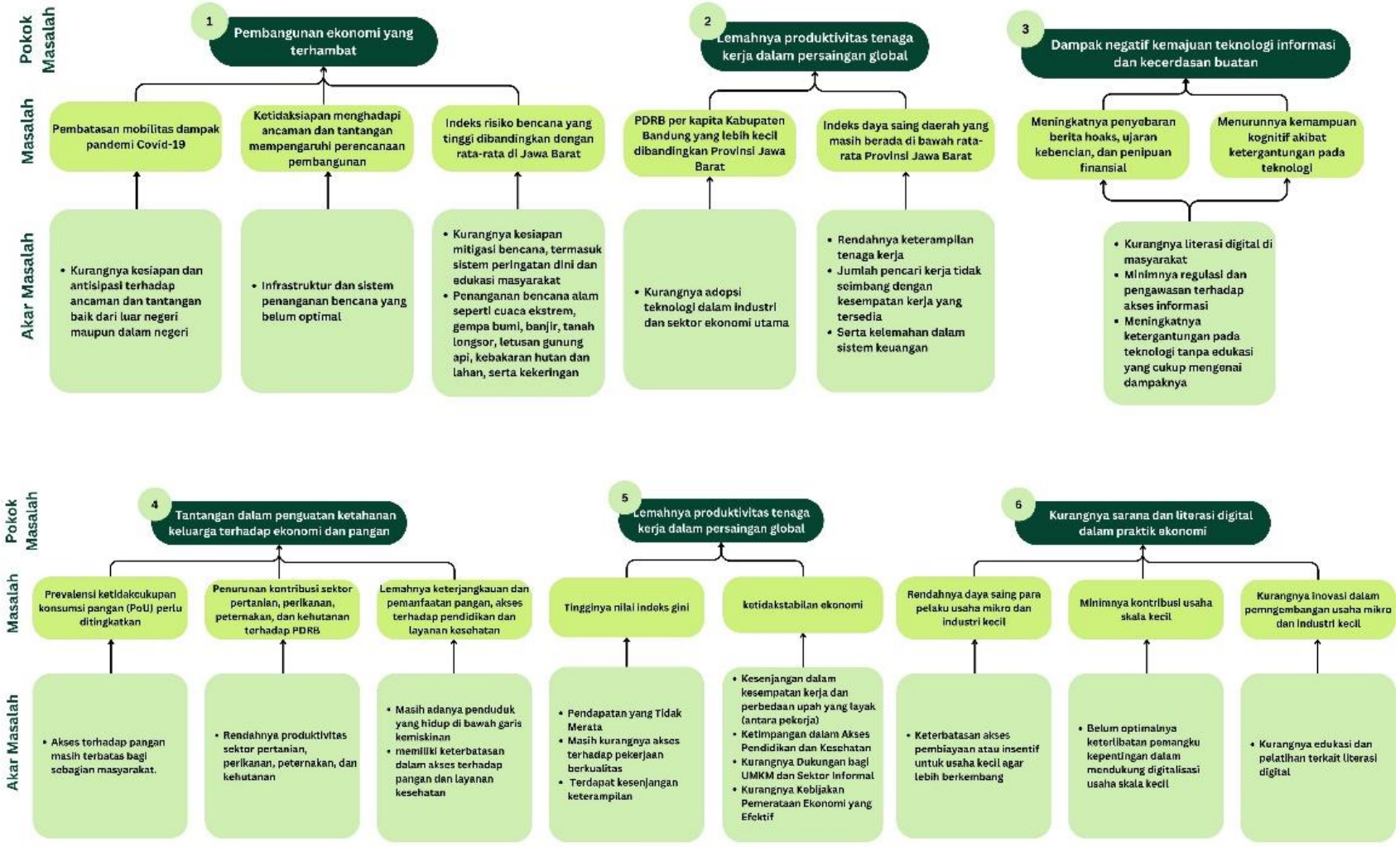

Gambar 2.110. Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah
Sumber: Analisis Bapperida,2025

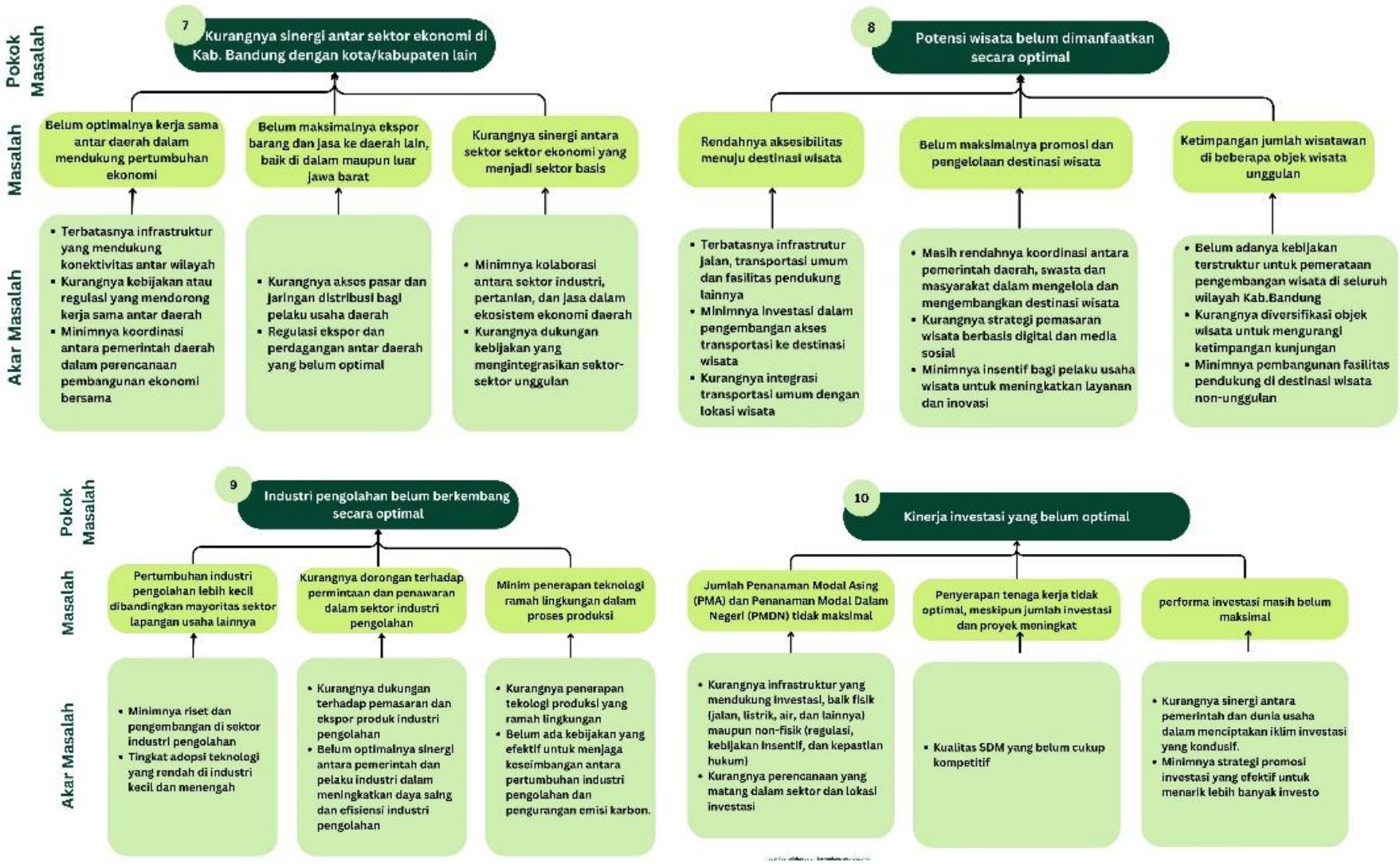

Gambar 2.111. Pohon Masalah Aspek Daya Saing Daerah (Lanjutan)
Sumber: Analisis Bapperida,2025

Gambar 2.112. Pohon Kinerja Aspek Pelayanan Umum
Sumber: Analisis Bapperida,2025

2.10.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Sehingga, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan.

2.10.2.1 Isu Global

Di era modern ini, dunia menghadapi berbagai tantangan besar yang mempengaruhi kehidupan manusia secara global. Perubahan iklim menjadi ancaman nyata dengan dampak yang semakin terasa, mulai dari bencana alam yang lebih ekstrem hingga ketidakstabilan ekosistem. Sementara itu, transformasi teknologi berkembang pesat, membawa peluang sekaligus tantangan bagi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspek lingkungan secara holistik.

A. Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah menjadi isu prioritas global yang mendesak, dan dampaknya semakin nyata dirasakan di seluruh dunia. Laporan dari *World Meteorological Organization* (WMO). Menunjukkan bahwa tahun 2023 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat dengan ketidakwajaran suhu global 1,45℃ di atas rata-rata periode pra-industri. Peningkatan suhu ini memicu serangkaian bencana alam, seperti gelombang panas, banjir, dan kekeringan yang mengancam kehidupan manusia dan ekosistem.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi bencana alam menjadi tantangan serius. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (*Nationally Determined Contribution* (NDC) pada tahun 2030 dan terus berupaya untuk merealisasikan target tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2022, target penurunan emisi sebesar 91 juta ton CO^2, dengan realisasi 91,5 juta ton CO^2. Upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.

Di tingkat lokal, Kabupaten Bandung juga menghadapi tantangan serupa. Perubahan iklim dapat memengaruhi sektor pertanian, sumber daya air, dan infrastruktur di wilayah ini.

Suhu maksimum di Kabupaten Bandung saat ini berkisar antara 29 hingga 32°C pada siang hari, disertai dengan tingkat kelembaban udara yang tinggi, mencapai hingga 97% pada waktu tertentu. Kondisi suhu permukaan laut yang hangat turut mendorong peningkatan uap air di atmosfer, yang memperbesar peluang terjadinya hujan lebat. Saat ini, wilayah Kabupaten Bandung tengah memasuki masa pancaroba, yakni periode transisi dari musim hujan menuju musim kemarau. Berdasarkan perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di kawasan Bandung Raya diperkirakan akan dimulai pada Juni 2024, dengan curah hujan yang berada pada kisaran normal hingga sedikit di bawah normal.

Meskipun demikian, beberapa wilayah di Kabupaten Bandung telah mengalami hujan lebat yang berdampak pada terjadinya banjir dan tanah longsor. Perubahan iklim yang terjadi di wilayah Jawa Barat secara nyata telah mengganggu kestabilan pola cuaca, serta meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. BMKG juga memperkirakan akan terjadi lonjakan curah hujan yang signifikan pada bulan November 2024, sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam.

Merespons kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang tergolong rawan bencana sebagai langkah antisipatif menjelang musim hujan. Hal ini menjadi bukti bahwa Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung, tengah menghadapi tantangan serius akibat dampak perubahan iklim yang ditandai oleh pola cuaca yang semakin tidak menentu. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat serta penerapan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi sangat krusial untuk menekan risiko bencana di masa mendatang.

Dalam upaya penanganan perubahan iklim, Kabupaten Bandung juga aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 12 Tahun 2024. Inventarisasi tersebut disusun berdasarkan pedoman teknis yang melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan sektoral masing-masing. Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang secara aktif menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau emisi GRK dari berbagai sumber. Program ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global, mengingat emisi GRK memiliki kontribusi besar terhadap pemanasan global dan dampaknya terhadap lingkungan.

B. Transformasi Digital

Transformasi teknologi telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam mengubah lanskap global. Kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan *Internet of Things* (IoT) adalah beberapa teknologi yang merevolusi industri, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari. Menurut laporan dari perusahaan riset pasar seperti Gartner dan IDC, investasi dalam teknologi digital terus meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan pengakuan global terhadap potensi teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan mengatasi tantangan sosial.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muda dan tingkat penetrasi internet yang tinggi, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan transformasi teknologi. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi serta Digitalisasi merupakan salah satu program prioritas yang dirumuskan oleh pemerintah. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi merupakan kunci dalam menghadapi transformasi teknologi global. Pendidikan yang berfokus pada *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) menciptakan SDM adaptif dan inovatif, sementara riset dalam sains dan teknologi mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan manufaktur canggih. Digitalisasi mempercepat efisiensi layanan, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong pemerataan akses teknologi. Dengan sinergi ini, sebuah negara tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan solusi inovatif yang berkontribusi pada kemajuan global dan keberlanjutan.

Di tingkat lokal, Kabupaten Bandung juga berupaya untuk memanfaatkan transformasi teknologi dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung dapat mendorong adopsi teknologi di sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. Misalnya, penggunaan aplikasi digital untuk pemasaran produk lokal dan pengelolaan rantai pasok dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM. Selain itu, pengembangan *smart city* dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Dengan memanfaatkan transformasi teknologi, Kabupaten Bandung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Geopolitik dan Geoekonomi

Perubahan dinamika geopolitik dan geoekonomi global, seperti ketegangan antarnegara, perang dagang, serta terganggunya rantai pasok, memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan ekonomi nasional dan daerah. Fluktuasi harga energi dan pangan serta

ketidakpastian global dapat memengaruhi inflasi, investasi, dan daya beli masyarakat global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata, sekaligus menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok.

Di sisi lain, pergeseran kekuatan ekonomi global ke kawasan Asia, termasuk ASEAN, membuka peluang strategis bagi Kabupaten Bandung untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Melalui peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan konektivitas, serta kemudahan berusaha, daerah dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok regional dan pengembangan ekonomi kreatif. Respons yang adaptif dan terarah terhadap isu geopolitik dan geoekonomi global ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Demografi Global

Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa peduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk tua dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, dimana 95% pertambaan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25-30% penduduk perkotaan masih tinggal dikawasan permukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik dan jalan yang memadai.

Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi, dengan proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai sekitar 70,72% dari total populasi berdasarkan Sensus Penduduk 2020. Namun, proyeksi menunjukkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) akan meningkat dari 5,95% pada tahun 2020 menjadi sekitar 15,9% pada tahun 2050. Kabupaten Bandung, sebagai bagian dari Indonesia, perlu memanfaatkan momentum bonus demografi ini dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta mempersiapkan sistem kesehatan dan jaminan sosial yang adaptif untuk menghadapi penuaan penduduk di masa depan.

E. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung melalui Telaah KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan tujuan global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial, KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, KLHS tidak hanya relevan secara nasional, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target SDGs.

Sejak tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs, tetapi dengan cakupan yang lebih luas. Jika MDGs hanya memiliki 8 tujuan, SDGs menetapkan 17 tujuan dengan 169 target yang dirancang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan global. SDGs berfokus pada tiga aspek utama pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. SDGs disusun sebagai kelanjutan dari keberhasilan MDGs dan mencakup lebih banyak aspek kehidupan. Pelaksanaannya didasarkan pada lima pilar utama, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Untuk mencapai target pada tahun 2030, ditetapkan 17 tujuan global sebagai pedoman utama.

Gambar 2.113. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: sdgs.bappenas.go.id

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah upaya global untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. TPB mencakup berbagai dimensi seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan ini, terdapat 17 tujuan utama yang harus dipenuhi, antara lain penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan terhadap ekosistem darat

dan laut. Kabupaten Bandung sebagai bagian dari komitmen nasional terus berupaya mencapai target TPB dengan berbagai strategi dan kebijakan.

Capaian TPB di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai tantangan. Dari total 203 indikator yang ditetapkan, sebagian besar indikator (59,11%) telah dilaksanakan dan berhasil mencapai target nasional (SS). Sebanyak 27,09% indikator telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), sementara 10,34% belum dilaksanakan dan juga belum mencapai target nasional (BB). Sisanya, 3,45% tidak memiliki data (n/a). Hal ini mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar program TPB berjalan efektif, masih terdapat ruang perbaikan terutama pada indikator yang belum mencapai target atau belum terlaksana sama sekali.

Dalam merumuskan isu strategis TPB, Kabupaten Bandung memperhatikan berbagai faktor seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kebijakan pembangunan daerah, serta hasil evaluasi capaian TPB. Beberapa isu utama yang diidentifikasi antara lain alih fungsi lahan yang berdampak pada ekosistem, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat kurangnya akses pendidikan berkualitas, serta perlunya peningkatan representasi perempuan dalam pengambilan kebijakan. Isu-isu ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 9 isu PB strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.136. Arahan KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Belum optimalnya akses sanitasi (air minum layak, limbah domestik dan persampahan) sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.	TPB 6
2	Tingginya alih fungsi lahan menyebabkan semakin menurunnya proporsi tutupan lahan	TPB 15
3	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi sebagai upaya peningkatkan daya saing sektor ekonomi	TPB 8, TPB 9 & TPB 17
4	Tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualits konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	TPB 1 dan TPB 2
5	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyaraakat	TPB 4
6	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16
7	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	TPB 1
8	Belum optimalnya pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat	TPB 3
9	Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan akta kelahiran	TPB 16

Sumber: KLHS RPJMD, 2025

2.10.2.2 Isu Nasional

A. Perpindahan IKN

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor

perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Fungsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sekaligus penyangga ekonomi Indonesia, dengan hilangnya sekitar 90% dari total keseluruhan belanja pemerintahan pusat di DKI Jakarta, serta adanya keterkaitan DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat seperti ekonomi akan memiliki dampak menurunnya PDRB sebesar 0,06%, serta upah nyata sektor pertanian turun sebesar 0,49%, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat.

B. Bonus Demografi Indonesia

Pada rentang tahun 2025-2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan puncak peningkatan usia produktif diperkirakan tepat saat Indonesia berusia 100 tahun di tahun 2045. proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia kedepannya. Selain itu, Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50% yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

C. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Saat ini, pemerintah Indonesia tengah memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan dalam skala nasional maupun global. Salah satu upayanya dengan mengantisipasi perubahan iklim melalui penandatanganan *Paris Agreement* sebagai bentuk keterlibatan dalam komitmen global untuk menanggulangi perubahan iklim. Adanya ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka panjang untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada ekonomi hijau, Indonesia memiliki fokus pada pembangunan ekonomi

yang berkelanjutan dan penurunan risiko kerusakan lingkungan, dengan ditopang oleh 6 sumber energi terbarukan yaitu gelombang laut, panas bumi, bioenergi, air, angin, dan panas matahari. Sementara itu, ekonomi biru dilandasi oleh potensi laut negara kepulauan Indonesia, sehingga perlu pelestarian sumber daya laut yang akan berdampak pada cadangan sumber pangan yang berkelanjutan.

D. Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

Keterbatasan terhadap akses angkutan umum perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Selain itu, permasalahan terkait keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air menyebabkan keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti. Selain itu baru sebagian kecil rumah tangga mendapat akses terhadap pengelolaan sanitasi aman, pengelolaan air limbah domestik yang berasal sari kakus (*blackwater*), non kakus (*greywater*), ataupun lumpur tinja.

E. Perubahan iklim, data dukung dan daya tampung lngkungan, serta ketahanan bencana

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp 22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

F. Desentrlisasi dan ekonomi daerah

Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan

peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, tuntutan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Jawa semakin tinggi seiring dengan membaiknya tingkat pengetahuan masyarakat dan ruang untuk mengekpresikan aspirasi dan ide masyarakat perlu terus dibuka.

2.10.2.3 Isu Regional

1. Isu Strategis Jawa Barat

a. *Green and Blue Economy*

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal. Paradigma *green and blue economy* yang berkembang saat ini harus melibatkan masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari keseimbangan sistem sosial ekologi di Jawa Barat.

Green economy merujuk pada model ekonomi yang berfokus pada pengembangan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan, efisiensi energi, serta mengurangi dampak negatif lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan dari segi lingkungan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara luas. *Blue economy,* di sisi lain, berkaitan dengan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Konsep ini mencakup pengembangan ekonomi yang memanfaatkan potensi lain dan sumber daya alam yang ada di ekosistem laut secara berkelanjutan. *Blue economy* menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut, pemaanfaatan sumber daya dengan cara yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat pesisir yag hidup dari laut.

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi di distribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan atau rentan. Ini melibatkan penciptaan kesempatan kerja yang adil, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam peroses pembangunan.

Berdasarkaan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *green and blue economy* dengan pembangunan inklusif berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan memperkuat kapasaitas masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan

b. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Perkembangan penduduk menciptakan potensi sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat.

Perbaikan terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam penddikan, pelatihan, inovasi, kesejahteraan, dan pemberdayaan adalah kunci mencapai tujuan ini dalam upaya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

c. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar

Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wiayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu permasalahan sekaligus tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat. Kesenjangan dalam penyelenggaraan pembangunan akan menciptakan perbedaan kualitas kehidupan, termasuk kualitas sumber daya manusianya. Dalam *Indonesia Development Forum* (2018), kesenjangan ini berkaitan dengan permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar khususnya di antara masyarakat marginal yang dapat menyebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Kesenjangan wilayah dapat terjadi karena adanya perbedaan faktor geografi, kualitas sumber daya alam dan manusia, sehingga keterbatasan aksesibilitas perhubungan antar daerah. Masalah pokok yang harus dipecahkan adalah adanya konsepsi kuat untuk jangka waktu yang panjang yang dilandasi keadilan sosial dan sistem ekonomi yang tidak memihak terlalu kuat pada wilayah tertentu.

Isu tentang kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi akses dan kualitas hidup masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Beberapa poin penting terkait isu kesenjangan pembangunan dan

infrastruktur pelayanan dasar adalah akses yang tidak merata, dampak pada kualitas hidup, pengembangan ekonomi, inklusivitas sosial, perubahan iklim dan keberlanjutan, pemerataan pembangunan, tantangan finansial.

d. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan tema isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan linkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sejumlah poin utama yang terkait dengan isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingungan adalah daya dukung daya tampung, eksploitasi berlebihan sumber daya, perubahan iklim, manajemen sumber daya, kehidupan berkelanjutan, kolaborasi global, pendidikan, dan kesadaran. Pengelolaan sumber daya alam untuk pemanfaatan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan yang dapat menopang kehidupan manusia merupakan tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang keberlanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu, kemampuan lingkungn hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami, dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan. Perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa ekosistem wilayah dan lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dan penghidupan manusia.

e. Keberlanjutan Penataan Ruang

Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung, guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Isu keberlanjutan penataan ruang menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan. Poin penting terkait isu keberlanjutan penataan ruang meliputi pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan. Beberapa poin penting terkait isu keberlanjutan penataan ruang terdiri dari pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, keadilan sosial, adaptasi terhadap perubahan iklim, penggunaan lahan yang efisien, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antar pemerintah.

f. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegrasi memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik, dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan. Isu kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Aspek penting yang terkait dengan isu kualitas tata kelola pemerintah terdiri dari transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, keadilan dan keterbukaan, efisiensi dan efektivitas, penegakan hukum dan anti-korupsi, inovasi dan teknologi, kolaborasi dan kemitraan.

2. Telaah Dokumen Rencana Tata Ruang Perkotaan Cekungan Bandung

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Dalam konteks Kabupaten Bandung, penataan ruang Cekungan Bandung memiliki peran sebagai alat koordinasi dan operasionalisasi rencana pembangunan yang berfungsi untuk memastikan keseimbangan pengembangan antarwilayah. Penataan ruang ini juga berperan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Wilayah Kabupaten Bandung sendiri termasuk ke dalam bagian kawasan strategis nasional karena mendukung pusat-pusat kegiatan utama dan penyeimbang, seperti kawasan industri, permukiman, pertanian, hingga pusat jasa dan perdagangan. Sebanyak 31 kecamatan di Kabupaten Bandung tercakup dalam kawasan Cekungan Bandung, yang menjadi sasaran pengaturan dan pengendalian ruang untuk menjaga kesinambungan lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tabel di bawah menjelaskan isu strategis konstelasi Kabupaten Bandung dalam penataan ruang dan cakupan kawasan perkotaan cekungan bandung.

Tabel 2.137. Peran dan Fungsi Kabupaten Bandung dalam Penataan Ruang dan Cakupan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Aspek	Penjelasan
Peran	1. Menjadi alat koordinasi pembangunan wilayah dan pemanfaatan ruang 2. Mengintegrasikan pembangunan antarwilayah dan sektor
Fungsi	1. Pedoman pembangunan daerah 2. Pengendali pemanfaatan ruang 3. Penetapan lokasi investasi 4. Perwujudan keterpaduan antarwilayah 5. Pengendalian kerusakan lingkungan
Cakupan Kecamatan	Terdiri dari 31 kecamatan, antara lain: Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Bojongsoang, Margahayu, Margaasih, Katapang, Dayeuhkolot, Banjaran, Pameungpeuk, Pangalengan, Arjasari, Cimaung, Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Rancaekek, Ciparay, Pacet, Kertasari, Baleendah, Majalaya, Solokanjeruk, Paseh, Ibun, Soreang, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Cangkuang, dan Kutawaringin

Wilayah Strategi di Kabupaten Bandung	Kawasan Perkotaan: Soreang-Kutawaringin-Katapang, Margahayu-Margaasih, Majalaya-Ciparay, Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang, Banjaran, Cicalengka, Cileunyi-Rancaekek

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, 2025

Penataan ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bertujuan untuk mewujudkan kawasan metropolitan yang berkelas dunia dan ramah lingkungan, sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi, jasa, pariwisata, dan budaya berbasis pendidikan tinggi dan teknologi. Di Kabupaten Bandung, penataan ruang diarahkan untuk memaksimalkan peran kawasan-kawasan penyangga seperti Soreang, Rancaekek, Majalaya, dan Baleendah sebagai pusat kegiatan industri, pertanian, perdagangan, hingga pendidikan.

Kebijakan penataan ruang difokuskan pada pengembangan pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi dengan infrastruktur dan transportasi, serta berwawasan lingkungan. Strateginya melibatkan pengembangan sistem transportasi massal, penataan kawasan industri dan permukiman, serta konservasi sumber daya air dan ruang terbuka hijau. Kabupaten Bandung juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis melalui pelestarian kawasan lindung di selatan dan pengendalian banjir di wilayah dataran rendah. Adapun Isu Strategis terkait Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai berikut

1. Tekanan Lingkungan dan Daya Dukung
    a. Penurunan Kualitas Lingkungan: Urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan pencemaran air, udara, serta alih fungsi lahan hijau.
    b. Krisis Air Tanah: Eksploitasi berlebihan terhadap Cekungan Air Tanah (CAT) mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas air.
    c. Banjir dan Longsor: Degradasi kawasan lindung (resapan air, hutan) dan perubahan iklim meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
2. Perkembangan Kawasan yang Tidak Terkendali
    a. Urban Sprawl: Perluasan permukiman dan industri ke kawasan lindung (utara/selatan) tanpa mempertahankan RTH minimal 30%.
    b. Ketimpangan Pembangunan: Konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Perkotaan Inti (Bandung-Cimahi) vs keterbatasan infrastruktur di Kawasan Sekitarnya.
3. Infrastruktur yang Tidak Memadai
    a. Transportasi: Kemacetan akibat ketergantungan pada kendaraan pribadi dan kurangnya integrasi transportasi massal antarwilayah.
    b. Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Sampah: Masih terbatasnya cakupan IPAL dan TPA regional, serta tingginya pencemaran sungai (Citarum).
4. Konflik Lahan dan Tata Ruang

a. Alih Fungsi Lahan Pertanian: Konversi lahan pertanian beririgasi (Zona B5) menjadi permukiman/industri mengancam ketahanan pangan.
b. Pelanggaran Zona Lindung: Aktivitas budi daya di kawasan resapan air (Zona L1) dan sempadan sungai (Zona L2) memperparah banjir.

5. Dampak Perubahan Iklim
   a. Perubahan Pola Curah Hujan: Meningkatkan frekuensi banjir dan kekeringan, terutama di daerah tangkapan air (DAS Citarum).
   b. Risiko Bencana Geologi: Kawasan sekitar gunung berapi (Tangkuban Perahu) dan zona rawan gerakan tanah memerlukan mitigasi khusus.
6. Keterbatasan Koordinasi Antarwilayah
   a. *Fragmented Governance*: Pembangunan oleh 5 wilayah administratif (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang) sering tidak terintegrasi.
   b. Lemahnya Penegakan Hukum: Pelanggaran izin pemanfaatan ruang dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
7. Pariwisata dan Budaya yang Tidak Berkelanjutan
   a. Tekanan pada Kawasan Wisata Alam: Aktivitas pariwisata massal di Lembang atau Ciwidey berpotensi merusak ekosistem (Zona L3).
   b. Pelestarian Cagar Budaya: Situs seperti Observatorium Bosscha dan Kampung Adat Cirendeu rentan terhadap dampak pembangunan.

2. Telaah Dokumen RTRW Kabupaten Bandung tahun 2024-2044

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Bandung

Sebagai bagian integral dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam mengoptimalkan tata ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sub bab ini menguraikan tujuan penataan ruang yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan dan strategi yang dirumuskan tidak hanya memperhatikan aspek lokal, tetapi juga keterkaitan regional dengan kabupaten/kota sekitar, serta keselarasan dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Melalui pendekatan terpadu, penataan ruang Kabupaten Bandung diarahkan untuk menciptakan kawasan yang kompetitif, layak huni, dan berwawasan lingkungan, sekaligus menjawab isu-isu strategis di tingkat regional.

Tabel 2.138. Arahan Penataan Ruang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044

Komponen	Muatan RTRW
Tujuan Penataan Ruang	1. Menjadikan Kabupaten Bandung sebagai bagian Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung dengan lingkungan hidup berkualitas tinggi, melalui:

Komponen	Muatan RTRW
	a. Optimalisasi potensi sektor industri, pertanian, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing. b. Pemenuhan kriteria permukiman layak huni di perkotaan maupun perdesaan. 2. Keseimbangan Ekonomi-Lingkungan: Memastikan pembangunan selaras dengan daya dukung lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan pelestarian keanekaragaman hayati. 3. Keselarasan dengan Rencana Pembangunan: Mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042, RPJPD (2005-2025), dan RPJMD (2021-2026) dengan visi "Kabupaten Bandung Repeh Rapih Kerta Raharja 2025" dan "BEDAS" (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Sejahtera). **Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.**
Kebijakan Penataan Ruang	1. **Pengembangan Pusat Kegiatan Pelayanan**: Membangun hierarki pusat permukiman (PKN, PKL, PPK, PPL) sebagai penyeimbang kawasan metropolitan. 2. **Pemantapan Prasarana Transportasi**: Meningkatkan kualitas transportasi perkotaan, regional, dan angkutan massal berkelanjutan. 3. **Sarana Prasarana Terpadu**: Pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan, telekomunikasi, drainase, dan mitigasi bencana. 4. **Keterpaduan Kegiatan Budidaya**: Menyelaraskan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan pelestarian kawasan lindung. 5. **Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi**: Alokasi ruang untuk kegiatan sosial-ekonomi dan pelestarian lingkungan. 6. **Pengendalian Pemanfaatan Ruang**: Ketat di kawasan lindung, rawan bencana, resapan air, serta penerapan insentif/disinsentif.
Kebijakan Penataan Ruang	1. **Pengembangan Pusat Kegiatan**: Penetapan hierarki permukiman dan integrasi kawasan perkotaan-perdesaan. 2. **Transportasi Berkelanjutan**: Pengembangan angkutan massal, simpul transit multimodal, dan peningkatan kapasitas jalan. 3. **Infrastruktur Terpadu**: Pengelolaan air berbasis DAS, energi terbarukan, sistem drainase, dan pengolahan limbah. 4. **Pelestarian Lingkungan**: Rehabilitasi kawasan lindung, pengendalian industri ramah lingkungan, dan penyediaan ruang terbuka hijau (minimal 30% di perkotaan). 5. **Kawasan Strategis Ekonomi**: Pengembangan kawasan terpadu untuk agribisnis, pariwisata, dan industri berbasis teknologi. 6. **Pengendalian Ruang**: Zonasi ketat, penegakan sanksi pelanggaran RTRW, dan resolusi konflik ruang.

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2024

b. Struktur Ruang Kabupaten Bandung

Struktur ruang Kabupaten Bandung dirancang untuk menciptakan tata kelola wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan, mencakup sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana yang mendukung perkembangan fisik, ekonomi, dan sosial. Dalam dokumen RTRW 2023-2043, struktur ruang ini dibagi menjadi dua komponen utama: sistem pusat permukiman, yang mencakup hierarki pelayanan dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), serta sistem jaringan prasarana, meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur pendukung lainnya. Perencanaan ini bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antarwilayah, mengoptimalkan potensi lokal, dan mengatasi tantangan regional seperti kesenjangan aksesibilitas, ketahanan lingkungan, serta integrasi dengan kawasan strategis nasional seperti Cekungan Bandung.

Tabel 2.139. Arahan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044

Komponen	Muatan RTRW
Rencana Sistem Pusat Permukiman	1. **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)** Kawasan perkotaan yang melayani skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Wilayah yang direncanakan: a. Soreang-Kutawaringin-Katapang-Margahayu-Margaasih b. Cileunyi-Rancaekek c. Cicalengka d. Majalaya-Ciparay e. Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang f. Banjaran**.** 2. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** Kawasan perkotaan yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Wilayah yang direncanakan: a. Ciwidey b. Pangalengan. 3. **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)** Pusat permukiman yang melayani skala kecamatan. Wilayah yang direncanakan: a. Cimenyan b. Cangkuang. 4. **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)** Pusat permukiman yang melayani skala antar desa. Wilayah yang direncanakan: a. Arjasari b. Cikancung c. Cimaung d. Ibun e. Kertasari f. Nagreg g. Pacet h. Pameungpeuk i. Paseh j. Rancabali k. Solokanjeruk.
Rencana Sistem Jaringan Prasarana	1. **Sistem Jaringan Transportasi** a. **Jalan**: 1. Pemeliharaan & Pembaruan: a. Jalan Arteri Primer (misalnya, Akses Tol Cileunyi-Bandung, Batujajar-Soreang). b. Jalan Kolektor Primer (misalnya, Jalan Bandung-Kopo-Soreang, Jalan Banjaran-Pangalengan). 2. Pengembangan & Pembangunan: a. Jalan Lingkar Selatan Bandung. b. Jalan Poros Barat-Timur Bojongsoang. c. Jalan Akses Tol Margaasih II. b. **Kereta Api**: 1. Jalur Baru: a. Ciwidey-Rancabuaya. b. Jakarta-Bandung Cepat (Stasiun Tegalluar). c. Jalur Perkotaan (misalnya, Bojongsoang-Tegalluar, Gedebage-Tegalluar-Majalaya). 2. Pengembangan Eksisting: a. Jalur Bogor-Yogyakarta. b. Jalur Dayeuhkolot-Majalaya. c. **Bandar Udara**: - Pemeliharaan: Bandara Sulaiman (Kec. Margahayu) sebagai bandara khusus TNI AU d. **Angkutan Massal**: 1. BRT Loop Line: a. Loop 1: Soreang-Katapang-Margahayu-Tol Kopo-Dayeuhkolot-Banjaran. b. Loop 2: Cileunyi-Tol Buahbatu-Dayeuhkolot-Majalaya-Solokan Jeruk. c. Loop 3: Majalaya-Solokan Jeruk-Rancaekek-Cicalengka. 2. Light Feeder: a. 5 koridor (e.g., Pangalengan-Banjaran, Kertasari-Ciparay). e. **Terminal & Stasiun** 1. Terminal Penumpang: a. Peningkatan Terminal Cileunyi (Tipe B ke A).

Komponen	Muatan RTRW
	b. Pembangunan Terminal Barang Cileunyi. 2. Stasiun Baru: a. Stasiun Banjaran, Bojongsoang, Ciwidey. b. Stasiun LRT (Margahayu, Katapang, Soreang). 2. **Sistem Jaringan Energi** a. **Pembangkit Listrik** 1. Pengembangan PLTA Plengan, Lamajan, Cikalong, dan Bengkok. 2. Pembangunan PLTP Cibuni & Pengembangan PLTP Kamojang, Wayang-Windu, dan Patuha. 3. Pengembangan PLTMH Cileunca. 4. Pembangunan PLTS Mandalawangi, Sugihmukti, dan Sukaluyu. 5. Pembangunan PLTSa (tenaga sampah) Legok Nangka. b. **Desa Mandiri Energi** Peningkatan kapasitas di 11 kecamatan (misalnya, Pasirjambu, Pangalengan, Kertasari, Pacet, Ciwidey). c. **Transmisi & Gardu Listrik** 1. SUTET 500 kV: Bandung Selatan-Mandirancan & New Ujung Berung, Saguling-Bandung Selatan (1&2), Tasikmalaya-Depok, dan Banse Inc. 2. SUTT 150/70 kV: misalnya, Cigereleng-Bandung Selatan, Kamojang-Darajat, Ujungberung-Dago Pakar. 3. Gardu Listrik: Pengembangan GL 150 kV (misalnya, Cikasungka, Dago Pakar, Kutawaringin) dan GL 70 kV (misalnya, Cikalong, Majalaya), serta pembangunan GI 150kV Rancaekek & Sangian. d. **Distribusi & Infrastruktur** 1. Pengembangan jaringan SUTM 30 kV Plengan-Lamajan. 2. Pembangunan gardu baru (GL 150 kV Rancaekek, GL Sangian). 3. **Sistem Jaringan Telekomunikasi** a. **Jaringan Tetap** 1. Pengembangan jaringan serat optik. 2. Peningkatan sistem telepon bawah tanah. b. **Jaringan Bergerak** 1. Penertiban BTS ilegal. 2. Penataan menara seluler bersama. 3. Pembangunan 90 menara bersama (270 BTS baru). 4. Peningkatan telematika berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan. c. **Data Eksisting** terdapat 683 menara seluler (301 berizin, 493 terawat). d. **Target Akhir Perencanaan,** Direncanakan pembangunan 90 menara bersama (270 BTS) untuk memenuhi kebutuhan minimal 2.318 BTS atau 773 menara bersama. 4. **Sistem Jaringan Sumber Daya Air** a. **Sistem Jaringan Irigasi** 1. Pemeliharaaan jaringan irigasi primer: Saluran Induk Ciwalengke, Saluran Primer misalnya Baros, Buahbatu, Cangkuang. 2. Pemeliharaaan jaringan irigasi sekunder: Ruas B.RMK.0-1, Saluran Sekunder misalya Babakan, Bojongkunci, Ciasana Kiri. b. **Jaringan Pengendalian Banjir** 1. Pemeliharaaan jaringan pengendali banjir misalnya, Oxbow Babakan Patrol, Bantarsari, Bojongsoang. 2. Pengembangan eksisting jaringan pengendali banjir misalnya, floodway cisangkuy. c. **Bangunan Sumber Daya Air** 1. Pemeliharaan bangunan misalnya, Bendung Cigadong, Daerah Irigasi Astana, Daerah Pengamatan Astana Gantung, Kolam Retensi Lamajan, Situ Cileunca, Waduk Santosa. 2. Pengembangan eksisting misalnya, Bendung Daerah Irigasi Cibeureum. 3. Pembangunan bangunan misalnya, Situ Aul, Waduk Andir, Waduk Cisondari. d. **Sistem Pengendalian Banjir** 1. Pemeliharaan bangunan misalnya, Polder Bojong Citepus, Cieunteung, Citepus, Parung Halang. 2. Pengembangan eksisting Terowongan Nanjung. 3. Pembangunan bangunan misalnya, Kolam Retensi Cilampeni, Kolam Retensi Citarik, Polder Cigede, Polder Tegalluar. 5. **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya** a. **Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Kecamatan Pasirjambu dan Kecamatan Lainnya.

Komponen	Muatan RTRW
	2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan misalnya SPAM Sinumbra, Kecamatan Rancabali, SPAM Regional Bandung Raya, Kecamatan Cimaung, Ciparay, dan Soreang. 3. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang memiliki potensi berdasarkan kajian teknis. 4. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan misalnya, SPAM Sinumbra, Kecamatan Rancabali, SPAM Regional Bandung Raya. 5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung 6. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi berdasarkan kajian teknis 7. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Wilayah yang belum terlayani oleh sistem pelayanan air minum Perumda Tirta Raharja Kabupaten Bandung 8. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan di Seluruh Kecamatan 9. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang memiliki potensi berdasarkan kajian teknis 10. Pembangunan Unit Air Baku Bangunan Penampung Air Sadu di Kecamatan Soreang, Reservoir Ciwidey di Kecamatan Ciwidey, Reservoir SPAM Cinyusu di Kecamatan Cicalengka. 11. Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku misalnya Bangunan Penampung Air Sadu di Kecamatan Soreang, Intake Murci SPAM Kutawaringin di Kecamatan Kutawaringin, Mata Air Cibelah di Kecamatan Kertasari. 12. Pembangunan Unit Produksi IPA Sadu di Kecamatan Soreang 13. Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Produksi misalnya Bangunan Penampung Air Jalak Harupat di Kecamatan Kutawaringin, Bangunan Penampung Air Soreang di Kecamatan Soreang, IPA Sadu di Kecamatan Soreang. b. **Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)** 1. **Sistem Air Limbah Non Domestik** Pembangunan sistem pengelolaan air limbah non domestik pada Kegiatan industri di Kabupaten Bandung serta Pembangunan IPAL Rancaekek 2. **Sistem Air Limbah Domestik** a. Rehabilitasi IPAL Buninagara dan IPAL Soreang b. Operasi dan pemeliharaan IPAL Bojongsoang dan IPLT Cibeet c. Penyediaan Sarana dan Prasarana IPAL Regional Lagadar dan IPLT Soreang c. **Sistem Jaringan Persampahan** 1. Rencana Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Bojongsoang, Cicalengka, Jelegong, Kutawaringin, dan Majalaya; 2. Rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Legoknangka; 3. Pengembangan Eksisting Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Babakan Ciparay; 4. Rencana Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) BLK dan Daraulin; 5. Pengembangan Eksisting Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Citaliktik, Margahayu Tengah, Katapang, Kutawaringin, Margahayu Selatan, dan Soreang; 6. Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Neglasari, Oxbow Cicukang Mekarrahayu, dan UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah d. **Sistem Jaringan Evakuasi Bencana** Sistem jaringan evakuasi bencana sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021. Isu strategis ini dibagi menjadi dua bagian besar: jalur evakuasi dan tempat evakuasi, serta dikaitkan dengan wilayah risiko bencana. Adapun muatannya sebagai berikut. 1. Jalur Evakuasi, Jalur evakuasi menggunakan jaringan jalan utama dan lingkungan dengan lebar 12–18 meter, dilengkapi papan petunjuk arah. Dibutuhkan survei teknis untuk penetapan jalur. a. Jalan Adipati Agung (Baleendah) b. Jalan Banjaran – Pangalengan c. Jalan Rancaekek – Cileunyi – Cicalengka 2. Tempat Evakuasi, Menggunakan bangunan publik dan/atau ruang terbuka sebagai tempat aman saat bencana. Fasilitas pendukung seperti pos kesehatan dan dapur umum harus disiapkan. Misalnya berada di lokasi sebagai berikut. a. Gedung PMI Kab. Bandung (Soreang) b. Masjid Baleendah

Komponen	Muatan RTRW
	c. Kantor Camat Majalaya 3. Wilayah Risiko Bencana, Perlu penyesuaian sistem evakuasi berdasarkan jenis risiko dominan di wilayah tersebut: gerakan tanah, banjir, gempa, aliran lahar, puting beliung. Misalnya berada di lokasi sebagai berikut. a. Banjir: Baleendah, Bojongsoang, Dayeuhkolot b. Gerakan tanah: Pangalengan, Kertasari c. Puting beliung: Soreang 4. Sosialisasi & Mitigasi, Sosialisasi dan edukasi masyarakat terhadap mekanisme evakuasi dan mitigasi bencana sangat penting agar sistem berjalan efektif. e. **Sistem Drainase** 1. Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan di Kabupaten Bandung 2. Penyusunan *outline plan* pada kawasan genangan di Kabupaten Bandung 3. Penyediaan dan pemanfaatan jaringan drainase yang terpisah dari saluran air limbah di Kabupaten Bandung 4. Pembangunan sistem drainase perkotaan dan lingkungan di Kabupaten Bandung 5. Peningkatan sistem drainase perkotaan dan lingkungan di Kabupaten Bandung 6. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan dan lingkungan di Kabupaten Bandung 7. Pengaturan sistem jaringan drainase sesuai hierarki dan terintegrasi dengan badan air penerima di Kabupaten Bandung

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2024

c. Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung

Pola ruang Kabupaten Bandung merupakan perwujudan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang mengintegrasikan fungsi lindung dan fungsi budi daya secara berimbang dan berkelanjutan. Penetapan pola ruang ini didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana pola ruang tidak hanya memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, namun juga mengakomodasi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara terarah. Dalam perencanaannya, pola ruang Kabupaten Bandung terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya, yang dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan wilayah secara terpadu. Berikut merupakan penjelasan muatan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044.

Tabel 2.140. Arahan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044

Komponen	Muatan RTRW
Rencana Kawasan Lindung	1. Badan Air Pemanfaatan meliputi normalisasi, peningkatan kapasitas, operasi dan pemeliharaan situ/waduk/embung, serta rehabilitasi. Total luas: 821 Ha. Contoh lokasi: Sungai Citarum, Situ Cisanti, Waduk Cileunca. 2. Hutan Lindung Perlindungan tata air dan pencegahan bencana. Luas ±34.137 Ha. Kegiatan: pengendalian pemanfaatan, pemantapan batas, rehabilitasi. Lokasi: Arjasari, Banjaran, Cilengkrang, Kertasari, Pangalengan, dll. 3. Kawasan Perlindungan Setempat Penertiban bangunan di sempadan, pengamanan DAS, penegasan sempadan danau/waduk dan mata air (jarak min. 50–200 m). Luas ±1.241 Ha. Contoh: Situ Patenggang, Waduk Citarik, Sub DAS Cisangkuy di Cimaung dan Pangalengan. 4. Kawasan Konservasi Fungsi utama pelestarian hayati dan ekosistem. Total luas ±16.197 Ha. Meliputi:

Komponen	Muatan RTRW
	• Cagar Alam (Contoh: Gunung Tilu, Kertasari) • Taman Hutan Raya (THR Ir. H. Juanda – Cimenyan) • Taman Wisata Alam • Taman Buru (Cicalengka, Nagreg)
Rencana Kawasan Lindung	1. Hutan Produksi Fungsi: produksi hasil hutan, resapan air, lapangan kerja. • Tetap: 335 Ha (Arjasari, Paseh, dll) • Terbatas: 72 Ha (Rancabali). Kegiatan: pengelolaan berbasis masyarakat, pengembangan komoditas, pengendalian ruang. 2. Pertanian Total luas: ±75.675 Ha. • Tanaman pangan: 22.582 Ha (tersebar hampir di semua kecamatan) • Hortikultura: 13.482 Ha (Pasirjambu, Nagreg, dll) • Perkebunan: 39.445 Ha (Rancabali, Pangalengan, Kertasari, dll) 3. Peternakan Luas: 166 Ha. • Ternak besar (sapi, kerbau): Cimaung, Pangalengan, dll • Ternak kecil (kambing, domba): Ciwidey, Pacet, Ibun, dll • Unggas: Cicalengka, Majalaya, Banjaran, dll. Tersedia RPH di seluruh kecamatan. 4. Perikanan Luas: 130 Ha (Bojongsoang). • Budidaya ikan: Ibun, Majalaya, Pacet, dll • Budidaya di situ/waduk: Rancabali, Kertasari, dll • Pembenihan: Pacet, Ciparay • Pengolahan hasil: Banjaran, Cileunyi, Majalaya, dll. 5. Pertambangan dan Energi Luas: 487 Ha. • Tambang batuan: Baleendah, Nagreg, dll • Tambang logam (emas): Kutawaringin, Pasirjambu, Pangalengan • Energi (panas bumi): Kamojang (Ibun), Patuha (Pasirjambu), Wayang Windu (Pangalengan), dll. 6. Industri Luas: 4.615 Ha. • Industri besar: Katapang, Majalaya, Rancaekek, dll • Menengah: Arjasari, Pacet, dll • Kecil/Mikro: seluruh kecamatan. Fokus: industri rumah tangga, makanan, non-air intensive. 7. Pariwisata Luas: 630 Ha. • Kawasan Strategis & Kawasan Pengembangan. • Lokasi: Rancabali, Ciwidey, Soreang, Baleendah, Jelekong, dll. Fokus: wisata alam, budaya, petualangan, dan agrowisata.

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2024

d. Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Bandung merupakan upaya penataan ruang yang diarahkan untuk mendorong pemanfaatan ruang yang memiliki nilai strategis tinggi, baik dari aspek ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, maupun pertahanan dan keamanan. Kawasan strategis ditetapkan karena memiliki peran penting terhadap pembangunan wilayah secara keseluruhan dan memerlukan perlakuan khusus dalam pengelolaan ruangnya. Penetapan kawasan ini didasarkan pada kebijakan nasional, provinsi, maupun lokal serta mempertimbangkan potensi, keterkaitan antarwilayah, dan daya dukung lingkungan. Dalam RTRW Kabupaten Bandung 2023–2043, kawasan strategis terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu kawasan strategis nasional, provinsi, dan

kabupaten, yang masing-masing memiliki arah dan prioritas pengembangan sesuai karakteristik wilayahnya. Berikut merupakan penjelasan muatan kawasan strategis RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044.

Tabel 2.141. Arahan Kawasan Strategis RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044

Komponen	Muatan RTRW
Kawasan Strategis Nasional (KSN)	Cekungan Bandung – Termasuk seluruh wilayah Kabupaten Bandung dalam konteks Metropolitan Bandung Raya. Kepentingan: Ekonomi nasional. Arah pengembangan: • Perlindungan fungsi lindung melalui pengaturan zonasi • Revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa • Pengembangan pembangunan vertikal • Menjadi kawasan ekonomi bersaing regional • Sinergi pembangunan dan infrastruktur antarwilayah
Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Kawasan Bandung Utara (KBU) – Ketinggian di atas 750 mdpl (sebagian Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang). Kepentingan: Konservasi dan pengendalian pemanfaatan ruang. Arah pengembangan: • Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi (hutan lindung) • Pembatasan alih fungsi lahan • Diatur dalam Perda Jabar No. 2 Tahun 2016 dan revisi Pergub Jabar No. 21 Tahun 2009
Kawasan Strategis Kabupaten – Ekonomi	1. Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar (KTPT) – 3.667 Ha (Cileunyi, Bojongsoang, Rancaekek, Solokanjeruk). Fungsi: Kawasan kota baru – permukiman skala besar, industri, rekreasi, komersial, dan TOD. Pengembangan: • TOD Tegalluar 486 Ha • IPAL kawasan industri • Drainase & pengendalian banjir • Pembangunan jalan tol dan stasiun kereta cepat Jakarta–Bandung • Penyusunan RDTR & pengelolaan kawasan berbasis investasi publik-swasta 2. Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu (KSTB) – ±11.785 Ha. Fungsi: Pusat pemerintahan, komersial, ekonomi daerah. Konsep: Compact City & Sustainable Development. Pengembangan: • CBD, universitas, RS, pusat seni budaya & olahraga • Sarana MICE (konferensi, pameran, dll.) • Rusunawa & rusunami • Infrastruktur dasar (RTH, drainase, WWTP, pompa, kolam retensi)
Kawasan Strategis Kabupaten – Lingkungan	Kabupaten – Lingkungan Kawasan Bandung Selatan (KBS) – Berbasis konservasi dan lingkungan hidup. Kepentingan: Daya dukung & keseimbangan ekologi. Arah pengembangan: • Peningkatan fungsi konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati • Pengembangan wisata alam berkelanjutan • Sentra pertanian ramah lingkungan • Pengendalian konversi kawasan budidaya yang melebihi daya dukung lingkungan.

Sumber RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2024

3. Telaah Dokumen RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Adapun isu strategis RPJPD Kabupaten Bandung 2025-2045 meliputi:

a. SDM yang Berakhlak dan Berkualitas

SDM yang berakhlak dan berkualitas merujuk pada Sumber Daya Manusia yang tidak hanya memiliki kualifikasi dan keahlian yang memadai, tetapi juga memiliki integritas moral, etika kerja yang tinggi, serta komitmen untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya SDM yang berakhlak dan berkualitas akan

menjadi aset berharga bagi setiap organisasi atau komunitas (Kabupaten Bandung), karena mereka tidak hanya membawa kemampuan dan pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang kuat yang dapat membantu membangun lingkungan kerja dan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan.

b. Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif

Tata Kelola Pemerintahan yang Transformatif mengacu pada sistem pengelolaan pemerintahan yang mampu mengubah paradigma, proses, dan praktek pemerintahan secara menyeluruh untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih inklusif bagi masyarakat. Selain itu, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan kemajuan sosial yang inklusif. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

c. Riset dan Inovasi yang Berkualitas

Riset dan inovasi yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam menciptakan kemajuan dan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang teknologi, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, Riset dan inovasi yang berkualitas memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mengatasi tantangan global yang kompleks. Oleh karena itu, investasi yang tepat dalam riset dan inovasi sangat penting untuk memastikan terciptanya solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

d. Infrastruktur Dasar yang Inklusif

Infrastruktur dasar yang inklusif mencakup berbagai aspek infrastruktur yang dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan aksesibilitas semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah. Selain itu, Infrastruktur dasar yang inklusif merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat, infrastruktur ini dapat membantu meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara merata.

e. Pengembangan Kewilayahan Berkelanjutan

Pengembangan kewilayahan berkelanjutan merujuk pada upaya untuk mengembangkan wilayah secara holistik dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini melibatkan integrasi kebijakan dan praktik yang mendukung pertumbuhan yang seimbang, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Selain itu, pengembangan kewilayahan berkelanjutan dapat membantu

menciptakan wilayah yang lebih seimbang, berdaya saing, dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup bagi semua lapisan masyarakat.

f. Perekonomian yang Inklusif, Bedaya Saing dan Berkelanjutan

Perekonomian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan adalah konsep yang menggambarkan sebuah sistem ekonomi yang memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat, menciptakan peluang bagi partisipasi aktif dari berbagai sektor, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, sebuah wilayah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi lingkungan alam untuk generasi yang akan datang.

g. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara Inklusif

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif merujuk sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedesaan, perkotaan, serta kelompok rentan seperti kaum miskin, anak-anak, lanjut usia, difabel, dan minoritas.

2.10.3 Perumusan Isu Strategis

Penyusunan isu strategis dalam RPJMD 2025–2029 dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pembangunan daerah. Faktor internal mencakup potensi dan tantangan di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola, sementara faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, dinamika global, dan perkembangan regional. Proses ini berbasis data dari sumber resmi, kajian akademis, dan kebijakan pemerintah guna memastikan relevansi isu yang diangkat. Keterlibatan pemangku kepentingan, masyarakat, swasta, akademisi, dan lembaga pemerintah melalui forum konsultasi publik turut memperkaya perspektif dan solusi. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis bukti, isu strategis yang dihasilkan diharapkan menjadi pijakan kuat bagi kebijakan dan program pembangunan daerah yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.

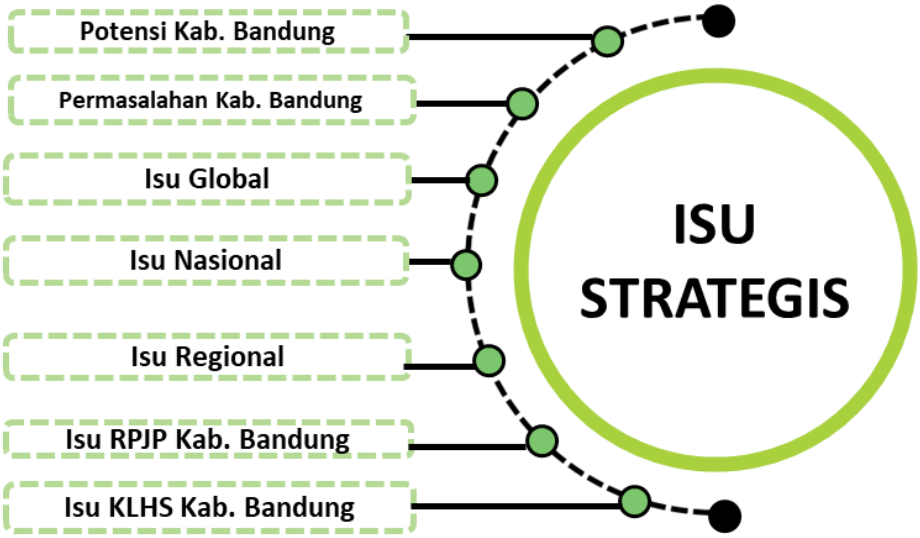

Gambar 2.114. Perumusan Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029
Sumber: Inmendagri No 2 Tahun 2025

Tabel 2.142. Perumusan Isu strategis Kaupaten Bandung

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD 2025–2029
				Global	Nasional	Regional	
1	8. IKLH meningkat (56,58) 9. Potensi panas bumi (2.711 MW) 10. Luas hutan primer tinggi 11. Nilai indeks risiko bencana Kabupaten Bandung tahun 2024 adalah 117,13. Menurunnya Indeks Risiko Bencana menunjukkan peningkatan ketahanan Kabupaten Bandung terhadap bencana	1. Topografi rawan longsor (32.144 Ha) 2. Ekosistem pangan kualitas sedang/rendah (63,91%) 3. Penggunaan lahan untuk bangunan permukiman kota dan desa secara kumulatif mencapai sekitar 14,46%, menunjukkan tekanan pembangunan perkotaan yang perlu diimbangi dengan upaya perlindungan lingkungan dan tata ruang berkelanjutan 4. Luas lahan sawah mengalami penurunan signifikan sebesar 6.932 Ha, dari 35.682 Ha pada tahun 2014 menjadi hanya 28.750 Ha pada tahun 2024	1. Tingginya alih fungsi lahan menyebabkan semakin menurunnya proporsi tutupan lahan 2. Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	1. Perubahan iklim 2. Geoekonomi	1. Ketahanan bencana 2. Daya dukung lingkungan	3. Keberlanjutan ruang dan lingkungan 4. Pengembangan kewilayahan berkelanjutan	**Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana**
2	1. TPAK meningkat (67,22%) 2. Rasio ketergantungan stabil 3. IPG meningkat (70,20) 4. Nilai IPM Kab. Bandung relatif meningkat dari tahun ke tahun, 2024 (74, 59) 5. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah adalah 8,79 tahun dan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 9,15 pada tahun tahun 2024 6. Angka UHH di Kbupaten Bandung naik sebesar 0,34%/pada tahun tahun 2020-2024, hal ini menandakan masyarakat	1. Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung masih didominasi oleh tatanan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 34,35%.	1. Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat 2. Belum optimalnya pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	3. Transformasi digital 4. Demografi global	1. Bonus demografi	2. Kualitas dan daya saing SDM 3. SDM yang berakhlak dan berkualitas	**Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing SDM**

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD 2025–2029
				Global	Nasional	Regional	
	memiliki peluang untuk hidup lebih lama 7. Indeks Kesehatan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 84,97 pada tahun 2024						
3	1. Pertumbuhan ekonomi 5,04% 2. PDRB per kapita Rp 43,13 juta- Industri dominan (52,91% PDRB) 3. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung secara konsisten lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional, pada tahun 2024 adalah 6,19 4. Tren positif pada indeks kedalaman kemiskinan terlihat pada tahun 2024 dengan penurunan signifikan menjadi 0,61, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan 5. Tren positif pada indeks keparahan kemiskinan terlihat pada tahun 2024, dengan penurunan signifikan menjadi 0,09. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil	1. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung tercatat sebesar 6,36% atau 121.455 jiwa, sedangkan jumlah penduduk bekerja mencapai 1.789.207 jiwa 2. Pada tahun 2019, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 345.177 dan terus meningkat menjadi Rp 455.636 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan pengeluaran minimum penduduk untuk hidup layak, baik akibat inflasi, perubahan pola konsumsi, maupun kenaikan harga barang kebutuhan pokok.	1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor ekonomi berakibat kurangnya peningkatan daya saing	1. Geoekonomi	1. Ekonomi hijau dan biru	1. Kesenjangan pembangunan 2. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan- Kesejahteraan masyarakat inklusif	**Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan**
4	1. Indeks ketertiban meningkat (80,5)	1. Potensi konflik sosial- Ketimpangan layanan publik	1. Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya	1. Ketimpangan sosial	1. Desentralisasi dan otonomi daerah	1. Tata kelola pemerintahan 2. SDM yang berakhlak	**Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan**

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD 2025–2029
				Global	Nasional	Regional	
			keselarasan program antar OPD				**Ketertiban Masyarakat**
5	1. Indeks infrastruktur meningkat- Koridor PKN/PKL berkembang- Energi panas bumi mendukung 2. Persentase rumah tangga di Kabupaten Bandung yang memiliki akses terhadap sumber air minum perpipaan menunjukkan tren peningkatan yang positif dari 84,54% pada tahun 2021 menjadi 90,75% pada tahun 2024 3. Persentase rumah tangga di Kabupaten Bandung yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan signifikan dari 85,11% pada tahun 2020 menjadi 93,66% di tahun 2024	1. Hunian layak rendah (54,16%)- Akses air, sanitasi, dan limbah belum optimal 2. Secara keseluruhan, sudah terdapat 63,7% lahan yang sudah tidak dapat mendukung penyediaan air di Kabupaten Bandung. 3. Indeks Kualitas Air (42,67) 4. Kabupaten Bandung mencapai 0,31 kg/orang/hari, angka ini mencerminkan variasi kontribusi antar-kelompok permukiman, dengan permukiman menengah menjadi faktor dominan peningkatan rata-rata timbulan sampah	1. Belum optimalnya akses sanitasi (air minum layak, limbah domestik dan persampahan) sebagai Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Kesehatan masyarakat	1. Perubahan iklim- Transformasi digital	1. Infrastruktur dasar- Perpindahan IKN	2. Kesenjangan infrastruktur dasar 3. Infrastruktur inklusif- Pengembangan wilayah	**Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah**
6	1. Nilai IRB mencapai 87,37 atau meningkat sebesar 3.70 poin dengan predikat A 2. Indeks SPBE yang awalnya berada di angka 2,98 pada tahun 2021 turun menjadi 2,82 pada tahun berikutnya, namun meningkat tajam menjadi 3,48 pada tahun 2023 dan mencapai 3,98 pada 2024	1. Ketimpangan digital antar wilayah 2. Koordinasi antar OPD belum optimal	1. Sinkronisasi program antar OPD belum baik	1. Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD 2. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan akta kelahiran	1. Otonomi daerah	1. Kualitas tata kelola 2. Pemerintahan transformatif- Riset & inovasi berkualitas	**Transformasi Tata Kelola Pemerintahan**

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis RPJMD 2025–2029
				Global	Nasional	Regional	
7	1. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung mengalami tren meningkat dari tahun 2020 (79,08) hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 (82,48). Namun, terjadi penurunan pada tahun 2024 (80,63) 2. Lahan pertanian luas (143.928 Ha)- Produktivitas padi stabil- Komoditas jagung dan ubi potensial	3. Penurunan produksi padi (–28%) 4. Alih fungsi sawah 6.932 Ha 5. 67,56% dari luas wilayah Kabupaten Bandung memiliki status daya dukung pangan yang sudah melampaui	1. Tingginya kerentanan Masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	1. Krisis pangan global	1. Ketahanan pangan	2. Green and blue economy 3. Ketahanan pangan daerah	**Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah**

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Isu Strategis 1: Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana

Isu strategis ini dirumuskan sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Bandung. Fenomena alih fungsi lahan yang tinggi, penurunan tutupan hijau, serta tingginya kerentanan wilayah terhadap bencana alam menuntut penataan ruang yang berkelanjutan dan adaptif terhadap risiko iklim. Potensi sumber daya seperti panas bumi dan luasnya kawasan lindung juga menjadi pertimbangan penting dalam merancang kebijakan berbasis keseimbangan ekologis dan pembangunan.

Secara eksternal, isu ini selaras dengan isu global mengenai perubahan iklim dan krisis ekologi, serta isu nasional dan provinsi tentang ketahanan lingkungan dan tata ruang. Diperkuat oleh isu dalam KLHS yang menunjukkan belum optimalnya pengelolaan lahan dan respons terhadap bencana, isu ini menjadi krusial untuk memastikan pembangunan tidak merusak ekosistem yang menopangnya. Oleh karena itu, perumusan isu ini menekankan pentingnya tata ruang yang presisi dan upaya mitigasi risiko bencana secara sistemik.

Isu Strategis 2: Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing SDM

Isu ini muncul dari fakta bahwa kualitas SDM Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan, ditandai dengan dominasi tenaga kerja berpendidikan dasar, akses pendidikan tinggi yang terbatas, dan layanan kesehatan yang belum merata. Salah satu isu kesehatan yang menjadi perhatian utama di Kabupaten Bandung adalah *stunting,* mengingat dampak jangka panjangnya terhadap kualitas SDM serta keterkaitannya yang erat dengan akses layanan kesehatan dasar dan pemenuhan gizi pada masa awal kehidupan. Meski terdapat kemajuan seperti meningkatnya TPAK dan indeks pemberdayaan gender, ketimpangan layanan dasar antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, isu ini diperkuat oleh agenda nasional mengenai bonus demografi dan kebutuhan peningkatan daya saing SDM, serta isu global tentang transisi teknologi dan struktur demografi. Dalam konteks RPJP dan KLHS, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi landasan utama pembangunan jangka panjang. Maka, rumusan isu ini menekankan pentingnya distribusi layanan dasar yang merata dan strategi pembangunan SDM yang berkelanjutan.

Isu Strategis 3: Penguatan Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan

Rumusan isu ini berangkat Kondisi ekonomi Kabupaten Bandung yang tumbuh cukup baik, namun belum sepenuhnya inklusif, menggambarkan adanya dinamika yang kompleks dalam proses pembangunan daerah. Ketimpangan distribusi ekonomi, dominasi sektor informal dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung dibandingkan dengan Provinsi menunjukkan Kabupaten Bandung sudah lebih baik daripada Provinsi Jawa Barat. Perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri juga memunculkan tantangan distribusi kesejahteraan antarsektor dan antarwilayah.

Isu ini konsisten dengan isu nasional mengenai pembangunan ekonomi hijau dan penguatan daya saing, serta isu provinsi terkait kesenjangan pembangunan. Dukungan data dari KLHS yang menyoroti rendahnya pemanfaatan potensi ekonomi dan kerentanan masyarakat miskin memperkuat urgensi isu ini. Maka, pendekatan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan menjadi prioritas untuk memastikan semua lapisan masyarakat terlibat dan mendapat manfaat dari pembangunan.

Isu Strategis 4: Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah

Isu ini dirumuskan berdasarkan tren penurunan luas lahan dan produksi pangan, khususnya padi, yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan lokal. Padahal Kabupaten Bandung memiliki potensi lahan dan komoditas unggulan yang besar, seperti hortikultura dan biofarmaka. Konversi lahan pertanian serta ancaman perubahan iklim berisiko mengganggu ketersediaan dan stabilitas pangan daerah.

Pentingnya ketahanan pangan menjadi bagian dari isu global dan nasional, terutama dalam konteks krisis pangan dan inflasi bahan pokok. KLHS juga menyoroti peningkatan malnutrisi dan stunting akibat buruknya konsumsi pangan. Dalam RPJP Kabupaten Bandung, ketahanan pangan dinyatakan sebagai komponen vital pembangunan inklusif. Oleh karena itu, isu ini diarahkan untuk memperkuat produksi, distribusi, dan konsumsi pangan secara berkelanjutan.

Isu Strategis 5: Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah

Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar menjadi isu strategis penting karena masih adanya disparitas wilayah, terutama terkait akses air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni. Padahal, infrastruktur yang merata dan berkualitas adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta mobilitas masyarakat. Potensi wilayah seperti koridor industri dan kawasan strategis belum optimal dimanfaatkan karena ketimpangan infrastruktur dasar.

Isu ini diturunkan dari isu nasional dan provinsi tentang konektivitas dan pemerataan pembangunan, serta dikuatkan oleh KLHS yang mencatat lemahnya akses terhadap layanan dasar. RPJP Kabupaten Bandung juga mendorong pengembangan wilayah berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, isu ini dirumuskan untuk menjamin penyediaan infrastruktur dasar yang inklusif, berkeadilan, dan mendukung transformasi wilayah secara berkelanjutan. dengan didukung oleh perencanaan perkotaan yang terintegrasi dan tata ruang yang adaptif, guna mendorong terciptanya wilayah yang produktif, layak huni, serta tangguh terhadap dinamika pembangunan dan tantangan lingkungan.

Isu Strategis 6: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Rumusan isu ini didasarkan pada kebutuhan memperkuat kapasitas birokrasi agar lebih adaptif, kolaboratif, dan digital. Meskipun capaian indeks reformasi birokrasi, SPBE, dan inovasi daerah meningkat signifikan, koordinasi lintas-OPD, kesenjangan digital, dan pelayanan publik masih menghadapi hambatan struktural. Oleh karena itu, transformasi kelembagaan menjadi prasyarat dalam mewujudkan pemerintahan yang *agile* dan akuntabel.

Di tingkat nasional dan provinsi, tata kelola pemerintahan menjadi perhatian utama dalam mewujudkan pelayanan yang efektif. Isu global seperti disrupsi teknologi dan desentralisasi memperkuat urgensi reformasi birokrasi lokal. Dukungan dari RPJP yang menekankan tata kelola transformatif dan inovasi berkualitas, serta KLHS yang mencatat kurangnya keselarasan program, menegaskan bahwa isu ini penting untuk mendorong peran pemerintah sebagai katalisator pembangunan.

Isu Strategis 7: Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Isu ini muncul dari perlunya memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat di tengah meningkatnya dinamika sosial dan tekanan urbanisasi. Meski indeks ketertiban umum menunjukkan tren positif, potensi konflik horizontal, ketimpangan layanan publik, dan rendahnya partisipasi sosial tetap menjadi tantangan nyata. Stabilitas sosial sangat penting dalam menopang pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Konteks eksternal seperti desentralisasi dan tuntutan tata kelola lokal yang lebih baik memperkuat perumusan isu ini. Isu ini juga sejalan dengan RPJP Kabupaten Bandung yang menekankan pembentukan SDM berkarakter dan masyarakat yang harmonis. Di sisi lain, KLHS menyoroti belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, isu ini dirumuskan untuk memastikan terbangunnya ketahanan sosial yang responsif dan proaktif terhadap perubahan sosial.

Apabila isu strategis yang telah diidentifikasi dapat diselesaikan dengan baik, Kabupaten Bandung akan mampu mencapai visi pembangunan jangka panjangnya pada tahun 2030, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas." Pengelolaan tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan serta ketahanan terhadap bencana akan menciptakan daerah yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia, yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Penguatan ekonomi inklusif serta pengurangan kemiskinan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan. Peningkatan ketahanan pangan dan infrastruktur dasar akan memperkuat sektor pertanian serta mendorong konektivitas antarwilayah, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong efisiensi dalam pelayanan publik.

Dengan mengatasi isu-isu strategis ini, Kabupaten Bandung dapat mewujudkan harapan *stakeholder* pada tahun 2030, yakni menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Penguatan ketahanan sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Keseluruhan langkah ini akan mengantarkan Kabupaten Bandung menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan visi dan harapan seluruh pemangku kepentingan.

BAB 3
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan pada periode 2025-2030. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perumusan visi dan misi RPJMD tidak hanya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah, tetapi juga harus mengacu pada RPJPD guna memastikan kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Maka visi RPJMD Kabupaten Bandung harus mengacu kepada visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Visi RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kabupaten Bandung

RPJP Nasional (Tahun 2025-2045)	RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2025-2045)	RPJPD Kabupaten (Tahun 2025-2045)
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan	Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia	Kabupaten Bandung Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Jawa Barat Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045

Untuk merealisasikan visi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045, telah dirumuskan delapan misi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas;
2. Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal;
3. Transformasi tata kelola;
4. Mewujudkan kabupaten yang Kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah;
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter;
6. Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata;
7. Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif;
8. Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Setelah menyandingkan visi dari setiap dokumen perencanaan RPJP di berbagai level pemerintahan, selanjutnya yang menjadi acuan bagi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun

2025-2029 adalah mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam tahap pembangunan ke I RPJP yaitu tahap penguatan fondasi melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Berikut ini adalah arah kebijakan pembangunan pada tahap I dalam masing-masing dokumen perencanaan jangka panjang.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kabupaten Bandung

RPJP NASIONAL (TAHUN 2025-2045)	RPJPD PROVINSI JAWA BARAT (TAHUN 2025-2045)	RPJPD KABUPATEN BANDUNG (TAHUN 2025-2045)
Tahap I (2025-2029) Penguatan Transformasi	**Tahap I (2025-2029)** Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola	**Tahap I (2025-2029)** Penguatan fondasi melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola

Sumber: Diolah dari RPJP Nasional tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045, 2025

Dengan mempertimbangkan visi Bupati Kabupaten Bandung tahun 2025-2030, visi pembangunan pada dokumen RPJP tiap level pemerintahan, serta isu-isu strategis, maka ditetapkanlah visi pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu:

"Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas"

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah dirumuskan, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati

terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam penyusunan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak

Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius. Selain itu, misi ini juga berkomitmen untuk menguatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut diimbangi dengan perlindungan terhadap anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembangnya.

Dalam mencapai misi ini, penguatan nilai-nilai religius juga ditekankan untuk membentuk individu yang memiliki integritas, etika, dan moral yang tinggi. Selain itu, misi ini juga menitikberatkan pada penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan agar lebih berperan dalam berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Perempuan didorong untuk menjadi agen perubahan melalui akses yang lebih luas terhadap pendidikan, permodalan, dan pelatihan. Hal ini bukan hanya soal kesetaraan, melainkan juga sebagai strategi memperkuat struktur sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung juga tercermin dalam upaya nyata untuk mendorong perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penekanan diberikan pada perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Perlindungan anak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, peningkatan promosi potensi daerah agar meningkatkan investor yang masuk, penguatan sektor unggulan, pemanfaatan produk lokal secara massal serta pemerataan kesempatan dalam berbagai sektor ekonomi. Peningkatan pertumbuhan sektor-

sektor unggulan di Kabupaten Bandung seperti pertanian, pariwisata berbasis alam dan budaya serta industri kreatif, terus menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan budaya Sunda, serta didukung inovasi dan digitalisasi, sektor-sektor ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing Kabupaten Bandung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke pangan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola yang baik mencerminkan sistem pemerintahan yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak.

Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan inklusivitas, supremasi hukum, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta diawasi publik. Partisipasi masyarakat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif, sementara efektivitas dan efisiensi menjamin sumber daya dimanfaatkan secara optimal. Keadilan dan inklusivitas memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan, sedangkan supremasi hukum menegakkan kepastian serta rasa keadilan. Untuk mewujudkannya aparatur negara perlu memiliki integritas, profesionalitas, dan kompetensi yang kuat, didukung oleh pemanfaatan TIK guna mempercepat layanan, memperluas akses, serta menutup celah penyalahgunaan wewenang. Dengan sinergi seluruh aspek tersebut dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi

Misi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan kemajuan dalam pembangunan fisik wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan udara bersih, air layak konsumsi, lahan subur, serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, mengoptimalkan aksesibilitas masyarakat dan kelancaran arus distribusi barang, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur berarti setiap pembangunan dilakukan secara terpadu, memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Serta setiap wilayah juga mendapatkan akses pembangunan yang merata, tidak hanya terpusat di perkotaan. Dengan kombinasi antara lingkungan hidup yang terjaga dan infrastruktur yang terencana dengan baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi 5: Menjaga Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Misi ini bertujuan untuk menciptakan dan menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat. Di tengah perkembangan dinamika sosial, dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif dan pelibatan masyarakat serta kebijakan yang berorientasi pada pencegahan konflik, Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi daerah yang aman dan kondusif bagi perkembangan ekonomi wilayah. Upaya menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bandung diarahkan melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Program keamanan berbasis masyarakat seperti patroli lingkungan, pengawasan warga, serta edukasi mengenai ketertiban umum difokuskan pada pencegahan potensi konflik sosial dan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu iklim usaha. Melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, melaporkan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban, serta mendukung kebijakan pemerintah, diharapkan tumbuh rasa tanggung

jawab kolektif dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Kolaborasi erat antar pemangku kepentingan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya stabilitas daerah yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya tarik investasi dan mendorong perkembangan ekonomi wilayah. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, Kabupaten Bandung dapat menjadi tempat yang lebih baik untuk tinggal, bekerja, dan berwisata, sesuai dengan visi besar untuk menjadi daerah yang lebih bedas, maju, dan berkelanjutan.

Misi pembangunan di atas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir logis (*Logical Framework*) pencapaian misi dalam bentuk *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. *Cascading* pencapaian misi pembangunan daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta untuk menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut dan siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra Perangkat Daerah) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD ini.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung memiliki sejumlah rencana aksi yang akan dilakukan selama lima (5) tahun ke depan. Setiap rencana aksi disusun secara strategis dan sistematis untuk menjabarkan langkah-langkah operasional yang diperlukan dalam mencapai sasaran dari masing-masing misi pembangunan. Berikut merupakan lima puluh tujuh (57) rencana aksi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung.

Tabel 3.3 Visi, Misi dan Rencana Aksi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung

VISI	MISI	RENCANA AKSI	
Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas	**MISI 1** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak	1	Reformasi Layanan Pendidikan berstandar Nasional
		2	Mendorong Masyarakat Kabupaten Bandung Setara Lulusan Pendidikan SMA/Sederajat
		3	Meningkatkan Insentif Guru Ngaji Dalam Rangka Menuntaskan Buta Huruf Alquran
		4	Jaminan (asuransi) untuk Guru Ngaji, Ustadz/ah, Takmir, dan Marbot
		5	Meningkatkan program BESTI (Beasiswa TI Bupati) Lebih Bedas
		6	Pemerataan Kesempatan Belajar di Setiap Jenjang Pendidikan Dan Mendorong Berdirinya Perguruan Tinggi

VISI	MISI	RENCANA AKSI	
		7	Implementasi Muatan Lokal Ke Dalam Kurikulum Seluruh Jenjang Pendidikan
		8	Reformasi Layanan Kesehatan
		9	Menurunkan angka stunting (New Zero Stunting) & Peningkatan gizi anak
		10	Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat
		11	Meningkatkan Ketahanan Sosial Berbasis Keluarga dan Kesetaraan Gender
		12	Meningkatkan Insentif PKK Desa dan Posyandu berikut BPJS Ketenagakerjaan
		13	Meningkatkan Tenaga Kerja Profesional Dengan Prioritas Angkatan Kerja Muda yang Kompetitif
		14	Peningkatan Peran Pemuda Dalam Penguatan Ekosistem Kreatif
		15	Peningkatan Layanan Disabilitas dan Seluruh Kantor Pemerintahan Ramah Disabilitas
		16	Fasilitasi Penyelengaraan Pesantren
		17	Peningkatan Kualitas Pengembangan Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat
		18	Pelestarian dan Pengembangan Budaya
	MISI 2 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan	19	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
		20	Mencetak Wirausaha Baru dan Aktivasi Inkubasi Bisnis Ekonomi Kreatif (Ekraf)
		21	Peningkatan Kerjasama Dengan Industri Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan
		22	Pemberian Asuransi dan/atau Subsidi/hibah Kepada Petani dan buruh tani beserta BPJS Ketenagakerjaan
		23	Peningkatan Fasilitasi Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga dan Jaminan dan Mendorong Melalui Kerjasama KUR (Kredit Usaha Rakyat) Kepada Seluruh Pelaku Usaha Termasuk Petani
		24	Kemudahan Pelayanan Perizinan
		25	Meningkatakan Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Lokal Dan Optimalisasi Lahan Sawah Yang Dilindungi (LSD) dengan dikuatkan melalui Perdes (Peraturan Desa) menjadi sawah abadi
		26	Pemberian Subsidi/Hibah Terhadap Petani yang Menanam Produk Unggulan Kabupaten Bandung

VISI	MISI	RENCANA AKSI	
	MISI 3 Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	27	Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) Melalui Diantaranya Fasilitasi Pemekaran/Penggabungan Dan Peningkatan Desa/Kelurahan
		28	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Paham Digitalisasi Serta Mengoptimalkan Tata Kelola *Big Data* dan Transformasi Digital
		29	Membentuk Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah
		30	Peningkatan Siltap / Insentif Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD beserta BPJS Ketenagakerjaan
		31	Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Sinergitas Pemerintahan antara Pusat dan Daerah
		32	Peningkatan Layanan Kependudukan yang Responsif dan Cepat
		33	Pembebasan PBB Terhadap Lahan Sawah Abadi
		34	Pembebasan PBB dan fasilitasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terhadap Fasilitas Keagamaan
		35	Peningkatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Fasilitas Keagamaan
	MISI 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi	36	Peningkatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
		37	Meningkatkan Keterpaduan Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan
		38	Mewujudkan Pembangunan Berbasis Desa
		39	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas Baik Infrastruktur Umum Maupun Pertanian
		40	Penataan Pemukiman Kumuh
		41	Menciptakan Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan
		42	Mendorong Fasilitasi Penyediaan Rumah Bersubsidi
		43	Fasilitasi dan Evaluasi Pembagian Dana Bagi Hasil Panas Bumi Untuk Peningkatan Pembangunan Desa
		44	Pendataan dan Penataan Pemakaman Umum
		45	Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih
		46	Mendorong Percepatan Menuju *Zero Waste*
		47	Mendorong Normalisasi Jaringan Saluran Air di Daerah Perbatasan
		48	Memperluas Layanan Transportasi Publik/Massal

VISI	MISI	RENCANA AKSI	
		49	Penangulangan Lahan Kritis dan Penyusunan Roadmap (Peta Jalan) Karbon
		50	Membangun Convention Centre, Taman Kota, Gedung Kesenian, Fasilitas Olahraga, Dan Rest Area Di Lokasi Pariwisata Yang Terintegrasi.
		51	Mendorong Percepatan Reforma Agraria
		52	Mendorong Pembangunan Kolam Retensi Dalam Rangka Penangulangan Banjir
	MISI 5 Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	53	Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Tertib
		54	Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama
		55	Membangun Kampung Moderasi
		56	Meningkatkan Koordinasi FORKOPIMDA Untuk Mendorong Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
		57	Peningkatan Insentif RT, RW, Kadus dan Linmas beserta BPJS

Sumber: Diolah dari Buku Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun dengan dilengkapi arsitektur kinerja yang menggambarkan alur keterkaitan antara visi, misi, hingga program pembangunan yang dirancang. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD merupakan hasil dari proses perumusan capaian strategis Kabupaten Bandung, yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penentuan tujuan dan sasaran harus bersifat terukur (*measurable*), sehingga dapat dievaluasi secara objektif melalui indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pengukuran kinerja keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan direpresentasikan melalui tujuan RPJMD yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan pencapaian strategis dalam lingkup yang lebih luas. Sementara itu, pencapaian sasaran RPJMD yang kemudian ditetapkan didalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) berfungsi sebagai indikator spesifik dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini, seluruh aspek perencanaan pembangunan dapat dievaluasi secara sistematis, memastikan bahwa tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.

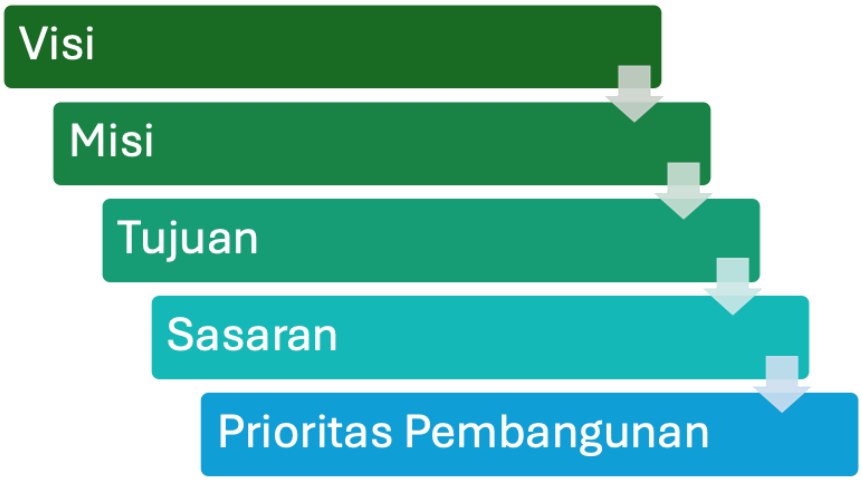

Gambar 3.1. Linearitas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam *penyusunan logical framework* Kabupaten Bandung. Gambaran *cascading* di atas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat didalamnya. Masing-masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program-program pembangunan daerah juga terdapat keterlibatan lintas perangkat daerah/ lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Prioritas Pembangunan Daerah ditransformasikan ke program nomenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang memfokuskan langkah intervensi tersebut harus dilakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah. Dengan disusunnya Prioritas Pembangunan Daerah pada *cascasding* kinerja merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan pendekatan *money follow program* yang berorientasi pada pendekatan holistik – tematik dan integratif. Prioritas pembangunan daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian misi. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur.

Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang di ikuti dengan gambaran *cascading* kinerja Kabupaten Bandung. Berdasarkan perumusan yang telah dilakukan, terdapat 5 (lima) tujuan pembangunan dan 16 (enam belas) sasaran pembangunan sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan dilengkapi dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak, maka tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung misi 1 sebagai berikut:

Tujuan Pembangunan 1: Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing

Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga serta Pengembangan Potensi Pemuda dan Keolahragaan
4. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat
5. Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda

Misi 1	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak**				
Tujuan	**Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing**				
Indikator Tujuan	**Indeks Pembangunan Manusia**				
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga serta Pengembangan Potensi Pemuda dan Keolahragaan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda
Indikator Sasaran	Indeks Pendidikan	1. Indeks Kesehatan 2. Prevalensi Stunting pada Balita	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Indeks Pembangunan Pemuda	Tingkat Kemiskinan	Indeks Pembangunan Kebudayaan
Prioritas Pembangunan	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berakhlak, Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Penguatan Kebudayaan Lokal

Gambar 3.2.*Cascading* Misi Pembangunan 1
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Penyusunan *cascading* di atas dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa Kabupaten Bandung masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakatnya, agar dapat tercapai SDM yang unggul. Hal ini dikarenakan masih mendominasinya tenaga kerja berpendidikan dasar, akses layanan pendidikan tinggi yang terbatas, dan layanan kesehatan yang belum merata. Salah satu isu kesehatan yang menjadi perhatian utama di Kabupaten Bandung adalah *stunting*, mengingat dampak jangka panjangnya terhadap kualitas SDM serta keterkaitannya dengan akses layanan kesehatan

dasar dan pemenuhan gizi pada masa awal kehidupan. Peningkatan kualitas SDM juga didukung oleh kualitas pembangunan keluarga, yang tidak hanya menggambarkan kesejahteraan materiil, tetapi juga mencerminkan kebahagiaan dan ketahanan keluarga secara holistik. Meskipun terdapat capaian positif seperti meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menunjukkan adanya kemajuan dalam kesetaraan peran perempuan, namun ketimpangan layanan dasar antarwilayah masih menjadi hambatan signifikan dalam upaya meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan daya saing masyarakat Kabupaten Bandung.

Rumusan tujuan di atas menerjemahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berakhlak melalui pendidikan, pelatihan, serta pembentukan karakter yang berintegritas. Selain itu, pembangunan ini juga menekankan pentingnya kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan agar lebih berperan dalam berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Upaya ini diimbangi dengan perlindungan terhadap anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembangnya.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ini, dirumuskan sasaran pembangunan pertama yaitu **meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat** yang mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan penambahan muatan lokal didalamnya agar tetap melestarikan kebudayaan daerah. Selain itu, metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif juga diterapkan guna meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta didik. Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan lahir generasi yang lebih cerdas, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan di berbagai bidang, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa.

Sasaran pembangunan kedua, yaitu **meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pelayanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih luas terhadap fasilitas kesehatan, serta penerapan pola hidup sehat di lingkungan masyarakat. Sasaran ini juga merespons tantangan kasus *stunting* yang masih terjadi di Kabupaten Bandung. Untuk itu, diperlukan komitmen multipihak, baik dalam hal advokasi, perencanaan, maupun pelaksanaan program, termasuk perumusan strategi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas dalam rangka percepatan penuntasan dan penurunan kasus *stunting*. Dengan demikian, masyarakat yang lebih sehat dan keluarga yang lebih kuat dapat terbentuk, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan ketiga yaitu **meningkatnya kualitas kehidupan keluarga serta pengembangan potensi pemuda dan keolahragaan**. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran utama dalam membentuk karakter, nilai moral, dan kebiasaan hidup sehat bagi setiap individu. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas kehidupan keluarga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan peran orang tua dalam mendidik anak, serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Di sisi lain, pemuda sebagai generasi penerus bangsa perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi baik di bidang pendidikan, kreativitas, kepemimpinan, maupun olahraga. Pengembangan sektor keolahragaan tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mendorong terbentuknya karakter yang disiplin, kompetitif, dan sportif. Dengan demikian, pembangunan yang berfokus pada keluarga dan pemuda akan menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual dan keterampilan, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan daya saing yang kuat di berbagai bidang.

Sasaran pembangunan keempat yaitu **meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat**, yang mencerminkan peningkatan kualitas hidup melalui terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta lingkungan yang aman dan nyaman. Upaya tersebut ditempuh melalui program pemberdayaan ekonomi, pemberian bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas dan merata. Peningkatan kesejahteraan ini juga tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sosial, yang menunjukkan semakin berkurangnya jumlah masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan juga diwujudkan dengan memperkuat solidaritas antarwarga, membangun rasa kebersamaan, serta menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan tercapainya kesejahteraan sosial, diharapkan tumbuh masyarakat yang mandiri, produktif, dan harmonis, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.

Sasaran pembangunan kelima yaitu **meningkatnya ketahanan dan kontribusi budaya Sunda**, budaya lokal seperti budaya Sunda memiliki peran penting dalam membentuk karakter, identitas, dan nilai-nilai moral masyarakat, terutama dalam hal kesopanan, gotong royong, serta penghargaan terhadap kearifan lokal. Ketahanan budaya menunjukkan kemampuan suatu masyarakat dalam menjaga, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai budayanya di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Sementara itu kontribusi budaya Sunda dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun ekonomi dapat memperkuat jati diri masyarakat serta meningkatkan daya tarik daerah melalui seni, tradisi, dan produk budaya yang khas. Dengan mengintegrasikan pelestarian budaya ke dalam pembangunan

sumber daya manusia, diharapkan terbentuk generasi yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki akhlak mulia, berakar pada budaya sendiri, serta mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas lokal.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan, maka tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung misi 2 sebagai berikut:

Tujuan Pembangunan 2: Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan

Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan
2. Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah
3. Menurunnya Tingkat Pengangguran
4. Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Misi 2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan			
Tujuan	Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan			
Indikator Tujuan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Gini Rasio			
Sasaran	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
Indikator Sasaran	Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB (Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	*Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Skor PPh Konsumsi
Prioritas Pembangunan	Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan		Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan Ketahanan Pangan

Gambar 3.3.*Cascading* Misi Pembangunan 2
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Kondisi ekonomi Kabupaten Bandung yang tumbuh cukup baik, namun belum sepenuhnya inklusif, menggambarkan adanya dinamika yang kompleks dalam proses pembangunan daerah. Ketimpangan distribusi ekonomi, dominasi sektor informal dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya angka Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung dibandingkan dengan Provinsi menunjukkan Kabupaten Bandung sudah lebih baik daripada Provinsi Jawa Barat. Selain itu, perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri meskipun berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dan peluang investasi, juga menimbulkan tantangan dalam hal distribusi kesejahteraan antar sektor dan antarwilayah. Tantangan lainnya adalah terjadinya konversi lahan pertanian, tren penurunan luas lahan dan produksi pangan, khususnya padi yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan lokal, serta ancaman perubahan iklim berisiko mengganggu ketersediaan dan stabilitas pangan daerah. Namun demikian sampai saat ini Kabupaten Bandung masih memiliki potensi lahan dan komoditas unggulan yang berkontribusi besar terhadap provinsi seperti hortikultura, perkebunan, peternakan dan biofarmaka.

Rumusan tujuan di atas menerjemahkan tujuan pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang terpinggirkan. Hal ini diwujudkan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, peningkatan promosi potensi daerah agar meningkatnya investor masuk, penguatan sektor unggulan, pemanfataan produk lokal secara massal serta pemerataan kesempatan dalam berbagai sektor ekonomi. Selain itu, inklusivitas ekonomi juga mencakup pengurangan kesenjangan sosial dengan memastikan kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas ekonomi. Dengan adanya perekonomian yang inklusif, diharapkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi meningkat secara berkelanjutan sehingga dapat berkontribusi mewujudkan misi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada tahun 2029.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ini, dirumuskan sasaran pembangunan pertama yaitu **meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan** mencerminkan perkembangan positif dalam bidang-bidang ekonomi yang memiliki potensi besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah maupun nasional. Sektor-sektor yang diarahkan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bandung yaitu Pertanian Modern, Industri Pengolahan berbasis Industri Hijau dan Pariwisata didorong melalui kebijakan yang mendukung inovasi, investasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penguatan infrastruktur dan akses pasar yang lebih luas juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor unggulan. Dengan berkembangnya sektor-sektor strategis ini, diharapkan perekonomian dapat menyasar masyarakat secara inklusif.

Sasaran pembangunan kedua yaitu **meningkatnya daya tarik investasi daerah** mengindikasikan meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di suatu

wilayah, yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif, infrastruktur yang memadai, serta iklim usaha yang stabil. Upaya ini dilakukan melalui penyederhanaan regulasi perizinan, pemberian insentif bagi investor, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendukung sektor industri dan ekonomi lokal. Selain itu, optimalisasi potensi unggulan daerah, seperti sumber daya alam, pariwisata, dan industri kreatif, juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi. Dengan meningkatnya investasi di daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi semakin pesat, lapangan kerja bertambah, serta meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bandung.

Sasaran pembangunan ketiga yaitu **menurunnya tingkat pengangguran** merepresentasikan adanya peningkatan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi, investasi, serta pengembangan sektor-sektor produktif. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan agar tenaga kerja lebih siap bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta investasi di berbagai sektor strategis, turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru. Dengan semakin berkurangnya angka pengangguran, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat, daya beli menguat, serta stabilitas ekonomi dan sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Sasaran pembangunan keempat yaitu **meningkatnya ketahanan pangan yang berkelanjutan**, hal ini mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memastikan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara merata bagi seluruh masyarakat dalam jangka panjang. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis sumber daya lokal dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan serta praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu, penguatan sistem distribusi dan pemasaran hasil pangan lokal juga menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di berbagai wilayah. Dengan ketahanan pangan yang semakin kuat, diharapkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal meningkat, ketergantungan pada impor berkurang, serta ketahanan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan global.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 3

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 3 yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel, maka tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung misi 3 sebagai berikut:

Tujuan Pembangunan 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien

Gambar 3.4. *Cascading* Misi Pembangunan 3
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Kebutuhan memperkuat kapasitas birokrasi agar lebih adaptif, kolaboratif, dan digital menjadi semakin mendesak di tengah dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Meskipun capaian indeks reformasi birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta inovasi daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan, realitas di lapangan masih memperlihatkan adanya hambatan struktural, seperti belum optimalnya koordinasi lintas PD, kesenjangan digital antarwilayah, dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa reformasi tidak hanya cukup diukur melalui capaian indeks, tetapi juga perlu diwujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari yang lebih *agile* dan akuntabel.

Rumusan tujuan di atas menerjemahkan tujuan pembangunan yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola yang baik mencerminkan sistem pemerintahan yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyediaan layanan publik yang berkualitas, serta pengelolaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kepercayaan publik terhadap institusi

pemerintah akan meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ini dirumuskan sasaran pembangunan yaitu **meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.** Birokrasi yang berkualitas ditandai dengan pelayanan publik yang mudah diakses, prosedur yang jelas dan tidak berbelit-belit, serta penggunaan anggaran dan sumber daya yang tepat sasaran. Transparansi dalam birokrasi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi proses pemerintahan, sementara akuntabilitas menjamin bahwa setiap tindakan aparat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Efektivitas berarti kebijakan dan program pemerintah mampu mencapai hasil yang diinginkan, dan efisiensi menunjukkan bahwa proses pencapaian tersebut dilakukan dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Selain itu, peningkatan kualitas birokrasi juga harus ditopang oleh penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memiliki integritas, profesionalitas, serta kapasitas yang adaptif terhadap dinamika perubahan. Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan *big data* sebagaimana menjadi amanat Bupati, menjadi instrumen strategis untuk mendukung perencanaan berbasis bukti, meningkatkan kecepatan layanan, memperkuat transparansi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan peningkatan kualitas birokrasi yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus tumbuh, pelayanan publik menjadi lebih baik, dan seluruh proses pembangunan dapat berjalan secara lebih adil, cepat, dan berkelanjutan.

3.2.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 4 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi, maka tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung misi 4 sebagai berikut:

Tujuan Pembangunan 4: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan

Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif
2. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang Berkelanjutan
3. Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran
4. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan

Misi 4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi			
Tujuan	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan			
Indikator Tujuan	1. Indeks Pengembangan Wilayah 2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca			
Sasaran	Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang Berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan
Indikator Sasaran	Indeks Kualitas Infrastruktur	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1. Indeks Risiko Bencana 2. Tingkat Kerawanan Kebakaran	Persentase Desa Mandiri
Prioritas Pembangunan	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar	Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Kualitas Lingkungan Hidup	Penataan Infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana	Peningkatan Pembangunan Desa

Gambar 3.5.*Cascading* Misi Pembangunan 4
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Dalam bidang infrastruktur dan lingkungan, Kabupaten Bandung masih menghadapi tantangan pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar yang belum optimal. Disparitas antarwilayah masih terlihat, terutama dalam akses air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah, termasuk koridor industri dan kawasan strategis, serta memperbesar tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat alih fungsi lahan, penurunan tutupan hijau, dan tingginya kerentanan bencana. Urbanisasi yang pesat juga menimbulkan tantangan baru berupa kebutuhan hunian, transportasi, pengelolaan sampah, dan banjir yang semakin kompleks. Situasi tersebut menegaskan pentingnya penataan ruang yang berkelanjutan dan adaptif terhadap risiko iklim, sekaligus memperhatikan potensi sumber daya seperti panas bumi dan kawasan lindung sebagai modal menjaga keseimbangan ekologis.

Rumusan tujuan di atas menerjemahkan tujuan pembangunan yang berarti bahwa setiap daerah mendapatkan akses pembangunan yang merata, tidak hanya terpusat di satu wilayah saja. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi memastikan adanya konektivitas yang baik antarwilayah, seperti jaringan transportasi, telekomunikasi, dan energi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, aspek ketahanan dalam pembangunan infrastruktur mengacu pada daya tahan terhadap bencana, perubahan iklim, serta tantangan sosial dan ekonomi, sehingga fasilitas yang dibangun dapat digunakan dalam jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan juga menekankan efisiensi penggunaan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan adanya pembangunan yang merata dan berbasis infrastruktur yang terencana dengan baik, diharapkan setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih seimbang.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ini, dirumuskan sasaran pembangunan pertama yaitu **meningkatnya ketersediaan dan akses infrastruktur dasar yang inklusif** merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan, dan berkelanjutan. Infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi, air baku, air minum, irigasi, listrik, sanitasi, persampahan serta layanan telekomunikasi dan internet, harus tersedia secara merata di seluruh wilayah agar setiap masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan dapat menikmati manfaat yang sama. Akses yang inklusif berarti pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada wilayah yang sudah berkembang, tetapi juga menjangkau daerah terpencil, tertinggal, dan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk penyandang disabilitas. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, mobilitas dan aktivitas ekonomi dapat meningkat, kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi, serta kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Pembangunan infrastruktur yang merata juga mendukung konektivitas antarwilayah, memperkuat ketahanan terhadap berbagai tantangan lingkungan dan sosial, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh daerah.

Sasaran pembangunan kedua yaitu **meningkatnya efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang berkelanjutan** merupakan faktor penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan, dan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan yang baik memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem, menjaga kualitas udara, air, dan tanah, serta mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sementara itu upaya menghadapi perubahan iklim dilakukan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan energi terbarukan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam berbagai sektor pembangunan. Infrastruktur yang berketahanan harus dirancang agar mampu menghadapi dampak perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem sehingga tetap dapat berfungsi optimal dalam jangka waktu yang panjang. Dengan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan, pembangunan dapat berjalan lebih seimbang, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta kelestarian sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Sasaran pembangunan ketiga yaitu **meningkatnya ketahanan wilayah rentan bencana dan kebakaran**, merupakan langkah penting berikutnya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan, dan berkelanjutan. Wilayah yang sering mengalami bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah

longsor, kebakaran dan kekeringan, memerlukan perencanaan dan pembangunan yang lebih tangguh agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan perekonomian. Upaya ini mencakup pembangunan infrastruktur yang resilien terhadap bencana, seperti sistem drainase yang terintegrasi, bangunan dengan konstruksi yang sesuai standar mitigasi bencana, serta penataan ruang yang memperhatikan risiko alam. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan tanggap bencana juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah. Dengan meningkatnya kesiapan dan ketahanan terhadap bencana, diharapkan dapat meminimalisir dampak, keselamatan masyarakat lebih terjamin, serta pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sasaran pembangunan keempat yaitu **meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan** memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan, dan berkelanjutan. Pembangunan yang merata di desa-desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, sehingga masyarakat perdesaan hingga wilayah perbatasan dan terluar dapat menikmati akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, layanan dasar, serta peluang ekonomi. Upaya ini mencakup peningkatan konektivitas transportasi, akses listrik dan air bersih, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor pertanian dan ekonomi lokal agar lebih produktif dan berdaya saing. Dengan adanya pembangunan yang merata, masyarakat desa tidak hanya mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa harus berpindah ke kota. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan di perdesaan juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan bencana. Dengan demikian, pemerataan pembangunan di desa akan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.2.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 5

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 5 yaitu Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung misi 5 sebagai berikut:

Tujuan Pembangunan 5: Terselenggaranya Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
2. Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Gambar 3.6.*Cascading* Misi Pembangunan 5
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Perlunya memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat menjadi penting di tengah meningkatnya dinamika sosial dan tekanan urbanisasi. Meskipun indeks ketertiban umum menunjukkan tren positif, tantangan nyata masih muncul berupa potensi konflik horizontal akibat kesenjangan sosial ekonomi, ketimpangan layanan publik antarwilayah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Kondisi tersebut jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kerentanan terhadap harmonisasi kehidupan sosial maupun keberlangsungan pelayanan publik.

Rumusan tujuan di atas menerjemahkan tujuan pembangunan yang berarti merupakan kondisi yang mendukung kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tertib, sehingga setiap individu dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan. Stabilitas mencerminkan situasi yang kondusif, di mana tidak ada konflik atau gangguan yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketenteraman menunjukkan adanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, baik dalam lingkungan tempat tinggal maupun dalam berinteraksi sosial. Sementara itu, ketertiban umum mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang berlaku, sehingga menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan menaati aturan yang berlaku. Dengan stabilitas, ketentraman, dan ketertiban yang terjaga, proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin kuat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ini, dirumuskan sasaran pembangunan pertama yaitu **meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat** mencerminkan

pentingnya menciptakan suasana kehidupan yang aman, tertib, dan damai sebagai landasan utama bagi terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi masyarakat yang tenteram tidak hanya mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas serta kepercayaan antar warga dalam membangun lingkungan yang harmonis. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yakni mengedepankan pentingnya keamanan sebagai bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan masyarakat. Upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga norma sosial, saling menghormati, dan menjaga ketenangan di lingkungannya masing-masing. Kolaborasi yang kuat antara seluruh unsur masyarakat, tokoh lokal, dan lembaga sosial akan membentuk ekosistem sosial yang resilien, sehingga stabilitas dapat terjaga dan pembangunan daerah dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Sasaran pembangunan kedua yaitu **meningkatnya stabilitas kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)**. Stabilitas sosial yang berkelanjutan diperlukan sebagai prasyarat terciptanya iklim kehidupan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Stabilitas tersebut diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara, penegakan prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan dan partisipasi masyarakat secara adil, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat setiap individu. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan, memperkuat edukasi kebangsaan, dan memperluas ruang dialog yang konstruktif. Upaya ini diharapkan mampu membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja dan target yang terukur untuk tahun 2025-2030.

Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

VISI	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak	T.1	Terwujudnya kualitas hidup sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,59	75,06	75,76	76,40	77,02	77,62	78,24
		S.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	65,89	66,21	67,01	67,54	68,10	68,63	69,19
		S.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	84,97	85,26	85,55	85,86	86,15	86,45	86,74
				Prevalensi Stunting pada Balita	%	24,1	21,72	19,67	17,92	16,40	15,10	13,96
		S.1.3	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga serta Pengembangan Potensi Pemuda dan Keolahragaan	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	59,93	60,93	61,93	62,88	63,83	64,78	65,73
				Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,45	58,77	60,12	61,50	62,92	64,36	65,84
		S.1.4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	6,19	5,95	5,70	5,48	5,28	5,09	4,89
		S.1.5	Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19	56,27-56,55	56,31-56,73	56,73-57,29	57,15-57,87	57,57-58,44	58,00-59,02
	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan	T.2	Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	4,90-5,25	5,33-6,20	5,41-7,04	5,45-7,50	5,61-7,96	5,68-6,27
				Gini Rasio	Poin	0,346	0,339-0,352	0,338-0,351	0,337-0,350	0,336-0,349	0,335-0,348	0,334-0,347
		S.2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB (Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	61,99	61,76-63,26	61,72-63,34	61,68-63,42	61,63-63,50	61,57-63,55	61,52-63,61
		S.2.2	Meningkatnya daya tarik investasi daerah	*Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)	Poin	4,00	3,75-3,90	3,71-3,89	3,66-3,89	3,62-3,91	3,58-3,94	3,54-3,98

VISI	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		S.2.3	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,36	6,15-6,70	6,00-6,56	5,83-6,41	5,68-6,28	5,52-6,14	5,39-6,03
		S.2.4	Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	68,02	67,63-68,66	66,75-68,91	65,90-68,76	65,06-68,21	64,23-67,28	63,43-65,98
				Skor PPH Konsumsi	Poin	85,10	85.62-85.77	86.13-86.37	86.66-86.98	87.18-87.58	87.71-88.20	88.24-88.81
	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	T.3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks	0,9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		S.3.1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A- (87,37)	A- (87,87)	A- (88,37)	A- (88,87)	A- (89,37)	A- (89,87)	A- (90,37)
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi	T.4	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Pengembangan Wilayah*	Poin	62,33	37,82	46,36	54,84	61,00	71,18	79,76
				Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2Eq/Miliar	N/A	2,50	2,77	3,06	3,42	3,85	4,17
		S.4.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar serta Inklusif	Indeks Kualitas Infrastruktur*	Poin	64,94	37,95	40,73	43,72	46,47	49,59	53,13
		S.4.2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,62	63,73	63,98	64,23	64,48	64,74	64,98
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton Co2eq	N/A	456.335,50	515.590,09	584.667,15	673.908,50	794.696,72	935.619,98
		S.4.3	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran	Indeks Risiko Bencana	Poin	117,13	116	115	114	113	112	111
				Tingkat Kerawanan Kebakaran	Poin	N/A	3,3	3,1	2,9	2,8	2,6	2,4
		S.4.4	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Persentase Desa Mandiri*	%	49,63	57,78	59,26	61,48	62,59	64,81	66,40

VISI	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	T.5	Terselenggaranya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	80,5	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,50
		S.5.1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	80,5	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,50
		S.5.2	Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	87	80	82	84	86	88	89
				Persentase Masyarakat yang Menerapkan Hasil Pembinaan Kebebasan Dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	%	64,00**	31,25	33,33	38,33	41,67	42,68	45,71

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025
Keterangan: *Terdapat perubahan formulasi perhitungan
** Lonjakan nilai dikarenakan tahun pemilu

3.3 Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah disajikan dalam Bab 2 serta dikaitkan dengan target-target yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam sub bab sebelumnya, maka dirumuskan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun 2025-2029 untuk Kabupaten Bandung. Arah kebijakan dan strategi merupakan rumusan perencanaan yang memungkinkan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

3.3.1Tema Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan periode tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan pertama (fondasi) dari RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, tema atau fokus pembangunan pada periode tahun 2025-2045 adalah "Penguatan Fondasi melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola". Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan tema pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam setiap tahun, serta akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Bupati, telah dibuat 5 tema tahunan untuk lima tahun periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, kelima tema tersebut dijabarkan sebagai berikut.

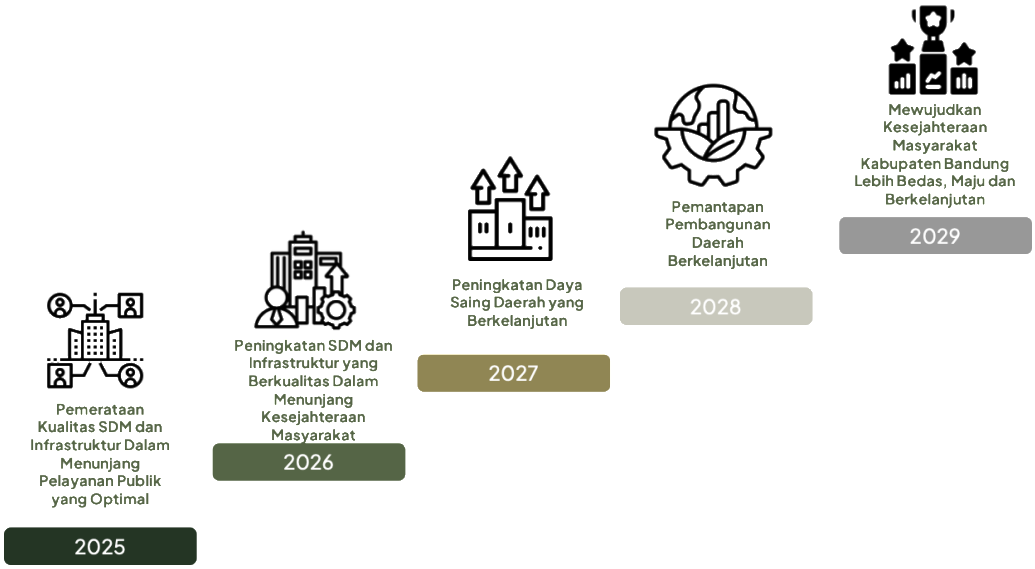

Gambar 3.7. Tema dan Tahapan Pembangunan Tahunan Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Tema pembangunan tahun 2025 yaitu **"Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Optimal"**

mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kesetaraan akses dan mutu terhadap sumber daya manusia dan sarana prasarana di seluruh wilayah. Pemerataan kualitas SDM mencakup seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Bandung yang unggul, terampil, sehat, dan berdaya saing akan menjadi motor penggerak kemajuan daerah, khususnya jika didukung dengan akses pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan yang merata hingga pelosok desa. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, dan penguatan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan.

Di sisi lain pemerataan infrastruktur menjadi faktor pendukung utama dalam memastikan layanan publik dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan tertinggal. Infrastruktur yang baik dan terintegrasi, seperti jalan, transportasi, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan, berperan penting dalam mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya keselarasan antara peningkatan kapasitas SDM dan pembangunan infrastruktur yang merata, pelayanan publik tidak hanya menjadi lebih efisien dan berkualitas tetapi juga memberikan kontribusi secara langsung terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tema pembangunan tahun 2026 yaitu **"Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat"** mencerminkan upaya strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui penguatan dua pilar utama pembangunan, yaitu sumber daya manusia dan infrastruktur. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan fondasi dalam menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan mampu bersaing di berbagai bidang. Oleh karena itu, arah kebijakan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan di semua jenjang, penguatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat serta terjangkau. Selain itu, pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai kebangsaan juga menjadi bagian penting dalam membentuk SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak dan berintegritas.

Sebagai penunjang dari upaya peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur yang berkualitas menjadi penopang utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, memperluas akses pelayanan dasar, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, jaringan internet, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Tahapan

pelaksanaannya meliputi perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan yang efisien dan transparan, serta pengawasan yang akuntabel. Sinergi antara peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur yang terencana dan tepat sasaran akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Tema pembangunan tahun 2027 yaitu **"Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan"** menegaskan pentingnya mendorong pertumbuhan wilayah yang tidak hanya unggul dalam aspek ekonomi, tetapi juga mampu mempertahankan keunggulan tersebut secara jangka panjang melalui prinsip keberlanjutan. Tema ini menjadi kelanjutan logis dari pembangunan SDM dan infrastruktur berkualitas yang telah menjadi fondasi dalam mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas manusia dan penguatan infrastruktur, daerah memiliki bekal untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi, efisiensi pelayanan, dan penguatan ekonomi lokal. Arah kebijakan yang diambil meliputi pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas iklim investasi dan usaha, serta dukungan terhadap transformasi ekonomi hijau dan digitalisasi sebagai motor pertumbuhan baru yang ramah lingkungan.

Selaras dengan itu, strategi pembangunan ke depan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem daerah yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika global. Tahapan yang dilakukan mencakup pemetaan potensi unggulan tiap wilayah, peningkatan kualitas layanan perizinan, pemberian insentif bagi pelaku usaha inovatif, serta penguatan peran UMKM sebagai yang berperan strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi lokal. Di samping itu, penting pula menjaga keberlanjutan lingkungan melalui tata ruang yang terencana, efisiensi energi, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan daerah mampu bersaing tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga di tingkat global, tanpa mengorbankan aspek sosial dan ekologis, serta tetap menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya.

Tema pembangunan 2028 yaitu **"Pemantapan Pembangunan Daerah Berkelanjutan"** menekankan pentingnya memperkuat fondasi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan sosial di masa mendatang. Tema ini merupakan kelanjutan dari arah pembangunan sebelumnya, seperti peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, dan peningkatan daya saing daerah. Setelah fondasi-fondasi tersebut dibangun, diperlukan pemantapan melalui kebijakan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis pada potensi lokal. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga

memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem, budaya, dan struktur sosial masyarakat.

Arah kebijakan dalam mewujudkan pemantapan pembangunan berkelanjutan antara lain mencakup peningkatan perencanaan pembangunan berbasis data dan lingkungan, integrasi prinsip pembangunan hijau dalam setiap program, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah agar mampu menyelenggarakan pembangunan yang efisien, inklusif, dan ramah lingkungan. Tahapan yang akan dilakukan mencakup evaluasi terhadap program pembangunan sebelumnya, penyesuaian regulasi yang mendukung keberlanjutan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan antar generasi, ketahanan wilayah dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan.

Tema pembangunan tahun 2029 yaitu **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan"** mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat capaian pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Tema ini selaras dengan visi besar Kabupaten Bandung, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas." Dalam konteks ini, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta penguatan nilai-nilai religius dan kearifan lokal. Oleh karena itu, arah pembangunan diarahkan pada pemantapan layanan dasar, pengurangan ketimpangan sosial dan wilayah, serta penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berdaya secara mandiri.

Tahapan yang akan dilakukan meliputi optimalisasi program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur dasar secara merata, dan penguatan sektor-sektor unggulan lokal berbasis potensi daerah yang ramah lingkungan. Di samping itu, kolaborasi antarsektor akan diperkuat untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau dan digital, serta menjamin ketahanan sosial dan lingkungan di tengah dinamika perubahan global. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel menjadi kunci dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh upaya pembangunan yang dilakukan akan saling bersinergi untuk mencapai masyarakat Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045.

3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD serta disusun untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai fokus dan rangkaian kerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD. Jika misi berfungsi sebagai pernyataan umum tentang arah pembangunan yang diinginkan, maka arah kebijakan berperan menerjemahkan misi tersebut menjadi pedoman yang lebih spesifik untuk mengarahkan langkah pembangunan. Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah daerah, diperlukan keselarasan dengan visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Selain itu, penyusunannya harus mempertimbangkan berbagai potensi yang dimiliki daerah, peluang yang tersedia, serta tantangan dan permasalahan yang mungkin muncul selama masa pemerintahan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung dalam RPJMD 2025–2029 dirancang sejalan dengan kerangka kerja pencapaian misi RPJPD 2025–2045 pada tahap pertama yaitu tahun 2025–2029, yang mengusung tema "Penguatan fondasi melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola" sebagai landasan penguatan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Berikut gambaran posisi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 didalam RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045.

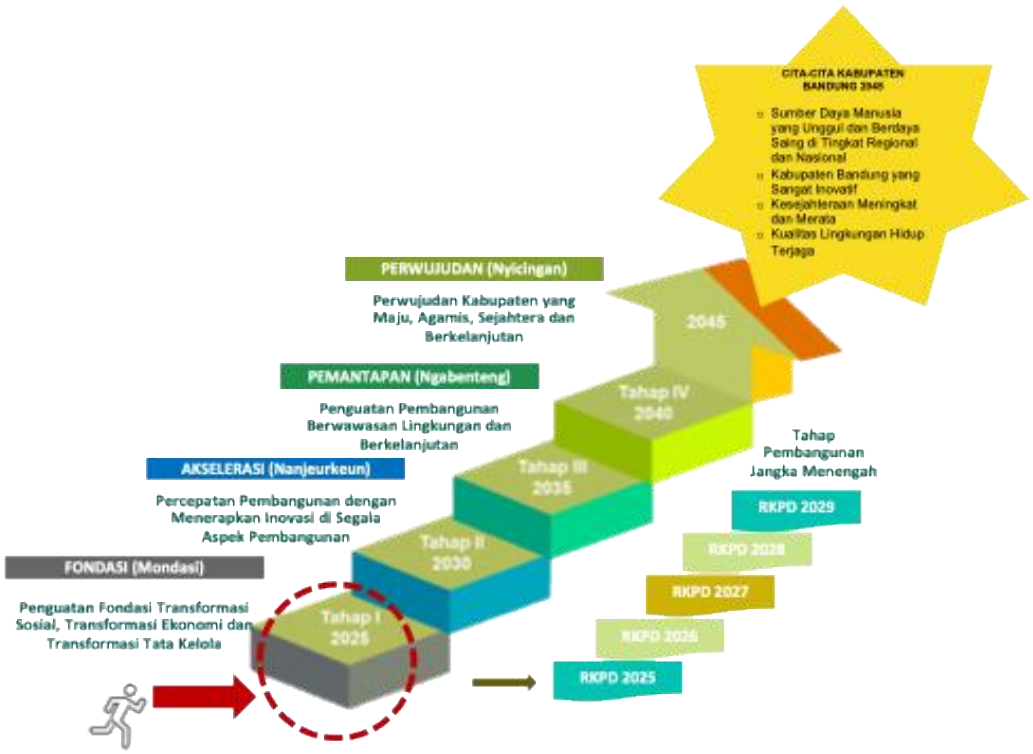

Gambar 3.8.Posisi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dalam RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045

Sumber: RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045, diolah 2025

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dalam pembangunan wilayah, pemerintah daerah menyiapkan langkah strategis beserta arah kebijakan yang disusun sesuai kompleksitas dan prioritas pembangunan, dengan tetap menjamin sinergi antar pihak serta optimalisasi potensi daerah. Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam merumuskan program pembangunan yang konkret untuk mencapai sasaran secara terukur. Penyusunannya juga memperhatikan kepentingan setiap unsur pemerintahan sebagai pemangku urusan, sehingga mampu menerjemahkan rangkaian kerja selama periode pemerintahan dalam mendukung kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bandung. Berikut tabel perumusan arah kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025–2029.

Tabel 3.5 Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak	Peningkatan wajib belajar 13 tahun dan penguatan kurikulum berbasis talenta, karakter, literasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor	Disdik
		Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana	Disdik
		Peningkatan kualitas dan kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif	Disdik
		Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional	Disdik
		Pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan	Disdik
		Peningkatan budaya literasi masyarakat	Dispusip
		Pemenuhan, peningkatan, dan pemerataan sarana prasarana pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.	Dinkes
		Perluasan upaya promotif, preventif, dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Dinkes
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat, pendekatan budaya, dan peningkatan imunisasi rutin lengkap	Dinkes
		Penyiapan dan peningkatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting.*	Dinkes
		Penataan dan pemenuhan sistem perlindungan sosial melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial bagi kelompok rentan.	Dinsos
		Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga	DP2KBP3A
		Pemenuhan dan perlindungan hak anak, perempuan, dan lansia serta pemberdayaan perempuan dan lansia.	DP2KBP3A
		Peningkatan daya saing pemuda dan keolahragaan serta pembudayaan olahraga rekreasi	Dispora
		Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila	Disbud
		Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat	Disbud
2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan	Distan Dispakan
		Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan)	Distan DPUTR Dispakan
		Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian	Distan
		Pengembangan investasi berbasis sektor pertanian, energi terbarukan, pariwisata, perindustrian dan potensi sektor lainnya	DPMPTSP Distan Disparekraf
		Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha berbasis potensi lokal	DPMPTSP
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan inklusif	Bapperida

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		Penataan sumber daya pariwisata dan Pemenuhan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam	Disparekraf Disbud
		Penguatan ekosistem bisnis pelaku usaha mikro, koperasi IKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui perluasan ekosistem digital, perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi kreasi dan inkubator bisnis serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan modal bergulir	Diskop UKM Disperindag
		Pengembangan IKM dan sentra industri berbasis potensi lokal serta hilirisasi produk pertanian	Diskop UKM Disperindag Distan Dispakan
		Peningkatan sarana perdagangan dan sistem logistik produk strategis	Disperdagin Dishub
		Transisi IKM berbasis ramah lingkungan	Disperindag
		Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat desa	Diskop UKM DPMD
		Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, dan kewirausahaan melalui penguatan BLK (Balai Latihan Kerja) sebagai pusat pengembangan kompetensi terintegrasi dan terpadu	Disnaker Distan Dispakan
		Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan akses kesempatan kerja	Disnaker
		Peningkatan produktivitas dan daya saing industri dan pariwisata halal serta berkelanjutan	Disparekraf Disperdagin
		Pengembangan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Dispakan Distan Dinkes
		Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas	Distan Dispakan, dll
3	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Penguatan sistem meritokrasi dalam manajemen ASN	BKPSDM
		Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan tata kelola satu data (*big data*) melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan	Diskominfo
		Peningkatan infrastruktur IT untuk layanan pemerintahan dengan skema pembiayaan yang inovatif	Diskominfo
		Peningkatan tata kelola kearsipan berbasis digital	Dispusip
		Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital	Disdukcapil Diskominfo
		Penguatan kelembagaan dan regulasi serta keterbukaan informasi berdasarkan riset dan inovasi daerah	Bapperida

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		Peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui penerapan manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi, dan peningkatan kapabilitas APIP.	Inspektorat Diskominfo
		Penataan dan Restrukturisasi BUMD	Sekretariat Daerah
		Penguatan fungsi koordinasi, *monitoring* dan evaluasi serta tata kelola pemerintahan.	Sekretariat Daerah
		Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan optimalisasi tata kelola pengelolaan pendapatan daerah	Bapenda Bapperida DPUTR Dishub Distan DLH Disperkimtan BLUD Kesehatan Disdagin
		Pengembangan Pembiayaan yang Inovatif, Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Serta Optimalisasi Pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)	BKAD
		Penguatan Sinergitas Perencanaan, Penganggaran dan penataan aset daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional	Sekretariat Daerah
		Peningkatan koordinasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Sekretariat DPRD
		Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Setda, DPMD Kecamatan
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi	Sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah	Sekretariat Daerah Bapperida
		Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah daerah untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	DPUTR Disperkimtan
		Mempertahankan kualitas kondisi jalan sebagai sarana aksesibilitas dan konektivitas masyarakat	DPUTR Disperkimtan
		Pengembangan dan penerapan tata kelola konektivitas dan aksesibilitas masyarakat serta peningkatan kualitas layanan sistem transportasi publik massal	Dishub
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas air melalui pengembangan infrastruktur air baku, distribusi air minum, dan irigasi yang terkelola secara terintegrasi serta partisipatif	DPUTR Distan Disperkimtan
		Peningkatan akses hunian layak dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah melalui penyediaan hunian vertikal dan penataan kawasan kumuh	Disperkimtan Disdamkar DPUTR

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
			Dinkes DLH
		Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat serta peningkatan upaya edukasi dalam percepatan bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), pengurangan dan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat mandiri melalui pengembangan ekonomi sirkular	DPUTR Disperkimtan DLH Dinkes Disdik
		Peningkatan pengelolaan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	DPUTR Disperkimtan
		Pengembangan konservasi lahan dan air berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal	DPUTR DLH Disperkimtan Distan
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	DPUTR DLH Distan
		Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat yang ideal	DPUTR DLH Disperkimtan
		Pemenuhan upaya pengurangan emisi karbon melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mendukung efisiensi energi	DLH DPUTR Disperkimtan Distan Disdagin Dishub
		Pengembangan sistem pengelolaan limbah non-domestik	DLH Disdagin Distan Dinkes
		Penguatan kelembagaan dan pengelolaan berbasis DAS mikro	DPUTR DLH
		Implementasi Penataan ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	DPUTR DLH BPBD

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		Peningkatan implementasi infrastruktur sesuai standar pengawasan dan ketahanan bencana	Disperkimtan BPBD
		Peningkatan upaya promotif, preventif dan edukasi tentang resiliensi bencana	BPBD
		Pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Metropolitan Bandung Raya	DPUTR Dishub Disperkimtan
		Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	DLH
		Pengembangan Kewilayahan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, dan Kawasan Strategis	DPUTR Disperkimtan DPMD
		Peningkatan kualitas pemerintahan desa, potensi desa, serta pemberdayaan masyarakat dan desa melalui pendekatan inovasi dan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	DPMD
5	Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat secara efektif dan berkeadilan.	Satpol PP
		Penguatan peran masyarakat dan peningkatan komitmen multi pihak dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan peningkatan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi.	Bakesbangpol

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Selanjutnya arah kebijakan yang telah disusun dituangkan ke dalam penahapan pembangunan dan disesuaikan dengan tema pembangunan tiap tahun, sebagai pedoman untuk menjalankan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD. Pentahapan pembangunan pada dua tahun pertama (tahun 2025 dan 2026) difokuskan kepada pemerataan dan peningkatan Kualitas SDM serta infrastruktur guna mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Lalu pada tahun ketiga dan seterusnya difokuskan pada mendukung penguatan daya saing daerah yang dilakukan dengan pengembangan ekonomi dan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan guna mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung di masa mendatang. Berikut tabel pentahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029.

Tabel 3.6 Pentahapan Pembangunan Tahun 2025-2029

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
MISI 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak	Pemetaan kondisi wajib belajar 13 tahun dan perumusan kurikulum berbasis talenta, karakter, literasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor.	Peningkatan wajib belajar 13 tahun dan penerapan kurikulum berbasis talenta, karakter, literasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor.	Peningkatan wajib belajar 13 tahun dan penerapan kurikulum berbasis talenta, karakter, literasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor.	Peningkatan wajib belajar 13 tahun dan penerapan kurikulum berbasis talenta, karakter, literasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor.	Peningkatan wajib belajar 13 tahun dan penguatan kurikulum berbasis talenta, karakter, literasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor.
	Pemetaan dan perumusan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang memenuhi standar kualitas serta aman bencana.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang memenuhi standar kualitas serta aman bencana.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang memenuhi standar kualitas serta aman bencana.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang memenuhi standar kualitas serta aman bencana.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang memenuhi standar kualitas serta aman bencana.
	Pemetaan kondisi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan peningkatan akses masyarakat terhadap PKBM.	Peningkatan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan akses masyarakat terhadap PKBM melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor.	Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan akses masyarakat terhadap PKBM melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor.	Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan akses masyarakat terhadap PKBM melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor.	Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif.
	Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional.	Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional.	Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional.	Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional.	Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional.
	Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, terutama di daerah terluar dan perbatasan.	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, terutama di daerah terluar dan perbatasan.	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, terutama di daerah terluar dan perbatasan.	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, terutama di daerah terluar dan perbatasan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, terutama di daerah terluar dan perbatasan.

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
	Pemerataan akses literasi dasar untuk semua kelompok masyarakat.	Peningkatan kualitas literasi dan minat baca masyarakat melalui pelatihan guru, kader, komunitas, kampanye literasi.	Peningkatan ekosistem literasi sebagai fondasi daya saing daerah melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan ekosistem literasi sebagai fondasi daya saing daerah melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Pembiasaan budaya literasi di masyarakat melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.
	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta tenaga medis dan tenaga kesehatan.	Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta tenaga medis dan tenaga kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta tenaga medis dan tenaga kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta tenaga medis dan tenaga kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta tenaga medis dan tenaga kesehatan.
	Pemenuhan sarana dasar untuk mencapai akses aman dalam upaya PHBS serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan sarana dasar untuk mencapai akses aman serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan sarana dasar untuk mencapai akses aman serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan sarana dasar untuk mencapai akses aman serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan sarana dasar untuk mencapai akses aman serta peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.
	Sosialisasi dan advokasi pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pendekatan budaya dan pemberian imunisasi rutin lengkap dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Sosialisasi dan advokasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pendekatan budaya dan pemberian imunisasi rutin lengkap dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Sosialisasi dan advokasi, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pendekatan budaya dan pemberian imunisasi rutin lengkap dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Sosialisasi dan advokasi, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pendekatan budaya dan pemberian imunisasi rutin lengkap dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Sosialisasi dan advokasi, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pendekatan budaya dan pemberian imunisasi rutin lengkap dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.
	Analisis situasi dan identifikasi masalah, pelaksanaan intervensi spesifik serta intervensi sensitif dalam rangka penuntasan dan pencegahan stunting melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, serta pemantauan dalam rangka penuntasan dan pencegahan stunting melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, serta pemantauan dalam rangka penuntasan dan pencegahan stunting melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan intervensi spesifik, intervensi sensitif, pemantauan, serta penguatan sistem dalam rangka penuntasan dan pencegahan stunting melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan intervensi spesifik, intervensi sensitif, pemantauan, serta penguatan sistem dalam rangka penuntasan dan pencegahan stunting melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
	Pemutakhiran data, identifikasi sasaran penerima, dan pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial bagi kelompok rentan.	Pemutakhiran data penerima, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial bagi kelompok rentan, serta pengembangan program perlindungan sosial.	Pemutakhiran data penerima, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial bagi kelompok rentan, serta pengembangan program perlindungan sosial.	Pemutakhiran data penerima, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial bagi kelompok rentan, serta pengembangan program perlindungan sosial.	Pemenuhan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
	Sosialisasi, edukasi, dan peningkatan akses informasi pelayanan ketahanan keluarga dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Sosialisasi, edukasi, dan peningkatan akses informasi pelayanan ketahanan keluarga dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Sosialisasi, edukasi, dan peningkatan akses informasi pelayanan ketahanan keluarga dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Sosialisasi, edukasi, dan pemerataan akses informasi pelayanan ketahanan keluarga dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.
	Pemenuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam rangka ketahanan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan lansia dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Pemenuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam rangka perlindungan hak anak, perempuan, dan lansia serta pemberdayaan perempuan dan lansia dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Pemerataan sarana prasarana dan peningkatan sumber daya manusia, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam rangka perlindungan hak anak, perempuan, dan lansia serta pemberdayaan perempuan dan lansia dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Pemerataan sarana prasarana dan peningkatan sumber daya manusia, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam rangka perlindungan hak anak, perempuan, dan lansia serta pemberdayaan perempuan dan lansia dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Pemenuhan dan perlindungan hak anak, perempuan, dan lansia serta pemberdayaan perempuan dan lansia.
	Identifikasi potensi pemuda dan sumber daya manusia dalam olahraga prestasi dan rekreasi, serta pemenuhan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Pengembangan kualitas pemuda dan sumber daya manusia dalam olahraga prestasi dan rekreasi, serta pemenuhan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan kualitas pemuda dan sumber daya manusia dalam olahraga prestasi dan rekreasi, serta sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan kualitas pemuda, sumber daya manusia dalam olahraga prestasi, dan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan, serta pembudayaan olahraga rekreasi dengan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan daya saing pemuda dan keolahragaan serta pembudayaan olahraga rekreasi.

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila		
	Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat	Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat	Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat	Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat	Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat
MISI 2 Meningkakan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan	Peningkatan Kebijakan dan Infrastruktur, Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi serta Penyelerasan dengan Perkembangan Global	Peningkatan Kebijakan dan Infrastruktur, Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi serta Penyelerasan dengan Perkembangan Global	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung, Kemitraan, Budaya Riset dan Inovasi serta Penyelerasan dengan Perkembangan Global	Peningkatan Implementasi kebijakan berbasis riset melalui Peningkatan Keterpaduan, Kapasitas Kelembagaan, Kemitraan, Budaya Riset Inovasi serta Penyelerasan dengan Perkembangan Global	Peningkatan Implementasi kebijakan berbasis riset melalui Peningkatan Keterpaduan, Kapasitas Kelembagaan, Kemitraan, Budaya Riset Inovasi serta Penyelerasan dengan Perkembangan Global
	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan melalui penguatan database dan pemetaan lahan berkelanjutan	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan melalui penguatan database, peningkatan daya dukung lahan dan air, peningkatan benih unggulan	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan melalui penguatan database, peningkatan daya dukung lahan dan air, peningkatan benih unggulan	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan melalui penguatan database, peningkatan daya dukung lahan dan air, peningkatan benih unggulan	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan melalui peningkatan daya dukung lahan dan air, peningkatan benih unggulan
	Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan)	Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas	Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas	Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas	Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
		infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan)	infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan)	infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan)	infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan)
	Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian	Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian	Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian	Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian	Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian
	Pengembangan investasi berbasis sektor pertanian, energi terbarukan, pariwisata, perindustrian dan potensi sektor lainnya dan optimalisasi pemanfaatan asset daerah	Pengembangan investasi berbasis sektor pertanian, energi terbarukan, pariwisata, perindustrian dan potensi sektor lainnya melalui peningkatan promosi profile investasi, dan inisiasi pembentukan konsorsium investasi	Pengembangan investasi berbasis sektor pertanian, energi terbarukan, pariwisata, perindustrian dan potensi sektor lainnya dan optimalisasi pemanfaatan asset daerah	Pengembangan investasi berbasis sektor pertanian, energi terbarukan, pariwisata, perindustrian dan potensi sektor lainnya dan optimalisasi pemanfaatan asset daerah	Pengembangan investasi berbasis sektor pertanian, energi terbarukan, pariwisata, perindustrian dan potensi sektor lainnya dan optimalisasi pemanfaatan asset daerah
	Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha melalui penguatan database potensi investasi dan regulasi	Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha melalui penguatan database, regulasi, SDM dan kelembagaan investasi, potensi investasi serta forum investasi daerah	Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha melalui penguatan database, regulasi, SDM dan kelembagaan investasi, potensi investasi serta forum investasi daerah	Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha melalui penguatan database, regulasi, SDM dan kelembagaan investasi, potensi investasi serta forum investasi daerah	Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha melalui penguatan database, regulasi, SDM dan kelembagaan investasi, potensi investasi serta forum investasi daerah
	Penataan sumber daya pariwisata dan Pemenuhan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam	Penataan sumber daya pariwisata dan Pemenuhan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam	Penataan sumber daya pariwisata dan Pemenuhan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam	Penataan sumber daya pariwisata dan Pemenuhan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam	Penataan sumber daya pariwisata dan Pemenuhan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam
	Penguatan ekosistem bisnis pelaku usaha mikro, koperasi, IKM dan pelaku ekonomi	Penguatan ekosistem bisnis pelaku usaha mikro, koperasi, IKM dan pelaku ekonomi	Peningkatan ekosistem bisnis pelaku usaha mikro, koperasi, IKM dan pelaku ekonomi	Peningkatan ekosistem bisnis pelaku usaha mikro, koperasi, IKM dan pelaku ekonomi	Pemantapan ekosistem bisnis pelaku usaha mikro, koperasi, IKM dan pelaku ekonomi

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
	kreatif melalui perluasan ekosistem digital, perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi kreasi dan inkubator bisnis serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan modal bergulir	kreatif melalui perluasan ekosistem digital, perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi kreasi dan inkubator bisnis serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan modal bergulir	kreatif melalui perluasan ekosistem digital, perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi kreasi dan inkubator bisnis serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan modal bergulir	kreatif melalui perluasan ekosistem digital, perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi kreasi dan inkubator bisnis serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan modal bergulir	kreatif melalui perluasan ekosistem digital, perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi kreasi dan inkubator bisnis serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan modal bergulir
	Pengembangan sentra IKM berbasis potensi lokal	Pengembangan sentra IKM berbasis potensi lokal	Peningkatan sentra IKM berbasis potensi lokal	Peningkatan sentra IKM berbasis potensi lokal	Pemantapan sentra IKM berbasis potensi lokal
	Pengembangan hilirisasi produk pertanian berdasarkan klaster unggulan	Pengembangan hilirisasi produk pertanian berdasarkan klaster unggulan	Peningkatan hilirisasi produk pertanian berdasarkan klaster unggulan	Peningkatan hilirisasi produk pertanian berdasarkan klaster unggulan	Pemantapan hilirisasi produk pertanian berdasarkan klaster unggulan
	Perencanaan peningkatan sarana perdagangan dan sistem logistik produk pangan dan pertanian	Perencanaan peningkatan sarana perdagangan dan sistem logistik produk pangan dan pertanian	Perencanaan dan pengembangan tata kelola sistem logistik produk pangan dan pertanian	Peningkatan sarana dan pra sarana serta pengembangan tata kelola sistem logistik produk pangan dan pertanian	Sistem logistik pangan dan pertanian daerah menuju terintegrasi dan berkelanjutan
	Pemetaan potensi industri berbasis ramah lingkungan	Pemetaan potensi industri berbasis ramah lingkungan	Pengembangan potensi industri berbasis ramah lingkungan	Peningkatan potensi industri berbasis ramah lingkungan	Peningkatan potensi industri berbasis ramah lingkungan
	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, dan kewirausahaan melalui penguatan BLK (Balai Latihan Kerja) sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan terpadu	Penguatan tata Kelola BLK (Balai Latihan Kerja) sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan terpadu dalam rangka meningkatkan kompetensi Angkatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Penguatan tata Kelola BLK (Balai Latihan Kerja) sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan terpadu dalam rangka meningkatkan kompetensi Angkatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Peningkatan sarana dan prasarana BLK (Balai Latihan Kerja) sebagai pusat pengembangan kompetensi terintegrasi dan terpadu dalam rangka meningkatkan kompetensi Angkatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	BLK (Balai Latihan Kerja) sebagai pusat pengembangan kompetensi terintegrasi dan terpadu dalam rangka meningkatkan kompetensi Angkatan kerja dan produktifitas tenaga kerja sesuai perkembangan zaman
	Perencanaan strategi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan	Ekspansi Kerjasama pemerintah dan multipihak dalam penciptaan lapangan	Ekspansi Kerjasama pemerintah dan multipihak dalam penciptaan lapangan	Ekspansi Kerjasama pemerintah dan multipihak dalam penciptaan lapangan	Ekspansi Kerjasama pemerintah dan multipihak dalam penciptaan lapangan

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
	akses kesempatan kerja bagi tenaga kerja bersertifikat	kerja dan meningkatkan akses bagi tenaga kerja bersertifikasi dan non bersertifikasi	kerja dan meningkatkan akses bagi tenaga kerja bersertifikasi dan non bersertifikasi	kerja dan meningkatkan akses bagi tenaga kerja bersertifikasi dan non bersertifikasi	kerja dan meningkatkan akses bagi tenaga kerja bersertifikasi dan non bersertifikasi
	Penguatan tata kelola industri dan pariwisata halal serta berkelanjutan	Penguatan tata kelola industri dan pariwisata halal serta berkelanjutan (perencanaan, regulasi, SDM) serta SDM pelaku industri dan pariwisata	Penguatan tata kelola industri dan pariwisata halal serta berkelanjutan (regulasi, SDM, kelembagaan, sertifikasi, promosi, branding) serta SDM pelaku industri dan pariwisata	Peningkatan kualitas tata kelola dan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata halal serta berkelanjutan (SDM, kelembagaan, sertifikasi, promosi, branding) serta SDM pelaku industri dan pariwisata	Peningkatan kualitas tata kelola dan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata halal serta berkelanjutan (SDM, kelembagaan, sertifikasi, promosi, branding) serta SDM pelaku industri dan pariwisata
	Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat desa	Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat desa	Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat desa	Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat desa	Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat desa
	Pengembangan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Pengembangan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Pengembangan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Pengembangan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Pengembangan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
	Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas	Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan melalui penguatan kelembagaan ketahanan dan keamanan pangan penguatan simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas	Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan melalui kelembagaan ketahanan dan keamanan pangan penguatan simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas yang kolaboratif dan terpadu	Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan melalui penguatan kelembagaan ketahanan dan keamanan pangan penguatan simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas yang kolaboratif dan terpadu	Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan melalui penguatan kelembagaan ketahanan dan keamanan pangan penguatan simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas yang kolaboratif dan terpadu

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
MISI 3 Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Pengembangan sistem meritokrasi dalam manajemen ASN melalui pemanfaatan sistem informasi.	Pengembangan dan pelaksanaan sistem meritokrasi dalam manajemen ASN melalui pemanfaatan sistem informasi.	Pelaksanaan sistem meritokrasi dalam manajemen ASN melalui pemanfaatan sistem informasi.	Pelaksanaan dan peningkatan sistem meritokrasi dalam manajemen ASN melalui pemanfaatan sistem informasi.	Peningkatan dan penguatan sistem meritokrasi dalam manajemen ASN melalui pemanfaatan sistem informasi.
	Peningkatan tata kelola kearsipan berbasis digital melalui perumusan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan kearsipan digital.	Peningkatan tata kelola kearsipan berbasis digital melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta pengembangan kearsipan digital.	Peningkatan tata kelola kearsipan berbasis digital melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penerapan kearsipan digital.	Peningkatan tata kelola kearsipan berbasis digital melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penerapan kearsipan digital.	Peningkatan tata kelola kearsipan berbasis digital.
	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi, sumber daya manusia, dan peningkatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi, sumber daya manusia, dan peningkatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi, sumber daya manusia, dan peningkatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi, sumber daya manusia, dan peningkatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi, sumber daya manusia, dan peningkatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	Peningkatan kapabilitas APIP dan transformasi sistem pengawasan digital.	Peningkatan kapabilitas APIP dan pengembangan sistem pengawasan digital.	Peningkatan kapabilitas APIP dan penerapan sistem pengawasan digital.	Peningkatan kapabilitas APIP dan penerapan sistem pengawasan digital.	Peningkatan sistem pengendalian pembangunan daerah berbasis digital yang efektif dan efisien.
	Penataan dan Restrukturisasi BUMD	Penataan dan Restrukturisasi BUMD	Penataan dan Restrukturisasi BUMD	Penataan dan Restrukturisasi BUMD	Penataan dan Restrukturisasi BUMD
	Penguatan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi serta tata kelola pemerintahan.	Penguatan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi serta tata kelola pemerintahan.	Penguatan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi serta tata kelola pemerintahan.	Penguatan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi serta tata kelola pemerintahan.	Penguatan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi serta tata kelola pemerintahan.

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
	Peningkatan sumber daya manusia aparatur kecamatan, sarana prasarana, dan mekanisme pelayanan publik serta peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal.	Peningkatan sumber daya manusia aparatur kecamatan, sarana prasarana pelayanan publik, dan membangun pelayanan berbasis digital serta peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal.	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital serta peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor.	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital serta penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor.	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat serta penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
	Penguatan sinergitas perencanaan dan penganggaran dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah, prioritas provinsi dan prioritas nasional	Penguatan sinergitas perencanaan dan penganggaran dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah, prioritas provinsi dan prioritas nasional	Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan optimalisasi tata kelola pengelolaan pendapatan daerah	Pengembangan pembiayaan yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah serta optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD),	Pengembangan pembiayaan yang inovatif, peningkatan kualitas belanja daerah serta optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD),
MISI 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi	Sinkronisasi dan integrasi data perencanaan (e-planning) dan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi sebagai dasar tunggal untuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan.	Sinkronisasi dan integrasi data perencanaan (e-planning) dan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi sebagai dasar tunggal untuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan.	Sinkronisasi dan integrasi data perencanaan (e-planning) dan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi sebagai dasar tunggal untuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan.	Memantapkan model kolaborasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi *(One Data, One Policy)* untuk pelayanan publik optimal yang menjadi acuan pada Nasional, Provinsi dan Daerah.	Memantapkan model kolaborasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi *(One Data, One Policy)* untuk pelayanan publik optimal yang menjadi acuan pada Nasional, Provinsi dan Daerah.

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
	Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas
	Mempertahankan kualitas kondisi jalan sebagai sarana aksesibiltas dan konektivitas masyarakat	Mempertahankan kualitas kondisi jalan sebagai sarana aksesibiltas dan konektivitas masyarakat	Mempertahankan kualitas kondisi jalan sebagai sarana aksesibiltas dan konektivitas masyarakat	Mempertahankan kualitas kondisi jalan sebagai sarana aksesibiltas dan konektivitas masyarakat	Mempertahankan kualitas kondisi jalan sebagai sarana aksesibiltas dan konektivitas masyarakat
	Menyusun dan menyelaraskan kerangka kebijakan serta peta jalan (*roadmap*) pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dengan kebijakan tingkat provinsi dan nasional.	Pengembangan infrastruktur pendukung dan integrasi moda transportasi umum untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi masyarakat.	Melakukan penguatan sistem tata kelola dan implementasi teknologi dalam mendukung operasional layanan transportasi publik yang lebih terpadu.	Optimalisasi sistem tata kelola dan implementasi teknologi dalam mendukung operasional layanan transportasi publik yang lebih terpadu.	Memantapkan model pengelolaan dan *sustainability* sistem transportasi publik massal yang terintegrasi dan berkelanjutan.
	Menyusun peta jalan dan kerangka kebijakan terpadu untuk pengelolaan sumber daya air yang melibatkan multipihak dan selaras dengan rencana induk Nasional, Provinsi dan Daerah.	Pengembangan infrastruktur air baku, distribusi air minum, dan irigasi yang terkelola secara terintegrasi serta partisipatif yang melibatkan multipihak.	Melakukan penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem air secara partisipatif dalam peningkatan kapasitas pengelola.	Melaksanakan ekspansi cakupan layanan air bersih dan Optimalisasi sistem irigasi dengan didukung teknologi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan sektor pertanian.	Peningkatan sistem pengelolaan air yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kemandirian pendanaan.
	Menyusun peta kebutuhan dan kerangka kebijakan terpadu untuk penyediaan hunian layak yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan kebijakan nasional.	Melakukan penguatan kelembagaan dan skema pembiayaan inovatif untuk mempercepat penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.	Penyediaan hunian layak vertikal yang terjangkau bagi masyarakat pada kawasan kumuh	Memantapkan sistem penyediaan hunian layak yang berkelanjutan melalui kolaborasi multipihak dan pendekatan berbasis komunitas.	Pengawasan dan evaluasi sistem penyediaan hunian layak yang berkelanjutan melalui kolaborasi multipihak dan pendekatan berbasis komunitas.
	Melakukan kajian komprehensif dan penyusunan	Penyediaan infrastruktur sanitasi dan persampahan	Mendorong pengembangan kapasitas pengelola	Melakukan konsolidasi kelembagaan serta	Menciptakan keberlanjutan program serta memperkuat

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
	masterplan terintegrasi yang mencakup analisis gap infrastruktur sanitasi dan persampahan, pemetaan kapasitas SDM, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan dan pembangunan.	yang berkualitas disertai dengan program edukasi intensif dan pembentukan kelembagaan masyarakat.	persampahan melalui kemitraan strategis dengan akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing ekonomi.	memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terpadu, digitalisasi data pengelolaan sanitasi dan sampah.	sistem monitoring dan evaluasi terpadu, digitalisasi data pengelolaan sanitasi dan sampah.
	Menyusun peta jalan dan strategi terpadu untuk pengelolaan sistem drainase yang berwawasan lingkungan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.	Revitalisasi dan normalisasi saluran drainase serta edukasi masyarakat tentang drainase ramah lingkungan.	Memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola drainase dan mengembangkan sistem pemeliharaan berkelanjutan berbasis masyarakat.	Memantapkan sistem pengelolaan drainase yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan melalui kolaborasi multipihak dan pendanaan berkelanjutan.	Memantapkan sistem pengelolaan drainase yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan melalui kolaborasi multipihak dan pendanaan berkelanjutan.
	Penyusunan strategi konservasi partisipatif dengan pendekatan kearifan lokal dan potensi jasa lingkungan masing-masing wilayah.	Pengembangan konservasi lingkungan dan pengelolaan air berbasis ekosistem berbasisjasa lingkungan dan kearifan lokal masyarakat.	Memperkuat jejaring kolaborasi antar-desa dan dengan pihak swasta untuk perluasan praktik konservasi lahan dan air yang inovatif	Penciptaan nilai ekonomi jasa lingkungan melalui pengembangan ekowisata dalam pengelolaan lahan dan air.	Penguatan kelembagaan kolaborasi dalam monitoring dan evaluasi dalam pengembangan konsertvasi lahan dan air berbsis jasa lingkungan dan kearifan lokal
	Penyusunan peta kerentanan dan rencana aksi ketahanan air terintegrasi untuk kawasan rawan bencana hidrometeorologi.	Pembangunan infrastruktur pengelolaan air didasarkan pada kawasan prioritas rawan & rentan terhadap hidrometerologi dan/atau ketersediaan air.	Pengembangan sistem peringatan dini dan teknologi adaptif untuk mengoptimalkan ketersediaan air di kawasan rentan bencana.	Penerapan sistem kertahanan pengelolaan air terpadu yang mengintegrasikan pendekatan ekologis, sosial, dan ekonomi di kawasan rawan bencana.	Penerapan sistem kertahanan pengelolaan air terpadu yang mengintegrasikan pendekatan ekologis, sosial, dan ekonomi di kawasan rawan bencana.
	Penyusunan peta kebutuhan dan strategi pencapaian target RTH publik dan privat yang ideal berbasis analisis spasial.	Pembangunan dan revitalisasi RTH publik serta insentif bagi pengembangan RTH privat untuk akses masyarakat yang lebih baik.	Pengembangan RTH multifungsi yang terintegrasi dengan nilai estetika, ekologi, dan ekonomi untuk meningkatkan daya tarik wilayah dengan melibatkan	Pemenuhan proporsi RTH ideal yang berkontribusi terhadap kualitas hidup dan lingkungan dengan sistem manajemen dan pemeliharaan RTH berkelanjutan dengan	Pemenuhan proporsi RTH ideal yang berkontribusi terhadap kualitas hidup dan lingkungan dengan sistem manajemen dan pemeliharaan RTH berkelanjutan dengan

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
			masyarakat dan swasta secara berkelanjutan.	melibatkan peran serta masyarakat dan swasta.	melibatkan peran serta masyarakat dan swasta.
	Penyusunan peta jalan dan strategi aksi pengurangan emisi karbon melalui identifikasi sumber emisi dan potensi reduksi di sektor infrastruktur.	Penerapan standar konstruksi hijau dan efisiensi energi dalam pembangunan serta revitalisasi infrastruktur publik.	Pengembangan infrastruktur rendah karbon dan integrasi energi terbarukan dan implementasi sistem pemantauan emisi karbon berbasis teknologi.	Pemantapan capaian pengurangan emisi karbon dan tata kelola rendah karbon berdasarkan implementasi sistem pemantauan emisi karbon berbasis teknologi yang terintegrasi.	Pemantapan capaian pengurangan emisi karbon dan tata kelola rendah karbon berdasarkan implementasi sistem pemantauan emisi karbon berbasis teknologi yang terintegrasi.
	Penyusunan peta jalan *(roadmap)* dan strategi pengelolaan limbah non-domestik melalui identifikasi sumber limbah dan potensi pengelolaan.	Pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah non-domestik dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan limbah.	Pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah non-domestik dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan limbah.	Pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah non-domestik dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan limbah.	Pengembangan infrastruktur pengelolaan limbah non-domestik dan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan limbah.
	Pemetaan partisipatif DAS mikro dan identifikasi kelembagaan lokal yang berpotensi untuk pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas.	Penguatan kelembagaan lingkungan DAS mikro dengan memberdayakan masyarakat lokal yang dapat berkontribusi pada ketahanan air secara berkelanjutan.	Penguatan kelembagaan lingkungan DAS mikro dengan memberdayakan masyarakat lokal yang dapat berkontribusi pada ketahanan air secara berkelanjutan.	Penguatan kelembagaan lingkungan DAS mikro dengan memberdayakan masyarakat lokal yang dapat berkontribusi pada ketahanan air secara berkelanjutan.	Penguatan kelembagaan lingkungan DAS mikro dengan memberdayakan masyarakat lokal yang dapat berkontribusi pada ketahanan air secara berkelanjutan.
	Penyusunan basis data spasial terintegrasi yang memetakan kerentanan bencana, daya dukung lingkungan, dan dampak perubahan iklim untuk perencanaan tata ruang.	Penyelarasan regulasi tata ruang terhadap kerentanan bencana, daya dukung lingkungan, dan dampak perubahan iklim.	Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi tata ruang berbasis teknologi digital untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan daya dukung lingkungan.	Pemantapan model tata ruang adaptif yang responsif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana serta mendukung ketahanan wilayah jangka panjang.	Pemantapan model tata ruang adaptif yang responsif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana serta mendukung ketahanan wilayah jangka panjang.
	Penyusunan standar teknis dan NSPK terkait infrastruktur tahan bencana serta	Peningkatan implementasi dan sosialisasi infrastruktur sesuai standar dan NSPK berketahanan bencana dan	Peningkatan implementasi infrastruktur sesuai standar ketahanan bencana dan perubahan iklim didukung	Peningkatan implementasi infrastruktur sesuai standar ketahanan bencana dan perubahan iklim didukung	Peningkatan implementasi infrastruktur sesuai standar ketahanan bencana dan perubahan iklim didukung

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
	peningkatan kapasitas pengawasan.	perubahan iklim serta peningkatan kapasitas pengawasan.	dengan pengintegrasian teknologi monitoring dan *early warning system* dalam responsivitas terhadap bencana.	dengan pengintegrasian teknologi monitoring dan *early warning system* dalam responsivitas terhadap bencana.	dengan pengintegrasian teknologi monitoring dan *early warning system* dalam responsivitas terhadap bencana.
	Penyusunan materi edukasi dan pelatihan resiliensi bencana yang terstandarisasi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Pelaksanaan upaya promotif dan simulasi penanganan bencana di wilayah rawan bencana dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.	Penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas dan teknologi untuk mendukung upaya preventif/mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.	Pemantapan model edukasi dan promotif resiliensi bencana yang berkelanjutan melalui kolaborasi multipihak dan media digital, disertai dengan penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas dan teknologi guna mendukung upaya preventif /mitigasi serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana	Pemantapan model edukasi dan promotif resiliensi bencana yang berkelanjutan melalui kolaborasi multipihak dan media digital, disertai dengan penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas dan teknologi guna mendukung upaya preventif /mitigasi serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana
	Perencanaan pengembangan infrastruktur perkotaan dan peningkatan kapasitas SDM lokal untuk mendukung pelayanan publik berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Metropolitan Bandung Raya	Pembangunan infrastruktur dasar perkotaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan serta penguatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah.	Pengembangan kawasan perkotaan berbasis *innovation hub* dan ekonomi kreatif yang memanfaatkan potensi lokal serta terintegrasi dengan jaringan Metropolitan Bandung Raya.	Pemantapan kawasan perkotaan berbasis *innovation hub* dan ekonomi kreatif yang memanfaatkan potensi lokal serta terintegrasi dengan jaringan metropolitan, disertai penerapan *smart city* dan *green infrastructure* dalam pengelolaan kawasan perkotaan untuk mendukung keberlanjutan dan ketahanan lingkungan yang terintegrasi dengan jaringan Metropolitan Bandung Raya	Pemantapan kawasan perkotaan berbasis *innovation hub* dan ekonomi kreatif yang memanfaatkan potensi lokal serta terintegrasi dengan jaringan metropolitan, disertai penerapan *smart city* dan *green infrastructure* dalam pengelolaan kawasan perkotaan untuk mendukung keberlanjutan dan ketahanan lingkungan yang terintegrasi dengan jaringan Metropolitan Bandung Raya

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
	Pendataan dan identifikasi kekayaan budaya lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal serta penyusunan regulasi dan kelembagaan.	Pelestarian kekayaan budaya lokal serta penerapan praktik pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal di komunitas.	Pengembangan pelestarian lingkungan melaui ekonomi kreatif dengan nilai-nilai tradisi.	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang kolaboratif dan inklusif serta penguatan regulasi dan kelembagaan	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang kolaboratif dan inklusif serta penguatan regulasi dan kelembagaan
	Perencanaan dan identifikasi dalam perkembangan kawasan berbasis potensi unggulan Kewilayahan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, dan Kawasan Strategis	Pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antarwilayah dan peningkatan akses layanan publik di kawasan prioritas.	Memperkuat infrastruktur perkotaan dan perdesaan dengan penerapan tata kelola terpadu yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan.	Pemantapan infrastruktur perkotaan dan perdesaan dengan penerapan tata kelola yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan.	Mewujudkan infrastruktur perkotaan dan perdesaan dengan penerapan tata kelola yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan.
	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kerja sama antar desa dalam pengembangan kewilayahan kawasan perdesaan.	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kerja sama antar desa dalam pengembangan kewilayahan kawasan perdesaan.	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kerja sama antar desa dalam pengembangan kewilayahan kawasan perdesaan.	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kerja sama antar desa dalam pengembangan kewilayahan kawasan perdesaan.	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kerja sama antar desa dalam pengembangan kewilayahan kawasan perdesaan.
	Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemetaan potensi desa, serta pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan potensi.	Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan potensi dengan mendorong penciptaan inovasi.	Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa secara inovatif berdasarkan potensi melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa secara inovatif berdasarkan potensi melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan kualitas pemerintahan desa, potensi desa, serta pemberdayaan masyarakat dan desa melalui pendekatan inovasi dan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.
MISI 5 Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemetaan wilayah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, pemenuhan sarana prasarana dasar dan kebutuhan PPNS, peningkatan kapasitas SDM, serta	Pemenuhan sarana prasarana dasar dan kebutuhan PPNS, peningkatan kapasitas SDM, transformasi sistem pelaporan pengaduan masyarakat secara digital, serta peningkatan	Pemenuhan sarana prasarana dasar, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem pelaporan pengaduan masyarakat secara digital, serta peningkatan kolaborasi	Pemenuhan sarana prasarana dasar, peningkatan kapasitas SDM, penerapan sistem pelaporan pengaduan masyarakat secara digital, serta peningkatan kolaborasi	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat secara efektif dan berkeadilan.

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN				
	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	PEMERATAAN KUALITAS SDM DAN INFRASTRUKTUR DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PENINGKATAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG LEBIH BEDAS, MAJU DAN BERKELANJUTAN
	peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat.	kolaborasi lintas sektor dalam penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat.	lintas sektor dalam penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat.	lintas sektor dalam penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat.	
	Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat, pembangunan ruang partisipasi aktif, penguatan pengawasan dan kontrol sosial, peningkatan transparansi lembaga dan kolaborasi multi pihak.	Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat, pembangunan ruang partisipasi aktif, penguatan pengawasan dan kontrol sosial, peningkatan transparansi lembaga dan kolaborasi multi pihak.	Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat, pembangunan ruang partisipasi aktif, penguatan pengawasan dan kontrol sosial, peningkatan transparansi lembaga dan kolaborasi multi pihak.	Peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat, pembangunan ruang partisipasi aktif, penguatan pengawasan dan kontrol sosial, peningkatan transparansi lembaga dan kolaborasi multi pihak.	Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan peningkatan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi.

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

3.3.3Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Perumusan strategi menggunakan hasil dari pemetaan potensi, permasalahan, peluang dan ancaman didasarkan pada isu-isu strategis yang terdapat di Kabupaten Bandung yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Isu-isu ini berupa potensi dan permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal wilayah. Dalam berupaya mengatasi tantangan ke depan, dalam merumuskan strategi juga di dasari oleh peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung. Penyusunan strategi berdasarkan isu strategis dan peluang yang dimiliki dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien, yakni menjawab permasalahan yang ada dengan mengoptimalkan potensi dan peluang yang dimiliki.

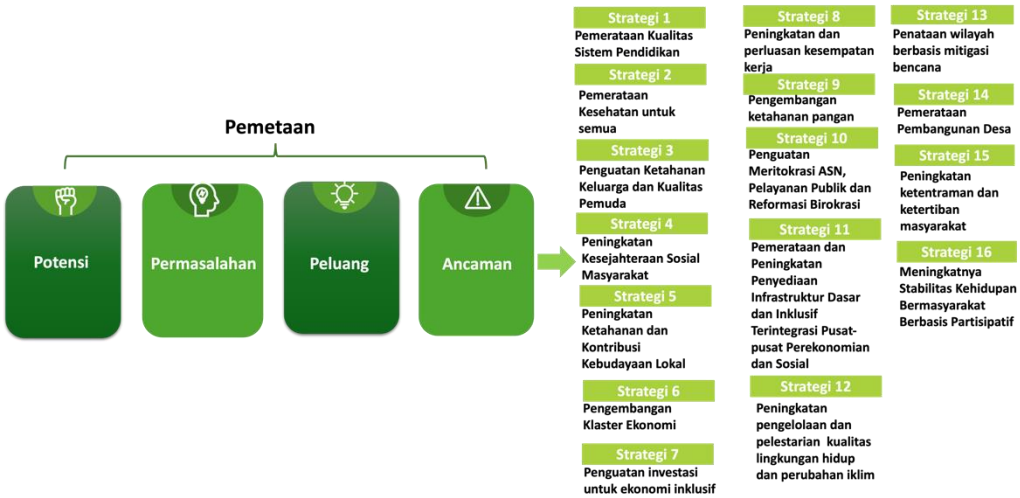

Gambar 3.9.Kerangka Penyusunan Strategi
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Masing-masing strategi yang sudah dihasilkan tersebut kemudian perlu disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan. Untuk menyesuaikan strategi dengan visi dan misi yang telah disusun, maka hasil dari pemetaan yang sudah dilakukan kemudian disandingkan dengan masing-masing tujuan dan sasaran pembangunan lalu kemudian diturunkan menjadi strategi pembangunan dan penjabarannya diturunkan kedalam arah kebijakan. Setelah melalui proses penilaian dirumuskan strategi terpilih seperti yang termuat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
VISI: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas			
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak			
T.1 Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing			
S.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Pemerataan dan Peningkatan wajib belajar 13 tahun dan penguatan kurikulum berbasis talenta, karakter, literasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor	ST.1.1 Pemerataan Kualitas Sistem Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pembinaan Perpustakaan 3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 4. Program Pengembangan Kurikulum 5. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 7. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas, serta aman bencana		
	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif		
	Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum Nasional		
	Pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan		
	Penguatan budaya literasi		
S.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan, peningkatan, dan pemerataan sarana prasarana pelayanan kesehatan, tenaga	ST.1.2 Pemerataan Kesehatan untuk Semua	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
	medis, dan tenaga kesehatan		3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Perluasan upaya promotif, preventif, dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)		
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat, pendekatan budaya, dan peningkatan imunisasi rutin lengkap		
	Penyiapan dan peningkatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting*		
S.1.3 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga serta Pengembagan Potensi Pemuda dan Keolahragaan	Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga	ST.1.3 Penguatan Ketahanan Keluarga dan Kualitas Pemuda	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 3. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 4. Program Perlindungan Khusus Anak 5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 7. Program Perlindungan Perempuan 8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 9. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 11. Program Pengendalian Penduduk 12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 13. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Pemenuhan dan perlindungan hak anak, perempuan, dan lansia serta pemberdayaan perempuan dan lansia		
	Peningkatan daya saing pemuda dan keolahragaan serta pembudayaan olahraga rekreasi		
S1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Penataan dan pemenuhan sistem perlindungan sosial melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial bagi kelompok rentan	ST.1.4 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
			7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
S1.5 Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila	ST.1.5 Peningkatan Ketahanan dan Kontribusi Kebudayaan Lokal	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 4. Program Pembinaan Sejarah 5. Program Pengelolaan Permuseuman 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat		
Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan			
T.2 Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan			
S.2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan inklusif	ST.2.1 Pengembangan Klaster Ekonomi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 5. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 7. Program Pengembangan Ekspor 8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 9. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 12. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 13. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 14. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 15. Program Penyuluhan Pertanian 16. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 17. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 18. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 19. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan		
	Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian		
	Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan)		
	Penataan sumber daya pariwisata dan Pemenuhan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam		
	Penguatan ekosistem bisnis pelaku usaha mikro, koperasi IKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui		

TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
	perluasan ekosistem digital, perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi kreasi dan inkubator bisnis serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan modal bergulir		20. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 21. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 22. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 23. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 24. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 25. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 26. Program Pengelolaan Energi Baru 27. Program Pemasaran Pariwisata 28. Program Perizinan Usaha Pertanian 29. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 30. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 31. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 32. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 33. Program Pengelolaaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Peningkatan sarana perdagangan dan sistem logistik produk strategis		
	Transisi IKM berbasis ramah lingkungan		
	Peningkatan produktivitas dan daya saing industri dan pariwisata halal serta berkelanjutan		
	Pengembangan Koperasi Desa dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat desa		
S.2.2 Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Penguatan tata kelola investasi dan kemudahan berusaha berbasis potensi lokal	ST.2.2 Penguatan Investasi Untuk Ekonomi Inklusif	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Pelayanan Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Program Promosi Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan investasi berbasis sektor pertanian, energi terbarukan, pariwisata, perindustrian dan potensi sektor lainnya		
S.2.3 Menurunnya Tingkat Pengangguran	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, dan kewirausahaan melalui penguatan BLK (Balai Latihan Kerja) sebagai pusat pengembangan kompetensi terintegrasi dan terpadu	ST.2.3 Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Program Penempatan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5. Program perencanaan tenaga kerja 6. Program Pembangunan kawasan transmigrasi
	Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan akses kesempatan kerja		
S.2.4 Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar	ST.2.4 Pengembangan Ketahanan Pangan	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
	ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas		2. Program Penanganan Kerawanan Pangan 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan IKM dan sentra industri berbasis potensi lokal serta hilirisasi produk pertanian		
	Pengembangan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG)		
Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel			
T.3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
S.3.1 Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Penguatan sistem meritokrasi dalam manajemen ASN.	ST.3.1 Penguatan Meritokrasi ASN, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Program Riset dan Inovasi Daerah 4. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 5. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 8. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 9. Program Penyelenggaraan Pengawasan 10. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi 11. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 12. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 13. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 14. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 15. Program Pengelolaan Arsip 16. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 17. Program Perekonomian Dan Pembangunan 18. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan tata kelola satu data (*big data*) melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan		
	Peningkatan infrastruktur IT untuk layanan pemerintahan dengan skema pembiayaan yang inovatif		
	Peningkatan tata kelola kearsipan berbasis digital		
	Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital		
	Penguatan kelembagaan dan regulasi serta keterbukaan informasi berdasarkan riset dan inovasi daerah		
	Peningkatan pengendalian		

TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
	pembangunan daerah melalui penerapan Manajemen Risiko, Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Peningkatan Kapabilitas APIP		19. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 20. Program Pendaftaran Penduduk 21. Program Pencatatan Sipil 22. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 23. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 24. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 25. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 26. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 27. Program Perizinan Penggunaan Arsip 28. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 29. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 30. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Penataan dan Restrukturisasi BUMD		
	Penguatan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi serta tata kelola pemerintahan		
	Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan optimalisasi tata kelola pengelolaan pendapatan daerah		
	Pengembangan Pembiayaan yang Inovatif, Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Serta Optimalisasi Pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD)		
	Penguatan Sinergitas Perencanaan, Penganggaran dan penataan aset daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional		
	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal		
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi			

TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
T.4 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan			
S.4.1 Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif	Peningkatan rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas	ST.4.1 Pemerataan dan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Inklusif, Terintegrasi Pusat-pusat Perekonomian dan Sosial	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Penyelenggaraan Jalan 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 7. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 10. Program Pengembangan Perumahan 11. Program Kawasan Permukiman 12. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 13. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 14. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 15. Program Pengelolaan Pelayaran 16. Program Pengelolaan Perkeretaapian 17. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 18. Program Pengembangan Permukiman 19. Program Penataan Bangunan Gedung 20. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 21. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 22. Program Penatagunaan Tanah
	Sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah		
	Mempertahankan kualitas kondisi jalan sebagai sarana aksesibiltas dan konektivitas masyarakat		
	Pengembangan dan penerapan tata Kelola aksesibilitas Masyarakat dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal		
	Peningkatan ketersediaan dan kualitas air melalui pengembangan infrastruktur air baku, distribusi air minum, dan irigasi yang terkelola secara terintegrasi serta partisipatif		
	Peningkatan akses hunian layak dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah melalui penyediaan hunian vertikal dan penataan kawasan kumuh		
	Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat serta peningkatan upaya edukasi dalam percepatan bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), pengurangan dan pengelolaan sampah terpadu berbasis		

TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
	masyarakat mandiri melalui pengembangan ekonomi sirkular		
	Peningkatan pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan		
S.4.2 Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang Berkelanjutan	Pengembangan konservasi lahan dan air berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal	ST.4.2 Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Kualitas Lingkungan Hidup	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 3. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 4. Program Pengelolaan Persampahan 5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	Pengembangan konservasi lahan dan air berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal		
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air		
	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat yang ideal		
	Pemenuhan upaya pengurangan emisi karbon melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mendukung efisiensi energi		
	Pengembangan sistem pengelolaan limbah non-domestik		
	Penguatan kelembagaan dan pengelolaan berbasis DAS mikro		
	Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
	Implementasi Penataan ruang		1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan

TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
S.4.3 Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana	dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	ST.4.3 Penataan Wilayah Berbasis Mitigasi Bencana	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 2. Program Penanggulangan Bencana 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan implementasi infrastruktur sesuai standar pengawasan dan ketahanan bencana		
	Peningkatan upaya promotif, preventif dan edukasi tentang resiliensi bencana		
S.4.4 Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan berbasis potensi lokal, inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, sebagai bagian Metropolitan Bandung Raya	ST.4.4 Pemerataan Pembangunan Desa	1. Program Penataan Desa 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 4. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan Kewilayahan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, dan Kawasan Strategis		
	Peningkatan kualitas pemerintahan desa, potensi desa, serta pemberdayaan masyarakat dan desa melalui pendekatan inovasi dan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.		
Misi 5: Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum			
T.5 Terselenggaranya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum			
S.5.1 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda dan perkada, serta perlindungan masyarakat secara efektif dan berkeadilan.	ST.5.1 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
S.5.2 Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan peran masyarakat dan peningkatan komitmen multi pihak dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan peningkatan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	ST.5.2 Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat Berbasis Partisipatif	1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

3.3.4Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Perumusan program prioritas pembangunan daerah didasarkan pada agenda pembangunan Kabupaten Bandung untuk memenuhi sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun. Berikut merupakan tabel Program Prioritas Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029:

Tabel 3.8 Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
Visi: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas						
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak	Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia		
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		Indeks Pendidikan		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 2. Persentase Perpustakaan yang Dibina	Program Pembinaan Perpustakaan	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		1. Indeks Kesehatan 2. Prevalensi Stunting pada Balita		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Persentase Ketercapaian Cakupan SPM Kesehatan 2. Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 3. Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun 4. Persentase Fasilitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Kesehatan Sesuai Standar 5. Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan 6. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 7. Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi 8. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar 9. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)		
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1. Persentase tenaga kesehatan yang bermutu 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga serta Pengembangan Potensi Pemuda dan Keolahragaan		1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Indeks Pembangunan Pemuda		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) 2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 3. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern 4. Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)			
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan, dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Perlindungan Khusus Anak	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	1. Rasio Wirausaha Pemuda 2. Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	1. Angka partisipasi Masyarakat Olahraga (APMO) 2. Persentase Atlet yang Masuk Pelatda atau Pelatnas	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Tingkat Kemiskinan		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3. Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				4. Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi 3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin 4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 2. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat Kesiap Siagaannya 3. Persentase Korban Bencana	Program Penanganan Bencana	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				yang mendapat Layanan Pemulihan Sosial		
		Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda		Indeks pembangunan Kebudayaan		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan	Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan			1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Gini Rasio		
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan		Kontribusi sekotr unggulan terhadap PDRB (Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)		
			Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omset Pelaku UMKM	Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya Produktivitas Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Peningkatan Sentra Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Indeks Pertumbuhan Izin Industri di Kabupaten Bandung	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Non Migas	Program Pengembangan Ekspor	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Perkebunan 4. Peningkatan Produksi Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan jadi LP2B 2. Persentase Lahan Pertanian yang difasilitasi pembangunan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya pengendalian	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Strategis (PHMS) 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Keaktifan Kelompok Petani	Program Penyuluhan Pertanian	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah Sentra/Kampung Berbasis Perikanan yang Memenuhi Standar	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah		*Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*		
			Terciptanya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel	Nilai IKM Bidang Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Terselesaikannya Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Menurunnya Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya tenaga kerja yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Program Hubungan Industrial	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan		1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Skor PPh Konsumsi		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase AKE	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi		
			Meningkatnya Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN	Program Kepegawaian Daerah	
			Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi	1. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			daerah dalam pembangunan 2. Meningkatnya riset yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah 3. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	2. Persentase Riset yang tersedia dalam dokumen Perencanaan 3. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia, bidang perekonomian dan SDA, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			1. Meningkatnya Tata Kelola Akutansi dan Pelaporan 2. Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan 3. Meningkatnya Tata kelola Anggaran	1. Persentase laporan keuangan tepat waktu 2.a. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.b. Persentase Penurunan SILPA 3.a. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				3.b. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan dan Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan 3. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital 4. Nilai IKM 5. Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	1. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1 2. Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Nilai Hasil Penilaian Mandiri PK APIP 2. Nilai Maturitas Hasil Penilaian Mandiri SPIP PD 3. Persentase Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Dinas Kominfo 2. Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Layanan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	1. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 2. Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Penurunan Serangan Cyber	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	1. Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan 2. Tingkat Capaian Skor LPPD	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	1. Tingkat Kematangan UKPBJ 2. Persentase Bahan Perumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	
			Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manjamen Risiko Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Terfasilitasinya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 4. Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
			Meningkatnya kulitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kulitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Program Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan			1. Indeks Pengembangan Wilayah 2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca		
		Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif		Indeks Kualitas Infrastruktur		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Rasio konektivitas kabupaten/kota 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal 3. Persentase Kebijakan Pengembangan Bidang Transportasi Yang dimanfaatkan 4. Peresentase Layanan Perizinan sektor transportasi yang terfasilitasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas 3. Kapasitas Air Baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	1. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) 2. Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengolahan Air Limbah	1. Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi layak 2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Volume Sampah yang terkelola	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Penataan Ruang		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	
			Tersedianya rumah layak huni	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
		Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang Berkelanjutan		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Udara 2. Indeks Kualitas Air 3. Indeks Kualitas Lahan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang ditertibkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Meningkatnya kapasitas lembaga dan/atau SDM bidang lingkungan hidup	Persentase lembaga dan/atau SDM lingkungan hidup yang telah meningkat kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Program Pengelolaan Persampahan	
		Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran		1. Indeks Risiko Bencanna\ 2. Tingkat Kerawanan Kebakaran		
			1. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 2. Meningkatnya	1.a. Persentase jumlah korban penyelamatan dalam dan evakuasi korban kebakaran dalm waktu 15 menit 1.b. Persentase layanan penyelamatan evakuasi non kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
			layanan pencegahan kebakaran	2.a. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan Rawan Kebakaran 2.b. Persentase sistem proteksi kebakaran bangunan gedung		
			1. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana 3. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2. Persentase Penanganan Pasca Bencana 3.a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 3.b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan		Persentase Desa Mandiri		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa 2. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum			Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum		
			1. Meningkatnya kapasitas SDM PPNS 2. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat 4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	1. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya 2. Persentase Penyelenggaraan Trantibum 3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 4. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)		1. Persentase Konflik Sosial yang Ditangani 2. Persentase Masyarakat yang Menerapkan Hasil Pembinaan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi		
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Dalam mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dan rumusan indikator kinerja sasaran. Perumusan prioritas pembangunan daerah dibentuk dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung yang telah dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran serta disesuaikan dengan janji Bupati yang disampaikan pada masa kampanye. Terdapat 13 prioritas pembangunan daerah selama periode masa jabatan lima tahun sesuai dengan periode berlakunya RPJMD Kabupaten Bandung. Prioritas pembangunan daerah tersebut dituangkan ke dalam beberapa program prioritas dan program pendukung. Berikut merupakan rincian program prioritas dan pendukung pada masing-masing prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bandung:

◊ Prioritas Pembangunan Daerah Misi 1 "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak" di antaranya:

1. **Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berakhlak, Berdaya Saing** diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan perkembangan dunia usaha dan industri, serta penguatan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral dan integritas. Prioritas pembangunan ini meliputi pengembangan kompetensi teknis dan *soft skills* melalui pendidikan bermutu serta pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, disertai penanaman nilai-nilai moral dan etika agar setiap individu bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menghormati sesama. Di samping itu, program pemberdayaan perempuan dirancang untuk membuka kesempatan yang setara dalam akses pelatihan dan pengembangan karier, sementara perlindungan anak dipastikan melalui layanan pendampingan dan pendidikan karakter sejak usia dini. Dengan sinergi antara peningkatan keahlian, penguatan akhlak, dan kebijakan inklusif, diharapkan dapat tercipta generasi yang tidak hanya kompeten secara profesional tetapi juga bermartabat dan mampu bersaing di tingkat regional maupun global. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 1 sasaran 1.1.

Tabel 3.9Program Prioritas Sasaran 1.1

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		2	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

2. **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat,** prioritas pembangunan ini menitikberatkan pada pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh kelompok masyarakat melalui peningkatan akses ke layanan kesehatan primer, perbaikan gizi, serta program pencegahan dan penanggulangan penyakit. Selain itu, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai di setiap wilayah, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan edukasi kesehatan berbasis masyarakat menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Salah satu isu kesehatan yang menjadi perhatian utama di Kabupaten Bandung adalah *stunting,* mengingat dampak jangka panjangnya terhadap kualitas SDM serta keterkaitannya yang erat dengan akses layanan kesehatan dasar dan pemenuhan gizi pada masa awal kehidupan.

   Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi program-program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan percepatan penurunan *stunting*. Seluruhnya dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi, selaras dengan arahan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Stranas P3S). Komitmen tersebut diperkuat dengan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 463/Kep.146-DP2KBP3A/2023.

   Kebijakan dan program tersebut diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kesehatan daerah yang inklusif, berbasis siklus hidup, dan mendorong terciptanya generasi sehat serta produktif. Dengan masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan optimal, akan terbentuk generasi yang lebih produktif, mampu berkompetisi secara global, dan memiliki akhlak baik berkat pola hidup sehat yang terinternalisasi sejak dini. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 1 sasaran 1.2.

Tabel 3.10Program Prioritas Sasaran 1.2

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

3. **Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**, prioritas pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan budaya melalui penguatan jaminan sosial, pemberdayaan kelompok rentan, serta peningkatan kualitas layanan kesejahteraan. Upaya ini mencakup fasilitasi akses terhadap bantuan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan rentan, serta penguatan nilai-nilai solidaritas sosial dan gotong royong. Program prioritas yang telah dirumuskan juga berupaya untuk pengentasan dan penghapusan kemiskinan di Kabupaten Bandung, salah satunya melalui Sekolah Rakyat. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, mengamanatkan bahwa Bupati turut mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyiapan lahan, perizinan dan penyiapan guru serta tenaga pendidik. Hal tersebut sudah terakomodir dalam program prioritas Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada misi 1 sasaran 1.4. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 1 sasaran 1.3 dan 1.4.

Tabel 3.11Program Prioritas Sasaran 1.3

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga serta Pengembangan Potensi Pemuda dan Keolahragaan	1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		3	Program Pengarusutamaan Gender Dan	Program Pengelolaan	

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
			Pemberdayaan Perempuan	Sistem Data Gender dan Anak	
		4	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
				Program Pengendalian Penduduk	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

Tabel 3.12Program Prioritas Sasaran 1.4

Tujuan	Sasaran	No	Program Prioritas	Program Pendukung	Perangkat Daerah
Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1	Program Rehabilitasi Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
		2	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
		3	Program Pemberdayaan Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		4	Program Penanganan Bencana		

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

4. **Penguatan Kebudayaan Lokal**, upaya ini diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat, khususnya budaya Sunda, sebagai landasan pembentukan karakter yang berakhlak mulia dan berjati diri. Penguatan budaya lokal dilakukan melalui pelestarian tradisi, seni, bahasa daerah, serta pengembangan ekosistem kebudayaan yang melibatkan partisipasi aktif generasi muda dan perempuan. Dengan menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya lokal diharapkan tercipta identitas masyarakat yang kuat, toleran, serta mampu bersaing secara positif di tengah arus globalisasi tanpa kehilangan akar budaya. Berikut program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 1 sasaran 1.5.

Tabel 3.13Program Prioritas Sasaran 1.5

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing	Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda	1	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan
		2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pembinaan Sejarah	
				Program Pengelolaan Permuseuman	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

◊ Prioritas Pembangunan Daerah Misi 2 “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan” di antaranya:

1. **Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan**, bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah Kabupaten Bandung secara optimal melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, industri kreatif dan UMKM. Langkah ini mencakup peningkatan kualitas produk, efisiensi proses produksi, akses pasar, serta inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan memperkuat sektor unggulan, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata, peluang kerja yang luas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 2 sasaran 2.1 dan sasaran 2.2.

Tabel 3.14Program Prioritas Sasaran 2.1

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	Program Pengembangan UMKM	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
		3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		5	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
		7	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
		8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		9	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		
		10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		11	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
		12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
		13	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		14	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		15	Program Penyuluhan Pertanian		

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		16	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		17	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

Tabel 3.15Program Prioritas dan Program Pendukung Sasaran 2.2

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

3. **Perluasan Lapangan Kerja**, upaya ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan wirausaha lokal, serta meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif juga didorong untuk berkembang sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan demikian, perluasan lapangan kerja tidak hanya membantu menurunkan angka pengangguran, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 2 sasaran 2.3

Tabel 3.16Program Prioritas Sasaran 2.3

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		3	Program Hubungan Industrial	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

4. **Peningkatan Ketahanan Pangan**, Prioritas ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pangan yang mandiri dan tangguh dengan diarahkan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan pangan bagi seluruh masyarakat, terutama melalui penguatan sektor pertanian lokal. Strategi yang dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas lahan, pemanfaatan teknologi pertanian modern, pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan lokal, serta perbaikan sistem distribusi pangan. Dengan mengutamakan produksi lokal yang berkelanjutan, daerah tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis pangan. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 2 sasaran 2.4.

Tabel 3.17Program Prioritas Sasaran 2.4

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		3	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

◊ Prioritas Pembangunan Daerah Misi 3 “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel” di antaranya:

1. **Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik**, berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi, adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat. Penguatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur menjadi kunci untuk memastikan pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, transformasi tata kelola pemerintahan juga

mencakup modernisasi sistem administrasi melalui pemanfaatan teknologi digital, perbaikan prosedur birokrasi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Langkah ini diarahkan agar tercipta pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, serta mendorong partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.

Juga berupaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan berorientasi pada kepuasan pengguna. Hal ini mencakup perbaikan sistem dan prosedur pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 3 sasaran 3.1.

Tabel 3.18 Program Prioritas Sasaran 3.1

TUJUAN	SSARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Program Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		3	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		4	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
		5	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
		6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		
		8	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pendapatan Daerah
		9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat Daerah
		10	Program Perumusan Kebijakan		

TUJUAN	SSARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
			Pendampingan Dan Asistensi		
		11	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
		13	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
		14	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		
		15	Program Pengelolaan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		16	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	Sekretariat Daerah
		17	Program Perekonomian Dan Pembangunan		
		18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		19	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD
		20	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		21	Program Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		22	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
		23	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan

TUJUAN	SSARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		24	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
		25	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

◊ Prioritas Pembangunan Daerah Misi 4 "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi" di antaranya:

1. **Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar**, berupaya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap air bersih dan air minum, sanitasi layak, pengolahan sampah, jaringan jalan dan penerangan jalan yang memadai, drainase, serta fasilitas energi dan perumahan yang layak huni. Penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas akan memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain melalui perencanaan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pemerataan wilayah, peningkatan sinergi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Selain itu, pembangunan infrastruktur prioritas di wilayah Kabupaten Bandung dapat memanfaatkan sumber pendanaan dengan mekanisme pembiayaan lainnya (pembiayaan kreatif). Pendekatan partisipatif juga didorong agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 4 sasaran 4.1

Tabel 3.19Program Prioritas Sasaran 4.1

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
				Program Pengelolaan Perkeretaapian	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		2	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Penataan Bangunan Gedung	

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		
		7	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
		9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		
		10	Program Pengembangan Perumahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		11	Program Kawasan Permukiman	Program Penatagunaan Tanah	
		12	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		13	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
		14	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

2. **Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Kualitas Lingkungan Hidup**, dengan fokus pada terwujudnya lingkungan hidup yang sehat, lestari, dan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan. Upaya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penguatan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ekosistem. Selain itu, langkah konkret yang akan dilakukan meliputi rehabilitasi lahan kritis, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan

sampah terpadu, dan pelibatan berbagai pihak dalam konservasi keanekaragaman hayati, sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga untuk generasi sekarang dan mendatang. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 4 sasaran 4.2.

Tabel 3.20Program Prioritas Sasaran 4.2

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang Berkelanjutan	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
		3	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
		4	Program Pengelolaan Persampahan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

3. **Penataan Infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana**, merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk membangun wilayah yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi risiko bencana, baik alam maupun non-alam. Prioritas ini sejalan dengan misi daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, di mana pembangunan fisik tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan kerentanan

wilayah terhadap bencana. Untuk mencapainya, pemerintah daerah akan mendorong penguatan sistem perencanaan tata ruang yang berbasis risiko bencana, pembangunan infrastruktur yang adaptif dan tahan bencana, serta integrasi teknologi peringatan dini. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, edukasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa seluruh pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan aman bagi masyarakat. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 4 sasaran 4.3.

Tabel 3.21Program Prioritas Sasaran 4.3

TUJUAN	SASARAAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran	1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		2	Program Penanggulangan Bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

4. **Peningkatan Pembangunan Desa**, merupakan prioritas strategis dalam rangka memperkuat fondasi pembangunan daerah dari tingkat paling dasar. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pemerataan hasil pembangunan, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan secara berkelanjutan. Sejalan dengan misi meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang terintegrasi, pembangunan desa difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta penguatan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan serta penguatan cakupan pelayanan Posyandu berbasis 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Mengacu Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Bupati diamanatkan untuk mendukung program tersebut melalui sosialisasi dan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengganggaran daerah, serta koordinasi. Sementara itu, perluasan cakupan Posyandu menjadi Posyandu 6 SPM mencakup layanan di enam bidang utama: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum/linmas), serta sosial. Penguatan peran Posyandu sebagai pusat pelayanan publik berbasis masyarakat diharapkan mendorong

transformasi pelayanan dari yang semula bersifat sektoral menjadi lebih integratif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan warga desa.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk mendorong sinergi program lintas sektor guna memastikan integrasi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah daerah juga akan memperluas partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan, agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Selain itu, komitmen penguatan tata kelola juga dilakukan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik. Upaya ini juga diperkuat dengan langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat adat, agar mereka menjadi bagian yang aktif dan berdaya dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 4 sasaran 4.4.

Tabel 3.22Program Prioritas Sasaran 4.4

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	1	Program Penataan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

◊ Prioritas Pembangunan Daerah Misi 5 “Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum” di antaranya:

1. **Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Harmonisasi Kehidupan Bermasyarakat**, berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, dan harmonis, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman serta mendukung kelancaran pembangunan di berbagai sektor. Untuk mencapainya, pemerintah daerah akan mendorong penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani ketertiban umum, memperkuat koordinasi antarinstansi dan unsur masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran hukum, toleransi, dan nilai-nilai kebersamaan melalui pendidikan masyarakat, penyuluhan, dan forum komunikasi sosial. Di samping itu, peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga

keamanan lingkungan dan menyelesaikan konflik secara damai menjadi bagian penting dari strategi menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Berikut program-program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 5 sasaran 5.1.

Tabel 3.23Program Prioritas Sasaran 5.1 dan 5.2

TUJUAN	SASARAN	NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Terselenggaranya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
		4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	

Sumber: Hasil Diolah Bapperida, 2025

Program yang telah dirancang ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih terarah, termasuk target spesifik dan lokasi pelaksanaannya, guna mencapai indikator sasaran yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Setiap program pembangunan daerah memiliki definisi tersendiri yang sesuai dengan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaannya. Untuk memperjelas hubungan antara program pembangunan daerah dengan program prioritas pemerintah daerah yang telah disusun berdasarkan nomenklatur yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah.

3.4 Perencanaan Tematik Kabupaten Bandung

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029, yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran hingga menetapkan prioritas pembangunan, dan juga menggunakan pendekatan tematik dengan mengusung

beberapa tematik pembangunan. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi tersebut juga mengamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah memperhatikan orientasi substansi melalui penerapan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Pengusungan Konsep Tematik dimaksudkan sebagai bentuk percepatan pembangunan menuju Visi Kabupaten Bandung 2025 –2029 yang Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan. Sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung, berbagai tematik pembangunan dikonsepkan dengan menggunakan model "Gunungan (Kayon)". Gunungan memiliki makna filosofis dan religius serta merepresentasikan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia yang hidup di dalamnya. Gunungan melambangkan penyatuan antara dunia dan akhirat, serta menyiratkan tujuan hidup manusia untuk mencapai kesempurnaan. "Gunungan" juga melambangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalani hidup.

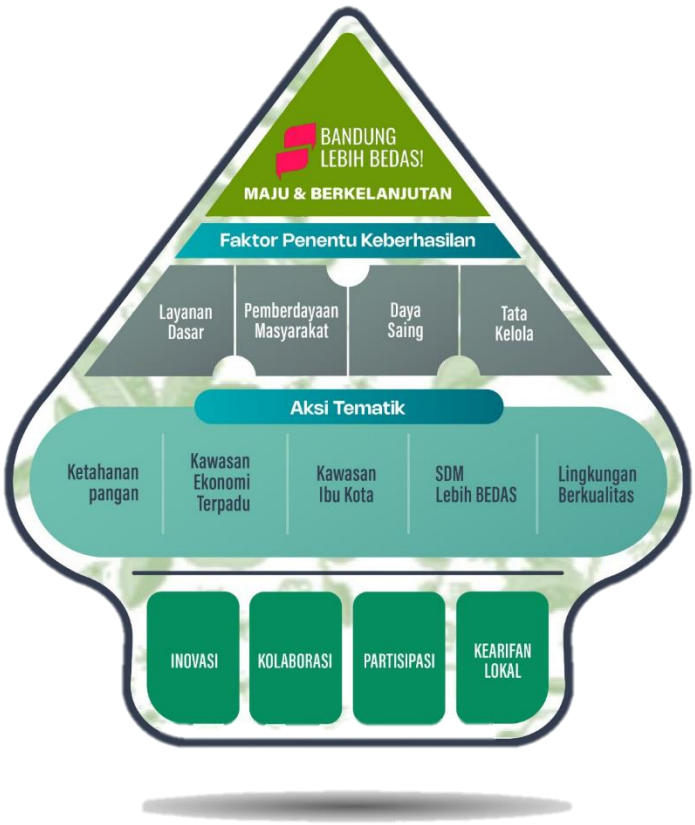

Gambar 3.10. Struktur Pembangunan Tematik Model "Gunungan"
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Tabel 3.24 Struktur Pembangunan Tematik Model "Gunungan"

PUNCAK	**Hijau Keemasan melambangkan kejayaan, kesuksesan, prestasi tertinggi dan kemuliaan, sebagai Visi dari Kabupaten Bandung yaitu "Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan".**

LERENG (1)	**Abu-abu** memiliki berbagai filosofi dan arti melambangkan netralitas, keseimbangan, ketenangan, dan keseriusan. Hal ini merepresentasikan elemen-elemen kunci yang menjadi penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
LERENG (2)	**Hijau Tosca** memiliki makna yang kaya dan sering dikaitkan dengan ketenangan, keseimbangan emosional, dan kreativitas. Warna ini melambangkan aksi tematik RPJMD (2025-2029) yakni, Peningkatan Ketahanan Pangan, Ekonomi Hijau, Pengembangan Kawasan Ibukota Kabupaten Bandung, SDM Bedas, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
KAKI GUNUNG	**Hijau Tua** secara umum melambangkan pertumbuhan, kesuburan, dan kesehatan, serta sering dikaitkan dengan alam, kesegaran, dan ketenangan. Warna ini merupakan fondasi dasar pembangunan tematik yang menopang keseluruhan struktur pencapaian tujuan, dengan menekankan pada inovasi, kolaborasi, partisipasi, dan kearifan lokal.
LINGKUNGAN	**Garis Gunungan dan Background Kina** menggambarkan lingkungan dengan berbagai elemennya terdiri dari lingkungan fisik (tanah, air dan udara), biologis (tumbuhan, hewan dan manusia) dan lingkungan sosial termasuk di dalamnya unsur pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan lainnya.

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Tematik pembangunan yang dikonsepkan dengan pendekatan konsep ”Gunungan” terdiri dari beberapa aksi tematik sebagai berikut:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan
b. Kawasan Ekonomi Terpadu
c. Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung
d. SDM Lebih Bedas
e. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas

3.4.1Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan kemandirian ekonomi. Kabupaten Bandung yang memiliki sumber daya alam melimpah serta keragaman komoditas pangan, memegang peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat regional maupun nasional. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, seperti dampak perubahan iklim, konversi lahan pertanian, ketidakstabilan harga, serta keterbatasan pada sistem distribusi dan infrastruktur pasca panen.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung menginisiasi pendekatan Simpul Pangan Lokal Berbasis Komunitas yang mengintegrasikan proses produksi, distribusi, dan konsumsi ke dalam suatu ekosistem pangan yang inklusif serta

berkelanjutan. Pendekatan ini diperkuat melalui pemanfaatan inovasi teknologi, penerapan prinsip ekonomi sirkular, serta pengembangan warung sehat di tingkat desa. Momentum penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2025–2029 juga dimanfaatkan secara strategis untuk memperkuat kebijakan ketahanan pangan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan, pengembangan infrastruktur, perluasan kemitraan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Konsep pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung pun dirancang berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

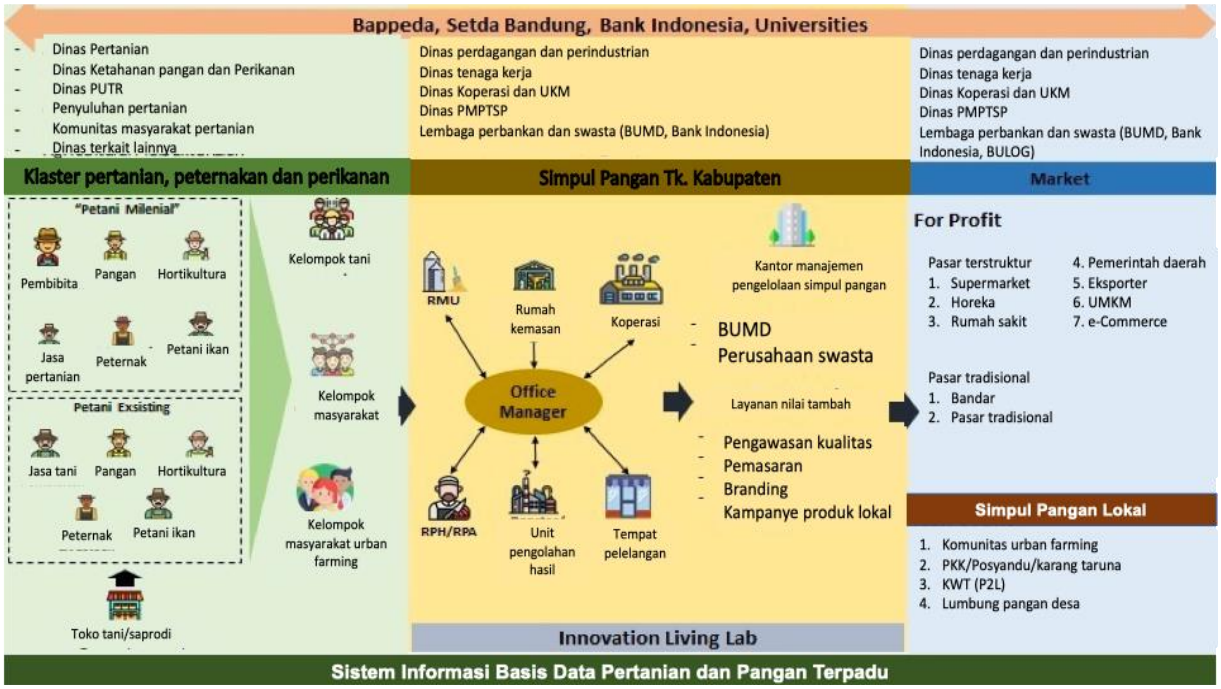

Gambar 3.11.Konsep Pembangunan Ketahanan Pangan Melalui Simpul Pangan Lokal
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Gambar di atas menunjukkan adanya sistem terintegrasi berbasis data yang mencakup seluruh rantai nilai pertanian dan pangan di tingkat kabupaten, mulai dari proses produksi hingga distribusi ke pasar. Sistem ini melibatkan keterlibatan petani milenial maupun petani yang telah lama beroperasi di berbagai subsektor, dengan dukungan dari kelompok tani, praktik urban farming, serta penyedia sarana produksi. Seluruh elemen ini terhubung dalam satu jaringan melalui Simpul Pangan Kabupaten. Simpul ini dikelola oleh kantor manajemen yang mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk BUMD, koperasi, sektor swasta, serta unit pengolahan dan distribusi. Selain itu, simpul tersebut juga menyediakan layanan tambahan seperti promosi produk dan pengawasan mutu untuk meningkatkan nilai tambah dalam sistem pangan daerah.

Selain mendistribusikan ke pasar modern (supermarket, HOREKA, UMKM, *e-commerce*) dan tradisional, sistem ini diperkuat oleh simpul pangan lokal berbasis komunitas (PKK, KWT, lumbung desa) yang didukung oleh lintas sektor seperti, pemerintah daerah, lembaga keuangan, pendidikan, dan riset. Tujuan utamanya adalah membangun ketahanan pangan

berbasis komunitas melalui efisiensi, inovasi, dan keterhubungan antar pelaku. Dimana penekanan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung berfokus pada **"Simpul Pangan Lokal Berbasis Komunitas"** yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.12. Bisnis Simpul Pangan Lokal Berbasis Komunitas
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Gambar tersebut menggambarkan konsep ketahanan pangan lokal melalui model Simpul Pangan Lokal Berbasis Komunitas yang bertujuan membangun sistem pangan mandiri, berkelanjutan, dan berbasis kekuatan masyarakat desa. Pendekatan inti-plasma menjadi dasar, di mana koperasi atau BUMDes sebagai inti didukung oleh masyarakat sekitar sebagai plasma, menciptakan keterlibatan sosial dan ekonomi dalam rantai pasok pangan. Model ini juga mengintegrasikan pengelolaan sampah domestik menjadi bagian dari ekosistem pangan sirkular, mendukung pertanian ramah lingkungan. Diversifikasi produk dilakukan melalui pengolahan pasca panen, sedangkan distribusi pangan mengandalkan warung sehat dan platform e-logistik untuk menjangkau konsumen kota dan desa. Seluruh sistem didukung lembaga pendidikan, riset, keuangan, serta komunitas, membentuk ekosistem inovatif yang mendorong ketahanan pangan lokal berbasis komunitas secara efisien dan berkelanjutan.

Adapun jika di gambarkan konsep pembangunan ketahanan pangan berdasarkan peta wilayah di Kabupaten Bandung maka dapat digambarkan sebagai berikut:

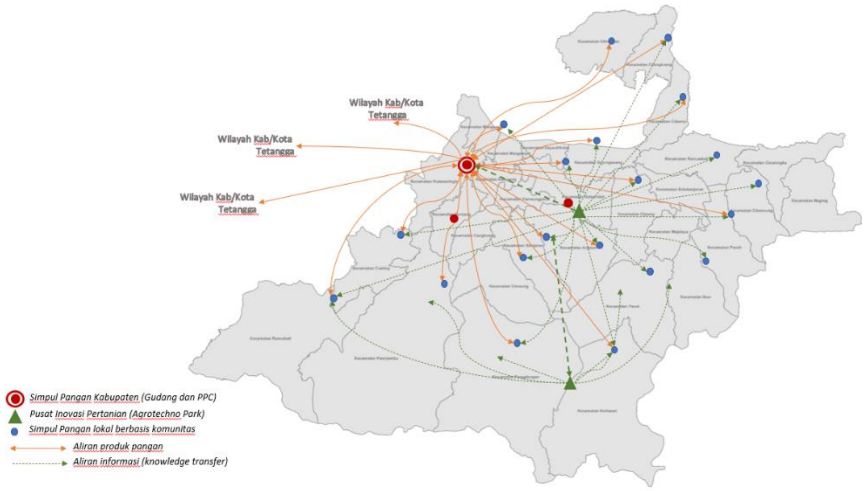

Gambar 3.13. Keruangan Simpul Pangan Regional Dan Kemitraan Dengan Simpul Pangan Lokal

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Gambar ini menunjukkan peta distribusi dan konektivitas Simpul Pangan Kabupaten sebagai pusat logistik yang mengumpulkan dan mendistribusikan produk pangan dari berbagai simpul pangan lokal berbasis komunitas di kecamatan, yang kemudian disalurkan ke wilayah kota/kabupaten tetangga. Selain arus produk pangan, terdapat juga pusat inovasi pertanian atau Agrotechno Park yang mendukung peningkatan kapasitas produksi melalui aliran informasi dan transfer pengetahuan kepada simpul lokal dan kabupaten. Keterkaitan antara simpul pangan lokal, pusat inovasi, dan simpul kabupaten menciptakan jaringan sistem pangan yang terintegrasi, adaptif, dan berfokus pada ketahanan pangan dengan penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan, sehingga membangun ekosistem pangan daerah yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Adapun pembagian peran konsep pembangunan ketahan pangan lokal di Kabupaten Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:

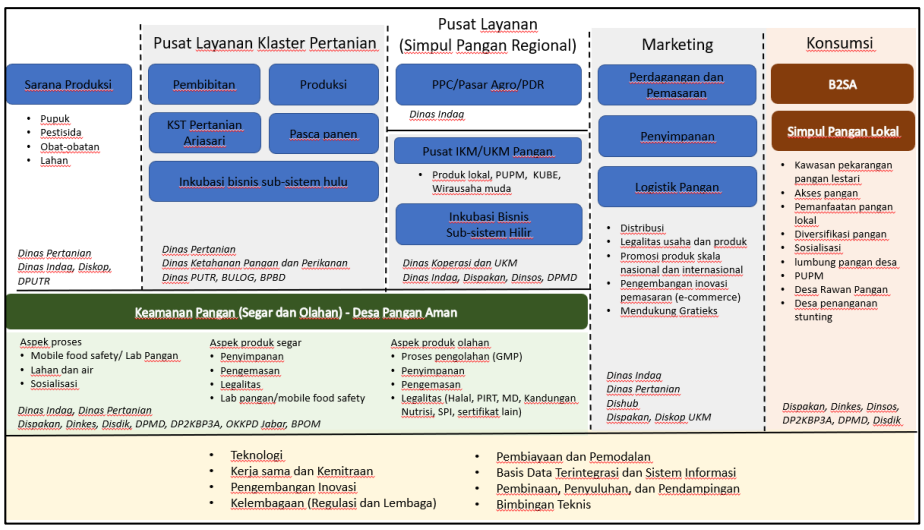

Gambar 3.14. Konsep Pembagian Peran Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

3.4.2 Kawasan Ekonomi Terpadu

Pengembangan perekonomian Kabupaten Bandung dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Bandung tahun 2025-2029 diwujudkan melalui pendekatan klaster ekonomi. Klaster adalah sekelompok perusahaan dan lembaga terkait yang saling terhubung secara geografis dan berdekatan dalam suatu bidang tertentu, yang terhubung oleh kesamaan dan saling melengkapi (Porter, 1998, 2000). Konsentrasi ini mendorong lingkungan unik yang menggerakkan inovasi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif (Cortright, 2006).

Dalam dokumen Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang diterbitkan Bapperida Kabupaten Bandung pada tahun 2021, identifikasi potensi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa terdapat klaster pertanian di bagian Selatan, klaster industri dan perdagangan di bagian Tengah, serta *hotspots* pariwisata di bagian Selatan. Dari klaster dan *hotspots* tersebut kemudian dirumuskan dua ekosistem ekonomi yaitu ekosistem perkotaan dengan sektor unggulan industri dan perdagangan yang terdapat di bagian Tengah, serta ekosistem pedesaan dengan sektor unggulan pertanian dan pariwisata yang terdapat di bagian Selatan, Timur, dan Utara. Dalam merangkai hubungan antara ekosistem perkotaan dan pedesaan, dikembangkan simpul kegiatan ekonomi. Simpul ini terdapat di tingkat lokal, yang menghubungkan potensi sektor ekonomi seperti pertanian dan pariwisata melalui agrowisata, pertanian dan industri makanan, serta industri dan perdagangan. Sedangkan pada tingkat Kabupaten, dikembangkan simpul inovasi dan simpul pangan yang merupakan pusat koleksi dan distribusi, serta pusat pengembangan produk ekonomi lokal Kabupaten Bandung. Simpul-simpul ini juga didukung oleh kawasan penelitian dan pengembangan perekonomian seperti kawasan sains dan teknologi pertanian Arjasari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dirumuskan konsep pembagian wilayah pengembangan ekonomi yang terdiri dari 7 (tujuh) wilayah dengan sebaran sebagai berikut:

1. Wilayah Pengembangan Ekonomi I

   Wilayah ini 12 kecamatan yaitu Kecamatan Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Baleendah, Pameungpeuk, Katapang, Kutawaringin, Soreang, Cangkuang, Banjaran dan Arjasari. Wilayah I ini memiliki karakteristik umum ekonomi perkotaan. Potensi utama di Wilayah I adalah sektor industri menengah besar dan perdagangan yaitu pasar. Wilayah I juga merupakan kawasan yang relatif terbangun dengan aksesibilitas baik, dan kepadatan penduduk tinggi;
2. Wilayah Pengembangan Ekonomi II

   Wilayah II terdiri dari 3 Kecamatan, dengan karakteristik umum ekonomi pedesaan yaitu Kecamatan Ciwidey, Rancabali, dan Pasirjambu. Potensi utama Wilayah II

adalah sektor pariwisata yang termasuk *hotspots*, serta potensi pertanian yang termasuk klaster. Secara geografis Wilayah II merupakan wilayah dataran tinggi;

3. Wilayah Pengembangan Ekonomi III

   Wilayah III terdiri dari 3 Kecamatan, dengan karakteristik umum ekonomi pedesaan yaitu Kecamatan Cimaung, Pangalengan, dan Kertasari. Potensi utama di Wilayah III adalah sektor pertanian yang teridentifikasi sebagai klaster. Tantangan utama di Wilayah III adalah terbatasnya akses transportasi;

4. Wilayah Pengembangan Ekonomi IV

   Wilayah IV terdiri dari 6 Kecamatan, dengan karakteristik gabungan ekonomi pedesaan dan semi perkotaan, yang meliputi Kecamatan Solokanjeruk, Majalaya, Cipayar, Paseh, Pacet dan Ibun. Potensi utama Wilayah IV adalah sektor pertanian dan perdagangan jasa. Wilayah V juga memiliki lokasi strategis dari kota;

5. Wilayah Pengembangan Ekonomi V

   Wilayah V terdiri dari 3 kecamatan dengan karakteristik umum pedesaan meliputi Kecamatan Cicalengka, Nagreg, dan Cikancung. Potensi utama di Wilayah IV adalah sektor industri menengah besar dan sektor pertanian pangan. Wilayah V juga memiliki keunggulan dari segi aksesibilitas dan lokasi dengan keberadaan jalan nasional dan stasiun kereta api sehingga memudahkan terhadap akses pasar yang lebih luas;

6. Wilayah Pengembangan Ekonomi VI

   Wilayah VI terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Cileunyi dan Rancaekek, yang memiliki karakteristik ekonomi semi perkotaan. Wilayah VI memiliki lokasi yang strategis sebagai pintu masuk dan keluar wilayah Cekungan Bandung, terutama dari arah Timur. Wilayah VI juga memiliki kedekatan dengan kawasan pusat pendidikan tinggi di Jatinangor;

7. Wilayah Pengembangan Ekonomi VII

   Wilayah VII terdiri dari 2 Kecamatan, dengan karakteristik umum ekonomi pedesaan, yang meliputi Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang Potensi utama SWPE VI adalah sektor pertanian. Tantangan utama di Wilayah VII adalah akses transportasi dari dan ke Kabupaten Bandung, tetapi relatif lebih dekat dengan Kota Bandung, sehingga memiliki potensi tersendiri dalam mengakses pasar yang lebih luas.

Dari konsep diatas sesuai dengan Prioritas Nasional 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara yang Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Eknomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru maka dalam rangka mengelaborasikan konsep tersebut kedalam perencanaan jangka menengah sektor perekonomian dan sumber daya alam dan disesuaikan dengan Misi Bupati Bandung "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif Mendorong Ketahanan Pangan melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan". Penerapan konsep ekonomi hijau di Kabupaten Bandung dapat

dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu konsep utama dan konsep penunjang. Konsep utama berkaitan dengan integrasi prinsip ekonomi hijau ke dalam sektor unggulan Kabupaten Bandung, sehingga penerapan ekonomi hijau berupa pertanian hijau, ekonomi sirkular, dan pariwisata berkelanjutan. Sedangkan konsep penunjang meliputi teknologi hijau, proses produksi rendah limbah, infrastruktur hijau, solusi berbasis alam. Pada tingkat yang lebih detail, konsep-konsep tersebut kemudian disesuaikan dengan karakteristik wilayah pengembangan ekonomi agar dapat diperoleh prioritas implementasi konsep ekonomi untuk masing-masing wilayah pengembangan. Berikut adalah konsep ekonomi yang spesifik terhadap wilayah pengembangan ekonomi di Kabupaten Bandung:

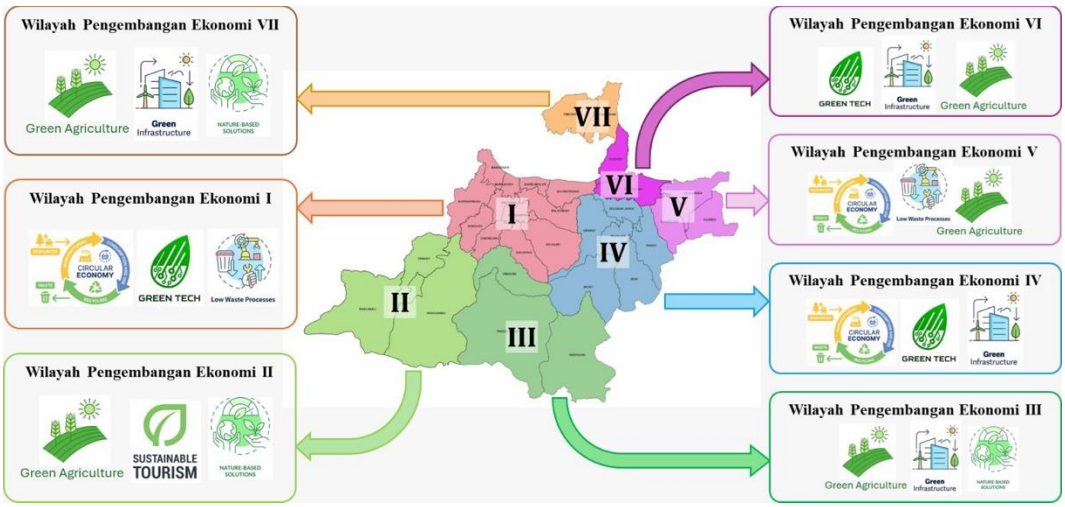

Gambar 3.15. Konsep Wilayah Pengembangan Ekonomi Kabupaten Bandung
Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2025

Dari Konsep diatas maka masing-masing Wilayah Pengembangan memiliki penekanan konsep ekonomi hijau yang berbeda-beda disesuaikan dengan potensi utama dan tantangan kedepannya, berikut ini konsep masing-masing Wilayah Pengembangan:

1. Sub Wilayah Pengembangan I, menekankan pada Ekonomi Sirkular, Teknologi Hijau, dan *Low Waste Processes*.
2. Sub Wilayah Pengembangan II, menekankan pada Ekonomi Sirkular, *Low Waste Processes* dan Pertanian Hijau (berkelanjutan).
3. Sub Wilayah Pengembangan III, menekankan pada Pertanian Hijau (berkelanjutan), Pariwisata Berkelanjutan, dan *Nature Based Solution.*
4. Sub Wilayah Pengembangan IV, menekankan pada Pertanian Hijau (berkelanjutan), Infrastruktur Hijau (berkelanjutan), dan *Nature Based Solution*.
5. Sub Wilayah Pengembangan V, menekankan pada Ekonomi Sirkular, Teknologi Hijau dan Infrastruktur Hijau (berkelanjutan).
6. Sub Wilayah Pengembangan VI, menekankan pada Pertanian Hijau (berkelanjutan), Infrastruktur Hijau (berkelanjutan), dan *Nature Based Solution*.

Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, yang ditopang oleh kekayaan sumber daya alam, kekuatan

sektor usaha mikro dan kecil (UKM/IKM), serta keragaman destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Namun demikian, upaya optimalisasi dua sektor strategis yakni pengembangan Sentra Industri Kecil dan Usaha Mikro Terpadu serta pembangunan Pariwisata Hijau masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan.

Di satu sisi, sektor IKM/UKM masih dihadapkan pada hambatan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya adopsi teknologi, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, dan lemahnya konektivitas ke pasar. Upaya pembentukan ekosistem usaha yang kuat melalui program seperti KABANDUNG BANGKIT telah diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, penyediaan fasilitas produksi, inkubasi bisnis, dan akses pembiayaan melalui PLUT serta kolaborasi lintas perangkat daerah.

Sementara itu, sektor Pariwisata Hijau dan Budaya juga belum berkembang secara optimal akibat minimnya sinergi antarperangkat daerah, infrastruktur pendukung yang belum merata, belum efektifnya pengelolaan sampah di kawasan wisata, serta lemahnya strategi promosi dan penguatan identitas pariwisata daerah. Banyak potensi desa wisata belum tergarap maksimal, padahal berpeluang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi lokal.
Untuk itu, dibutuhkan sebuah pendekatan integratif yang mampu menyatukan kekuatan kedua sektor tersebut dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan. Konsep Kawasan Ekonomi Terpadu hadir sebagai solusi strategis untuk menjembatani pengembangan sektor produksi (IKM/UKM) dengan sektor jasa (pariwisata) dalam suatu mata rantai nilai yang saling memperkuat dari hulu ke hilir. Melalui pendekatan ini, produk-produk lokal hasil IKM/UKM tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari atraksi wisata dan identitas daerah yang bernilai tambah.

Dengan membangun keterhubungan spasial dan fungsional antara desa produksi, sentra UKM/IKM, dan destinasi wisata, Kabupaten Bandung berpotensi menciptakan rantai pasok yang terpadu serta memperkuat keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan peluang kerja dan usaha yang inklusif. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan global. Adapun beberapa sub tematik yang menjadi pilar dalam perekonomian terpadu ini ialah sebagai berikut:

3.4.2.1 Sub-Tematik Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Usaha Mikro Terpadu

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Usaha Mikro Terpadu di Kabupaten Bandung memegang peranan penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas pelaku usaha kecil dan mikro yang menjadi fondasi utama kegiatan ekonomi lokal. Dengan potensi yang besar dari sisi sumber daya alam, ketersediaan tenaga

kerja, serta semangat kewirausahaan masyarakat, Kabupaten Bandung memiliki modal kuat untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan akses modal, keterlambatan adopsi teknologi, dan kesulitan dalam menjangkau pasar masih menjadi hambatan utama.

Oleh sebab itu, arah pengembangan sentra industri difokuskan pada peningkatan efisiensi dan kualitas melalui sinergi antar pelaku usaha, penyediaan fasilitas produksi yang memadai, pelatihan peningkatan kompetensi, dan penguatan sistem pemasaran yang lebih terorganisir. Strategi ini diharapkan mampu membangun ekosistem usaha yang tangguh dan berkelanjutan, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Konsep konvergensi antara IKM dan UKM dalam konteks tersebut digambarkan dalam ilustrasi berikut.

Gambar 3.16. Konsep Konvergensi Pembangunan IKM dan UKM (KAB BANDUNG BANGKIT)
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Konsep pada gambar tersebut menggambarkan integrasi Program "KABANDUNG BANGKIT" yang dirancang untuk memperkuat pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bandung. Program ini melibatkan kolaborasi berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, serta instansi lainnya, yang didukung oleh sistem informasi terpadu dan kebijakan regulatif sebagai infrastruktur pendukung. Salah satu pilar utama program ini adalah penyediaan Pinjaman Dana Bergulir, yaitu akses pembiayaan bersifat non-permanen melalui kemitraan dengan BUMD. Penguatan lebih lanjut dilakukan melalui pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di tingkat regional yang menyediakan beragam layanan

pendukung, termasuk inkubasi bisnis, pengembangan teknologi, konsultasi usaha, digitalisasi, serta fasilitasi kemitraan. Program ini juga didukung oleh sinergi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga keuangan, BUMD, dan komunitas lokal dalam rangka membangun ekosistem usaha yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Adapun pembagian peran konsep pembangunan Konvergensi IKM dan UKM di Kabupaten Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.17. Konsep Pembagian Peran Konvergensi Pembangunan IKM dan UKM di Kabupaten Bandung
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Ilustrasi pada gambar di atas menunjukkan suatu ekosistem yang terintegrasi dalam upaya penguatan ketahanan pangan dan pengembangan usaha kecil melalui pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, mencakup seluruh tahapan mulai dari produksi hingga konsumsi. Program ini melibatkan berbagai komponen penting, seperti penyediaan sarana produksi bagi pelaku UKM/IKM yang didukung oleh fasilitasi bahan baku dan kerja sama kemitraan, pengembangan pusat inovasi dan kreativitas seperti PLUT, pelaksanaan program inkubasi bisnis, serta penguatan simpul-simpul desa sebagai bagian dari rantai produksi massal yang terhubung dengan pasar agro dan pusat distribusi pangan. Di sisi pemasaran, program mencakup kegiatan perdagangan, penyimpanan, dan distribusi logistik yang disertai dengan fasilitasi legalitas produk serta promosi. Sementara pada tahap konsumsi, fokus diarahkan pada peningkatan pemenuhan gizi seimbang melalui penerapan konsep B2SA dan penguatan simpul pangan lokal, termasuk pengembangan pekarangan pangan lestari dan intervensi pada wilayah rawan pangan. Keseluruhan rantai nilai ini dijalankan dengan pengawasan sistem keamanan pangan yang mencakup produk segar dan olahan, serta diperkuat melalui dukungan teknologi, kelembagaan, pendanaan, pelatihan, dan sistem informasi yang terkoordinasi, dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan lembaga terkait.

3.4.2.2 Kebijakan Pembangunan Pariwisata Hijau di Kabupaten Bandung

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat potensi maksimal daerah sebagai destinasi unggulan. Aksesibilitas dan transportasi publik menuju destinasi wisata belum optimal, ditambah dengan kemacetan di beberapa titik akibat lonjakan volume kendaraan, terutama saat akhir pekan dan libur panjang. Selain itu, pengembangan pariwisata masih terfokus di wilayah DPK Soreang, Pacira, dan Pangalengan, sementara wilayah lainnya belum tergarap secara maksimal. Dukungan dari sektor penunjang seperti perhubungan, perdagangan, koperasi dan UKM, pekerjaan umum, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pertanian, serta pengelolaan kebencanaan juga belum berjalan secara sinergis. Persoalan lain yang masih menjadi tantangan adalah belum terkelolanya sampah di sekitar obyek wisata, kurang optimalnya pengembangan desa wisata, lemahnya kolaborasi dengan wilayah sekitar dalam promosi destinasi, serta kurangnya promosi dan penguatan branding wisata Kabupaten Bandung secara terpadu dan berkelanjutan.

Konsep pembangunan pariwisata Hijau dan Budaya di kabupaten bandung dapat di gambarkan sebagai berikut:

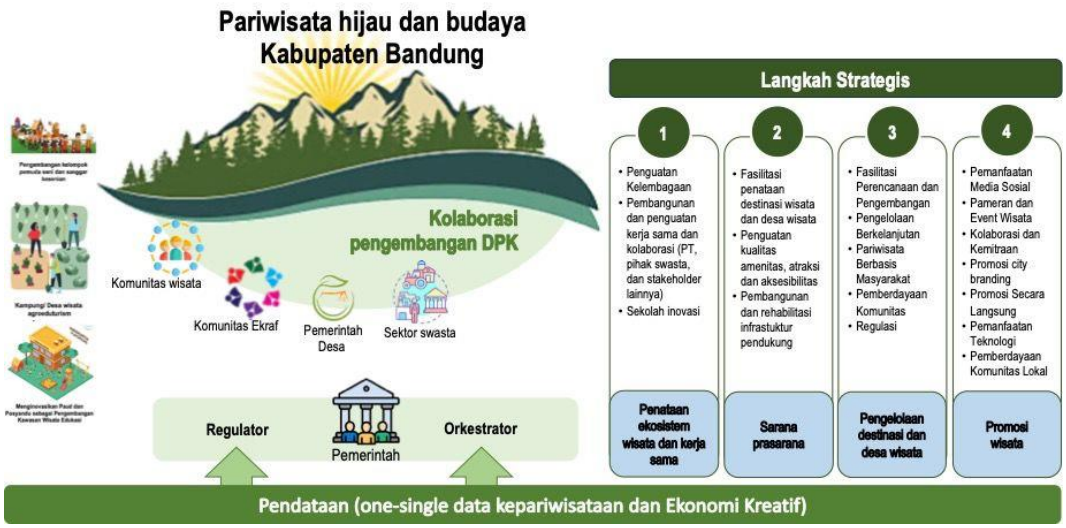

Gambar 3.18. Konsep Pembangunan Pariwisata Hijau dan Budaya di kabupaten Bandung
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Gambar Diatas mengilustrasikan strategi pengembangan pariwisata hijau dan budaya di Kabupaten Bandung melalui kolaborasi multipihak dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK). Pemerintah berperan sebagai regulator dan orkestrator yang mendorong sinergi antara komunitas wisata, komunitas ekonomi kreatif, pemerintah desa, dan sektor swasta. Pendekatan ini ditopang oleh sistem pendataan terpadu (*one-single data*) sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Empat langkah strategis dijalankan, yaitu: (1) penguatan kelembagaan, pembangunan jejaring, serta kerja sama antar pemangku

kepentingan; (2) fasilitasi penataan destinasi dan desa wisata, peningkatan kualitas atraksi serta infrastruktur pendukung; (3) perencanaan dan pengembangan pengelolaan destinasi melalui pariwisata berbasis masyarakat, pemberdayaan komunitas, dan penguatan regulasi; serta (4) promosi destinasi secara aktif melalui media sosial, event, kemitraan, branding, dan keterlibatan komunitas lokal. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat secara inklusif.

Mengingat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka pengembangan pariwisata tahun 2025-2029 dilakukan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dengan pembagian peran sebagai berikut Pengembangan sektor pariwisata merupakan hasil kolaborasi lintas perangkat daerah yang saling mendukung sesuai dengan peran dan kewenangannya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) memegang peran sentral melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata, penguatan promosi dan pemasaran, kolaborasi pentahelix, serta diversifikasi atraksi wisata. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) mendukung melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur menuju destinasi wisata. Penguatan desa wisata menjadi fokus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), termasuk mendorong kerja sama antar desa. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berperan dalam peningkatan kompetensi SDM pariwisata, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan di kawasan wisata. Promosi digital dan branding destinasi menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang dilengkapi oleh peran Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menyediakan transportasi yang aman dan terjangkau. Dukungan terhadap pelaku UMKM diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM), sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjamin kebersihan di sekitar objek wisata. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendorong investasi sektor pariwisata, dan Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin) memfasilitasi pengembangan sektor perdagangan dan industri yang mendukung ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Kolaborasi ini mencerminkan upaya terpadu dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

3.4.3 Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung

Sub-tema Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung merupakan bagian integral dari pendekatan perencanaan tematik-spasial yang menjadi landasan utama dalam RPJMD Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu domain implementatif, sub-tema ini memfokuskan intervensi pembangunan pada isu-isu strategis di Ibukota Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Soreang yang berfokus pada ”Mewujudkan Kawasan Perkotaan Soreang Sebagai Ibukota Kabupaten Bandung yang Bersih, Nyaman, Tertib, Aman, dan Berkembang Melalui Penguatan Fungsi Kawasan Serta Penataan Ruang Yang Berkelanjutan”. Pendekatan ini selaras dengan prinsip perencanaan dengan memperhatikan

keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dalam memperkuat fungsi kawasan dan penataan ruang yang berkelanjutan, guna mewujudkan Perkotaan Soreang sebagai kawasan perkotaan yang bersih, nyaman, tertib, aman, dan berkembang secara inklusif dan adaptif.

Perkotaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Salah satu peran kota adalah sebagai pusat aglomerasi kegiatan ekonomi, sehingga kota mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan membuat kota tersebut menjadi lebih kompetitif. Selain itu, kota juga harus menjamin bahwa setiap orang berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, terutama bagi kelompok penduduk rentan. Pengembangan ekonomi perkotaan juga harus mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan agar tidak merugikan lingkungan di masa kini dan masa mendatang (BPIW, 2020).

Penataan Ibu Kota Kabupaten di Soreang diarahkan menjadi Penataan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ibu Kota skala Kabupaten dimana terus menjalin jejaring dengan perkotaan di tingkat nasional dan dunia menunjukkan keterbukaan, kolaborasi, dan integrasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, teknologi, serta inovasi, guna memperkuat posisinya dalam sistem perkotaan global, mendorong pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Diharapkan Kawasan Ibu Kota Soreang dapat membentuk masyarakat yang mandiri, kota yang bertumbuh, berbudaya dan berwawasan lingkungan.

Untuk ”Mewujudkan Kawasan Perkotaan Soreang Sebagai Ibukota Kabupaten Bandung yang Bersih, Nyaman, Tertib, Aman, dan Berkembang Melalui Penguatan Fungsi Kawasan Serta Penataan Ruang Yang Berkelanjutan” dilakukan analisis tematik Kawasan Perkotaan Soreang dengan mengidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan aspeknya, yakni:

a. Aspek Infrastruktur

Seiring dengan pesatnya perkembangan kawasan perkotaan Soreang, terutama sejak beroperasinya Jalan Tol Soreang–Pasirkoja (Soroja), muncul berbagai permasalahan seperti pelanggaran terhadap batas sempadan jalan, bangunan, sungai, dan jaringan irigasi. Pembangunan di area sempadan tersebut berpotensi menghambat aliran air, menyempitkan badan sungai atau saluran, serta meningkatkan risiko terjadinya banjir dan genangan. Hal ini juga dapat menyebabkan terganggunya distribusi air untuk lahan pertanian maupun sebaliknya, serta menimbulkan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk terganggunya kelancaran lalu lintas dan meningkatnya kemacetan.
Permasalahan lain yang dihadapi adalah terbatasnya jangkauan layanan pengelolaan sampah, yang mengakibatkan masih ditemukannya keberadaan sampah liar, baik yang menumpuk maupun yang dibuang sembarangan di fasilitas publik seperti jalan, jembatan, sungai, serta bangunan yang tidak terpelihara. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga masih rendah.

Berikut adalah salah satu gambaran permasalahan di Kawasan Soreang:

Gambar 3.19. Profil Kemacetan di Kawasan Soreang
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Permasalahan yang terjadi di kawasan Pasar Soreang berakar pada rendahnya ketertiban tata ruang dan lalu lintas. Banyak kendaraan roda dua maupun roda empat yang parkir secara sembarangan di badan jalan (*on-street parking*), sehingga mengurangi kapasitas lajur dan menyebabkan kemacetan. Trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki justru beralih fungsi menjadi tempat parkir dan lapak berjualan, memaksa pejalan kaki untuk berjalan di badan jalan yang padat dan berisiko. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu hingga badan jalan semakin mempersempit ruang gerak kendaraan dan membuat suasana pasar menjadi semrawut. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya sistem pengelolaan lalu lintas yang efektif dan terkoordinasi di sekitar pasar, sehingga sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki tidak tertata dengan baik dan menimbulkan ketidakteraturan yang berkelanjutan.

b. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan kinerja ekonomi perkotaan dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan sektor basis. Di wilayah perkotaan Soreang telah tumbuh berbagai investasi usaha, permukiman, jasa dan perdagangan serta pemerintahan. Di sisi lain, kinerja usaha mikro belum dimanfaatkan secara optimal agar dapat berkontribusi jangka panjang menuju kota mandiri dari segi ekonomi baik dari segi pendapatan kota maupun penataannya. Salah satu upaya peningkatan pertumbuhan adalah dengan konsep *Land Value Capture* dan peningkatan pendapatan ekslusif (jalan tol, bangunan bertingkat, wisata khusus, hiburan dan fasilitas lainnya):

1. Pusat Pemerintahan
2. Perdagangan dan Jasa

3. Wisata perkotaan
4. Ekonomi Hijau/*Circular Economy* dan Ekonomi inklusif
5. Penanggulangan calo, bank emok dan pengepul

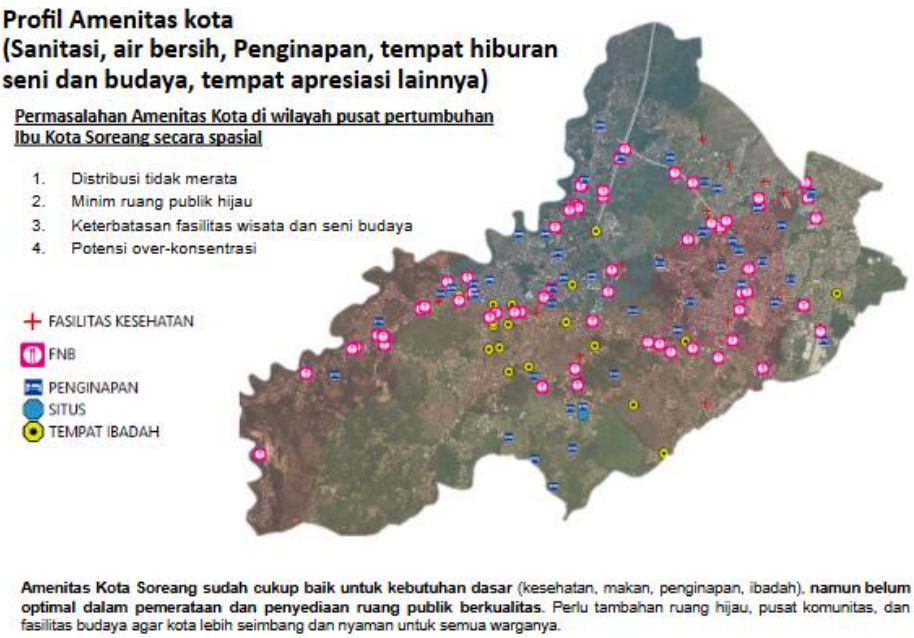

Gambar 3.20.Konsep Penanganan Permasalahan Amenitas di Kawasan Perkotaan Soreang
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Amenitas di kawasan pertumbuhan Soreang menunjukkan ketersediaan fasilitas dasar yang relatif memadai, seperti fasilitas kesehatan, penginapan, tempat makan (F&B), situs budaya, dan tempat ibadah. Namun, jika dilihat secara spasial sebaran distribusi lokasi penunjang amenitas masih belum merata. Terjadi konsentrasi fasilitas di beberapa titik saja, terutama di pusat kota dan sekitar simpul transportasi, sementara wilayah lainnya kurang terlayani. Minimnya ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik juga menjadi catatan penting, mengingat fasilitas tersebut berperan vital sebagai wadah interaksi sosial, kegiatan komunitas, rekreasi, dan penguatan identitas kawasan.

Dari perspektif inklusivitas, kekurangan RTH dan ruang publik membatasi akses masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, terhadap ruang bersama yang aman dan nyaman. Ruang publik bukan hanya elemen estetika kota, melainkan juga infrastruktur sosial yang menunjang kohesi antarwarga, partisipasi komunitas, serta aktivitas budaya dan seni. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pertumbuhan Soreang ke depan perlu mengintegrasikan penyediaan RTH dan ruang publik yang inklusif dan mudah diakses, guna menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.

c. Aspek Sosial

Selain tata kelola pemerintahan yang baik, isu lainnya adalah masih banyaknya penduduk yang memiliki pekerjaan serabutan sehingga agar memiliki pendapatan tetap akan

diarahkan melalui program jaminan sosial dengan prioritas penduduk produktif. Salah satu isu krusial yang dihadapi di wilayah Soreang adalah keberadaan parkir liar yang tersebar di berbagai titik strategis, seperti di pintu masuk dan keluar Tol Soroja, kawasan Gading Tutuka, area perkantoran Pemerintah Daerah, serta sejumlah lokasi lainnya. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga menimbulkan potensi risiko keselamatan, menurunkan estetika kawasan, serta mencerminkan lemahnya pengawasan dan penataan ruang publik yang perlu segera ditangani secara terpadu.

Gambar 3.21.Strategi Mengatasi Parkir Liar
Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

3.4.4 SDM Bedas

Sub-tema SDM BEDAS merupakan bagian integral dari pendekatan perencanaan tematik-spasial yang menjadi landasan utama dalam RPJMD Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu domain implementatif, sub-tema ini memfokuskan intervensi pembangunan pada isu-isu strategis di bidang sosial, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip pembangunan berbasis sistem, di mana dimensi sosial berinteraksi secara sinergis dengan aspek ekonomi dan lingkungan untuk membentuk fondasi pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Sub-tema SDM BEDAS mengarusutamakan transformasi sosial melalui penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok sasaran prioritas. Intervensi dirancang untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan, kualitas pendidikan, serta ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh, dengan tujuan akhir membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan tangguh terhadap guncangan sosial-ekonomi. Untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran, sub-tema ini dijabarkan ke dalam tiga sub-sub tema prioritas, yaitu: (1) kesehatan masyarakat dengan fokus pada percepatan penurunan stunting dan pencegahan dan pengendalian AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM); (2) kesejahteraan sosial melalui penanganan kemiskinan; serta (3) inklusi pembelajaran melalui jalur

pendidikan non-formal. Ketiga fokus ini menjadi simpul strategis dalam memperkuat peran sumber daya manusia sebagai pilar utama kesejahteraan dan daya saing daerah.

3.4.4.1 Kesehatan Masyarakat – Tematik Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

Pada Tahap I RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2045, periode tahun 2025–2029 difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, termasuk melalui arah kebijakan "Pemerataan Kesehatan untuk Semua" yang memprioritaskan penuntasan dan pencegahan stunting. Target penurunan prevalensi stunting ditetapkan sebesar 21,72% pada tahun 2025 dan 15,10% pada 2029. Stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi strategi kunci untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Upaya penanganan dilakukan secara holistik dan integratif dengan mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Stranas P3S), yang terdiri dari enam pilar utama, antara lain komitmen kepemimpinan, perubahan perilaku, konvergensi program, ketahanan pangan dan gizi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pemantauan berbasis data. Pemerintah Kabupaten Bandung juga memperkuat sistem pemantauan terhadap intervensi gizi spesifik (PMT, suplementasi) dan gizi sensitif (sanitasi, air bersih, perlindungan sosial), serta membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting melalui Keputusan Bupati yang berlaku hingga tingkat kecamatan dan desa.

Program intervensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung menyasar kepada ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui; Baduta (usia 0 – 23 bulan); Balita (usia 24 – 59 bulan); remaja putri; calon pengantin; serta rumah tangga dan masyarakat. Adapun bentuk program intervensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung di antaranya seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil KEK, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk ibu hamil, pemeriksaan kehamilan 6 kali selama masa kehamilan, Imunisasi Rutin Lengkap bagi Baduta, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta pemberian obat cacing (POPM) untuk Baduta dan Balita, tambahan asupan gizi bagi Baduta dan Balita gizi kurang, Pemberian TTD dan skrining anemia terhadap remaja putri, serta pemeriksaan kesehatan dan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting bagi calon pengantin.

Selain kebijakan formal, pendekatan inovatif terus dikembangkan, seperti melalui program Bunga Desa yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa secara partisipatif. Kegiatan dalam program ini mencakup sosialisasi Gemarikan, GEKSSOR, pemberian tablet tambah darah, PMT berbasis CSR, dan edukasi Germas bersama NGO. Inovasi lain yang dikembangkan antara lain KATRESNA, BEDAS SAPUJAGAT, *Circular Economy* Desa Cibiru Wetan, serta program komunitas Ruang Riung Ceria.

Kolaborasi tenaga medis melalui KOLBU dan KITA SEHATI, serta penguatan kader melalui SEBLAK dan SIMANIS, menjadi bagian dari ekosistem penanganan stunting yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

3.4.4.2 Kesehatan Masyarakat – Pencegahan dan Pengendalian AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM)

Pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan malaria (ATM) merupakan bagian dari agenda global *Ending ATM by 2030* dalam kerangka SDG 3, yang menargetkan berakhirnya epidemi ATM pada tahun 2030. Komitmen ini dipayungi oleh WHO, UNAIDS, dan The Global Fund, serta diadopsi Indonesia melalui berbagai regulasi nasional seperti Perpres No. 67 Tahun 2021 tentang TBC, Perpres No. 124 Tahun 2018 tentang AIDS, dan Permenkes No. 22 Tahun 2022 tentang malaria. Tujuannya adalah menurunkan angka kejadian, kematian, dan mencegah penularan baru melalui sistem surveilans yang kuat, deteksi dini, penanganan tuntas, serta keterlibatan aktif masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut di 2030, dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaanya yang meliputi:

- Pendekatan lintas sektor dan pendekatan sistem, melalui komisi atau tim percepatan di semua tingkat pemerintahan.
- Deteksi dini dan penanganan tuntas, seperti strategi TEMPO TBC (Temukan, Pisahkan, Obati), serta ketersediaan obat dan infrastrukturnya.
- Promosi kesehatan, edukasi komunitas, dan pemberdayaan pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan kader, non-kesehatan, dan masyarakat luas.

Di tingkat Kabupaten Bandung, arah kebijakan ini diterjemahkan ke dalam:

- Penguatan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan ATM, termasuk skrining aktif, fasilitas PPI (Pengendalian dan Pencegahan Infeksi), dan penggunaan teknologi diagnostik cepat (DPP).
- Pembentukan atau penguatan Satgas/TP2TB daerah sesuai Perpres No. 67/2021, yang melibatkan lintas OPD dan relawan desa.
- Program monitoring dan pelaporan digital, pengadaan obat lengkap, serta pemberdayaan komunitas melalui edukasi massal, kampanye PHBS, dan pelibatan sektor pendidikan dan ekonomi lokal dalam promosi hidup sehat.

Melalui strategi ini, Kabupaten Bandung menargetkan percepatan eliminasi TBC, pengendalian HIV, dan eliminasi malaria sebelum target nasional, serta terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

3.4.4.3 Kesejahteraan Sosial – Tematik Penanganan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari komitmen nasional dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan

pertama: menghapus segala bentuk kemiskinan di mana pun. Hal ini ditegaskan melalui Perpres No. 59 Tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Arahan tersebut mendorong keterpaduan program antar pemangku kepentingan, ketepatan sasaran, serta pelibatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, daerah juga mengacu pada Permendagri No. 53 Tahun 2020 terkait penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Pada Tahap I RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2045, periode tahun 2025–2029 difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, termasuk melalui arah kebijakan penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial bagi kelompok marginal dan rentan, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal layak, serta pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan. Untuk mengoperasionalkan kebijakan ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) secara konsisten menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) melalui koordinasi lintas sektor, guna memastikan integrasi program antar perangkat daerah dan mitra non-pemerintah.

Intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung mengacu pada empat strategi utama: peningkatan pendapatan, penurunan beban pengeluaran, pengurangan kantong kemiskinan, dan perbaikan tata kelola. Dukungan kebijakan nasional juga memperkuat pelaksanaan program daerah, seperti Inpres No. 8 Tahun 2025 yang mendorong pengembangan program Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Selain itu, penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana diamanatkan Inpres No. 4 Tahun 2025 menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program agar tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

3.4.4.4 Inklusi Pembelajaran – Jalur Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal berperan strategis dalam memperluas akses pembelajaran yang inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum atau tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek No. 17 Tahun 2021 dan target SDG 4 yang menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal menjangkau kelompok marginal seperti anak putus sekolah, penyandang disabilitas, pekerja informal, dan perempuan kepala keluarga, dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal melalui program kesetaraan, pelatihan keterampilan, digitalisasi pembelajaran, serta kemitraan dunia kerja.

Di Kabupaten Bandung, kebijakan ini diterjemahkan melalui penguatan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) sebagai simpul pendidikan non-formal, alokasi anggaran afirmatif bagi warga rentan, serta integrasi program dengan dunia usaha dan sektor swasta. Pemanfaatan data sosial-ekonomi nasional juga menjadi dasar untuk menyusun program yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Dukungan lintas OPD dan komunitas desa turut didorong agar pendidikan non-formal menjadi gerakan kolektif yang memperkuat kapasitas masyarakat.

Untuk menjamin keberlanjutan, pendidikan non-formal perlu diarusutamakan dalam dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting dari pengembangan SDM. Pendekatan wilayah dan kelompok sasaran prioritas, penguatan kelembagaan, penggunaan teknologi informasi, serta pembiayaan berbasis kinerja menjadi kunci dalam membangun sistem pembelajaran yang responsif, adil, dan berkelanjutan.

3.4.5 Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas

Dunia saat ini dihadapkan pada tiga krisis global (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia yaitu perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini tentunya akan menjadi hambatan dalam mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan karena lingkungan hidup berkualitas merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Selaras dengan Visi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, maka Kabupaten Bandung juga berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Hal tersebut tercermin dari Visi RPJPD Kabupaten Bandung 2025 – 2045 yaitu Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan dan Visi RPJMD Kabupaten Bandung 2025 – 2029 yaitu Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan. Berkelanjutan memiliki makna Pembangunan yang berwasasan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Indikator yang terkait dengan keberlanjutan adalah Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *Zero N*et *Emission*.

Saat ini permasalahan di Kabupaten Bandung terkait dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca adalah belum optimalnya upaya penurunan emisi GRK yang disebabkan karena penanganan yang lintas sektor. Adapun tujuan dari tematik Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas adalah menurunnya emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan target yang ditentukan. *Critical Succes Factor* atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja dalam penurunan emisi GRK terdiri dari penurunan emisi GRK di Sektor Transportasi, Sektor Pertanian, Sektor Peternakan dan Sektor Pengolahan Sampah.

BAB 4
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Indikator program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, setiap program Perangkat Daerah harus dirancang secara terukur melalui penetapan indikator, target, dan pagu indikatif. Ketiga elemen ini menjadi komponen utama dalam memastikan program yang dilaksanakan benar-benar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Indikator program digunakan sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Indikator tersebut disusun secara kuantitatif maupun kualitatif, agar mampu menggambarkan capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program secara objektif. Dengan adanya indikator yang jelas, evaluasi terhadap keberhasilan program dapat dilakukan secara berkala dan sistematis.

Target program menggambarkan tingkat pencapaian yang ingin diraih dalam kurun waktu 2025–2029 dengan akhir tahun perencanaan pada tahun 2030 sebagai masa transisi pemerintahan. Penetapan target ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual, potensi daerah, serta sumber daya yang tersedia, sehingga tetap realistis namun tetap mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah. Sementara itu, pagu indikatif menjadi acuan awal dalam pengalokasian anggaran untuk setiap program. Pagu ini membantu memastikan bahwa sumber daya fiskal daerah dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan, sesuai prioritas pembangunan. Dengan menyajikan indikator, target, dan pagu indikatif secara rinci, pemerintah daerah mengarahkan pembangunan secara lebih fokus, terukur, dan akuntabel.

Dengan merinci indikator, target, dan pagu indikatif, Perangkat Daerah memiliki dasar yang kuat dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program yang telah ditetapkan. Penjabaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan. Berikut disajikan data tabel yang memuat informasi detail mengenai masing-masing program Perangkat Daerah Tahun 2026–2030.

Tabel 4.1. Program disertai Kebutuhan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.498.625.622.327		1.383.742.942.261		1.393.742.942.261		1.383.742.942.261		1.393.742.942.261	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.109.241.572.097		1.159.067.354.812		1.159.067.354.812		1.159.067.354.812		1.159.067.354.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	51.9	53	1.109.241.572.097	54	1.159.067.354.812	55	1.159.067.354.812	56	1.159.067.354.812	57	1.159.067.354.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	64	64.52		65		65.27		66		66.25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				386.383.688.078		221.675.315.288		231.675.315.288		221.675.315.288		231.675.315.288	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	63.47	67.49	386.383.688.078	70.53	221.675.315.288	73.57	231.675.315.288	76.61	221.675.315.288	77	231.675.315.288	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)	98.65	99.28		99.68		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	18.74	22.84		26.94		31.04		35.14		39.24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Index Distribusi Guru SMP (Indeks)	0.37	0.47	750.000.000	0.52	750.000.000	0.56	750.000.000	0.6	750.000.000	0.62	750.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Index Distribusi Guru SD (Indeks)	0.23	0.31		0.36		0.41		0.42		0.43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Index Distribusi Guru PAUD (Indeks)	0.29	0.33		0.35		0.37		0.41		0.42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	46.51	46.71		46.87		47		47.1		47.2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				500.362.152		500.272.161		500.272.161		500.272.161		500.272.161	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	125	125	500.362.152	125	500.272.161	125	500.272.161	125	500.272.161	125	500.272.161	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.232.663.574.455		1.219.928.344.156		1.247.998.747.227		1.290.051.693.093		1.323.772.719.659	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				968.953.545.249		982.083.628.950		998.588.555.893		1.017.286.854.893		1.034.007.881.459	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	73.58	74.65	968.953.545.249	75.20	982.083.628.950	75.73	998.588.555.893	76.40	1.017.286.854.893	77.75	1.034.007.881.459	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	57.40	59.50		60.25		61.10		62.35		63.45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				258.747.559.006		232.882.245.006		244.447.721.134		267.802.368.000		284.802.368.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Ketercapaian Cakupan SPM Kesehatan (%)	100	100	258.747.559.006	100	232.882.245.006	100	244.447.721.134	100	267.802.368.000	100	284.802.368.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	70	75		82.14		89.28		96.43		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23.37	25.50		25.00		24.50		23.40		23.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan (Poin)	88.44	88.70		88.90		89.10		89.30		89.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (Kabupaten/Kota)	0	45		50		55		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)	80	84		86		88		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Persentase)	15	17		18		19		20		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	0	82		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai IKM Rumah Sakit (poin)	90.89	90.95		91.00		91.05		91.10		91.15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD KELAS B MAJALAYA)
	Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target (%)	97.85	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD KELAS B MAJALAYA)
	Nilai IKM Rumah Sakit (poin)	84.88	85		85.50		86		86.50		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD OTO ISKANDAR DI NATA)
	Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target (%)	78.40	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD OTO ISKANDAR DI NATA)
	Nilai IKM Rumah Sakit (poin)	88.95	91		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD CICALENGKA)
	Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target (%)	94.62	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD CICALENGKA)
	Nilai IKM Rumah Sakit (poin)	88.44	88.70		88.90		89.10		89.30		89.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD BEDAS KERTASARI)
	Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD BEDAS KERTASARI)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai IKM Rumah Sakit (poin)	76.95	78		79		80		81		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD BEDAS CIMAUNG)
	Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD BEDAS CIMAUNG)
	Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD BEDAS ARJASARI)
	Nilai IKM Rumah Sakit (poin)	88.5	88.9		89.1		89.3		89.5		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD BEDAS ARJASARI)
	Nilai IKM Rumah Sakit (poin)	88.44	88.70		88.90		89.10		89.30		89.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD BEDAS PACIRA)
	Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD BEDAS PACIRA)
	Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD BEDAS TEGALLUAR)
	Nilai IKM Rumah Sakit (poin)	88.44	88.70		88.90		89.10		89.30		89.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD BEDAS TEGALLUAR)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				4.392.470.200		4.392.470.200		4.392.470.200		4.392.470.200		4.392.470.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang bermutu (%)	90.18	91.18	4.392.470.200	91.50	4.392.470.200	91.70	4.392.470.200	91.90	4.392.470.200	92.10	4.392.470.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	95.16	95.70		96.00		96.30		96.60		96.90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	0.13	0.20		0.21		0.22		0.24		0.26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Farmasi yang dibina/diawasi sesuai standar (%)	84.60	85.00	290.000.000	85.20	290.000.000	85.40	290.000.000	85.60	290.000.000	85.80	290.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Sarana IRTP (%)	80	84		86		88		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan (%)	80	84		86		88		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	80	82		83		84		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Strata (Purnama - Mandiri) (%)	75.50	75.00	280.000.000	75.25	280.000.000	75.50	280.000.000	75.75	280.000.000	76.00	280.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				609.371.806.421		308.485.887.910		398.786.146.358		393.786.146.358		423.544.809.670	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				57.934.232.983		59.853.289.242		59.853.289.242		59.853.289.242		59.853.289.242	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	83.01	83.20	57.934.232.983	83.25	59.853.289.242	83.50	59.853.289.242	83.55	59.853.289.242	83.70	59.853.289.242	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	42.48	43.20		43.40		43.60		43.70		44.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				28.684.815.189		16.731.899.389		16.731.899.389		16.731.899.389		16.731.899.389	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	40.28	44.11	28.684.815.189	46.19	16.731.899.389	48.10	16.731.899.389	50.00	16.731.899.389	53.25	16.731.899.389	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	66.47	67.00		67.25		67.50		67.75		68.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	3.10	10.66		11.76		12.87		14.01		15.15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				35.933.251.355		12.544.793.000		12.544.793.000		12.544.793.000		12.544.793.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	90.75	92.00	35.933.251.355	94.00	12.544.793.000	96.00	12.544.793.000	98.00	12.544.793.000	100.00	12.544.793.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	0	25.20		29.13		33.07		37.01		40.95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				2.200.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase kapasitas sampah yang dikelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (%)	30.74	31.36	2.200.000.000	31.57	2.150.000.000	31.80	2.150.000.000	32.01	2.150.000.000	32.22	2.150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				15.225.106.999		12.165.206.999		12.165.206.999		12.165.206.999		12.165.206.999	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi layak (%)	92.03	94.00	15.225.106.999	94.66	12.165.206.999	95.00	12.165.206.999	95.66	12.165.206.999	96.00	12.165.206.999	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) (%)	1.63	28.40		33.77		39.15		44.52		49.90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				32.065.479.683		13.074.968.778		13.074.968.778		13.074.968.778		13.074.968.778	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	47.24	53.00	32.065.479.683	55.00	13.074.968.778	57.00	13.074.968.778	59.00	13.074.968.778	61.00	13.074.968.778	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				-		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Bangunan Permukiman yang telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan (%)	100.00	100.00	-	100.00	1.200.000.000	100.00	1.200.000.000	100.00	1.200.000.000	100.00	1.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				89.542.456.000		44.235.597.552		58.535.856.000		43.535.856.000		48.160.886.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	100.00	100.00	89.542.456.000	100.00	44.235.597.552	100.00	58.535.856.000	100.00	43.535.856.000	100.00	48.160.886.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis (%)	60.00	65.00	150.000.000	70.00	150.000.000	70.55	150.000.000	75.00	150.000.000	80.00	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				340.092.823.212		138.836.491.950		214.836.491.950		224.836.491.950		249.970.125.262	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	83.09	88.13	340.092.823.212	92.13	138.836.491.950	96.07	214.836.491.950	98.07	224.836.491.950	99	249.970.125.262	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	17.85	39.28	2.000.000.000	50.00	2.000.000.000	60.71	2.000.000.000	80.35	2.000.000.000	100.00	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				5.543.641.000		5.543.641.000		5.543.641.000		5.543.641.000		5.543.641.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Dokumen Perencanaan Penataan Ruang yang Ditetapkan (%)	24.00	86.00	5.543.641.000	92.00	5.543.641.000	94.00	5.543.641.000	97.00	5.543.641.000	100.00	5.543.641.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten (%)	0.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				200.550.827.296		96.001.133.841		98.001.133.841		102.223.701.533		98.001.133.841	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.884.483.500		23.084.483.500		23.084.483.500		23.084.483.500		23.084.483.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	86,97	87,57	22.884.483.500	87,77	23.084.483.500	87,97	23.084.483.500	88,07	23.084.483.500	88,17	23.084.483.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	53,56	59,56		62,31		64,81		67,06		69,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				9.180.784.565		6.800.000.000		6.800.000.000		6.800.000.000		6.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	9.180.784.565	100	6.800.000.000	100	6.800.000.000	100	6.800.000.000	100	6.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				15.364.589.300		3.380.350.000		3.380.350.000		3.380.350.000		3.380.350.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani (%)	57	69	15.364.589.300	75	3.380.350.000	82	3.380.350.000	88	3.380.350.000	94	3.380.350.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				122.658.234.531		49.989.442.341		49.989.442.341		49.989.442.341		49.989.442.341	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Tersedianya Rumah Layak Huni	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	74,27	81,86	122.658.234.531	84,67	49.989.442.341	86,89	49.989.442.341	88,59	49.989.442.341	89,23	49.989.442.341	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				30.462.735.400		12.646.858.000		14.646.858.000		18.869.425.692		14.646.858.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (%)	32,09	34	30.462.735.400	35	12.646.858.000	36	14.646.858.000	37	18.869.425.692	38	14.646.858.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU (%)	0	0	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				116.489.133.549		114.067.598.889		117.567.598.889		117.567.598.889		117.567.598.889	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				66.175.532.599		66.406.900.889		66.406.900.889		66.406.900.889		66.406.900.889	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	72.32	74.32	33.701.700.399	75.32	33.853.025.889	76.32	33.853.025.889	77.32	33.853.025.889	78.32	33.853.025.889	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
	Indeks Manajemen Risiko (Poin)	52.72	52.92		53.02		53.12		53.22		53.32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	76	13.046.774.200	77	13.126.817.000	78	13.126.817.000	79	13.126.817.000	80	13.126.817.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	45		46		47		48		49		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	77.55	79	19.427.058.000	80	19.427.058.000	81	19.427.058.000	82	19.427.058.000	83	19.427.058.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	55.73	57		58		59		60		61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN)
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				40.467.830.000		37.878.400.000		37.878.400.000		37.878.400.000		37.878.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	1.663.280.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibum (%)	0	100	16.277.592.000	100	14.808.400.000	100	14.808.400.000	100	14.808.400.000	100	14.808.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	0	100	22.178.884.000	100	20.900.000.000	100	20.900.000.000	100	20.900.000.000	100	20.900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	100	348.074.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				5.015.741.000		6.488.741.000		6.488.741.000		6.488.741.000		6.488.741.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	2.447.241.000	100	3.093.741.000	100	3.093.741.000	100	3.093.741.000	100	3.093.741.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	1.2	1.508.500.000	1.2	2.155.000.000	1.2	2.155.000.000	1.2	2.155.000.000	1.2	2.155.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	1.060.000.000	100	1.240.000.000	100	1.240.000.000	100	1.240.000.000	100	1.240.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				4.830.029.950		3.293.557.000		6.793.557.000		6.793.557.000		6.793.557.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan Rawan Kebakaran (Desa/Kelurahan)	60	44	1.477.650.450	44	605.500.000	44	605.500.000	44	605.500.000	44	605.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase sistem proteksi kebakaran bangunan gedung (%)	40	45		50		55		60		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase jumlah korban penyelamatan dalam dan evakuasi korban kebakaran dalm waktu 15 menit (%)	84.21	85	3.352.379.500	87	2.688.057.000	89	6.188.057.000	91	6.188.057.000	93	6.188.057.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase layanan penyelamatan evakuasi non kebakaran (%)	99	99		99		99		99		99		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				39.967.085.850		28.960.393.910		28.960.393.910		28.960.393.910		28.960.393.910	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.947.067.130		16.131.358.300		16.131.358.300		16.131.358.300		16.131.358.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	80.72	81.25	16.947.067.130	81.50	16.131.358.300	81.75	16.131.358.300	82.00	16.131.358.300	82.25	16.131.358.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	40.47	41.50		42.00		42.50		43.00		43.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				3.052.040.000		2.185.000.000		2.185.000.000		2.185.000.000		2.185.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	0	37.70	3.052.040.000	40.60	2.185.000.000	43.93	2.185.000.000	46.92	2.185.000.000	50.24	2.185.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	0	24.8		28.93		32.63		36.67		40.38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	37.79	39.45	50.000.000	40.79	50.000.000	42.12	50.000.000	50.45	50.000.000	65.78	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				7.011.946.952		4.763.435.610		4.763.435.610		4.763.435.610		4.763.435.610	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	9.00	7.011.946.952	9.99	4.763.435.610	10.98	4.763.435.610	12.36	4.763.435.610	12.46	4.763.435.610	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	7.88		10.84		12.85		15.07		15.27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	10.97		23.89		31.16		34.12		34.21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	59.60		69.70		79.80		92.93		93.94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	0	36.14		37.08		38.03		38.98		39.16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				10.115.321.500		3.210.000.000		3.210.000.000		3.210.000.000		3.210.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	0	3.60	10.115.321.500	4.00	3.210.000.000	4.26	3.210.000.000	4.52	3.210.000.000	4.79	3.210.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	4.13		4.15		4.16		4.18		4.20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	0	38.06		38.10		38.20		38.27		38.65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	0	49.19		49.47		49.75		50.34		55.49		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				2.615.710.268		2.445.600.000		2.445.600.000		2.445.600.000		2.445.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	0	44.73	2.615.710.268	49.66	2.445.600.000	53.32	2.445.600.000	57.38	2.445.600.000	59.89	2.445.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat Kesiap Siagaannya (%)	0	18.93		19.29		19.64		20.00		20.36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Korban Bencana yang mendapat Layanan Pemulihan Sosial (%)	0	10.26		10.94		13.00		14.36		15.73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik (%)	80	80	175.000.000	80	175.000.000	80	175.000.000	80	175.000.000	80	175.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				42.394.859.912		27.661.386.312		29.661.386.312		44.661.386.312		64.661.386.312	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.867.273.462		17.308.039.000		17.308.039.000		17.308.039.000		17.308.039.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	84.88	85.33	17.867.273.462	85.67	17.308.039.000	85.87	17.308.039.000	86.07	17.308.039.000	86.27	17.308.039.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	56.50	56.90		57.10		57.30		57.50		57.70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				324.000.000		324.000.000		324.000.000		324.000.000		324.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	324.000.000	100	324.000.000	100	324.000.000	100	324.000.000	100	324.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				17.525.850.538		5.321.674.700		7.321.674.700		22.321.674.700		42.321.674.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan (%)	57.58	57.98	17.525.850.538	58.58	5.321.674.700	59.58	7.321.674.700	60.58	22.321.674.700	61.58	42.321.674.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				4.733.966.112		2.763.902.812		2.763.902.812		2.763.902.812		2.763.902.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	44.82	46.32	4.733.966.112	47.82	2.763.902.812	48.52	2.763.902.812	49.32	2.763.902.812	50.32	2.763.902.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				1.943.769.800		1.943.769.800		1.943.769.800		1.943.769.800		1.943.769.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	27.31	31.3	1.943.769.800	33.3	1.943.769.800	35.3	1.943.769.800	37.3	1.943.769.800	39.3	1.943.769.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.994.512.720		1.256.470.000		1.256.470.000		1.256.470.000		1.256.470.000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				656.768.870		290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	19.18	19.75	656.768.870	19.85	290.000.000	20	290.000.000	20.15	290.000.000	20.30	290.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				298.865.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	298.865.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				344.813.000		344.813.000		344.813.000		344.813.000		344.813.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	1	344.813.000	1	344.813.000	1	344.813.000	1	344.813.000	1	344.813.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				123.210.000		144.000.000		144.000.000		144.000.000		144.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	40	42	123.210.000	43	144.000.000	44	144.000.000	45	144.000.000	46	144.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				143.130.850		172.657.000		172.657.000		172.657.000		172.657.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	58.00	58.04	143.130.850	58.06	172.657.000	58.08	172.657.000	58.10	172.657.000	58.12	172.657.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				427.725.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	427.725.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	78.49	78.53		78.55		78.57		78.59		78.61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				23.322.058.263		24.134.626.063		26.129.626.063		26.094.626.063		26.169.626.063	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.095.184.000		16.295.184.000		16.355.184.000		16.295.184.000		16.370.184.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	79.6	80.1	16.095.184.000	80.35	16.295.184.000	80.60	16.355.184.000	80.85	16.295.184.000	81.1	16.370.184.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	60.04	63.08		66.06		69.04		72.02		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	0	8	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				5.894.849.263		6.449.442.063		8.449.442.063		8.449.442.063		8.449.442.063	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase AKE (%)	92.7	100	5.894.849.263	100	6.449.442.063	100	8.449.442.063	100	8.449.442.063	100	8.449.442.063	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				625.000.000		575.000.000		575.000.000		575.000.000		575.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	4	11	625.000.000	10	575.000.000	9	575.000.000	8	575.000.000	7	575.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				457.025.000		565.000.000		500.000.000		525.000.000		525.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	98	90	457.025.000	90	565.000.000	90	500.000.000	90	525.000.000	90	525.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				14.098.893.750		2.132.610.000		2.132.610.000		2.132.610.000		2.132.610.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				1.432.484.000		1.465.610.000		1.465.610.000		1.465.610.000		1.465.610.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan (%)	33	50	1.432.484.000	67	1.465.610.000	83	1.465.610.000	90	1.465.610.000	97	1.465.610.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (%)	13,89	19,44	175.000.000	25	175.000.000	30,56	175.000.000	36,11	175.000.000	41,67	175.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				12.491.409.750		492.000.000		492.000.000		492.000.000		492.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase bidang tanah Pemda yang dimanfaatkan (%)	21,67	24,44	12.491.409.750	27,22	492.000.000	30	492.000.000	32,78	492.000.000	35,56	492.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				118.433.236.335		105.256.360.400		106.399.685.400		106.550.176.650		106.708.192.463	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				48.721.425.279		49.086.613.000		49.229.938.000		49.380.429.250		49.538.445.063	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	88.36	88.37	48.721.425.279	88.38	49.086.613.000	88.39	49.229.938.000	88.40	49.380.429.250	88.41	49.538.445.063	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	58.08	55		55		55		55		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				198.409.467		276.000.000		276.000.000		276.000.000		276.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	198.409.467	100	276.000.000	100	276.000.000	100	276.000.000	100	276.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2.924.953.706		2.067.860.500		2.567.860.500		2.567.860.500		2.567.860.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	81.30	61.60	2.924.953.706	62	2.067.860.500	62.40	2.567.860.500	62.80	2.567.860.500	63	2.567.860.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air (Indeks)	42.67	65.84		66.04		66.24		66.44		66.45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	49.77	65.18		65.25		65.32		65.39		65.40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				559.540.006		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase pembangunan Taman Kehati (%)	100	10	559.540.006	20	700.000.000	30	700.000.000	40	700.000.000	50	700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				-		150.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	-	100	150.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				204.610.000		323.006.000		523.006.000		523.006.000		523.006.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang ditertibkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH (%)	98.5	72	204.610.000	75	323.006.000	80	523.006.000	82	523.006.000	85	523.006.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				550.215.988		584.025.600		584.025.600		584.025.600		584.025.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	100	550.215.988	100	584.025.600	100	584.025.600	100	584.025.600	100	584.025.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Pemenuhan Indikator Hasil Edukasi dan Pengawasan Sosial (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				212.831.816		448.048.800		648.048.800		648.048.800		648.048.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase lembaga dan/atau SDM lingkungan hidup yang telah meningkat kompetensinya (%)	91.9	100	212.831.816	100	448.048.800	100	648.048.800	100	648.048.800	100	648.048.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				27.522.400		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Jumlah Penghargaan LH untuk Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Diperoleh (%)	40	20	27.522.400	40	100.000.000	40	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				232.088.951		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penegakan hukum terhadap pelaku usaha/kegiatan (%)	100	100	232.088.951	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				64.801.638.722		51.170.806.500		51.170.806.500		51.170.806.500		51.170.806.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	42	40.7	64.801.638.722	40.9	51.170.806.500	43	51.170.806.500	43.2	51.170.806.500	43.5	51.170.806.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				33.184.670.820		37.641.293.000		39.181.293.000		39.681.293.000		40.181.293.000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28.478.126.230		30.013.972.000		31.473.972.000		31.893.972.000		32.333.972.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	85.02	85.06	28.478.126.230	85.08	30.013.972.000	85.10	31.473.972.000	85.12	31.893.972.000	85.14	32.333.972.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	49.03	51		52		53		54		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				985.307.790		1.315.378.000		1.315.378.000		1.315.378.000		1.315.378.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	3.41	6.41	985.307.790	7.91	1.315.378.000	9.41	1.315.378.000	10.91	1.315.378.000	12.41	1.315.378.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	44.14	58		61		64		67		70		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				670.174.800		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	84.61	86	670.174.800	87	950.000.000	88	950.000.000	89	950.000.000	90	950.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah (%)	71.74	71.40		72.24		72.74		73.24		73.74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai (%)	57.90	57.90		58.40		58.90		59.40		59.90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				2.301.062.000		4.361.943.000		4.441.943.000		4.521.943.000		4.581.943.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	83.87	90.32	2.301.062.000	93.55	4.361.943.000	96.77	4.441.943.000	100	4.521.943.000	100	4.581.943.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				750.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				35.477.828.000		24.648.450.000		21.648.450.000		22.648.450.000		21.648.450.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.383.059.000		11.412.009.000		11.412.009.000		11.412.009.000		11.412.009.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	79.36	79.40	11.383.059.000	79.55	11.412.009.000	79.70	11.412.009.000	79.85	11.412.009.000	80.00	11.412.009.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	46.61	46.64		47.50		48.00		49.00		50.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				1.125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2	6	1.125.000.000	10	125.000.000	14	125.000.000	18	125.000.000	22	125.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				9.516.388.000		12.233.060.000		9.233.060.000		10.233.060.000		9.233.060.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	9.516.388.000	100	12.233.060.000	100	9.233.060.000	100	10.233.060.000	100	9.233.060.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	11.10	3		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				13.328.381.000		753.381.000		753.381.000		753.381.000		753.381.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	93.00	93.00	13.328.381.000	93.00	753.381.000	93.00	753.381.000	93.00	753.381.000	93.00	753.381.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	1.42		2.13		2.84		3.55		4.26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				30.204.828.980		29.791.335.000		29.791.335.000		29.791.335.000		29.791.335.000	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.898.644.616		24.989.715.000		24.989.715.000		24.989.715.000		24.989.715.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	83.95	83.99	24.898.644.616	84.01	24.989.715.000	84.03	24.989.715.000	84.05	24.989.715.000	84.07	24.989.715.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	52.8	52.12		52.14		52.16		52.18		52.20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				218.846.600		242.000.000		242.000.000		242.000.000		242.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.21	2.19	218.846.600	2.18	242.000.000	2.17	242.000.000	2.16	242.000.000	2.15	242.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	21.4	20.5		20		19.5		19		18.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4.680.918.600		4.119.620.000		4.119.620.000		4.119.620.000		4.119.620.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	80.63	82.58	4.680.918.600	83.57	4.119.620.000	84.57	4.119.620.000	85.58	4.119.620.000	86.57	4.119.620.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8	6.5		6		5.5		5		4.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	72.41	72.50		72.55		72.60		72.65		72.70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				406.419.164		440.000.000		440.000.000		440.000.000		440.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Seiahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	56	58	406.419.164	59	440.000.000	60	440.000.000	61	440.000.000	62	440.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				109.675.906.056		89.040.878.600		93.040.878.600		93.040.878.600		93.040.878.600	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				42.105.220.192		41.717.432.000		41.985.870.000		41.897.432.000		41.897.432.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	74,26	74,36	42.105.220.192	74,41	41.717.432.000	74,46	41.985.870.000	74,51	41.897.432.000	74,56	41.897.432.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	51.6	52.10		52.35		52.60		52.85		53.10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				67.063.711.864		46.761.472.600		50.523.034.600		50.611.472.600		50.596.472.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	49.52	49.52	67.063.711.864	49.77	46.761.472.600	50.02	50.523.034.600	50.27	50.611.472.600	50.52	50.596.472.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	12.15	52.31		54.96		58.02		61.08		64.13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kebijakan Pengembangan Bidang Transportasi Yang dimanfaatkan (%)	.	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Peresentase Layanan Perizinan sektor transportasi yang terfasilitasi (%)	.	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				17.974.000		27.974.000		17.974.000		17.974.000		32.974.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi angkutan sungai dan danau	Persentase pendampingan teknis layanan angkutan sungai dan danau terfasilitasi (%)	.	100	17.974.000	100	27.974.000	100	17.974.000	100	17.974.000	100	32.974.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				489.000.000		534.000.000		514.000.000		514.000.000		514.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	32,58	32,58	489.000.000	36,84	534.000.000	42,11	514.000.000	47,37	514.000.000	52,63	514.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				30.773.465.391		31.104.195.000		33.104.195.000		33.104.195.000		33.104.195.000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.349.946.514		16.376.017.890		16.376.017.890		16.376.017.890		16.376.017.890	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	81.59	82.09	16.349.946.514	82.34	16.376.017.890	82.59	16.376.017.890	82.84	16.376.017.890	82.84	16.376.017.890	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	46.14	46.16		46.17		46.18		46.19		46.20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.164.624.214		3.159.922.818		3.159.922.818		3.159.922.818		3.159.922.818	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	3.164.624.214	100	3.159.922.818	100	3.159.922.818	100	3.159.922.818	100	3.159.922.818	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				11.258.894.663		11.568.254.292		13.568.254.292		13.568.254.292		13.568.254.292	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	11.258.894.663	100	11.568.254.292	100	13.568.254.292	100	13.568.254.292	100	13.568.254.292	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Layanan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				21.501.946.483		19.632.243.918		24.632.243.918		17.632.243.918		17.632.243.918	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.224.887.940		13.789.748.218		16.739.748.218		13.739.748.218		13.739.748.218	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	85.20	85.50	13.224.887.940	85.60	13.789.748.218	85.70	16.739.748.218	85.80	13.739.748.218	85.90	13.739.748.218	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	53.62	56		57		58		59		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang memilki izin usaha simpan pinjam (%)	0	18.77	35.000.000	17.73	35.000.000	18.39	35.000.000	19.02	35.000.000	19.57	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				610.798.802		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Koperasi Memenuhi Standar Kesehatan dan Ketentuan	Persentase Koperasi memenuhi standar dan ketentuan Koperasi (%)	0	2.70	610.798.802	2.88	600.000.000	3.05	600.000.000	3.21	600.000.000	3.36	600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				265.596.901		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Penilaian Koperasi Berdampak pada Peningkatan Produktivitas Koperasi	Persentase Rekomendasi Hasil Penilaian yang Ditindaklanjuti (%)	0	17.89	265.596.901	19.00	300.000.000	20.00	300.000.000	20.91	300.000.000	21.74	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				143.404.500		165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang Bersertifikat Kompetensi (%)	0	6.43	143.404.500	7.26	165.000.000	8.63	165.000.000	9.85	165.000.000	10.92	165.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				893.088.774		845.520.000		845.520.000		845.520.000		845.520.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya Produktivitas Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%)	0	2.04	893.088.774	2.14	845.520.000	2.17	845.520.000	2.21	845.520.000	2.25	845.520.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				4.632.376.878		2.696.160.000		4.696.160.000		696.160.000		696.160.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya Wirausaha Baru	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru (%)	7.06	14.39	4.632.376.878	15.59	2.696.160.000	16.65	4.696.160.000	17.57	696.160.000	18.37	696.160.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1.696.792.688		1.200.815.700		1.250.815.700		1.250.815.700		1.250.815.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Omset Pelaku UMKM (%)	0	12.90	968.409.299	13.70	389.947.900	14.60	439.947.900	15.60	439.947.900	16.70	439.947.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PLUT KUMKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	86.34	87.67	728.383.389	88.17	810.867.800	88.67	810.867.800	89.17	810.867.800	89.67	810.867.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				18.964.910.493		25.151.569.000		28.151.569.000		24.151.569.000		20.151.569.000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.407.541.613		21.921.569.000		24.996.569.000		20.996.569.000		16.966.569.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	49.39	50.2	16.407.541.613	50.6	21.921.569.000	51	24.996.569.000	51.4	20.996.569.000	51.8	16.966.569.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	83.92	84.2		84.3		84.4		84.5		84.6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				1.139.579.735		1.480.000.000		1.310.000.000		1.310.000.000		1.340.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Terciptanya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	100.52	100	1.139.579.735	100	1.480.000.000	100	1.310.000.000	100	1.310.000.000	100	1.340.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				441.000.000		475.000.000		475.000.000		475.000.000		475.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya Investasi PMDN dan PMA Melalui Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Persentase Investasi PMDN dan PMA yang Didorong Melalui Promosi Potensi Investasi (%)	-	5	441.000.000	5	475.000.000	5	475.000.000	5	475.000.000	5	475.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				493.903.300		700.000.000		775.000.000		775.000.000		775.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel	Nilai IKM Bidang Perizinan (poin)	84.82	88.5	493.903.300	90	700.000.000	90.5	775.000.000	91	775.000.000	91.5	775.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				457.885.845		530.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	457.885.845	100	530.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				25.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Termanfaatkannya Data dan Informasi Penanaman Modal untuk Penilaian Kinerja	Nilai Kinerja PTSP dan PPB (poin)	93.43	93.55	25.000.000	93.6	45.000.000	93.65	45.000.000	93.7	45.000.000	93.75	45.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				72.892.156.402		41.855.834.802		41.855.834.802		41.855.834.802		41.855.834.802	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.292.821.285		21.972.519.000		21.972.519.000		21.972.519.000		21.972.519.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	81.44	81.80	21.292.821.285	82	21.972.519.000	82.20	21.972.519.000	82.40	21.972.519.000	82.60	21.972.519.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	42.39	43.66		45		46.37		48.12		49.22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				7.405.876.004		5.725.000.000		5.725.000.000		5.725.000.000		5.725.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio)	0	13.5	7.405.876.004	14.9	5.725.000.000	15.8	5.725.000.000	16.5	5.725.000.000	17.5	5.725.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	0	22.29		22.79		23.29		23.79		24.29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				41.072.129.113		13.158.315.802		13.158.315.802		13.158.315.802		13.158.315.802	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Angka partisipasi Masyarakat Olahraga (APMO) (%)	68.70	70.35	41.072.129.113	71.70	13.158.315.802	73.40	13.158.315.802	75.22	13.158.315.802	77.22	13.158.315.802	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda atau Pelatnas (%)	0	1.08		13.60		2.12		15		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				3.121.330.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Anggota Pramuka yang Tersertifikasi (%)	0	30	3.121.330.000	32	1.000.000.000	34	1.000.000.000	36	1.000.000.000	40	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.225.766.459		1.282.787.000		1.282.787.000		1.282.787.000		1.282.787.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				1.225.766.459		1.282.787.000		1.282.787.000		1.282.787.000		1.282.787.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	1.225.766.459	100	1.282.787.000	100	1.282.787.000	100	1.282.787.000	100	1.282.787.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.874.450.500		1.438.366.000		1.438.366.000		1.438.366.000		1.438.366.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				1.874.450.500		1.438.366.000		1.438.366.000		1.438.366.000		1.438.366.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Penurunan Serangan Cyber (%)	69.92	70.54	1.874.450.500	71.32	1.438.366.000	72.09	1.438.366.000	72.87	1.438.366.000	73.64	1.438.366.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				13.555.625.365		12.136.741.990		13.136.741.990		13.136.741.990		13.136.741.990	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.456.273.715		9.948.390.340		10.948.390.340		10.948.390.340		10.948.390.340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	62	9.456.273.715	63	9.948.390.340	64	10.948.390.340	65	10.948.390.340	66	10.948.390.340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	61		62		63		64		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2.986.520.250		1.075.520.250		1.075.520.250		1.075.520.250		1.075.520.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2	2	2.986.520.250	3	1.075.520.250	3	1.075.520.250	4	1.075.520.250	5	1.075.520.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				250.831.400		250.831.400		250.831.400		250.831.400		250.831.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Presentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	0	39	250.831.400	44	250.831.400	49	250.831.400	54	250.831.400	60	250.831.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi seiarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				662.000.000		662.000.000		662.000.000		662.000.000		662.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	0	24	662.000.000	29	662.000.000	33	662.000.000	38	662.000.000	43	662.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	0	100.000.000	0	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				18.661.463.458		19.693.554.367		19.693.554.367		19.693.554.367		19.693.554.367	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.362.244.669		13.229.567.167		13.229.567.167		13.229.567.167		13.229.567.167	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	52.06	13.362.244.669	52.07	13.229.567.167	52.08	13.229.567.167	52.09	13.229.567.167	52.10	13.229.567.167	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	80.25	80.35		80.40		80.45		80.50		80.55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				5.268.489.189		6.383.266.880		6.383.266.880		6.383.266.880		6.383.266.880	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Dibina (%)	0	3.6	5.268.489.189	4.8	6.383.266.880	6	6.383.266.880	7.2	6.383.266.880	8.4	6.383.266.880	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (%)	87.14	87.24		87.29		87.34		87.39		87.44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				30.729.600		80.720.320		80.720.320		80.720.320		80.720.320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	100	100	30.729.600	100	80.720.320	100	80.720.320	100	80.720.320	100	80.720.320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				168.798.093		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				142.831.857		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	100	100	142.831.857	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				14.169.238		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100	100	14.169.238	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				11.796.998		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	100	100	11.796.998	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.197.377.900		3.097.534.200		3.102.534.200		3.137.534.200		3.062.534.200	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	3.30	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				5.699.739.200		2.158.637.000		2.198.637.000		2.233.637.000		2.158.637.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produksi perikanan budidava	Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	3.45	3	5.699.739.200	3	2.158.637.000	3	2.198.637.000	3	2.233.637.000	3	2.158.637.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				120.000.000		155.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah Sentra/Kampung Berbasis Perikanan yang Memenuhi Standar (Sentra)	1	2	120.000.000	3	155.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1.227.638.700		633.897.200		633.897.200		633.897.200		633.897.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase peningkatan produksi hasil olahan perikanan (%)	0	3	1.227.638.700	3	633.897.200	3	633.897.200	3	633.897.200	3	633.897.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	16.9	14.45		14.96		15.48		16.02		16.58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				21.518.981.920		22.293.010.400		22.293.010.400		21.293.010.400		21.293.010.400	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.469.226.120		16.523.254.600		16.523.254.600		15.523.254.600		15.523.254.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	65	67	15.469.226.120	68	16.523.254.600	69	16.523.254.600	70	15.523.254.600	71	15.523.254.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	61		62		63		64		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				2.624.316.200		2.474.316.200		2.474.316.200		2.474.316.200		2.474.316.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0	3	2.624.316.200	3	2.474.316.200	3	2.474.316.200	3	2.474.316.200	3	2.474.316.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1.625.439.600		1.675.439.600		1.675.439.600		1.675.439.600		1.675.439.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	3.79	1.625.439.600	6.71	1.675.439.600	9.62	1.675.439.600	12.83	1.675.439.600	16.03	1.675.439.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				455.000.000		455.000.000		455.000.000		455.000.000		455.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	5.17	455.000.000	6.06	455.000.000	6.94	455.000.000	7.82	455.000.000	8.70	455.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				1.345.000.000		1.165.000.000		1.165.000.000		1.165.000.000		1.165.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekraf yang Aktif dan Tervalidasi (%)	2.54	5.56	1.345.000.000	7.58	1.165.000.000	9.61	1.165.000.000	11.63	1.165.000.000	13.65	1.165.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				109.875.769.489		84.341.693.189		89.341.693.189		89.341.693.189		94.341.693.189	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				45.983.501.278		46.675.923.000		46.675.923.000		46.675.923.000		46.675.923.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko (Poin)	50.71	52.71	45.983.501.278	53.71	46.675.923.000	54.71	46.675.923.000	55.71	46.675.923.000	56.71	46.675.923.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	78.06	79.06		79.56		80.06		80.56		81.06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				24.080.268.211		11.699.397.643		10.466.585.143		10.925.960.143		11.354.483.111	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	-	0.19	24.080.268.211	0.10	11.699.397.643	0.17	10.466.585.143	0.25	10.925.960.143	0.08	11.354.483.111	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	-	0.55		0.44		0.44		0.55		0.44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	-	1.99		2.12		2.05		2.12		2.16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Peternakan (%)	-	0.12		0.12		0.13		0.13		0.13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Alat Mesin Pertanian yang dapat digunakan dengan baik (%)	0	89.26		89.31		89.35		89.42		89.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Benih di UPTD (%)	0	80		93.33		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Bibit Sapi (%)	0	19		3		6		6		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5.220.000.000		2.690.092.880		3.912.620.651		3.387.072.151		7.879.127.961	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan jadi LP2B (%)	0	58.74	5.220.000.000	58.74	2.690.092.880	58.74	3.912.620.651	58.74	3.387.072.151	58.74	7.879.127.961	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Lahan Pertanian yang difasilitasi pembangunan prasarana pertanian ()	-	0.33		0.50		0.81		0.97		1.14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana RPH sesuai Standar Teknis (%)	0	88		91		91		94		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				2.708.000.000		2.876.279.666		2.886.564.395		2.952.737.895		3.032.159.117	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	-	76.82	2.708.000.000	77.53	2.876.279.666	78.24	2.886.564.395	78.94	2.952.737.895	79.65	3.032.159.117	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	-	2.26		2.31		2.36		2.42		2.48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase produk hewan yang berkriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) (%)	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kesembuhan Hewan dari Pelayanan Puskeswan (%)	-	91.46		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ternak yang diperiksa kesehatannya sebelum dan saat transaksi di pasar hewan (%)	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				-		-		-		-		-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				-		-		-		-		-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				-		-		-		-		-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian				-		-		-		-		-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				31.884.000.000		20.400.000.000		25.400.000.000		25.400.000.000		25.400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Keaktifan Kelompok Petani (%)	-	97.06	31.884.000.000	97.06	20.400.000.000	97.06	25.400.000.000	97.06	25.400.000.000	97.06	25.400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				161.767.200		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				161.767.200		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola (%)	80	80	161.767.200	80	350.000.000	80	350.000.000	80	350.000.000	80	350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				44.063.146.618		41.780.060.000		51.780.060.000		48.780.060.000		47.780.060.000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				37.684.568.800		37.582.682.000		47.582.682.000		39.582.682.000		37.582.682.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	82	83	37.684.568.800	83.4	37.582.682.000	83.8	47.582.682.000	84.2	39.582.682.000	84.6	37.582.682.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	56.71	57		57.5		58		58.5		59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				141.957.374		233.500.000		233.500.000		233.500.000		233.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi (%)	-	65	141.957.374	65	233.500.000	65	233.500.000	65	233.500.000	65	233.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				2.019.962.000		2.037.500.000		2.037.500.000		7.037.500.000		8.037.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	-	44	2.019.962.000	44	2.037.500.000	44	2.037.500.000	44	7.037.500.000	44	8.037.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				2.262.911.700		815.000.000		815.000.000		815.000.000		815.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting (%)	2.952	3	2.262.911.700	3	815.000.000	3	815.000.000	3	815.000.000	3	815.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				888.602.050		411.378.000		411.378.000		411.378.000		411.378.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Non Migas (US$)	1683417519.73	950853317	888.602.050	960267706	411.378.000	969682095	411.378.000	979096485	411.378.000	988510875	411.378.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				569.777.200		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	-	100	569.777.200	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				495.367.494		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	11.12	7.41	495.367.494	7.41	250.000.000	7.41	250.000.000	7.41	250.000.000	7.41	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN				4.598.065.695		2.725.000.000		2.725.000.000		5.725.000.000		3.725.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BIDANG PERINDUSTRIAN													
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				4.178.956.200		2.225.000.000		2.225.000.000		5.225.000.000		3.225.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Peningkatan Sentra Industri (%)	17.65	41	4.178.956.200	52	2.225.000.000	64	2.225.000.000	76	5.225.000.000	88	3.225.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				167.429.400		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Indeks Pertumbuhan Izin Industri di Kabupaten Bandung (poin)	-	1.09	167.429.400	1.14	200.000.000	1.19	200.000.000	1.24	200.000.000	1.29	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				251.680.095		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	-	33	251.680.095	33	300.000.000	33	300.000.000	33	300.000.000	33	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				69.646.250		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				69.646.250		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
Terlaksananya penjajagan lokasi transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi (Lokasi)	1	1	69.646.250	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				129.032.004.443		91.981.622.443		96.981.622.443		96.981.622.443		97.356.622.443	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				86.495.797.443		75.290.415.443		75.290.415.443		75.290.415.443		75.665.415.443	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	87.44	87.46	86.495.797.443	87.47	75.290.415.443	87.48	75.290.415.443	87.49	75.290.415.443	87.50	75.665.415.443	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	52.21	52.21		52.22		52.23		52.24		52.25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				38.795.000.000		13.250.000.000		18.250.000.000		18.250.000.000		18.250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	100	100	38.795.000.000	100	13.250.000.000	100	18.250.000.000	100	18.250.000.000	100	18.250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Capaian Skor LPPD (Skor)	-	3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.741.207.000		3.441.207.000		3.441.207.000		3.441.207.000		3.441.207.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ (Poin)	40	40	3.741.207.000	40	3.441.207.000	40	3.441.207.000	40	3.441.207.000	40	3.441.207.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Bahan Perumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				107.800.230.000		125.000.230.000		125.000.230.000		125.000.230.000		125.000.230.000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				87.805.400.512		87.975.730.000		87.975.730.000		87.564.556.067		87.813.022.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	71.83	73	87.805.400.512	74	87.975.730.000	75	87.975.730.000	76	87.564.556.067	77	87.813.022.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	48.12	50		51		52		53		54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				19.994.829.488		37.024.500.000		37.024.500.000		37.435.673.933		37.187.207.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Terfasilitasinya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	80	19.994.829.488	85	37.024.500.000	90	37.024.500.000	95	37.435.673.933	100	37.187.207.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD (%)	100	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN				25.000.201.200		25.000.201.200		25.000.201.200		26.000.201.200		26.000.201.200	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.769.731.000		19.769.731.000		19.769.731.000		19.769.731.000		19.769.731.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	83.64	83.74	19.769.731.000	83.79	19.769.731.000	83.84	19.769.731.000	83.89	19.769.731.000	83.94	19.769.731.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	50.26	50.36		50.41		50.46		50.51		50.56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.760.090.200		2.760.090.200		2.760.090.200		3.010.090.200		3.010.090.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD (%)	100	91	2.760.090.200	92	2.760.090.200	93	2.760.090.200	94	3.010.090.200	95	3.010.090.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	91		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.470.380.000		2.470.380.000		2.470.380.000		3.220.380.000		3.220.380.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia, bidang perekonomian dan SDA, dan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	2.470.380.000	100	2.470.380.000	100	2.470.380.000	100	3.220.380.000	100	3.220.380.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN				1.090.518.876.751		1.122.131.700.915		1.126.314.609.491		1.130.287.967.963		1.132.312.579.623	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				120.218.868.732		117.633.960.785		118.262.337.545		118.902.335.697		119.554.178.209	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	50.76	55	33.601.132.000	56	34.524.431.000	57	34.524.431.000	58	34.524.431.000	59	34.524.431.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	86.34	87		88		89		90		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	85	87.46	86.617.736.732	88.06	83.109.529.785	88.66	83.737.906.545	89.26	84.377.904.697	89.86	85.029.747.209	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (BADAN PENDAPATAN DAERAH)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	50	56.94		57.74		58.54		59.34		60.14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (BADAN PENDAPATAN DAERAH)
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				951.109.648.019		991.057.380.130		994.611.911.946		997.945.272.266		999.318.041.414	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	-	32	949.886.961.019	30	989.834.693.130	30	993.389.224.946	30	996.722.585.266	30	998.095.354.414	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	-	34		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	-	95	466.065.000	95	466.065.000	95	466.065.000	95	466.065.000	95	466.065.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-	1,27		1,28		1,3		1,32		1,32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Akutansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	756.622.000	100	756.622.000	100	756.622.000	100	756.622.000	100	756.622.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.487.944.000		1.487.944.000		1.487.944.000		1.487.944.000		1.487.944.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	-	6	1.487.944.000	6	1.487.944.000	6	1.487.944.000	6	1.487.944.000	6	1.487.944.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				17.702.416.000		11.952.416.000		11.952.416.000		11.952.416.000		11.952.416.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan dan Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	31	31.94	17.702.416.000	32.25	11.952.416.000	32.63	11.952.416.000	33	11.952.416.000	33.35	11.952.416.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	3	3.09		3.11		3.14		3.17		3.20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	11	13		15		18		20		23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai IKM (poin)	83.5	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)	50.30	50.50		50.60		50.70		50.80		50.90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN				34.185.493.000		34.060.914.000		34.060.914.000		34.060.914.000		34.060.914.000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				30.366.142.300		30.665.158.000		30.665.158.000		30.665.158.000		30.665.158.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	80.29	80.80	30.366.142.300	81.10	30.665.158.000	81.40	30.665.158.000	81.70	30.665.158.000	82	30.665.158.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	63.51	63.70		63.80		63.90		64		64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				3.819.350.700		3.395.756.000		3.395.756.000		3.395.756.000		3.395.756.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kinerja Manajemen Pelayanan ASN	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN (%)	99.50	90	3.819.350.700	90	3.395.756.000	90	3.395.756.000	90	3.395.756.000	90	3.395.756.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.154.964.000		5.794.964.000		7.794.964.000		9.178.485.426		9.178.485.427	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5.154.964.000		5.794.964.000		7.794.964.000		9.178.485.426		9.178.485.427	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN (%)	41.03	53.03	5.154.964.000	60.03	5.794.964.000	68.03	7.794.964.000	77.03	9.178.485.426	86.03	9.178.485.427	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				-		-		-		-		-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan				-		-		-		-		-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya riset yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah				-		-		-		-		-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah				-		-		-		-		-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	26.45	28.85	2.700.000.000	29.09	2.700.000.000	29.31	2.700.000.000	29.51	2.700.000.000	29.69	2.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya riset yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Persentase Riset yang tersedia dalam dokumen Perencanaan (%)	0	75	-	81	-	88	-	94	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				44.399.885.385		39.032.754.304		42.032.754.304		42.032.754.304		42.032.754.304	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				36.386.061.382		33.632.632.248		33.632.632.248		33.632.632.248		33.632.632.248	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	60.78	61.10	36.386.061.382	61.35	33.632.632.248	61.60	33.632.632.248	61.85	33.632.632.248	62.10	33.632.632.248	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	84.00	85.85		86.10		86.35		86.60		86.85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				4.624.203.280		2.664.718.065		3.664.718.065		3.664.718.065		3.664.718.065	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Menurunnya terjadi penyelewangan atau penyimpangan, baik bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1 (%)	78.50	79.50	4.624.203.280	80.00	2.664.718.065	80.50	3.664.718.065	81.00	3.664.718.065	81.50	3.664.718.065	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	82.3	84		84.25		84.50		85.75		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3.389.620.723		2.735.403.991		4.735.403.991		4.735.403.991		4.735.403.991	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Nilai Hasil Penilaian Mandiri PK APIP (Poin)	3.46	3.56	3.389.620.723	3.61	2.735.403.991	3.66	4.735.403.991	3.71	4.735.403.991	3.76	4.735.403.991	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai Maturitas Hasil Penilaian Mandiri SPIP PD (Poin)	3.876	3.896		3.906		3.916		3.926		3.936		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) (%)	92.65	92.90		93.00		93.20		93.40		93.60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN				223.645.582.292		213.045.582.292		216.145.582.292		217.695.582.292		223.645.564.292	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				175.705.765.759		170.435.107.988		170.435.107.988		170.435.107.988		170.435.107.988	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61	5.280.481.224	63.50	5.258.223.736	66.00	5.258.223.736	68.50	5.258.223.736	71.00	5.258.223.736	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILEUNYI)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	43.00		44.00		46.00		47.00		48.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILEUNYI)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	62	5.135.045.162	64	4.978.773.300	66	4.978.773.300	68	4.978.773.300	71	4.978.773.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILENGKRANG)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	42.87	48		52		56		60		64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILENGKRANG)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61.20	7.181.381.000	61.40	7.181.381.000	61.60	7.181.381.000	61.80	7.181.381.000	62	7.181.381.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMENYAN)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	37.48	39.00		40.00		41.00		42.00		43.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMENYAN)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61	4.573.602.588	62	4.288.870.000	63	4.288.870.000	64	4.288.870.000	65	4.288.870.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BOJONGSOANG)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	56,5		57		57.5		58		58.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BOJONGSOANG)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61	6.798.011.852	61.05	6.287.585.100	61.02	6.287.585.100	61.11	6.287.585.100	62	6.287.585.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAHAYU)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	65		65.4		65.11		65.95		66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAHAYU)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	60	61	5.002.523.008	61.5	4.953.247.000	62	4.953.247.000	62.5	4.953.247.000	63	4.953.247.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAASIH)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	45.28	46		47		48		49		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAASIH)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61	6.709.387.000	64	6.609.387.000	68	6.609.387.000	70	6.609.387.000	71	6.609.387.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN DAYEUHKOLOT)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	42.90		43		43.20		43.30		43.40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN DAYEUHKOLOT)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	58.50	5.546.783.408	59.00	5.305.713.000	59.50	5.305.713.000	60.00	5.305.713.000	60.50	5.305.713.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KATAPANG)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	43.78	47.00		49.00		51.00		53.00		55.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KATAPANG)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	60	63	4.594.111.435	65.50	4.556.544.035	69	4.556.544.035	71	4.556.544.035	72	4.556.544.035	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PAMEUNGPEUK)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	51.26	52.50		53.00		53.50		54.00		54.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PAMEUNGPEUK)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	-	61	4.840.831.900	63.5	4.752.988.000	66	4.752.988.000	68.5	4.752.988.000	71	4.752.988.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN ARJASARI)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	36.42	37		38		39		40		41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN ARJASARI)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61.00	5.130.518.800	61.50	5.057.747.000	62.00	5.057.747.000	62.50	5.057.747.000	63.00	5.057.747.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PANGALENGAN)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	40.30		40.40		40.50		40.60		40.70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PANGALENGAN)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61	4.996.922.390	63	4.968.912.390	66	4.968.912.390	69	4.968.912.390	71	4.968.912.390	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMAUNG)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	46.09	46.2		46.3		46.4		46.5		46.6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMAUNG)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	55.80	5.967.585.537	57.80	5.545.938.000	59.80	5.545.938.000	61.80	5.545.938.000	63.80	5.545.938.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BANJARAN
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	34.26	36.80		38.80		40.80		42.80		44.80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BANJARAN
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	-	60	4.843.345.000	60.50	4.609.945.000	61	4.609.945.000	61.50	4.609.945.000	62	4.609.945.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CICALENGKA)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	50	60		60.50		70		70.50		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CICALENGKA)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	-	61	6.906.052.000	63	6.627.331.769	65	6.627.331.769	68	6.627.331.769	71	6.627.331.769	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCAEKEK)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	-	45		50		55		60		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCAEKEK)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	60	5.648.934.371	60.5	5.492.471.000	61	5.492.471.000	61.5	5.492.471.000	62	5.492.471.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIKANCUNG)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	70		71		72		73		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIKANCUNG)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	63	5.781.463.825	65	5.525.689.868	67	5.525.689.868	69	5.525.689.868	71	5.525.689.868	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN NAGREG)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	50.86	51.00		52.00		53.00		54.00		55.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN NAGREG)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	60	63	15.988.137.000	64.5	14.630.251.000	66	14.630.251.000	70.71	14.630.251.000	71.50	14.630.251.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BALEENDAH)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	41.79	44		46		48		50		52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BALEENDAH)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	60	4.741.988.000	61	4.712.988.000	62	4.712.988.000	63	4.712.988.000	64	4.712.988.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PACET)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	35.26	40		44		48		52		56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PACET)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61	4.911.263.300	63.5	4.835.062.000	66	4.835.062.000	68.5	4.835.062.000	71	4.835.062.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KERTASARI)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	42.57	42.70		42.80		42.90		43		43.10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KERTASARI)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61	5.114.529.160	64	5.122.904.080	67	5.122.904.080	71	5.122.904.080	71.5	5.122.904.080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIPARAY)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	44.15		44.25		44.35		44.45		44.55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIPARAY)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61	4.696.572.800	61.10	4.474.982.400	61.20	4.474.982.400	61.30	4.474.982.400	61.40	4.474.982.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MAJALAYA)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	51.11	51.30		51.40		51.50		51.60		51.70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MAJALAYA)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	63	5.362.535.000	66	5.362.535.000	69	5.362.535.000	71	5.362.535.000	71.25	5.362.535.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN IBUN)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	11,36	31		32		33		34		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN IBUN)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	62	4.864.145.000	64	4.864.145.000	67	4.864.145.000	71	4.864.145.000	71.5	4.864.145.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASEH)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	48,32		50		51,68		53,36		55,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASEH)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	-	61	4.960.759.000	64	4.862.399.000	67	4.862.399.000	71	4.862.399.000	71.50	4.862.399.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOLOKAN JERUK)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	-	43		43.25		43.50		43.75		44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOLOKAN JERUK)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	60.00	61.00	4.563.721.150	61.50	4.461.430.000	62.00	4.461.430.000	62.50	4.461.430.000	63.00	4.461.430.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASIRJAMBU)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	34.40	35.20		35.50		35.80		36.00		36.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASIRJAMBU)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61.00	4.608.507.824	61.50	4.576.024.710	62.00	4.576.024.710	62.50	4.576.024.710	63.00	4.576.024.710	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIWIDEY)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	53.26	53.66		53.86		54.06		54.26		54.46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIWIDEY)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61	4.984.649.278	62	4.799.416.000	63	4.799.416.000	64	4.799.416.000	65	4.799.416.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCABALI)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	0	49.56		49.57		49.58		49.59		49.60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCABALI)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61.05	6.026.421.200	63.5	5.934.041.200	66.5	5.934.041.200	71	5.934.041.200	71.05	5.934.041.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOREANG)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	13.80	35		40		45		50		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOREANG)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	62.20	4.621.014.608	64.40	4.562.017.000	66.60	4.562.017.000	68.80	4.562.017.000	71.00	4.562.017.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CANGKUANG)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	48.45	49.35		50.00		50.50		51.00		51.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CANGKUANG)
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61.25	5.324.541.939	61.50	5.236.165.400	61.75	5.236.165.400	62.00	5.236.165.400	62.50	5.236.165.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KUTAWARINGIN)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	43.29	43.45		43.65		43.85		44.00		44.10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KUTAWARINGIN)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.394.460.740		8.555.286.944		12.958.969.744		13.880.612.644		20.488.969.744	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	194.124.200	100	296.997.764	100	436.884.964	100	504.144.414	100	765.004.294	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILEUNYI)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	85	89	214.774.900	91	228.983.200	93	324.188.000	95	332.124.300	97	458.476.220	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILENGKRANG)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	70.97	74	584.830.179	76	217.634.000	78	415.190.000	80	450.582.250	82	662.229.650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMENYAN)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	0	100	309.000.960	100	313.324.600	100	416.443.000	100	468.625.900	100	667.283.260	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BOJONGSOANG)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	499.403.181	100	282.522.000	100	361.510.000	100	401.481.750	100	553.651.950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAHAYU)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	230.809.300	100	80.000.000	100	438.092.000	100	80.000.000	100	727.782.940	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAASIH)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	92	147.665.588	92	100.680.000	92	333.492.000	92	372.673.100	92	521.833.340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN DAYEUHKOLOT)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	292.353.967	100	315.122.800	100	404.874.000	100	450.292.450	100	623.197.930	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KATAPANG)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	235.544.357	100	99.291.400	100	234.843.400	100	262.955.400	100	369.976.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PAMEUNGPEUK)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	-	100	352.949.946	100	383.154.200	100	499.987.000	100	559.110.050	100	784.188.170	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN ARJASARI)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	490.866.184	100	320.243.800	100	631.683.000	100	627.054.450	100	1.094.935.130	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PANGALENGAN)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	300.335.393	100	220.612.880	100	227.830.480	100	329.376.080	100	433.503.120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMAUNG)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	85.000.000	100	315.989.200	100	431.086.000	100	489.330.550	100	711.064.270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BANJARAN)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	237.772.261	100	397.280.800	100	495.712.000	100	545.522.950	100	735.150.430	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CICALENGKA)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	540.158.451	100	523.270.000	100	731.850.000	100	801.111.250	100	1.122.468.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCAEKEK)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	382.997.200	100	288.088.800	100	354.404.000	100	387.962.700	100	515.718.780	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIKANCUNG)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	210.000.000	100	233.663.200	100	312.756.000	100	342.720.300	100	480.827.420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN NAGREG)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	164.549.166	100	410.182.500	100	582.393.700	100	669.540.900	100	1.001.305.380	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BALEENDAH)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	423.422.483	100	353.750.000	100	462.250.000	100	517.156.250	100	726.181.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PACET)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	250.017.008	100	222.908.800	100	320.924.000	100	355.463.950	100	535.025.030	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KERTASARI)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	440.305.900	100	282.790.200	100	636.287.000	100	656.494.050	100	1.021.837.770	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIPARAY)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	313.243.406	100	346.020.200	100	456.950.600	100	513.086.750	100	726.793.910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MAJALAYA)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	60	260.850.655	70	154.405.200	80	344.366.000	90	334.769.550	100	514.548.870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN IBUN)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	389.814.700	100	344.003.900	100	550.420.700	100	604.272.750	100	809.284.470	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASEH)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	-	81.25	205.000.000	81.25	234.708.400	81.25	329.322.000	81.25	364.549.850	81.25	498.660.290	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOLOKAN JERUK)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	371.499.000	100	352.432.800	100	478.468.000	100	524.596.700	100	724.240.780	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASIRJAMBU)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	311.596.233	100	269.818.700	100	359.743.500	100	405.249.800	100	578.489.720	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIWIDEY)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	255.685.209	100	121.720.000	100	270.490.000	100	295.527.250	100	390.842.650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCABALI)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	292.798.469	100	373.768.200	100	483.681.800	100	520.553.400	100	710.158.840	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOREANG)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	0	100	240.421.544	100	190.301.600	100	255.228.000	100	288.083.900	100	413.164.460	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CANGKUANG)
	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	100	100	166.670.900	100	281.617.800	100	377.618.600	100	426.199.650	100	611.144.970	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KUTAWARINGIN)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				31.257.906.168		27.358.997.370		27.358.997.370		27.358.997.370		27.358.997.370	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	181.077.171	100	50.480.000	100	50.480.000	100	50.480.000	100	50.480.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILEUNYI)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	80	84	125.283.900	86	77.000.000	88	77.000.000	90	77.000.000	92	77.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILENGKRANG)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	93.80	94.20	6.335.352.268	94.40	5.839.000.000	94.60	5.839.000.000	94.80	5.839.000.000	95	5.839.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMENYAN)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	0	100	142.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BOJONGSOANG)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	1.676.644.856	100	1.606.599.900	100	1.606.599.900	100	1.606.599.900	100	1.606.599.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAHAYU)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	249.121.730	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAASIH)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	92	2.445.350.000	92	2.375.350.000	92	2.375.350.000	92	2.375.350.000	92	2.375.350.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN DAYEUHKOLOT)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	172.290.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KATAPANG)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	52.281.200	100	52.281.200	100	52.281.200	100	52.281.200	100	52.281.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PAMEUNGPEUK)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	-	100	239.735.000	100	177.735.000	100	177.735.000	100	177.735.000	100	177.735.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN ARJASARI)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	325.330.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	100	155.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PANGALENGAN)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	145.993.228	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMAUNG)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	107.000.000	100	101.000.000	100	101.000.000	100	101.000.000	100	101.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BANJARAN)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	339.450.000	100	112.204.000	100	112.204.000	100	112.204.000	100	112.204.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CICALENGKA)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	2.763.000.000	100	2.730.000.000	100	2.730.000.000	100	2.730.000.000	100	2.730.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCAEKEK)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	142.480.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIKANCUNG)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	135.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN NAGREG)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	13.491.748.200	100	12.501.276.970	100	12.501.276.970	100	12.501.276.970	100	12.501.276.970	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BALEENDAH)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	171.000.000	100	93.000.000	100	93.000.000	100	93.000.000	100	93.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PACET)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	180.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KERTASARI)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	36.36	36.36	200.621.000	36.36	104.375.300	36.36	104.375.300	36.36	104.375.300	36.36	104.375.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIPARAY)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	245.892.000	100	82.500.000	100	82.500.000	100	82.500.000	100	82.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MAJALAYA)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	60	235.000.000	70	187.000.000	80	187.000.000	90	187.000.000	100	187.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN IBUN)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	205.571.492	100	82.000.000	100	82.000.000	100	82.000.000	100	82.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASEH)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	-	100	131.221.123	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOLOKAN JERUK)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	217.118.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASIRJAMBU)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	50.400.000	100	42.300.000	100	42.300.000	100	42.300.000	100	42.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIWIDEY)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	109.940.000	100	44.895.000	100	44.895.000	100	44.895.000	100	44.895.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCABALI)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	186.090.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOREANG)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	0	100	97.960.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CANGKUANG)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	100	100	157.955.000	100	141.000.000	100	141.000.000	100	141.000.000	100	141.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KUTAWARINGIN)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.527.024.400		1.061.000.600		1.061.000.600		1.061.000.600		1.061.000.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	52.187.000	100	30.857.300	100	30.857.300	100	30.857.300	100	30.857.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILEUNYI)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	70	78	66.840.000	82	28.725.000	86	28.725.000	90	28.725.000	94	28.725.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILENGKRANG)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	97.18	97.60	30.000.000	97.80	30.000.000	98	30.000.000	98.20	30.000.000	98.40	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMENYAN)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	37.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BOJONGSOANG)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	29.239.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAHAYU)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	50.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAASIH)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	92	20.920.000	92	20.920.000	92	20.920.000	92	20.920.000	92	20.920.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN DAYEUHKOLOT)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	24.790.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KATAPANG)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	26.234.000	100	11.445.300	100	11.445.300	100	11.445.300	100	11.445.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PAMEUNGPEUK)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	-	100	27.235.000	100	45.235.000	100	45.235.000	100	45.235.000	100	45.235.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN ARJASARI)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PANGALENGAN)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMAUNG)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BANJARAN)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	66.912.000	100	66.912.000	100	66.912.000	100	66.912.000	100	66.912.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CICALENGKA)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	50.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCAEKEK)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	30.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIKANCUNG)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN NAGREG)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	82.926.400	100	33.286.000	100	33.286.000	100	33.286.000	100	33.286.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BALEENDAH)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	70.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PACET)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	35.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KERTASARI)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	161.231.000	100	43.000.000	100	43.000.000	100	43.000.000	100	43.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIPARAY)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	26.200.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MAJALAYA)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	74.000.000	100	74.000.000	100	74.000.000	100	74.000.000	100	74.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN IBUN)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASEH)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	-	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOLOKAN JERUK)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASIRJAMBU)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	30.000.000	100	20.800.000	100	20.800.000	100	20.800.000	100	20.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIWIDEY)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	57.510.000	100	56.320.000	100	56.320.000	100	56.320.000	100	56.320.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCABALI)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	61.700.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOREANG)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	100	31.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CANGKUANG)
	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	64.100.000	100	27.500.000	100	27.500.000	100	27.500.000	100	27.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KUTAWARINGIN)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				3.234.825.423		2.265.036.250		2.265.036.250		2.265.036.250		2.265.036.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	171.314.900	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILEUNYI)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	95	97	154.410.000	98	48.760.000	99	48.760.000	100	48.760.000	100	48.760.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILENGKRANG)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	41.88	42.20	67.522.000	42.40	67.522.000	42.60	67.522.000	42.80	67.522.000	43	67.522.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMENYAN)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	100	98.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BOJONGSOANG)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	97.500.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAHAYU)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	71.998.373	100	54.500.000	100	54.500.000	100	54.500.000	100	54.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAASIH)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	92	98.200.000	92	74.800.000	92	74.800.000	92	74.800.000	92	74.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN DAYEUHKOLOT)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	77.200.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KATAPANG)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	112.100.000	100	62.679.000	100	62.679.000	100	62.679.000	100	62.679.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PAMEUNGPEUK)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	-	100	118.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN ARJASARI)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	145.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PANGALENGAN)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	125.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMAUNG)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	144.976.650	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BANJARAN)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	82.308.000	100	82.308.000	100	82.308.000	100	82.308.000	100	82.308.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CICALENGKA)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCAEKEK)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	35.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIKANCUNG)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	80.000.000	100	44.000.000	100	44.000.000	100	44.000.000	100	44.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN NAGREG)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	153.084.400	100	90.081.250	100	90.081.250	100	90.081.250	100	90.081.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BALEENDAH)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	130.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PACET)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	90.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KERTASARI)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	128.415.400	100	85.500.000	100	85.500.000	100	85.500.000	100	85.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIPARAY)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	118.000.000	100	83.000.000	100	83.000.000	100	83.000.000	100	83.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MAJALAYA)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	100	87.000.000	100	87.000.000	100	87.000.000	100	87.000.000	100	87.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN IBUN)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	132.000.000	100	122.000.000	100	122.000.000	100	122.000.000	100	122.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASEH)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	-	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOLOKAN JERUK)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	124.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASIRJAMBU)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	89.560.000	100	89.560.000	100	89.560.000	100	89.560.000	100	89.560.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIWIDEY)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	94.644.300	100	43.326.000	100	43.326.000	100	43.326.000	100	43.326.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCABALI)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOREANG)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	0	100	71.928.300	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CANGKUANG)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	81.663.100	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KUTAWARINGIN)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.525.599.802		3.370.153.140		2.066.470.340		2.694.827.440		2.036.470.340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	81.796.012	100	54.970.000	100	49.970.000	100	50.970.000	100	49.970.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILEUNYI)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	59.700.000	100	95.300.000	100	55.300.000	100	75.300.000	100	55.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CILENGKRANG)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	42.56	42.90	91.000.000	43.10	187.000.000	43.30	91.000.000	43.50	107.000.000	43.70	91.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMENYAN)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	64.440.000	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BOJONGSOANG)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	45.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAHAYU)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	35.000.000	100	268.002.400	100	29.000.000	100	447.357.100	100	29.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MARGAASIH)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	40.000.000	100	195.386.400	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN DAYEUHKOLOT)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	54.200.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KATAPANG)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	48.145.000	100	124.000.000	100	44.000.000	100	44.000.000	100	44.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PAMEUNGPEUK)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	-	100	90.248.000	100	90.248.000	100	90.248.000	100	90.248.000	100	90.248.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN ARJASARI)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	75.000.000	100	199.000.000	100	78.000.000	100	179.000.000	100	78.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PANGALENGAN)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	66.475.000	100	56.000.000	100	121.000.000	100	56.000.000	100	91.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIMAUNG)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	59.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BANJARAN)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	93.238.000	100	93.238.000	100	93.238.000	100	93.238.000	100	93.238.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CICALENGKA)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	151.378.000	100	199.378.000	100	151.378.000	100	163.378.000	100	151.378.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCAEKEK)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	80.000.000	100	46.880.000	100	46.880.000	100	46.880.000	100	46.880.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIKANCUNG)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	61.000.000	100	61.000.000	100	51.000.000	100	56.000.000	100	51.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN NAGREG)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	99.518.400	100	47.336.250	100	47.336.250	100	47.336.250	100	47.336.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN BALEENDAH)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	123.000.000	100	61.500.000	100	61.500.000	100	61.500.000	100	61.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PACET)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	75.000.000	100	65.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KERTASARI)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	92.575.000	100	268.000.000	100	73.000.000	100	133.000.000	100	73.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIPARAY)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	85.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN MAJALAYA)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	140.000.000	100	200.000.000	100	80.000.000	100	125.000.000	100	80.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN IBUN)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	204.105.300	100	304.105.300	100	204.105.300	100	204.105.300	100	204.105.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASEH)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	50.000.000	100	75.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOLOKAN JERUK)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN PASIRJAMBU)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	69.955.790	100	69.955.790	100	69.955.790	100	69.955.790	100	69.955.790	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CIWIDEY)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	65.530.300	100	136.733.000	100	37.439.000	100	37.439.000	100	37.439.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN RANCABALI)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	104.000.000	100	84.000.000	100	84.000.000	100	84.000.000	100	84.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN SOREANG)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	0	100	55.995.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN CANGKUANG)
	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	90.300.000	100	63.120.000	100	63.120.000	100	63.120.000	100	63.120.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (KECAMATAN KUTAWARINGIN)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				44.677.841.813		22.634.468.000		22.634.468.000		22.634.468.000		22.634.468.000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.322.668.650		10.912.057.000		10.912.057.000		10.912.057.000		10.912.057.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	82	82	10.322.668.650	82	10.912.057.000	82	10.912.057.000	82	10.912.057.000	82	10.912.057.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	94	94		94		94		94		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	60	60	1.250.000.000	60	1.250.000.000	60	1.250.000.000	60	1.250.000.000	60	1.250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				13.677.638.400		3.041.994.400		3.041.994.400		3.041.994.400		3.041.994.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	70	70	13.677.638.400	70	3.041.994.400	70	3.041.994.400	70	3.041.994.400	70	3.041.994.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				3.217.181.600		2.372.181.600		2.372.181.600		2.372.181.600		2.372.181.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	70	70	3.217.181.600	70	2.372.181.600	70	2.372.181.600	70	2.372.181.600	70	2.372.181.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	70	70	150.000.000	70	150.000.000	70	150.000.000	70	150.000.000	70	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				16.060.353.163		4.908.235.000		4.908.235.000		4.908.235.000		4.908.235.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	70	70	16.060.353.163	70	4.908.235.000	70	4.908.235.000	70	4.908.235.000	70	4.908.235.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintah

Dalam kapasitasnya sebagai daerah dengan kewenangan otonom, Kabupaten Bandung memiliki kewajiban untuk menetapkan target capaian berdasarkan indikator-indikator yang telah disepakati bersama antara pemerintah kabupaten dan para pemangku kepentingan. Target pencapaian ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang optimal. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah diukur menggunakan indikator kinerja daerah yang mencakup berbagai tingkatan, mulai dari tujuan dan sasaran (*impact*) hingga program yang menghasilkan dampak nyata (*outcome*).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keberhasilan ini tercermin dalam akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun, atau melalui indikator capaian mandiri yang diukur setiap tahunnya. Dengan demikian, kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai secara optimal. Indikator kinerja daerah disusun berdasarkan analisis hubungan antara satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) dengan tingkat pencapaian indikator kinerja daerah secara keseluruhan. Penetapan indikator kinerja mulai dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja program secara berjenjang sesuai kinerja yang akan dihasilkan/dicapai, diharapkan dapat memberikan gambaran terkait kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Dalam penyusunannya, indikator ini dikategorikan ke dalam 4 (empat) aspek utama yaitu geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Penyusunan IKU dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja yang berpedoman pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), guna memastikan bahwa setiap indikator mampu mencerminkan pencapaian pembangunan daerah secara objektif dan akuntabel. IKU merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi paling tinggi dan merupakan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Untuk tercapainya IKU didukung oleh kinerja *outcome* atau *intermediate outcome*, pada umumnya merupakan hasil lintas bidang

(*crosscutting*) beberapa urusan program. Selanjutnya, merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, IKU menjadi instrumen penting dalam integrasi antara perencanaan dan penganggaran, sekaligus sebagai alat *monitoring* dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, pencapaian target dalam RPJMD dapat diarahkan secara lebih terukur dan efektif untuk menjawab isu strategis daerah, mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,59	75,06	75,76	76,40	77,02	77,62	78,24
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,36	6,15-6,70	6,00-6,56	5,83-6,41	5,68-6,28	5,52-6,14	5,39-6,03
3	Gini Rasio	Poin	0,346	0,339-0,352	0,338-0,351	0,337-0,350	0,336-0,349	0,335-0,348	0,334-0,347
4	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Poin	0,9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Indeks Pengembangan* Wilayah	Poin	62,33	37,82	46,36	54,84	61,00	71,18	79,76
6	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2Eq/Miliar	N/A	2,50	2,77	3,06	3,42	3,85	4,17
7	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	80,50	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,50

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025
Keterangan: *Terdapat perubahan formulasi perhitungan

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2025-2029

4.2.2.1 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Penetapan IKD bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, serta program pembangunan yang telah dirancang. Keberhasilan ini terlihat dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahunnya atau melalui indikator capaian yang bersifat mandiri, sehingga target kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat terealisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI											
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	68,02	67,63-68,66	66,75-68,91	65,90-68,76	65,06-68,21	64,23-67,28	63,43-65,98	IUP RPJPD; Indikator Sasaran RPJMD	Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5,8	5,48-6,02	5,10-5,60	4,73-5,20	4,39-4,82	4,06-4,47	3,76-4,14	IUP RPJPD	Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	Skor PPH Konsumsi	Poin	85,10	85,62-85,77	86,13-86,37	86,66-86,98	87,18-87,58	87,71-88,20	88,24-88,81	Indikator Sasaran RPJMD	Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	N/A	21,26	25,2	29,13	33,07	37,01	40,95	IUP RPJPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Kapasitas Air Baku	m3/detik	3,1	9,57	10,66	11,76	12,87	14,01	15,15	IUP RPJPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Poin	59,62	63,73	63,98	64,23	64,48	64,74	64,98	**Indikator Makro;** IUP RPJPD; Indikator Sasaran RPJMD	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase akses aman terhadap sanitasi	%	1,63	23,02	28,4	33,77	39,15	44,52	49,9	IUP RPJPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Persentase akses sanitasi layak	%	92,03	93,75	94	94,66	95	95,66	96	IUP RPJPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	52,28	52,4	53,62	54,84	56,06	57,27	59,94	IUP RPJPD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	32,00	17,58	19,92	22,58	25,59	29,00	30,61	IUP RPJPD	Dinas Lingkungan Hidup
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	N/A	44,51	53,43	63,67	83,67	92,87	100	IUP RPJPD	Dinas Lingkungan Hidup
12	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton Co2eq	N/A	456.335,50	515.590,09	584.667,15	673.908,50	794.696,72	935.619,98	IUP RPJPD; Indikator Sasaran RPJMD	Dinas Lingkungan Hidup
13	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton Co2Eq/Miliar	N/A	2,50	2,77	3,06	3,42	3,85	4,17	**Indikator Makro;** Indikator Tujuan RPJMD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan
14	Indeks Risiko Bencana	poin	117,13	116	115	114	113	112	111	IUP RPJPD; Indikator Sasaran RPJMD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,74	0,75	IUP RPJPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
16	Tingkat Kerawanan Kebakaran	poin	N/A	3,3	3,1	2,9	2,8	2,6	2,4	Indikator Sasaran RPJMD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Indeks Pendidikan	poin	65,89	66,21	67,01	67,54	68,10	68,63	69,19	IUP RPJPD	Badan Pusat Statistik
2	Kemampuan Literasi Jenjang SD	nilai	63,63	64,34	65,05	65,37	65,7	66,02	66,35	IUP RPJPD	Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah; Dinas Pendidikan
3	Kemampuan Literasi Jenjang SMP	nilai	71,12	71,13	71,13	71,13	71,14	71,14	71,15	IUP RPJPD	Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah; Dinas Pendidikan
4	Kemampuan Numerasi Jenjang SD	nilai	56,77	57,98	59,18	59,42	59,65	59,89	60,13	IUP RPJPD	Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah; Dinas Pendidikan
5	Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	nilai	62,74	63,69	64,63	64,59	64,55	64,51	64,47	IUP RPJPD	Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah; Dinas Pendidikan
6	Indeks Kesehatan	poin	84,97	85,26	85,55	85,86	86,15	86,45	86,74	IUP RPJPD	Badan Pusat Statistik; Dinas Kesehatan
7	Jumlah Kasus Kematian Ibu per tahun	jumlah	44	42	40	38	37	35	33	IUP RPJPD	Dinas Kesehatan
8	Prevalensi Stunting pada Balita	%	24,1	21,72	19,67	17,92	16,40	15,10	13,96	IUP RPJPD	Kementerian Kesehatan; Dinas Kesehatan
9	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)	%	80,00	80,86	81,71	82,57	83,43	84,29	85,14	IUP RPJPD	Dinas Kesehatan
10	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)	%	87,00	87,52	88,05	88,57	89,10	89,62	90,14	IUP RPJPD	Dinas Kesehatan
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,52	99,54	99,57	99,59	99,61	99,63	99,66	IUP RPJPD	Dinas Kesehatan
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	4,90-5,25	5,33-6,20	5,41-7,04	5,45-7,50	5,61-7,96	5,68-6,27	**Indikator Makro**	Badan Pusat Statistik; Pemerintah Kabupaten
13	Tingkat Kemiskinan	%	6,19	5,95	5,70	5,48	5,28	5,09	4,89	**Indikator Makro;** IUP RPJPD; Indikator Sasaran RPJMD	Badan Pusat Statistik; Dinas Sosial
14	PDRB Per Kapita ADHK	Rp Juta	25,98	27,04-27,13	28,28-28,60	29,59-30,40	30,99-32,45	32,49-34,78	34,09-36,70	-	Pemerintah Kabupaten
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,36	6,15-6,70	6,00-6,56	5,83-6,41	5,68-6,28	5,52-6,14	5,39-6,03	**Indikator Makro;** IUP RPJPD; Indikator Tujuan RPJMD	Dinas Ketenagakerjaan
16	Gini Rasio	poin	0,346	0,339-0,352	0,338-0,351	0,337-0,350	0,336-0,349	0,335-0,348	0,334-0,347	**Indikator Makro;** Indikator Tujuan RPJMD	Pemerintah Kabupaten
17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	74,59	75,06	75,76	76,40	77,02	77,62	78,24	**Indikator Makro;** Indikator Tujuan RPJMD	Badan Pusat Statistik
18	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	75,23	75,42	75,61	75,81	76,00	76,19	76,38	IUP RPJPD	Badan Pusat Statistik; Dinas Kesehatan
19	Rata-rata lama Sekolah (RLS)	tahun	9,15	9,23	9,41	9,52	9,63	9,74	9,85	IUP RPJPD	Dinas Pendidikan
20	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,74	12,76	12,83	12,89	12,96	13,02	13,09	IUP RPJPD	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	60,65	60,66	60,67	60,68	60,69	60,70	60,71	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	27,46	31,15-59,64	35,34-61,13	40,09-62,66	45,48-64,23	51,59-65,83	58,52-67,48	IUP RPJPD	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Dinas Ketenagakerjaan
23	Jumlah potensi konflik kerukunan umat beragama	%	6	5	5	4	4	5***	4	IUP RPJPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	87	80	82	84	86	88	89	Indikator Sasaran RPJMD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25	Persentase Masyarakat yang Menerapkan Hasil Pembinaan Kebebasan Dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	%	64,00**	31,25	33,33	38,33	41,67	42,68	45,71	Indikator Sasaran RPJMD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26	Indeks Pembangunan Kebudayaan	poin	56,19	56,27-56,55	56,31-56,73	56,73-57,29	57,15-57,87	57,57-58,44	58,00-59,02	IUP RPJPD; Indikator Sasaran RPJMD	Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah (sebelum 2025), Kementerian Kebudayaan (2025-sekarang); Dinas Kebudayaan
27	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	indeks	N/A	62,31	62,34	62,36	62,38	62,40	62,42	-	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	94,23	94,38	94,53	94,61	94,69	94,77	94,85	IUP RPJPD	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
29	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	70,17	72,35	72,8	73,24	73,69	74,14	74,59	IUP RPJPD	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
30	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	59,93	60,93	61,93	62,88	63,83	64,78	65,73	IUP RPJPD; Indikator Sasaran RPJMD	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
31	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	57,45	58,77	60,12	61,50	62,92	64,36	65,84	Indikator Sasaran RPJMD	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,39	0,37	0,37	0,35	0,35	0,34	0,32	-	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
33	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Tahun per Jiwa	54,50	56,10-56,29	57,91-58,59	59,85-61,49	61,90-64,83	64,15-68,67	66,54-71,63	-	Survei Angkatan Kerja Nasional, Dinas Ketenagakerjaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
34	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	44,13	47,05-47,29	50,53-51,42	54,33-56,59	58,45-62,68	63,02-69,87	68,02-76,05	**Indikator Makro**	Badan Pusat Statistik, Pemerintah Kabupaten
35	Jumlah Kematian Balita	Jiwa	473	468	462	456	450	444	438	-	Dinas Kesehatan
36	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	N/A	40%	60%	70%	80%	90%	100%	-	Dinas Kesehatan
37	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	94,83%	94,85%	94,88%	94,90%	94,95%	95,00%	95,50%	-	Dinas Kesehatan
38	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	%	14,9	20	25	30	35	40	45	-	Dinas Kesehatan
39	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	-	Badan Amil Zakat Nasional Pusat
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB (Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	% PDRB ADHB	61,99	61,76-63,26	61,72-63,34	61,68-63,42	61,63-63,50	61,57-63,55	61,52-63,61	Indikator Sasaran RPJMD	Badan Pusat Statistik; Pemerintah Kabupaten
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	% PDRB ADHB	52,91	52,66-53,35	52,64-53,41	52,62-53,47	52,59-53,52	52,56-53,57	52,52-53,61	IUP RPJPD	Badan Pusat Statistik; Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	% PDRB ADHB	2,31	2,35-2,51	2,36-2,52	2,38-2,54	2,39-2,55	2,38-2,54	2,39-2,55	IUP RPJPD	Badan Pusat Statistik; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Rasio Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) Terhadap Total Pelaku Usaha	% Total Pelaku Usaha	2,21	2,22-2,25	2,25-2,28	2,27-2,32	2,28-2,35	2,30-2,38	2,30-2,41	-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pusat Statistik
5	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	% PDRB ADHB	6,77	6,75-7,40	6,72-7,41	6,69-7,42	6,66-7,43	6,63-7,44	6,61-7,45	IUP RPJPD	Badan Pusat Statistik, Dinas Pertaninan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
6	Rasio PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	% PDRB ADHB	13,46	12,70-13,47	12,69-13,48	12,68-13,49	12,67-13,50	12,67-13,51	12,66-13,52	IUP RPJPD	Badan Pusat Statistik, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,72	3,75-3,84	3,83-3,92	3,98-4,07	4,45-4,56	4,56-4,67	5,03-5,15	IUP RPJPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pusat Statistik, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8	Proporsi Jumlah Usaha Kuliner terhadap jumlah total pelaku UKM	%	57,22	54,18-58,91	52,60-59,35	51,22-59,80	50,04-60,26	49,05-60,72	48,22-61,18	IUP RPJPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	% PDRB ADHB	0,31	0,32-0,35	0,33-0,36	0,34-0,37	0,34-0,38	0,35-0,39	0,36-0,40	IUP RPJPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik
10	Rasio Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB	% PDRB ADHB	0,69	0,69-0,72	0,69-0,72	0,69-0,72	0,69-0,72	0,69-0,72	0,69-0,72	IUP RPJPD	Badan Pusat Statistik, Bagian Ekonomi, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah
11	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	7,716,767	7,747,849-8,416,524	8,096,502-8,771,733	8,440,604-9,124,751	8,778,228-9,474,613	8,558,772-9,546,018	8,858,329-9,877,012	IUP RPJPD	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,22	67,75-67,82	68,13-68,28	68,51-68,73	68,89-69,19	69,28-69,66	69,66-70,12	IUP RPJPD	Survei Angkatan Kerja Nasional, Dinas Ketenagakerjaan
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penyandang Disabilitas	%	35,91	36,03-39,11	36,28-39,38	36,53-39,65	36,78-39,92	37,03-40,19	37,28-40,47	IUP RPJPD	Survei Angkatan Kerja Nasional, Dinas Ketenagakerjaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
14	Indeks Inovasi Daerah	skor	65,89	62,42	63,98	65,54	67,1	68,66	70,22	IUP RPJPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
15	Indeks Ekonomi Hijau/*Green Economy Index*	skor	26,15	28,30	30,36	32,86	35,53	38,40	41,48	IUP RPJPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB ADHB	19,05	19,12-19,75	19,09-19,67	19,06-19,59	19,04-19,53	19,03-19,48	19,02-19,43	IUP RPJPD	Badan Pusat Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB ADHB	11,96	10,03-12,05	10,11-12,14	10,18-12,22	10,25-12,31	10,33-12,40	10,41-12,49	IUP RPJPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18	Indeks Kualitas Infrastruktur*	poin	64,94	37,95	40,73	43,72	46,47	49,59	53,13	IUP RPJPD; Indikator Sasaran RPJMD	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
19	Persentase Desa Mandiri*	%	49,63	57,78	59,26	61,48	62,59	64,81	66,40	IUP RPJPD; Indikator Sasaran RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,43	0,44-0,55	0,44-0,57	0,47-0,68	0,48-0,71	0,49-0,74	0,50-0,77	IUP RPJPD	Badan Pusat Statistik, Badan Pendapatan Daerah
21	Tingkat Inflasi (IHK)	%	1,46	2,47-2,65	2,69-3,12	2,73-3,54	2,75-3,77	2,83-4,00	2,86-3,16	IUP RPJPD	Badan Pusat Statistik, Pemerintahan Kabupaten
22	Indeks Pengembangan Wilayah*	poin	62,33	37,82	46,36	54,84	61,00	71,18	79,76	IUP RPJPD; Indikator Tujuan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
23	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Poin/Indeks	4,27	4,32	4,35	4,37	4,40	4,42	4,44	-	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan
24	*Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)	Poin	4,00	3,75-3,90	3,71-3,89	3,66-3,89	3,62-3,91	3,58-3,94	3,54-3,98	Indikator Sasaran RPJMD	Badan Pusat Statistik (diolah), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
IV. ASPEK PELAYANAN UMUM											
1	Indeks Reformasi Hukum	nilai	97,00	97,05	97,15	97,25	97,50	98,00	98,07	-	Sekretariat Daerah
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,98	1,83	1,83	1,92	1,96	2	2,04	IUP RPJPD	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
3	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	A- (87,37)	A- (87,87)	A- (88,37)	A- (88,87)	A- (89,37)	A- (89,87)	A-(90,37)	IUP RPJPD; Indikator Sasaran RPJMD	Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Daerah
4	SPIP Terintegrasi	level	3,00	3,19	3,23	3,27	3,31	3,35	3,39	IUP RPJPD	Inspektorat Daerah
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	-	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	poin	80,5	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,50	IUP RPJPD; Indikator Tujuan & Sasaran RPJMD	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,86	3,89	3,95	4,01	4,06	4,12	4,18	IUP RPJPD	
8	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks	0,9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Indikator Tujuan RPJMD	

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.	SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
9	Indeks Integritas Nasional	Poin	74,04	74,08	74,10	74,12	74,15	74,20	74,25	-	Inspektorat Daerah

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025
Keterangan:
* Terdapat perubahan formulasi perhitungan
**Lonjakan nilai dikarenakan tahun pemilu sehingga kegiatan meningkat
*** Tahun Pemilu

4.2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah, Dengan menetapkan IKK, pemerintah daerah dapat mengukur pencapaian sasaran strategis, memantau efektivitas program, serta mengevaluasi efisiensi pemanfaatan anggaran dan sumber daya, Setiap IKK dirancang sehingga mencerminkan *output* dan *outcome* yang spesifik serta selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, Melalui pengendalian dan evaluasi secara berkala, kepala daerah dan perangkat daerah memperoleh umpan balik objektif untuk memperbaiki kebijakan, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta mempertanggungjawabkan kinerja kepada legislatif dan publik, Dengan demikian, IKK tidak hanya menjadi tolok ukur capaian pemerintah, tetapi juga instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan, Adapun penetapan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut,

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	**Pendidikan**									
1.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,74	12,76	12,83	12,89	12,96	13,02	13,09	IUP RPJPD
1.2	Rata-rata lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,15	9,23	9,41	9,52	9,63	9,74	9,85	IUP RPJPD
2	**Kesehatan**									
2.1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,53	75,30	75,40	75,50	75,60	75,70	75,80	IUP RPJPD
2.2	Prevalensi Stunting pada Balita	%	24,1	21,72	19,67	17,92	16,40	15,10	13,96	IUP RPJPD; Indikator Sasaran RPJMD
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
3.1	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Poin	N/A	45,70	54,38	61,17	67,19	74,47	82,17	-
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**									
4.1	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	52,28	52,4	53,62	54,84	56,06	57,27	59,94	IUP RPJPD
5	**Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat**									
5.1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	80,50	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,50	IUP RPJPD
5.2	Indeks Risiko Bencana	Poin	117,13	116	115	113	111	109	107	IUP RPJPD
5.3	Persentase Jumlah Aset/Harta benda yang diselamatkan	%	73,27	74	75	80	85	90	95	-
5.4	Persentase Jumlah Korban Jiwa yang Diselamatkan	%	99,93	99	99,94	99,95	99,95	99,95	99,95	-
6	**Sosial**									
6.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri secara sosial ekonomi	%	56,82	62,02	67,53	73,04	78,55	84,06	89,57	-
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	**Tenaga Kerja**									
7.1	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja	%	3,11	3,29-3,85	4,08-4,18	4,18-4,95	4,20-5,44	4,21-5,93	4,31-5,96	-
8	**Pangan**									
8.1	Skor PPH Konsumsi	Poin	85,10	85,62-85,77	86,13-86,37	86,66-86,98	87,18-87,58	87,71-88,20	88,24-88,81	-
9	**Lingkungan Hidup**									
9.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,62	63,73	63,98	64,23	64,48	64,74	64,98	IUP RPJPD
9.2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton Co2eq	N/A	456.335,50	515.590,09	584.667,15	673.908,50	794.696,72	935.619,98	IUP RPJPD
10	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
10.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Poin	88,54	88,56	88,58	88,60	88,62	88,64	88,66	-
11	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
11.1	Persentase Desa Mandiri*	%	49,63	57,78	59,26	61,48	62,59	64,81	66,40	IUP RPJPD
12	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
12.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	94,23	94,38	94,53	94,61	94,69	94,77	94,85	IUP RPJPD
12.2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,39	0,37	0,37	0,35	0,35	0,34	0,32	-
12.3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	N/A	62,31	62,34	62,36	62,38	62,4	62,42	-
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
13.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	59,93	60,93	61,93	62,88	63,83	64,78	65,73	IUP RPJPD
14	**Perhubungan**									
14.1	Indeks Kualitas Infrastruktur Transportasi*	Poin	N/A	19,14	19,14	21,74	24,34	26,94	29,54	-
15	**Komunikasi dan Informatika**									
15.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintahan Digital	Poin	3,98	1,83	1,83	1,92	1,96	2	2,04	IUP RPJPD
15.2	Indeks Transformasi Layanan Publik berbasis Digital	Poin	N/A	75	77	78	79	80	81	-
16	**Statistik**									
16.1	Indeks Pengembangan Statistik (IPS)	Poin	2,84	2,84	3,02	3,04	3,20	3,23	3,30	-
17	**Persandian**									
17.1	Indeks Keamanan Informasi	Poin	451	454	455	460	465	470	475	-
18	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18.1	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,72	3,75-3,84	3,83-3,92	3,98-4,07	4,45-4,56	4,56-4,67	5,03-5,15	IUP RPJPD
18.2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	% PDRB ADHB	0,31	0,32-0,35	0,33-0,36	0,34-0,37	0,34-0,38	0,35-0,39	0,36-0,40	IUP RPJPD
19	**Penanaman Modal**									
19.1	Laju Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA*	%	10,72	1,43-7,36	2,05-7,84	2,95-8,34	4,23-8,88	6,09-9,46	10,07-12,59	-
20	**Kepemudaan dan Olahraga**									
20.1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	indeks	57,45	58,77	60,12	61,50	62,92	64,36	65,84	-
20.2	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	N/A	0,65	1,00	1,35	1,70	1,82	2,00	-
21	**Kebudayaan**									
21.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19	56,27-56,55	56,31-56,73	56,73-57,29	57,15-57,87	57,57-58,44	58,00-59,02	IUP RPJPD
22	**Perpustaakan**									
22.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	60,65	60,66	60,67	60,68	60,69	60,70	60,71	-
23	**Kearsipan**									
23.1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah	Indeks	77,05	77,06	77,07	77,08	77,09	77,10	77,11	-
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
24	**Kelautan dan Perikanan**									
24.1	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	Poin	N/A	100-101	100-102	100-103	100-104	100-105	100-106	-
24.2	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	Poin	N/A	100-101	100-102	100-103	100-104	100-105	100-106	-
25	**Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**									
25.1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	% PDRB ADHB	2,31	2,35-2,51	2,36-2,52	2,38-2,54	2,39-2,55	2,38-2,54	2,39-2,55	IUP RPJPD
26	**Pertanian**									
26.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	N/A	100-101	100-102	100-103	100-104	100-105	100-106	-
27	**Perdagangan**									
27.1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	% PDRB ADHB	13,46	12,70-13,47	12,69-13,48	12,68-13,49	12,67-13,50	12,67-13,51	12,66-13,52	-
28	**Perindustrian**									
28.1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	% PDRB ADHB	52,91	52,66-53,35	52,64-53,41	52,62-53,47	52,59-53,52	52,56-53,57	52,52-53,61	-
29	**Pertanahan**									
29.1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Poin	34,16	34,58	35,77	37,12	38,31	39,66	40,85	-
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30	**Sekretariat Daerah**									
30.1	Nilai Refomasi Birokrasi *General*	Poin	BB (76,86)	BB (77,55)	BB (78,24)	BB (78,93)	BB (79,62)	A- (80,31)	A- (81)	-
31	**Sekretariat DPRD**									
31.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	77,58	78,61	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	-
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
32	**Perencanaan**									
32.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	85,57	79	83,20	85,70	88	91	93,50	-
33	**Penelitian dan Pengembangan**									
33.1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	10	20	40	60	80	90	100	-
34	**Keuangan**									
34.1	Opini Laporan Keuangan BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
34.2	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	50,50	47,62-47,83	48,26-49,33	49,80-50,90	49,75-50,85	50,83-51,95	50,66-51,78	-
35	**Kepegawaian**									
35.1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	-
36	**Pendidikan dan Pelatihan**									
36.1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Poin	N/A	28,90	29,00	29,10	29,20	29,30	29,40	-
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
37	**Inspektorat Daerah**									
37.1	Nilai Maturitas SPIP	Poin	3,096	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	-
37.2	Indeks Manajemen Risiko	Poin	3,097	3,107	3,117	3,127	3,137	3,147	3,157	-
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
38	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
38.1	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	87	80	82	84	86	88	89	-
38.2	Persentase Masyarakat yang Menerapkan Hasil Pembinaan Kebebasan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	%	64,00**	31,25	33,33	38,33	41,67	42,68	45,71	-
	UNSUR KEWILAYAHAN									
39	**Kecamatan**									
39.1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0,18 - 0,43	0,19 - 0,45	0,22 - 0,52	0,24- 0,59	0,25 - 0,60	0,26 - 0,61	0,27 - 0,63	-

Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Keterangan:

* Terdapat perubahan formulasi perhitungan/indikator baru

**Lonjakan nilai dikarenakan tahun pemilu sehingga kegiatan meningkat

BAB 5
PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan. Setelah periode ini berakhir, RPJMD periode selanjutnya akan disusun sebagai pedoman pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi, penyusunan dokumen perencanaan tahun 2030 akan merujuk pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RKP Tahun 2030. Transisi ini juga berdampak pada awal penyusunan RPJMD periode selanjutnya, di mana target kinerja tahun 2030 masih akan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bandung serta para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Pelaksanaannya berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

1. Bupati Bandung berkewajiban mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 kepada Masyarakat melalui perangkat daerah.
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026 hingga 2030 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung harus berkontribusi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini.
4. Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung harus menjalankan program-program yang telah tercantum dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.
5. Setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ditetapkan, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada dokumen RPJMD ini.
6. Bapperida bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.
7. DPRD memiliki kewajiban untuk membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam penyusunan RAPBD serta membahas rancangan Peraturan Daerah terkait RAPBD agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang

menegaskan menegaskan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

8. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029 telah melalui konsultasi publik dan musrenbang guna memastikan program yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun bertujuan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Untuk mendukung efektivitas implementasinya, Bapperida berperan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
9. Perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang bersifat tidak fundamental, seperti revisi target kinerja, perubahan nomenklatur perangkat daerah, atau aspek lain yang tidak mengubah substansi perencanaan pembangunan, dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati.
10. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan keterkaitan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RTRW Kabupaten Bandung. Harmonisasi spasial dan substansial ini dilakukan untuk memastikan sinergi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Selain itu, terminologi, struktur data, serta indikator dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin konsistensi antarbab dan keabsahan hukum dokumen.
11. Pendekatan manajemen risiko diterapkan secara sistematis melalui identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Risiko strategis seperti pendanaan, regulasi, dan bencana alam telah diantisipasi melalui strategi adaptif agar pelaksanaan RPJMD tetap berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika.

5.3 Penutup

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 akan dijabarkan dalam RKPD Tahun 2026–2030, yang memuat kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan tahunan melalui Peraturan Kepala Daerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi Pemerintah dan DPRD dalam merumuskan program serta menampung aspirasi masyarakat. Keduanya bertanggung jawab menjaga konsistensi antara RPJMD dan RKPD agar perencanaan pembangunan tetap selaras, terarah, dan sesuai regulasi.

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun 2025